

TAHUN YANG TAK PERNAH BERAKHIR

MEMAHAMI PENGALAMAN KORBAN 65

ESAI-ESAI SEJARAH LISAN

ANDRÉ LIEM · AQUINO W. HAYUNTA · JOHN ROOSA
JOSEPHA SUKARTININGSIH · RAZIF
RINTO TRI HASWORO · YAYAN WILUDIHARTO

TAHUN YANG TAK PERNAH BERAKHIR

MEMAHAMI PENGALAMAN KORBAN 65
ESAI-ESAI SEJARAH LISAN

ANDRÉ LIEM · AQUINO W. HAYUNTA · JOHN ROOSA · JOSEPHA SUKARTININGSIH · RAZIF · RINTO TRI HASWORO · YAYAN WILUDIHARTO

MASASILAM

TAHUN YANG TAK PERNAH BERAKHIR

MEMAHAMI PENGALAMAN KORBAN 65

ESAI-ESAI SEJARAH LISAN

oleh

ANDRÉ LIEM · AQUINO W. HAYUNTA · JOHN ROOSA · JOSEPHA SUKARTININGSIH · RAZIF · RINTO TRI HASWORO · YAYAN WILUDIHARTO

Jakarta,
Januari 2004

Editor:
John Roosa, Ayu Ratih & Hilmar Farid

Penyunting Tata Bahasa:
M. Fauzi dan Th. J. Erlijna

Diterbitkan oleh:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
Institut Sejarah Sosial Indonesia
Tim Relawan untuk Kemanusiaan

Transcriber

k-Jank

Editor

F. Indah, k-Jank

2026 MasasilaM • CC BY-SA 4.0

Berdasarkan arsip dari: *Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)*

Gambar sampul karya Alit Ambara

MasasilaM mengandalkan partisipasi kawan-kawan pembaca untuk melaporkan kesalahan ketik, koreksi, dan segala bentuk perbaikan lainnya. Kontribusi dapat dikirimkan melalui info@masa-silam.com.

MasasilaM

masasilam.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian kami tidak akan mungkin terlaksana, terutama di tahap paling awal, tanpa dukungan penuh Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK). Terima kasih kepada Karlina Supelli, Sekretaris Umum TRuK (1999-2001), untuk keterbukaannya terhadap gagasan kami dan keterlibatannya dalam diskusi-diskusi persiapan penelitian. Selain tujuh penulis resilian, ada sejumlah orang yang mengikuti sebagian proses penelitian sebagai pewawancara, yaitu Astri, Cietwo, Eka, Cendra, Rini, Emile, dan Jarmoko. Untuk bantuan sebagai narasumber dan fasilitator dalam pelatihan bagi calon-calon pewawancara, terima kasih kepada Agung Putri, Hario Kecik, Oey Hay Djoen, Pramoedya Ananta Toer, Siauw Tiong Djien. Untuk penyediaan sarana pelatihan dan diskusi, terima kasih kepada Dewi Wilutomo dan Ibu Marie Soetarto (alm.) sekeluarga, juga kepada Pak Gembel Sedijono.

Ada banyak kawan yang dengan sukarela membantu kami dalam mencari informasi tentang, dan menghubungkan kami dengan para korban. Di Jakarta, kami berterima kasih kepada: Ibu Ade R. Sitompul, Amarzan Loebis, Hardoyo, Mbak Fadhila, Tante Jane, Joesoef Isak, Mariatun, Ibu Sundari, Pak Suwarto, dan

Ruth Indiah Rahayu. Di Jawa Barat: Pak Djadji (Tasikmalaya), Pak Endang dan Pak Saukat (Cipanas), Fauzan Machdami dan Rusyana Sulaiman (Bandung), Pak Surjaatmadja (Bogor). Di Yogyakarta: Pak Istiadi dan Pak Sukamoto. Di Jawa Timur: Arief W. Djati, Pak Puji, Pak Rusno, dan Pak Tumiso (Surabaya), Pak Hasnan, Pak Jauhari, Pak Slamet, dan Mas Yoyok (Banyuwangi), Ibu Bandhi (Blitar), SDInpers (Jember), Ibu Non dan Pak Oka (Malang). Di Bali: Agus, Degung Santikarma, Ibu Gedong Bagus Oka (alm.), Indra, dan anggota Ashram Gandhi di Denpasar, I Gusti Agung Gde Tjiptapura dan keluarga, Ni Made Ayu, Robert Nalenan, Pak Wayan Santa, Wayan "Bob" Tirja, dan Manikaya Kauci. Di Sulawesi Tengah: Pak Mahid Halim, Ewin, dan Hedar dari LBH Bantaya (Palu). Di Lampung: Dedi dan Pak Priyadi (Bandar Lampung). Dalam beberapa kali pertemuan di Amsterdam dan Jakarta, kami beroleh pengetahuan dan inspirasi dari Hersri Setiawan.

Kami juga ingin berterima kasih kepada sejumlah orang dan institusi di Amerika Serikat: Allan Nairn, Betty dan Jack Roosa, Prof. Joseph Nevins, Mary Kaplan, Solidago Foundation, Direktur Institute of International Studies di University of California-Berkeley, Prof. Michael Watts, serta seluruh staf Institut. Secara khusus, kami ingin berterima kasih kepada Mary Letterii, kawan setia dalam perjalanan menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Kepada kawan-kawan yang sudah bersusah payah mengerjakan transkripsi ratusan kaset, ‘membersihkan’ transkripsi dari kekurangan dan kesalahketikan, serta menerjemahkan wawancara dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia: Anton, Kosim, Marsih, Paijo, Ria, dan Taat, terima kasih banyak.

Di tahap akhir, kami mendapatkan bantuan tak terduga dari sejumlah kawan yang secara langsung pun tidak mengikuti perjalanan riset ini. Muhammad Fauzi dan Erljna dengan tekun dan teliti memeriksa kerapian ejaan dan tata bahasa seluruh teks. Kemudian, Asvi Warman Adam, yang kami minta membaca kata pengantar dan beberapa esai yang sudah selesai terlebih dahulu, memberi masukan penting dalam hal ketepatan informasi. Menjelang naik cetak, Hersri Setiawan menyisir seluruh teks dan memberi usulan perbaikan, terutama untuk penulisan kata-kata dalam bahasa Jawa.

Ungkapan terima kasih kami pada Dolorosa Sinaga dan Arjuna Hutagalung tidak akan pernah cukup. Mereka melakukan tempat bekerja dan beristirahat yang leluasa bagi kami di Jakarta dan Bandung, pastikan kami tidak kelaparan atau sakit, bahkan mengantar kami bertemu korban. Dan yang paling membesarkan hati, mereka senantiasa percaya bahwa kami sedang melakukan sesuatu yang berguna bagi gerakan kemanusiaan di negeri ini.

Dukungan dalam bentuk apa pun yang diberikan semua orang dan lembaga yang kami sebutkan di atas tidak

dengan sendirinya membuat mereka bertanggung jawab atas apa yang kami sampaikan dalam tulisan-tulisan di buku ini.

Jakarta, Desember 2003
Tim Penulis

PERIHAL KUTIPAN

Nama-nama orang yang ceritanya dikutip dalam esai-esai yang dimuat di buku ini, kecuali disebutkan lain, adalah nama samaran. Karena suasana intimidasi yang terus-menerus diderita para tapol, sangat sedikit korban yang merasa cukup aman untuk tampil dengan nama mereka sendiri. Akan tetapi, tempat dan waktu kejadian sesuai dengan cerita asli para korban.

Dalam semua esai, kutipan wawancara tercetak sebagai paragraf tersendiri dengan pinggir yang berbeda–tepi kiri menjorok ke dalam. Kutipan yang disalin mengikuti ucapan yang direkam. Kami sengaia tidak memperbaiki pola bicara yang tidak beraturan–betapa pun hal itu akan membuatnya mendekati bahasa tulisan yang enak dibaca–karena tujuan menulis sejarah lisan adalah membuat pembaca mendapat kesan mengenai suara orang yang berucap. Tentu sulit untuk menangkap seluruh tekstur suara dalam tulisan, tapi setidaknya kita dapat menangkap sebagian darinya. Agar cerita yang dikutip lebih mudah diikuti, di beberapa tempat kami menghapus pertanyaan dari pewawancara dan satu-dua kata atau frasa orang yang diwawancarai. Kami menggunakan tanda elipisis … (tiga titik) untuk menunjukkan adanya ucapan yang dihapus.

Dalam kutipan, kata-kata atau frasa yang tidak dalam bahasa Indonesia dicetak miring, dan diikuti oleh terjemahan dalam bahasa Indonesia yang ditempatkan dalam tanda kurung ( ). Penjelasan atas istilah atau singkatan yang tidak lazim dalam kutipan ditempatkan dalam tanda kurung siku [ ]. Semua kata yang ditempatkan dalam tanda kurung maupun tanda kurung siku adalah tambahan dari penyunting, bukan dari orang yang diwawancarai.

Rekaman wawancara dengan 260 orang ini beserta transkripsinya disimpan dalam arsip Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). Rekaman yang berasal dari kaset audio telah dipindah ke dalam data digital dan disimpan dalam bentuk cakram padat. Semua wawancara telah ditranksripsi. Baik rekaman maupun transkripsinya terbuka untuk umum. Nama samaran yang digunakan dalam buku ini sama dengan nama samaran yang digunakan dalam arsip ISSI.

DAFTAR SINGKATAN

AKABRI = Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Babinsa = Bintara Pembina Desa
Bakoksi = Badan Koordinasi Organisasi-Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia
Bamudes = Badan Musyawarah Desa
Banser = Barisan Ansor Serbaguna
Bapera = Balai Pendidikan Rakyat
Baperki = Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia
Brimob = Brigade Mobil
BTI = Barisan Tani Indonesia
Buterpra = Bintara Urusan Teritorial Pertahanan Rakyat
CC = Comite Central
CDB = Comite Daerah Besar

CGMI = Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia
CPM = Corps Polisi Militer
Danramil = Komandan Koramil
Dekon = Deklarasi Ekonomi
Detga = Detasemen Gerilya
DI/TII = Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ET = Eks Tapol
FDR = Front Demokrasi Rakyat
G-30-S = Gerakan Tiga Puluh September
Gerwani = Gerakan Wanita Indonesia
Gerwis = Gerakan Wanita Indonesia Sedar
GPII = Gerakan Pemuda Islam Indonesia
GPK = Gerakan Pengacau Keamanan
Golkar = Golongan Karya
GTM = Gerakan Tutup Mulut
Hanra = Pertahanan Rakyat
Hansip = Pertahanan Sipil

HSI = Himpunan Sarjana Indonesia
IKIP = Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
IKJ = Institut Kesenian Jakarta
Inrehab = Instalasi Rehabilitasi
IPB = Institut Pertanian Bogor
IPPI = Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
ITS = Institut Teknologi Sepuluh November
Kakancab = Kepala Kantor Cabang
KAMI = Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPPI = Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia
Kasdim = Kepala Staf Kodim
KB = Keluarga Berencana
KKN = Korupsi Kolusi dan Nepotisme
KKPR = Kursus Kader Perang Rakyat
KNIL = Koninklijk Nederlands Indisch Leger, Tentara Kerajaan Hindia Belanda
Kodam = Komando Daerah Militer
Kodim = Komando Distrik Militer

Kompro = Komite Proyek Basis
Kopkamtib = Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Koramil = Komando Rayon Militer
Korem = Komando Resort Militer
Lekra = Lembaga Kebudayaan Rakyat
LP = Lembaga Pemasyarakatan
Mako = Markas Komando
Mahmilub = Mahkamah Militer Luar Biasa
Masyumi = Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Nasakom = Nasionalis, Agama dan Komunis
NU = Nahdlatul Ulama
OPR = Organisasi Pertahanan Rakyat
OTB = Organisasi Tanpa Bentuk
PDI-P = Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
Pesindo = Pemuda Sosialis Indonesia
PGRI = Persatuan Guru Republik Indonesia
Non-vak Central = Non-vak Central

PGT = Pasukan Gerak Tjepat
PKI = Partai Komunis Indonesia
PKK = Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
PNI = Partai Nasional Indonesia
POM = Polisi Militer
PRD = Partai Rakyat Demokratik
PRRI/Permesta = Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta
PSII = Partai Serikat Islam Indonesia
RPKAD = Resimen Para Komando Angkatan Darat
RTM = Rumah Tahanan Militer
Ruba = Rumah Baru atau Rumah Bawah tanah
Sarbupri = Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SD = Sekolah Dasar
SI = Sarekat Islam
SGA = Sekolah Guru tingkat Atas
SGB = Sekolah Guru tingkat Bawah
SKP = Sekolah Kepandaian Putri

SMA = Sekolah Menengah tingkat Atas
SMEA = Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas
SMP = Sekolah Menengah tingkat Pertama
SOBSI = Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SPG = Sekolah Pendidikan Guru
SR = Sekolah Rakyat
STM = Sekolah Teknik Menengah
STPR = Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat
Tapol = Tahanan Politik
Tefaat = Tempat Pemanfaatan
Timperca = Tim Pemeriksa tingkat Kecamatan
TK = Taman Kanak-Kanak
Tonwal = Peleton Pengawal
TP = Tentara Pelajar
TRuK = Tim Relawan untuk Kemanusiaan
UUPA = Undang-Undang Pokok Agraria
Wankom = Wanita Komunis

PENGANTAR
SEJARAH LISAN DAN INGATAN SOSIAL

‘Sejarah lisan’ bukan istilah yang akrab di telinga banyak orang Indonesia. Mungkin istilah itu malah dianggap aneh karena pemahaman umum mengenai sejarah adalah studi tentang masa lalu berdasarkan dokumen tertulis. Ketika kami mengatakan bahwa kami sedang menulis sejarah berdasarkan wawancara lisan, reaksi orang pada umumnya penuh keraguan: ‘Bagaimana kalian bisa yakin bahwa orang yang diwawancarai itu memang berkata benar?’ Reaksi ini bisa dimengerti karena ingatan manusia, tentu saja, tidak pernah lengkap dan bahkan bisa salah; cerita orang mengenai pengalaman masa lalu selalu mungkin mengandung bermacam distorsi dan kesalahan.

Namun, reaksi itu sendiri mencerminkan persepsi yang terdistorsi mengenai penelitian dan penulisan sejarah. Jika kita mengatakan sedang membuat penelitian sejarah di Arsip Nasional atau gedung arsip di Belanda, mereka tentu tidak akan bertanya: ‘Bagaimana kalian bisa yakin bahwa dokumen-dokumen itu mengandung kebenaran?’ Kita sudah dibiasakan untuk mempercayai ketepatan dokumen resmi pemerintah dan surat kabar walaupun setiap sejarawan yang pernah melakukan penelitian agak

mendalam menyadari bahwa dokumen-dokumen itu kadang-kadang tidak dapat diandalkan. Banyak orang di zaman modern ini, bukan hanya di Indonesia, terlalu mementingkan arsip resmi pemerintah sebagai gudang kebenaran sejarah. Padahal, dokumen-dokumen yang tersimpan di sana tidak luput dari bias dan distorsi seperti halnya ingatan seseorang.

Mari kita lihat kasus empat surat permintaan maaf Sukarno yang diam-diam dikirimnya kepada Jaksa Agung di Belanda pada Agustus-September 1933. Dalam surat-surat itu, Sukarno berjanji akan menarik diri dari kegiatan politik dan menulis artikel di surat kabar untuk mengkritik gerakan nonkooperasi. Ia mengungkapkan, bersedia menerima apa pun persyaratan pemerintah asal dibebaskan dari penjara. Sejak ditemukan dalam sebuah arsip Belanda pada 1970an, muncul debat mengenai keaslian dokumen-dokumen itu.

Sejumlah sejarawan percaya surat-surat itu memang ditulis oleh Sukarno, dan karena itu melihatnya berubah: dari seorang nasionalis yang tampil gagah di pengadilan Belanda dengan Indonesia Menggugat menjadi seorang pengecut yang mengiba minta ampun. Seperti dikatakan seorang penulis biografinya, Lambert Giebels, ‘dari seorang ksatria yang berani dan gagah perkasa, menjadi seorang pendosa dan bertobat.[1] Tapi, sejarawan lain menganggap surat-surat itu dipalsukan oleh agen intelijen Belanda untuk mendiskreditkan Sukarno. Kedua belah pihak dalam perdebatan ini memiliki argumen yang cukup

meyakinkan.[2] Terlepas dari apakah surat-surat itu memang asli atau tidak, yang pasti semua dokumen harus dibaca secara kritis. Walau ada banyak orang yang memahami masalah ini, mereka tetap berpegang pada keyakinan: ketika menulis sejarah, dokumen tertulis harus didahulukan dibandingkan wawancara lisan.

Dalam menilai kebenaran yang terkandung dalam wawancara lisan, seseorang harus menggunakan prosedur yang sama seperti saat ia menilai kebenaran dokumen tertulis. Kita harus memeriksa ulang informasi yang diperoleh, menimbang bias yang ada pada sang pencerita atau penulis, memeriksa konsistensi internal dari suatu narasi, dan seterusnya. Pada akhirnya, kita harus menggunakan perangkat yang sangat mengambang dan tidak pasti, yakni ‘akal sehat’. Salah satu alasan mengapa prosedur penilaian sumber lisan dan tulisan itu sama adalah karena sumber tulisan sendiri sering didasarkan pada informasi yang dikumpulkan secara lisan. Dokumen dasar yang digunakan sejarawan–surat kabar, laporan intelijen atau polisi, dan sebagainya–ditulis oleh orang-orang yang melakukan wawancara lisan. Dalam hal ini, sumber lisan punya kelebihan dibandingkan dokumen tertulis: peneliti bisa kembali kepada orang yang diwawancarai berulang-ulang untuk meminta penjelasan dan gambaran lebih rinci mengenai sesuatu. Kita dapat terus mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

Dewasa ini, banyak sejarawan di pelbagai belahan dunia telah menerima sejarah lisan sebagai cabang yang

sah dalam disiplin sejarah. Ada banyak dosen yang menyebut dirinya sejarawan lisan, dan ada banyak buku yang diterbitkan dalam bidang ini setiap tahunnya. Sejarah lisan mulai populer dan digunakan secara luas sejak 1960an, terutama sebagai metode untuk mengungkap cerita-cerita dari komunitas yang dipingkirkan, ditindas, dan menjadi korban.[3] Gagasan dasarnya adalah penulisan sejarah harus lebih dari sekedar cerita tentang para presiden, raja-raja, menteri, pemerintah; sejarah juga harus bicara tentang orang biasa, pemikiran, sudet pandang, dan perasaan mereka. Untuk menulis 'sejarah dari bawah', kita tidak bisa mengharapkan arsip negara atau rekaman tertulis sebagai sumber infomasi. Kita harus langsung mendatangi komunitas tertentu, seperti buruh, petani, atau pengungsi, dan berbicara dengan mereka.[4]

Sejak 1960an, sejarawan juga mulai menyadari kegunaan sejarah lisan untuk menulis 'sejarah dari atas.' Ada berbagai arsip sejarah lisan yang menyimpan hasil wawancara dengan mantan pejabat tinggi pemerintah. Tujuannya untuk membeberkan sejarah politik tingkat tinggi, seperti kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah tertentu. Dengan mewawancara mantan pejabat, seseorang dapat melihat apa yang terjadi di balik layar dalam proses pengambilan keputusan dan juga dinamika perorangan di dalam lembaga-lembaga negara. Informasi dari wawancara lisan dapat membantu sejarawan memahami apa yang hanya secara samar

tampak dalam rekaman tertulis yang resmi. Para praktisinya sendiri menyebut kegiatan ini sebagai “sejarah lisan elit”.[5]

Dengan makin banyaknya orang yang mempraktekkan sejarah lisan, bidang itu pun makin berkembang. Pengetahuan mengenai teknik wawancara, misalnya, mulai diketahui secara luas. Banyak orang, bukan hanya sejarawan profesional, mulai melakukan penelitian sejarah lisan. Ada beberapa jurnal yang secara khusus memuat tulisan ilmiah tentang penelitian sejarah lisan sejak 1970an (seperti Oral History Review). Bermunculan pula literatur mengenai sejarah lisan di berbagai negara.[6]

Sejarawan asing yang meneliti Indonesia telah lama mempraktekkan sejarah lisan. Anton Lucas, sejarawan dari Australia, mungkin adalah orang yang paling banyak menyambangkan pengetahuan dan karyanya untuk memajukan sejarah lisan di Indonesia. Ia mewawancarai ratusan orang untuk bukunya, Peristiwa Tiga Daerah (1989), dan menulis sejumlah artikel mengenai cara melakukan penelitian sejarah lisan.[7] Buku-buku yang ditulis sejarawan Peter Carey dan Robert Cribb pun banyak bersandar pada wawancara lisan.[8] Namun, sejarawan Indonesia sendiri sepertinya tidak mempedulikan sejarah lisan. Hanya ada segelintir proyek sejarah lisan yang pernah dilaksanakan. Arsip Nasional, misalnya, pernah menjalankan beberapa wawancara lisan dalam kerangka sejarah lisan elit yang disebutkan di atas; institusi ini menyimpan koleksi wawancara dengan para

mantan pejabat tinggi Indonesia.[9] Menariknya, proyek sejarah lisan besar pertama yang dilakukan orang Indonesia secara independen justru berlangsung di luar negeri: Hersri Setiawan, seorang eks-tapol mewawancarai sekitar 50 orang eksil ‘generasi 1965’ di Eropa, Vietnam dan Tiongkok.[10]

Praktik sejarah lisan pada dasarnya menegaskan kebenaran yang tak dapat diragukan lagi: dalam kehidupan manusia, kebenaran tidak pernah mutlak. Mengenai subyek apa pun, ada pernyataan benar yang tak terhitung jumlahnya. Masalah paling sulit dalam sejarah bukanlah bagaimana menetapkan fakta-fakta–prosedur untuk melakukan hal ini sudah cukup jelas–tapi fakta mana yang harus kita bahas mengingat jumlahnya yang tak terhitung. Sejarah, karena itu, tidak terarah pada ‘Kebenaran’, tapi lebih pada ‘banyak kebenaran’. Mempelajari sejarah selalu mengandung pembatasan penglihatan. Seseorang harus memilih topik tertentu untuk diselidiki. Ia juga harus memilih metodologi, sudah pandang tertentu yang digunakan untuk mempelajari topik yang dipilih.

Mari ambil contoh berikut. Seorang sejarawan, dari sekian banyak kemungkinan topik yang ada dalam sejarah dunia, memilih mempelajari gerakan nasionalis Indonesia. Ada sekian banyak cara untuk mempelajarinya. Ia bisa memilih salah satu dari sekian ribu desa di negeri ini untuk mempelajari politik lokal; ia bisa mempelajari berbagai ideologi politik di kalangan pemimpin nasionalis,

atau faktor-faktor cultural yang membuat seseorang dianggap pemimpin, atau, dinamika gender dalam gerakan itu, dan seterusnya.

Sejumlah sejarawan memilih untuk menulis biografi Sukarno, karena ia adalah salah satu proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Indonesia. Tapi perlu kita ingat, seandainya Sukarno tidak menjadi presiden, ia mungkin tidak akan menjadi tokoh penting yang menarik perhatian para penulis biografinya. Sukarno mungkin hanya akan dianggap sebagai salah satu tokoh dari sekian banyak aktivis nasionalis: ia muncul sebagai tokoh akhir 1920an dan selama 1930an, tapi setelah itu mundur dari politik dan diasingkan selama sembilan tahun. Jika ia tidak menjadi seterkenal sekarang, kiranya tak akan ada orang yang peduli apakah empat suratnya yang ditemukan di arsip Belanda, memang asli atau tidak. Kebenaran dalam masalah ini, seperti banyak kebenaran lain dalam sejarah, menjadi tidak penting untuk ditetapkan.

Pemilihan topik dan metodologi dibuat berdasarkan apa yang oleh sejarawan dianggap relevan secara sosial, mengandung arti penting dan berguna. Bagi sejarawan, tidak ada langkah maju yang tunggal dalam ilmu sejarah. Buku yang ditulis tidak sekadar melengkapi perpustakaan raksasa yang suatu saat akan memuat sejarah yang benar dan lengkap mengenai dunia. Sejarawan merujuk pada apa yang menjadi masalah pada masa mereka hidup. Artinya, ada keharusan bagi mereka untuk terlibat dalam

masalah moral, kultural, dan politik, ketika memilih untuk menulis tentang masa lalu dan cara penulisannya.[11]

Dalam hal ini, sejarawan lisan mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali persepsi kita tentang apa yang relevan dan berguna secara sosial. Buku Anton Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, misalnya, menampilkan gerakan nasionalis Indonesia dengan cara yang sangat berbeda dari studi-studi yang menaruh perhatian pada tokoh-tokoh ternama, seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir. Ia memperlihatkan dinamika gerakan nasionalis di tingkat akar rumput pantai utara Jawa. Dengan begitu, sejarawan lisan telah menyatakan pendapatnya: jika mau menulis sejarah, tulislah dari perspektif orang yang menghidupinya, bukan dari seperangkat prinsip ahistoris atau penilaian apriori.

Sejarah lisan bukan hanya teknik untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari rekaman tertulis. Arti pentingnya jauh lebih luas dari itu. Seperti ditulis Paul Thompson, sejarah lisan telah mengubah seluruh watak penulisan sejarah: ‘dengan menampilkan bukti-bukti baru dari bawah, dengan memindahkan fokus [penyelidikan sejarah] dan membuka wilayah penyelidikan baru, dengan menantang sejumlah asumsi dan penilaian yang selama ini dipegang oleh sejarawan, dengan memperhatikan kelompok-kelompok orang yang selama ini diabaikan…ruang lingkup penulisan sejarah sendiri telah diperluas dan diperkaya; dan pada saat bersamaan pesan

sosialnya pun berubah. Sejarah, dengan kata lain, menjadi lebih demokratik.[12]

Sejarah lisan dalam hal ini bisa jadi alat berharga untuk meneliti kejahatan negara. Rekaman atau dokumen resmi pemerintah yang tersimpan dalam arsip tertulis sudah tentu tidak memuat banyak keterangan mengenai kejahatan yang dilakukannya. Sejarah lisan dengan begitu menjadi mutlak diperlukan oleh sejarawan yang ingin menulis tentang kejahatan yang ingin ditutupi atau disangkal oleh negara. Ada beberapa buku dan artikel yang ditulis mengenai genosida orang Armenia oleh pemerintah Turki pada 1910an, mengenai genosida orang Yahudi oleh pemerintah Nazi, dan mengenai ‘gulag archipelago‘ di bekas Uni Soviet, yakni rangkaian kamp kerja paksa bagi tahanan politik.[13]

Banyak kisah mengenai kejahatan perang Jepang di Asia selama Perang Dunia II berasal bukan dari rekaman resmi pemerintah Jepang, melainkan dari wawancara yang dilakukan dengan korban, saksi, maupun pelaku. Mereka yang meneliti pembantaan di Nanking 1937 sebagai contoh, umumnya bersandar pada wawancara dengan orang Tiongkok yang menjadi korban dan serdadu Jepang yang bertanggung jawab atas perbuatan itu.[14]

Sepanjang pengetahuan kami, buku sejarah lisan pertama yang ditulis orang Indonesia bercerita mengenai kejahatan perang Jepang, yaitu karya Pramoedya Ananta Toer, Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer[15], mengenai jugun ianfu semasa pendudukan militer Jepang,

antara 1943 sampai 1945. Saat ditahan di Pulau Buru sebagai tahanan politik sepanjang 1970an, Pramoedya bertemu dengan sejumlah perempuan Jawa yang tinggal di pulau itu. Begitu mendengar cerita mereka, ia tahu bahwa para perempuan itu dibawa dari Jawa saat masih remaja dengan janji-janji akan bersekolah di Jepang. Mereka tidak tahu akan dibawa ke pangkalan militer Jepang dan dipaksa menjadi budak seksual. Ketika perang usai, mereka terlalu malu untuk kembali kepada keluarga mereka di Jawa. Mereka memilih menetap di Buru dan menikah dengan orang dari suku setempat. Pramoedya dan sekelompok tapol kemudian mewawancarai perempuan-perempuan ini dan menulis kisah hidup mereka pada 1970an.

Dengan mewawancarai mantan jugun ianfu di Buru ini, Pramoedya menemukan pengalaman manusia yang tidak pernah tertuang dalam dokumen tertulis. Ia menyadari pentingnya menggunakan kesaksian lisan karena perwira militer Jepang, dengan berbagai alasan, tidak pernah membuat dokumen mengenai penculikan dan perbudakan kaum perempuan itu. Pramoedya menyesal karena tidak memiliki akses pada dokumen dari awal 1940an–berada dalam kamp tahanan di mana semua bahan tertulis kecuali buku-buku agama dinyatakan terlarang, ia masih beruntung mendapat hak istimewa untuk memiliki pensil dan kertas. Tapi, ia pun sudah menduga dengan tepat bahwa kejahatan pemerintah pendudukan Jepang ini tidak akan meninggalkan jejak-jejak tertulis: ‘Sejak awal, jejak

kelakuan mereka telah dihapus.’ Penguasa Jepang tidak pernah membuat pengumuman bahwa mereka memperbudak perempuan. Namun, di kalangan orang Jawa sendiri, semua itu pelan-pelan menjadi apa yang disebut Pramoedya sebagai ‘rahasia.

umum‘. Ia memahami bahwa wawancara lisan sangat diperlukan ketika meneliti kejahatan yang dilakukan oleh lembaga yang juga menguasai arsip tempat menyimpan dokumen tertulis.[16]

Pramoedya benar: dokumen Jepang mengenai jugun ianfu ini sangat sedikit. Seorang sejarawan Jepang, Yuki Tanaka, yang mempelajari arsip resmi pemerintahnya, mencatat bahwa dokumen-dokumen itu hanya memuat sedikit informasi mengenai perbudakan seksual. Dokumen-dokumen itu hanya bercerita tentang pembentukan ‘tempat hiburan’ di dekat pangkalan militer, tapi tidak menggambarkan cara-cara brutal yang digunakan untuk mendatangkan perempuan dan mengurung mereka di sana. Jika kita hanya bersandar pada dokumen-dokumen resmi, bisa saja kita berkesimpulan bahwa tidak pernah ada kejahatan yang terjadi di sana: semuanya tampak seperti prosedur administratif dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Dalam benak para perwira militer Jepang, ‘tempat hiburan’ itu, seperti dinyatakan dalam salah satu edaran Kementerian Perang pada 1940, dibuat untuk ‘memenangkan dan mengatur perasaan pasukan’ agar dapat mencegah kejahatan seperti ‘penjarahan,

perkosaan, pembakaran dan pembunuhan tahanan' (seperti yang terjadi di Nanking pada 1937). Kunjungan serdadu ke 'tempat hiburan' dapat 'meningkatkan moral, menjaga disiplin dan menghalangi terjadinya kejahatan dan penyebaran penyakit kelamin.'[17] Surat edaran lain mengecam 'agen perekrut yang tak pantas', yang menculik perempuan atau membujuk mereka dengan janji-janji palsu.[18]

Pemerintah Jepang masih menyimpan banyak dokumen rahasia militer dari zaman perang. Seperti dicatat Tanaka, 'sangat sulit melakukan penelitian menyeluruh mengenai masalah ini terutama karena pembatasan akses pada dokumentasi yang relevan.[19] Masalah sejarawan bukanlah bahwa dokumen resmi Jepang itu isinya bohong belaka, tapi karena ada banyak lubang di dalamnya. Kita tidak dapat memahami pengalaman para jugun ianfu melalui dokumen-dokumen tersebut. Untuk memahami pengalaman mereka, kita harus mendengarkan cerita mereka yang selamat. Tanaka menulis bukunya dengan mengandalkan kesaksian dari mantan jugun ianfu itu. Dalam bab tentang jugun ianfu di Hindia Belanda, ia mengandalkan, antara lain, buku Pramoedya (yang saat itu masih berbentuk naskah yang belum diterbitkan).[20]

Pramoedya tidak tahu bahwa ia sesungguhnya melakukan penelitian sejarah lisan di Buru dan memang tidak bermaksud menulis bukunya sebagai karya sejarah lisan. Ia menghadirkannya lebih sebagai kumpulan 'catatan' dan 'data' mengenai 'kejahatan terhadap

kemanusiaan.’ Alih-alih menggunakan nada datar yang biasa digunakan dalam buku-buku sejarah dan dikenalnya dengan baik, ia berbicara dalam nada yang lebih pribadi; ia menulis bukunya sebagai surat terbuka yang dialamatkan kepada kaum muda Indonesia. Kalimat pembukanya berkata: ‘Dengan hati berat aku tulis surat ini untuk kalian.’ Pramoedya ingin agar perempuan remaja yang diharapkan membaca bukunya bisa ikut membayangkan pengalaman perempuan seusia mereka pada awal 1940an: diculik dari Jawa untuk menjadi budak seksual. Terlepas dari penolakannya sendiri untuk menyebutnya sebagai tulisan sejarah, buku itu adalah uraian ‘data’ yang indah, yang tentunya bisa dianggap sebagai karya sejarah lisan.[21]

Sejarawan berhutang pada Pramoedya dan rekan-rekannya sesama tahanan politik karena sudah berusaha merekam cerita-cerita kaum perempuan yang terdampar di Pulau Buru tersebut. Mengingat para tapol saat itu tengah bertahan hidup sebagai tenaga kerja paksa, niat dan ketekunan mereka untuk melakukan suatu penelitian sangat menakjubkan. Bahwa salah satu buku sejarah terbaik di negeri ini, dan mungkin hanya satu-satunya buku mengenai jugun ianfu, ditulis oleh seorang tahanan politik di Pulau Buru, yang semua bukannya dilarang selama rezim Soeharto, sungguh memalukan bagi profesi sejarawan Indonesia.

Ingatan Sosial tentang Kekerasan 1965-66

Teror 1965-66 adalah ‘rahasia umum’ lain yang harus didekati melalui sejarah lisan. Hampir semua orang di Indonesia, bahkan mereka yang hidup di daerah paling terpencil sekalipun, tahu akan adanya penahanan dan pembunuhan massal. Mereka menyaksikan atau mendengar cerita tentang gerombolan orang yang berkeliaran di jalan-jalan, memburu ‘PKI’; tentara yang datang ke pabrik untuk menangkap ‘PKI’; tetangga, teman, atau saudara yang hilang secara misterius; jasad para korban yang tergeletak di jalan-jalan atau dibuang ke sungai; sekolah dan gedung pemerintah yang diubah, jadi kamp tahanan dan pusat penyiksaan. Boleh dibilang, hampir semua orang memiliki bukti bahwa perburuan terhadap ‘PKI’ pernah terjadi. Betapa pun teror itu sudah menjadi pengetahuan umum, sangat sedikit yang pernah ditulis mengenainya, bahkan dari perspektif para pelaku sendiri. Pembunuhan itu juga menjadi rahasia umum: setiap orang tahu, tapi tidak ada yang menulis atau membicarakannya di hadapan publik.[22]

Penulis ternama, Satyagraha Hoerip, dalam sebuah esai kritik sastranya pada 1972, mencatat bahwa pengetahuan tentang pembunuhan massal itu disebarkan dari mulut ke mulut. Cerita-cerita terus beredar, tapi tidak pernah ditulis: ‘Tapi yang aneh di sini ialah, bahwa dari yang pernah-seru kita dengan itu, tidak satu berita atau foto

pun pernah kita saksikan, baik itu dari koran-koran, majalah-majalah maupun wartawan-wartawan yang umumnya cekatan itu, di dalam maupun di luar negeri.' Dengan rangkaian kata yang jarang ditemui dalam tulisan di Indonesia, ia menggambarkan beberapa cerita yang disiarkan dari mulut ke mulut itu: 'Lalu seperti yang kita dengan, pembunuhan massal kemudian terjadilah di banyak tempat di Indonesia ini, selama beberapa pekan. Ada yang langsung dipancung, dihanyutkan ke kali baik utuh seluruh tubuhnya ataupun hanya bagian-bagian badannya saja, ada yang dengan mata disekap berbondong-bondong digiring ke laut atau jurang dan kemudian dari atas dihujani batu-batu; ada yang lebih dulu disuruh gali lubang dan kemudian dari jarak dekat ditembak masuk ke lubang itu sehingga tinggal menimbuninya saja; dan lain-lain dan banyak lagi.' Hoerip merasa ia harus melawan mereka yang berpikir bahwa pembantaian itu mungkin tak pernah terjadi karena, terlepas dari jumlahnya yang banyak, cerita-cerita itu tidak pernah diperiksa ulang dan sering dilebih-lebihkan sampai orang tidak lagi mempercayainya: 'Bukankah kita tidak sangsi lagi bahwa pembunuhan massal seperti itu sebenarnya pernah terjadi di negeri ini?'[23]

Tidak adanya dokumentasi tertulis, analisis sejarah, atau dialog publik di Indonesia mengenai teror 1965-66 membuat banyak orang merasa bahwa seluruh masa itu sangat misterius dan tidak dapat dijelaskan. Orang bahkan tidak yakin apa arti penting dari ingatan mereka sendiri.

Misalnya, seseorang yang pernah menyaksikan pembunuhan massal di desanya mungkin tidak tahu apa yang terjadi di desa sebelum atau kabupaten lain. Ia tidak tahu pasti apakah pembunuhan yang disaksikannya adalah bagian dari sebuah pola umum atau kebetulan saja. Cerita mengenai tempat-tempat lain, karena beredar dari mulut ke mulut, menjadi tidak dapat diandalkan. Orang tidak tahu apakah harus mempercayai cerita-cerita itu atau menganggapnya sebagai desas-desas saja. Tanggung jawab atas pembunuhan itu tetap kabur. Apakah semua itu dilakukan penduduk biasa yang mengamuk? Apakah Angkatan Darat? Apakah kelompok-kelompok milisi sipil seperti Banser dan Tameng? Ataukah kerja sama antara keduanya?

Tidak adanya pembahasan atau penelitian menyeluruh mengenai peristiwa 1965-66 berarti bahwa tak seorang pun tahu beberapa luas pembunuhan itu sesungguhnya. Tak ada orang yang tahu berapa jumlah orang yang di penjara dan/atau dibunuh. Orang pada umumnya memperkirakan yang tewas mencapai ratusan ribu.[24] Sejumlah besar orang Indonesia, mungkin mencapai satu setengah juta orang, dicap ‘PKI’ oleh pemerintah dan terpaksa mendekam di penjara.[25]

Selama 32 tahun kekuasaan rezim Soeharto, pembunuhan massal 1965-66 tidak pernah menjadi bagian dari ‘ingatan sosial’, yakni ingatan mengenai masa lalu yang disampaikan kepada orang lain, diperingati dengan upacara, ditulis dalam buku, didokumentasi dalam

museum, atau ditandai dengan mendirikan monument.[26] Pengalaman akan pembunuhan itu umumnya tersimpan dalam ingatan orang per orang atau dalam percakapan terbatas. Soeharto sendiri hampir tidak pernah bicara mengenai pembunuhan itu. Ia tidak menyinggung soal itu sedikit pun dalam otobiografia.[27] Para perwira Angkatan Darat bawahannya hampir tak pernah bicara soal itu. Hanya beberapa di antaranya, dalam kesempatan berbeda-beda, menyebut bahwa ada sejumlah orang terbunuh saat itu.[28] Buku-buku pelajaran sekolah tidak memuat keterangan apa pun[29], begitu pula dengan buku-buku sejarah yang diterbitkan pemerintah mengenai kejadian 1965-66. Jurnalis, cendekiawan, akademisi, termasuk sejarawan Indonesia tidak pernah melakukan penyelidikan dan menerbitkan laporan mengenai kejadian itu.[30]

Jika kita mengikuti versi rezim Soeharto mengenai sejarah, kebungkaman itu bisa ditafsirkan sebagai penyesalan atau rasa malu kolektif akan kejadian traumatik yang membuat masyarakat terbelah oleh kebencian yang mematikan. Saat menyinggung pembunuhan massal itu–yang jarang sekali ia lakukan–Soeharto menjelaskannya sebagai buah persaingan politik di antara kelompok-kelompok sipil. Dalam sebuah konferensi pers 1971, waktu memperingati lima tahun Supersemar, Soeharto mengatakan bahwa setelah G-30-S, ‘Ribuan korban jatuh di daerah-daerah karena rakyat bertindak sendiri-sendiri, juga karena prasangka-

prasangka buruk antar golongan yang selama bertahun-tahun ditanamkan oleh praktik-praktik politik yang sangat sempit.'[31] Soeharto mengangkat soal pembunuhan itu sebagai contoh bahayanya mobilisasi politik massa. Ia tidak hanya membersihkan tangan Angkatan Darat dari tanggung jawab atas pembunuhan itu, tapi malah menggunakannya untuk membenarkan dominasi Angkatan Darat dalam tubuh negara sejak 1965, dengan mengatakan bahwa orang sipil belum matang untuk menjalani sistem demokrasi.

Menurut narasi resmi dari rezim, tidak ada teror antiPKI yang perlu diingat: yang melancarkan teror hanyalah PKI, yakni terhadap Angkatan Darat dan partai-partai politik non-komunis pada Oktober 1965. Orang komunis sudah terbukti sebagai 'pemberontak' dan 'pengkhianat' dengan melancarkan kup. 'Pembasman' PKI adalah reaksi yang wajar terhadap Gerakan 30 September yang menculik dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat. Orang komunis harus disekap dan disingkirkan dari kehidupan politik. Angkatan Darat yang memimpin pembasman PKI, hanya membela diri dari agresor keji yang nyaris berhasil memaksa Indonesia menjadi negara komunis seperti Uni Soviet atau Tiongkok. Angkatan Darat berhasil menyelamatkan bangsa.[32]

Rezim Soeharto merayakan keberhasilan menghancurkan PKI, tapi menampilkan 'penghancuran' itu semacam pekerjaan rutin biasa: tentara dan polisi menangkap anggota PKI, menginterogasi dan

mengklasifikasi mereka sesuai tingkat keterlibatan dalam Gerakan 30 September dan PKI, lalu melepas sebagian dan menyekap yang lain di penjara.[33] Seluruh proses itu berlangsung tertib dan tidak berdarah, kecuali beberapa ledakan kemarahan massa antikomunis yang spontan dan tak dapat dikontrol di beberapa tempat. Pembunuhan itu dianggap semacam ‘ekses’ dari sebuah operasi pemerintah yang taat semua prosedur hukum.

Selama berkuasa, Soeharto membentuk ingatan sosial sedemikian rupa sehingga pembunuhan massal terlupakan, tapi ingatan akan Gerakan 30 September terus hidup. Orang Indonesia sekarang, jika ditanyai mengenai apa yang terjadi pada 1965-66, akan mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan tujuh perwira militer di Lubang Buaya adalah yang paling penting. Rezim Soeharto menanamkan peristiwa itu dalam benak masyarakat dan tetap diam mengenai pembunuhan ratusan ribu orang yang terjadi sesudahnya. Rezim ini juga menempatkan Gerakan 30 September sebagai titik tolak utama dalam penulisan sejarah versi pemerintah. Kemudian didirikanlah monumen di Lubang Buaya dengan tujuh patung perunggu besar dari tujuh perwira yang meninggal, yang diresmikan pada 1969. Monumen Kesaktian Pancasila ini menjadi semacam lambang penyucian tempat pengkhianatan terhebat terhadap Pancasila yang pernah terjadi, dan para perwira yang terbunuh ditahbiskan sebagai martir-martir agung.

Monumen itu adalah tempat rezim Orde Baru mengadakan ritual-ritualnya yang paling penting. Setiap lima tahun, sebelum memulai sidang pertama, anggota MPR berkumpul di monumen tersebut dan mengucapkan sumpah setia kepada Pancasila. Setiap tahun pada 1 Oktober, Soeharto dan pejabat teras lainnya mengadakan upacara di monumen tersebut. Tanggal itu kemudian diresmikan menjadi Hari Peringatan Pancasila Sakti. Di dekat monumen, pemerintah membangun sebuah museum besar bertingkat dua pada 1992, dengan pajangan 34 diorama yang menggambarkan adegan-adegan anggota PKI yang tengah melakukan penyiksaan dan pembunuhan.

Rezim Soeharto menggunakan setiap media yang tersedia untuk menyebarkan cerita tentang kekejaman PKI. Pada 1984, pemerintah membuat film tentang pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat yang berjudul Pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI. Film berdurasi empat setengah jam ini menjadi tontonan wajib bagi anak sekolah. Mereka ramai-ramai dibawa ke bioskop untuk menonton pertunjukan khusus, sementara televisi menyiarkan film yang sama pada setiap malam 1 Oktober.[34]

Usaha menyatukan ingatan sosial dengan monumen, museum, upacara, film dan buku-buku teks ini dibuat sedemikian rupa agar orang terus mengingat Gerakan 30 September, tapi melupakan apa yang terjadi sesudahnya. Pembunuhan terhadap tujuh orang perwira Angkatan Darat menggantikan pembunuhan dan penahanan massal

sebagai tragedi bangsa yang paling hebat. Seluruh perangkat rezim untuk mengenang masa lalu dikerahkan untuk menonjolkan peristiwa yang relatif kecil, sementara bencana mengerikan yang berakibat kematian massal berlalu begitu saja. Bagi publik, kesadaran dan simpati pada korban yang masih tersisa umumnya larut dalam penggambaran 'PKI' sebagai setan besar yang tidak manusia; negara ingin agar rakyat berpikir 'PKI' begitu jahatnya, dan karena itu memang pantas mendapatkan ganjaran dan penderitaan semacam itu. Orang tidak lagi berpikir tentang manusia; orang hanya berpikir tentang 'PKI' sebagai sebuah kategori abstrak.

Mungkin saja kutukan tiada henti terhadap 'PKI' selama tahun-tahun kekuasaan Soeharto sangat penting bagi kesehatan jiwa mereka yang terlibat dalam kekerasan massal itu. Kutukan itu sepertinya membantu meyakinkan kembali orang-orang ini bahwa tindakan yang mereka ambil memang benar dari segi moral. Dengan terus mengingat 'PKI' sebagai setan jahat, mereka tidak perlu menimbang-nimbang apakah perbuatan mereka sendiri dapat dibenarkan. Mungkin saja tidak adanya suara dari pelaku, baik sipil maupun militer, adalah pengakuan diam-diam bahwa pembunuhan itu memang tidak pantas dibanggakan. Jika mereka harus berbicara tentang pembunuhan itu, maka mereka harus berpikir keras, mencari cara mencocokkan kebiadaban itu dengan Pancasila yang, konon, mereka junjung dengan hormat, terutama sila kemanusiaan.

Menariknya, salah satu forum publik tempat pembunuhan dinyatakan secara eksplisit adalah penulisan fiksi. Banyak penulis antikomunis yang menjadi terkenal selama kekuasaan Soeharto menyebutkan pembantaan dan penahanan massal itu dalam cerita pendek maupun novel-novel mereka. Patut diperhatikan bahwa karya-karya ini mendukung sekaligus menyangkal narasi resmi negara tentang sejarah. Karya-karya ini memecah kesunyian, tapi dengan cara sedemikian rupa sehingga kesunyian itu bisa menjadi lebih bulat lagi. Tidak seperti propaganda negara, tulisan-tulisan mereka mengakui adanya pembunuhan massal, dan tentunya mengakui bahwa tentara terlibat langsung di dalamnya. Tapi, mereka mengangkat pembunuhan itu ke permukaan justru untuk membenarkannya. Mereka berusaha memberi kerangka begitu apik untuk suatu peristiwa kekejaman sehingga melakukan kejahatan dapat diterima akal sehat, bahkan dianggap terhormat.

Perhatikan, misalnya saja, cerita-cerita pendek mengenai pembunuhan itu yang diterbitkan di Horison, majalah sastra yang digerakkan oleh ‘Angkatan 66’. Semua redakturnya kemudian menjadi sokoguru bangunan kebudayaan Orde Baru: Mochtar Lubis, H. B. Jassin, Taufiq Ismail, Arief Budiman, dan Goenawan Mohamad. Mereka memproklamirkan diri sebagai penegak ‘humanisme universal’, bertentangan dengan ideologi-ideologi politik sempit yang menghalangi kebebasan artistik. Sebagai humanis, tentu saja mereka

mengungkapkan kegelisahan atas terjadinya pembunuhan itu. Hampir semua cerita pendek yang diterbitkan di Horison terarah pada seorang pencerita yang mendukung pembunuhan, tapi pada saat bersamaan, tidak suka pada kekerasan. Para penulis 'humanis universal' tidak menampilkan pembunuhan itu sebagai sesuatu yang tragis bagi korban, tetapi sesuatu yang tragis bagi para pembunuh karena harus mendamaikan pembunuhan itu dengan nilai-nilai kemanusiaan.[35]

'Perang dan Kemanusiaan' adalah salah satu contohnya. Cerita ini adalah 'catatan pengalaman pribadi.' Namun tidak begitu jelas, apakah karya itu adalah fiksi, nonfiksi, atau nonfiksi yang ditulis dengan bahasa yang sangat bergaya. Penulisnya bernama Usamah, seorang pemuda yang sukarela bekerja sebagai interrogator tentara. Dengan keyakinan penuh bahwa PKI akan mendirikan pemerintahan teror, ia ingin ambil bagian dalam upaya menghancurkan partai itu. Tapi, penahanan guru sekolahnya, dokter keluarga, dan seorang gadis teman sekelasnya mulai mengganggu pikirannya. Para korban bukan lagi kategori abstrak 'PKI', tapi sekumpulan orang yang dikenalnya dengan baik dan memanggilnya dengan sebutan 'dik Us.' Ia ingat menonton gadis itu menari dalam pertunjukan wayang orang. Kala melihat serdadu-serdadu menyiksa dokter keluarga mereka, ia mengaku, 'Menyaksikan kejadian itu saya mendadak kepingin muntah.' Usamah dengan cepat meyakinkan pembaca bahwa ia pada dasarnya mendukung penyiksaan

itu, tapi tidak tahan ketika menyaksikannya sendiri. Ia merasa sakit ‘bukan karena kasihan atau mungkin disangka tidak setuju, bukan. Soalnya saya pribadi tidak terbiasa menyaksikan bentuk-bentuk penyiksaan.’ Ia menganggap desakan nalurinya bukan sebagai tanda bahwa ‘penghancuran’ PKI itu salah, tapi karena ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ia mengutuk dirinya karena tidak tahan melihat penyiksaan itu dan berharap bisa lebih keras hati: ‘Kalau seluruh petugas di sana seperti saya, mungkin keadaannya akan berbalik.’ Ia menghormati dan bahkan agak iri pada para penyiksa dan pembunuh: ‘tanpa orang seperti Komandan Team saya dulu, tanpa anggota-anggota tentara yang tegas-tegas seperti mereka-mereka yang aktif memberikan ‘pelajaran’ pada manusia-manusia komunis di Solo seperti apa yang diberikan pada Sri [penari], Bu Guru Y maupun dokter X, barangkali sampai hari ini penumpasan G-30-S belum selesai.’ Narator itu membenarkan narasi resmi negara–PKI memang harus ‘dihancurkan’ karena mereka menyerang lebih dulu. Tentara tidak menyerang orang sipil yang tak berdaya; tentara saat itu sedang berperang. Tidak ada tragedi di sisi korban, dan tidak ada pula bencana kemanusiaan di sana.

Para redaktur Horison, dalam pengantar untuk cerita Usamah ini, menggambarkan sosok penulis humanis sebagai orang yang ‘selalu harus melatih diri untuk menggunakan perasaannya yang halus, untuk selalu melihat manusia di sekelilingnya sebagai sesuatu

kenyataan yang unik, untuk selalu mencoba menghayati dan memahami persoalan-persoalan manusia-manusia yang bukan dirinya.' Gejolak perasaan Usamah saat melihat kekerasan dianggap semacam bukti rasa kemanusiaan. Pada saat bersamaan, para redaktur melihat kekerasan antiPKI itu sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Dengan cara inilah kemanusiaan tetap dijunjung, dan pembantaian massal menjadi semacam segelengesahan oleh penulis yang mengaku berperasaan halus.

Apakah memang ada 'perang' pada 1965-66? Banyak pelaku yang jika ditanyai sekarang ini akan membela tindakan mereka dengan mengatakan bahwa saat itu pilihannya hanya 'membunuh atau dibunuh', seolah-olah semua orang yang berafiliasi dengan PKI sudah siap membunuh, lawan politik mereka. Itulah versi mereka tentang masa itu. Tapi, jelas ada alasan untuk meragukan keterangan mereka. Perhatikan saja cerita Usamah yang menggambarkan saat itu sebagai perang: penari, guru, dan dokter disiksa dan dibunuh, sesudah mereka ditahan. Dan mereka dibunuh karena alasan yang tidak masuk akal: kedua perempuan dibunuh karena serdadu-serdadu yang memeriksa merasa marah terhadap Sukarno karena menyatakan Gerwani tidak terlibat dalam pembunuhan di Lubang Buaya. Tentunya ini perang yang aneh karena kebanyakan korban adalah tahanan. Jika kita mengikuti logika Usamah dan percaya bahwa saat itu memang terjadi perang, maka seluruh tindakan yang

digambarkannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Penyiksaan dan pembunuhan terhadap tawanan perang, menurut Konvensi Jenewa, adalah kejahatan perang. Fakta dasar ini tampaknya luput dari perhatian para redaktur Horison yang ‘humanis’ itu.

Jika kita mengikuti versi rezim Soeharto mengenai peristiwa itu, sangat sulit sebenarnya menganggap masa itu sebagai masa perang. Tentara tidak terlibat dalam pertempuran berarti dengan gerakan bersenjata waktu ‘menghancurkan’ PKI pada 1965-66, dan tidak melaporkan korban atau kerugian di pihak mereka. PKI saat itu tidak melawan ketika ‘dihancurkan.’ Seandainya melawan, tentu mereka tidak begitu mudah dan cepat ‘dihancurkan.’ Satu-satunya perang dengan PKI terjadi di Blitar Selatan pada 1968, dan bahkan saat itu pun gerilyawan PKI tidak memberi perlawanan berarti. Soe Hok Gie, ketika menulis tentang pembunuhan di Bali, menggambarkan peristiwa itu lebih sebagai pembantaian seperti yang terjadi di Uni Soviet semasa Stalin ketimbang peperangan: ‘Dalam peperangan, bagaimanapun tidak seimbangnya kedua kekuatan yang sedang berhadap-hadapan, di antara mereka pastilah ada usaha yang bagaimanapun kecilnya untuk menghabisi lawannya atau paling sedikit membela diri. Penyembelihan atau pembantaian mungkin merupakan perkataan yang paling cocok.’[36]

Cerita pendek, ‘When People Become Numbers,’ oleh seorang pengarang Bali, Putu Arya Tirtawirya, menggambarkan pembunuhan itu sebagai proses

‘mencoret nama-nama dari daftar seorang pejabat.’[37] Penceritanya adalah seorang pemuda desa non-PKI yang sedang berjaga malam dengan teman-temannya. Sekitar 15 pemuda dari desa lain suatu malam datang membawa pentungan, tombak, pedang, dan parang. Mereka bermaksud membunuh ‘PKI’. Mereka membawa daftar nama-nama: ‘kami datang mau memenuhi target malam ini. Tiga orang dari desa ini.’ Mereka lalu mendatangi rumah orang-orang yang tertera dalam daftar, menyeret keluar, lalu membunuh mereka. Pembunuhan yang diceritakan Tirtawirya dilakukan sekelompok orang, dan bukan kematian karena perang. Seandainya memang terjadi perang, tentu kita akan mendengar kisah-kisah pertempuran yang heroik dalam dunia sastra, dan bukan kisah-kisah kekerasan sepihak yang diatur biokrasi seperti dalam catatan pribadi Usamah dan cerita pendek Tirtawirya.[38]

Ada alasan kuat bahwa pembunuhan yang diurus melalui administrasi ini terjadi di mana-mana, dan bukan hanya pengecualian. Sekalipun secara umum tidak banyak suara mengenai pembunuhan itu, ada beberapa kesaksian nonfiksi yang telah diterbitkan. Salah satunya ditulis oleh Pipit Rochiat, seorang Indonesia yang tinggal di Jerman, pada 1984. Tentu saja tulisannya tidak pernah diterbitkan ulang di Indonesia saat Soeharto masih berkuasa. Ia menggambarkan ingatannya mengenai rangkaian kejadian di Kediri, Jawa Timur, tempatnya bersekolah saat itu. Ia mengingat bahwa dua minggu pertama setelah G-30-S

sebenarnya agak tenang. Para pendukung PKI dituduh terlibat dalam pemberontakan, tapi mereka tidak terlihat akan menyerang siapa pun. Serangan terhadap mereka pun baru dimulai pada paruh kedua Oktober, di tengah ketenangan semacam itu. Beberapa pendukung PKI dibunuh dalam serangan milisi ke desa-desa, sementara lainnya dibunuh saat mereka telah berada dalam tahanan militer.

Daerah Kediri tampaknya tak aman bagi orang-orang Komunis (anehnya, kecuali satu kasus mereka tak bergerak mengadakan perlawanan). Lalu kebanyakan dari mereka berusaha lari ke Surabaya atau mencari perlindungan di Kodim di kota Kediri. Tapi, di penjara pun tidak aman, sebab terlalu banyak yang ingin mencari perlindungan dan penjara tidak sanggup menampungnya. Akhirnya, tentara sering mengangkut mereka dengan truk ke Gunung Klotok (jalan menuju ke sana harus melalui SMA Negri I) entah apa yang diperbuat oleh tentara terhadap mereka, tapi yang jelas pergi penuh muatan dan pulang kosong. Selain daripada itu, Kodim juga tak keberatan bila ada orang-orang Nasionalis atau Agama datang ke sana untuk meminta orang-orang komunis yang dibutuhkan. Kodim bersedia menyerahkan tawanan komunis, asal mereka-mereka yang membutuhkan membawa kendaraan (bukan sepeda motor tentunya).[39]

Kenangan Pipit Rochiat akan adanya eksekusi terhadap para tapol diperkuat oleh cerita dari seorang anggota NU dari Kediri. Buku dari Ansor Jawa Timur, Banser Berjihad

Menumpas PKI (1996), mengutip salah seorang pemimpin Banser di Kepung, dekat Kediri, yang menggambarkan pembunuhan di daerahnya. Menurut ingatannya, sekitar 6.000 ‘orang PKI’ dari kecamatan dikumpulkan dan ditahan di sebuah perkebunan. Setelah ditahan, mereka dibawa keluar berkelompok untuk dieksekusi: ‘Setiap malam, setelah menerima surat perintah dari Kodim, Banser yang bertugas menggiring PKI ke Sumbertigo di hutan Krenceng. Sekali menggiring sekitar 30 sampai 40 orang. Di dalam hutan Krenceng itulah mereka disembelih satu demi satu dan kemudian dikubur di dalam lubang kuburan massal.’[40] Kutipan ini merupakan salah satu dari sedikit bagian buku yang menggambarkan pembantaan dengan cukup terperinci. Selebihnya, buku Ansor ini mengikuti penjelasan versi resmi Orde Baru: penggambaran tentang ‘penghancuran’ PKI secara abstrak dan tanpa detil mengenai cara pembunuhan itu dilakukan. Tujuan utama Ansor menerbitkan buku ini adalah untuk menjelaskan bahwa peran mereka di dalam penghancuran PKI ‘tidak terlepas dari komando ABRI.’

Dengan gaya serupa, seorang pemimpin Ansor lain dari Lombok, Fathurrahman Zakaria, pada 1997, menerbitkan buku tentang ‘penghancuran’ PKI di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan bahwa banyak orang yang dicurigai sebagai anggota PKI dikumpulkan pada akhir Oktober dan November 1965. Penjara-penjara penuh dengan tahanan ini sehingga militer mulai menggunakan bangunan dan gedung lain sebagai tempat tahanan

darurat. Militer kemudian mengurus interogasi dan klasifikasi para tahanan. Zakaria sendiri menjadi seorang interrogator di bekas pabrik, es yang dipakai untuk menahan sekitar 600 orang: ‘Pekerjaan itu kami tekuni dari bulan April sampai Agustus 1966. Mereka yang masuk golongan C dibebaskan sementara, dan golongan inilah yang terbanyak. Mereka wajib lapor seminggu sekali. Tetapi mulai akhir Agustus 1966, setiap kali penulis datang ke rumah tahanan itu, nampak penghuninya makin berkurang saja. Baru beberapa hari kemudian penulis mengetahui bahwa ada kebijakan baru yang dilancarkan, yaitu ibarat pedagang ritel, diadakan ‘aksi mencuci gudang dan mengobral isinya keluar.’ Zakaria menjelaskan, sampai awal 1967, hampir setiap malam, ada sekitar 10-15 tahanan yang dibawa keluar dan dipaksa menggali lubang kuburnya sendiri. Ia menggunakan istilah ‘cuci gudang’ untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya merupakan pembunuhan di luar hukum terhadap para tahanan yang tidak pernah dikenakan, tuhan apa pun.[41] Sekalipun menggunakan eufemisme seperti itu, Zakaria adalah satu dari sedikit pelaku yang menulis tentang proses eksekusi tahanan.

Sementara versi resmi Orde Baru tetap bungkam soal pembunuhan itu, cerita yang terserak dalam karya fiksi maupun narasi perorangan memberitahukan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah pembunuhan di luar hukum terhadap para tahanan. Pembunuhan massal dilakukan setelah para korban ditangkap. Diperlukan lebih banyak

riset mengenai pembunuhan itu untuk memahami mengapa bentuk kekejaman seperti itu yang muncul dan siapa yang bertanggung jawab. Dari informasi yang tersedia sejauh ini, kita dapat mengatakan bahwa tentara Soeharto yang paling bertanggung jawab karena mengobarkan histeria terhadap PKI dan menghimpun milisi sipil untuk melakukan pembunuhan massal. Sudah terang, penjelasan rezim Soeharto bahwa pembunuhan itu terjadi karena ‘rakyat mengamuk’, sama sekali tidak benar.

Demi ketepatan sejarah, kita harus mendengar lebih banyak orang lagi, khususnya para korban. Salah satu alasan mengapa kita tidak banyak mendengar cerita mereka adalah karena sensor negara. Di bawah rezim Soeharto, para korban dicap ‘PKI’ dan secara hukum dilarang menulis dan berbicara di hadapan publik. MPR yang sudah dikuasai militer pada 1966 membuat ketetapan membubarkan PKI dan melarang penyebaran Marxisme-Leninisme (TAP MPRS XXV/1966). Berdasarkan ketetapan ini, siapa pun yang dianggap ‘komunis’ oleh negara tidak berhak bicara karena apa pun yang dikatakannya tentu, dengan satu atau lain cara, mengandung pesan-pesan ‘komunis’.

Pemerintah juga melakukan segala cara untuk mengisolasi keluarga kaum ‘komunis’ ini. Aturan ‘bersih lingkungan’ mulai diterapkan pada pertengahan 1970an untuk memastikan bahwa semua pegawai pemerintah tidak tercemar oleh PKI. Pemerintah merasa berwenang

menolak lamaran kerja atau memecat seseorang hanya karena yang bersangkutan adalah saudara, suami atau isteri, atau anak dari seorang tapol atau ekstapol. Dengan wacana higiene sosial, pemerintah menginterogasi pegawai negeri–dalam proses yang disebut screening mental-ideologi–lalu membagi mereka dalam klasifikasi 'bersih' dan 'tidak bersih'. Kategorisasi ini berlaku bagi semua penduduk. Seseorang yang ingin membuat paspor, misalnya, harus memberikan tiga surat (dari kantor polisi setempat, ketua RT, dan lrahah), yang menyatakan bahwa ia berasal dari 'lingkungan yang bersih', artinya tidak memiliki hubungan saudara dengan salah seorang 'komunis'.[42] Bahkan Soeharto sendiri, sebagai orang yang paling tidak memerlukan surat keterangan 'bersih diri' semacam itu, juga memilikinya.

Para eks-tapol mendapat tanda khusus pada KTP mereka dan karena itu menjadi korban hukum yang sangat diskriminatif. Setelah melepas sebagian besar tapol di akhir 1970an, pemerintah menetapkan aturan yang melarang mereka bekerja di bidang yang dapat mempengaruhi opini publik. (Mereka juga dilarang bekerja di sektor publik.) Aturan ini dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri pada 1981, dan menyebutkan larangan itu berlaku untuk bidang jurnalistik, pendidikan, hukum, dan jenis pekerjaan lain yang dianggap 'strategis' oleh pemerintah.[43] Dalam penjelasan resmi disebutkan bahwa pemerintah khawatir para eks-tapol akan menggunakan posisi-posisi tersebut untuk menyebarkan

komunisme. Tapi, mungkin yang lebih tepat adalah pemerintah khawatir mereka akan berbicara mengenai kejahatan yang dilakukan militer pada 1965-66.

Ingatan sosial akan peristiwa 1965-66 dibentuk oleh propaganda negara dan pembungkaman para korban. Ingatan ini menyerupai dongeng semasa kanak-kanak: monster besar dan mengerikan bernama PKI mengancam keselamatan orang yang sederhana dan baik hati, akhirnya dikalahkan oleh pasukan ksatria mulia dan patriotik di bawah pimpinan Soeharto yang pemberani. Dongeng semacam ini mungkin masih diyakini anak-anak sekolah yang terus dibawa berkunjung ke Lubang Buaya dan mendapat indoktrinasi melalui pelajaran sejarah di sekolah, tapi lain halnya bagi orang dewasa yang cukup rasional. Sejak lama ada keraguan mengenai versi sejarah rezim Soeharto. Saat ini, sudah ada informasi yang diterbitkan para pelaku kekerasan antiPKI, yang memperlihatkan bahwa militer di bawah pimpinan Soeharto melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketimbang terus berpegang pada versi resmi tersebut demi ‘persatuan dan kesatuan,’ kita perlu secara jujur melihat keragaman ingatan orang mengenai masa itu. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan suara korban dibungkam. Kita tidak bisa lagi berharap bahwa orang akan menaati kisah rekayasa perwira intelijen militer sebagai sejarah nasional yang benar dan suci.

Metodologi

Penelitian sejarah lisan ini merupakan sebuah kerja bersama yang dimulai pada awal 2000 oleh sepuluh anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK). Sebelumnya, kami semua berdiskusi mengenai penelitian ini bersama Sekretaris Umum TRuK saat itu, Karlina Supelli, untuk menemukan cara paling mudah dan tepat untuk menjalankan kegiatan ini. John Roosa menjadi penasehat sekaligus coordinator dari kelompok relawan yang terlibat dalam penelitian ini. Sampai saat itu, TRuK lebih banyak menaruh perhatian pada para korban kasus-kasus yang baru terjadi, antara lain korban Kerusuhan Mei 1998 dan Tragedi Semanggi I dan II. Para relawan menemani korban dan mengumpulkan kesaksian mereka untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa-peristiwa tragis itu terjadi. Walau tak seorang pun dari mereka punya pengalaman dengan sejarah lisan, kami melihat mereka memiliki kemampuan tertentu untuk menjadi pewawancara yang baik. Mereka memiliki kesabaran mendengar orang lain, ketahanan mendengar kisah orang yang menderita, dan keprihatinan yang tulus terhadap para korban. Dalam pengalaman kami, para pengajar universitas dan mahasiswa justru tidak pernah bisa membuat wawancara yang baik. Mereka berpikir mereka tahu segala sesuatunya, atau merasa yakin bahwa apa pun yang perlu mereka ketahui berasal dari buku-buku.

Keangkuhan inilah yang menghalangi mereka untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan mendengarkan cerita dari orang biasa. Hal terpenting dalam wawacara lisan adalah pemahaman yang baik mengenai hubungan antarmanusia.

Semua orang yang terlibat dalam pekerjaan ini, termasuk koordinator, bekerja secara sukarela. Kami tidak mulai bekerja karena ada dana, tapi karena kami yakin bahwa penelitian ini memang penting untuk dilakukan. Penelitian kami, karena itu, mewakili pikiran generasi pasca-1965 yang ingin memahami sejarah masyarakat mereka sendiri, dan meninggalkan penyederhanaan dan kepalsuan propaganda negara. Baru belakangan, setelah bekerja selama lebih kurang setahun, bantuan mulai berdatangan dari beberapa lembaga dan teman yang memiliki kepedulian yang sama.

Selama dua bulan, kami mengadakan pelatihan sejarah lisan bagi sepuluh orang relawan. Kami bertemu sekurangnya sekali seminggu, membaca sejumlah artikel dan buku pilihan, menyusun agenda penelitian, membahas teknik wawancara, dan menentukan jenis-jenis pertanyaan yang harus diajukan. Pelatihan ini sangat penting untuk memperkenalkan para peneliti awal kepada literatur sejarah tentang 1965, terutama tulisan-tulisan yang diterbitkan di luar negeri dan dilarang, atau sulit diperoleh, di Indonesia. (Beberapa di antaranya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.) Kecuali seorang sejarawan yang juga terlibat dalam kelompok

peneliti muda ini, semua relawan sebelumnya hanya tahu sejarah menurut versi rezim Soeharto. Mereka semua lahir setelah 1965 dan dibesarkan dalam sekolah-sekolah Orde Baru. Mereka menyaksikan jatuhnya kediktatoran Soeharto dan sadar sepenuhnya mengenai watak korup, sinis, dan brutal dari pemerintahan itu. Tapi, mereka tidak tahu apa-apa tentang teror yang membawa Soeharto ke puncak kekuasaan. Tak seorang pun dari mereka tahu dan peduli akan korban peristiwa itu. Beberapa relawan yang terang-terangan menentang rezim Soeharto, pada saat bersamaan, meresapi propaganda rezim mengenai kejadian 1965-66; mereka menerima begitu saja cerita bahwa Soeharto berkuasa dengan cara-cara konstitusional, dan bahwa orang komunis adalah atheis yang berbahaya, kejam, dan oleh karenanya harus dihancurkan 'sampai ke akar-akarnya.' Mereka sudah sering mendengar penjelasan bahwa cerita tentang pembunuhan dan penahanan massal itu hanya desas-desus belaka.

Pelatihan itu juga penting untuk memperkenalkan para relawan pada berbagai teknik sejarah lisan. Beberapa relawan awalnya menduga bahwa wawancara lisan itu semat-mata memasang mikrofon di hadapan seseorang dan memintanya bercerita, seolah-olah orang yang melakukan wawancara tidak perlu berperan aktif mengembangkan diskusi. Wawancara berlangsung dua arah atau sebuah interaksi antar-orang, bukan sebuah monolog dari orang yang diawancarai atau yang

mewawancarai. Kita harus telaten mendengarkan, sekaligus terus mengajukan pertanyaan dan meminta keterangan. Kita tidak bisa hanya duduk diam atau, sebaliknya, mendominasi percakapan. Kita harus mengajukan pertanyaan yang tepat kepada orang yang diawancarai. Terlibat dalam dialog seperti ini memang merupakan seni tersendiri yang memerlukan kepekaan tertentu.[44]

Kami kemudian bersama-sama memutuskan akan mewawancarai eks-tapol dan keluarga mereka. Maksudnya, kami mengumpulkan cerita-cerita untuk menulis sebuah biografi kolektif dari orang-orang yang memiliki pengalaman serupa dalam perjalanan hidupnya (masa pra-1965, penangkapan, interogasi, penahanan, pembebasan, dan kehidupan di luar penjara). Kami memutuskan untuk tidak mewawancarai pelaku dan orang yang tidak menjadi korban karena mereka selama ini tidak punya hambatan berarti jika mau bicara; sebagian di antaranya sudah sering menyampaikan versi mereka tentang sejarah, dan bahkan mendominasi pembicaraan selama ini.[45] Adalah para korban yang selama ini tidak mendapat kesempatan bicara, dan pengalaman mereka pula yang ingin kami pahami. Kami berpikir bahwa mewawancarai korban adalah langkah awal yang penting untuk memahami secara menyeluruh sejarah bangsa ini setelah masa kemerdekaan. Tentunya upaya ini perlu dilanjutkan dengan menggali informasi dari orang lain,

seperti saksi dan pelaku yang selama ini belum bersuara di hadapan publik.

Setelah pelatihan selesai, kami semua menyusun rencana melakukan wawancara. Pada pertengahan 2000, kami mulai mewawancarai orang-orang yang sudah kami kenal sebelumnya–teman, saudara, dan tetangga–yang berdiam di wilayah Jakarta, baru kemudian menyebar untuk mewawancarai orang-orang yang direkomendasikan oleh kelompok pertama. Setelah dua bulan melakukan wawancara, kami mulai berpergian ke luar Jakarta. Kami melakukan pertemuan mingguan untuk berbagi informasi tentang apa yang kami temui dan sekaligus menilai kemajuan kerja. Kami menghadapi beragam masalah baru setiap minggunya–mulai dari masalah teknis mengenai cara memasang mikrofon sampai masalah emosional ketika mendengarkan cerita-cerita yang mengerikan. Pertemuan reguler bermanfaat untuk bersama-sama membahas cara menghadapi masalah seperti ini.

Sebelum merekam percakapan, kami biasanya terlebih dulu menemui orang yang hendak diwawancarai untuk berkenalan. Pertemuan awal ini penting untuk menjelaskan siapa kami, apa tujuan kami, dan apa yang akan kami lakukan dengan hasil wawancara itu. Pertemuan itu juga penting untuk menentukan cara melakukan wawancara dengan mereka: pertanyaan apa yang harus diberi prioritas dan topik apa yang akan dibahas. Setelah wawancara, baru kami memutuskan apakah harus mengulang atau memperdalam wawancara

tersebut. Jika kami merasa bahwa kisah hidup orang itu atau topik tertentu masih perlu diperdalam, maka kami akan kembali melakukan wawancara lagi. Di akhir penelitian, Mei 2001, kami berhasil mewawancarai 260 orang.

Tidak semua orang yang kami hubungi bersedia wawancaranya direkam. Alasan mereka umumnya sama: takut. Sekalipun rezim Soeharto sudah jatuh, mereka tahu bahwa militer masih berkuasa, dan bahwa politisi 'reformasi' sebenarnya adalah orang-orang konservatif yang melayani Soeharto selama bertahun-tahun. Tapi, hanya sejumlah kecil orang yang sama sekali tidak mau berbicara pada kami. Mereka umumnya adalah orang-orang yang sangat tertekan oleh kekerasan yang dialami dan masih takut pada militer, sehingga memilih untuk tidak bicara, terutama demi keselamatan keluarga mereka.

Ketika para peneliti muda ini pertama kali bertemu dan berbicara dengan para korban teror, mereka merasa marah karena selama ini mengacuhkan sejarah masyarakat mereka sendiri, bahkan sejarah keluarga mereka sendiri. Beberapa peneliti akhirnya mengungkap 'rahasia keluarga' dalam proses penelitian ini. Salah seorang dari mereka yang kembali ke kampungnya di Jawa Timur, bertanya pada neneknya mengenai apa yang terjadi pada 1965. Sang Nenek untuk pertama kali bercerita bahwa kakeknya adalah pimpinan BTI setempat yang hilang di akhir 1965. Keluarganya sampai saat ini

tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Selama bertahun-tahun sang nenek diam seribu bahasa, hanya berharap suaminya masih hidup dan suatu saat akan pulang. Peneliti lain tahu pamannya seorang tapol, tapi tidak pernah sekali pun ia mendengar cerita tentang kehidupannya. Baru dalam wawancara yang dilakukan rekan sesama peneliti ia berkesempatan mendengar apa yang selama ini dialami oleh pamannya sendiri. Seorang peneliti lain akhirnya tahu bahwa banyak saudaranya di Jawa Tengah dibunuh pada 1965-66. Keluarganya sendiri tidak pernah bercerita apa pun mengenai mereka.

Kami cukup beruntung melakukan wawancara ini saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden. Pada periode itulah kekuatan rezim lama berada di titik paling rendah, dan eks-tapol menikmati napas kebebasan pertama setelah 1965. Gus Dur mengambil beberapa langkah yang tak terduga: ia meminta maaf kepada para korban atas keterlibatan organisasi Islam yang dipimpinnya (NU) dalam pembantaian 1965-66, mengusulkan agar larangan terhadap paham Marxisme-Leninisme dicabut, dan dua kali mengunjungi rumah Pramoedya Ananta Toer. Untuk pertama kalinya, para korban 1965 merasa beban yang menghimpit mereka agak melonggar, apalagi nemesis mereka, militer, tengah kerepotan; Gus Dur ikut menentukan nasib pimpinan tertinggi mereka (ia memecat Jenderal Wiranto, seorang loyalis Soeharto); Kongres AS memutuskan memberikan embargo militer karena Operasi Bumi Hangus di Timor

Leste pada September 1999; dan, puluhan ribu mahasiswa melancarkan demonstrasi antimiliter di jalan-jalan kota Jakarta. Tentu tidak sebegitu mudah para korban bicara. Mereka masih berhati-hati. Karena sekalipun Gus Dur memegang kekuasaan tertinggi, para kroni Soeharto dan perwira militer garis keras selalu bisa memukul balik. Tapi setidaknya, mereka lebih terbuka ketimbang masa sebelumnya.

Trauma yang diderita para korban ini mungkin membuat sebagian orang berpikir bahwa cerita-cerita mereka tidak berguna untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di masa lalu. Tentu saja kita perlu menyadari bahwa trauma yang mereka idap selama ini mempersulit mereka mengingat kejadian di masa lalu secara tepat. Namun, sungguh keji jika kita mengkritik ingatan yang tidak lengkap atau tepat, sementara mereka telah dipaksa menghidupi pengalaman yang melumpuhkan ingatan, seperti siksaan dan kelaparan. Dalam beberapa hal, kebenaran mereka mengenai masa lalu justru terletak pada ketidakmampuan mereka untuk mengungkapkannya. Tapi, orang tidak bisa berkesimpulan bahwa cerita mereka tidak punya nilai apa pun bagi sejarah. Trauma memang berpengaruh besar, tapi tampaknya tidak sampai menguasai mereka begitu rupa hingga hilang kemampuan untuk mengingat apa pun secara tepat.[46]

Kami memperhatikan nilai kebenaran dari cerita-cerita yang kami dengar dan rekam. Kami menilai ketepatan cerita seseorang dari konsistensi internal, pembandingan

dengan cerita orang lain, kesan yang kami peroleh saat melakukan wawancara, dan pendapat orang lain yang kenal dengan orang yang diwawancarai. Kami memilih untuk mewawancarai banyak korban di berbagai tempat di negeri ini agar punya landasan luas untuk membuat perbandingan. Kami ingin menggambarkan pola-pola yang lazim, misalnya mengenai cara orang ditangkap, disiksa, di penjara, dan kemudian dilepaskan. Kami sering mewawancarai orang di ruang tamu mereka, duduk dengan anggota keluarga dan teman lain yang dapat memperkuat atau menambahkan ceritanya. Kami melakukan wawancara dengan orang-orang yang pernah hidup di kota atau penjara yang sama, sehingga bisa mendapatkan versi yang berbeda mengenai sebuah kejadian dan bermacam reaksi terhadap pengalaman yang sama. Dalam wawancara, kami memusatkan perhatian pada hal-hal yang dialami langsung ketimbang cerita yang mereka dengan dari orang lain.

Ada pula sejumlah orang yang akhirnya tidak kami wawancarai. Ada seorang eks-tapol yang berulangkali ditemui salah satu pewawancara, tapi sangat ragu-ragu dalam mengungkapkan pengalamannya, seolah ada banyak hal yang ingin disembunyikannya. Kita semua, saat bercerita tentang kehidupan kita, tentu tidak mau menceritakan hal-hal yang memalukan, misalnya. Tapi, eks-tapol ini terlalu berhati-hati dengan setiap ucapannya. Apalagi, apa yang diceritakannya sering tidak sesuai dengan apa yang dikatakan orang lain mengenainya.

Seorang eks-tapol lain punya masalah unik: ia mengaku pernah bertemu Jimmy Carter di Pulau Buru. Padahal jelas, presiden Amerika Serikat ini tidak pernah berkunjung ke pulau itu. Orang ini sebenarnya sangat menarik dan cukup rasional, tapi seperti yang diakui teman-temannya, ia kadang begitu larut dalam fantasinya sendiri. Ada juga seorang eks-tapol lain yang begitu sulit mengungkapkan pikiran dan pengalamannya secara lisan. Saat bicara dengannya dalam pertemuan pertama, si pewawancara menyadari bahwa orang ini begitu menderita sehingga menjadi tidak berdaya dan tidak utuh lagi sebagai manusia.

Pembaca buku ini perlu menyadari bahwa 260 orang yang kami wawancarai adalah orang-orang yang masih ‘beruntung’: mereka adalah korban yang selamat dari pembunuhan massal, tetap bertahan waras, dan punya rasa kemanusiaan setelah belasan tahun mendekam di penjara, atau setelah puluhan tahun mengalami diskriminasi sosial dan politik sebagai anggota keluarga tapol. Mereka tetap bisa bicara mengenai pengalaman mereka yang sering kali begitu pahit dan memilukan, dan dengan berani menyepakati untuk direkam wawancaranya.

Penulisan

Tulisan-tulisan dalam buku ini dibuat oleh tujuh peneliti yang melakukan wawancara dengan korban. Topik yang mereka pilih mencakup sejumlah tema penting yang muncul dari hasil wawancara. Saat memulai penelitian, tidak terbersit rencana bahwa keenam topik inilah yang akan ditulis. Tentu saja ini bukan kumpulan tulisan yang 'lengkap' mengenai sejarah para korban. Masih banyak topik lain yang pantas dan perlu ditulis. Tapi, keenam tulisan ini adalah topik yang menarik bagi para peneliti. Topik lain yang sayangnya tidak dapat dimasukkan dalam kumpulan ini adalah tentang bantuan bagi para tapol yang diterima dari orang-orang di luar penjara. Di samping menerima kunjungan keluarga, para tapol juga sering didatangi para relawan, yang karena rasa kemanusian, membawakan makanan dan kebutuhan lain bagi para tapol. Karena kami adalah bagian dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan, kami menganggap cerita mereka adalah cerita kami juga. Kami berharap suatu saat dapat menuliskan kekayaan pengalaman pendahulu kami.

Pembaca akan melihat bahwa ada dua jenis tulisan dalam kumpulan ini. Tiga tulisan menganalisis sebuah kejadian atau proses sejarah, sementara tiga lainnya berbicara tentang perasaan pribadi dan perspektif para korban. Jenis tulisan pertama menekuni saat tertentu dalam sejarah hidup para korban, sementara satunya berbicara mengenai sejarah hidup para korban secara

menyeluruh. Jenis pertama disusun berdasarkan logika analisis historis; pembaca tidak mendapat keterangan banyak tentang orang yang diwawancarai. Jenis kedua disusun berdasarkan urutan waktu pengalaman korban sendiri; dan pembaca akan bersentuhan dengan relung kehidupan mereka. Tulisan dari Rinto T. Hasworo, Razif, dan Andre Liem dapat dikatakan sebagai analisis peristiwa sejarah. Sementara, tulisan Josepha Sukartiningsih, Aquino W. Hayunta dan John Roosa, serta Yayan Wiludiharto, adalah tulisan mengenai ingatan personal.

Dalam menyusun tulisan, setiap penulis menggunakan sejumlah besar kaset wawancara. Tidak ada ruang cukup untuk mengutip semua wawancara yang digunakan dalam penelitian. Dalam tulisan Rinto, misalnya, hanya ada 12 wawancara yang dikutip dari sekitar 80 wawancara yang dilakukannya di Jawa Tengah. Semua wawancara ini berguna dalam menyusun argumen yang dikemukakan dalam tulisan mereka, tapi hanya sebagian saja yang kemudian dipilih untuk dikutip.

Dalam wawancara kami, kebanyakan korban ingin menantang ingatan sosial yang menganggap mereka sebagai setan dan pengkhianat. Mereka ingin mengungkapkan cerita yang memperlihatkan bahwa mereka adalah orang baik, bermartabat, dan patriotik, yang kemudian dikorbankan. Mereka tetap merupakan bagian dari kelompok nasionalis generasi Sukarno yang sejatinya ingin diterima oleh negeri yang telah menghukum dan menyingkirkan mereka. Keinginan untuk

tampil sebagai orang baik turut membentuk cara mereka menceritakan pengalaman hidupnya. Buku ini tidak bermaksud menampilkan mereka sebagai malaikat, karena mereka pun tidak ingin terlihat seperti itu. Dalam buku ini, kami ingin menampilkan mereka sebagai manusia, yang tidak lebih baik atau jelek dari manusia lain, yang tidak pantas diperlakukan seperti apa yang mereka alami. Prinsip kami pun sederhana saja: tak seorang pun, terlepas dari latar belakang dan masa lalunya, boleh diculik, disiksa, diperkosa, dipaksa kerja tanpa upah, ditembak mati, dan dikubur dalam kuburan massal yang tersembunyi, atau ditahan tanpa batas waktu atas alasan apa pun.

John Roosa
Ayu Ratih
Hilmar Farid

Jakarta, 10 Desember 2003

---

[1] Lambert Giebels, *Soekarno: Biografi 1901-1950* (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 181

[2] Lihat perdebatan tentang hal ini dalam W.H. Frederick and Soeri Soeroto, eds., *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi* (Jakarta: LP3ES, 1984), h. 429-458.

[3] Ada beberapa proyek sejarah lisan sebelum 1960an, tapi sebagai kegiatan yang lepas-lepas. Minat terhadap sejarah lisan secara luas hampir tidak ada sampai 1960an. Sepanjang pengetahuan kami, salah satu proyek pertama dikerjakan oleh peneliti yang dikerahkan pemerintahan F.D. Roosevelt semasa

depresi. *Federal Writers Project* pada 1936-38, mewawancarai orang kulit hitam yang pernah menjadi budak di masa lalu. Lihat George Rawick, ed., *The American Slave: A Composite Autobiography* (Westport: Greenwood, 1972-79), 41 jilid. Kegiatan sejarah lisan lain yang mengesankan dibuat oleh seorang psikolog Amerika Serikat bernama David Boder. Pada akhir Perang Dunia II, ia pergi ke Eropa untuk mewawancarai orang Yahudi yang selamat dari kamp-kamp konsentrasi Nazi. Bukunya, yang diterbitkan pada 1949 mungkin adalah karya sejarah lisan pertama tentang para korban. Buku ini tidak banyak mendapat perhatian saat itu, dan baru mulai dinilai penting pada 1970an, ketika ada banyak orang yang mewawancarai para korban Holocaust. David Boder, *I Did not Interview the Dead* (Urbana: University of Illinois Press, 1949).

[4] Studs Terkel, seorang pengasuh talk-show, adalah salah satu sejarawan lisan yang paling terkenal dan produktif di Amerika Serikat. Karya-karyanya, antara lain *Hard Times: An Oral History of the Great Depression* (New York: Pantheon, 1970) dan *'The Good War': An Oral History of World War Two* (New York: Ballantine, 1984).

[5] L.A. Dexter, ed., *Elite and Specialized Interviewing* (Evanston: Northwestern University Press, 1970); A. Seldon dan J. Pappworth, *By Word of Mouth:'Elite' Oral History* (London: Methuen, 1983); E.M. McMahan, *Elite Oral History Discourse: A Study of Cooperation and Coherence* (Tuscaloosa: University of Alabama, 1989).

[6] Lihat Robert Perks dan Alistair Thomson, eds., *The Oral History Reader* (London: Routledge, 1998); Alessandro Portelli, *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Forms and Meaning in Oral History* (Albany: State University of New York Press, 1991). Buku pengantar klasik dalam bidang ini adalah Paul Thompson, *The Voice of the Past: Oral History* (Oxford: Oxford University Press, 1978).

[7] Anton Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi* (Jakarta: Grafiti, 1989). Mengenai sejarah lisan, lihat artikelnya, 'My Story' and Other Sources: An Oral Approach to the Indonesian Revolution,' *Masyarakat Indonesia* 1: 2 (December 1974); 'Masalah Wawancara dengan Informan Pelaku di Jawa,' dalam Koentjaraningrat dan Donald Emmerson, eds., *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1982). Lucas telah menerbitkan dua wawancara dengan perempuan korban kekerasan 1965-66, 'I am a Leaf in the Storm,' *Indonesia* no. 47 (April 1989); 'Survival: Bu Yeti's Story,' dalam Robert Cribb, *The Indonesian Killings of 1965-66: Studies from*

Java and Bali (Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990).

[8] Peter Carey, *Born in Fire: The Indonesian Struggle for Independence* (Athens: Ohio University Press, 1988); Robert Cribb, *Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1991).

[9] Tujuan penelitian Arsip Nasional yang dimulai pada 1972 ini adalah untuk mengisi kekurangan arsip periode 1942-1950 dengan tema sekitar Pendudukan Jepang dan Revolusi. Arsip Nasional juga menerbitkan sebuah buletin tentang riset ini: *Berita Sejarah Lisan* no. 1 sampai 13. Selain itu, perlu diperhatikan pada 1989-1990 ada satu tim riset dari Universitas Gajah Mada yang dipimpin sejarawan Kuntowijoyo yang menulis laporan "Perubahan Sosial di Pedesaan: Sejarah Lisan Surakarta, 1930-1960." Sepanjang pengetahuan kami, buku pertama yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia mengenai metode sejarah lisan adalah terjemahan dari P. Lim Pui Huen, et al, eds., *Oral History in Southeast Asia: Theory and Method* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1998; terjemahan: *Sejarah Lisan di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 2000).

[10] Proyek itu berjudul 'In Search of Silenced Voices,' dilakukan pada pertengahan 1990an oleh Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia yang berpusat di Belanda. Hasil wawancara disimpan oleh IISG di Amsterdam. Lihat website www.iisg.nl/archives. Beberapa hasil rekaman itu juga tersedia di Institut Sejarah Sosial Indonesia di Jakarta.

[11] Masalah sejarah dan kebenaran terlalu rumit untuk dibahas secara memadai di sini. Kami hanya ingin mengatakan bahwa gagasan obyektivitas sejarah yang dipegang oleh sejarawan dan publik Indonesia belum mampu mencerna kritik terhadap gagasan itu. Beberapa teks dasar untuk masalah ini adalah Peter Novick, *That Noble Dream: The'Objectivity Question' and the American Historical Profession* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988); Joyce Appleby, et al, *Telling the Truth About History* (New York: Norton, 1994). Lihat pula tradisi hermeneutik dan fenomenologi dalam filsafat abad ke-20, misalnya Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Continuum, 1993); Maurice Merleau-Ponty, *The Visible and the Invisible* (Evanston: Northwestern University Press, 1968); Charles Taylor, *Philosophy and the Human Sciences* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

[12] Paul Thompson, *The Voice of the Past*, h. 7-8

[13] Donald Miller dan Lorna Miller, *Survivors: An Oral History of the Armenian Genocide* (Berkeley: University of California Press, 1993). Ada banyak sejarah

lisan mengenai genosida Nazi terhadap kaum Yahudi di Eropa. Karya yang paling terkemuka dan kontroversial adalah film *Shoah*, yang transkripsinya sudah diterbitkan dalam bentuk buku, Claude Lanzmann, *Shoah: An Oral History of the Holocaust* (New York: Pantheon, 1985). Mengenai kamp kamp tahanan di Uni Soviet, lihat Irina Sherbakova, 'The Gulag in Memory,' dalam Luisa Passerini, ed., *Memory and Totalitarianism* (New York: Oxford University Press, 1992). Kejahatan militer Soeharto di Timor Leste kejahatan yang tidak diketahui orang Indonesia sendiri, tapi menjadi pengetahuan umum bagi orang lain di dunia– dituturkan dalam buku yang ditulis seorang Australia, Michele Turner, *Telling East Timor: Personal Testimonies* (Kensington: New South Wales University Press, 1992). Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Cerita Timor-Timur: Kesaksian Pribadi* (Jakarta: Pijar, 1999).

[14] Iris Chang, *The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II* (New York: Basic Books, 1997); Honda Katsuichi, *The Nanjing Massacre: A Japanese Journalist Confronts Japan's National Shame* (Jakarta: M.E. Sharpe, 1999).

[15] Pramoedya Ananta Toer, *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* (Jakarta: KPG, 2001). Naskah ini ditulis di Pulau Buru pada 1970an

[16] Perlu dicatat bahwa kejahatan perbudakan seksual ini tidak tercantum dalam *Sejarah Nasional Indonesia*, sementara kerja paksa atau romusha tercatat.

[17] Dikutip dari Yuki Tanaka, *Japan's Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution during World War II and the US Occupation* (London: Routledge, 2002), h. 24.

[18] Tanaka, *Japan's Comfort Women*, h. 23.

[19] Tanaka, *Japan's Comfort Women*, h. 19.

[20] Tanaka, *Japan's Comfort Women*, h. 79-80.

[21] Seno Gumira Ajidarma, salah satu dari sedikit orang yang memahami arti penting buku Pramoedya, melihatnya sebagai 'tulisan jurnalistik' dan 'sejenis laporan investigatif.' Sebutan ini, dan tidak adanya rujukan pada istilah sejarah lisan, bagi kami memperlihatkan betapa sejarah lisan tidak dikenal di Indonesia. Lihat tulisannya, 'A Story about Unimportant News Reports,' di Seno Gumira Ajidarma, *Jakarta at a Certain Point in Time: Fiction, Essays and a Play from the Post-Suharto Era in Indonesia*, diterjemahkan oleh Michael Bodden (Victoria: University of Victoria, 2002).

[22] Rahasia umum bisa kita jumpai dalam banyak masyarakat. Seringkali kita menemukan masyarakat yang tahu bahwa kejahatan tertentu telah terjadi,

tapi karena berbagai alasan tidak pernah dibicarakan secara publik, dan anggota masyarakat lainnya pun berpura-pura tidak tahu bahwa kejahatan seperti itu pernah terjadi. Lihat Stanley Cohen, *States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering* (Cambridge: Polity Press, 2001).

[23] Satyagraha Hoerip, 'Pemberontakan Gestapu/PKI Dalam Cerpen-cerpen Indonesia,' dalam *Cerpen Indonesia Mutakhir: Antologi Esei dan Kritik*, Pamusuk Eneste, ed., (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 56-57. Tulisan ini awalnya diterbitkan dalam *Budaya Jaya* (Februari 1972).

[24] Robert Cribb, ed., *The Indonesian Killings*, 'Introduction.'

[25] Jumlah sesungguhnya dari eks-tapol ini, sama seperti jumlah orang yang meninggal, tidak diketahui. Rezim Soeharto memberikan bermacam angka statistik berbeda. Pada 1981, pejabat rezim Soeharto mengatakan bahwa ada 1,5 juta eks-tapol. Empat tahun kemudian, para pejabat mengatakan jumlah mereka sesungguhnya 1,7 juta. Try Soetrisno, dalam sebuah majalah, mengatakan jumlah mereka 1,8 juta. Mungkin saja jumlah mereka sebenarnya lebih besar dari itu. Lihat Robert Cribb, ed., *The Indonesian Killings*, 'Introduction,' h. 42. Angka yang diberikan para pejabat pemerintah pada 1980an ini sangat berbeda dengan angka-angka dari 1960an dan 1970an. Saat itu, pejabat pemerintah mengaku hanya ada 120.000 tapol. Angka itu diberikan Jaksa Agung Sugih Arto pada September 1966. Pemerintah mengklaim bahwa mereka terus melepas para tahanan sehingga jumlah ini terus menurun. Pada 1977, pemerintah mengklaim hanya ada 31.461 tapol dalam penjara. Lihat, Greg Fealy, *The Release of Indonesia's Political Prisoners: Domestic vs. Foreign Policy* (Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1995), appendix, 'The Problem of Detainee Statistics,' h. 44-46.

[26] Istilah 'ingatan sosial' tidak berarti bahwa semua orang dalam masyarakat memiliki ingatan yang sama mengenai sebuah kejadian, tapi bahwa seluruh masyarakat membicarakan peristiwa itu, menganggapnya penting, dan memperdebatkan arti pentingnya. Istilah ini sama dengan 'ingatan kolektif'. Tekanan dari kedua istilah ini adalah gagasan bahwa ingatan seseorang disusun oleh identitas kelompok. Lihat James Fentress dan Chris Wickham, *Social Memory* (Oxford: Blackwell, 1992); Maurice Halbwachs, *On Collective Memory*, diedit dan diterjemahkan oleh Lewis A. Coser (Chicago: The University of Chicago Press, 1992); David Middleton dan Derek Edwards, eds., *Collective Remembering* (London: Sage, 1990).

[27] Soeharto, *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991).

[28] Kol. Sarwo Edhie, komandan RPKAD pada 1966, mengatakan pada seorang jurnalis Amerika bahwa pasukannya menghimpun kelompok pemuda untuk melakukan pembunuhan di Solo. John Hughes, *Indonesian Upheaval* (New York: Fawcett, 1967), h. 130-132. Soedomo mengatakan bahwa jumlah orang yang dibunuh pada 1965-66 berkisar antara 450.000 sampai 500.000. 'Setelah Wawancara Sudomo,' *Tempo*, 10 Juli 1976, h. 7.
[29] Bahkan buku-buku teks yang 'diperbaiki' pada masa pasca-Soeharto tetap tidak membicarakan pembunuhan itu. Lihat misalnya, Tim Sejarah SMU, *Sejarah untuk SMU Kelas 3* (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2001).
[30] Pembunuhan di Purwodadi pada 1968-69 mendapat perhatian pers di Jakarta ketika J.C. Princen kembali membawa laporan mengenai kejadian itu. Lihat Robert Cribb, *The Indonesian Killings*, bab 9, 'The Purwodadi Killings: Two Accounts.'
[31] ''Surat Perintah 11 Maret' untuk mengatasi situasi konflik ketika itu,' *Kompas*, 11 Maret 1971, h. 1, 12.
[32] Jumlah literatur anti-PKI yang diproduksi rezim Soeharto dan para pendukungnya benar-benar mencengangkan. Seakan-akan mereka tidak pernah yakin bahwa masyarakat memahami pesan yang ingin mereka sampaikan sehingga mereka harus terus-menerus mengulang cerita yang kurang lebih sama. Untuk contoh contoh mutakhir literatur sejenis ini, lihat Alex Dinuth, ed., *Dokumen Terpilih Sekitar G.30.S/PKI* (Jakarta: Intermasa, 1997); Alex Dinuth, ed., *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis* (Jakarta: Intermasa, 1997); Tim Cidesindo, *Membuka Lipatan Sejarah: Menguak Fakta Gerakan PKI* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999).
[33] Noegroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *The Coup Attempt of the 'September 30 Movement' in Indonesia* (Jakarta: Pembimbing, 1968). Terjemahan dalam bahasa Indonesia: *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1989).
[34] Film ini kemudian diolah menjadi buku: Arswendo Atmowiloto, *Pengkhianatan G-30-S/PKI* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986; cetak ulang 1988, 1994).
[35] Cerita-cerita itu dikumpulkan dan diterjemahkan (dengan hasil yang jauh dari sempurna) oleh Harry Aveling, *Gestapu: Indonesian Short Stories on the Abortive Communist Coup of 30th September 1965* (Honolulu: Southeast Asian Studies Program, University of Hawaii, 1975).
[36] Soe Hok Gie, 'Di Sekitar Peristiwa Pembunuhan Besar-Besaran di Pulau Bali,' dalam *Zaman Peralihan* (Yogyakarta: Bentang, 1995), h. 161-162

[37] Kami tidak berhasil menemukan naskah asli dari cerita pendek ini, dan terpaksa menggunakan terjemahannya dalam bahasa Inggris: Putu Arya Tirtawirya, 'When People Become Numbers,' *Latitudes Magazine*, vol. 10 (2002). Judul asli cerpen ini adalah 'Kegelapan di Bawah Matahari' yang diterbitkan dalam buku berjudul *Kegelapan di Bawah Matahari dan Cerpen-Cerpen Lainnya* (Ende, Flores: Nusa Indah, 1979).

[38] Ahmad Tohari, dalam bagian trilogi *Ronggeng Dukuh Paruk* yang disensor penerbitnya, menggambarkan militer menahan ratusan orang di tempat tahanan yang penuh sesak dan kotor, lalu membawa mereka berkelompok untuk dieksekusi. Ahmad Tohari, 'Village Dancer,' diterjemahkan oleh René Lysloff, *Manoa*, 12: 1 (2000). Juga film Garin Nugroho *Puisi Tak Terkuburkan* (2001), menggambarkan tahanan di Aceh pada 1965 dibawa dengan kepala yang ditutup karung beras untuk dieksekusi. Film ini dibuat berdasarkan ingatan Ibrahim Kadir, seorang penyair Aceh yang menyaksikan eksekusi seperti itu saat ia ditahan.

[39] Pipit Rochiat, 'Saya PKI atau Bukan PKI?' Majalah *Gotong Royong* (Berlin, Perhimpunan Pelajar Indonesia), April 1984. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Benedict Anderson, 'Am I PKI or Non-PKI?' *Indonesia* no. 40 (October 1985). Para pemimpin NU di Kediri yang diwawancarai Hermawan Sulistyo juga menggambarkan eksekusi sejumlah besar tahanan. Pembunuhan lain di Kediri dan Jombang, menurut Sulistyo, dilakukan oleh kelompok-kelompok NU dengan kawalan tentara yang menyerbu desa-desa dan membantai orang yang dicurigai sebagai pendukung PKI. Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu* (Jakarta: KPG, 2000), bab 5.

[40] Agus Sunyoto, dkk., *Banser Berjihad Menumpas PKI* (Tulungagung: Pesulukan Thoriqoh Agung, 1996), h. 155.

[41] Fathurrahman Zakaria, *Geger Gerakan 30 September 1965, Rakyat NTB Melawan Bahaya Merah* (Mataram: Sumurmas, 1997; cetakan kedua 2001), h. 110-111.

[42] Naskah aturan hukum itu dapat dilihat dalam *Himpunan Peraturan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan dari G-30 S/PKI* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1988).

[43] Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32, 1981, 'Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G-30-S/PKI.'

[44] Kathryn Anderson dan Dana Jack, 'Learning to Listen: Interview Techniques and Analyses,' dalam R. Perks and A. Thomson, eds., *The Oral History Reader*, h. 157-171.

[45] Taufiq Ismail dan D.S. Moeljanto menerbitkan serangan terhadap Lekra, *Prahara Budaya: Kilas-balik Ofensif Lekra/PKI* (Bandung: Mizan, 1995), dan

berkeliling mempromosikan buku tersebut dari kampus ke kampus. Yang pakling mengherankan adalah mereka menyerang orang-orang yang secara hukum dilarang bicara di hadapan publik untuk membela diri. Pada tahun yang sama, pemerintah melarang peredaran *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* karya Pramoedya, hanya beberapa minggu setelah diterbitkan.

[46] Untuk pembahasan yang terkait dengan masalah-masalah ini, lihat Dominick LaCapra, *Writing History, Writing Trauma* (Baltimore: Johns Hopkins, 2001), khususnya bab 3, ‘Holocaust Testimonies: Attending to the Victim’s Voice.

I
ESAI

PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN DI JAWA TENGAH SETELAH G-30-S

Rinto Tri Hasworo

Menurut sejarah yang saya pelajari di sekolah, G-30-S adalah ledakan kekacauan dan subversi yang kemudian berhasil ditangani dengan baik oleh Mayjen Soeharto. Proses penggebukan terhadap G-30-S digambarkan sebagai tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Dan memang, sejak Oktober 1965, Soeharto diangkat menjadi pimpinan Kopkamtib: Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Jika kita melihat relief pada Monumen Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, jelas terlihat Soeharto berperan sebagai penyelamat bangsa dari kekacauan total. Penjelasan umum mengatakan bahwa Soeharto muncul sebagai penguasa untuk mengatasi G-30-S.

Bukan hanya pemerintahan Soeharto yang menyampaikan versi sejarah seperti ini. Mereka yang disebut 'Angkatan 66' pun–anggota-anggotanya menempati posisi-posisi berpengaruh di Indonesia sampai saat ini: pemimpin media, direktur pusat kesenian, pengajar perguruan tinggi, pengacara dengan bayaran mahal, pemimpin lembaga penelitian, dan seterusnya–

berbicara mengenai kemunculan Soeharto ke kekuasaan sebagai saat-saat kemenangan. Mereka mengatakan bahwa PKI itu jahat, dan Sukarno adalah tiran yang membiarkan PKI tumbuh besar. Mereka melihat Soeharto yang menindas G-30-S dan PKI sebagai sang pembebas. Menurut versi sejarah ini, Soeharto baru belakangan menjadi diktator: kelahiran Orde Baru sendiri sungguh murni dan indah.

Selama bertahun-tahun, tidak pernah saya pertanyakan penjelasan sejarah yang mereka sampaikan. Saya juga tidak banyak memikirkan peristiwa 1965-66. Bagi saya, semuanya terasa seperti cerita-cerita usang dari masa lalu. Setelah Soeharto mengundurkan diri barulah saya sadari, kejadian-kejadian itu sebenarnya penuh kontroversi. Laporan di media massa pun mulai mempertanyakan versi sejarah yang dibuat pemerintah.

Semakin saya pikirkan rangkaian peristiwa itu, semakin terasa tidak masuk akal versi pemerintah. Pertama, sejarah resmi dan media massa. Orde Baru tidak pernah menggambarkan secara jelas bagaimana sesungguhnya PKI ‘dihancurkan’. Semuanya hanya menyebut tentang serdadu dan orang sipil yang ‘menghancurkan’ PKI. Tapi apa arti istilah itu, tidak pernah ada penjelasan. Baru kemudian saya tahu bahwa ratusan ribu orang dibunuh dan ratusan ribu lainnya disekap di penjara selama bertahun-tahun, dalam rangka menumpas G-30-S.

Saya tidak mengerti mengapa begitu banyak warga sipil harus menjadi korban untuk mengatasi sebuah

insiden yang hanya melibatkan beberapa ratus orang saja–dan kebanyakan dari mereka adalah tentara? Kenapa pasukan di bawah Soeharto dan para pendukungnya di kalangan sipil harus menghantam ratusan ribu orang yang tidak punya hubungan apa pun dengan G-30-S? Gerakan itu hanya bertahan selama sehari di Jakarta dan beberapa hari di Jawa Tengah, sesudahnya dengan cepat dihentikan. Lalu, mengapa orang di Jawa Timur, Bali, dan Sumatera juga ikut dibunuh dengan tuduhan terlibat G-30-S? Mengapa pembunuhan itu terus berlangsung selama berbulan-bulan, lama setelah G-30-S berakhir dan para pelakunya sudah ditangkap? Kenapa ratusan ribu orang perlu dibunuh sebagai pembalasan atas tewasnya sepuluh perwira militer (delapan di Jakarta dan dua di Jawa Tengah)?

Jika kita setuju semua orang yang terkait dengan PKI harus dihukum karena tindakan beberapa pimpinan atau anggota, maka kita juga harus mendukung pembunuhan massal terhadap semua anggota Golkar atas kejahatan yang dilakukan para pemimpinnya semasa Orde Baru. Namun, setiap kali Golkar atau militer berhadapan dengan kasus kejahatan yang melibatkan anggota, mereka mengatakan, ‘Oh, itu kan oknum.’ Kenapa mereka tidak menggunakan logika yang sama ketika menghantam PKI? Mengapa sampai ada prinsip menghancurkan PKI sampai ke akar-akarnya?[1] Mengapa penulisan sejarah resmi tidak bicara apa pun tentang pembunuhan dan penangkapan massal ini? Apa sesungguhnya yang ingin disembunyikan?

Apakah mereka malu atas pembunuhan yang mereka lakukan? Apakah dalam hati nuraninya sempat terbersit bahwa pembunuhan itu salah? Mengapa rezim Soeharto, militer dan politisi elit Orde Baru, selalu menghujat PKI dan Sukarno tanpa pernah menggambarkan kebiadaban yang mereka sendiri lakukan?

Orde Baru tidak muncul sebagai bayi yang bersih dan murni. Kemunculannya didahului peristiwa yang sangat berdarah. Sudah waktunya kita berpikir lebih hati-hati mengenai apa yang sesungguhnya dimaksud dengan 'penumpasan PKI'. Apalagi, serangan terhadap PKI telah menyebabkan kehidupan banyak orang menjadi terjungkir-balik, hancur berantakan.

Untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, pertama-tama kita harus berbicara dengan mereka yang menjadi korbannya. Selama Orde Baru, cerita-cerita mereka tidak mungkin ditampilkan. Sebaliknya, kita terus-menerus mendengar para pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh sipil lainnya berbicara tentang kekejaman PKI, bahkan sampai membuat orang berpikir bahwa apa pun yang dikatakan seorang 'PKI' itu tidak ada artinya, atau malah berbahaya. Sekalipun penguasa lewat sejarah resminya secara sistematis selalu berusaha mengingkari apa yang pernah terjadi, tetapi penguasa lupa bahwa tidak selamanya mereka dapat membendung suara-suara korban. Suara korban akan tetap menggema sekalipun dihimpit oleh berbagai macam kebijakan yang berusaha membungkam dan memenjarakannya.

Dalam penelitian ini, saya berbicara dengan sekitar delapan puluh eks-tapol di Jawa Tengah, antara 2000 dan 2001. Dari cerita-cerita mereka, saya mencoba memetakan pola-pola ‘pembasmiain’ PKI. Seperti akan saya jabarkan lebih jauh di bagian tulisan berikutnya, pemicu kekerasan fisik terhadap PKI adalah masuknya RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) ke Jawa Tengah pada pertengahan Oktober 1965. Setelah kedatangan RPKAD-lah pasukan-pasukan tentara lain yang berbasis di propinsi itu mulai menyerang PKI. Tentara menggalang milisi sipil, menculik orang secara acak (termasuk banyak orang yang bukan PKI), menculik dan menyandari sanak-saudara orang-orang yang dicari, memperkosa tahanan perempuan dan istri-istri para tahanan lelaki, dan menyebabkan kematian banyak dari mereka yang ditahan.

RPKAD sebagai Pemicu dan Provokator

Sebelum dimulainya penangkapan yang dikoordinir pihak militer, situasi beberapa daerah di Jawa Tengah berkaitan dengan isu penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal di Jakarta, amat beragam. Sebagian besar daerah umumnya dalam kondisi tenang sekalipun masyarakat merasakan suhu politik sangat tinggi. Di banyak daerah, warga masyarakat tidak mengetahui berita tentang G-30-S. Kalaupun tahu, beritanya sangat simpang siur.

Kondisi sosial politik di daerah-daerah Jawa Tengah pun masih seperti sediakala. Kalaupun muncul ketegangan akibat adanya informasi G-30-S, hal itu tidak menimbulkan konflik antar-anggota masyarakat yang berlatar belakang organisasi dan sikap politik berbeda. Bentuk ketegangan hanyalah saling curiga antar-anggota masyarakat partai atau organisasi yang berbeda. Ada ketakutan di kalangan anggota partai atau organisasi yang berideologi nasionalis atau agama: jika benar PKI yang melancarkan G-30-S, berarti PKI akan berkuasa. Dan, jika PKI berkuasa, tentunya eksistensi mereka sebagai partai/organisasi akan terancam, karena sejak sebelumnya memang terjadi persaingan antar-partai yang ada.

Kalangan anggota atau simpatisan PKI sendiri juga merasa tegang: mereka tidak percaya PKI adalah dalang peristiwa G-30-S sebab tidak ada sama sekali instruksi atau kebijakan partai menyangkut peristiwa yang terjadi. Hari-hari mereka setelah terjadinya peristiwa itu hanya berisi pertanyaan: ‘Apa benar PKI yang menculik dan membunuh para jenderal?’ Walaupun berita-berita yang diterima masyarakat, melalui radio maupun dari mulut ke mulut, mengatakan bahwa penculik dan pembunuh para jenderal adalah PKI, partai atau organisasi massa lain tidak melakukan tindakan apa pun sebelum 17 Oktober 1965. Dalam tiga minggu pertama Oktober 1965, tidak ada kerusuhan besar di Jawa Tengah dan tidak ada pembunuhan massal. Bahkan di beberapa daerah, kerja

sama yang telah terjalin tetap dijalankan seperti sediakala.

Temuan saya, berdasarkan wawancara lisan, mendukung pendapat Benedict Anderson dan Ruth McVey yang menggunakan laporan surat kabar antara Oktober dan Desember 1965. Mereka mengatakan bahwa G-30-S dan kampanye antiPKI, ‘sekalipun terkait erat-erat, merupakan dua gejala politik yang terpisah’ (cetak miring dalam teks asli). Kampanye itu dimulai setelah G-30-S berhasil dikalahkan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangkit. Angkatan Darat menyerang PKI saat partai itu tidak melakukan aksi apa pun. PKI tidak bermaksud menyerang siapa pun dalam beberapa minggu setelah G-30-S: ‘antara kematian enam jenderal di Jakarta pada subuh 1 Oktober dan bentrokan di Bojolali pada 21 Oktober, tiga minggu berlalu tanpa kekerasan atau jejak-jejak perang saudara, bahkan menurut Angkatan Darat sendiri‘ (cetak miring dalam teks asli).[2]

Salah satu alasan mengapa berita tentang G-30-S tidak serta-merta menyulut serangan terhadap PKI adalah karena PKI saat itu dipandang sebagai partai politik biasa. PKI bersaing, tapi juga bekerja sama dengan partai-partai lain; para wakilnya di DPRD bekerja sama dengan wakil partai lain di dalam komisi; mereka mendukung konsep Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis)[3] dari Sukarno, dan dengan demikian menerima PNI dan NU sebagai anggota sah dalam pemerintahan nasional. Banyak anggota PKI yang bersaudara dengan anggota partai lain;

mereka bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda secara ideologi. Berita tentang G-30-S tidak dengan sendirinya membuat orang melihat anggota PKI sebagai unsur berbahaya yang harus dibunuh.

Alasan lainnya adalah karena pengaruh PKI dan ormas-ormas yang dekat dengan PKI dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang seni, budaya, pertanian, perburuhan, dan sektor informal lainnya, begitu kuat. Partai atau ormas lain yang berbasis agama dan nasionalis tidak memiliki keberanian untuk melakukan tindak kekerasan atau melancarkan serangan terhadap PKI, anggota, maupun simpatisannya. Orang-orang antiPKI yang tergolong garis keras dan ingin menghantam PKI segera setelah kejadian pun harus berpikir dua kali dan menimbang kemungkinan adanya serangan balik.

Faktor yang juga penting adalah tidak adanya jaminan bebas dari tuntutan hukum jika melakukan penangkapan, penahanan, penyiksaan, pembunuhan, dan sikap sewenang-wenang lainnya terhadap anggota dan simpatisan PKI. Di tubuh Kepolisian dan Angkatan Darat sendiri ada sejumlah personil yang berpihak pada PKI atau setia kepada Presiden Sukarno. Dalam beberapa minggu pertama Oktober 1965, masih ada upaya-upaya dari pihak kepolisian maupun militer tingkat lokal untuk mencegah terjadinya insiden kekerasan.[4]

Begitu RPKAD datang, situasi berubah drastis. Daerah-daerah yang awalnya tenteram tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Dengan kekuatan satu batalyon yang terdiri

dari beberapa kompi, RPKAD langsung dikirim dari Jakarta pada 17 Oktober 1965, dan tiba di Semarang pada 18 Oktober 1965, pukul 14.30 WIB, setelah bermalam di Desa Tanjung, Kabupaten Brebes. Keesokan harinya, sekitar pukul 23.00 WIB, RPKAD langsung beraksi, menangkapi orang-orang yang disinyalir menjadi anggota atau simpatisan PKI dan diduga terlibat dalam peristiwa G-30-S, setelah sebelumnya melakukan unjuk kekuatan keliling kota Semarang. Batalyon itu dipimpin langsung oleh komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edwie Wibowo.[5]

Operasi penangkapan yang dilakukan oleh RPKAD tidak hanya terjadi di Semarang, melainkan juga di daerah-daerah Jawa Tengah lainnya. Semarang merupakan kota pertama dimulainya operasi penangkapan terhadap mereka yang menjadi anggota atau simpatisan PKI beserta ormas pendukungnya. Operasi RPKAD ini kemudian bergerak meluas dan berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, dari satu propinsi ke propinsi lain. Dalam operasi pertama di Jawa Tengah, misalnya, setelah Semarang, mereka bergerak ke Magelang, Kudus, Demak, dan Jepara.

Kebanyakan korban, walau telah mengalami tekanan luar biasa, tidak akan lupa bahwa tentara-lah yang mengawali serangan terhadap mereka. Penuturan Suparno di bawah ini dengan gamblang menggambarkan bagaimana serangan tentara mulai dilancarkan di daerahnya. Suparno pernah bekerja pada salah satu koperasi di Pati, Koperasi Garam Rakyat, pada awal

1960an. Dia juga menjadi sukarelawan untuk pengambilalihan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Menjelang 1965, Suparno menjadi anggota organisasi kepemudaan, Pemuda Rakyat. Suparno ditangkap pada 10 November 1965. Alasan penangkapannya, selain karena menjadi anggota Pemuda Rakyat, Suparno dituduh berniat menggulingkan kepala desa. Dia sempat mengalami pembuangan ke Pulau Buru selama sekitar enam tahun, setelah sebelumnya ditahan di kamp-kamp penahanan di Pati dan singgah di Nusakambangan selama enam bulan pada 1971.

Pada tanggal empat bulan November itu tahun 1965 RPKAD mengadakan manuver [maneuver] dan berhenti di kecamatan Juana dan di situ mengadakan ceramah yang intinya menerangkan bahwa di Jakarta terjadi ada pembunuhan jenderal-jenderal. Pada waktu itu saya juga ikut mendengarkan dalam ceramahnya RPKAD itu, dengan beberapa teman, banyak, dan masyarakat banyak, saya melihat di dalam truk itu ada teman saya yang dari Jakenan yang bernama Trimo. Itu sudah ada di truk itu. Hanya satu orang yang saya lihat itu. Dan waktu yang lain, yaitu setelah tanggal empat itu, diadakan gerakan pembersihan. Pembersihan. Operasi di daerah Juana itu pada tanggal delapan bulan sebelum, tahun 65. Jadi sebelum RPKAD datang itu, persatuan dan kesatuan dari antara partai politik itu masih bisa bermusyawarah, artinya itu masih bisa satu, satu pendapat jadi tidak ada perpecahan apa-apa. Tapi setelah RPKAD itu datang,

RPKAD membentuk suatu kesatuan aksi pemuda dan pelajar yang disebut KAPPI [Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia] dan KAMI [Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia]. Itu mengadakan gerakan, gerakan operasi penangkapan terhadap yang apa dikatakan orang-orang PKI.

Pada tanggal delapan atau sepuluh khusus bagi teman-teman dari golongan PKI dan dari ormas-ormasnya dipanggil di kantor polisi dibriefing [diberi petunjuk singkat]. Tapi briefing tersebut belum sampai tuntas telah datang RPKAD dan Brimob [Brigade Mobil] bersenjata lengkap dalam keadaan situasi perang. Jadi teman-teman itu sebagian ada yang dipanggil langsung terus diangkut ke Pati... Dan saya pada tanggal sembilan malam itu dipanggil oleh kepala desa, di satu ada beberapa orang atau banyak sekali dari pasukan Brimob. Terus setelah itu saya diijinkan untuk kembali pulang, dalam malam itu. Terus paginya disuruh saya diantarkan ke kantor polisi.

Setelah di kantor polisi beberapa lama, dan beberapa hari di kantor polisi, saya dengan teman saya terus langsung dibawa ke Pati, di tempat kamp penahanan di Gedung Baperki [Badan Permusyawaratan Kewanganegaraan Indonesia], sekolahan Baperki. Saya dikumpulkan di situ beberapa teman dan dari beberapa daerah seluruh Kabupaten Pati. Dikumpulkan di situ, sampai penuh. Pada tanggal 27 sampai tanggal 29 saya diperiksa. Tuduhannya itu adalah kita dituduh akan merebut kepala desa. Padahal kepala itu mbah (kakek)

saya sendiri. Jadi kepala desa itu pernah mbah saya sendiri. Jadi, mana mungkin saya merebut kekuasaannya mbah? Wong itu mbah saya sendiri. Jadi, tuduhan itu adalah dibuat-buat, artinya itu direkayasa.

Apa yang dialami Suparno hanyalah satu contoh kasus di mana alasan penangkapan dan penahanan seseorang sering kali jauh kaitannya dengan peristiwa G-30-S dan sama sekali tidak bisa diterima nalar. Para petugas pemeriksa tetap menggunakan tuduhan yang tidak masuk akal sehat tersebut sebagai alasan. Sebab, bukanlah kebenaran sejati yang ingin mereka peroleh dari jawaban para tapol, melainkan jawaban yang sesuai dengan keinginan mereka. Tidak jarang, tuduhan digunakan sebagai pengantar untuk melakukan tindak kekerasan terhadap para tapol: yang dicari para petugas pemeriksa adalah alasan untuk menangkap, menahan, memukul, menendang, menyetrum, bahkan membunuh para tahanan. Tuduhan memang ada, tapi tidak menjadi hal substantif dalam penangkapan.

Cerita Mansur dari Rembang sekali lagi menggambarkan bagaimana proses perburuan acak berlangsung di bawah pimpinan RPKAD. Mansur adalah eks-tapol dengan tradisi beragama cukup kuat. Sebelum Masyumi dibubarkan, ia dan keluarganya menjadi anggota partai tersebut. Karena hobi main ketoprak, Mansur tertarik bergabung dengan perkumpulan kesenian ketoprak yang dikoordinir Bakoksi (Badan Koordinasi Organisasi-Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia).

Kegandrungannya pada seni ketoprak sempat membuatnya batal naik haji pada pemberangkatan haji 1950an. Padahal, kepergian Mansur untuk naik haji sudah lama dipersiapkan orang tuanya.

Bapak saya dulunya termasuk orang, ya bisa dikatakan sudah orang termasuk orang partai, termasuk golongan SI, Sarekat Islam. Ini, ayah saya SI, Sarekat Islam pada waktu itu... Sebetulnya, lha ini, sebelum saya getoprak (main ketoprak) itu–ya memang tadi santri ya–saya ikut pada waktu itu dalam Partai Masyumi di sini. Termasuk di Sodetan ini partai yang terkenal pada waktu itu ya Masyumi. Juga partai yang terbesar di Sodetan sini. Ada dua yang terbesar, Masyumi dan PKI pada waktu itu. Tapi pada waktu itu saya Masyumi ya, ketuanya Gus Fud, sekretarisnya Ridwan, ini dari Masyumi... Setelah itu saya, karena di ketoprak, ya tidak membawa arti partai atau politik atau apa, pokoknya getoprak saja pada waktu itu. Ha, lantas tahun 50 merantau, merantau, satu tahun itu, lantas dikawinkan. Mertua saya orang Masyumi pada waktu itu.

Karena tidak ada rasa cinta dalam arti suami isteri... kira-kira ada enam bulan atau tujuh bulan cerai pada waktu itu. Ini saya menjadi duda pada waktu itu ya, tapi masih getoprak ini. Masih getoprak... Ha, organisasinya ya, Langen Sedio Rukun namanya. Di Lasem. Tapi kalo pada waktu itu memang banyak ketoprak. Ketoprak itu yang isinya itu sudah ya diorganisasi. Dari naungan

Bakoksi tadi, ada Rukun Santoso, dan Cahyo Mudo, dan sebagainya, banyak itu.

Lantas ada kejadian, istilahnya itu peristiwa G-30-S. Nah, ini. Tapi saya sudah kawin, yang menurut dari hati saya sendiri. Dengan isteri saya itu, sampai saya punya anak pada waktu itu. Jadi kejadian ada peristiwa G-30-S itu saya sudah kembali lagi di Lasem, tidak merantau-merantau... Mulai operasi setelah satu bulan terjadi G-30-S itu tadi, wah sudah mulai itu. Saya diwajibkan lapor pada waktu itu. Istilahnya wajib lapor itu diminta keterangannya kan begitu, kan saya wajib lapor. Pada waktu Dandis-nya [Komandan Distrik] di Lasem ini Dariyo namanya. Pak Dariyo kepala polisinya, namanya Pak Dariyo pada waktu itu. Iya saya ya wajib lapor pada waktu itu. Tahu-tahu lantas wajib lapor karena ada gerakan yang besar-besar itu ndak pulang terus langsung dikirim ke Lembaga Rembang itu...

Wah, massa pada waktu itu ya ada yang mimpin pada waktu itu istilahnya. Tapi, pada waktu itu otomatis yang menggerakkan, yang menggerakkan itu, ya sedikit pun itu musti pakai nama atau pakai gelar RPKAD. Begitu pada waktu itu. Asal muni (mengucapkan) ada RPKAD sudah, massa itu seolah-olah ya bisa dikatakan membabi-buta. Jadi setelah ada RPKAD itu seolah-olah yaitu tadi, sudah massa itu merusak apa pun. Tapi bisa kita ketahui, mengrusak itu tidak hanya merusak saja, ya ada yang menggunakan kesempatan mengambil harta bendanya orang, apa itu ya jarah rayah.

Dari kesaksian Mansur tampak jelas, ruang-ruang untuk melakukan tindakan apa pun memang sengaja diciptakan. Massa menjadi beringas begitu merasa ada dalam payung RPKAD. Inilah yang kemudian menjadikan massa tidak hanya berfungsi sebagai mesin penangkap, melainkan juga sebagai mesin pembunuh.

Perlawanan terhadap RPKAD

Banyak orang yang berafiliasi dengan PKI atau organisasi kiri lainnya tidak melawan ketika ditangkap; Suparno datang ke kantor polisi atas keinginannya sendiri, lalu ditahan; Mansur secara teratur melapor ke kantor polisi pada awal Oktober, lalu diijinkan kembali ke rumah. Ia baru ditahan setelah kedatangan ke kantor polisi yang kesekian kalinya. Karena yakin tidak melakukan kesalahan, mereka tidak mencoba melarikan diri. Mereka tidak membayangkan suatu saat akan ditangkap tanpa tuduhan (kecuali tuduhan serampangan ‘terlibat G-30-S’) dan ditahan selama bertahun-tahun tanpa pengadilan. Umumnya, orang yang menjadi sasaran penangkapan mencoba bekerja sama dengan polisi dan militer dengan harapan nama-nama mereka akan dibersihkan dan kemudian dilepas.

Mungkin satu-satunya tempat terjadinya perlawanan terhadap RPKAD adalah Klaten. Setelah mendengar apa yang dilakukan RPKAD di Semarang dan pantai utara Jawa

Tengah, para aktivis di Klaten menghimpun diri untuk mencegah pasukan ‘baret merah’ itu memasuki wilayah mereka.[6] Saya berbicara dengan mantan pengurus SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) di Tegalgondo, Klaten, yang bernama Winata. Demikian ia menggambarkan perlawanan kaum buruh Klaten:

Menjelang pada tahun 65, aktivitas saya sendiri sudah beralih ke Jawa Tengah. Jadi ya mulai tahun 65, saya agitasi (mobilisasi orang) ke Pekalongan tiga bulan, konsolidasi tugas buruh SOBSI. Selesai tiga bulan, pulang. Di rumah satu minggu, dikirim ke Purwokerto. Kira-kira baru mendapatkan setengah bulan di Purwokerto, kejadian di Jakarta itu. Jadi saya di Purwokerto itu. Lantas, ‘Gimana ini?’ Tapi saya punya firasat bahwa sudah ndak enak itu. Firasat saya, ‘Gimana ini?’ Saya kurang lebih masih bertahan satu minggu. Kawan-kawan di sana sudah banyak trauma, panik. Lebih baik saya pulang. Saya pulang. Pulang ke rumah, terus saya laporan ke Semarang. Laporan ke Semarang, sudah bulan Oktober sampai di Semarang, RPKAD sudah sampai di Semarang machtsvertoon (pawai), mubeng-mubeng (berputar-putar) di kota Semarang itu. Lantas saya kembali ke rumah dalam keadaan stand by (bersiaga).

Nah, kita mengadakan satu protes. Protes. Tapi sudah tidak dihiraukan lagi oleh kekuasaan Soeharto. Protes-protes itu sampai kita mengadakan pemogokan. Pemogokan kaum buruh, misalnya di Delanggu pabrik karung Delanggu, kereta api, di Serikat Buruh Gula. Jadi

mulai dari Tegalgondo sampai di Delanggu sebelum sana pohon-pohon di tepi jalan itu kan ditebangi, gerakan tebangan-tebangan. Ya untuk merintangi RPKAD-RPKAD itu. Untuk memperlambat gerakan. Dengan itu juga sampai adanya gerakan protes-protes, gerakan pemogokan kaum buruh tadi ya bersamaan. Nah, gerakan-gerakan pada waktu itu, ya sampai ada isu, entah itu soal benar atau tidak, akan mengadakan satu serangan umum, begitu. Tapi akhirnya nggak ada apa-apa, jadi keadaan kita sudah terputus-putus, sudah nadak ada hubungan secara langsung. Instruksi secara langsung itu nadak ada. Jadi kalau ada begitu ya sudah, terus adakan satu persiapan, begitu saja.

Dengan demikian akhirnya kesemuanya itu bisa dipatahkan. Akhirnya kita diadakan suatu penangkapan-penangkapan dan ada satu pengejaran-pengejaran. Nah mulai itu, sudah mulai ada satu pembunuhan-pembunuhan. Jadi setelah selesai itu, artinya telah ada penebangan-pemberontakan.

penebangan, pemrotesan-pemrotesan, adanya satu gerakan-gerakan pemogokan-pemogokan itu, baik itu di dalam maupun di perkebunan itu mulai ada satu penangkapan-penangkapan dan adanya satu pembunuhan-pembunuhan.

Aksi protes dan perlawanan itu hanya bersifat reaktif. Oleh karenanya, aksi tersebut tidak terlalu solid dan dengan mudah dipatahkan aparat keamanan. Fenomena ini mencerminkan bahwa para aktivis di Klaten

sebenarnya tidak tahu persis posisi PKI dalam peristiwa G-30-S. Jika mereka tahu secara persis posisi PKI, tentu mereka akan membuat persiapan untuk menyikapi situasi pasca-peristiwa G-30-S.

Pada operasi RPKAD 30 Oktober 1965, Winata tertangkap. Saat menjalani pemeriksaan, ia diperintahkan untuk merangkak sambil dicambuki oleh tentara RPKAD. Ia dibebaskan setelah ditahan semalaman di Markas RPKAD Kartosuro, karena seorang luruh bersedia menjelaskan pada aparat bahwa Winata hanya orang biasa. Tentara mempercayai keterangan luruh tersebut karena aktivitas politik Winata memang tidak terlalu menyolok di kampungnya. Dia lebih sering berada di tingkat pusat atau bertugas ke daerah lain untuk memberikan pendidikan tentang sistem pengairan dan pengorganisasian buruh. Tampaknya, informasi yang diterima tentara dari masyarakat seputar aktivitas politik Winata memang tidak banyak.

Setelah terjadinya 65, saya pada operasi pertama tanggal 30 Oktober, tanggal 30 Oktober saya tertangkap. Operasi besar-besaran RPKAD, sehingga saya dengan kawan-kawan digiring ke lapangan oleh RPKAD. Di lapangan situ saya disuruh merangkak. RPKAD sudah membawa pecut yang besar itu, kita merangkak terus dipecuti, terus begitu. Saya mberangkang (merangkak), dipecuti terus, sampai terus digiring ke jalan besar. Saya terus diangkut ke Markas RPKAD. Hanya semalam di situ.

Nah, akhirnya kita semalam di RPKAD, paginya saya dilepaskan, disuruh pulang. Tapi pulang saya sudah merasa sendiri, introspeksi, saya sudah merasa saya ini memang orang penting, orang yang banyak diketahui. Kalau di sini [kelurahan Tegalgondo] memang tidak diketahui, tapi kalau di Klaten [kota] itu kita dikenal. Kalau di desa saya nggak dikenal, sebab saya jarang di rumah dan tidak tampak kita beraktivitas di sini. Oleh karena itu terus setelah sampai di rumah saya juga terus umpetan (bersembunyi) saja. Umpetan saja, sama dengan kakak saya. Kakak saya dipanggil Koramil, 'Jangan dilayani, nggak usah ke sana.' Semboyan saya, saya menyerah mati–lebih baik saya nggak menyerah biarpun mati. Kakak saya saya bilangi begitu juga manut (menurut).

Winata merasa, cepat atau lambat, aktivitasnya pasti akan diketahui. Oleh karena itu, segera setelah dibebaskan, ia dan sang kakak melarikan diri, menjadi 'buron'. Satu bulan dalam persembunyian, keduanya tertangkap.

Jadi, satu bulan setelah 30 Oktober tertangkap, kita terus lari. Dikejar satu bulan, terus 30 November kita tertangkap. Setelah itu kita terus dibawa ke tempat markasnya Hanra [Pertahanan Rakyat]. Terus saya dibawa ke Grogolan, RPKAD, dibawa ke Markas RPKAD. Sudah, saya sudah ndaak ada harapan, akan hidup sudah ndak ada harapan. Setelah itu lantas saya di RPKAD situ mau dipindah ke Klaten. Mau dipindah ke Klaten sebab RPKAD

mau akan kembali ke Jakarta. Suasananya pada waktu itu memang mengkhawatirkan. Dikirim ke Klaten itu kelau ndak keliru pada bulan akhir Januari atau awal Februari itu ke Klaten. Kita mampir di Delanggu itu, di kantor polisi itu satu malam, paginya terus diangkat ke Kodim. Di Kodim kita diinterogasi supaya membikin pernyataan dalam surat-surat tertulis. Ya musti saja saya nggak mau terus terang soal itu. Ya, misalnya kita dengan alasan, saya nggak kenal masalah penebangan.

Winata menduga ia dan saudaranya akan dieksekusi di dalam tahanan. Sekitar 26 Maret 1966, tengah malam, 15 orang tapol, termasuk Winata dan kakaknya, dipanggil dan dikumpulkan. Dia masuk dalam kelompok 4, sedangkan sang kakak masuk dalam kelompok 11. Tengah malam itu adalah terakhir kali Winata bertemu dengan kakaknya. Tak satu orang pun dari kelompok 11 kembali setelah peristiwa itu. Winata yakin, kakak dan rekan-rekannya telah dibunuh. Ia sendiri baru dibebaskan dari tahanan tujuh tahun kemudian, yaitu pada Oktober 1972.

Mobilisasi Massa

Aktivitas penangkapan dan pembunuhan bukan monopoli aparat keamanan. Warga sipil anggota sejumlah organisasi massa, seperti Ansor dan Pemuda Marhaen, juga terlibat. Hubungan tentara dengan milisi sipil cukup kompleks dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Dalam

menganalisis kekerasan 1965-66, selalu sulit menentukan apakah tentara atau milisi yang harus disebut sebagai agen utama kekerasan. Para pejabat dalam rezim Soeharto dalam beberapa kesempatan mengakui telah terjadi kekerasan massal. Menurut mereka, pelakunya adalah masyarakat yang mengamuk. Tetapi, dari berbagai literatur yang saya baca dan wawancara yang saya lakukan, saya percaya bahwa tentara-lah yang paling bertanggung jawab atas tindak kekerasan massa tersebut. Kelompok kelompok milisi bertindak atas kemauan sendiri karena terprovokasi oleh propaganda tentara yang disebarkan melalui berbagai media massa (seperti cerita rekayasa tentang mutilasi alat kelamin dan pencungkilan mata para jenderal). Tentara juga memobilisir masyarakat melalui sejumlah demonstrasi (seperti yang diceritakan Suparno di Juana). Mereka melatih dan secara langsung mendorong kelompok-kelompok milisi di Jawa Tengah untuk mencari dan membunuh orang-orang yang dianggap komunis. Sarwo Edhie terang-terangan mengakui Angkatan Darat berada di belakang gerombolan sipil itu: 'Kami memutuskan untuk mendorong kaum sipil antikomunis membantu pekerjaan ini...' Kami melatih mereka dua atau tiga hari, lalu mengirim mereka untuk membunuh orang Komunis.'[7] Tentara menunjukkan dengan jelas kepada milisi bahwa mereka bebas menculik dan membunuh orang tanpa perlu khawatir akan ditangkap aparat negara karena telah melakukan tindakan kriminal. Sepanjang pengetahuan saya, tak satu warga

sipil pun (atau anggota militer) yang pernah diadili untuk tindakannya membunuh orang-orang yang dianggap komunis.

Dengan dukungan tentara, kelompok-kelompok milisi pada saat itu memiliki semacam kekebalan hukum untuk merampok, memperkosa, dan membunuh siapa saja yang mereka inginkan. Para pelaku penangkapan mempunyai kebebasan untuk berimprovisasi dalam menentukan sasaran, juga kondisi orang saat ditangkap: hidup atau mati. Tak jarang, sentimen pribadi mewarnai operasi penangkapan oleh massa yang berujung pada pembunuhan. Sekedar terlihat dekat dan akrab dengan PKI pun bisa membuat seseorang menjadi target penangkapan.

Korban sendiri tidak tahu banyak bagaimana milisi dan militer bekerja sama. Apa yang mereka saksikan, seperti dinyatakan di bagian sebelumnya, adalah: milisi baru mulai melakukan tindakan kekerasan setelah mereka mendapat perlindungan dan dukungan dari tentara, khususnya RPKAD. Sujoko dari Jatinom, Klaten, bercerita pada saya tentang sebuah ‘pertempuran’ antara anggota Pemuda Rakyat melawan kelompok milisi antiPKI yang terjadi di dekat rumahnya. Kelompok Pemuda Rakyat ‘memenangkan’ pertempuran itu, tapi kemudian milisi antiPKI kembali dengan dikawal tentara dan dilengkapi senjata api. Ketika anggota Pemuda Rakyat melarikan diri, kelompok milisi menyerang orang-orang di kampung. Sujoko karena dianggap mendukung PKI. Rumah Sujoko

dibakar habis dan ayahnya dibunuh. Ayah Sujoko yang berprofesi dalang, menjadi korban karena pernah meminjamkan peralatan pertunjukan wayangnya pada PKI.

Bapak saya ini menjadi korban G-30-S/PKI. Tapi di sini akan saya ceritakan, bahwa sebetulnya dalam struktur keorganisasian PKI, bapak saya ini tidak punya kedudukan. Cuma, kebetulan ayah saya itu dulu bisa dibilang orang terkaya di Jatinom. Karena kekayaan orang tua saya hasil daripada mendalang, jadi, otomatis bapak saya punya segala macam fasilitas yang pada saat itu dibutuhkan oleh Partai PKI, antara lain di bidang kesenian. Sebab bapak saya ini punya lampu petromaks, yang pada saat itu lampu petromaks itu di satu kelurahan masih bisa dihitung, tidak lebih dari dua orang yang punya... Kedua, bapak saya punya gamelan dan pengeras suara, juga bapak saya punya tonil-wayang orang plus dandanan-wayang orang. Lha, kebetulan PKI itu kalau kerja apa-apa, misalnya pada saat itu ulang tahun PKI, pada saat itu 17 Agustus dan hari besar Buruh Tani, pada saat itu tanggal 1 Mei, kalau nggak salah, itu PKI membutuhkan apa yang bapak saya punya dipinjam untuk satu pentas pertunjukan.

Nah, akhirnya pada hari Selasa Legi pagi, itu ada orang dari kelurahan, itu disuruh oleh Kepala Desa katanya. Orang dari Manjungan, namanya Dirgo. Itu jermut bapak saya dengan membawa surat, dan membawa surat, yang isi suratnya: ‘Bapak dimohon datang ke Kelurahan

Manjungan dalam rangka rembug (berunding) masalah Bamudes [Badan Musyawarah Desa].' Itu dan suratnya juga saya lihat pada saat hari Selasa Legi... Tahunnya itu tahun Wawu dulu, 1965. Itu tanggalnya 28 bulannya Bakda Mulud (Hari Raya Maulud Nabi). Itu kebetulan ibu saya tidak ada di rumah. Bapak saya bilang, 'Saya mau ke kelurahan, nanti kalau ibumu datang, kamu bilang saja, kalau saya ke kelurahan.' Bapak naik sepeda, bapak pakai sepedanya sendiri, dan yang jemput itu dipinjami sepeda, sepedanya mbakyu (kakak perempuan) saya.

Lalu saya ikut nguntabke (melepas) bapak, memandang bapak. Oleh karena di sebelum timur desa ini bulak panjang (tanah lapang), tanah luas, saya melihat bapak sampai bapak itu hilang dari pandangan saya. Itu kira-kira jam sembilan pagi. Lalu, jam 10, jam 11 itu, nggak tahunya pemuda dari kidul (selatan) kali itu terdiri Nasional, Agama, pemuda dari lor (utara) kali itu Pemuda Rakyat, itu sudah therek (berbaris) di pinggir kali ini, mau mengadakan pertempuran besar. Iya. Itu kali di depan saya itu, bukan kali jurang. Itu namanya Kali Bajingan, namanya Kali Bajingan. Itu sepanjang kali itu, yang sebelum utara kali Pemuda Rakyat, yang sebelum kidul kali ini Pemuda Ansor, Pemuda Marhaen.

Itu baru cara (bahasa) wayangnya masih sumbar-sumbaran (adu mulut) gitu, lho. Itu sekitar jam 11, 12, setengah 12. Saya juga ikut pakai kathok cendhak (celana pendek), pakai kaos sport (olahraga). Saya lihat. Lalu terjadi pertempuran. Puncaknya pertempuran itu sekitar

jam setengah satu. Pakai ketapel itu, lalu yang untuk pelurunya itu tidak hanya kerikil batu, tapi potongan besi cor itu lho, besi baja potong-potong, pakai geranggang (bambu runcing), pakai sabit. Lalu jam satu itu Pemuda Ansor, Agama, dengan Marhaen ini mundur dari pertempuran. Otomatis Pemuda Rakyat ini bisa menguasai daerah selatan kali. Terjadi anu, pesta kemenangan. Karena di perempatan sebelum baratnya rumah saya itu markas pertempurannya. Itu ada dikirim oleh ibu-ibu pedesaan. Dikirim, ada gemblong (penganan dari tepung ketan yang digoreng dan bersalut gula jawa), jadah (penganan dari ketan putih, uli). Iya, ada nasi. Minumnya itu ada air, ada wedang (minuman hangat), wah senang-senang di situ.

Lalu let (selisih) sebentar, itu ada satu truk datang, polisi dari Polsek Jatinom. Dulu namanya belum Polsek, distrik apa, apa itu dulu? Itu naik truk. Kirakira polisinya cuma ada lima orang. Lalu polisi itu mengadakan tembakan, tembakan peringatan itu dan polisi itu bengak-bengok (teriak-teriak), orang-orang itu suruh bubar. Semua bubar, semua bubar, polisi juga. Itu agak tergesa-gesa, polisinya juga takut ngelihat massa yang sampai ribuan. Polisinya pergi, saya itu duduk-duduk di depan rumah saya. Tidak tahunya dari sebelum timur, itu ada bendera RPKAD. Ada bendera RPKAD. RPKADnya di belakang, tapi yang di depan itu massa. Massa dari Agama. Dia takbiran, ‘Allahu Akbar,’ gitu. Nah, ini membaki ngalor (ke arah utara), membaki arah orang PKI.

Wah semua lari tunggang-langgang, termasuk saya. Lalu let satu jam kemudian saya lihat di sebelum selatan itu, Dik, ada asap tebal. Nah saya dibilangi Pak Ndoyo, 'Le (Nak) kamu jangan nangis. Wah rumahmu dibakar.' Saya langsung nangis.

Nah lalu, ganti mbok (ibu) saya memikirkan nasib bapak saya. Nah saat itu, kurang lebih satu minggu kemudian ibu saya menyarter dokar, dulu belum ada mobil. Si mbok sama anak-anaknya itu disuruh naik, itu ke Kodim, ke Kodim itu sampai tiga hari. Tiga pagi berturut-turut, itu masih bisa ketemu sama tentaranya, memberikan jawaban. Itu mengatakan gini:

'Kamu nyari suaminya?'

'Inggih (ya) Pak.'

'Kalau nyari suaminya, sana! Tanya sama algojo-algojo itu, sudah membunuh suami kamu belum?'

Nah itu, si mbok di situ nangis sama anak-anaknya, pulang. Pulang. Lha, sampai kira-kira dua bulan, ibu saya ini belum dengan ceritanya bapak saya itu nasibnya bagaimana. Itu belum dengan. Setelah kurang lebih dua bulan, ada seorang perempuan ibu-ibu, itu temannya mbok saya, rumahnya Manjungan, itu memberikan kabar bahwa bapak sudah dibunuh, dibunuh ramai-ramai di Mlandang. Lha nggak tahunya bapak pada hari Selasa Legi sampai di kelurahan, itu nggak tahunya bapak itu dikroyok sama massa, dibunuh ramai-ramai, massa dari Tempur Sari.

Pada waktu kejadian, Sujoko masih duduk di bangku SD kelas enam. Ketika ujian kelulusan SD, oleh gurunya ia dipanggil ke ruang guru. Di ruangan itu, ia dipukuli oleh guru-gurunya dengan tangan kosong dan penggaris karena dianggap sebagai anak seorang PKI.

Terbukanya situasi untuk melakukan segala bentuk kekerasan memungkinkan siapa pun memanfaatkan situasi tersebut. Bayangkan saja jika setiap orang dapat menentukan nasib orang lain hanya karena keinginan memiliki harta, isteri, dan anaknya yang cantik; setiap orang dapat saja kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk nyawanya sekali pun, hanya karena ia menjadi anggota atau simpatisan PKI.

Tuduhan sebagai anggota atau simpatisan PKI merupakan hantu yang paling menakutkan pada masa itu. Karena jika tuduhan PKI mengarah pada diri seseorang, akibatnya sudah pasti terukur: setiap saat dapat ditangkap, ditahan, dibuang, atau dibunuh. Setiap orang punya potensi untuk menjadi sasaran penangkapan; jangan lagi mereka yang memang menjadi anggota atau simpatisan PKI, mereka yang mempunyai hubungan pertemanan dengan seseorang yang menjadi anggota atau simpatisan PKI pun akan merasa dan dianggap sebagai orang PKI.

Bahwa banyak masyarakat atau organisasi massa terlibat langsung dalam pembunuhan massal anggota atau simpatisan PKI beserta ormas pendukungnya, itu memang tidak bisa dihindari sejarah. Namun, haruslah diingat

bahwa masyarakat atau organisasi massa tidak bisa bertanggung jawab ‘sendirian’ terhadap peristiwa tersebut, karena massa bergerak; menangkap dan membunuh, tidaklah sendirian. Ada sebuah sistem dan kebijakan yang menggerakkan massa. Ada sebuah ruang yang memungkinkan masyarakat berbuat sadis. Ada bentuk-bentuk dukungan riil terhadap masyarakat untuk melakukan kekejaman dengan skala yang begitu luas. Tanpa ada penciptaan ruang sedemikian luas untuk melakukan segala bentuk kekerasan, rasanya sulit diterima nalar bahwa dalam tempo bersamaan, secara tiba-tiba, rakyat menjadi pembunuh sesamanya di mana-mana, tanpa usaha pencegahan sedikit pun.

Sasmo Atmojo dari desa Karang Gempol, Pati, menyerahkan diri ke polisi karena banyak anggota Banser yang memburunya. Sebelum Peristiwa 65, ia menjadi anggota Dewan Harian PKI tingkat kecamatan. Ia sempat mencoba melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gunung dekat desanya, tapi akhirnya terpaksa menyerahkan diri juga.

Pada waktu 65, itu memang saya tunggu-tunggu komando dari Bung Karno. Pada waktu itu Bung Karno komando, ingat saya itu. ‘Revolusi ini mundur satu langkah,’ gitu. Wah kok mundur satu langkah? Terus saya mengikuti radio-radio itu kan. Bulan sebelas. Terus ada operasi. Malam itu operasi RPKAD, dua truk itu penuh, penuh RPKAD, dengan Brimob, baretnya merah. Di sini dan di jalan itu. Nah, saya kan tahu ada operasi, nggoleki

wong (mencari orang) PKI. Saya mendengar kalau di kota-kota Pati sudah ditangkapi, kan begitu. Terus kalau saya tidak lari, ditangkap. Saya lebih baik dibunuh, kalau ditangkap. Pikiran saya begitu. Terus saya, Wah ini, nek keno aku mesti dipateni (jika kena aku pasti dibunuh). Saya keluar dari jendela. Anak-isteri saya masih di rumah itu. Setelah ada operasi anak-isteri saya lari semua. Saya tidak tahu itu larinya di mana, saya ndak tahu. Saya terus jalan ke sawah. Di sana itu saya nrunut (menelusuri) sawah, saya masuk kali dulu. Massa banyak. Saya terus lari sampai di gunung itu, di Sumber Polomarto. Nah itu, setelah ada kira-kira, ada satu bulan.

Lah, terus setelah itu, operasi sampai di Watu Lawang itu. Lah, saya turun. Pada waktu saya turun, itu adik saya belum kepethuk (bertemu), belum ketemu adik saya, masih di gunung itu. Setelah malamnya, ada operasi lagi. Ada operasi lagi. Lho saya mendengar kata kok, 'Selamet ketembak! … Selamet ketembak!' begitu. Lah saya terus turun mendekati desa itu. Saya tanyakan penduduk di situ, 'Iya. Memang ketembak,' lah itu. Ketimbang adikku mati korban, aku menyerah pisan, ben dipateni ben mati. Arep nggo apa? (Aku menyerah sekalian, biar dibunuh, biar mati. Mau dijadikan apa?) Saya begitu, nekad saya begitu. Setelah saya turun di situ, adik saya sudah dibawa di Tayu. Kabarnya, itu saya ndak tahu itu, dibawa ke Tayu. Terus saya jalan turun, tidak jalan ke luar jalan, tidak, jalannya di dalam sungai, jalan di dalam sungai, menurut

sungai itu. Kalau jalan lewat jalan ya digropyok (disergap) lagi, begitu.

Terus saya sampai di rumah. Titik rumah saya tidak ada, dibakar itu nggak tahu saya. Sudah, saya di rumahnya mbakyu. Terus saya akan menyerah. Sini sudah tiap malam itu Banser-Banser itu, gimana ya. Saya terus lewat Desa Jatiroto. Akan saya suruh mengantarkan kamituwo [kepala dukuh] Dongkor, Rebo. Terus saya jalan, jalan antara satu kilo dari kantor polisi, terus jalan ke barat menuju kantor polisi. Itu banyak Banser-Banser itu. Saya terus masuk kantor polisi.

Hal serupa juga dialami oleh Suprapto dari Klaten. Sebelum peristiwa G-30-S, Suprapto aktif dalam organisasi BTI (Barisan Tani Indonesia) tingkat kecamatan. Setelah aksi-aksi penangkapan di Klaten dimulai, dia nyaris tewas dianiaya oleh massa yang menangkapnya.

Sebelum saya tertangkap, itu kalau kondisi untuk Kecamatan Kota Klaten, dan tempat saya, itu kondisinya ndak ada apa-apa itu. Ndak ada apa-apa, baik. Tapi, setelah tiga bulan, Batalyon E masuk, Batalyon F masuk, RPKAD, ya ini GPI [Gerakan Pemuda Islam Indonesia] dan lain sebagainya, kemudian Pemuda Ansor, Pemuda Nasionalis baru bergerak. Jadi karena payungnya belakang militer itu umumnya, umumnya, payungnya belakang. Jadi kalau tanpa militer di belakang dia juga itung-itung, nggak berani.

Saya tahu, ‘Lha ini kok ada pengejaran macam ini.’ Saya keluar rumah, bablas (lari). Sudah dibuntut, kejar. Ya sudah, mau gimana lagi. Saya lari rumah ya pontang-panting. Ha, rumah saya mau dibakar, tapi dielingke (diingatkan) sama tetangga waktu itu, ‘Jangan. Ini bukan rumahnya itu, ini rumahnya mertua.’ Ha ndak jadi dibakar.

Yang namanya linggis, geranggang (bambu runcing), pukulan, itu entah, pada waktu itu saya ndak tahu. Saya ndak kroso (tidak merasakan), terakhir itu pedang. Nah saya kena pedang, kaki sama kepala, jatuh. Saya ketahuan, ponakan saya massa Marhaenis, ‘Ini Pak Cilik to iki (Paman kah ini)?’ Saya ditulung (ditolong) waktu itu, dipikul, masukkan, naikkan truk, terus penjara.

Terus terang aja, dulu itu ada dua massa saling berebutan. Massa agama dan massa Front Marhaenis, dulu. Ini saling rebutan. Nah yang nganu saya itu massa agama, yang ngremuk (meremukkan) saya. Itu massa drop-dropan. Drop. Jadi satu kampung misalkan, itu bisa didrop dari kampung sini, kampung sana. Jadi satu. Itu modelnya. Ya nggak bisa lari. Saya dikabarkan sudah mati, dulu, ‘Wah Pak Suprapto wis mati nang kono, dikepruki wong.’ (Wah, Pak Suprapto sudah mati di sana, dipukuli orang.) Tapi kenyataan masih hidup. Dulu itu rusuh kok. Rusuh. Rusuhnya gini, kalau hukum rimba itu ada lima unsur kalau nggak salah, ‘obong omahe, pateni sing duwe, pek bojone, rayah bandane (bakar rumahnya, bunuh pemiliknya, ambil isterinya, jarah hartanya).’

Sering terjadi, dalam melakukan penangkapan, massa yang dikerahkan tidak berasal dari daerah yang sama dengan orang yang menjadi sasaran penangkapan. Kelompok yang melakukan penangkapan biasanya gabungan masyarakat dari beberapa desa yang telah diorganisir rapi. Sebab, penangkapan terhadap orang-orang ‘kiri’ yang berbasis massa besar di tiap-tiap desa tidak akan berlangsung efektif jika hanya mengandalkan kekuatan satu desa. Sementara itu, peran warga lokal adalah sebagai algojo atau penunjuk siapa-siapa saja warganya yang harus ditangkap atau dibunuh.

Penangkapan Sewenang-wenang

Semua eks-tapol yang saya temui masih memendam kebingungan tentang alasan penangkapan mereka. Namun, pada saat itu siapa yang berani bertanya kepada para penguasa: ‘Kenapa saya ditangkap? Apa alasan saya ditangkap?’ Istilah pembelaan tidak pernah diletakkan pada diri tapol. Sedangkan menjawab secara jujur pertanyaan yang diajukan pemeriksa saja, nyawa bisa melayang. Siapa pun orangnya, atau apa pun kekuatan yang ia miliki, ketika telah dinyatakan sebagai anggota atau simpatisan PKI, ia tidak akan mampu menganulir tuduhan tersebut.

Jangan dibayangkan bahwa setelah ditunjuk kemudian dilakukan pengecekan ulang untuk membuktikan benar-

tidaknya orang tersebut anggota atau simpatisan PKI. Pada saat itu, ujung jari telunjuk sangat menentukan nasib seseorang. Begitu ujung jari telunjuk orang mengarah kepada kita dan mengatakan bahwa kita adalah PKI, serta-merta massa akan mengejar, menangkap, bahkan membunuh, tanpa memberi ruang untuk menjelaskan siapa kita sebenarnya, apalagi membela diri.

Kesaksian Yahya dari Bawen, Semarang, menggambarkan bagaimana sembarangannya proses penangkapan pada saat itu. Yahya adalah anggota PNI yang waktu itu berprofesi sebagai tukang cukup. Pada masa awal pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Yahya duduk sebagai anggota Panitia Land Reform[8] dari unsur PNI.

Saya pada waktu itu turut orang tua. Kerjanya tukang cukup, potong rambut. Sebelum saya punya keluarga, saya nganu, suruh mengganti bapak saya itu. Bapak saya sudah tua. Selesai itu, lama, lama, lama, terus saya didekati oleh orang-orang, pada waktu itu ya orang-orang PNI, nah terus suruh masuk warga PNI. Setelah itu terus saya masuk PNI. Setelah masuk PNI, terus saya diambil menantu ketuanya PNI, namanya Pak Kamto, ketua cabang Bawen. Ya kurang lebih tahun 64, saya ditunjuk mertua saya mewakili dari panitia Land Reform poros Nasakom dari PNI, wakil PNI. Nah terus, satu tahun terus saya ada huru-hara ramai-ramai itu. Saya tahu-tahu dipanggil oleh polisi. Ada suratnya, saya diberi surat, dipanggil, suruh datang ke kantor. Nah maksudnya, saya

ndak tahu, ndak tanya. Saya datang ke kantor, nah ngomongnya begini:

‘Sudah, duduk situ!’

‘Lha, maksudnya apa saya datang ke sini?’

‘Ya pokoknya duduk!’

Terus saya duduk. Nah, setelah duduk itu ya ndak ada yang ngomong-ngomong dengan saya. Pokoknya duduk ya sendiri, sekalipun kawannya banyak di situ, di kantor polisi itu, tapi saya nggak kenal ya toh. Karena ya orang satu kecamatan ya saya ndak kenal, pada waktu itu ada yang kenal ada yang tidak. Karena yang satu kampung kenal, kalau yang nggak, ya nggak. Terus truknya datang, yang akan mengangkut orang yang mau ditawan itu, saya masih duduk. Ha, saya tidak merasa, bahwa saya itu bukan orang PKI, ya to. Saya orang PNI.

‘Lha mengapa malah duduk di situ?’

‘Ya duduk sini.’

‘Sana lho, naik truk!’

‘Lha mau ke mana?’

‘Wis (sudah), pokoknya turut!’

Lha turut, turut mana? Perasaan saya ya, ‘Ha saya itu orang PNI, kok saya suruh masuk truk dibawa dengan orang-orang PKI itu maksudnya apa, saya ndak tahu.’ Setelah itu saya sampai ke Ambarawa. Hampir satu tahun itu baru diproses, sekali, ditanya:

‘Saudara mengapa di sini?’

‘Ya ndak tahu maksudnya.’

‘Mengapa di sini?’

‘Ha maksudnya saya ndak tahu. Datang sini itu yang nunjuk saya itu polisi, suruh datang ke sini, terus dimasukkan Beteng sini [nama penjara], Ambarawa.’

‘Lha, Saudara anggota PKI?’

‘Bukan. Saya anggota PNI Front Marhaenis.’

‘Mengapa kok ditawan?’

‘Ya ndak tahu maksudnya.’

‘Masa kalau Saudara tidak PKI ya tidak mungkin dibawa ke sini.’

‘Lha ya ngomong siapa itu?’

‘Lha nyatanya Saudara itu ditawan itu. Itu orang PKI.’

‘Saya bukan orang PKI’, saya bilang begitu. ‘Saya orang PNI.’

‘Moso’ PNI kok bisa masuk penjara?‘

‘Lha masuk penjara dan tidak itu kan bukan kehendak saya. Saya hanya memenuhi panggilan polisi. Nanti Kalau saya nggak datang dianggap menentang.’

Istri Yahya sedang mengandung anak mereka yang ketiga ketika ia ditangkap. Setelah beberapa bulan dalam penjara, anak yang dikandung tersebut lahir tanpa disaksikan ayahnya. Yahya menerima kabar kelahiran anaknya dari seorang tetangga yang sedang membesuk tapol lain.

Ketika dipanggil polisi, suruh datang ke kantor, anak saya dua, masih kecil-kecil, umurnya kurang lebih satu tahun dengan satu setengah tahun. Isteri saya dulu ya sehat pada waktu itu, sedang hamil hampir tiga bulan, hampir tiga bulan. Terus saya ditawan itu hampir satu

tahun. Hampir satu tahun itu, ya mungkin enam bulan terus lahir itu, anak saya ketiga. Setelah itu, isteri saya setelah melahirkan, karena kesibukan dalam membina anak tiga itu, ya kerepotan atau apa. Dia cuci-cuci di kali. Setelah itu karena stres atau bagaimana, saya ndak tahu, wong saya dalam tawanan ya. Ha terus terjun ke kali itu. Ha, terjunnya itu karena bunuh diri, atau bagaimana saya ndak tahu prosesnya. Atau karena sakit, saya ndak tahu. Ha, tahu-tahu saya diberi tahu dengan polisi:

'Suruh datang ke kantor.'

'Maksudnya apa?'

'Supaya pulang sebentar.'

'Ha, maksudnya apa disuruh pulang? Ya pulang terus atau pulang anu?'

'Ya pokoknya nanti terserah itu, nanti petugas yang bawa Saudara nanti pulang.'

Tahu-tahu sampai ke kantor polisi sini terus, 'Itu keluarganya meninggal dunia, supaya Saudara datang ke sana!' Terus saya dikawal polisi dua. Setelah itu ya saya menunggui isteri saya meninggal itu kan. Setelah itu ya saya terus dibawa lagi ke penjara lagi.

Saya nggak diberi tahu kalau isteri saya melahirkan, begitu... Pokoknya saya datang ke rumah menengok isteri saya, sudah meninggal itu. Tanya orang yang ndak berani, orang yang mau tanya saya, ndak berani, karena pada waktu itu ya gawat memang... Ha, karena lama ditinggal ibunya, yang menyusui ndak ada. Bayinya ya terus ikut meninggal.

Yahya tidak pernah tahu pasti penyebab kematian isterinya. Sesungguhnya, ia ingin bertanya pada tetangga-tetangganya: apakah isterinya meninggal karena terperosok ke sungai atau bunuh diri karena tidak tahan menderita setelah sang suami ditahan? Terbersit juga keinginan Yahya untuk menengok anaknya yang baru lahir. Ia ingin tahu: di mana anaknya, bagaimana nasibnya, siapa yang merawatnya? Namun, semua pertanyaan dan keinginan terpaksa disimpannya sendiri karena yakin, kalaupun disampaikan, para tetangga tidak mungkin berani menjawab. Yang menghambat para tetangga hanya satu: Yahya seorang tapol. Demikian juga ketika anaknya yang baru lahir menyusul kematian ibunya, lagi-lagi Yahya harus bermain dengan dugaannya sendiri. Dalam pikirannya, penyebab paling rasional atas kematian anaknya adalah karena tidak ada yang merawat dengan baik.

Tindakan menjauh para tetangga bukan karena mereka takut pada Yahya, tapi pada efek yang bisa jadi akan mereka terima seandainya berbicara dengan seorang tapol. Para tetangga sadar betul, sangat mungkin mereka dikelompokkan dalam satuan yang sama: anggota PKI, jika tampak mengenal, apalagi akrab, dengan orang-orang PKI. Pada waktu itu, umum dijalankan prinsip: dengan saudara sekalipun, lebih baik pura-pura tidak pernah kenal ketimbang di-PKI-kan.

Setelah menjalani pemeriksaan, Yahya dipindah ke Kamp Penahanan Salatiga. Ia semakin tidak mengerti

dengan seluruh penahanan ini: kenapa ia dikirim ke Salatiga? Ia juga tidak tahu akan diapakan setelah sampai di sana: ‘Di Salatiga saya menginap selama empat hari, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Setelah menginap empat hari saya dipulangkan sampai sekarang.’

Sekalipun sudah jelas Yahya adalah anggota PNI, ia tetap harus menjalani masa penahanan. Setelah dibebaskan dari tahanan, dalam surat pembebasan dinyatakan: Yahya bukan anggota atau simpatisan PKI. Ia adalah anggota PNI Front Marhaenis. Namun, tidak ada jaminan bahwa dengan bermodalkan surat keterangan tersebut Yahya akan mendapat rehabilitasi, apalagi kompensasi. Untuk hal-hal yang bersifat administratif pun, Yahya masih mengalami diskriminasi: di dalam KTP tertera tanda ET (Eks-Tapol); untuk pergi keluar kota harus memperoleh ijin dari pengurus desanya.

Hal serupa juga dialami oleh Wakijan dari Hargorojo, Purworejo. Wakijan bukan anggota atau simpatisan organisasi mana pun, tapi ia harus masuk penjara dan mengalami pembuangan ke Pulau Buru selama belasan tahun. Ia hanya seorang petani miskin yang buta huruf dan tidak dapat berbahasa Indonesia secara baik. Ia tinggal di pelosok desa, tapi dipaksa harus mengakui keterlibatannya dalam peristiwa G-30-S. Bukti memberatkan yang diajukan petugas pemeriksa adalah lubang di samping rumah Wakijan. Ia dituduh menggali lubang tersebut untuk mengubur para jenderal, layaknya lubang bekas sumur tempat tujuh perwira dikuburkan di

Lubang Buaya. Padahal, jangankan terlibat dalam peristiwa di Jakarta, letak persis kota itu saja Wakijan tidak tahu. Tak seorang jenderal pun pernah terlihat di desanya yang terpencil. Lubang yang ada di samping rumah Wakijan sudah ada jauh sebelum peristiwa G-30-S: lubang itu merupakan sumur untuk mengambil air.

Setengah mati Wakijan berusaha meyakinkan petugas pemeriksa bahwa tuduhan itu tidak benar. Betapa pun ia sudah mengajukan berbagai alasan yang menurutnya rasional dan memberi pengakuan yang sejujur-jujurnya, hukuman tetap tidak terelakkan. Selama proses interogasi, ia terus didera petugas dengan pemukul bambu hingga alat pemukul itu hancur dan Wakijan tidak bisa berjalan selama satu minggu. Ia sendiri baru mendengar tentang G-30-S setelah ditangkap pada 23 November 1965. Sebelumnya, ia tidak tahu-menahu tentang peristiwa yang telah memicu petaka bagi dirinya dan banyak orang lain itu. Ketidaktahuan Wakijan mudah dipahami, bagaimana tidak, sudah memasuki tahun 2000 saja, tempat tinggal Wakijan di daerah pegunungan dekat Purworejo masih sulit dijangkau: jika hujan becek, jika kemarau tandus. Sulit sekali mendapatkan air di daerah tersebut. Bisa Anda bayangkan bagaimana situasi desa itu sekitar 1965.

Saya taksih (masih) umur 10 tahun, bapak masih, ibu sudah meninggal. Meninggalnya itu sakit, babaran (setelah melahirkan). Saya nggak sekolah. Baca atau menulis tidak bisa. Pecah itu saya belum tau, saya itu

tanggal 23 November itu diambil. Saya itu nggak nguoi apa-apa. Pecahnya di Jakarta saja ndak tau.

Malam itu ada surat panggil: ‘Menghadap di Kecamatan.’ Terus berangkat jam delapan ke Camat dulu, terus ke Kodim Purworejo. Penjara Purworejo ndak amot (tidak muat), pindah ke Kutoarjo, pabrik mi itu. Sampai di Purworejo ndak ada apa-apa, jadi ndak diperiksa, sudah, dilebokke (dimasukkan) penjara saja. Tidurnya sudah ngringkuk (meringkuk) saja, di jubin-jubin (lantai) itu.

Sesak niku (penuh itu). Makannya? Alah, kalau ndak dikirim dari keluarga ya ndak makan. Makannya itu jagung, gerontol (bijig jagung). Seket iji (lima puluh butir) satu hari. Kalau itu ndak begitu, ya bulgur (sejenis gandum). Kalau nggak ada bulgur, niku (itu), tekat–beras tapi pake jagung, nasi jagung.

Nggak ada diperiksa apa-apa. Kalau diperiksa sudah lama di sana, tahun sewidak pitu (enampuluh tujuh) periksa, periksanya di sana. Saya itu ndak bikin apa-apa ditanya kudu mengakoni (harus mengakui). Bagaimana? Wong ndak ada. Saya itu bikin blumbang (lubang), ya ndak tau apa blumbang bagaimana, bikinnya ada yang nggen (di tempat) saya. Tempat saya ada sumur, sumur saja, sumur dari lepen (sungai). Tapi bikin blumbang itu ndak tau.

Tanyanya, ‘Anggotanya apa?’ ‘Saya itu nggak pakai anggota, saya itu mung (hanya) partisan, saya itu.’ Saya dulu bikin perbuatan gini-gini nggak, begitu. Wonge (orangnya) saya itu, saya itu, kalaau di sana itu main

gebuk. Karepe (maunya) bagaimana. Saya digebuki itu ndak kerasa, ndak apa-apa. Sudah, saya kalau ngakoni (mengakui) ndak nyata nggih (ya) saya ndak mau. Saya digebuki, saya satu minggu ndak bisa tangi (bangun).

Sudah, makannya didulang (disuapi). Obatnya itu suruh–daun sirih itu direbus pakai air anget, dibegitu, terus ditepleki (dihaluskan), diwedaki (dibalur) di punggung, terus kempes. Pukulnya pakai bambu. Bambu perapatan (dibelah menjadi empat) itu. Nganti (hingga) remuk, yang mukuli Tim itu. Sebagian kejaksaan, polisi. Ha sudah mati semua, yang meriksa itu sudah mati semua, ada itu Pak Margono, sa‘ niki bakul pit (sekarang berdagang sepeda) di Purworejo.

Jika melihat sosok Wakijan, tentunya kita akan bertanya: ‘Apa standar yang digunakan tentara dalam mengklasifikasi tapol?’ Wakijan yang tidak dapat baca-tulis serta tidak dapat berbahasa Indonesia dengan lancar, menyandang Golongan B dan harus menjalani pembuangan ke Pulau Buru.

Apa yang dialami Yahya dan Wakijan serta tapol-tapol lain menjelaskan pada kita bahwa banyak penangkapan yang memang tidak didasari alasan yang logis dan sama sekali tak bersangkut-paut dengan peristiwa G-30-S. Setiap orang dapat mengadukan orang lain terlibat dalam peristiwa G-30-S, dan setiap orang dapat diajukan sebagai orang yang terlibat dalam peristiwa G-30-S. Jika diberi ilustrasi mungkin seperti ini: ibaratnya kita ada dalam sebuah barisan orang yang berdiri rapi, kemudian

seseorang yang berdiri di depan barisan melempar batu sambil teriak, ‘Yang kena batu ini berarti PKI!’ Siapa pun dalam barisan pasti berpeluang terkena batu. Jika sudah terkena tuduhan, tidak seorang pun kuasa menolak, dan tidak seorang pun mau dan mampu memberikan pertolongan, karena mereka tidak berani menanggung risiko tercemar noda yang sama.

Dalam kasus Yahya dan Wakijan, penangkapan mereka dilakukan dengan cukup sopan. Mereka tidak diculik secara paksa dan diseret ke penjara. Yahya dikirimi surat resmi yang memintanya datang ke kantor polisi, sedang Wakijan diminta datang ke kecamatan. Keduanya mematuhi panggilan tersebut karena yakin mereka tidak berbuat salah. Namun, aparat negara memperlakukan mereka, sekaligus sebagai pengkhianat dan kriminal. Pola penangkapan seperti ini umum terjadi. Pihak keamanan atau pamong desa mengeluarkan surat pemanggilan resmi, tapi alasan dan tujuan pemanggilan tidak disebutkan jelas. Namun, karena umumnya mereka yang dipanggil tidak apriori dan tidak berpretensi apa-apa, mereka patuh memenuhi panggilan tersebut tanpa perasaan curiga apalagi takut. Mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa setelah hadir di tempat yang sudah ditentukan, besar kemungkinan mereka tidak diperkenankan pulang karena dituduh terlibat G-30-S.

Penyanderaan

Di samping pola-pola yang sudah disebut di atas, beberapa fakta menunjukkan adanya praktik-praktik memancing keluar orang yang menjadi target penangkapan dengan menyandera anggota keluarganya. Biasanya penyanderaan dilakukan jika korban tidak atau sulit ditemukan, entah karena menyembunyikan diri atau memang sedang berada di tempat lain. Yang menjadi sandra biasanya adalah anggota keluarga korban. Dengan demikian, korban akan dengan sukarela menyerahkan diri untuk membebaskan orang yang dikasihinya tersebut.

Salah seorang sandra dari keluarga korban yang sempat saya wawancarai adalah Ibu Lasmini dari Purwodadi. Ibu Lasmini tidak pernah bersekolah. Sebagai anak tertua dalam keluarga, ia harus membantu kedua orang tuanya, terutama dalam mengasuh delapan orang adik-adiknya. Sekitar 1950an, tepat berumur 15 tahun, Ibu Lasmini dijodohkan orang tuanya dengan seorang petani muda, Kusdi. Pada 1955, anak pertama lahir, laki-laki, dan sampai dengan 1965, mereka sudah dikaruniai lima orang anak. Ketika itu marak bertumbuhan partai-partai politik. Ibu Lasmini tidak tahu suaminya berkecimpung dalam ormas atau partai yang mana. Yang ia tahu hanyalah bahwa suaminya mengurus para petani. Ia teguh berpegang pada falsafah Jawa bahwa isteri yang baik harus patuh pada suami, dan kewajiban isteri hanyalah mengurus rumah tangga dan anak-anak.

Setelah peristiwa G-30-S, Kusdi menjadi target operasi tentara. Rumah mereka sempat diobrak-abrik. Semua dokumen atau apa pun yang berupa kertas dibawa oleh tentara. Karena saat dicari di rumahnya Kusdi tidak ada, sebagai gantinya para tentara membawa Ibu Lasmini untuk diadikan sandra sampai Kusdi berhasil ditangkap.

Kegiatane bapak ngurusi keluarga tani. Bapak di organisasi kula ngghij setuju mawon. Wong kula bagian teng ngomah, inggih setuju. Mboten napa-napa kula riyin. Mendukung.... Tahun 65, mboten kelingan bulane, naliko ditangkep niku kula enten ngomah. Nggih, onten ngomah kula dioyak-oyak kaleh niku, ken nduduhke bapak teng pundi. Tapi wong kula mboten ngerti lungane bapak nggih, kula nggih sanjang nek mboten ngerti, ngeten. Kula sanjang nek mboten ngerti. Tete pula ontene mung ditodong, bedhil nika ndeyan, teng jeron ngomah. Sing nodong sing ngoyak kula niku wau. Sing ngoyak nggih RPKAD-RPKAD niku, mbok menawi, wong ngangge kathah plonteng-plonteng nika ndeyan. Kathah. Enten sing teng jawi, enten sing mlebet, enten sing napa lah, kula ngantos ngires. Saumpamane kula cilik ati nggih, pun ngglimpang dek naliko semanten nika... Nek kula ken nduduhke Pak Kusdi niku, kula nggih mboten ngerti manggene, nggih wong niku kesah. Njur kula dibeto teng kantor polisi, ditahan.

Ditahan. Enten seminggu niku mbok menawi. Lha terus gentos bapak teng Gundi, kantor polisi... Mriku mlebet, kula medal, ngeten... Bapak ngghung ngomong ngoten, ‘Ya

wis Mak saiki kowe bali, aku sing nang kene,’ ngoten. Perkoro anak-anak kekurangan apa-apa, ya wis apa didol saeneke,‘ ngeten toh, ’nggo mangan anake,‘ ngoten. Bareng em pun teng Purwodadi ngghig, em pun meling ngeten. ’Anu, ya wis saiki leh mu arep momong anak kono mak, aku ora iso ngurusi, wong aku ning kene nggone,‘ ngeten. Lha kula nggh entene ngghih ming nangis, ndeyan. Wong kula tiyang esteri, entene diserahi anak sa'monten kathahe toh. Anak limo niku napa mboten kathah?

(Kegiatannya bapak mengurusi keluarga tani. Bapak di organisasi, saya ya setuju saja. Karena saya bagian di rumah, ya setuju. Tidak apa-apa saya dahulu. Mendukung... Tahun 65, tidak ingat bulannya, ketika ditangkap itu saya berada di rumah. Iya, di rumah, saya dipaksa oleh itu, disuruh menunjukkan bapak berada di mana. Tapi karena saya tidak mengerti perginya bapak, ya saya mengatakan kelau saya tidak tahu, begitu. Saya mengatakan kalau saya tidak tahu. Tetap saya adanya hanya ditodong, senjata api itu, di dalam rumah. Yang menodong yang paksa saya itu tadi. Yang paksa ya RPKAD-RPKAD itu, mungkin, karena memakai banyak loreng-loreng. Banyak. Ada yang di luar, ada yang masuk ke dalam, ada yang apalah, saya sampai sedih. Andaikan saya kecil hati ya, saya sudah jatuh pingsan pada waktu itu... Kalau saya diminta untuk menunjukkan Pak Kusdi itu, saya ia tidak tahu tempatnya, karena dia itu sudah pergi. Lalu saya dibawa ke kantor polisi, ditahan.

Ditahan. Sekitar satu minggu mungkin. Lha terus gantian bapak di Gundi, kantor polisi. Dia masuk, saya keluar, begitu... Bapak hanya berbicara seperti ini, 'Ya sudah Bu, sekarang kamu pulang, aku yang di sini,' begitu. 'Masalah anak-anak kekurangan, ya apa saja dijual seadanya,' begitu kan, 'untuk makan anak-anak,' begitu. Ketika sudah di Purwodadi ya, sudah mengingatkan seperti ini, 'Ya sudah, sekarang sana, kamu mengasuh anak, Bu. Aku tidak bisa merawat, karena aku di sini tempatnya [penjara],' begitu. Saya ya adanya hanya menangis pada waktu itu. Karena saya hanya seorang istri, diserahi anak segitu banyaknya. Anak lima itu apa tidak banyak?)

Setelah sekitar seminggu Ibu Lasmini ditahan, Kusdi tertangkap. Ibu Lasmini dilepaskan dari tahanan Kantor Polisi Gundi. Ia masih sempat membesuk suaminya hingga suaminya dipindahkan ke Kamp Penahanan Purwodadi. Setelah beberapa kali besuk, ia tidak lagi bertemu suaminya, namun ia takut bertanya kepada petugas.

Terakhir besuk bapak dinane Selasa Wage. Kula Rebone mrika, mrika m pun mboten wonten. Kula nggih mboten tangled sing neka-neka. Mboten wani teko napa-napa kula. M pun byar, mboten wonten, kula nggih klepat wangsul. Kula nggih nggrantes. Wong anak tesih cilik-cilik ditinggal bapake, nggih nggrantes. Sedih, susah, napa-napa m pun morat-marit terus mboten enten, nggih sedeh to?

(Terakhir besuk bapak harinya Selasa Wage. Saya hari Rabunya ke sana, dia sudah tidak ada. Saya terkadut

berani menanyakan yang macam-macam. Saya terkadut berani bertanya apa-apa. Setelah tahu tidak ada, saya terkadut berani di ditinggal bapaknya, ya sedih sekali. Karena anak masih kecil-kecil ditinggal bapaknya, ya sedih sekali. Sedih, susah, apa-apa sudah tidak karuan lalu

Setelah sang suami tidak ada, ‘hilang’ ketika ditahan, Ibu Lasmini harus menjalani hidup sebagai seorang janda, ibu tunggal, membesarkan lima orang anaknya seorang diri. Berita simpang siur mengenai tapol yang dibunuh dalam tahanan kerap ia dengar di jalan dari para tetangga. Setelah mendengar berita tersebut, Ibu Lasmini sangat putus asa, lebih-lebih ketika ia sampai di rumah. Ia selalu merenungi nasib suaminya. Untuk menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya, Ibu Lasmini harus banting-tulang dan menjual benda-benda yang ia miliki sampai habis, termasuk rumah dan tanah. Segala jenis pekerjaan telah Ibu Lasmini jalani: berdagang di pasar, mengambil daun jati, hingga harus bekerja di hutan.

Sekali waktu anaknya pernah bertanya: seperti apa persisnya wajah ayah mereka, karena saat ayahnya ditangkap, dan kemudian hilang, mereka masih terlalu kecil. Keinginan tersebut tidak pernah terjawab karena foto sebagai dokumentasi keluarga satu-satunya juga dirampas oleh tentara yang memeriksa rumah mereka.

Kini kelima anak Ibu Lasmini telah menikah. Ketika akan melangsungkan pernikahan, anaknya sempat ditanya: mengapa saudaranya yang menjadi wali? Ayahnya ke mana? Ibu Lasmini hanya menjawab: ‘Bapaknya

minggat’ (pergi tanpa pesan). Jawaban seperti ini bukan bermaksud menyudutkan Kusdi, suaminya, melainkan mencegah tumbuhnya kecurigaan dan prasangka yang tidak ia inginkan. Sebab, jika menjawab suaminya meninggal, tentu pertanyaan akan berlanjut: Meninggal karena apa? Di mana kuburannya?

Pemerkosaan

Di atas sudah digambarkan bahwa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tidak hanya menimpa kaum laki-laki. Perempuan pun mengalami hal yang sama. Jika situasi kesewenang-wenangan beririsan dengan perempuan, pasti hal-hal yang berkaitan dengan keperempuanan dijadikan sasaran oleh para pelaku. Bagi mereka, pemilik kesewenang-wenangan, rasanya tidak lengkap jika hanya memenjarakan para perempuan tersebut. Mereka tampaknya merasa perlu memanfaatkan keberadaan tapol perempuan untuk kepentingan mereka. Begitu perempuan yang masuk tahanan, sering kali kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual dan pemerkosaan lah yang paling dahulu menghampiri dirinya.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan pasca peristiwa G-30-S, pelecehan seksual dan perkosaan bukanlah ekses dari penangkapan. Perkosaan terjadi bersamaan dengan penyiksaan, pelaparan, kerja paksa, dan pembunuhan terhadap para tapol pada umumnya.

Pemerkosaan tidak hanya dilakukan oleh satu-dua pelaku, dan juga tidak hanya menimpa satu-dua tapol perempuan. Perkosaan menjadi sebuah kecenderungan umum yang akan dilakukan para petugas keamanan ketika berhadapan dengan tapol perempuan, bahkan tidak jarang digunakan sebagai cara untuk beroleh keterangan dalam suatu proses interogasi.

Pengalaman menjadi tapol perempuan, serta menerima perlakuan sewenang-wenang dan amoral tak bisa dilupakan begitu saja oleh Ibu Nona. Ibu sederhana yang berasal dari Kabupaten Semarang ini tiba-tiba harus menyandang gelar tapol tanpa tahu kesalahan apa yang telah ia perbuat. Suatu hari, Ibu Nona berencana pergi ke kota kecamatan untuk memenuhi undangan menyanyi di sebuah pesta keluarga. Dalam perjalanan, Ibu Nona terlebih dahulu singgah di kantor kecamatan tempat tinggalnya. Keinginan singgah di kantor tersebut muncul saat ia melihat temannya berada di kantor itu. Ia bermaksud mengajak serta temannya pergi ke kota kecamatan. Ternyata, begitu ia masuk kantor kecamatan tersebut, Ibu Nona dilarang melanjutkan perjalanan. Tanpa sempat bertanya, Ibu Nona dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke kamp penahanan tanpa alasan yang jelas.

Ibu Nona adalah adalah ibu rumah tangga yang tidak pernah menjadi anggota atau simpatisan PKI atau ormas pendukungnya. Suaminya seorang guru SMP yang, demi meningkatkan taraf hidup, kemudian berganti profesi

menjadi pegawai salah satu departemen pemerintah. Karena kebutuhan hidup yang mendesak, sementara gaji suami kurang mencukupi, Ibu Nona kerap membantu menambah penghasilan suami dengan menjadi buruh tani pada saat musim panen di desanya. Kebetulan ia berparas cantik dan pandai menyanyi, sehingga sering diminta tampil dalam pesta-pesta keluarga, pesta kampung, atau peringatan hari besar nasional di kampungnya. Suami Ibu Nona hilang pada masa dimulainya aksi penangkapan oleh petugas dan massa. Hingga kini, Ibu Nona tidak pernah mengetahui keberadaan sang suami; tempat tinggalnya, kalau memang ia masih hidup, atau kuburannya, kalau memang ia sudah meninggal.

Ibu Nona sendiri mengalami dua kali masa penahanan. Selama masa penahanan, Ibu Nona mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh komandan penjara, hingga ia hamil dan harus melahirkan bayi perempuan di kamp penampungan.

Suami saya bekerja di Perdagangan Dalam Negeri Semarang, tapi tiap minggu pulang. Tanggal 11 bulan 11, Kalau nggak salah, terus waktu itu saya dimasukkan dulu, karena suami saya tidak di rumah. Waktu itu mau ke Ambarawa ya, mau ke Ambarawa di kecamatan itu banyak berkerumun orang, gitu lho. Terus kebetulan memang tetangga saya ada yang di situ, ya masuk di situ. Ya kan saya turun, maksud saya, saya kalau ke Ambarawa nyarter (sewa) andong itu, biasa itu kalau mau nyanyi. Terus, ‘Ya nanti bareng saja sama saya,’ saya gitu. Lha kan saya

masuk di kecamatan. Saya kira itu biasa saja, nadak ada pencidukan (pengambilan) itu lho. Wong saya kan belum tahu waktu itu. Lha saya masuk sudah ndak boleh keluar. Sampai andong saya ya terus terpaksa saya suruh pulang. Itu nggak saya bayar juga itu andongnya.

Waktu itu di situ banyak, ya ada tentara, ada polisi, anu, pamong-pamong. Tapi anehnya kok saya ndak boleh lepas dari situ 'tu, terus saya juga diangkut truk begitu saja, diangkut di truk terus dibawa ke kantor polisi, kantor polisi langsung Beteng [nama penjara di Ambarawa]. Di kantor polisi ditanya 'Organisasi apa? Kegiatannya apa?' gitu. 'Saya ndak punya organisasi.'

Memang waktu itu saya ndak ikut. Ha, waktu itu saya itu 'aktif' dan 'problem' saja itu saya itu ndak tahu artinya. Saya cuma diam saja ditanya gitu. Saya diam saja. Terus, karena yang meriksa itu ada yang kenal dengan saya, terus, 'Pokoknya' situ itu ikut organisasi, misalnya Gerwani apa-apa itu, kamu itu sregep (rajin) atau ndak? gitu. 'Oh, ya ndak to Pak. Wong saya cari makan kok tiap hari. Kalau ndak cari makan di sawah ya ndak bisa makan, gajihe (gajinya) cuma 200.' Kalo dulu itu Rp 200 itu waktu itu cukup apa? Kalau saya ikut organisasi mana untuk bayar ini, bayar itu, sedang waktu itu kan garam saja antri toh itu. Saya ndak bisa makan kalau gitu. Ya apa adanya saya ceritakan, memang sesungguhnya gitu. Ha jadi ada pertanyaannya, 'Waktu itu ke Jakarta?' Apalagi ke Jakarta, untuk makan aja ndak kok, dan ndak ada kenalan di Jakarta, ngapain ke Jakarta? Gitu.

Di Beteng itu didiamkan saja di situ. Makannya pagi gerontol satu cangkir. Jagung yang direbus tapi ndak dicuci, jadi masih ada gelabatnya (kulit jagung), masih ada ulatnya, itu direbus terus diciduki ditaruh di piring. Ya, satu cangkir itu. Itu jagung satu cangkir sehari. Lha, kalau ndak jagung, ceriping (keripik) yang direbus itu to, ceriping tela (keripik ketela) yang sudah bubukan (hancur seperti bubuk) itu direbus, itu ya dari singkong itu, itu ya satu cangkir itu. Tapi, ya ada ularnya, ada bubuknya.

Setelah di Beteng tujuh bulan, terus dikirim, ada yang di Salatiga–saya kebetulan katut (ikut terbawa) di Salatiga. Pemeriksaannya di Timperca [Tim Pemeriksa tingkat Kecamatan]. Timperca itu cuma tujuh bulan. Jadi, bulan sebelas, dua belas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, jadi 66 saya bebas.

Tapi, nasibnya orang yang sudah berbau [pernah ditahan dan dituduh PKI] kayak gitu. Di rumah itu, sedang ada pejabat yang datang ke tempat saya saja, saya terus langsung panggil di Timperca sana paginya. ‘Ada tamu siapa? Dan mengapa?’ Saya ndak tahu tujuannya, sedang kedatangan saja darah saya itu seperti beku semua. Apa saya suruh usir? Ya ndak berani toh. Jadi nggak tenteram di rumah itu.

Nah, karena terus-menerus kayak gitu, saya ambil sikap. Daripada saya sebagai ibu ndak ada yang dampingi, nasibnya kayak gitu, terus saya mengambil keputusan untuk kawin. Nah kawin itu mungkin di antara penjabat-penjabat itu ya ada yang senang sama saya. Ya istilahnya

ada yang keturutan ada yang ndak. Ya bagi yang ndak, daripada repot-repot, saya dijebloskan lagi, di Kantor Polisi Ambarawa. Kantor Polisi Simpang Ambarawa itu ya ada pejabat yang, siapa, yang mengok gitu. Ya namanya kan ‘ngeruwet’ itu. Sudah, saya sudah masuk saja masih ‘digitukan’ ya. Ha, terus saya dikirim ke Salatiga. Kirim Salatiga, di Salatiga ‘diruwet’ lagi, di kantor polisi itu. Saya ndak bisa ‘ngutarakan,’ tapi bisa membayangkan to, ‘ngeruwetnya’ gimana itu orang yang berkuasa waktu itu. Saya ndak bisa mengutarakan, tapi bisa dibayangkan nasib saya. Terus di kantor polisi karena heboh, terus saya dikirim di Kongsu, di tahanan perempuan, dijadikan satu sama ibu-ibu. Tapi saya lebih tenteram di situ daripada kantor polisi. Ha, di kantor polisi karena ya gimana ya, sampai saya itu sempat melahirkan anak satu di dalam kamp itu. Ya banyak yang nanyakan, saya juga njawab, ‘Jangan merasa takut saya membawa buah kayak begini. Karena ini tidak kehendak saya.’ Tapi, asal saya ditanya dengan siapa pun ndak mau jawab waktu itu. Ya saya terima saja keadaan yang kayak begitu. Nah, waktu itu pemeriksaan untuk ibu-ibu yang mau dilepaskan kan harus diperiksa dulu. Itu tidak pernah saya katut itu, nggak pernah diperiksa saya itu. Waktu itu belum pembebasan massal. Nah, asal ada pemeriksaan itu ndak pernah saya dikatutkan (diikutkan).

Tahun 66 bulan enam, saya masuk lagi, alasannya ‘dititipkan.’ ‘Dditipkan,’ masalahnya kan waktu itu saya mau kawin dengan polisi. Nah, kalau ndak ‘dititipkan’ saya

musti bisa kawin dengan orang itu, itu. Padahal waktu itu saya sudah mengurus surat talak. Sekalipun [suami] sudah hilang kan harus cerai dulu. Nah, saya kira itu ya dalam tahanan itu bisa diselesaikan, ternyata memang itu sengaja dipisahkan.

Tapi ya saya menyadari. Terus, ‘Kalo saya ndak pisah sama situ (kamu), berarti saya ndak bisa bebas nanti. Nah, kalau bisa kamu kawin saja.’ Itu memang saya yang nyuruh. Nyatanya setelah dia kawin, saya aman di dalam itu. Tapi waktu itu, wah, sengsara saya di dalam. Sebetulnya orang itu [si polisi] ya, waktu saya masuk di Salatiga ya sering nengok. Tapi di sana [dia] juga diancam, ‘Kalau sampai kamu masih ke sini, tukar baju.’ gitu. Ya ndak berani to. Lha pekerjaan cuma itu. Tapi saya juga berjanji, ‘Saya lepas, saya juga tidak akan mengenal kamu dan kamu jangan mengenal saya!’ gitu.

Selama 32 tahun sudah saya pendam, ndak pernah orang tahu sejarah saya kayak gitu itu. Ya pengalaman di luar maupun di kamp. Kalau merincikan, menerangkan yang sedalamnya itu tidak bisa, ndak sampai hati itu. Jadi ya makanya sampai sekarang itu pun saya masih ada tekanan batin. Ndak layak saya ceritakan itu. Ya orang pejabat-pejabat, penguasa-penguasa waktu itu kan ya gimana ya, sesuka hatinyalah terhadap orang-orang yang di situ.

Ya memang itu mungkin banyak yang terjadi kayak gitu itu, tidak hanya saya. Cuma ya ndak ada yang terjadi seperti saya. Kalau di kamp sana memang dua, saya

dengan Bu Sis itu. Tapi Bu Sis ada suami di rumah. Kan tahunya dengan suaminya. Mungkin ya terjadi, wong dia juga sering dibon [diambil aparat dari tahanan untuk disiksa, diperkosa, atau dibunuh] kok waktu itu. Sama petugasnya itu. Sekarang kalau malam mau mengadakan pemeriksaan, pemeriksaan apa? Ngebon orang itu mau bikin apa? Tapi penjaga, kalau orang itu ngebon kan memperbolehkan, wong ada suratnya bon-bonan itu.

Saya pernah dipanggil di Tim itu. Ditanya, 'Dengan siapa kamu?' Sepertinya saya mau njerit-njerit. Sedang yang nanya itu saja sebetulnya yang berbuat itu juga. Kan lucu toh itu. Tapi ya biar saja, orangnya sudah mati kok sekarang.

Jika melihat kesaksian Ibu Nona di atas, betapa luar biasanya kekuasaan pejabat publik pada saat itu sehingga dapat menentukan nasib orang lain. Seseorang yang tidak bersalah dapat dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman–yang lebih tepat disebut penyiksaan–tanpa proses peradilan sebelumnya. Tidak ada kekuatan yang sanggup membendung atau menghalangi ketika kekuasaan ini digunakan. Membendung atau menghalang-halangi sama dengan menyerahkan diri untuk menerima tuduhan yang sama dengan segala akibatnya.

Para petugas pemerintah ini tidak hanya berkuasa menentukan nasib orang yang tidak bersalah menjadi orang yang bersalah, serta memaksanya menjalani hukuman tanpa proses peradilan. Mereka juga mempunyai kebebasan yang luar biasa untuk memperlakukan para

tahanan menurut kehendak hatinya. Dalam kesaksian Ibu Nona, kuat sekali gambaran bagaimana seseorang mempunyai kekuasaan yang luar biasa tanpa batas atas diri orang lain. Seorang tahanan dipaksa harus menjadi budak dari nafsu para penguasa. Yang setiap saat dapat dipanggil dan harus memenuhi segala keinginan sang penguasa; kapan saja, di mana saja, dan untuk apa saja.

Pemerkosaan, 'diruwet', menurut istilah Ibu Nona, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi terhadap tapol perempuan di setiap kamp-kamp penahanan. Ia hanyalah satu dari sekian banyak korban yang mau dan berani mengungkapkan bagaimana perbudakan seksual terjadi di masa itu. Tidak ada atau sedikitnya korban perkosaan yang mau bersuara bukanlah ukuran bahwa tidak ada atau hanya sedikit perkosaan terjadi. Tapi juga harus diingat, sedikit atau banyak bukanlah ukuran kejahatan. Kalau pun hanya satu orang yang menjadi korban perkosaan, tidak pemerkosaan itu tetaplah sebuah kejahatan. Lebih-lebih ketika perkosaan tersebut justerkan di bani terjadi atau diberi ruang kebebasan oleh pejabat pemerintah.

Tidak banyaknya korban yang mau berbicara tentang pengalaman terburuk mereka adalah suatu pertanda bahwa perkosaan merupakan torehan luka yang perih dan mendalam sepanjang hidup para korban dan keluarganya. Korban perkosaan akan merasa terperkosa untuk kesekian kalinya ketika mereka harus menceritakan tragedi yang menimpa dirinya, apalagi jika pengakuannya hanya

dijawab oleh publik dan pemerintah dengan: ‘Mungkinkah? Benarkah hal itu terjadi?’

Di samping memperkosa tahanan perempuan, petugas keamanan juga sering memperkosa isteri tahanan laki-laki. Mungkin ketakutan paling besar di kalangan laki-laki tapol bukan keselamatan mereka sendiri, tapi keselamatan para isteri mereka yang berada di luar penjara. Perempuan-perempuan ini menjadi sasaran empuk. Hidup dengan stigma ‘PKI’, mereka tidak dapat mengeluh kepada siapa pun. Beberapa isteri tapol bahkan dinikah paksa oleh petugas. Seorang polisi, misalnya, mengganggu isteri tapol, mengancam akan terus mengganggunya, dan membuat suaminya menderita jika tidak mau menikah dengannya.

Misalnya kisah Hardi yang isterinya diperkosa ketika ia masih ditahan. Dia seorang petani di desa terpencil yang menjadi anggota biasa BTI. Pada waktu di kampungnya marak dibentuk organisasi massa maupun partai, banyak orang desa, termasuk Hardi sendiri, berpikir dengan logika sederhana: ‘karena saya petani, maka saya masuk Barisan Tani’. Seperti kebanyakan orang desa lainnya, Hardi sama sekali tidak tahu-menahu soal penculikan para jenderal di Jakarta. Jangankan tentang substansi peristiwa itu, berita mengenainya pun ia tidak dengar. Desa tempat ia tinggal sulit memperoleh informasi. Informasi yang sempat diterima masyarakat desa sangat lambat datangnya. Hardi baru tahu mengenai penculikan dan pembunuhan para jenderal setelah ia ditangkap pada 11

November 1965. Ia bingung menanggapi berita itu. Semakin bingung lagi ketika namanya dikaitkan dengan peristiwa tersebut hanya lantaran ia anggota BTI.

Alasan lain penangkapan Hardi adalah ia dituduh mempunyai senjata api dan membuat tiga lubang di sebelah rumahnya yang akan digunakan untuk menimbun mayat jenderal. Ia ditahan selama kurang lebih sebulan di Gedung Baperki dan gudang cabai milik seorang warga keturunan Tionghoa di Purwodadi. Karena dua tuduhan yang diarahkan kepadanya demikian serius–walau tidak pernah terbukti kebenarannya–ia mengira pasti akan diambil pada malam hari, seperti banyak tahanan lainnya, dan dibunuh. Untung saja Hardi kenal baik dengan petugas pemeriksa yang memasukkan namanya ke dalam daftar tapol yang akan dikirim ke Nusakambangan. Petugas inilah yang menyelamatkan nyawanya. Seandainya ia tetap dikurung di tempat penahanan Baperki, mungkin saja ia akan dibon. Awal 1966, Hardi dikirim ke Nusakambangan.

Pada 1969, Hardi dibuang ke Pulau Buru, dan baru sepuluh tahun kemudian ia dibebaskan. Sesampainya di rumah, ia begitu terpukul melihat keadaan keluarganya. Dua orang anaknya yang ketika ia ditangkap masih berusia tujuh dan empat tahun, SD saja tidak tamat dan harus mencari nafkah sendiri. Isterinya telah meninggal dunia karena penderitan yang luar biasa setelah Hardi ditahan. Belum lagi adik kandungnya menceritakan bagaimana isterinya harus ‘melayani’ banyak lelaki secara

bergiliran. Malam ini dipaksa tidur dengan ketua RT, malam berikutnya dengan ketua RT yang lain, malam berikutnya lagi dipanggil oleh lurahan. Baru saja pulang, keesokan malamnya tentara datang dan tidur di rumah. Berum terhitung guru, anggota ormas pemuda dari kelompok nasionalis dan agama yang ikut meminta pelayanan dari istri. Hardi. Yang paling mengerikan adalah ketika seorang pemuda Ansor datang dan meniduri isteri Hardi, ia datang dengan baju dan pedang berlumuran darah karena baru saja membunuh orang-orang yang dituduh komunis di Purwodadi. Tidak jarang, adik kandung. Hardi yang perempuan pun diperintahkan untuk mencuci pakaian dan samurai yang berlumur darah tersebut.

Setelah di rumah, yaitu tadi, adik saya bilang, ‘Kang, ngene, mbakyu iku leh mati wong anu iku kang, ngenes.’ (Mas, begini, mbakyu itu mati karena ini Mas, menderita.)

‘Ngenes piye to?’ (Menderita bagaimana?)

‘Ha piye? Angger bengi ngono ya, ngger anu ya dijukuk saka kelurahan kono, kon turu nang kono, ya kon pijet, kon tetek bengek. Mengko nek ora nang kelurahan ya ABRI mrene, ya nang amben kono, kon mijeti, mengko turu nang kene. Ya balike ya esuk to kang. Toh de mbakyu suwe-suwe ra koyok ngenes ngene. Nek ora kuwe, mengko ya wong-wong ‘ngono kuwi’ kok kang, bengi ya padha dolan rene, mengko ya turu nang kene.’ (Ha gimana? Kalau malam begitu ya, kalau anu ya diambil dari kelurahan sana, disuruh tidur di sana, ya disuruh pijat,

disuruh segala macam. Nanti kalau tidak ke kelurahan ya ABRI ke sini, ya di bale-bale sana, disuruh memijat, nanti tidur di sini. Ya pulangnya pagi, Mas. Mbakyu ya lama-lama menderita. Kalau tidak, orang-orang yang ‘gitu itu’ kok, Mas. Kalau malam ya pada main di sini, nanti ya tidur di sini).

Terus niku wau, bangsane dhisik carane OPR, ning m pun Garudha. Garudha-garudha niku nek dalu terus, mengke duka giliran duka pundi, kula mboten ngerti, pokoke angger sampun ngriki, mengke onten sing tilem teng ngriki, liyane bali. (Kemudian itu tadi, kalau dahulu istilahnya OPR [Organisasi Pertahanan Rakyat, sekarang Hansip], tapi sudah Garuda. Garuda-garuda itu kalau malam selalu, nanti entah giliran mana, saya tidak tahu, pokoknya kalau sudah ke sini, nanti ada yang tidur di sini, yang lainnya pergi).

Nanti malam lain lagi, lama-kelamaan isteri saya terus badannya kurus, kurus, kurus, perutnya terus besar, meninggal tahun 77. Tahun 79 saya kembali. Terus saya mendapat laporan dari RT saya sendiri itu, ‘Bojomu kuwi wong saka prihatin, saka ngenese atine arep mati, ’Pakmu kapan to nduk, nduk, leh balik?‘ Ngarep-ngarep.’ (Istrimu itu orangnya prihatin, sampai mengenaskan hati ketika akan meninggal dunia, ‘Bapakmu kapan ya nak, pulangnya?’ Berharap-harap.) Sudah akan meninggal itu. ‘Piye, awakku wis kadhung koyok ngene, pakmu gelem mbaleni meneh apa ora?’ (Bagaimana, tubuhku sudah terlanjur seperti ini, bapakmu mau menerima saya lagi

apa tidak?) Setiap malam itu diambil orang, kalau tidak diambil orang, dibawa kepala desa entah ke mana. Kalau ndak kepala desa, ABRI, letnan pangkatnya, yang sering di sini itu letnan. Pijet, kerok-kerok di sini, nanti terus tiduran itu, di dalam kamar sana.

Banser-nya pada waktu itu belum ada, yang ada itu bukan Banser tapi Pemuda Ansor. Lha setelah itu, sebelum meninggal itu, kan penghabisan diambil oleh Pemuda Ansor isteri saya di sini. Diambil oleh yang namanya A. , orang dari Sidorejo. Perempuan sini kan tiap malam dikelilingi terus dengan dia, sering bunuh orang, yang namanya A. itu Pemuda Ansor, pakaiannya hitam-hitam pakai samurai. Kalau masuk di rumah sini waktu kembali jam sembilan, jam sepuluh. Itu adik saya itu masih, 'Nem, tangi (bangun)! Bangun. Sana ngliwet (masak nasi),' istilahnya ya masak di dapur. 'Besok pagi ini celana, baju dicuci, itu samurai dicuci.' Pedang, itu ditaruhkan di meja. Begitu laporannya adik saya. Kalau anak kecil bisa bilang begitu, apa saya terus nggak percaya? Kenyataannya juga pembunuh itu yang namanya A. Pagi dicuci, ini sudah darah melulu dan samurai itu masih jiprak (berlumur) darah.

Katanya adik saya, kadang-kadang kalau jam tujuh sore [istri] menghadap ke timur, ke pintu, 'Lha iya, ya nduk, nduk. Kapan pakmu iki leh bali, suk kapan, leh ora bali-bali? Aku gak kuat to Nem, Nem. Kalo bapakmu urung bali, aku ya tetep menderita koyok ngene ki piye?' (Lah iya, nak, nak. Kapan bapakmu ini akan pulang, besok

kapan, kok tidak pulang-pulang? Aku tidak kuat, Nem, Nem. Kalau bapakmu belum pulang, aku akan tetap menderita seperti ini bagaimana?)

Pada 1982 Hardi kembali menikah dengan seorang janda. Dalam kesehariannya, Hardi harus memendam sakit hati, dan coba melupakan kenangan pahit yang ia dan almarhum istri pertama, serta keluarganya alami. Hal yang terberat buatnya, sebagian dari pelaku yang memperkosa istrinya adalah para tetangga dan orang-orang yang masih ia kenal, yang hingga kini masih hidup dan sering ia jumpai.

Tidak Aman setelah 'Diamankan'

Istilah yang umum dipakai untuk penahanan dan pemenjaraan orang-orang yang dituduh PKI adalah 'diamankan.' Mulanya, beberapa korban percaya bahwa dikurung di dalam tempat penahanan atau di penjara lebih aman daripada tinggal di rumah, karena mereka takut akan jadi sasaran tindakan sewenang-wenang milisi sipil. Mereka berpikir tidak akan dibunuh kalau mereka sudah ditahan; bahwa polisi dan tentara tidak akan memperbolehkan milisi menyerang mereka. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa pemenjaraan ternyata sama berbahayanya, bahkan lebih berbahaya, ketimbang tinggal di luar penjara. Bagi mereka yang ditangkap dan dipenjarakan, ada dua bahaya utama di dalam penjara: a)

diambil dari tahanan di waktu malam dan dieksekusi; b) mati kelaparan atau sakit sampai mati karena penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi.

Pak Hadi dari Ambarawa menghadapi kedua bahaya ini. Lahir pada 1933, ia mulai bekerja sebagai sipir penjara ketika ia masih berumur 19 tahun. Pak Hadi tidak pernah membayangkan bahwa ia sendiri akan menjadi narapidana. Tidak juga terbayang ia akan menemukan kondisi penjara yang begitu buruk di Indonesia merdeka. Pada suatu malam, 10 November 1965, seorang polisi dan anggota Banser datang ke rumahnya dan meminta dia berangkat bersama mereka ke kantor kecamatan. Sesampainya di kantor kecamatan, ia melihat sudah banyak orang lain yang dikumpulkan dari seluruh kecamatan di sana. Bersama mereka semua digiring ke beberapa truk dan dibawa ke Penjara Ambarawa–penjara tempat ia bekerja.

Setelah kurang lebih sebelum hari di Penjara Ambarawa, ia dipindahkan ke Penjara Salatiga. Ia mulai menyadari hidupnya dalam bahaya karena diperhatikannya banyak tahanan dibawa keluar berkelompok-kelompok dan tidak pernah kembali. Ia bertemu tiga orang tahanan, teman-teman lamanya, yang pernah dibawa keluar untuk dieksekusi, tapi tidak jadi dilaksanakan. Mereka mengatakan bahwa mereka termasuk dalam kelompok 26 orang tahanan yang dibawa keluar dari penjara dan hilang.

Mengambilnya dari penjara itu kira-kira jam setengah empat sore. Sampai Zipur [Zeni Tempur] Ungaran, itu jam setengah enam, setengah tujuh, orang-orang itu sudah dibondo (diikat) semua. Lha dibondo itu, semua itu 26, yang tiga itu termasuk Muslimin, Bung Madi, Bung Slamet itu, bisa ketemu dengan saya di sel Salatiga... [mereka] dimasukkan di dalam truk tapi sudah diborgol, dibawa ke Karang Jati, ke Timur... Yang 23 sudah pokoknya hilang.

Ketika tiba gilirannya diinterogasi, ia mengira akan disiksa seperti banyak tahanan lainnya: 'Dalam pemeriksaan ya ada yang di Timperca, ya ada yang ditendang, ya ada yang luka, ada yang abuh (bengkak), ya macam-macam lah.' Ia terkejut waktu si interrogator malah menawarkan padanya untuk dipindahkan ke penjara Nusakambangan dengan imbalan uang.

Nah, kebetulan saya diperiksa itu tidak diapa-apakan, tapi dengan catatan 'Kalau Saudara itu memberi uang kepada saya Rp 30.000 nanti Saudara bisa kami kirim ke Nusakambangan,' gitu aja waktu itu. Nah, terpaksa saya harus jual-jual apa-apa. Rp 30.000 itu bukan uang kecil. Nah, terus jual apa-apa yang ada, ya sepeda, sembarang itu. Kekayaan saya dihabiskan waktu itu.

Karena Hadi percaya bahwa dia akan dibunuh kalau tetap tinggal di penjara Salatiga, ia bersedia membayar uang suap yang diminta si interrogator. 'Masuk di Nusakambangan itu mbayar saya. Sebab di sel itu semua ndak ada sampai sekarang, habis.' Uang suap itu untuk 'menghindari pembunuhan itu.'

Tentu Hadi tidak tahu bagaimana kondisi pemenjaraan di Nusakambangan yang sebenarnya. Sebelum sampai di sana ia yakin bahwa kondisi Nusakambangan akan lebih aman. Sampai batas tertentu, dia memang lebih aman. Ia tidak perlu khawatir dibon dan dieksekusi. Tapi ia berhadapan dengan bahaya lain: mati kelaparan. Saat ia tiba di Nusakambangan pada awal 1966, tahanan tidak diberi cukup makanan untuk bisa bertahan hidup, 'Makannya cuma gerontol, kadang-kadang, kalau tidak ada gerontol ya apa adanya, kalau ada mlandhing (petai cina) ya mlandhing, gitu aja... Gerontol, jagung itu, iya gerontol jagung itu. Satu kali. Jadi pagi cuma air, siang gerontol, sore oyek. Oyek itu telo (ketela) yang sudah busuk itu, ditumbuk dikepal seperti bal (bola) itu. Satu kepal, satu kepal gitu, makannya yaitu satu kepal seorang satu makanan. Seperti bal pimpong lah, lah itu segitu.' Gerontol atau butiran jagung kering yang diberikan sangat sedikit sehingga tahanan bisa menghitungnya. Hadi mengingat bahwa mereka biasanya diberi sekitar 150 butir jagung per hari. Karena mereka disekap di sebuah pulau yang jauh dari rumah, mereka tidak bisa menerima kiriman dari keluarga atau sanak saudaranya. Mereka sepenuhnya bergantung pada ransum yang disediakan penguasa penjara.

Pulau Nusakambangan ini merupakan sebuah kompleks yang memiliki sembilan penjara terpisah, di antaranya Batu, Permisan, Gliger, dan Nirbaya. Setiap penjara berbentuk seperti benteng yang bisa menampung ratusan

tahanan. Hadi sempat tinggal di beberapa penjara yang ada: ‘Sampai di Batu, pindah lagi ke Besi. Besi pindah ke Permisan lagi, jadi diputer-puter, puter-puter, gitu.’ Situasi makanan di seluruh penjara sama saja. Tahanan terus-menerus kelaparan dan makan apa saja yang tampaknya bisa dimakan. ‘Semua kelaparan. Ndak ada yang tidak kelaparan, ndak ada. Makannya ndak pantas dimakan.’ Sampai tahap tertentu di penjara Batu ransum gerontol jagung dan oyek yang sangat sedikit itu pun berhenti dan tahanan terpaksa mencari-cari makanan sendiri: ‘Sudah pernah makan tutuk, buah bako-bako, bako-bako (pohon bakau) yang di rawa-rawa itu lho. Pohon Pon jadi buahnya, ini diambili, dimasak, direbus. Habis direbus, dikukus, terus dieplok (ditumbuk sampai halus). Ya seperti geblek itu, terus dikepak-kepak ini terus dimakan orang-orang ini. Nah, jagung ndak datang, oyek ndak datang dari Batu. Nah, terpaksa makan itu. Nah, sesudah agak lama yaitu banyak yang korban.

Tahanan sampai ada yang makan kulit pisang, batang pisang, dan bahkan wayang kulit:

Sudah pernah terjadi waktu itu, mau hari raya. Itu kan namanya hari raya ya–kalau ingat di rumah kan makannya enak-enak ya. Kalau di situ hanya diberi tontonan itu namanya wayang, gitu aja. Nah, mulai pagi sampai sore, sampai jam setengah enam, itu wayangan. Nah, serentak wayang itu bubar, habis semuanya. Debog (batang pisang) dimakan ya to. Wayangnya dibakar diambili, ada yang mengambil Antasena [nama tokoh pewayangan], ada yang

mengambil Werkudaranya [nama tokoh pewayangan], ha sudah habis.

Selama tiga tahun pertama Hadi di Nusakambangan, para tahanan berguguran setiap harinya. Tubuh mereka tidak mendapat cukup kalori dan gizi untuk bisa bertahan hidup.

La ini, jadi memang di sana ini status yang ‘suruh mati’ itu saja sudah. Nggak ada rasa mau hidup nggak ada, rasanya mau mati kapan gilirannya, itu aja. Wong kadang-kadang sekarang ngangkat orang mati besok sudah diangkat lagi. Diangkat lagi gitu aja, jadi giliran gitu lho. Sesuk nggowo wong (besok membawa orang) masuk, sesuk (besok) orang yang bawa mati lagi, gitu. Ini tiap-tiap kamar itu sudah satu–Kaukasan kan ada 20 kamar–nah tiap-tiap kamar ini mesti ada, orang satu, orang dua, mesti ada. Nah, soal kematian itu memang sangat tajam di sana.

Para tapol ini harus menguburkan teman-teman mereka yang mati. Tanpa ada bahan-bahan apa pun, mereka tidak bisa melaksanakan pemakaman yang pantas bagi teman-teman mereka sesama tapol.

Matinya di situ, yaitu, tikar dengan apa adanya ya digulung saja. Digulung sama tikarnya itu saja, sesudah digulung sama celananya–ya pokoknya apa adanya di situ–digulung saja. Terus dimasukkan, dibawa ke pinggir laut gitu saja... Jadi, ndak ada muni (bunyi) dicuci, atau diapakan itu ndak ada. Seperti larahan (sampah) itu lo, seperti bawa larahan itu kok. Sudah digotong ya digotong, pendhem (pendam) ya dipendhem (dipendam). Seperti

mendhem larakan (memendam sampah) itu. Nggak ada apa, itu manusia, bangsa kita sendiri.

Ketika Hadi pertama kali datang, ada sekitar 12.000 orang tapol yang ditahan di berbagai penjara di Nusakambangan. (Ia sempat melihat statistik di papan kantor penjara). Dengan adanya kelaparan luar biasa, ia memperkirakan ribuan tapol meninggal antara 1966 sampai 1969. Di salah satu penjara, Permisan, ia memperkirakan separuh dari isi penjara itu meninggal. Situasi yang mengerikan ini tidak berubah sampai Jaksa Agung datang ke Nusakambangan pada 1969 dan memerintahkan supaya para tapol diberi makan nasi. Setelah itu, barulah kematian massal itu berakhir.[9] Saat itu Nusakambangan menjadi daerah transit bagi seluruh tapol Golongan B dari Jawa yang akan dikirim ke Pulau Buru.

Pola Penangkapan

Situasi ketika massa secara aktif melakukan penangkapan hingga pembunuhan terhadap anggota atau simpatisan PKI dibentuk dan diciptakan pihak militer. Hal ini dapat terlihat di beberapa daerah yang semula dalam kondisi tenang–sekalipun atmosfir politik sangat panas berkaitan dengan peristiwa G-30-S–tiba-tiba berubah menjadi amat mencekam. Perubahan situasi ini tidak lepas dari gencarnya propaganda yang dilakukan pihak militer

tentang keterlibatan PKI dalam peristiwa G-30-S, dan penyebaran cerita bohong tentang tindakan perempuan-perempuan Gerwani yang sadis dan kejam terhadap para jenderal. Ketegangan politik dan kerawanan suatu wilayah semakin meningkat ketika pihak militer, terutama RPKAD, turun langsung hingga ke tingkat desa untuk melakukan penangkapan terhadap anggota atau simpatisan PKI.

Cara penangkapan terhadap mereka yang dituduh atau disinyalir terlibat dalam PKI atau ormas pendukungnya bervariasi di tiap-tiap daerah di Jawa Tengah. Namun, dari berbagai cara penangkapan, paling tidak ada empat bentuk tindakan yang menjadi pola umum, yaitu:

1. Penangkapan yang langsung dilakukan oleh petugas, baik unsur militer maupun kepolisian

Penangkapan langsung dilakukan oleh petugas keamanan, baik yang berasal dari jajaran kepolisian maupun militer. Walaupun lebih teratur dan terarah dalam melakukan penangkapan, tetap saja tindak kekerasan kerap dilakukan terhadap sasaran penangkapan, baik langsung terhadap diri orang yang menjadi sasaran, maupun terhadap lingkungannya (mengacak-acak isi rumah, membakar rumah, meneror, atau melakukan tindak kekerasan terhadap anggota keluarga sasaran).

2. Penangkapan dengan menggunakan massa partai atau ormas yang secara politik dan ideologi bertentangan dengan partai atau ormas PKI

Pola ini sering digunakan di daerah-daerah yang jumlah massa anggota atau simpatisan partai non-PKI-nya, jika

bergabung, berkekuatan menyolok. Dalam melancarkan aksi, massa biasanya bergerak dengan dipimpin oleh beberapa orang dari kalangan mereka sendiri. Tidak ada standar operasi dalam melakukan penangkapan sehingga tidak jarang improvisasi mendominasi aksi-aksi ini, baik menyangkut penggunaan senjata maupun orang-orang yang akan dijadikan sasaran penangkapan. Memang benar massa telah memiliki daftar siapa-siapa yang akan ditangkap. Namun perlu diingat, massa yang dibatkan untuk menangkap biasanya berasal dari daerah lain yang tentunya tidak tahu persis sosok orang yang akan ditangkapnya.

Hal lain yang perlu dicatat adalah tidak adanya mekanisme kontrol untuk mengawasi penangkapan yang dilakukan massa. Semua mengalir begitu saja, tergantung pada kehendak massa. Untuk menunjang aksi penangkapan oleh massa, RPKAD memberikan pelatihan-pelatihan militer berupa strategi pertahanan dan teknik penggunaan senjata kepada para pemuda dari partai atau ormas non-PKI. Pengajaran teknik penggunaan senjata biasanya mencakup pembekalan senjata bagi para pemuda yang akan melancarkan aksi penangkapan.

3. Penangkapan dengan menggunakan massa dari berbagai unsur ditambah unsur polisi dan militer, serta unsur pertahanan sipil lokal

Dalam melakukan aksinya, biasanya massa dari berbagai unsur melakukan penangkapan yang didukung langsung oleh pihak aparat polisi maupun militer dan

unsur pertahanan sipil. Kehadiran pihak aparat keamanan dalam penangkapan menjadi semacam motor penggerak aksi dan menambah tebal keberanian massa dalam melakukan aksi-aksinya.

4. Penangkapan dengan mengundang atau memanggil orang untuk datang atau berkumpul di tempat tertentu

Penangkapan dengan menggunakan cara ini memang terkesan lebih halus dibandingkan dengan cara-cara penangkapan yang lain, karena pola ini hanya menggunakan surat panggilan kepada seseorang yang menjadi sasaran penangkapan. Dalam surat biasanya tidak dijelaskan alasan pemanggilan. Isi dari surat pemanggilan kebanyakan hanya meminta seseorang datang ke instansi pemerintahan tertentu, misalnya balai desa, kantor lurahan, kantor polisi, kodim, dan instansi-instansi pemerintah yang lain. Ketika sampai di tempat yang telah ditentukan, seseorang tidak diperkenankan kembali dan harus menjalani pemeriksaan dan penahanan. Halusnya cara penangkapan ini bukan jaminan tidak ada kekerasan atau kekejaman terhadap korban. Pola ini hanyalah salah satu cara untuk menangkap. Banyak tapol yang ditangkap, lalu ditahan, dengan menggunakan pola ini tetap menjalani siksaan luar biasa hebat, menderita kelaparan, dan/atau mati dalam masa penahanan atau pembuangan.

Pola-pola di atas merupakan bentuk yang paling signifikan dalam masa penangkapan di Jawa Tengah. Selain keempat pola di atas, terdapat pola lain dalam penangkapan, yakni dengan menyandera salah satu

anggota keluarga tapol. Sekalipun penerapannya tidak signifikan keempat pola di atas, namun pola ini jelas diterapkan.

Penutup

Pola penangkapan dan penahanan, serta tindak kekerasan yang terkandung di dalamnya, bukanlah sebuah pola yang berdiri sendiri dan dipraktikkan hanya pada era 1965-66. Pola tersebut dibuat secara sistematis dan efektif, diterapkan sepanjang kekuasaan Orde Baru hingga sekarang. Rezim Orde Baru tidak hanya melahirkan, tetapi juga menumbuhkembangkan pola ini dan menjadikannya selalu aktual sebagai alat untuk menghadapi lawan-lawan politiknya.

Tentu masih segar dalam ingatan kita Peristiwa 27 Juli 1996. Penguasa menggunakan instrumen militer dan sipil yang diorganisir untuk menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri yang oleh rezim Orde Baru dianggap membahayakan eksistensinya. Setelah selesai melakukan penyerbuan, rezim ini mengeluarkan kebijakan ‘pengharaman’ Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang diiringi dengan aksi penangkapan dan penculikan para aktivis pro-demokrasi. Sekalipun jelas terlihat Soeharto lewat politik militerismenya berada di belakang peristiwa tersebut, tanpa rasa malu dan rasa bersalah rezim Orba bersikukuh

menyatakan peristiwa tersebut sebagai konflik internal PDI.

Pola memanfaatkan kelompok masyarakat sipil juga digunakan untuk menghadapi gerakan reformasi mahasiswa. Lihat saja bagaimana gerakan mahasiswa menuntut perubahan dalam kehidupan politik di Indonesia dan mendesak lahirnya pemerintahan yang bersih dari unsur KKN, dihadapi tidak hanya dengan kekuatan bersenjata, melainkan juga dengan gerakan massa tandingan yang diberi ‘seragam’ Pam Swakarsa.

Penguasa ingin memunculkan kesan kepada publik bahwa gerakan mahasiswa bukanlah gerakan yang berbasis pada aspirasi seluruh rakyat. Dan yang lebih penting lagi, penguasa ingin menunjukkan tidak semua rakyat mendukung gerakan moral mahasiswa.

Politik adu domba yang sangat menyolok dan telanjang ini kembali berulang pada masa menjelang dan setelah dilaksanakannya jajak pendapat untuk menentukan masa depan Timor Lorosae. Kali ini, operasi pengacauan bukan saja disaksikan masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat internasional. Aparat negara, lewat politik militerismenya, mendorong terjadinya militerisasi masyarakat sipil, Milisi Pro-Integrasi, yang sepenuhnya difasilitasi oleh negara. Apa pun namanya, di mana pun diciptakannya, strategi adu domba serupa ini seolah memberi alibi bagi penguasa untuk cuci tangan dari seluruh masalah dengan menyatakan bahwa yang terjadi adalah ‘konflik horisontal’.

Siapa pun dapat saja menggunakan bermacam-macam strategi ‘cuci tangan’ untuk menghindari tanggung jawab. Namun, harus diingat pula bahwa norma-norma hukum mensyaratkan bahwa pembiaran atas terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia dapat dipersamakan dengan keterlibatan dalam pelanggaran tersebut. Jika penguasa selalu menggunakan pola adu domba, membunuh pikiran dan ide kritis untuk mempertahankan kekuasaannya, lalu bagaimana dengan hakekat dan fungsi pemerintah terhadap warga negaranya? Adanya warga negara memang merupakan salah satu syarat diakuinya sebuah pemerintahan, namun bukan berarti hanya sampai titik itu hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Memenuhi hajat hidup warga negara: kesejahteraan, demokrasi, peran politik, kepastian hukum, keadilan sosial, dan lain-lain, merupakan kewajiban paling pokok pemerintah terhadap rakyatnya.

Daftar Wawancara

1. Ibu Diah, Yogyakarta, 13 Juli 2000
2. Hardi, Purwodadi, 28 Agustus 2000
3. Ibu Lasmini, Purwodadi, 1 September 2000
4. Mansur, Rembang, 8 September 2000
5. Ibu Nona, Ambarawa, 27 Juli 2000
6. Sasmo Atmojo, Pati, 6 September 2000
7. Sujoko, Klaten, 24 Juli 2000
8. Suparno, Pati, 7 September 2000

9. Suprapto, Klaten, 22 Juli 2000
10. Wakijan, Purworejo, 30 Juli 2000
11. Winata, Klaten, 21 Juli 2000
12. Yahya, Ambarawa, 28 Juli 2000

---

[1] Mayjen. Soeharto menyerukan pada rakyat di Jawa Tengah pada 10 November 1965, agar 'mempercepat hancurnya G-30-S sampai pada ke akar-akarnya.' Alex Dinuth, *Dokumen Terpilih Sekitar G-30-S/PKI* (Jakarta: Intermasa, 1997), h. 137.

[2] Benedict Anderson dan Ruth McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1971), h. 63.

[3] Soekarno menggunakan konsep Nasakom untuk menggalang persatuan nasional di antara kekuatan-kekuatan politik yang bersitegang di akhir 1950an. Soekarno percaya bahwa tiga aliran tersebut hidup di dalam masyarakat Indonesia dan tidak mungkin mengabaikan satu sama lain. Konsep ini diilhami tulisan Soekarno sendiri yang diterbitkan pada 1927, *Nasionalisme, Islam dan Marxisme*. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Nasakom, lihat Herb Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1962), terutama bab XI Conclusion; Soekarno, *Nationalism, Islam and Marxism*, diterjemahkan oleh Karel H. Warouw dan Peter D. Weldon, dengan kata pengantar dari Ruth T. McVey, (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Translation Series, 1969); Soekarno, *Nasakom Bersatu -- Nasakom Djiwaku!*, (Djakarta: Departemen Penerangan, 1965), Pidato di Konperensi Petani, 20 Juli 1965.

[4] Sejarawan Geoffrey Robinson mencatat, di Bali situasi berjaga-jaga tanpa ada serangan massal bertahan selama dua bulan penuh setelah G-30-S, karena gubernur, pangdam, dan polisi lokal berusaha mencegah kekerasan. Ada suasana 'ketegangan yang terjaga' antara kekuatan PKI dan anti-PKI, tapi sangat sedikit kasus-kasus pembunuhan terjadi. Pembantaian massal baru dimulai setelah RPKAD masuk Bali pada awal Desember. Lihat artikelnya, 'Post Coup Massacre in Bali,' dalam Daniel Lev dan Ruth McVey, eds., *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT. Kahin* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1996), h. 129-138.

[5] Feisal Tanjung, *Terbaik untuk Rakyat Terbaik Bagi ABRI*, 1999, h. 210. Feisal Tanjung saat itu adalah seorang perwira RPKAD.
[6] Jurnalis Amerika, John Hughes, mencatat ‘ada keributan di wilayah Bojolali dan Klaten’ yang dimulai pada 22 Oktober 1965. Tapi, informasinya mengenai kejadian-kejadian itu berasal dari Angkatan Darat. *Indonesian Upheaval* (New York, Fawcett, 1967), h. 132.
[7] Hughes, *Indonesian Upheaval*, h. 132. Kedutaan Besar Amerika Serikat menyampaikan laporan dalam bentuk telegram ke Washington bahwa Angkatan Darat, atas perintah Soeharto dan Nasution, ‘mendorong kelompok kelompok agama mengambil tindakan politik yang akan didukung Angkatan Darat.’ Kedutaan Besar AS kepada Departemen Luar Negeri, 9 Oktober 1965. Dalam telegram lain dilaporkan: ‘Di Jawa Tengah, Angkatan Darat (RPKAD) melatih kelompok pemuda Islam dan memberikan senjata, serta akan mengirim mereka untuk menghadapi PKI. Angkatan Darat akan sejauh mungkin menghindari konfrontasi langsung dengan PKI… Angkatan Darat membiarkan kelompok lain di luar mereka mendiskreditkan PKI dan menuntut agar mereka dihukum.’ Kedutaan Besar AS kepada Departemen Luar Negeri, 4 November 1965. Kedua kawat ini dikutip dalam Geoffrey Robinson, ‘The Post-Coup Massacre in Bali,’ h. 127.
[8] Sebuah panitia yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 131 tahun 1961 untuk penyelenggaraan reformasi agraria berkaitan dengan diundangkannya UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).
[9] Cerita Hadi tentang keadaan di Nusakambangan dipaparkan pula oleh semua tapol yang pernah ditahan di tempat itu. Misalnya, Hardi dari Purwodadi, yang disebutkan di bagian sebelumnya, pernah ditahan di Nusakambangan dari 1966 sampai 1969, menceritakan pengalaman yang kurang lebih serupa.

PENANTIAN PANJANG DI JALAN PENUH BATAS
KISAH KELUARGA KORBAN

Yayan Wiludiharto

Aku tak mengira ‘orang-orang PKI’ itu ternyata manusia biasa. Sebelum aku bertemu dan berbicara dengan mereka yang dianggap PKI, aku hanya tahu PKI sama dengan sesuatu yang menyeramkan. Waktu SMP, aku selalu nonton film Pengkhianatan G-30-S/PKI beramai-ramai dengan teman-teman sekelasku. Bagi kami, film itu seperti film action: ada orang jahat melawan orang baik, dan para PKI yang menculik dan membunuh para jenderal itu jelas orang-orang jahat. Tapi anehnya, kami juga tak menganggap Soeharto pahlawan. Kami hanya sangat bersimpati pada keluarga para jenderal yang disiksa dan dibunuh sedemikian sadis. Tak satu pun dari kami bicara soal kudeta, apalagi penyelamatan negara dan bangsa. Pokoknya, ‘orang-orang PKI’ itu sudah sepantasnya dibasmi; mereka tak pantas hidup, karena mereka sudah melakukan kejahatan yang mengerikan. Bahkan, guruku pun kalau marah pada anak-anak yang bandel di kelas akan berseru, ‘Dasar PKI!’

Aku tak pernah tertarik pada sejarah, apalagi sejarah yang diajarkan di sekolah. Satu-satunya buku sejarah yang menarik perhatianku adalah seri buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. Itu pun aku hanya senang melihat foto-fotonya, bukan membaca uraiannya. Baru setelah Peristiwa 27 Juli 1996 meledak, aku berpikir lebih serius tentang sejarah. Saat itu aku membantu seorang temanku, mahasiswa IKJ (Institut Kesenian Jakarta), berjualan secara sembunyi-sembunyi buku-buku yang dilarang pemerintah Orde Baru. Salah satu buku yang sempat kubaca ialah Bertahan Hidup di Gulag Indonesia, karya Carmel Budiardjo. Aku terkejut sekali membaca kisah-kisah menyedihkan para tahanan politik di buku itu. Sulit kupercaya, kekejaman seperti itu terjadi di negeriku. Mulai tumbuh banyak pertanyaan di otakku tentang PKI dan G-30-S 1965.

Ketika Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK), organisasi tempat aku bergabung, mengadakan penelitian sejarah lisan tentang pengalaman para korban Tragedi 1965, pada awal 2000, tanpa pikir panjang kuputuskan untuk terlibat. Aku ingin mendengar sendiri cerita para korban 1965. Sejak menjadi anggota TRuK pada Mei 1998, aku memang berhubungan semakin dekat dengan korban-korban kekerasan politik, seperti korban Tragedi Mei 1998 dan Tragedi Semanggi I. Selain itu, pengalamanku bekerja sebagai relawan kemanusiaan di Timor Leste menjelang jajak pendapat 1999 memperlihatkan bahwa kekerasan militer terhadap rakyat sipil adalah hal yang lumrah di Indonesia. Tapi, yang paling mengganguku

ialah kebanyakan korban tak tahu mengapa mereka dituduh sebagai pihak yang bersalah dan dijadikan sasaran tindak kekerasan. Sejak kapan kemustahilan ini jadi kenyataan? Mengapa?

Aku mulai bertemu muka dengan beberapa korban Tragedi 1965 pada akhir 2000. Kusangka, dengan mudah akan kudapatkan cerita-cerita mereka. Sama sekali tidak. Pengawasan berpuluh-puluh tahun, tidak saja oleh aparat pemerintah, tapi juga oleh masyarakat sampai ke tingkat desa, telah membuat mereka senantiasa waspada terhadap orang baru. Dari pengalaman mereka, jawaban jujur terhadap pertanyaan tentang diri pribadi adalah awal segala kepahitan hidupnya. Karena mengaku sebagai anggota BTI, Gerwani, atau Pemuda Rakyat, apalagi PKI, mereka ditangkap, disiksa, diperkosa, diasingkan, atau dibunuh. Karena berhubungan darah atau terkait tali perkawinan dengan mereka yang dianggap ‘PKI’ atau ‘komunis’, mereka juga harus lalui kekejaman serupa.

Untungnya, setelah dua-tiga kali bertandang ke rumah korban, aku berhasil memperoleh kepercayaan mereka. Mungkin kemudian dan latar belakangku sebagai aktif kemanusiaan cukup meyakinkan mereka bahwa aku bukan bagian dari kekuasaan yang akan menghancurkan lagi kehidupan mereka. Kisah-kisah pedih dan mencekam mulai mengalir. Tak selalu lancar, terutama bagi mereka yang sepanjang hidupnya memilih untuk memendam cerita-cerita itu demi kenyamanan keluarga, terutama anak-anak mereka. Isak tangis memiliki sering menyela

sehingga pembicaraan pun terhenti beberapa saat, menunggu mereka siap kembali bercerita. Terus terang, aku sendiri terhenak mendengar penuturan mereka. Aku merasa seperti dihantarkan ke dunia lain yang tak kumengerti sepenuhnya. Kalimat-kalimat santun dalam Penataran P4 yang pernah kuikuti dipatahkan oleh kenyataan hidup mereka.

Sebagian besar korban yang kuwawancarai adalah warga masyarakat desa biasa yang tidak tahu-menahu tentang pembunuhan para jenderal, apalagi kudeta ‘Gerakan 30 September’. Beberapa dari mereka bahkan buta huruf. Mereka tidak paham mengapa dipanggil ke kecamatan, ke Koramil (atau Butterpra waktu itu), atau ke Kodim. Tahutau mereka harus berhadapan dengan berbagai bentuk siksaan yang menyertai interogasi, dan menghabiskan belasan tahun di penjara atau di kamp-kamp pembuangan. Kalau pun mereka selamat dari perburuan ini, anggota keluarga mereka yang jadi korban, dipenjarakan, diperkosa, dibuang, atau hilang tanpa bekas. Belum terhitung harta benda yang dijarah atau dihancurkan, baik oleh massa maupun oleh aparat keamanan.

Yang membuat aku terkesan adalah ketegaran keluarga korban menghadapi guncangan bertubi-tubi yang memporak-porandakan kehidupan mereka. Karena kebanyakan yang ditahan atau hilang adalah suami/bapak yang menjadi tulang-punggung keluarga, para istri/ibu harus mengambil alih tugas mencari nafkah sekaligus

merawat anak. Kalau sang suami dipenjarkan, tugas istri bertambah dengan mengirim makanan secara rutin ke penjara. Di tengah ancaman dari pemerintah dan kecaman dari masyarakat, mereka kerja apa saja–menjadi pembantu rumah tangga, tukang tumbuk beras, berjualan kayu bakar, atau berdagang kecil-kecilan di pasar–agar anak dan suaminya, paling tidak, tetap hidup.

Mereka yang kehilangan suami/bapak tak kalah gigih. Tanpa arahan yang jelas, mereka mencari jejak orang-orang terkasih dari kantor ke kantor, penjara ke penjara, bulan demi bulan, selama bertahun-tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk ongkos perjalanan dan uang suap aparat yang memberi janji-janji kosong, tak sedikit. Harta-benda yang tersisa pun habis terjual, sementara yang dicari tak ketemu.

Setelah mendengar kisah para keluarga korban, aku merasa harus menyampaikannya ke publik yang lebih luas. Selama puluhan tahun, pemerintah Orde Baru memaksa kita semua menghormati Pancasila dan UUD 45. Tapi, aparat pemerintah yang sama yang juga mengingkari dan melanggar dasar-dasar bernegara dan berbangsa tersebut dengan menangkap orang sewenang-wenang tanpa memberi secuil pun informasi kepada keluarganya, tanpa memberitahu apakah orang itu sudah mati atau masih hidup. Propaganda Orde Baru menggembar-gemborkan pentingnya keluarga sejahtera lewat program-program KB, PKK, dan lain-lain Tapi, apa yang terjadi pada ratusan ribu keluarga yang dianggap ‘PKI’?

Pemerintah merebut mimpi-mimpi mereka, mencerai-beraikan satu dari yang lain, dan menutup kesempatan mereka untuk hidup tenang dan sejahtera.

Yang lebih ajaib lagi, pemerintah Orde Baru terus-menerus memperingatkan warganya dengan seruan ‘bahaya laten komunis’; menghimbau orang supaya waspada terhadap ‘kebangkitan kembali PKI’. Dalam kenyataan, setelah pembantaian besar-besaran sepanjang 1965-1969, pemenjaraan dan pembuangan ratusan ribu orang, yang tersisa adalah keluarga korban–istri/ibu dan anak-anak yang belum dewasa. Mereka tak mendalami paham ‘komunisme’, apalagi bermimpi mendirikan partai komunis untuk merebut kekuasaan negara. Tak bisa kubayangkan bagaimana para ibu dan anak-anak ini bisa dikategorikan ancaman ‘bahaya laten komunis’. Yang menjadi ancaman terbesar bagi rakyat justru negara ciptaan Orde Baru itu sendiri dengan aparatnya yang korup dan sewenang-wenang. Dan itu bukan bahaya laten, tetapi bahaya nyata.

Kisah-kisah yang kutuliskan di bawah hanya sekelumit dari yang kudengar. Namun, laiknya cermin bersisi jamak, mereka adalah pantulan dari ribuan kisah yang masih terpendam.

‘Waktu Bapak Diambil Tentara’

Saat peristiwa 1965 terjadi, Partono masih duduk di kelas empat di sebuah SD desa, di pegunungan Wonosari. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya seorang luruh, sekaligus petani, pelukis, dan pengrajin, waryang kulit dan topeng. Rumahnya selalu ramai dengan kegiatan warga desa, sampai-sampai sebagian pekarangannya dijadikan kelas-kelas berdinding geribik bambu untuk kegiatan belajar-mengajar kesenian. Warga desa rutin berlatih menari, memainkan waryang orang dan gamelan, maupun drum band di sana. Selain itu, keluarganya juga mengajak masyarakat mengembangkan peternakan ulat sutra yang benangnya dipakai untuk kerajinan kain tenun. Rumah itu menjadi pusat kegiatan belajar kesenian dan pengembangan ekonomi masyarakat di desanya.

Sepanjang ingatan Partono, masa kanak-kanaknya sangat bahagia. Ia hidup berkecukupan dan hari-harinya ramai dengan bermacam kegiatan, ‘Kehidupan rumah harmonis tidak ada apa-apa, dan segala sesuatu kebutuhan anak jelas tercukupi oleh orang tua.’ Setelah 30 September 1965, kenyamanan ini tiba-tiba berubah tanpa pertanda apa-apa. Suatu hari, ayahnya pergi dari rumah, memenuhi panggilan dari Kodim.

Bapak itu tidak diambil. Jadi, bapak itu dipanggil datang ke Kodim, itu ingat saya. Jadi, ya sekitar jam dua siang mungkin. Jadi dipanggil ke Kodim, bilangnya ada

urusan ke Kodim, gitu. Wong sepeda saya aja, sepeda bapak itu kan jaman dulu kan ‘NJRJ’ itu termahal, saya kira, Gasele [Gazelle] seri tujuh kalau nggak salah. Jadi orang itu kalau kles itu pergi ke sana bawa sepeda. Bawa sepeda, setelah satu hari atau dua hari, itu dibawa pulang pakai truk, orang tua saya. Sudah dikawal satu truk itu. Terus turun dari truk... cuma pamit, cuma pegang saya, dengan kepala saya, kepala adik saya itu suruh rukun tidak boleh tengkar, ‘Bapak mau sekolah’, gitu. Jadi, waktu itu saya masih kecil [menangis]... jadi ingat saya cuma itu, jadi kelanjutannya nggak tahu persis.

Ibunya, Ibu Sri, sebelum Peristiwa ‘65 juga tak pernah mengalami kesulitan. Sebagai putri seorang carik desa yang kemudian menikah dengan kepala desa, hidupnya cukup nyaman walau tak berlebihan. Tak terbayang olehnya, satu hari saja bisa mengubah seluruh kehidupannya.

Ya dhek cilik ya seneng, ning bareng tuwo-tuwo gek ketanggor kaya ngono kuwi. Lha gek ora, cilik ya seneng diingoni wong tuwo, diseneng-senengke, apa senenge keturutan, gek bareng nduwe bojo, wis anak-anak kemruyuk, tuwek-tuwek, bojone tinggal lungo, digowo uwong. (Ya, waktu kecil ya [hidup] senang, tetapi begitu [beranjak] tua, mengalami kenyataan seperti itu. Bagaimana tidak, waktu kecil dipelihara orang tua, disenang-senangkan, apa pun kesenangannya bisa didapat, tetapi begitu punya suami, anak sudah banyak, ditinggal pergi, [suami] dibawa orang.)

Ia mengenang kembali saat suaminya dibawa tentara ke rumah di hari naas itu:

Lha ya ngertiku iki kandhani ya kae kok, seka mbale, bapak kuwi iki gur pamit, ‘Aku arep sekolah, kurang pinter.’–Kuwa seka lungo rong bengi, leh nginep rong bengi mbuh sewengi, mbok agi sedina sewengi kae biyen —karo ngulihke pit... Deweke leh lungo nggih nganggo niku, ngagem niku, bablas gek lungo. Celanane dril, kuning. Kuning ora kuning, putih ora putih, wong dril. Gek heme dowo putih, cekro. Kalung kacu mangkate iki. Kacamata mlenor. Gek ngombe banyu—diterke tentara iki ngombe banyu sekendhi, entek. Wong senengane kendhi, kaya ngono kae senengane nek ngombe. Jarang mateng ningo. Glek... glek... glek, entek jling. Gek pamit aku, ‘Sa’ anak dha penging tukaran, nek nejaluk ojo sa jek sa nyet. Ibu ora iso golek dhuwit,’ ngono kuwi lho. ‘Ibu lara-laranen,’ gek karo aku weling, ‘Bune Par, tambak-tambakno mripatmu, men gek bablas mari, tenan.’... Aku ya, wong lara-laranen, gur ngludro enek ndhapur, ya karo ngadhepi bocah cilik-cilik anakku kuwi, tas diusuk-usuk bapakne, endase. ‘Ojo-ojo nakal tenan ya le. Aku arep disekolahke pemrintah. Aku kurang pengalaman, aku kurang pinter. Suk nek aku wis pinter, aku bali mulih,’ gur ngono. (Lha ya aku ngertinya, yaitu, dari Balai Desa, bapak itu terus pamit, ‘Aku akan sekolah, kurang pinter.’–Itu dari pergi dua malam, nginap dua malam atau semalam, masih baru sehari semalam dulu itu–sambil memulangkan sepeda... Waktu pergi dia ya pakai itu, pakai

itu, terus pergi begitu saja. Celananya dril, kuning. Kuning ndak kuning, putih ndak putih, namanya juga dril. Kemejanya panjang putih, tebal. Berkalung sapatkan berangkatnya itu. Kacamatanya besar. Terus minum air– diantar tentara itu minum air sekendi, habis. Memang senangnya kendi, seperti itu senangnya kalau minum. Tapi air matang. Glek... glek... glek, habis tuntas. Terus pamit ke aku, 'Anak-anak jangan boleh berkelah, kalau minta sesuatu jangan semaunya. Ibu ndak bisa cari duit,' begitu itu lho. 'Ibu sakit-sakitan,' terus dia ingatkan aku, 'Ibunya Par, obati matamu, biar sekalian sembuh betul.'...Aku memang sakit-sakitan, berbaring di dapur, ya juga menghadapi anak kecil-kecil anakku itu, kepalanya baru diusap-usap bapaknya. 'Jangan nakal ya Nak. Aku akan di sekolahkan pemerintah. Aku kurang pengalaman, aku kurang pinter. Besok kalau aku sudah pintar, aku kembali pulang,' ya begitu.

Apa sesungguhnya yang terjadi pada suaminya, mengapa hal itu terjadi, Ibu Sri tidak pernah tahu.

Dadine cacahe—si tentara napa niku—mlaku wonten negetrek niku, mboten ngerti kula. Nyang endi parane, gek arep digawa nyang ngendi, ngoten niku nggih mboten ngerti kula.... Dhodhok selehe we ra ngerti, gek diomongno aku dhong loro, arep negetuke nyang jaba ora iso kok... Gur ngerti-ngerti wis eneng siaran, 'Wong-wong sing dha dikunjoro'—wis ngono lho gampangane, dicidhuk, wis ngono gampangane–'dicidhuk gek diuger enek omah Wonosari, nek dina Rebo entuk ngirim'. (Jadi, banyaknya–

si tentara apa itu–jalan ke truk itu, aku tidak mengerti. Mau ke mana tujuannya, mau dibawa ke mana [suamiku], begitu itu ya aku tidak ngerti... Duduk perkaranya aja aku tidak tahu, waktu diomongkan aku sedang sakit, mau mengikuti ke luar [rumah] tidak bisa kok... Tahu-tahu sudah ada siaran, 'Orang-orang yang di penjara'–ya begitu lho gampangannya, diciduk, ya begitu gampangannya–'diciduk terus dikurung di rumah Wonosari, kalau hari Rabu boleh mengirim [makanan]'.

Serombongan tentara dengan truk datang ke rumah Partono dan Ibu Sri bukan hanya untuk mengantar sang bapak pamit ke keluarganya. Mereka juga menggeledah rumah. Entah kenapa, mereka begitu yakin di rumah itu ada banyak dokumen penting dari PKI. Simak cerita Partono:

[Boleh] dikatakan nggeledah itu, di belakangnya sudah diancam dengan senjata itu. Terus luar sana sudah, senjata, senjata, senjata–ternyata semua sudah dikepung rumahnya...Bongkar-bongkar semua, diadul-adul (diobrak-abrik) itu. Tapi dokumentasinya yang dicari, dokumentasi apa kita juga yang tidak tahu, dia menemukan atau tidak juga kita tidak tahu. Karena orang di rumah tidak bergerak, tidak boleh mengikuti.

Sama halnya dengan Partono, ibunya bingung menyaksikan rumahnya diobrak-abrik:

Tentarane iki nggeledhahi nggon buku. Mbokne diarani enek buku sing disenengi tentara. Kari-kari 'Buk, ora enek sing disenengi.' Gur kawer, kawer, kawer ngono iki,

gendera merah putih! Kuwi rak angger wong ya nduwe, tho? Nah kuwi ora digawa. Gek aku ki dikandhani bocah, ‘Benderane Merah Putih anu, Bu Dhe, anu ditokke.’ ‘Lha, arep dipek apa piye karo tentarane?’ ‘Mboten, namung diiling-ilingi.’‘Lha iya ngeten, nek gendera Merah Putih ki angger wong ya entuk nduwe,’ aku ya gur ngono. (Tentaranya itu menggeledahi tempat buku. Mungkin dikira ada buku yang disenangi tentara. Akhirnya, ‘Bu, ndak ada yang disenangi.’ Lalu cari-cari sana-sini begitu itu, bendera merah putih! Itu setiap orang kan ya punya, toh? Nah itu tidak dibawa. Aku dibilangi seorang anak kecil, ‘Bendera Merah Putih anu, Bu De, anu dikeluarkan.’ ‘Lha, mau diminta tentaranya, apa gimana? ‘Tidak, hanya diamat-amati saja.’ ‘Lha iya begitu, kalau bendera Merah Putih ini setiap orang kan boleh punya?’ aku ya hanya [bilang] gitu.)

Setelah selesai mengobrak-abrik rumah, gerombolan tentara itu pergi dengan truknya, membawa ayah mereka yang berdiri di bak belakang. Partono, ibu, dan adiknya, tidak diberitahu ke mana ayahnya dibawa pergi. Beberapa tahun kemudian mereka baru mendengar: ia mungkin dibawa ke Penjara Wirogunan di Yogyakarta. Mereka pergi mencarinya ke sana, tapi tidak ketemu. Lalu mereka mendengar kabar lain: ia mungkin dibawa ke Nusakambangan. Mereka pun pergi ke sana, tapi lagi-lagi tidak berhasil menemukannya. Akhirnya mereka beranggapan, ayah mereka sudah dieksekusi, seperti yang dikatakan orang-orang di desa.

Jadi diambil sampai hilang, ke mana, di mana sekarang, umpama sudah meninggal jasadnya di mana, kalau masih hidup sekarang di mana saya juga ndak tahu. Tapi kabar-kabar orang itu, ya, 'Bapakmu sudah mati, sudah dimasukkan gubug,' itu bilangnya. Kalau dulu kan orang-orang PKI buangannya ke gubug, gitu.

Seperti ayah Partono, suami Ibu Narohmi di Pati, juga hilang. Ia dan suaminya adalah guru sekolah dasar di desa kecil waktu itu. Mereka punya dua anak, yang pertama perempuan dan yang bungsu laki-laki, saat itu masih bayi. Agar bisa mengurus anak-anak, mereka mengajar bergantian; kalau suaminya mengajar pagi, Ibu Narohmi mengajar siang. Seperti banyak guru pada zaman itu, suaminya adalah anggota PGRI non-Vak Central. Suatu hari, Kantor Polisi Juwana, melalui surat, memanggil semua anggota serikat guru itu ke kantor polisi. Suaminya yang sedang mengajar, langsung ke kantor polisi tanpa sempat singgah ke rumahnya.

Saat itu dipanggil di kantor polisi yaitu pada tanggal 8 November tahun 65. Setelah dari situ dia dibawa ke Pati dan tidak pulang ke rumah sampai saat ini, tidak tahu di mana tempatnya. Jadi, mulai ditahan, mulai itu, 8 November ke Pati dulu [ditahan di Gedung Nasional], lalu ke Simo [desa di Kabupaten Pati], lalu ke penjara [Pati]. Dan pada tanggal 29 Maret tahun 66 itu dipindahkan [ke Semarang], katanya dipindahkan, tapi saya tidak tahu tempatnya, dan ya istilahnya 'hilang' sampai sekarang dan tidak tahu di mana ribbanya.

Ibu Narohmi mengunjunginya di Penjara Pati sehari sebelum ia dipindahkan ke Semarang.

Yang terakhir tanggal 28 Maret. Waktu itu hari Senin. Saya ingat itu sama anak saya, dan saya sudah mendengar berita bahwa besok ada pemindahan gitu, dari luar itu. Dia kan sudah pesan, 'Kalau dipindah itu jangan susah, itu dipekerjakan gitu lho, bisa kerja. Nanti kamu jangan susah, biar tidak membebani, kamu ngirim terus sama saya,' bilang gitu suami saya. Dan, 'Ada di mana tempat saya, nanti saya mesti kirim surat.' Dia kan minta kosblat, minta bolpen gitu. Itu sudah. 'Kalau sewaktu-waktu pindah dari Pati, nanti memberi kabar.' Gitu, janjinya. Tapi ya ndak tahu sampai sekarang ya ndak ada beritanya... Nggak pernah ada berita, temannya seangkatan juga sama-sama ndak ada berita sama sekali.

Suaminya lenyap di tangan aparat negara.

Pengalaman pahit Ibu Narohmi terjadi pula pada Ibu Menik di Kabupaten Ambarawa. Suaminya waktu itu bekerja sebagai petugas penjara Ambarawa, sedangkan Ibu Menik bekerja di rumah, mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka. Hidup mereka pas- pasan saja: 'Karena pegawai rendahan, ya hidupnya nggak ini, dah. Pokoknya susah.' Pada Oktober 1965, ia baru melahirkan anak ketiga dan sedang mengandung delapan bulan. Suatu hari, sekitar dua atau tiga bulan setelah G-30-S, suaminya dan beberapa tetangga dipanggil ke kecamatan. Nampaknya, satu-satunya alasan pemanggilan itu karena suaminya adalah anggota serikat penjaga penjara. Tidak

terbersit dalam pikiran Ibu Nahromi, suaminya akan ditahan.

Suami saya diambil tanggalnya berapa saya lupa itu. Saya bilang, ‘Kalau kamu masuk penjara gimana dengan anak-anak?’ Saya bilang, ‘Sudah cuma sebentar. Nggak apa-apa saya juga nggak salah, kok balik cuma diamankan sebentar. Paling lama juga tiga bulan,’ katanya. Orang ini diamankan supaya nggak ada apa-apa. Terus, ndak apa, nggak ada apa-apa. Itu yang geger cuma di Jakarta.’

Sesudah suaminya diambil selama gelombang penangkapan berlangsung, Ibu Menik tak pernah bisa tenang.

Waktu itu adanya cuma takut dan takut. Kalau dengan suara mobil lewat. Hati ini terasa berdebar-debar seperti mau lepas. Karena biasanya suara itu berasal dari kendaraan-kendaraan yang akan mengangkut orang-orang dari kampungnya yang kemudian akan dibunuh entah di mana. Itu pasti ada orang yang mau diambil walaupun itu mobil umum, tapi kalau dengan suara mobil, rasanya sudah hilang itu hati, pikiran engga, karuan-karuan. Saat itu adanya cuma takut dan takut. Waktu itu engga, ada perasaan merdeka atau perasaan bebas, engga ada.

Suaminya ternyata ditahan di Kantor Polisi Salatiga. Lalu, polisi memberitahu, suaminya akan dipindah ke Nusakambangan pada akhir 1965 atau awal 1966.

Sudah gitu anak saya umur 37 hari, suami saya mau dipindah ke Nusakambangan, saya ada panggilan dari kantor polisi. Terus, saya pergi ke kantor polisi, dari

rumah saya berangkat setengah enam. Setengah enam dengan anak-anak saya bawa semua. Jalan saja pelan-pelan, sampai di Salatiga setengah sembilan. Karena sama anak-anak kecil kan, kita harus sering berhenti, jalan lagi. Yang jalan tiga, yang digendong satu, empat kan, buat lihat bapaknya yang terakhir waktu itu ya. Sudah itu, saya sampai di kantor polisi, jam setengah sembilan itu bapaknya sudah ada di sana sama teman-temannya itu yang mau diberangkatkan. Terus di situ bisa kumpul kawan banyak–ada orang yang sudah begitu tua sekali, punya buyut kok itu orang, isterinya juga sudah bongkok sekali, mau dibawa ke Nusakambangan. Buat apa ini? Kasihan sekali. Ya kalau masih muda sih ini ya, kalau sudah begitu tua, ngenes (trenyuh) kan ngelihatnya. Sudah begitu, saya ngomong sama suami saya, 'Nanti kalau sampai di sana kirim saja surat,' saya bilang. 'Ya, kalau saya sampai di sana saya kirim surat,' katanya. Benar sampai di Nusakambangan, mungkin berapa hari saya nggak tahu, terus dia dapat surat. Senang sekali saya ada suratnya datang.

Tapi, setelah itu tidak ada berita lagi dari, atau mengenai, suaminya. Seperti kebanyakan tapol lainnya, suaminya tidak pernah diadili atau dihukum. Ia tetap tidak tahu apa kesalahan sang suami; ia tidak tahu berapa lama suaminya akan mendekam di penjara. Bisa saja ia bebas keesokan harinya atau mungkin juga ditahan seumur hidup.

Jual Harta, Jual Tenaga untuk Hidup

Penahanan atau pelenyapan seseorang secara sewenang-wenang mungkin terlihat seperti fakta yang sederhana dan kering, semacam statistik kasus pelanggaran hak asasi manusia yang perlu dicantumkan dalam sebuah laporan. Sering tidak disadari bahwa kehilangan suami atau ayah berpengaruh besar terhadap kehidupan seluruh keluarga. Banyak keluarga saat itu, dan sampai sekarang sebenarnya, bergantung pada sang bapak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat bapak ‘diambil’ paksa, istri dan anak-anaknya harus berjuang keras memperoleh uang secukupnya. Banyak anak yang kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah dan menjadi buruh kasar yang dibayar murah.

Perubahan ini juga sangat mempengaruhi perkembangan emosional orang-orang yang ditinggalkan, khususnya mereka yang tidak pernah tahu apa yang terjadi pada anggota keluarga yang hilang. Mereka hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berjawab, pencarian yang sia-sia, dan akhirnya ketakutan untuk berharap atas apa pun. Tragedi 1965 seakan mengembangbiakkan bencana tak terkendali. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi tanpa alasan yang jelas, bukan hanya dirinya seorang yang menanggung pedih. Seluruh keluarganya, termasuk yang baru lahir, ikut menanggung kesusahan menahun.

Bagi Partono, kepergian ayahnya membawa serta seluruh kesenangan yang pernah ia nikmati di masa kecil. Tidak ada lagi macam-macam kegiatan sosial-ekonomi dan kesenian bersama warga desa di rumahnya. Tidak ada lagi jaminan hidup layak dari orang tua.

Setelah orang tua tidak ada, kita dengan penuh niat, penuh rasa tanggung jawab untuk hidup dengan payah kita harus menghidupi kita sendiri, termasuk orang tua, termasuk adik. Dengan segi kehidupan yang ditinggal oleh orang tua tidak bisa kita bayangkan bahwa kita masih bisa hidup sampai sekarang. Karena ditinggal oleh orang tua tidak bisa apa-apa. Setelah ditinggal orang tua, saya itu makan harus cari sendiri, kebutuhan kehidupan harian harus mencari sendiri.

Dia dan adiknya tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Sementara, harta-benda peninggalan ayahnya telah habis terjual untuk biaya hidup, untuk modal usaha, dan biaya ke sana-ke mari mencari ayahnya: ‘Itulah jerih payah dan suka-dukaan orang atau anak-anak korban PKI, yang tidak tahu-menahu masalah itu, tapi jadi korban sampai sekarang dengan kehidupan yang serba tidak menentu.’

Ibu Sri yang saat ditinggal suaminya sakit-sakitan, berusaha segera sembuh supaya bisa bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Ia menjual apa saja yang ia miliki, mengerjakan apa saja yang bisa mendatangkan uang seadanya. Sebagai bekas istri kepala desa yang biasa hidup berkecukupan, ia tidak malu bekerja sebagai buruh

di ladang atau jadi pembantu di rumah saudara-saudaranya yang membutuhkan.

Aku, gek enek ngomah kuwi dijapak-japakke, wis ejik disuntikke, ejik nanggone kyai, nek jaman biyen iki kyai. Dijapani mripatku kuwi, diklomoti batuke ngono. Ya, tak marek-mareke tenan, ya nganti adol wedus, adol sapi, adol kandang, ya adol tandho, ya adol omah, adol bakal omah, adol kekayon, adol ngalas, sangganku entek jling, kidul kae wis nyang wong kabeh. Ya tak nggo ragad sekolah, nggo madang, ngingoni cah cilik, nggo nyandangi. Turnehe sandangan iki okeh nglusuri, okeh sing nglusuri. Sanak sedulurku ya eneng nukoke kaos, nukoke kathok... Bareng wis entek jling, mas-masan entek, sapi entek, wedus entek, lemah entek, kuwi mau gek tak jak glidik buruh, turut tengah alas, ngono. Ora isin, nek aku, ya nyuci pakaian, menatu pakaian ya ana daerah etan kono. Nglampini sedulur-sedulur sing dha manak-manak-manak ora duwe pembantu kuwi. Gek aku sing mbantu nyapu, mbantu adang, mbantu menatu, mbantu gawe sarapan anak-anak nek arep dha sekolah esuk kuwi, ngono kuwi carane aku mbiyen. (Aku itu ketika di rumah dimantrai, terus masih disuntik, masih pergi ke kyai, kalau zaman dulu itu kyai. Dimantrai mataku, diludahi dahiku. Ya, aku sembuh-sembuhkan benar, ya sampai jual kambing, jual sapi, jual kandang, ya jual simpanan, ya jual rumah, jual bakal rumah, jual kayu-kayuan, jual ladang, hartaku habis bersih, sebelum selatan itu sudah dijual ke orang semua. Ya aku pakai untuk membiayai anak sekolah, memberi

makan, memelihara anak, memberi pakaian. Apalagi kalau pakaian itu sudah banyak yang ngasih, banyak yang memberi. Sanak-saudaraku ada yang membelikan kaos, membelikan celana... Setelah sudah habis semua, emas-emasan habis, sapi habis, kambing habis, tanah habis, ya yang tadi itu saya ajak kerja memburuh, jalan ke tengah hutan, gitu. Tidak malu aku, ya nyuci pakaian, nyuci pakaian di daerah timur sana, mengurus saudara-saudara yang melahirkan, ndak punya pembantu itu. Aku yang mbantu nyapu, mbantu masak, mbantu nyuci-setrika pakaian, mbantu buat sarapan anak-anak yang mau sekolah pagi itu. Begitu itu caraku dulu.)

Tapi, tetap saja perubahan ini tak mudah bagi Ibu Sri. Dia seorang diri harus mengurus dan membesarkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, sementara kemampuannya mencari nafkah terbatas. Ia mulai sering melamun, setiap malam tidak bisa tidur, dan akhirnya jatuh sakit. Cukup lama dia mengalami pergumulan hebat dalam jiwanya, sampai-sampai orang-orang sekelilingnya menganggap ia gila. Yang paling sulit baginya adalah membayangkan masa depan anak-anaknya.

Sok nangis aku, lha nangisku iki, 'Dhuh lelakon gek semono nganti tekan saiki, anakku muga-muga gek kapan-kapan, dha iso kaya kanca-kancane.' Ning kanca-kancane kawi dha nduwe boreg, dha nduwe modhal, anakku modhale gur lambe, dhengkul, dlamakan, utek. (Aku sering menangis, lha menangisku ini, 'Duh perjalanan hidup dari dulu sampai sekarang, semoga anak-anak

kapan-kapan, semua bisa seperti teman-temannya.' Tapi teman-temannya itu punya jaminan, punya modal, anakku modalnya hanya mulut, dengkul, telapak kaki, dan otak.)

Anak pertama Ibu Narohmi baru menginjak umur lima tahun ketika ayahnya ditahan, kemudian hilang. Cukup lama ia tidak sampai hati menceritakan apa yang sesungguhnya dialami suaminya pada anaknya. Tapi, setiap kali ia harus memberi penjelasan yang kedengaran masuk akal untuk memenangkan si anak.

Ya, nanya. Itu yang anak saya yang waktu di SD itu ya bilang. Kan sudah tahu dia kalau ayahnya gitu. Nanya, kalau diajari sejarah kan ya dia tanya. 'Bapak saya gimana Bu, apa seorang yang tidak baik?' 'Oh ndak. Bapakmu itu baik, sopan santun. Baik sama orang.' Gitu. Terlalu mengharapkan gitu lho, saya ya terpaksa membohongi. 'Ini cari kerja di luar kota. Besok kalau pulang kamu dibelikan oleh-oleh, diberikan rok yang baik, bagus-bagus,' gitu. Dulu waktu kecil ya gitu. Kalau di penjara saya bilang ya. 'Kenapa Bu, bapak di situ?' Dia terakhir kan ikut ngirim. 'Kok di sini?' 'Di sini kursus,' saya bilang gitu, 'kursus kamu nggak boleh ikut.' Kan dia mau ikut di kamarnya, gitu. 'Ndak, ndak boleh. Kamu kan anak kecil. Itu bapak kan sekolah, kursus,' gitu. Ya hanya dibohongi terus. Gitu. Tahunya ya sudah itu, sudah besar, sudah sekolah guru SPG itu, tahu. 'Di mana Bu, ayah saya sebetulnya itu?' Ya sudah ndak tahu dulunya gini-gini, sekarang nggak pulang kalau besok pulang ya Puji Tuhan. Ya begitu saja supaya anak itu tidak minder gitu. 'Kamu

pokoknya belajar dan harus pandai, tidak boleh minder. Kamu harus berbuat baik, budi pekertinya harus baik, harus beriman,' gitu. Kan supaya... anak itu kan takut kalau melihat itu, polisi, ngeliat anu... Kecilnya itu takut, gitu.

Anak perempuan satu-satunya ini sering membayangkan bila saja ayahnya masih hidup, ia mungkin bisa hidup lebih enak. 'Andaikata saya punya bapak, ya tidak begini ya, Bu?' ujar anaknya suatu hari padanya. 'Kan teman-teman bapak itu sudah banyak yang menjadi Kakancab (Kepala Kantor Cabang). Kalau ayah saya tidak mengalami kejadian itu, saya bisa kuliah.' Ibu Narohmi menjelaskan: 'Kan dulu dia tidak saya kuliahkan walaupun dia sangat ingin melanjutkan pendidikannya sampai universitas.' Kondisi keuangan keluarga tidak memungkinkan baginya membiayai biaya pendidikan putrinya sampai ke perguruan tinggi.

Setelah penangkapan suaminya, Ibu Narohmi diskors dari sekolah tempat ia bekerja. Baru enam bulan kemudian ia diijinkan bekerja kembali walaupun gaji yang ia terima hanya separuh dari yang sebelumnya, dan pangkatnya tidak pernah dinaikkan sampai akhir 1980an. Gaji suaminya sudah sama sekali tidak dibayarkan lagi. Sementara itu, ia masih mendapat beban tambahan, memberi makan kepada suaminya di penjara: 'Ya, bawa nasi, lauk pauk. Itu kan di sana nggak diberi makan... kalau ndak dikasih makan kan kasihan. Jadi makannya

dari rumah.’ Ia membeli bahan di pasar, memasak di rumah, lalu membawanya ke penjara di Pati.

Untuk memperoleh uang tambahan, Ibu Narohmi, ‘membuat snack, membuat tempe, dijual untuk kebutuhan makan sehari-hari… Tempenya disetorkan di warung, yaitu. Lalu jahit, saya kan bisa jahit. Itu untuk mencukupi, pokoknya mengajar juga dengan menjahit, membuat toko kecil gitu. Segala usaha saya, saya lakukan itu. Membuat kue saya titipkan di toko-toko kue itu.’ Usaha lain: ‘barang-barang yang ada saya jual. Saya jual satu per satu. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga untuk modal usaha, untuk makan.’

Di sela-sela kesulitan memperjuangkan kelangsungan hidup keluarganya, anaknya yang kedua, laki-laki yang masih berusia 1,5 tahun, meninggal dunia pada 6 Maret 1966. ‘Karena sakit-sakitan terus, mungkin itu kangen bapaknya, karena kulino (terbiasa) diasuh bapaknya kalau saya mengajar.’ Ia memang tidak punya cukup uang dan waktu untuk merawat kesehatan si anak. Aparat negara yang sudah ‘menghilangkan’ suami Ibu Nahromi, secara tidak langsung sudah membunuh si bayi malang itu.

Kehilangan dua orang terkasih dalam waktu hampir bersamaan menambah beban penderitaan Ibu Nahromi:

Dukanya ya lebih banyak lagi. Kalau saat itu ya duka yang sangat dalam. Karena sudah ndak bisa diceritakan, waktu anak saya sakit dan sebagainya itu ya duka yang sangat mendalam pokoknya. Tapi untung Tuhan masih mengasihani, kesehatan dan umur panjang. Sangat duka

kalau... tapi ndak dipikirkan, gitu. Kan kita bergantung kepada Tuhan, semuanya diserahkan kepada Tuhan... Seperti saya kan ditinggalkan suami, gitu lho. Masih terlalu muda. Kan masih baru anak dua. Enam tahun pernikahan saya. Kan terus ditinggalkan sampai sekarang, gitu lho.

Ia juga tidak bisa meminta bantuan keluarganya sendiri atau keluarga suaminya,

Keluarga saya? Malah terkena semua. Malah hancur. Keluarga suami saya itu terkena semua, hancur itu. Yang sudah dewasa terkena, yang belum... Itu kan semuanya itu menjadi guru semua, tiga orang. Suami saya yang tua, terus yang tengah, lalu satu. Ini yang ndak kembali ini suami saya, hilang. Yang satu pulang dari Pulau Buru, yang satu meninggal di Nusakambangan, ipar-ipar saya itu. Kalau saudara saya sendiri yang terkena satu thok, yang lain ndak.

Sebenarnya ayah dari Ibu Narohmi juga terkena dampak operasi pembersihan ini. Ia sempat ditahan selama enam bulan, kemudian dipecat dari pekerjaannya di Jawatan Penerangan, lebih karena menantunya anggota PGRI non-Vak Central. Saudara iparnya yang lain malah bukan anggota organisasi apa pun, tapi ikut dipecat dari kantor pegadaian karena namanya tercantum di dalam daftar iuran Serikat Buruh Pegadaian. Sedangkan istrinya yang bekerja sebagai guru akhirnya dipecat juga.

Yang paling aneh bagi Ibu Narohmi adalah penangkapan terhadap seorang keponakan suaminya yang

masih duduk di bangku SMEA. Kalau Ibu Nahromi kebetulan sibuk dengan pekerjaannya, ia meminta tolong pada keponakannya mengirim makanan ke Penjara Pati untuk paman-pamannya. Perjaka muda ini tidak terlibat organisasi apa pun, tapi, suatu hari, dia ditangkap kemudian ditahan untuk waktu yang cukup lama.

Kondisi ekonomi rumah tangga Ibu Menik tidak lebih baik. Sebelum Peristiwa 65 terjadi, sumber ekonomi satu-satunya dalam kehidupan rumah tangganya hanyalah dari penghasilan suaminya sebagai pegawai rendahan di Penjara Ambarawa. Namun, sejak suaminya ditahan, dia tidak lagi menerima gaji itu. Tanpa keterangan apa pun, gaji suaminya distop. Bahkan, uang yang ditabungkan di tempat suaminya bekerja juga tidak diberikan padanya. Suaminya telah diberhentikan dari pekerjaannya begitu saja tanpa ada surat-surat yang mengungkap alasan pemberhentian kerja tersebut. Sejak saat itu dia harus mengusahakan sumber kehidupan sendiri dan masih harus mengirim makanan bagi suaminya di tahanan. Sementara, sebulan lagi, dia akan melahirkan anaknya yang keempat.

Sebelum dipindahkan dari Penjara Ambarawa, suaminya berjanji akan mengirimkan kabar sesampainya di Penjara Salatiga. Benar, selang beberapa hari dari saat pemindahan, Ibu Menik menerima sepucuk surat dari bekas kertas pembungkus rokok yang bertuliskan: ‘Anaknya sudah lahir apa belum?’

Itu jam enam saya menerima surat–eh mendadak perut saya ini seperti tahu. Saya terasa mau melahirkan tapi

saya diam saja. Di rumah anak saya tiga. Terus anak-anak saya angkat ke tempat neneknya, terus saya mampir pasar. Mampir pasar saya mau belanja ndak jadi, saya pulang. Pulang sampai di rumah, jalan sudah susah, sudah ini, sudah mau uwat (keluar) gitu. Ha, saya nggak makan nggak apa, eeh saya di dapur mau ambil air putih saja saya merangkak [ketawa]. Eh merangkak saya ke rumah, karena dapur saya agak ke bawah gitu, pakai rolak (tangga rendah), dua tingkat itu rolaknya. Terus naik, naik lagi di bale, di bale saya mikir, 'Kalau saya melahirkan di tikar, nanti tikarnya kena darah'. Mikir saya, 'Ini tikar saya gulung, terus saya melahirkan di ini–kalau orang Jawa bilang dari galar (alas tidur yang terbuat dari potongan bambu). Terus saya lahirkan itu anak di galar, saya sendirian, tanpa orang. Ada tetangga tapi saya nggak mau, ya kalau mau, tetangga juga senasib dengan saya. Sesudah itu, lahir itu bayi terus saya singkirkan saya bungkus dengan kain, saya mapan lagi, itu saya pencepat perut saya lahir itu ari-ari terus saya singkirkan saya pergi mandi.

Ibu Menik beruntung tidak mengalami masalah selama melahirkan. Tapi, ia ingat tetangganya heboh saat mereka tahu ia melahirkan seorang diri saja.

Saya baru mandi, itu tetangga saya ngomong, 'Tumben hari gini mandi', katanya. Saya bilang, 'Orang gerah namanya, entuk (dapat) mandi biar segar', saya bilang gitu. Tapi ndak tahu halau saya habis melahirkan. Terus saya–apa tetangga saya itu, 'Kok ada tangis itu orok?'

Saya bilang, ‘Itu anak saya.’ ‘Lho, kamu melahirkan?’ ‘Iya.’ Oh, terus nangis itu tetangga yang ada yang dagang di depan rumah saya dan pernah berdagang nasi itu dibilangi,

‘Itu si Menik melahirkan.’ ‘Lho kok meneng-meneng (diam-diam) nggak mau ngomong. Sama siapa? Kok sendiri, aduh…aduh…aduh. Untung nggak ada apa-apa,’ katanya. Tapi saya sehat-sehat saja ini, itu keadilan Tuhan itu. Orang yang kepepet (terjepit) ya kayak gini. Sudah gitu, anak saya suruh manggilkan dukun. Setengah sembilan itu dukun dipanggil, sampai jam 11 [siang] lebih baru datang. Sudah gitu yang datang cuma tetangga sebelum sama saudara atau orang lain nggak ada yang mau menengok saya, nggak ada. Padahal kalau di desa kan nggak gitu. Biasanya kalau ada yang melahirkan eeh ada banyak yang berkunjung. Itu nggak ada.

Walau masih letih karena baru melahirkan, Ibu Menik tidak punya waktu cukup untuk beristirahat. Ia harus terus bekerja mencari uang.

Anak saya yang paling kecil setelah sudah gitu, saya cari makannya, saya ini–ya orang nggak punya modal–saya buruh saja, buruh nutu (menumbuk beras). Waktu itu kan belum ada selep (mesin penggilingan beras), untuk numbuk itu lo, numbuk padi setengah kwintal sehari, itu dari pagi sampai jam 12. Saya ini numbuk beras itu dua kilo, kalau yang sekilo saya masak, yang satu kilo saya tukar dengan sayuran. Itu ada sampai satu tahun itu, gitu

tu saya. Tangan saya sampai seperti kaki itu tebalnya [ketawa].

Dari pekerjaan itu, Ibu Menik bisa menabung untuk modal usaha dagang sayuran di pasar: ‘Saya dagang sayuran di Semarang, bawa itu nangka ke Semarang, cabe, daun bawang dibawa ke Semarang itu. Kalau berangkat jam 11 siang, saya pulangnya sampai jam enam, jam tujuh baru sampai di rumah.’ Saat keadaan ekonomi keluarganya membaik, anak-anaknya sakit-sakitan. Modal dagangnya akhirnya habis: ‘Masuk rumah sakit ndak sekali dua kali, gantian aja. Saya habis, kehabisan modal.’

Harta satu-satunya yang tertinggal adalah sebuah rumah yang ia bangun di atas tanah milik adiknya. Namun, suatu ketika, datang orang yang tak ia kenal memaksanya menjual rumah itu. ‘Kalau enggak dijual akan dibuldoser,’ katanya. Terpaksa, saya takut, kalau dibuldoser betul siapa yang mau menolong. Akhirnya rumah itu saya jual, laku Rp14.000 waktu itu.‘

Setelah menjual rumah, Ibu Menik dan anak-anaknya tinggal bersama saudara-saudaranya–salah satu kakak perempuannya juga kehilangan suami–di rumah orang tuanya. Uang hasil penjualan rumah ternyata tidak cukup untuk menghidupi seluruh keluarga. Akhirnya, ia memutuskan pergi merantau ke Jakarta mencari kerja. Itu terjadi pada 1967, saat usianya baru 25 tahun.

Saya ngomong sama emak, ‘Saya titip ini anak-anak, saya mau ke Jakarta cari kerjaan,’ saya bilang. ‘Kamu di Jakarta belum tahu, terus di sana yang mau dituju ke

mana?’ ‘Tahu dah pokoknya nanti Tuhan yang ngasih lindungan ke saya, Mak. Pokoknya saya enggak berbuat yang jelek. Nanti kan ada pertolongan. Ini semboyan saya.’ Ya. Mak cuma bisa ndoakan hati-hati saja,‘ gitu.

Ibu Menik belum pernah ke Jakarta, tapi dia nekat berangkat seorang diri. Setibanya di terminal Lapangan Banteng Jakarta, dia tak tahu harus pergi ke mana. Sedang kebingungan, ‘Grogol, Grogol,’ suara kenek kendaraan umum menawarkan jasa angkutan. Dia putuskan untuk naik kendaraan itu tanpa tahu di mana letak Grogol. Ketika sampai di Grogol, seorang ibu tua yang rupanya menangkap kebingungannya menghampirinya:

Saya jalan di pinggir jalan gitu. Alhamdulillah, ada orang tanya, ‘Mau ke mana, Dik?’ katanya.

‘Tahu ini, Kak. Saya bingung mau ke mana?’

‘Lho, Adik dari mana?’

‘Saya dari Jawa,’ saya bilang.

‘Baru kali ini ke sini?’

‘Ya.’

‘Oh, kalau gitu mampir saja ke tempat saya. Kalau mau nginap,’ katanya. Alhamdulillah saya nginap di situ. Saya menginap di situ ada satu bulan, saya dicarikan kerjaan itu. Ada orang menolong gitu baiknya. Dicarikan kerjaan

Ibu Menik berpindah-pindah kerja. Pertama menjadi buruh di pabrik beton, kemudian pindah ke kantin, ironisnya, di gedung Mahkamah Agung, dan terakhir menjadi pembantu rumah tangga. Selama lebih kurang

empat tahun bekerja di Jakarta, ia tidak pernah pulang karena ongkos untuk pulang kampung terlalu mahal. Ibu Menik berpikir lebih baik seluruh uang yang dihasilkan dikirim kepada anak-anaknya.

Mencari Orang Hilang, Menunggu Orang Pulang

Ketika orang yang dicintai pergi tanpa ada penjelasan resmi dari pemerintah, anggota keluarga dihantui rasa khawatir dan ingin tahu yang tak berkesudahan. Istri atau anak biasanya terus-menerus mencari informasi dari segala sumber dan mendatangi tempat-tempat penahanan yang diduga ‘menyimpan’ sang suami/bapak. Kebanyakan pencarian tak menghasilkan apa-apa kecuali berita dari mulut ke mulut bahwa orang yang terkasih sudah dibunuh.

Ibu Sri, ibu dari Partono, setelah suaminya diambil, bermaksud mengunjunginya di dalam tahanan. Dia mencari suaminya ke Kodim karena mendengar yang membawa suaminya adalah petugas keamanan dari Kodim. Di Kodim sudah banyak orang berkumpul, mencari sanak-saudara yang hilang atau mengunjungi mereka yang ditahan. Dengan sabar mereka menunggu giliran untuk mengirim makanan atau mendapat kesempatan bertanya pada petugas Kodim mengenai keberadaan anggota keluarga mereka. Ibu Sri, tak terkecuali, ikut mengantri.

Seperti keluarga yang lain, ia membawakan suaminya perlengkapan mandi, pakaian ganti dan sarung, serta gula merah dan jadah (makanan terbuat dari ketan yang bisa bertahan lama). Tapi ia tak pernah bertemu muka dengan sang suami.

Lha, aku kawi angger ngirim sing entuk ya gur keluarga sing katut enek di kamp kawi. Nek bapakku sing jenenge Lurah Karyo kawi ora pernah ditampa.

Ditampa jarene arak dinehke, ning anggone sing anu iki ora ngerti aku. ‘Em pun selehke ngriku mawon, mengko tak terne, mengko tak nehke.’ (Lha, aku itu setiap ngirim yang dapat ya keluarga yang ada di kamp itu. Kalau suamiku yang bernama Lurah Karyo itu tak pernah diterima. Diterima katanya akan disampaikan, tapi tempatnya yang mana itu aku ngga ngerti. ‘Sudah taruh di situ saja, nanti kuantarkan, nanti kusampaikan.’)

Ketika Ibu Sri mendapat kesempatan bertanya pada petugas tentang keberadaan suaminya, bukan penjelasan yang ia peroleh dari tentara di Kodim.

‘Okeh kancane bojomu iki ra gur kowe dhewe ning ditinggal bojomu!’ Eh, ndak di dhongke ngono kaya kuwi. Aku nangis. ‘Kowe ojo nangis!’ mendak ngono tentarane iki nggetak kok. Lha enek nggon meja iki dilemeki ijo to. Gegere angger nggebrak ngono iki yo nganti, walah! Sepatune muni, pruuuk...pruuuk...pruuuk...huduh [menghela nafas sambil memukul-mukul dada] dhug...dhug...dhug, ngono wisan. Lha wong nduwe penyakit jantung ya ndredeg kok.... Ning meja ijo, gek

therek-therek kae, kancaku ya randha-randha sing dha ditinggal-tinggal kuwi. (‘Banyak teman suamimu ini bukan kamu saja yang ditinggal suamimu!’ Eh, begitu aku dibuat mengerti. Aku menangis. ‘Kamu jangan nangis!’ sudah begitu lalu tentaranya menggertak. Lha ada meja yang dialasi hijau toh. Badannya setiap menggebrak gitu sampai walah! Sepatunya berbunyi pruuk... pruuk... pruuk... haduh dug... dug...dug, seperti itu lah. Lha orang punya sakit jantung ya berdebar-debar kok.... Di meja hijau, sudah berderet-deret gitu, temanku ya janda-janda yang ditinggal-tinggal itu.)

Selama bulan-bulan berikutnya, ibu Sri tetap tidak tahu di mana suaminya berada. Ia bertanya pada banyak orang dengan harapan mendapat petunjuk. Ia mendengar banyak tahanan yang dipindah ke LP Wirogunan di Yogyakarta, lalu pergi ke sana untuk mencari suaminya. Ibu Sri mendatangi penjara itu sampai empat kali, tapi tidak berhasil mendapat informasi mengenai suaminya. Petugas di sana hanya berkata, ‘Mriki mboten enten Bu, mbenjing nek wonten kula kabari.’ (Di sini tidak ada Bu, nanti kalau ada akan saya kabari.)

Ibu Sri masih belum putus asa. Setiap kali sesama keluarga tahanan atau petugas keamanan memberinya informasi tentang tempat penahanan suaminya, walau hanya berupa kemungkinan–karena banyaknya tempat yang dijadikan lokasi penahanan pada saat itu–akan selalu didatanginya. Sampai suatu hari, ia memutuskan pergi ke Cilacap: ‘Nyang Cilacap nganti ketherek-therek adol bibit,

aku iki nyang Cilacap. Adol sapi. Badak, ora ketemu! We ora wani nyabrang aku, metu nggon sepur... apa kuwi? Laut? Ya gur diwangsuli enek nggon sandhing segara kuwi.’(Ke Cilacap sampai terbirit-birit jual bibit, aku ini ke Cilacap. Jual sapi. Badak, tidak ketemu! Tak berani nyabrang aku, keluar dari kereta... apa itu? Laut? Ya terus dibilangi ada tempat di seberang lautan itu.’)

Setelah perjalanan sia-sia ke Cilacap, Ibu Sri hanya tinggal berharap suatu saat suaminya akan kembali. Bermalam-malam ia habiskan dengan merenung. Kadang-kadang ia jalan kaki mengitari rumahnya; kali lain ia berdiam diri di emperan rumah. Dia sering menyanyikan lagu ‘Teluk Bayur’, lagu kesenangan suaminya sebagai pelepas rindu dan pelipur hati.

Lha ya, nek ngarep-ngarep wong kok nganti sasuwene. Nganti untu entek dha onpong, rambute nganti putih, harah. Nandur kambil, mandur agi nem sasi, saiki wohe ndadi, ora mulih. Lha ya wis suwe tho? ... Gek ya nganti kesel, nek bengi mbok ning kursi, nek esuk byar padhang, ra teka. Eh mbokne mengko sore. Sore ra teka. Eh mbokne mengko bengi. Bengi ra teka. Esuk neh. Entuk esuk, mbok gek wengiiiiii. Aku gur ngarep-arep dina iki ta'kon nganu, ‘Nek wengi ya gek padhango, nek wis padhang gek wengio, nek wengi gek padhango’. Gur ngono aku mbiyen. [terawa kecil] (Lha iya, kalau mengharap-harap orang kok sampai begitu lamanya. Sampai gigi habis onpong semua, sampai rambut memutih, hayo. Menanam kelapa, nanam dari umur masih

enam bulan, sekarang buahnya lebat, tidak pulang. Lha ya sudah lama toh? ... Sampai capek, kalau malam aku duduk di kursi, kalau pagi begitu terang, tak juga [ia] datang. Eh barangkali nanti sore. Sore tak datang. Eh barangkali nanti malam. Malam tak datang. Pagi lagi. Dapat pagi, maunya malaaam. Aku berharap-harap hari ini aku suruh, 'Jika malam tiba segeralah siang, jika sudah terang segeralah jadi malam, jika malam segeralah terang.' Seperti itu aku dulu.)

Berbeda dengan Ibu Sri, Ibu Nahromi tidak lagi berusaha mencari suaminya setelah menghilang dari Penjara Pati pada Maret 1966. Ia tidak tahu harus berbuat apa, karena bingung dan ketakutan.

Saya terus ndak mau ngurus, ndak tahu di mana ngurusnya, kan ya takut sendiri, kan ya di mana tempatnya... Ya nggak tahu. Ya gosip-gosip anu ya ndak, ndak saya tanggapi, saya ndak tahu sendiri kok. Gosipnya ya mungkin yang ndak pulang meninggal gitu, kata orang-orang umum.

Ia merasa gosip bahwa suaminya sudah dibunuh ada benarnya. Ia yakin, jika suaminya masih hidup, tentu akan mencari jalan untuk mengirim surat atau pesan kepadanya. Namun, ia juga tidak bisa meyakinkan diri bahwa suaminya sudah dibunuh.

Menyikapi gosip itu ya sedih saya. Sedih tapi kan tidak bisa berbuat apa-apa ya, hanya menangis thok, tapi kan saya [pikir], 'Ndak mungkin ah,' gitu. Ndak mungkin meninggal, mesti besok ketemu lagi dalam hati, ya gitu.

Ibu Nahromi hidup dalam kegamangan selama 37 tahun.

Ibu Menik yang tinggal di sebuah desa di pinggir kota Ambarawa, harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengunjungi suaminya di Salatiga. Tiga hari sekali ia pergi membawa makanan untuk suaminya yang ditahan di kantor polisi. Kadang, ia berjalan kaki menggendong seorang anaknya dan menuntun yang lain. Perjalanan itu memakan waktu sekurangnya dua jam, dan setengah hari waktunya tersita untuk urusan itu. Sisa waktu ia gunakan untuk mencari nafkah dan mengasuh anak-anaknya. Di tengah pengorbanan seperti itu, ia masih juga dicaci-maki oleh polisi dan tentara yang menahan suaminya.

Sudah pernah saya ngirim di Salatiga, di situ nggak diterima dengan baik, malah saya dibentak-bentuk. Karuan seperti, aduh seperti apa ya, pencuri saja nggak begitu. Mbentak-mbentak ngatain saya PKI, ini... itu. Saya cuma diam saja. Saya sampai bingung. ‘Kenapa suami saya dibilang PKI? Suami saya ini pegawai, dia momong [mengasuh] orang hukuman.’ [Orang] hukuman saja sama suami saya baik-baik.

Walau tahu suaminya ditahan di Salatiga, ia tidak pernah tahu bagaimana nasib suaminya kemudian. Saat mendengar cerita-cerita tapol yang menghilang secara misterius dari penjara, ia juga sempat berpikir bahwa suaminya pun akan mengalami nasib serupa. Suatu saat, ia berjalan ke Salatiga dengan dua istri tapol lain dan mendengar bahwa beberapa tapol akan dieksekusi.

Saya waktu perutnya gede sudah pernah dibilangin orang, ‘Hei, besok tahanan di Salatiga mau digantungi di lapangan,’ katanya, ‘mau digantung.’ Saya, semua, namanya Bu Ratmo, Bu Sri, orang tiga bunting gede semua itu, jalan dari sini jam setengah empat kali, jalan bertiga semuanya sangu (berbekal) nasi dingin sama garam berangkat bareng-bareng orang tiga itu mau lihat digantung di mana? Itu siapa yang mau digantung? Ya toh. Eeh, nggak tahunya kita sampai di lapangan di Salatiga, ndak ada apa-apa. Saya tunggu itu sampai jam 11 siang. Kepanasan nggak ada apa-apa. Pulang dah, jalan lagi, seperti orang mau drum band itu orang tiga. Jalan. [ketawa].

Kekhawatiran Ibu Menik sangat beralasan. Suami kakak perempuannya yang juga ditahan di Penjara Ambarawa, pada suatu hari dibawa entah ke mana. Ia kemudian membantu kakaknya mencari suaminya.

Pas kakak ipar saya dipindah itu. Harinya kalau nggak salah itu Jumat Legi. Mau lebaran atau habis lebaran itu. Kakak saya itu, melihat suaminya di atas truk itu, lari gitu nututin (mengejar). Tapi lakinya cuma gini-gini [melambai-lambai] dalam truk, kan ndak boleh, ditutup rapat itu mobil. Ditutup rapat itu mobil, terus kakak saya sampai merangkak-rangkak nututi. Orang mobil truk jalan dikejar, ya nggak bisa. Sampai merangkak-rangkak di dekat lapangan itu, Ambarawa itu.

Kebetulan Ibu Menik baru pulang dari mengirim makanan suaminya yang ditahan di Salatiga. Mereka

berpikir bahwa mungkin suami kakaknya juga dibawa ke Salatiga. Keesokan harinya, Ibu Menik pun bergegas pergi ke Salatiga untuk mencari di mana kakak iparnya ditahan.

Nyariin kakak saya di Salatiga ke Yon N, ke Kantor Polisi, ke Kodim. Kakak saya, saya cari hujan-hujan saya bawa itu anak saya belum umur 20 hari–waktu itu mau Lebaran–hujan deras setengah mati itu hujan, aduuuh deras banget. Saya nggak bawa payung, orang nggak punya, saya cuma bawa sangu popok (bekal kain bayi) sama gendong anak gitu saja saya jalan, nggak naik kendaraan dari Banyu Biru ke Salatiga itu juga. Jalan, sampai di Salatiga, yaitu hujan, saya ke sana ke sini bawa anak, kehujanan cuma saya tutupi saja itu pakai selendang.

Sudah beberapa tempat didatangi, namun tidak juga dia temukan kakak iparnya. Akhirnya Ibu Menik putuskan untuk kembali ke rumah karena sudah letih berjalan kaki selama dua jam lebih ke sana-kemari. Sudah sore, namun hujan belum juga reda. Ia putuskan untuk berteduh di sebuah halte. Kebetulan ada seorang kenek kendaraan umum yang mengenalnya.

‘Lho Bu dari mana?’ katanya. ‘Saya nyariin kakak saya,’ ngomong. ‘Alah sudah nggak usah dicari, itu anaknya kasihan. Coba saya lihat,’ katanya. Anak saya dibuka, memang masih merah, belum ada satu bulan, baru 20 hari. Dibuka, anak saya sudah biru, terus diminta sama dia. Ada gurita, ada bajunya itu dilepasin sama dia. Dia beli minyak kayu putih, dibedaki pakai kayu putih itu.

Terus baju yang buat ngenek dia itu dilepas buat bungkus itu anak saya. Ini–hati kalau ingat waktu itu waduh setengah mati.

Perjalanan ini menandai saat paling buruk dalam hidupnya. Ia dan kakaknya harus menghadapi kemungkinan bahwa orang yang mereka cintai telah dibunuh. Sementara itu, dinginnya hujan hampir saja membunuh bayinya sendiri. Ibu Menik yang mudah tertawa ini selalu menangis saat mengenang hari itu.

Saya pulang sampai di rumah, kakak saya waktu itu masih nangis [menangis], apa lagi melihat anak saya, kecil-kecil gitu, terus yang orok kehujanan sampai–hai gitu dah pokoknya paling menyakitkan [menangis]. Sudah gitu kakak saya bilang, 'Sudah nggak usah nyari lagi, biar kakakmu pergi pindah ke mana ngga tahu. Sudah kita terima saja dah. Pokoknya kita kalau malam minta saja sama Tuhan supaya nanti kelihatan, yang benar, yang salah Tuhan yang ngasih pengadilan nanti. Kita terima saja kalau gini [menangis],' katanya. Terus saya bilang, 'Ya.'

Karena kakak iparnya menghilang, Ibu Menik mulai khawatir suaminya akan 'dipindah' tak tentu ribbanya. Ia sering mendengar: banyak kejadian, tapol yang katanya dipindahkan ke lokasi tahanan lain ternyata tidak ada lagi kabar beritanya. Ia ingin memberi sejumlah besar uang kepada para penjaga yang berjanji akan menghalangi suaminya dipindah dari Salatiga.

Saya sudah pernah dimintain duit. Waktu itu berapa ya? 30 ribu. ‘Supaya nggak dipindah jauh,’ katanya. Dari mana itu saya nggak tahu. Terus satu-satunya saya punya radio yang modelnya kayak roti tawar itu sudah saya jual, laku 3.000 [terawa]. Lainnya nggak ada. Ya lainnya saya jual kain panjang, saya kumpulkan itu, jual. Tempat tidur saya kumpulin supaya suami saya nggak dikirim jauh. Nggak tahunya tetap saja, Nusakambangan. Sama saja ya.

Ibu Menik sempat merasa sedikit lega setelah menerima surat dari suaminya begitu ia sampai di LP Nusakambangan. Tapi, ia masih menyimpan rasa khawatir apakah suaminya akan selamat di salah satu penjara yang terkenal paling mengerikan bagi tapol itu. Waktu masih bekerja di Jakarta, ia menerima kabar bahwa suaminya telah dibebaskan pada 1971.

Tahun 71 ada surat dari Jawa, katanya suami saya pulang. Suami saya pulang, saya nggak percaya itu, yang ngirimi surat saudara saya. Saya nggak percaya, ‘Jangan-jangan ini cuma saya disuruh pulang saja, nanti di Jawa.

kerja apa lagi, saya ngomong,‘ pikir saya begitu. Sudah gitu suami saya yang kirim surat, ’Pulang dulu sebentar. Kalau memang kamu sudah kerasan di sini, urusin dulu anak. Kalau anak sudah bener, baru dah kalau kamu mau pulang,‘ katanya. Nah, setelah ada tanda tangan surat dari suami saya, saya pulang. Pulang, saya ketemu suami saya sampai–dia baru mau ke sektor kepolisian–saya naik andong itu, saya ketemu di jalan. Dia mukanya merah,

saya juga menangis. Allah, ya gembira campur gimana ya. Haru. Terharu sekali.

Selama enam tahun, Ibu Menik hidup dalam ketidakpastian. Ibu Menik boleh dibilang sedikit lebih beruntung daripada keluarga Ibu Sri dan Partono, dan Ibu Narohmi. Paling tidak, penantiannya berujung pada kembalinya sang suami ke tengah keluarganya.

Di Bawah Bayang-bayang Masalah Orang Tua

Operasi ‘pembersihan’ terhadap orang-orang yang dianggap PKI tidak saja memporak- porandakan kehidupan keluarga, tetapi juga menghancurkan kerukunan hidup bermasyarakat. Penangkapan, penahanan, dan pembunuhan sewenang-wenang tanpa ada penjelasan terhadap orang-orang yang dianggap PKI sudah membuat sebagian masyarakat berusaha membuktikan bahwa mereka bukan PKI, tak ada hubungan apa pun dengan PKI maupun dengan orang-orang yang dianggap PKI. Kecurigaan, ketakutan, dan antipati menjadi langgam pergaulan hidup, mendorong warga masyarakat biasa yang selamat dari gempuran aparat negara untuk turut menghukum keluarga korban secara sosial.

Negara Orde Baru semakin mempertebal jurang pemisah antara warga yang selamat dan warga yang jadi korban dengan mempropagandakan pentingnya ‘bersih

lingkungan’. Setiap saat keluarga korban diingatkan akan status sosial mereka, dan masyarakat dibuat senantiasa berjaga-jaga akan ‘bahaya laten’ di sekeliling mereka. Anak-anak korban tidak terkecuali. Yang sudah lahir saat Tragedi 1965 terjadi maupun yang lahir kemudian, segera berkenalan dengan pembatasan dan penghinaan. Stempel ‘anak PKI’ melekat di kedirian mereka seperti kutukan dan tak ada ruang untuk bertanya: ‘Mengapa?’

Memang, teror yang ditebar aparat negara tidak selamanya membuat semua orang kehilangan empati dan solidaritas terhadap korban. Banyak kasus memperlihatkan bagaimana warga masyarakat yang selamat berupaya melindungi dan membantu keluarga korban, biasanya secara sembunyi-sembunyi. Aturan ‘bersih lingkungan’ pun tidak selalu berhasil diterapkan sepenuhnya karena begitu jarang ditemui satu keluarga yang tidak punya hubungan sama sekali dengan orang-orang yang dianggap PKI, entah sebagai saudara atau teman. Celah-celah serupa inilah yang acapkali membuat keluarga korban bisa bernafas sedikit lega dan berkelit dari himpitan yang diciptakan negara.

Selama beberapa tahun setelah ayahnya dibawa pergi, Partono terus mengalami diskriminasi di sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingat pernah berhenti main sepak bola hanya karena anak-anak lain menyebut dirinya ‘anak PKI’ dan tidak mau bermain bersamanya.

Ketika saya masih senang berolahraga sejak kecil aja kalau ke lapangan, kalau saya dilihat karena keturunan

orang PKI, itu saja saya dan keluarga-keluarga orang PKI tidak boleh masuk ke lapangan, karena itu ‘orang-orang anak PKI’, dikatakan ‘karena sampah masyarakat, yang tidak berguna bagi masyarakat’.

Baru menjelang remaja ia mendapat kesempatan bermain bola lagi. Kesempatan ini Partono gunakan untuk menunjukkan: walaupun ‘anak PKI’, ia sanggup bermain dengan baik. Saat masih SMP, ia menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di desanya. Prestasi ini menarik perhatian camat-camat di wilayahnya. Tanpa peduli latar belakang keluarga Partono, pak camat selalu memintanya ikut memperkuat tim sepak bola kecamatan. Bahkan setelah lulus SMA dan tinggal di Yogyakarta, ia masih sering dipanggil pulang untuk memperkuat tim kampungnya.

Saya itu kan pemain sepak bola, saya penjaga gawang, sering kali diambil pak camat, dari desa untuk melawat ke mana, untuk pertandingan ke mana, saya untuk jaga gawang. Pernah saya pertandingan di AKABRI di Magelang sana. Banyak orang itu, kan saya tidak memamerkan potongan saya. Kan dikira saya dari AKABRI sana, orang mahasiswa kok, jaga gawang di sana. Sampai pak camat itu sering mbelikan sepatu, kaos, hadiah sepak bola. Tapi saya kan cari nafkah di Yogya, sering dijemput dikasih transport untuk ne-bis, nah untuk sepak bola.

Namun, prestasinya di bidang sepak bola tidak membuat Partono sama sekali bebas dari bayang-bayang aturan ‘bersih lingkungan’. Karena ayahnya dulu kepala

desa dan beberapa saudaranya bekerja untuk pemerintah, ia berharap bisa menjadi pegawai negeri juga. Setelah lulus SMP, ia masuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan berharap kelak akan menjadi guru sekolah. Tapi kemudian ia tahu tidak akan mungkin menjadi guru karena ayahnya dianggap PKI. Ia keluar dari sekolah itu dan menjadi buruh lepas.

Saya terasa itu kalau orang-orang, teman-teman, ya kalau seperti mengingatkan keberadaan orang tua saya, keberadaan itu. Tiap orang bercerita, ngomong-ngomong masalah orang PKI, saya terasa. Apalagi kalau tersinggung masalah, 'Lha keturunannya orang PKI tidak mungkin akan jadi pegawai,' itu terasa sekali. Seperti kan ibaratnya sudah dikatakan sampah gitu aja, berarti kan sudah tidak berguna lagi di masyarakat, gitu. Saya tidak mau keluar untuk ngomong sama masyarakat saja sudah sepertinya tidak nganu, tidak begitu sreg (nyaman) gitu lho. Masalahnya, semenjak kecil kan jadinya terlalu terjepit, terlalu tersisih, minder terlalu tersisih... Sekolah kan percuma, sekolah percuma, 'Lha kowe ta rewangono sekolah percuma ra iso nyambut gawe iku.' (Lha kamu aku bantu sekolah percuma tak bisa bekerja). Lha saya kan pikir sama pikir, waktu itu kan saya mempunyai teman yang kerja di tempat bis, nah itu. Terus saya itu tidak ditawari dia, tapi saya kok berpikir, lebih baik saya keluar dari SPG, saya kursus-kursus setir montir lho, setir montir itu. Terus lulus ya sudah sambil, ya masih sejak jaman dulu kan masih anak muda ya, masih mondar-mandir, sok-

sok (kadang-kadang) mau nyetir, sok-sok bengkel, sok-sok jualan bakso.

Ia sempat kerja serabutan selama hidup di Yogyakarta. Setelah menikah, ia bertekad untuk hidup tenang dan kembali ke desanya membuka bengkel mobil. Hubungan dengan tetangganya sekarang baik-baik saja. Ia tidak merasa ada perlakuan buruk atau isolasi dari masyarakat di sekelilingnya. Tapi, ia tetap merasa getir saat mengenang suasana diskriminatif yang memaksanya keluar dari sekolah guru itu. Ia tak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari masa lalu: ‘Masalah-masalah orang tua selalu terbayang.’

Di Pati, Ibu Nahromi tidak pernah merasa diperlakukan buruk oleh masyarakat di sekeliling tempat tinggalnya. Walaupun pernah diskors selama enam bulan dari sekolah tempatnya bekerja, setelah kembali mengajar, rekan-rekan sekerjanya tidak memusuhinya atau berusaha menyingkirkan dia.

Ndak apa-apa kok. Teman baik-baik. Ya seperti saudara, baik semua. Sudah semua tahu, tapi semuanya baik hubungan saya dengan teman-teman. Di organisasi PKK juga saya ikut, ndak ada tanggapan yang sinis itu ndak ada. Baik masyarakat.

Ia pun bersyukur bahwa anak-anaknya tidak pernah menghadapi pelecehan di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya.

Temannya kok, alhamdulillah ndak mengejek. Ndak mengejek anak saya. Soalnya anak saya percaya diri, ndak

minder. Terus prestasinya baik gitu. Ndak berani anak-anak lain menghina, ndak pernah. Ndak pernah menghina, jadi dia bersemangat, ikut apa saja, perlombaan ikut. Dan ya mendapat nilai, prestasi anak saya dulu, jadi ndak ada yang berani menghina atau melecehkan ndak ada. Sampai besar sampai di SPG juga ndak pernah dilecehkan temannya. Ndak tahu mungkin. Kalau tahu anaknya pribadinya baik kan ya ndak mau. Ndak mau melecehkan.

Anaknya, bagaimanapun, agak khawatir: apakah ada orang yang mau menjadi suaminya jika tahu bahwa ayahnya hilang karena dicap 'PKI'? Tapi, menurut penuturan Ibu Nahromi, anaknya berani berterus-terang kepada tunangannya mengenai nasib ayahnya.

Dia sudah menjelaskan sama calon suaminya. 'Bahwa saya ini, bapak saya begini-begini. Apakah kamu bersedia menjadi suami saya apakah tidak? Nanti kecewa di belakang hari, keadaan saya ya ini. Kalau kamu tahu ya begini. Bisa menerima saya atau tidak,' begitu bilangnya. Sudah jelas-jelas bilang dia, nanti kalau sembunyikan ya kalau hari belakang kecewa ndak baik dalam rumah tangga. Tapi suaminya memang sudah mau dan bersedia. Ya dia takutnya di situ. 'Kalau nanti saya, kalau ada yang senang sama sama saya ya harus saya beri tahu apa adanya. Kalau dia siap menerima ya saya ya siap. Kalau soal itu diungkit ya saya tidak mau,' gitu. Jadi begitu. Dia terus terang.

Apa yang dialami Ibu Nahromi dan anaknya boleh dikatakan salah satu pengecualian. Ada banyak kasus di

mana anak-anak korban Tragedi 65 gagal menikah dengan pujaan hatinya atau diceraikan suami/istrinya karena orang tuanya ‘tersangkut G-30-S/PKI’. Cukup banyak pula orang tua yang merelakan anak-anaknya diangkat keluarga lain, berganti nama keluarga, dan memutuskan tidak berhubungan sama sekali dengan anak-anak mereka supaya kelangsungan hidup sang anak-anak tidak terganggu oleh masa lalu orang tuanya.

Pengalaman Ibu Menik sangat berbeda dari pengalaman Ibu Nahromi. Setelah suaminya dibawa pergi dan ditahan, Ibu Menik dan anak-anaknya tak jarang diperlakukan dengan kasar oleh orang-orang sedesa, seolah-olah mereka wabah penyakit yang harus dihindari.

Tapi, gara-gara suami masuk itu, terus anak isteri disia-sia. Anak mau ikut ngaji, juga dikatakan najis. Terus main sama temannya juga dikatakan ‘anak PKI.’ Pokoknya serba salah, serba jelek, nggak ada yang benar... Anak saya itu aja, kalau saya keluar rumah, pada ikut. Kalau masuk, ikut semua, takut katanya. Takut apa? Katanya diejek sama orang. Main sama teman saja, temannya pada pergi...Pernah saya, waktu bapaknya masih di dalam, saya jalan gitu. Ketemu orang, katanya, ‘Saya daripada ketemu isterinya orang PKI, bagusan ketemu anjing yang korepen, budukan.’ Nah, ini kan saya, lebih bagus anjing daripada saya. Tapi, saya cuma, ‘Ya Allah, namung Panjenengan ingkang saged maringi pengadilan’ (hanya Engkau yang sanggup memberikan pengadilan). Di situ saya berhenti.

Langsung berhenti saya ngomong begitu. Sudah begitu saya jalan lagi.

Ibu Menik merasa di mata orang desa yang lain, ia selalu salah. Sekalipun sudah bekerja keras dan tidak pernah terlibat politik, sebagai perempuan yang hanya sendirian mengurus anak, stigma ‘PKI’ menambah beban di pundaknya.

Susah jadi isteri yang ditinggal, kalau berangkat kerja katanya berangkat, apa ya kalau orang Jawa bilang nglonte (melacur), kalau orang Jakarta bilang nyabo, he-eh nyabo. Nanti pulang sore, katanya ‘Nyabonya baru pulang.’ Kalau berangkat sore, orang itu kan ada kepentingan macam-macam katanya... Pokoknya waktu itu serba enggak aman, pergi juga diawasi, enggak pergi juga dibilangin, dikatain. Bisa makan juga dikatain enggak baik, enggak bisa makan juga disukurin. Jadi serba salah, serba susah. Anak saya sampai enggak berani main dengan tetangga.

Pelecehan ini juga yang menjadi salah satu alasan yang mendorongnya pergi mencari kerja ke Jakarta. Saat suaminya kembali dari penjara pada 1971, Ibu Menik berhenti kerja dan kembali ke desanya. Tapi masalah tidak berhenti datang. Walau keduanya berbahagia karena bisa bersatu kembali, mereka menghadapi soal besar: bagaimana mencari uang di desa sekecil itu? Keduanya tidak punya pekerjaan, ‘Saya pulang, suami saya nganggur, saya sendiri juga nganggur, makani anak empat, kan bingung.’ Sebagai eks-tapol, suaminya tidak

mungkin mendapat pekerjaan di kantor pemerintah atau swasta. Untung ada saudara yang mau menolong mereka. Salah seorang saudaranya menjual ternak dan meminjamkan uang penjualan itu agar keduanya bisa membangun rumah. Suaminya kemudian menjadi petani bagi hasil yang menyewa tanah dari tuan tanah. Setelah panen, ia mendapat separuh dari hasil penjualan sementara pemilik tanah mendapat separuh yang lain. Ibu Menik sementara itu bekerja mencari kayu di hutan. Mereka termasuk keluarga yang paling miskin di desanya.

Saya kalau pagi habis masak ke hutan nyari kayu, suami saya di sawah. Terus kalau kayunya sehari saya dapat dua ikat, yang satu ikat saya jual, yang satu saya kumpulkan di rumah buat masak sendiri. Itu tiap hari begitu. Terus yang saya jual buat sangu (bekal) sekolah anak saya ke Ambarawa. Waktu itu lakunya Rp1.500,00 satu ikat gede. Orang saya nggendongnya sampai nungging [ketawa]. Dari hutan jauh, dua, tiga kilometer saya nggendong sampai nungging. Sudah pernah saya sampai klenger di hutan. Untung ada yang nolongin. Kalau nggak saya mati ‘kali di hutan itu. Nggak sanggup, nggak makan apa-apa. Makan saya tiap hari cuma nasi lemes. Itu lemes. Nasi bubur yang agak ini, nasi lemes. Terus sayurannya cari di hutan, itu. Ada kalau orang bilang, joblog, ada daun singkong itu saya rebus. Hariannya itu saya makan itu, sama sambel kelapa kalau ada. Kalau tidak ada ya sambel terasi, kalau nggak ya bawang itu aja sama cabe rame-rame makan bareng-bareng gitu. Anak

saya juga pada lahap, enak betul. Ini pengalaman saya, kalau saya ingat sampai sekarang pedih, benar pedih.

Dari hasil membanting tulang, Ibu Menik dan suaminya berhasil menyekolahkan anak-anak mereka. Salah seorang dari mereka, selepas SMA masuk Akademi Kepolisian, tapi tidak bertahan lama. Begitu diketahui ayahnya seorang eks-tapol, si anak dikeluarkan dari sekolah itu.

Akhirnya anak saya ada yang tamat dari SMA, masuk kepolisian. Eeh, diterima. Senang sekali saya. Ndak tahunya, ada yang indikasi. Indikasi bapaknya masuk tahanan. Dalam indikasinya itu katanya bapaknya masuk delapan tahun. Padahal suami saya cuma lima tahun. ‘Ini kok delapan tahun?’ saya ngomong. Itu Surat Pembebasan bapak, saya suruh bawa ke kelurahan, ke kepala kepolisian di situ, di tempat. Katanya sudah terlanjur. Ya sudah. Untung anak saya nggak sampai gila waktu keluar. Kalau sampai dia nggak tahan, dipecat gitu saja, kan bisa sampai gila. Ada yang gitu. Tapi, anak saya itu besar hati dah pokoknya. ‘Orang Tuhan itu Maha adil katakan. Mak. Mak, gimana saya dilepas gini? Mak terima nggak?’ Saya bilang, ‘Kalau nggak terima mau ngadu ke siapa sih? Orang jaman begini ya terima saja, pokoknya kita minta sama Tuhan, supaya nanti, kalau besar, sudah ini dari cobaan ini, bisa dapat pekerjaan lebih bagus.’ Saya nggak akan kerja, saya mau wiraswasta,’ katanya, ‘mau wiraswasta,’ kalau kerja di pemerintahan, paling- paling saya diindikasi lagi. Sampai ke adik-adiknya nggak ada

yang kerja di pemerintahan. Takut, kalau diindikasi, sakit betul itu di hati.

Walaupun anaknya bisa menerima kenyataan pahit itu, Ibu Menik merasa hampir gila. Ia sulit tidur. Selama tiga bulan, setiap malam Ibu Menik berjalan menyusuri jalan-jalan sepi karena putus asa.

Terus setiap jam 12 malam saya keluar rumah. Saya jalan sampai di mana, tidak tahu. Pokoknya kira-kira mulai setengah lima, saya harus sampai di rumah. Itu sampai tiga bulan kali. Nah, kalau saya masuk kamar, saya nyenggol kaki suami saya itu katanya, 'Kok kayak es? Dari mana?' katanya. 'Nggak dari mana-mana, dari kamar mandi,' saya bilang. Suami saya nggak tahu kalau saya pergi kalau malam. Saya minta sama Tuhan, minta di hadapan Tuhan, supaya anak saya dikasih pengadilan dah. Pokoknya yang benar kasih lihat yang benar, yang salah kasih lihat yang salah, gimana caranya kalau orang yang salah. Gitu maunya saya. Saya cuma dari dulu saya percaya Tuhan itu adil.

Ia tetap tidak bisa mengerti mengapa hidupnya begitu pahit dan penuh penderitaan: 'Ya ingat riwayat, ya nangis. Saya kalau ngomong, suka nangis, itu riwayat.'

Akhir Cerita

Selama hampir setengah tahun aku berkeliling mendengarkan kisah-kisah korban. Dari Jakarta, ke Jawa

Tengah, kemudian ke Lampung. Yang kutemui adalah kumpulan orang-orang berusia lanjut yang selama puluhan tahun menanggung beban hidup, menyimpan cerita pahit. Dari perjalanan ini pula tersingkap tabir yang menyelimuti kebisuan keluarga almarhumah ibuku.

Perempuan-perempuan di keluarga ibuku kebanyakan tidak bersuami. Nenekku bilang: ‘Kakek hilang.’ Dua bibiku pernah menikah, tapi keduanya ditinggalkan suaminya. Ibuku pun, sebelum menikah dengan ayahku, pernah menikah dengan seorang perwira Angkatan Laut di Surabaya, tapi ditinggal pada 1965. Aku selalu bertanya-tanya: ‘Mengapa mereka semua ditinggalkan suaminya?’ Padahal, menurut cerita orang-orang kampung, mereka bertiga dulu kembang desa yang dikagumi kecantikan dan kepandaiannya menari. Tapi, aku tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memuaskan.

Waktu kecil, aku pernah mendengar ibuku mengajar menari di TK Melati. Aku tidak tahu apa itu TK Melati sampai aku ikut diskusi persiapan riset sejarah lisan ini. Lalu, aku mulai berpikir: ‘Apakah menghilangnya kakekku dan para menantunya ada hubungannya dengan Peristiwa 1965?’

Orang pertama yang kuajak bicara adalah nenekku. Aku ingat, begitu aku sebutkan soal ‘enam lima’, dengan wajah terkejut campur takut ia langsung tarik aku ke dapur, ‘Ojo banter-banter, le!’ (Jangan keras-keras, nak!)

Baru ia mulai bercerita tentang kakekku, seorang guru, anggota PGRI non-Vak Central. Setelah keributan 30

September di Jakarta, kakekku pergi entah ke mana dan tak pernah kembali. Nenekku tak berhasil mengingat apa persisnya yang terjadi. Ia hanya mendengar kabar burung kakekku terbunuh. Darinya pula aku tahu, almarhumah ibuku dan saudari-saudarinya ditinggalkan suami-suami mereka segera setelah kakekku menghilang. Kemudian, jadi semakin jelas juga butku mengapa Bude Sri, kakak nenekku, yang ceritanya kutuliskan di atas, pernah dianggap gila oleh keluarga.

Setelah habis bercerita, nenekku mengambil setumpuk buku yang dibungkus kain batik rapi dari almari, dan menyerahkannya padaku. Di antaranya ada buku Di Bawah Bendera Revolusi karangan Sukarno. Masih terselip pembatas buku yang berbekas kuat di salah satu lembarnya. Nenekku bilang: buku-buku itu milik kakekku.

Aku tak bisa membayangkan berapa banyak anak muda dari generasiku yang tidak tahu sejarah keluarganya, sejarah bangsanya. Kami dibesarkan dalam suasana ketidakjelasan dan kebohongan. Kami ditakut-takuti dan didorong untuk memusuhi orang-orang yang tidak kami kenal dan mencurigai orang-orang yang kami kenal demi ‘Kesaktian Pancasila’. Aku beruntung beroleh kesempatan memahami keluargaku dengan lebih baik, dan mulai mengurai kebohongan-kebohongan yang dijejalkan padaku sejak aku mulai bersekolah.

Buatku sekarang, menjadi semakin penting membuka ruang seluas-luasnya bagi para korban untuk menceritakan pengalamannya. Masih banyak orang yang

tidak menyadari bahwa Orde Baru sudah berhasil memecah-belah masyarakat (termasuk komunitas korban) dalam kotak-kotak yang tidak sehat–ada golongan komunis dan pancasila, ekstrim kiri dan ekstrim kanan, GPK dan patriot, dan sebagainya–karena kita sendiri sering kali takut keluar dari kotak-kotak yang membuat kita merasa nyaman dalam ketidaktahuan. Kurasa hanya dengan mendengarkan kisah korban, kemudian mencoba saling bicara, kita bisa meluruhkan sekat-sekat palsu yang diciptakan penguasa untuk memelihara kecurigaan di antara kita sebagai bangsa.

Daftar Wawancara

1. Ibu Menik, Ambarawa, 29 Juli 2000
2. Ibu Nahromi, Pati, 7 September 2000
3. Partono, Yogyakarta, 16 Juli 2000
4. Ibu Sri, Yogyakarta, 16 Juli 2000

KETIKA PEREMPUAN MENJADI TAPOL

Josepha Sukartiningsih

Saya termasuk salah satu orang yang cukup lama dibayangi ketakutan akan Gerwani. Sosok-sosok perempuan liar yang menyanyi ‘Genjer-genjer’, menari telanjang, lalu dengan kejam menyiksa, menyilet dan memotong kemaluan para jendral yang diculik di Lubang Buaya melekat di benak saya, bahkan setelah saya mulai tahu bahwa pemerintah Orde Baru banyak membuat cerita-cerita bohong tentang G-30-S dan PKI. Waktu saya masih kelas tiga SMA, seorang teman sekelas meminjami saya memoar Pramoedya Ananta Toer, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Setelah membaca buku itu, saya menjadi ingin tahu lebih banyak tentang peristiwa 1965 dan tentang Pramoedya sendiri. Tapi, saya tetap tak tertarik pada Gerwani. Ketika saya memberikan diri berkunjung ke rumah Pramoedya dan berbincang-bincang dengannya pun saya tidak pernah bertanya soal Gerwani.

Waktu Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) berencana mengadakan riset tentang korban Tragedi 65, saya langsung terlibat sejak awal. Saya pikir inilah kesempatan buat saya mengerti lebih baik hal-hal yang

berkaitan dengan G-30-S, terutama yang selama ini disembunyikan pemerintah Soeharto. Dalam salah satu diskusi persiapan riset, saya mendapat tugas membaca dan membahas sejumlah buku: Carmel Budiardjo, Bertahan Hidup di Gulag Indonesia (1997); Ruth Havelaar, Selamat Tinggal Indonesia (1995); dan Saskia Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia (1999). Apa yang dipaparkan dalam ketiga buku itu membuat saya sedih, terkejut, sekaligus bingung. Rasanya sulit buat saya mempercayai penggambaran Carmel tentang situasi kekerasan di dalam tahanan, terutama penyiksaan dan perkosaan terhadap para tahanan perempuan. Bagaimana mungkin kekejaman seperti itu berlangsung begitu lama tanpa ada sanksi dari pemerintah, tanpa ada protes dari aktivis atau lembaga pembela HAM? Dari buku Ruth, satu hal yang mengganggu pikiran saya: ternyata bukan hanya aparat pemerintah yang menganiaya orang-orang yang dianggap terlibat G-30-S atau PKI, tapi juga sebagian masyarakat. Mengapa masyarakat begitu mudah dibohongi dan digiring untuk ikut memusuhi sesama warga bangsa ini? Buku Saskia sedikit banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, tapi tidak meredakan kebingungan saya: kalau memang tari telanjang dan penyiksaan terhadap para jenderal itu tidak benar, dari mana tentara mendapat ide cerita segila itu? Seperti apa sebetulnya orang-orang Gerwani itu? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka harus dihina dan dimusnahkan dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi?

Anehnya, dengan bekal pengetahuan dari diskusi persiapan dan buku-buku yang saya baca, saya masih belum dapat menepis bayangan yang ditanamkan Orde Baru tentang Gerwani: sekelompok perempuan jahat, liar, komunis, dan kejam. Ketika saya diberi tugas mewawancarai mantan tapol perempuan, saya berusaha mengelak. Memang akhirnya saya bersedia menerima tugas itu, tapi saya merasa begitu takut dan gamang sehingga terpaksa minta ditemani seorang teman lelaki untuk bertemu dengan kelompok ibu-ibu mantan tapol.

Pertama kali saya bertemu para mantan tapol perempuan adalah dalam sebuah kesempatan arisan, pada pertengahan 2000. Saya kembali terkejut. Mereka ternyata tidak jauh berbeda dari kebanyakan ibu, tante, dan nenek yang sering saya temui dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berbicara tentang masalah-masalah rumah tangga, cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi, menggalang bantuan untuk teman-teman mereka yang sudah tua dan sakit-sakitan, mencarikan pekerjaan untuk anak atau cucu yang menganggur, dan banyak lagi yang melulu berkaitan dengan soal-soal kesejahteraan bersama. Tak bisa saya bayangkan ibu-ibu tua sederhana yang bersahaja ini di masa mudanya terlibat dalam rencana penggulingan kekuasaan negara, apalagi ikut atau mendukung tarian telanjang dan penyiletan penis para jenderal. Saya baru melihat perbedaan mereka dengan ibu-ibu seusia yang saya kenal saat mulai mewawancarai masing-masing ibu secara terpisah.

Tak semua ibu yang saya ajak bicara adalah anggota Gerwani. Tapi, begitu mereka ditangkap dan dipenjarakan, pemerintah sudah mencap, mereka sebagai Gerwani, yaitu penjabat perempuan. Sejak awal Oktober 1965, kata ‘Gerwani’ tidak lagi mengacu pada organisasi perempuan yang bercita-cita membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Ia semata-mata sebutan untuk tindakan di abad dan amoral yang dilakukan perempuan ‘komunis’. Demikian genc pererintah, Orde Baru melancarkan propaganda tentang kejahatan Gerwani sehingga masyarakat pada umumnya memilih tidak berhubungan dengan mereka. Bahkan, anak-anak mereka pun banyak yang mempersalahkan mereka dan tidak ingin mendengarkan cerita, versi ibunya karena takut dianggap, melawan pemerintah. Alhasil, ibu-ibu ini memilih diam, memendam pengalaman masa lalu, dan berjuang mengatasi trauma sendirian. Satu-satunya ruang penghiburan mereka adalah arisan bersama teman-teman, senasib.

Awalnya tidak mudah membuat ibu-ibu ini bercerita. Sebagian besar dari mereka baru pertama kali mengungkapkan kisah hidupnya kepada orang yang bukan dari kelompok mereka, dari generasi yang berbeda pula. Tak mengherankan bila ada dari mereka yang menunjukkan ketakutan berlebihan atau mencurigai saya akan menggunakan cerita mereka untuk kepentingan yang merugikan mereka. Sepintas para ibu ini memang tampak sangat rapuh dan tertutup, tapi begitu merasa nyaman,

mereka bisa bercerita selama berjam-jam tentang kegiatan mereka sebagai aktivis organisasi massa sebelum 1965. Bagian cerita sesudah G-30-S terjadi, paling berat mereka ungkapkan kembali. Teror, intimidasi, penangkapan, penyiksaan, dan pemenjaraan selama bertahun-tahun di tengah ketidakmengertian tentang apa yang sebenarnya terjadi sudah menghancurkan seluruh cita-cita dan harapan yang mereka bangun sejak terlibat dalam gerakan politik. Bagi mereka kemudian, yang terpenting adalah bagaimana bisa bertahan hidup dan anak-anak mereka tidak mengalami nasib seburuk ibunya.

Selama proses wawancara, saya sangat terkesan dengan ketegaran para ibu mantan tapol dalam menyambung hidup dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, serta solidaritas mereka dengan teman-teman senasib. Beberapa dari mereka malahan ikut memasak ribuan nasi bungkus untuk kelompok-kelompok mahasiswa yang berdemonstrasi pada Mei 1998. Mereka memang tidak bicara tentang ‘politik’ tingkat tinggi seperti beberapa mantan tapol laki-laki yang pernah saya temui; mereka tidak bermimpi membangun kembali kejayaan organisasi mereka di masa lalu. Namun, mereka juga tidak menampilkan diri sebagai korban kekerasan yang harus dikasihani terus-menerus. Di hadapan sebuah kekuasaan yang tak henti-hentinya berusaha membungkam mereka, melenyapkan mereka dari sejarah, ibu-ibu ini, sendiri atau bersama-sama, tetap berjuang untuk mempertahankan kemanusiaan mereka. Inilah yang

membuat saya bertekad untuk menuliskan pengalaman mereka.

Gerakan Perempuan sebelum 1965

Dalam wacana sejarah utama, sumbangan gerakan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan republik ini tidak pernah diperhitungkan sebagai kekuatan yang berarti. Di masa Orde Baru, wacana tentang gerakan perempuan yang dipropagandakan lebih buruk lagi. Dalam usahanya menggalang dukungan masyarakat untuk menghancurkan PKI dan kekuatan kiri pendukung Sukarno pada umumnya, Soeharto dan kelompoknya menciptakan cerita palsu tentang tindakan biadab kaum perempuan yang bergabung dalam Gerwani. Padahal, saat Gerwani didirikan pada 1950–awalnya bernama Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar)–sebagian besar anggotanya adalah perempuan-perempuan yang terlibat langsung dalam perang kemerdekaan melawan Belanda dan Jepang pada 1940an. Di bawah ini kutipan cerita Ibu Sunarti, bekas pengurus Gerwani di Solo:

Memang sejak kecil saya mempunyai keinginan untuk–ya, kalau dulu istilahnya teman-teman itu–berjuang, gitu. Waktu Solo dalam pendudukan Belanda itu saya memang diajak oleh dulu itu. Palang Merah, ‘Gimana Dik, Kalau mau ikut mbantu. Kalau seperti Adik ini misalnya membawa obat-obatan ke desa-desa, dan ditakuti

Belanda,' gitu. Ya, saya biasa diajak membantu-membantu untuk ditugaskan, nanti, jalannya sudah diberitahukan. Saya terus membawa obat-obatan itu ke desa-desa, itu di daerah Nggawok, nDelanggu, itu di daerah Solo. Memang saya juga berjumpa dengan anak-anak TP [Tentara Pelajar]. Jadi, ya kami memang melihat betapa ganasnya Belanda pada waktu itu, bom-bom selalu dijatuhkan di desa-desa. Sampai saya melihat anak-anak yang putus tangannya, putus kakinya. Kemudian karena kelihatan saya ini rombongan yang suka agak berani gitu, terus teman-teman TP itu, 'Mbok itu ditugaskan, ada membawa peluru dari kota. Nanti kan buat dia kan ndak dicurigai oleh Belanda gitu, dia sudah biasa jalan Nggawok Solo itu.' Nah, saya ditawari ya, 'Berani Dik?' 'Berani, cuma caranya bagaimana supaya ya berhasil?' saya bilang begitu, saya baru SMP kelas satu, ya kira-kira umur berapa? Memang kebetulan Belanda-Belanda itu sudah biasa kalau saya disuruh mengatakan, 'Sudah Menir.' Ya, dia mengatakan, 'Ya ada,' gitu. Saya kadang-kadang diberi permen gitu, saya terima. Sama saya diberitahu nanti, saya diberi permen jangan terus digulung ya, sudah dipakai sangu (bekal) saja, kalau ditanya pulang ke desa, ke neneknya mengambil beras, gitu.

Seorang perempuan lain yang bergabung dengan Gerwani pada 1950an, Ibu Rukmini, selama periode revolusi bekerja di kantor Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) di Wonosobo sebagai juru ketik.

Pulangnya ke Wonosobo ikut kerja di kerja di tempatnya pak Subaradi. Pak Subaradi itu ketua Pesindo. Itu saya sebetulnya sudah masuk itu, tapi nggak tahu, saya umurnya baru 18 tahun. Itu saya disuruh mengetik. Ya mengetik apa saja, jadi ya mengetik selebaran dan lain-lain, di rumahnya pak Subaradi. Jadi kayak seperti training (pelatihan) untuk kerja.

Setelah agresi kedua 1948, ia mengungsi ke gunung-gunung bersama masyarakat lainnya. Seperti Bu Sunarti, ia menyediakan obat-obatan untuk para gerilya. Ia berpura-pura menjadi pedagang yang pergi ke kota pendudukan Belanda untuk menjual barang-barang dari desa. Padahal, ia sebetulnya mengambil obat-obatan untuk dibawa kembali ke gunung.

Terus di dalam ngungsi itu, saya ini dulu sudah agak tahu organisasi. Saya belum ikut organisasi, tapi saya sering ikut mengambil obat-obatan di dalam kota, ya pakai kain pura-pura jual durian masuk ke kota... Saya selamat sampai di perbatasan juga ketemu orang yang dari dalam. Perbatasan yang namanya Singkil. Jadi kita nunggu di situ aja obat-obatan, jadi kayak ikut Palang Merah yaitu ya... Terus pulang akhir tahun 49. Jadi satu tahun kan di luar, itu pulang kita kan jalan kaki, disambut orang-orang yang kerja di dalam tapi untuk Republik.

Di Bali, Ibu Jermini diminta oleh kakaknya mencari uang bagi gerilyawan. Pada 1946 itu, umurnya baru 14 tahun. Karena pernah belajar bahasa Belanda saat duduk di sekolah dasar sebelum Jepang datang, ia mencari uang

dengan mengajar bahasa Belanda kepada orang Bali yang bekerja sama dengan pihak Belanda yang kembali ke Indonesia.

Nah, pada waktu itu kan masih ke-Belanda-Belanda-an, ya. Jadi ibu disuruh belajar bahasa Belanda di satu kampung itu. Anak-anak yang tidak melanjutkan itu, untuk mencari uang biar satu orang itu kena uang setali, 25 sen, satu orang, bayar 25 sen, satu orang, satu bulan. Jadi, ibu yang cari dana untuk pemuda yang berjuang gitu. Ibu terpaksa dah ingat-ingatkan bahasa itu untuk mengajar mereka.

Keluarga Ibu Jermini adalah pendukung Republik. Kakaknya seorang gerilyawan di kabupaten Bangli. Suatu hari, kakaknya diam-diam pulang ke rumah orang tuanya. Entah bagaimana, kedatangannya diketahui pasukan Belanda dan suatu pagi sebuah truk penuh tentara datang untuk menangkapnya. Saat digiring menuju truk, kakaknya berusaha melarikan diri. Tentara Belanda melepas tembakan dan membunuhnya. Ibu Jermini ingat keluarganya terlalu takut mengangkat mayat kakaknya sampai malam hari. ‘Dari jam enam pagi sampai jam enam sore darah masih. Nggak berani ke kuburan bawanya karena orang Belanda masih keliaran itu, jam enam malam. Setengah tujuh kira-kira baru kita-kita ini usung ke kuburan, itu. Itu jaman revolusi.’

Bagi Ibu Sunarti, Ibu Rukmini, dan Ibu Jermini, bergabung dengan Gerwani adalah sesuatu yang wajar. Diilhami oleh semangat 1945, mereka ingin

menyambangkan tenaga dan pikiran mereka untuk kemajuan bangsanya. Mereka tidak mau hanya menjadi ibu rumah tangga yang hidupnya diabdikan untuk melayani suami semata. Untungnya, Ibu Sunarti, Ibu Rukmini, dan Ibu Jermini menikah dengan orang-orang yang menghargai keterlibatan perempuan dalam politik. Sebagai organisasi yang mengusung semangat perjuangan nasionalis-kerakyatan, Gerwani bukan hanya mendorong perempuan agar menjadi istri dan ibu yang baik, tapi sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak sebagai warga bangsa yang baru.

Seperti sudah disebut di atas, sebelum menjadi Gerwani organisasi perempuan ini bernama Gerwis. Perubahan nama dilakukan dalam Kongres Gerwis I di Semarang pada 1951, tapi secara resmi nama Gerwani baru dipakai pada Kongres Gerwis II pada 1954. Ada alasan cukup kuat yang mendasari perubahan nama ini. Kata ‘Sedar’ dalam Gerwis dianggap hanya mengutamakan perempuan golongan menengah dan terdidik yang sudah sadar akan hak-haknya, sementara ada jutaan perempuan Indonesia yang dianggap belum ‘sedar’ dan harus dilibatkan dalam memperjuangkan kemajuan bangsa. Didasari pandangan kerakyatan, Gerwani ingin agar buruh dan tani perempuan juga aktif dalam kegiatan politik untuk memperkuat republik baru ini. Seperti organisasi perempuan lainnya yang didirikan kelas menengah pada saat itu, Gerwani juga memperhatikan undang-undang perkawinan (khususnya

mengenai poligami dan perceraian) dan pendidikan perempuan. Hanya saja Gerwani membedakan dirinya dengan organisasi-organisasi perempuan lain lewat program-program yang ditujukan bagi kaum perempuan yang bekerja di perkebunan, pabrik, dan sawah. Di perkampungan miskin, sering kali Gerwani menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang aktif karena organisasi lainnya membatasi wilayah kerjanya di lingkungan kelas menengah saja.

Ibu Sunarti mengatakan salah satu alasan dirinya bergabung dengan Gerwani ialah karena organisasi itu paling aktif di kampungnya, di Solo. Selain itu, banyak orang di kampungnya menjadi pendukung gerakan nasionalis kiri. Orang yang ia nikahi, mantan pejuang gerilya yang bekerja sebagai penilik sekolah umum, juga anggota PKI di Solo.

Di kampung, lingkungan kampung saya, satu-satunya organisasi wanita yang apa itu, yang kemasyarakatannya itu luas gitu ya, jadi baik dalam hal bantu-membantu, saling tolong-menolong, gotong-royong itu memang Gerwani, gitu dulu. Lha saya disarankan oleh suami itu, 'Ya kalau kamu sekarang sudah nggak sekolah, kan sudah nggak di IPPI, sekarang kamu masih ingin berorganisasi, ndak?'

'Ya ingin,' saya bilang begitu. Karena katanya orang itu berjuang tidak hanya sampai muda saja, sampai ke liang kubur pun masih orang bisa berjuang.

'Ya sudah mau masuk apa kamu?'

‘Saya itu kok yang organisasi besar itu Gerwani.’

‘Ya masuk di situ ndak apa-apa.’

Di kampung itu kan yang paling bagus kan Gerwani. Sehingga antara kampung yang satu dengan kampung lainnya, terus secara kecamatan itu memang akrab gitu lho, anggota-anggotanya, dan kerja terus. Ya merasa saya, tenaga saya masih diperlukanlah, sambil mengajar gitu. Saya tetap mengajar, karena pada waktu itu memang guru masih kekurangan to, meskipun saya hanya lulusan SMA tapi bisa mengajar di SKP [Sekolah Kepandaian Putri], terutama bahasa Indonesia itu.

Ibu Jermini di Bali bergabung dengan Gerwani tidak lama setelah menikah pada 1952. Ia bekerja di rumah membuat dompet, sementara suaminya bekerja sebagai pedagang kain. Kegiatan utama Gerwani di kampungnya adalah membuka taman kanak-kanak, yang dikenal dengan nama TK Melati.

Kita tampung anak-anak mereka, mampu bayar atau tidak, ya terserah, gitu. Kita kolektif itu lho untuk membeli bajunya itu, sekedar untuk dia beli sabun. Guru-gurunya tiga orang, dari sosial satu, dari teman-teman Gerwani dua. Ya tampung secara kolektiflah. Kebetulan anak yang mampu ya, dia bayar sekolah, nyumbang dia gitu, yang tidak, ya tidak.

Ia dan teman-temannya juga meminta pemerintah daerah membangun sekolah dasar untuk lingkungannya. Ketika Gunung Agung meletus pada 1963, Gerwani di Bali

bekerja sama dengan pemerintah memberikan bantuan kepada para pengungsi.

Waktu Gunung Agung meletus, ibu jadi pos sampe ngirim-ngirim makanan tuh ke sana, ke dasar Gunung Agung itu. Nggak bisa turun, nggak bisa melalui darat itu, nggak bisa, terpaksa pakai helikopter. Ketupat-ketupat itu, lontong itu, satu besek, isinya sepuluh-sepuluh. Di sana kita lempar-lempar, ada di bagian Gianyar, Klungkung tuh. Kita-kita ini, dari Gerwani ini, drop makanan ke sana. Minta-minta ke kampung-kampung nanti untuk orang-orang yang ngungsi.

Sekalipun Gerwani dalam beberapa hal pokok memiliki kesamaan pandangan dengan PKI–mengorganisir buruh dan petani, melawan imperialisme, dan seterusnya–organisasi itu tetap otonom dari kontrol partai. Sebuah pasal ditetapkan dalam Kongres 1954 yang menyatakan bahwa Gerwani ‘adalah organisasi untuk pendidikan dan perjuangan, yang tidak menjadi bagian dari partai politik apa pun.’[1] Perempuan yang punya komitmen kepada PKI bergabung dengan partai, menjadi anggota atau pengurus partai. PKI sendiri juga memiliki organisasi perempuan yang disebut Wanita Komunis (Wankom), yang menyelenggarakan konferensi nasional pada 1958.[2] Banyak pimpinan PKI yang sebenarnya tidak tertarik pada pekerjaan Gerwani, seperti meminta parlemen untuk mengubah undang-undang perkawinan atau menjalankan TK Melati di kampung-kampung. Gerwani punya agenda

kerja sendiri dan tidak semata-mata mengikuti perintah-perintah partai.

Para pemimpin Gerwani merasa perlu mendukung Presiden Sukarno dan kekuatan kiri, khususnya untuk menghadapi gerakan subversif yang didukung kekuatan imperialis, seperti yang dilakukan PRRI/Permesta pada akhir 1950an. Mereka yakin, masalah politik nasional seperti undang-undang land reform, kampanye antiMalaysia, dan merebut Irian Barat dari tangan Belanda, juga merupakan masalah perempuan karena sangat berpengaruh pada kesejahteraan perempuan. Seperti tertera dalam sebuah dokumen Gerwani, 'perjuangan demi hak-hak perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan demi masyarakat sosialis, atau perjuangan melawan imperialisme.'[3]

Sejumlah anggota Gerwani juga menjadi sukarelawati untuk perang melawan Belanda di Irian Barat. Ibu Ramdinah dari Pati adalah salah seorang di antaranya. Ia menjadi sukarelawati di 1962. Latihan militer yang diperolehnya di Jakarta dibiayai oleh Front Nasional, sebuah koalisi yang didirikan oleh pemerintah. Namun, biaya lainnya ditanggung oleh masing-masing organisasi yang mengirimkan anggotanya. Karena dana yang diberikan tidak mencukupi, Ibu Ramdinah masih harus bekerja di jawatan listrik untuk memenuhi kebutuhan enam orang temannya.

Di Kodim ada pengumuman bahwa dibutuhkan sukarelawan-sukarelawati untuk masuk ke Irian Barat.

Karena saya belum punya anak begitu ya, saya ingin nyari pengalaman. Waktu itu umur saya baru 26 tahun. Saya nanya ke suami saya boleh nggak, ternyata suami saya memperbolehkan, hanya saudara-saudara nggak setuju. Jadi saya berangkat ke Jakarta, tinggal di asrama Front Nasional. Di asrama itu tiap sore mesti ikut kursus atau pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan penjelasan. Tiap partai memberikan bahan-bahan bahasan, ada yang dari PKI juga. Kalau siang dipergunakan untuk organisasi, lalu kalau sore yaitu, latihan bagaimana menghadapi Belanda, latihan baris-berbaris, latihan bawa senapan. Saya di asrama selama satu bulan. Banyak yang ikut Front Nasional, ada yang dari Tuban, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Waktu itu kan pemerintah menyetujui adanya Front Nasional ini.

Lalu ada pemberitahuan tanggal 6 Juni 62 diberangkatkan. Saya pulang memberitahu suami. Rombongan saya terdiri dari tiga perempuan, prianya sembilan orang. Masih muda-muda semua. Kebanyakan yang menjadi guru, dan dari Pemuda Rakyat atau Gerwani. Waktu di kapal ada interlokal dari Jakarta, bahwa kondisi belum memungkinkan kita untuk masuk ke Irian. Kapal dibelokkan ke Ambon. Selama di Ambon kita juga bekerja. Ada yang ke Pertual, Saparua. Kita memberikan pembelajaran mengenai organisasi, pendidikan, dan lainnya. Di Ambon hampir satu tahun, pindah lagi. Jadi kita punya pengalaman tidur nggak enak, makan nggak enak, ya begitulah orang perjuangan. Tapi

karena kita dapat didikan, bimbingan bahwa beginilah cara kerja kita. Pokoknya kita bisa makan, bisa bekerja dan memberikan sedikit-sedikit apa yang kita punyai, kita salurkan ke teman-teman kita yang masih terbelakang.

Tahun 1964 diberangkatkan ke Irian. Sampai di sana, saya mengikuti Jawatan Sosial. Karena memang kita harus bekerja sama dengan Jawatan Sosial di daerah yang kita tinggali. Di situ melakukan kegiatan sosial di daerah, di pegunungan. Kalau tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, ya kita jalan kaki. Kita menemui orang-orang Irian, mengadakan diklat (pendidikan kilat).

Di tengah suasana krisis politik Demokrasi Terpimpin, beberapa pemimpin Gerwani menjadi semakin dekat dengan pimpinan PKI. Muncul pula kecenderungan organisasi itu akan secara resmi berafiliasi dengan PKI dalam kongres kelima yang dijadwalkan berlangsung Desember 1965.[4] Walaupun demikian, tetap perlu diingat bahwa Gerwani, sebagai organisasi massa dengan lebih dari satu juta anggota pada awal 1960an, tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perpanjangan tangan PKI. Lepas dari urusan pimpinan Gerwani dengan lingkaran elit politik nasional, anggota di tingkat basis sibuk dengan berbagai kegiatan di kampung mereka sendiri, seperti mendirikan TK dan arisan, atau paling jauh, mendukung kebijakan Sukarno memerangi kekuatan imperialis di Malaysia dan Irian Barat. Untuk memahami Gerwani, kita tidak dapat mengikuti cara berpikir Orde Baru yang

menganggapnya sebagai onderbouw atau perpanjangan tangan PKI.

Keibuan yang Direnggut

Pada pertengahan 1965, sebidang lahan yang ditumbuhi pepohonan karet di desa Lubang Buaya menjadi tempat pelatihan sukarelawan-sukarelawati yang akan dikirim berperang ke Irian Barat dan Kalimantan Utara. Sejumlah anggota organisasi massa, seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, dan SOBSI yang mendukung kebijakan Sukarno melawan kekuatan imperialis mengikuti latihan militer di sana. Keterlibatan dalam kegiatan ini saat itu tidak dianggap luar biasa karena sudah berlangsung sekurangnya empat tahun. Seorang anggota Pemuda Rakyat, Ibu Anita, yang aktif dalam kegiatan drum band, mendaftarkan diri menjadi sukarelawati dan ikut latihan di Lubang Buaya.

Saya bergabung dengan Pemuda Rakyat pada umur 18 tahun. Tapi saya kan baru ikut-ikutan karena diajak abang saya. Waktu itu ada pengumuman diperlukan sukarelawan untuk dikirim ke Kalimantan, ke Irian Barat. Waktu itu latihannya kan satu minggu, jadi TC [Training Center]. Jadi saya ikut, saya itu nggak mikir masalah apa-apa. Yang penting saya masih muda. Tujuan saya ini untuk perjuangan untuk negara. Waktu itu saya ikut abang saya dulu, setelah abang saya pulang, ganti saya. Kalau nggak

salah saya itu angkatan keempat dan di situ dibikin apa itu kayak tenda-tenda banyak kayak, ya, kalau Pramuka gimana. Jadi setiap laki setiap perempuan itu kan bikin kemah masing-masing. Setelah itu memang dilatih ya, dilatih merayap, di atas itu ada kawat berduri, jadi nerobos ke bawah, dari atas itu ada yang nembakin. Sudah selesai terus lari, lari, lompat lagi, lari lagi sambil bawa bedil. Cara menembak juga. Memang dikasih seragam juga. Setelah diajarkan semua saya pulang, terus kira-kira berapa ya, satu minggu ya, saya kurang memperhatikan... terus ada kejadian itu, tahun 65 itu.

Kaum perempuan yang bergabung dalam latihan militer di Lubang Buaya bernasib buruk. Tempat tersebut kemudian digunakan serdadu-serdadu Gerakan 30 September untuk membunuh tujuh perwira Angkatan Darat pada dini hari 1 Oktober 1965. Seperti kita semua ketahui, militer di bawah pimpinan Soeharto kemudian mengatakan bahwa semua orang yang dilatih di Lubang Buaya terlibat dalam G-30-S. Lebih parah lagi, sejak 11 Oktober, surat kabar yang sepenuhnya berada di bawah kontrol Angkatan Darat, mulai menerbitkan artikel-artikel tentang Gerwani yang menggunakan para perwira untuk ‘permainan tjabul’: ‘sukarelawan-sukarelawan Gerwani telah bermain-main dengan para jendral, dengan menggosok-gosokkan kemaluan mereka ke kemaluan sendiri.’[5] Cerita itu menjadi semakin rinci dalam artikel-artikel selanjutnya dalam dua bulan berikutnya. Perempuan-perempuan anggota Gerwani dikabarkan

menari-nari telanjang di hadapan para jenderal, menyilet tubuh mereka, dan juga memotong kemaluan para perwira. Pada awal November, surat kabar memuat pengakuan seorang perempuan bernama Djamilah yang mengatakan terlibat dalam penyiksaan yang sadis terhadap para jenderal tersebut.[6]

Sekarang menjadi lebih jelas bahwa semua cerita tentang perempuan yang menyiksa para jenderal–cerita yang dianggap benar oleh banyak orang–adalah rekaan perwira intelijen di bawah komando Jenderal Soeharto. Laporan otopsi oleh dokter-dokter yang memeriksa jenazah para perwira di rumah sakit mengungkap bahwa tidak satu pun perwira yang tewas disilet tubuhnya atau dikebiri. Jasad mereka tidak menunjukkan adanya bekas-bekas siksaan. Semuanya meninggal dunia karena luka tembak.[7] Posiden Sukarno yang membaca laporan otopsi itu sering mengatakan kepada jurnalis bahwa cerita-cerita penyiksaan itu bohong, tapi media yang berada di bawah kontrol militer tidak mau menerbitkan pernyataan-pernyataannya.[8] Pada 1980an, sejarawan asal Belanda, Saskia Wieringa, mewawancarai sejumlah perempuan tahanan politik yang dituduh menyiksa para jenderal itu. Ia berhasil mengungkap bahwa tiga perempuan ‘Gerwani’ (Djamilah, Saina, dan Emmy) yang kesaksiannya diberikan oleh tentara kepada pers, sesungguhnya adalah pekerja seks yang ditangkap oleh tentara, disiksa, dan dipaksa menandatangani pengakuan yang ditulis oleh para interrogator.[9]

Cerita rekaan tentara mengenai aksi perempuan Gerwani di Lubang Buaya turut menggerakkan histeria antiPKI pada akhir 1965. Anggota Gerwani di seluruh negeri dianggap sebagai setan yang tingkah lakunya sama dengan para perempuan penyiksa jenderal dalam cerita karangan tentara itu. Perempuan yang tinggal jauh dari Jakarta dan tidak pernah mendengar nama Lubang Buaya disebut pelacur dan pembunuh, seolah-olah mereka turut melakukan kejahatan seperti perempuan-perempuan dalam cerita tentara. Dalam sekejap, puluhan ribu perempuan yang semula hidup normal dan terhormat di kampung-kampung menjadi sasaran kekerasan massal dan serangan militer. Mereka dipukul, di penjara, dan dibunuh. Kehidupan mereka sepenuhnya berubah karena dipisah dari suami dan anak-anak mereka.

Suatu hari di bulan Oktober, Ibu Sunarti di Solo, melarikan diri dari rumah bersama tiga orang anaknya. Sudah beberapa hari ia tidak mendengar kabar dari suaminya. Suatu pagi suaminya berangkat ke kantor dan tidak pernah kembali lagi. Banyak tetangga, bahkan pembantunya sendiri, sudah ditangkap. Ia mendengar desas-desus bahwa rumahnya akan diserang dan dibakar.

Saya mempunyai anak tiga orang, yang satu laki-laki, perempuan, laki-laki. Waktu itu masih kecil-kecil, tahun 65 itu yang sulung baru saja dimasukkan ke SD, SD kelas 1… Terjadi peristiwa itu, suami saya jarang di rumah karena dia di kantornya, ya. Sebagai anggota DPRD dia mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pemerintahan

daerah sini. Jadi, saya sendiri sudah ndak pikirkan lah, ya saya cuma dengan ngurusi anak-anak itu. Tapi, ternyata juga, saya pun dicari sebelumnya. Saya setelah dicari itu saya disuruh pergi. Lho saya pergi ke mana? Ya sudah saya pergi ke saudara-saudara gitu aja... Waktu itu pikiran saya cuma bingung, bagaimana anak-anak saya? ... Saya dipesan oleh suami saya untuk hati-hati, supaya memimpin dan mendidik anak-anak saya, saya cuma gitu. Lah orang-orang Gerwani juga ditangkap, lah saya kan jadi bingung.

Ia kemudian lari ke rumah mertuanya. Beberapa hari sesudahnya, saat sedang berjalan kaki, ia ditangkap sekelompok orang sipil.

Mereka, ya cuma beberapa orang, bawa kendaraan roda empat, gitu. Terus saya diambil, pertama kali saya dibawa ke polisi, serahkan ke polisi di Banjarsari... Kemudian pagi harinya saya dibawa ke Balai Kota. Kalau di Balai Kota itu katanya sudah lebih aman, gitu. Terus, ternyata saya waktu itu, di Balai Kota itu, saya malah diinterogasi lagi, ditakut-takuti... [Untuk interogasi] saya hanya seorang dibawa ke Loji Gandrung itu malam-malam, tengah malam, kalau nggak salah jam 12 malam itu... terus pernah dibon (dibawa keluar tahanan) ke CPM. Dibon ke CPM itu saya dipukuli sama, anu, kaki meja itu [yang ada di depannya] lebih besar lagi [alat pemukulnya], terus kaki saya diinjak-injak sama sepatu orang-orang CPM. ‘Lha saya suruh bilang apa Pak, kalau saya nggak tau?’ saya bilang gitu.

Ibu Sunarti adalah salah seorang yang agak beruntung karena nyawanya selamat selama penahanan. Di Balai Kota ia ditahan bersama empat perempuan lain yang dikenalnya. Suatu malam, keempatnya dibawa keluar untuk dieksekusi. Selama beberapa minggu ia juga merasa akan dibawa keluar untuk ‘di-game-kan.’

Terus malam hari lagi, ada teman saya empat wanita, sudah dibon itu ndak pulang. Saya untung ada yang memberi tau, penjaganya itu ada yang baik. ‘Bu, maaf ya Bu. Empat ibu yang dibon tadi sudah tidak pulang. Karena mereka dibawa pergi, ya kalau orang bilang, katanya sudah di-game gitu,’ digame-kan gitu istilahnya dulu. ‘Lha di-game-kan itu apa?’ ‘Dibunuh,’ gitu. Oh, saya baru tau itu kalau di-game itu dibunuh.

Saat ditahan, Ibu Sunarti mendengar dari mertuanya, suaminya ditahan oleh CPM. Lalu tak lama kemudian, ia mendengar kabar suaminya hilang. Sampai hari ini ia tidak tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi pada suaminya, tapi ia menduga nasibnya serupa.

dengan banyak orang lain yang dieksekusi setelah ditahan.

Ternyata dari teman-teman yang ada di kamp itu memang mengatakan, ‘Ini banyak kawan-kawan yang diambil tapi kemudian tidak kembali, baik dari penjara, dari Sasono Mulyo [tempat di Solo yang dipakai sebagai tempat tahanan], dari CPM [Corps Polisi Militer]–waktu itu suami saya di CPM–itu hilang.’ ‘Lho hilang

bagaimana?’ Diambil oleh siapa kita tidak tahu, tapi kemudian hilang tidak ada beritanya.

Di Wonosobo, Ibu Rukmini menghadapi situasi berbeda. Ia menjalani hidup seperti biasa setelah peristiwa G-30-S. Ia tetap tinggal di rumahnya dan mengajar di Sekolah Guru tingkat Bawah (SGB). Ia menggambarkan kehidupannya selama bulan Oktober, ‘Saya nggak ngungsi, nggak bersembunyi, di rumah aja’ tidur enak-enak.‘ Ia tidak menghadapi ancaman kekerasan massa sekalipun memegang posisi penting di cabang Gerwani setempat. Ia dan anggota Gerwani lainnya baru ditangkap pertengahan November, satu setengah bulan setelah G-30-S berakhir. Saat itu mereka tidak membuat kekacauan atau kejahatan sehingga tidak pernah menyangka akan menjadi sasaran penangkapan.

Wong pencidukan itu cuma Gerwani di cabang Wonosobo itu cuma 27. Itu pengurus cabangnya, ketua, wakil ketua, saya sebagai pendidikan penerangan, terus bendahara, lainnya tidak diciduk, dan sekretarisya juga nggak diciduk. Terus anak cabang. Cuma 27 orang. Mulai itu, saya itu, pertama diciduk tanggal 17 November 65... Saya masih kerja di kantor terus ada Kepala Seksi I [dari Kodim], yang namanya P. itu datang ke kantor menghadap ke kepala, ‘Mau pinjam Ibu Rukmini untuk dimintai keterangan’. Ya cuma itu aja... Ya keterangan apa? ‘Ya sudah nanti ke Kodim.’ Tapi nggak tahunnya saya itu nggak dibawa ke Kodim tapi dibawa ke penjara, ‘Lho kok saya dibawa ke penjara!’

Saat disekap di penjara Wonosobo, ia tidak menyangka akan tinggal di balik jeruji selama sembilan tahun. Tidak ada surat penahanan, dakwaan atau proses pengadilan.

Saya masuk penjara Wonosobo tiga hari, terus pindah ke THK [sekolah Tionghoa yang diambil tentara dan dipakai sebagai tempat tahanan] juga di Wonosobo. Terus setelah 26 Februari 66 saya pindah ke Jogja, pindah Jogja [penjara] Wirogunan. Masuk Wirogunan sampai 26 Mei 66, terus dipindah ke [penjara] Bulu, Semarang, sampai akhir tahun 74 Desember.

Kekerasan setelah G-30-S di Bali lebih mirip dengan kekerasan massa yang dihadapi Ibu Sunarti di Solo ketimbang suasana yang relatif tenang di Wonosobo. Kelompok milisi PNI, Tameng, bekerja sama dengan militer untuk menyerang rumah-rumah orang yang berafiliasi dengan gerakan kiri. Ibu Jermini di Denpasar kelabakan. Suaminya yang bukan anggota partai ternyata ditangkap dan ditahan di pos polisi suatu malam pada Desember. Hari berikutnya ia melarikan diri bersama enam orang anaknya setelah rumahnya dibakar oleh seseorang.

Desember bapak diambil. Entah siapa yang ngambil, malamnya Ibu nggak tau. Sudah itu, besoknya itu rumah dibakar. Setelah dibakar, Ibu terus langsung mencari bapak ke kantor polisi, bapak adanya di Kantor Polisi

Lalu Lintas. Ibu ke sana, sudah itu sampai di sana, ya ngomong-ngomong sama polisi, nggak ada apa-apanya, bapak memang dia dagang... Bapak kan diajak pulang.

Setelah di rumah kan dia lihat, bapak lihat ininya, rumah-rumah yang terbakar, tapi nggak ada apa-apanya, masih tiang aja satu. Terus masih ngomong-ngomong, ‘Jangan susah Dik, nanti kalau selamat kita bangun lagi,’ dia bilang begitu. Nah ya belum selesai bicara itu, belum dapat makan, sudah diambil lagi, jadi dibawa lagi ke sana, ke Polisi Lalu Lintas. Nah sampai di sana itu, jadi Ibu nggak tau entah ke mana dibawa itu, Ibu paling down (sedih), mana rumah tidak ada, anak-anak enam, ini kecil-kecil. Itu baru lahir, ya tahun 65 itu baru lahir.

Ketika dia menyelamatkan diri ke rumah mertuanya, rumah itu juga dibakar.

Ibu terus ngungsi ke rumah mertua. Sampai di rumah mertua itu, besok paginya itu dihancurkan rumah mertua itu. Nah dihancurkan karena Ibu ada di sana mungkin ya. Sudah itu pagi-pagi sedang minum, rumah dihancurkan, minum bersama adiknya bapak, dia pegawai penjara. Dia SB dia, Serikat Buruh. Lagi minum-minum, tau-tau massa datang, ‘Mana Raka?’ Mana Raka?‘ Adik itu namanya Raka. Karena Ibu lihat massa sudah penuh datang, jadi, Ibu anu, apa nyandar di belakang pintu. Adik ini lari, lari ke tembok, nah itu, mungkin dikejar, mungkin didapat dia, waktu itu dapat. Ibu terus dicari-cari di belakang pintu, didapat itu tombok sama besi lancip. ’Keluar tokoh Gerwani!‘ dia bilang gitu. Ya daripada anak-anak dibunuh, lebih baik dah Ibu menyerah.

Pagi itu gerombolan milisi Tameng mengumpulkan anggota organisasi kiri yang berhasil mereka ciduk dari

lingkungan yang dikenal sebagai basis PKI. Mereka berhasil menciduk puluhan orang, termasuk Ibu Jermini. Milisi Tameng membawa para tahanan ke perempatan jalan di kampung itu, menyuruh mereka berbaris lalu berlutut. Salah satu saksi kejadian itu adalah seorang remaja bernama Made yang kemudian menjadi menantu Ibu Jermini. Ceritanya memperkuat keterangan Ibu Jermini. Ia menyaksikan seorang serdadu menarik pistol lalu menembak para tahanan yang berlutut satu per satu pada bagian kepala. Serdadu itu menembak sepuluh orang sebelum seseorang bernama Pak Syukur mencegah dan mengatakan bahwa para tahanan tersebut bukan berasal dari kampung itu. Salah seorang tahanan yang hendak dibunuh adalah seorang Muslim dari Jawa sehingga tidak mungkin berasal dari kampung pendukung PKI itu. Pernyataan itu membuat serdadu itu bingung. Ia akhirnya memutuskan mengangkut para tahanan dengan truk ke Kodim untuk ditanyai. Sementara, sepuluh jenazah tahanan yang telah dibunuh dibiarkan tergeletak di jalan. Orang kampung yang kemudian membungkus jenasah mereka dengan tikar dan membawanya untuk dikuburkan. Pembantai ini terjadi pada 7 Desember 1965. Made ingat persis tanggal itu karena kakak laki-laki dan seorang sepupunya termasuk dalam sepuluh orang yang dibunuh.

Sementara itu, Ibu Jermini setelah ditangkap dibawa ke tahanan di Kodim. Ia diinterogasi dan disiksa selama beberapa bulan.

Sudah jadi tahanan, tiap hari diperiksa, tiap hari diperiksa. Aduh, ini pipi dikasih api. Kursi diterjang begitu kan jatuh, habis jatuh, diambil kursi, boaatt... plek, ini rambut habis copot. 'Oh, kamu ketua Gerwani ya? GTM kamu ya?' Apa nama GTM saya nggak ngerti. 'Kamu Gerakan Tutup Mulut,' gitu... Mukul aja dia pintarnya ya, rambut dia copot habis, ditendang, disundut sama rokok. Habis ini [ia menunjuk lengannya] hitam-hitam kena rokok kan. Habis rokoknya mati, diambil lagi rokoknya, tentara lain diambil dimatiin semut-semut itu. Kuruuuus sekali ibu, nggak makan-makan, nggak makan-makan, nggak kuat dada makan. Mikir ini, mikir keadaan anak-anak, mana suami nggak ada, anak-anak di luar bagaimana.

Saya diperiksa beberapa bulan dari Januari [1966]. Pada waktu itu saya rebah, akhirnya stres nggak ingat diri. Waktu diperiksa, dipukul itu diam, orang nggak punya perasaan apa-apa lagi. Orang sudah nggak sadar. Bulan April Ibu dipindah ke lembaga, ke penjara. Ibu sudah nggak sadar. Temanteman yang ngurusi. Saya makan saja didulang, mandi, dimandiin.

Setelah para interrogator tidak lagi menganggapnya perlu sebagai sasaran pukulan, ia dipindahkan ke Penjara Denpasar. Sementara itu, keenam anaknya diasuh oleh beberapa saudara. Anak perempuannya yang sudah duduk di kelas empat suatu saat berkunjung ke penjara dan mengatakan ayahnya hilang dari kantor polisi pada 4 Januari 1966. Ibu Jermini terdampar di penjara, suaminya

hilang, rumahnya dibakar, dan anak-anaknya harus hidup terpisah darinya.

Ia akhirnya bisa kembali bergabung bersama anak-anaknya saat dilepas dari penjara pada Agustus 1966. Tapi, namanya sudah berada di tangan militer sehingga sewaktu waktu dapat ditangkap lagi. Pada 1968, ketika militer melancarkan penangkapan masal kedua terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai PKI, lagi-lagi ia disekap di Kodim dan ditahan tanpa prosesan apa pun selama tiga bulan. Saat kerusuhan Malari meletus di Jakarta pada 1974, militer kembali menangkap semua orang yang tertera pada daftar 'pengacau ketertiban' yang mereka susun. Ibu Jermini kembali ditangkap dan disekap di Penjara Denpasar selama empat tahun. Tidak ada tuduhan dan dakwaan apa pun terhadapnya selama ditahan.

Banyak perempuan yang saya wawancarai mengalami penyiksaan saat interogasi. Seorang mantan tapol mengatakan dirinya tidak disiksa secara fisik, tapi mengalami siksaan mental karena harus melihat perempuan lain sedang disiksa. Perempuan ini, Ibu Riani, adalah anggota organisasi mahasiswa, CGMI, yang ditahan di Tulung Agung pada 1968 dan kemudian dipindah ke Surabaya. Karena ia adalah istri dari pimpinan PKI terkemuka yang belum tertangkap, para interrogator rupanya ingin menyiksanya secara khusus: 'Di situ asal ada orang disiksa, saya dipanggil,' Mana Nyonya Riani? Panggil!"

Setelah dimasukkan ke penjara, malam-malam saya dibon. Tengah malam, lha di situ saya sudah menggigil kedinginan, sudah itu saya menerawang saja, nggak bisa bicara apa-apa. Cuma apa, gedeg (menggeleng) dan manthuk (mengangguk) saja di situ saya.

‘Umurnya berapa?’

‘28.’

Acep [interogator] wah sudah omongannya sudah celometan, akhirnya saya langsung dibawa ke Undaan Wetan tempat interogasi, di Undaan Wetan, tempat penyiksaan itu, ke Surabaya. Lha di situ, saya namakan di situ ‘simponi maut.’ Di situ terjadi saya mendengarkan ada orang tiang nggeletak (bergeletakan) banyak sekali. Saya kenal dengan temannya bapaknya. Saya tanya, ‘Mbak nanti kalau saya dipanggil saya musti bagaimana?’ ‘Sudah lihat saja saya,“ dia tengkurap di situ. Di situ tengkurap itu sininya besar [menunjuk ke kepala], dikepruk dengan kursi itu, kursi besi itu. Saya sudah nggak bisa apa-apa, saya nggak semuanya saya nggak kenal, cuma satu-satunya yang saya kenal itu, dia nggak bisa kasih jawaban, cuma di situ melihat orang laki-laki semua tengkurap gegernya (badannya), jadi kalau dipenjalin (dipukul dengan alat pemukul terbuat dari rotan) semua tengkurap.

Kadang-kadang saya dibawa ke kantor interogasi, tapi ya saya nggak bicara apa-apa, saya nggak bisa omongan apa-apa, makanya saya dikira orang sudah syaraf, gitu. Itu juga menyelamatkan saya dari siksaan, jadi saya memang

nggak kena siksaan apa-apa tapi siksaan jiwa. Saya sampai nggak bisa tidur, duduk saja di situ.

Sekelompok interrogator datang dan mengancam akan membawa Ibu Riani keluar dari penjara. Ia khawatir orang-orang itu akan memperkosanya. Saat itu, ia berusaha membuat dirinya sakit sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibawa keluar. Ia bahkan ingin bunuh diri untuk menghindari rasa sakit dan penghinaan itu.

Saya mau diajak tim tentara yang operasi-operasi itu, saya diajak pergi ke mana-mana. Saya pikir, kalau saya ini mau diajak mereka-mereka, serdadu-serdadu itu, musti saya ini akan dilecehkan, saya gitu. Saya lebih baik mati saja. Entah mati saya dengan benturkan kepala saya ke tembok atau bagaimana [menangis]. Terus saya kok, aduh lebih baik saya tidak mau makan daripada gitu. Saya mogok makan, saya nggak mau makan, dikasih nggak mau makan nggak apa. Yang tentara yang mau ngajak saya itu, itu juga orangnya cabul itu, kadang-kadang tanya sama yang anak buahnya dia, 'Bagaimana masih belum mau makan?' 'Tidak, belum, gitu terus.' Terus saya baru minum mau makan setelah rombongan ini pergi. Di situ saya sampai ini kena penyakit paru-paru, kena penyakit paru-paru di situ saya, asal mulanya itu, jadi saya kurang makan, kurang gizi, kurang tidur di situ.

Ibu Riani juga tersiksa karena merasa bertanggung jawab atas penyiksaan yang dialami seorang anak perempuan. Ia tidak tahan saat bercerita dan terus menangis saja.

Yang masih saya kenang sampai sekarang, saya merasa dosa sekali. Saya disuruh menulis alamat tapi saya toh tidak akan saya bicara alamat yang saya tempati, saya nggak bisa. Saya menulis alamat yang saya tau sembarangan saja, sembarangan. Alamat di tempat saya kan disuruh menulis itu formulir. Sudah sampai di sana saya dengan teriakan anak kecil, saya dipanggil, 'Kamu kenal ini nggak, kamu kenal ini nggak! Ini dulu di tempat kamu!' gitu sama anak kecil itu, kelau nggak SD kelas enam ya SMP, matanya sudah merah, karena nangis itu. Lha saya bilang, 'Ya memang saya di tempatnya dia, karena alamat saya itu, tapi dia itu anak sekolah, saya cuma di kamar, saya nggak pernah keluar. Jadi dia nggak tau saya, kalau saya keluar kalau dia sudah berangkat sekolah,' saya bilang begitu. Jadi saya nggak tau, dia dengan saya nggak tau. Jadi, sudah dibenarkan itu, 'Mau saya besok pagi sekolah, saya besok pagi sekolah Pak,' gitu. Jadi dengan saya bela begitu, dia memang tidak tau saya.

Dia masuk akal begitu, anak itu terus langsung dipulangkan, tapi dia sudah disiksa duluan. Padahal memang saya nggak pernah bertempat tinggal di situ, saya memang cuma bikin alamat palsu saja. Jadi entah nggak tau orang tuanya apa diambil apa nggak, tapi yang saya lihat cuma dia, yang diambil kok jadi sampai anak itu yang diambil. Saya merasa berdosa sampai sekarang kalau ingat masih wajahnya itu, matanya merah buntet (merah pekat).

Peristiwa keji yang juga tak bisa dilupakan Ibu Riani adalah apa yang dia lihat terjadi pada seorang perempuan muda yang baru melahirkan di pusat interogasi Surabaya. Ibu muda itu tidak punya pilihan lain kecuali mengirim bayinya keluar dari penjara untuk hidup bersama neneknya. Dan, para perwira militer pun tetap menyiksanya.

Antara lain teman saya Ibu M. itu. Dia habis melahirkan masih teteknya masih harusnya disusu, teman saya Ibu M. namanya, dia baru melahirkan, dia dilecehkan toh, diremet-remet (diremas dengan kasar) teteknya kan sakit sekali kalau orang baru melahirkan, dia sampai misuh (mengumpat), apa dia 'Bajingaaan!' gitu, terus misuh gitu, lantas terus mulutnya dibakar. Pakai kertas-kertas itu mbakarnya, pakai kertas-kertas di ruangan itu, dibakar. Sampai di sana saya lihat itu gosong-gosong semua, sampai nggak bisa makan, mulutnya dibakar itu. Jadi dia itu sampai anaknya ditinggal dipelihara oleh neneknya itu.

Beberapa tahun kemudian, Ibu Riani akhirnya bertemu dengan nenek dan anak itu. Mereka mencari sang ibu di penjara perempuan di Plantungan sekitar 1974. Ibu Riani adalah salah seorang tahanan di sana. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa Ibu M. setelah disiksa, dibawa keluar pada malam hari, dan dieksekusi pada 1968.

Setelah neneknya, itu kira-kira umur enam tahun, mencari ibunya, kemungkinan ibunya ada di Plantungan itu. Nah itu terus mengharukan sekali, semua terharu. Dia dengan neneknya mencari Ibu M. apakah di situ, tau-tau

tidak ada yang di situ. M. tidak ada, karena M. dibawa ke penjara, tengah malam, dibon, sudah habis dengan teman-temannya, sudah dibunuh. Tapi yang namanya keluarga itu masih belum, nggak ada yang memberi tau, jadi dia masih mengharapkan kalau masih hidup, gitu. Padahal dia sudah bersama lima orang, Kalau nggak salah, di penjara, dibon, tengah malam. Di penjara itu asal tengah malam dibon sudah game, mesti dibunuh.

Ketika seorang ibu ditangkap, maka yang akan langsung menjadi korban adalah anak-anaknya. Proses penangkapan yang sama sekali tidak mengikuti prosedur hukum, dilakukan secara tiba-tiba dan tidak manusia. Semua membuat seorang ibu bahkan tidak sempat mencarikan tempat aman untuk sang anak. Bayi-bayi yang membutuhkan perhatian khusus tidak bisa ditinggalkan oleh sang ibu. Maka, tak ada pilihan lain selain membawanya masuk tahanan. Perempuan yang sedang hamil juga tidak mendapat perlakuan khusus di dalam tahanan. Dalam segala kekurangan: makanan yang buruk, ruang gerak yang terbatas, dan aparat yang represif, seorang ibu masih berusaha untuk memberikan kasih sayang dan perlindungan pada sang anak. Ibu Ramdinah, seorang sukwati untuk pembebasan Irian Barat, ditahan ketika sedang hamil tua.

Setelah ada peristiwa ini [G-30-S] saya selalu dipanggil. Dalam keadaan mengandung sering dibawa, dipanggil. Pokoknya dibawa, surat panggilan nggak ada. Dari pagi sampai jam lima sore, baru dipulangkan. Yang

menginterogasi saya ada sembilan orang. Mengapa saya ditangkap, saya nggak tahu. Katanya bikin rapat, katanya masalah mau berontak pemerintah, dan sebagainya. Salah satu interrogatornya bilang, ‘Kalau kamu nggak mau ngaku, kamu nggak boleh pulang, biar kamu tidur di sini, beranak di sini.’ Saya bentak, ‘Biar saja saya beranak, saya nanti melahirkan di tangga, nggak apa-apa.’ Penahanan itu sampai saya melahirkan. Saya melahirkan tanggal 26 November 1965. Suami saya harus lapor ya bahwa saya melahirkan di Rumah Sakit. Rumah sakitnya dijaga aparat. Jadi temanteman yang mau mengok harus lapor dulu. Polisinya nanya, ‘Bagaimana Bu, sehat?’ ‘Sehat!’ Satu minggu di rumah sakit, begitu pulang besoknya dipanggil. Itu pertanyaannya sebetulnya sama saja, mungkin untuk menandaskan supaya ngaku. Jadi pemeriksaan itu sehabis saya melahirkan sampai 10 Desember 1965.

Lama-lama kita diberitahu bahwa kita harus dibawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta 11 Maret 1966, wong kita orang daerah nggak bisa ketemu saudara. Kita ditaruh di mess Koreri Tanah Abang. Setelah di mess itu suami saya nggak ikut turun, hanya ibu-ibu dan anak-anak. Kita di mana, suami kita bagaimana, nggak ada yang tahu. Tiga hari kemudian saya nanya petugas, ‘Kita di mana sih Pak?’ Anak saya kan masih bayi. Bapaknya mungkin pengen lihat.’

‘Nggak tahu Bu, nggak tahu.’

Lama-lama ada yang mbilangin kalau suami saya ada di mess. Dari mess Tanah Abang, saya dipindah ke jalan Tambak. Di sana satu bulan, lalu dipindah ke Penjara Bukit Duri. Saya sangka, kalau sudah ditahan nggak ada apa-apa lagi. Ternyata masih ada pemeriksaan. Terus-menerus pertanyaan itu, nggak ada habisnya. Padahal anak saya masih bayi waktu itu. Setelah saya masuk Bukit Duri, suami masuk Salemba. Jadi nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa nengok sana-sini. Jadi anak saya nggak tahu rupa bapaknya kayak apa gitu karena memang pisah sejak bayi.

Bayi saya besar di Bukit Duri sampai usia tiga tahun. Kata komandannya, ‘Anakmu harus keluar.’ Mau dibawa ke panti asuhan, saya nggak boleh. Saya mau cari teman yang mau pelihara anak saya. Lalu ada teman dari Irian, yang suaminya ditahan, tapi istrinya tidak. Mereka punya dua putra, yang satu masih SD, yang satu lagi sudah kelas dua SMA. Saya serahkan anak saya, ‘Ini Bu saya serahkan anak saya untuk dipelihara. Nanti Kalau saya sudah pulang, kita bisa rundingan lagi.’

Bertahan Hidup di dalam Penjara

Sekitar 1970, penangkapan massal dan interogasi oleh tentara terhadap orang yang diduga terlibat G-30-S pun berakhir. Banyak tahanan politik yang digolongkan kurang

‘berbahaya’, golongan C, dilepas dari tahanan. Mereka yang termasuk golongan A dan B tetap disekap. Masalah paling serius bagi para tahanan, termasuk perempuan, pada 1970an adalah kekurangan makanan. Saat itu para tapol jarang mendapat siksaan badan ketika interogasi. Tapi siksaan yang mereka alami jauh lebih kronis: pelaparan secara perlahan-lahan. Nampaknya tidak satu pun penjara di negeri ini yang memberi makanan cukup untuk bertahan hidup. Jatah dari penjara begitu sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan kalori dan gizi para tahanan untuk bertahan hidup. Para tapol perempuan, seperti yang laki-laki juga, harus bergantung pada makanan yang dibawa oleh saudara mereka atau tanaman pangan yang mereka pelihara di kebun. Para tapol juga memenuhi kebutuhan akan protein dengan menangkap tikus, kucing dan anjing jalanan, bekicot dan kadal. Karena jatah dari penguasa penjara yang sangat terbatas, para tapol harus kreatif mencari jalan untuk bertahan hidup.

Di Penjara Bukit Duri, sebuah penjara dari zaman kolonial di Jakarta, yang digunakan rezim Soeharto untuk mengurung tahanan perempuan, para tapol biasanya mencuri beras dari dapur penjara dan diam-diam memasaknya sendiri. Seorang tapol, Ibu Anita, mencuri beras untuk diberikan kepada suaminya yang juga menjadi tapol di penjara yang sama.

Saya juga di Bukit Duri itu bisa dibayangkan seperti apa. Karena kami ini diberi beras seperti sweeping [beras

yang berjatuhan dan disapu] itu, jadi masih banyak kotorannya, sehingga tidak bisa dimakan begitu saja, karena memang tidak layak dimakan. Atas inisiatif ibu-ibu dibentuk kelompok kelompok untuk memilih beras. Ada satu hal yang menggelikan dan bermanfaat bagi kami. Kalau lagi milihin beras gitu kami pura-puranya haus, kan memang lama proses untuk milihin itu. Jadi kami pulang untuk pura-pura minum. Padahal apa, kami pulang karena nyolong (mencuri) beras itu. Dicolongin (dicuri) itu semua dan yang melakukan itu banyak tidak hanya satu-dua orang saja, karena memang punya tanggungan bezukan (kunjungan). Ya kayak saya bezuk (mengunjungi) bapak, kan diperbolehkan ada pertemuan antar tahanan. Nanti, kalau sudah tiba waktunya nggak dibawa berasnya sih, dimasak. Masaknya juga nyolong. Kamar mandinya kan panjang, di situ ada kompor. Jadi sambil telanjang, kami masak [terawa].

Masalah tapol bukan hanya kekurangan makan, tapi makanan yang ada pun sangat kotor, seperti beras di Bukit Duri, busuk atau bahkan beracun. Ibu Sumiati mengingat bagaimana para tahanan di Penjara Beteng Yogyakarta muntah-muntah saat mencoba memakan gatot yang diberikan kepada mereka.

Ketika menjelang Lebaran, sore itu jatah dari Wirogunan bukan gerontol

(jagung), bukan nasi jagung tapi gatot. Tahu gatot? Itu singkong yang hitam. Gatot di luar sih enak saja ya, pakai kelapa. Nah tapi itu rupanya gatot yang entah sudah

berapa tahun di gudang terus dimasak. Apek baunya dan kalau wanita, tidak segera atau malah tidak dimakan. Malah banyak yang menangis, nelangsa (menderita) ya, karena mau Lebaran diberi makanan kok seperti ini katanya. Jadi tidak dimakan semua… Oh gerontol-nya kami hitung. Di tempat pria kira-kira 100-150 butir, di tempat wanita malah 250. Jadi aneh, malah lebih banyak ya. Jadi mereka kan kelaparan terus. Apalagi yang petani itu kan biasa makan meskipun dua kali atau sekali tapi kan makannya kenyang ya. Ada yang sudah meninggal kelaparan. Ada yang punya penyakit jadi kambuh. Di sebelum pagar sana rupanya mereka langsung dimakan itu ya. Tidak lama kemudian terdengar muntah-muntah, 'Huek…hueek…huueeek.' Makin lama makin banyak, beracun rupanya itu gatotnya.

Plantungan, sebuah tempat pengasingan terletak di lereng pegunungan Dieng, dekat kota kecil, Weleri, dibuka pada 1971 untuk menahan tapol perempuan dari berbagai kamp penjara di seluruh Jawa. Di zaman kolonial, tempat itu digunakan sebagai pengasingan penderita kusta. Mungkin bagi rezim Soeharto, perempuan 'komunis' tidak ada bedanya dengan penderita kusta, dan tempat itu dianggap ideal untuk menahan mereka. Rombongan perempuan pertama dibawa ke sana untuk membersihkan tempat itu dari debu dan jaring laba-laba.

Karena Plantungan jauh dari kota, maka keluarga para tapol tidak bisa rutin berkunjung dan menyediakan makanan maupun obat-obatan. Tahanan perempuan

sangat bergantung pada jatah yang mereka terima dari penjara. Berbagai usaha dilakukan oleh tapol-tapol perempuan ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan. Ibu Riani mengenang bagaimana tahanan perempuan dibagi ke dalam empat unit kerja: 'Ada peternakan, pertanian, kerajinan tangan, menjahit. Karena saya itu suka hewan, jadi saya pilih unit peternakan. Di situ memelihara ayam, kandangnya di atas, mesti jalan ke atas, gitu.' Salah satunya dengan menanam berbagai macam tanaman sayuran. Plantungan adalah penjara terbuka dengan lahan berlembah di daerah Wonokambang. Karena tempatnya cukup luas, penjara ini memungkinkan tapol-tapol untuk mengadakan kegiatan semacam pertanian. Ibu Andhika, seorang tahanan dari Blitar yang dikurung di penjara itu, bercerita:

Saya ke bagian pertanian. Nanam ubi jalar itu, jagung, gitu. Ada yang di kesehatan, ada yang di batikan, penajhatan, begitu, ada yang ternak, gitu. Saya di pertanian. Tapi di pertanian itu lumayan lho. Hasil itu bisa dinikmati semua. Jadi, kalah panen itu ya, untuk seasrama gitu. Yang saya masih terkesan itu anu, cuthik (pengungkit) saya itu masih saya bawa pulang, cuthik kecil itu. Ampas kamil (kelapa) itu lho, dari dapur minta dibagi. Untuk sambel, saya nanem, bikin kebun itu di belakang sedikit. Nanam pisang, nanam cabe, kalau nyambel itu, ambil itu. Teman-teman, 'Apa Bu lauknya?' 'Sambel ampas.' [tertawa] 'Itu sana, ambil sedikit!' Lalu, daun ubi jalar itu lho, namanya gandur kalau di sana itu,

ya. Saya bawa dari kebun itu buanyak gitu, satu pethet (keranjang) itu. Lalu dicuci, nanti minta air panas ke dapur waktu jarang anu itu. Hanya dipanasi gitu saja. Lalu urunan gula, cabe, garam gitu. Disambel kan. Nanti teman-teman saya itu liwat, akan mandi. Kan kamar mandinya di sebelum utara saya. Sama anu, menggok (belok), nyowel (mencicipi). Lucu-lucu kok pokoknya. Makanan itu saja berharga sekali, gandur itu saja, di Plantungan itu. Kan makannya sedikit sekali. Satu hari itu diberi dua kali.... Pagi singkong, jadinya nasinya siang untuk dua kali makan. Tapi ya kalau dijadikan satu, kalau dinet-net (dipadatkan) itu setengah rantang. Sayurnya ya sedikit, satu irus (sendok sayur), lauknya satu tempe untuk sehari.

Para penguasa penjara tahu bahwa jatah makanan untuk para tapol itu jauh dari cukup. Seperti di penjara-penjara lainnya, para penjaga biasanya memberi makanan lebih banyak beberapa hari sebelum ada kunjungan dari orang atau lembaga asing. Palang Merah, Amnesti Internasional, dan pejabat pemerintah Eropa mulai berkunjung ke penjara-penjara sejak pertengahan 1970an. Sebelum orang asing datang, makanan yang disediakan menjadi beragam, mulai dari nasi, telur, sampai daging yang ditata dengan apik. Tujuannya adalah supaya tamu yang datang melihat bahwa tapol-tapol itu diperlakukan dengan baik. Ibu Sunarti dari Solo, yang telah kita dengan ceritanya di atas, disekap di Plantungan sampai 1979. Ia

mengingat bagaimana para penjaga penjara bahkan meminta para tapol berbohong mengenai mutu makanan.

Sudah mendekat tahun pemulangan itu, itu baru nasi. Dulu ada pemeriksaan dari Palang Merah, itu dilihat kok, dilihat waktu itu diberi nasi. Kita malah terkejut ya, kok diberi nasi, diberi susu, gitu. 'Ini nanti selanjutnya apa?' kita biasa tanya sama bosnya situ. 'Ya, nanti biar ibu-ibu gemuk-gemuk,' gitu. Terus padahal di situ, di Plantungan kita kan pada bisa memanam-nanam gitu, sayur-sayuran itu sudah bisa dari kita sendiri. Terus, 'Nanti kalau ditanya, ini nanti kan ada pemeriksaan, ini kalau ditanya ini sejak dulu sudah diberi nasi sama susu, cuma ibu-ibu dulu ya gimana ya, ya mungkin ada kesalahan ya, karena yang sampai di sini kok bulgur [sejenis gandum]. Itu nanti kalau ditanya supaya bilang kalau sejak dulu itu sudah nasi, ya kadang-kadang diberi susu, kacang ijo,' gitu. Nah, sudahnya ya ada teman-teman sarjana itu yang mereka pemikirannya lebih anu ya, 'Sudah nanti kalau ditanya bahasa Inggris saya yang jawabnya ya apa adanya saja,' gitu. Ha ternyata sampai mereka tau, ternyata ha ya, jadi apa itu, banyak yang ngontrol itu, kalau waktunya nggak ada bosnya yang teman-teman sarjana itu yang terus bisa langsung dengan bahasa Inggris itu dia ngomong.

'Baru kali ini diberi nasi sama susu, ndak pernah diberi,' gitu.

Walaupun tahanan perempuan terisolasi di Plantungan dan dijaga oleh laki-laki, tidak banyak kasus serangan seksual yang dilakukan penjaga. Para tahanan sangat

berhati-hati tidak mau bersendiri dan saling menjaga satu sama lain. Dengan kata lain, mereka menjadi penjaga bagi sesama, seperti dikatakan Ibu Sunarti.

Kita mengatur diri to untuk setiap malam itu ada yang jaga, ibu-ibu ini ada yang jaga. Kita ini karena sudah biasa hidup, kita ini hidup maju ya di dalam kemasyarakatan itu, sehingga kita itu selalu berjaga-jaga. Yang dapat dihamili, itu anak yang dibon untuk jadi pelayan di komplek itu [perumahan staf penjara], di komplek atas itu, ya bisa dihamili. Ya kalau yang di daerah ini ndak bisa. Jadi kalau misalnya penjaga mau keliling kita juga keliling, jadi ibu-ibu ini ya karena dididik untuk sendiri kok ya akhirnya kita jadi berani, gitu lho.

Selama di Penjara Plantungan, hubungan tapol dengan anggota keluarganya terputus sama sekali. Banyak di antara tapol yang telah menjadi seorang ibu dipaksa berpisah dari anak-anaknya. Ibu-ibu itu kehilangan saat-saat di mana ia dapat merawat dan membesarkan anak-anak, memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Dalam kondisi terbelenggu di penjara, kerinduan itu terpapas. Jika ada kesempatan bagi sang anak untuk mengunjungi ibunya, sering kali sang ibu tidak mengenali anaknya karena telah berpisah begitu lama. Ibu Andhika bercerita:

Anak saya ke Plantungan. Anak saya disuruh diam saja, dan memang tidak ditunjukkan mana anak saya. Memang ada teman saya yang juga besuk, tapi dia diam saja. Setelah lama saya tanya petugas, ‘Mana Pak anak saya?’

‘Lho, anak ibu ada apa ngga?’ Anak saya masih diammm saja [tertawa]. Lama-kelamaan saya ingat-ingat, saya lihat dahinya, kok seperti aku semua. Waktu kecil begini bentuknya, tapi sudah besar kok lain. Jadi begitu anak saya pulang, saya lupa rupanya, karena ketemunya hanya sebentar. Ada lagi teman saya yang dari Jakarta anaknya nggak diakui. ‘Bukan. Itu bukan anak saya.’ Anaknya sampai nangis, ‘Ini saya, anak Mami.’ Ibunya masih bilang, ‘Bukan, saya nggak punya anak itu.’

Di samping Plantungan, penjara besar lain yang digunakan untuk menahan tapol perempuan adalah Penjara Bulu di Semarang. Karena penjara itu di tengah kota, keluarga para tahanan lebih sering menjenguk dan membawakan makanan. Ketika Ibu Rukmini dipindahkan ke Penjara Bulu pada Mei 1966, ia mengetahui salah seorang penjaga di sana adalah saudaranya sendiri.

Jadi saya punya saudara kakak, tapi puteranya Pak De [kakak lelaki dari ibu/bapak], kerja itu, pegawai Bulu itu. Ya memang saya datang saya melihat ya, saya tidak berani ngomong. Sana juga nggak berani tanya ya tho, kan takut pada waktu itu. Setelah dinas malam dia datang ke sel saya, ‘Butuh apa kamu?’ ‘Butuh ini, ini, sabun, odol,’ saya bilang begitu. Terus malamnya lagi dia membawakan gitu. Terus banyak yang titip, keluarganya-keluarganya ini, ini, ini, lewat kakak saya itu. Tapi ya kita harus hati-hati, ketahuan ya dia pasti dipecat.

Salah seorang saudarinya tinggal di Semarang dan juga membawakan barang-barang keperluannya. Saudarinya

menyampaikan kepada ayah mereka di Wonosobo bahwa Ibu Rukmini ditahan di Bulu. Ayahnya semula tidak percaya karena selama ini menyangka ia telah dibunuh, atau mengikuti istilah yang lazim digunakan saat itu, sudah ‘digame’. Sang ayah pun mulai berkunjung ke penjara membawa keempat anaknya: ‘kalau anak-anak itu libur sekolah semua dibawa ke Semarang sama bapak saya.’ Ia senang menerima kunjungan dari keluarganya. Ayah dan ibunya yang harus bertahan hidup dari uang pensian (sebagai bekas perwira polisi) juga harus mengurus anak-anaknya di Wonosobo.

Tapi, keadaan itu tidak bertahan lama. Anak yang paling kecil meninggal karena sakit ketika masih bayi pada 1969. Ibunya meninggal pada tahun yang sama, sementara ayahnya yang berusia 74 tahun, ditangkap dan ditahan tahun berikutnya. Kejahatan yang dilakukannya adalah tinggal di sebuah rumah yang ingin dikuasai seorang perwira Kodim.

Nah bapak saya diambil, karena tahu masih itu rumah saya mau disita, rumah yang ditempati bapak dan anak-anak saya. Tapi yang mempertahankan anak saya, ‘Pokoknya Pak, Kalau Bapak mau menempati di sini boleh disilahkan, tapi kamar yang besar ini untuk saya dan adik-adik saya. Saya mempertahankan ini.’ Itu rumah, dilock (dikunci) dan disegel.

Karena ayahnya ditahan, rumah yang semula mereka tinggali pun diambil alih oleh perwira Kodim itu. Tiga anaknya yang masih tersisa dipencar ke sejumlah

keluarganya karena tidak ada saudara yang punya cukup uang untuk merawat ketiganya. ‘Jadi ya berantakan itulah setelah bapak diambil. Terus anak saya nomor satu dikirim ke Jakarta ikut adik saya yang laki-laki, dan nomor dua ikut adik saya lagi yang paling kecil. Dan yang satu kan sudah meninggal, dan yang satu lagi ikut adik saya yang di Semarang.’

Penjara Tak Berjeruji

Kebanyakan tapol perempuan dilepas bersama tapol laki-laki antara 1978 sampai 1979. Beberapa di antaranya, seperti Ibu Rukmini yang ditahan di Bulu, dilepas lebih awal pada 1974. Tentu saja mereka bergembira saat dilepas dari penjara, walau belum benar-benar percaya bahwa akan dilepas sampai saat berdiri di luar gembang penjara. Ibu Marni dari Ambarawa menggambarkan rasa sukacitanya saat meninggalkan Bulu:

Lha waktu keluar dari Bulu itu ndak ada orang yang ndak nangis. Buka pintu Bulu, byak! Orang yang melihat kayak pawai itu nggak ada yang nggak nangis melihat ibu-ibu keluar dari penjara itu. Kan sudah dibilang kalau pada-pada gila, sudah kayak orang nggak bener, ngono to (begitu kan). Jadi buka, sing rokan, rokan necis, sing ngenggo jarik, jarike wironane mlipis. (Jadi buka, yang memakai rok, roknya rapi, yang memakai kain, kainnya berwiru rapi sekali.) Sebelumnya kan sudah disiarkan,

‘Nanti Lembaga Bulu akan melakukan pelepasan besar-besaran’ gitu to... Mereka pada bengong (terdiam), bengong-nya, ‘Lha kok wonge isik podo wutuh,’ gitu kan. (Lha kok orangnya masih utuh begitu.) Jadi orang yang melihat didustai dengan berita yang sebenarnya... ‘Sudah pada gila Gerwani yang di Bulu, sudah pada gila semua.’ Padahal kan nggak begitu.

Ibu Riani yang dilepas dari Plantungan pada 1978 tidak percaya bahwa dia akan dibebaskan.

Setelah bebas pertama-tama dibawa ke Semarang dulu. Di situ ada penerangan dulu. Langsung dibawa ke Korem Solo. Bermalam di sana, karena esok paginya menunggu pembebasan dari Nusakambangan. Jadi nanti upacaranya bareng-bareng gitu lho. Paginya dibawa ke Kodim, keluarga disuruh menjemput. Kebetulan saya katut (ikut), kalau nggak katut ya nangis. Penginnya semua katut... Saya sampai lupa bagaimana perasaan saya waktu bebas itu. Karena saya masih lihat kiri-kanan begitu. Saya bebas, ini belum, ini belum, gitu. Ya masih memikirkan yang lain-lain yang belum bebas.

Para tapol umumnya ditahan selama 13-14 tahun. Saat dilepas, anak-anak mereka sudah beranjak dewasa dan terbiasa dengan propaganda hitam dan lembaga-lembaga politik ciptaan rezim Soeharto. Banyak eks-tapol perempuan yang mengungkapkan kesedihan mereka karena tidak dapat berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Anak-anak yang telah tumbuh dewasa tanpa kehadiran sang ibu cenderung mengambil jarak. Lebih

menyedihkan lagi, ada anak-anak yang merasa malu orang tuanya berstatus eks-tapol, dan menyalahkan orang tua mereka atas penderitaan yang mereka alami. Saat Ibu Sunarti ditanya, ‘Ketika ibu kumpul dengan keluarga lagi bagaimana?’ Ia menjawab:

Bagaimana ya, ndak enak, karena kita harus membenahi semua, sudah berantakan dan anak-anak juga seolah-olah menyalahkan pada orang tuanya ya. Karena mereka kan masih ya anak-anak sekian kan belum tau. Kemudian di sekolah bagaimana pendidikannya mengenai sejarah yang sebetulnya kan ndak diberitau. Mereka taunya, yang tersangkut di G-30-S/ PKI itu jelek,‘ kalau anak-anak ditanya cuma itu. Kalau yang kecil-kecil seperti itu, saya sudah 14 tahun di kamp ya, jadi mereka sudah, ya di universitas gitu to, jadi setelah kita pulang ini cuma, ’Bu anu kowe ya ndadak melu-melu kuwi to Bu, wong sing terlibat G-30-S/PKI jelek?‘ (Bu mengapa kamu ikut-ikutan itu sih Bu, orang yang terlibat G-30-S/PKI jelek?)

‘Kuwi sing kandha ngono sapa?’ (Itu yang mengatakan begitu siapa?)

‘Ya sekolahan, sejarah,’ gitu. Ya sudah saya mau apa lagi. Waktu itu pemerintahan kan masih begitu, ndak ada demokrasi ya to. Saya sudah ndak bisa memberikan, mereka sudah besar-besar itu, sudah universitas. Itu kalau nanti saya mbanggel malah (membantah akan), ya to. Saya sedih ya, sedih sekali. Mengapa mereka tidak mengerti perjuangan orang tua, apalagi seperti saya yang sejak kecil sudah ikut bergerilya gitu. Saya sejak SMP sudah

ikut begini, saya belum pernah berbuat salah terhadap masyarakat tetangga sekitar, kami nggak pernah. Ya tetangga-tetangga sendiri yang memberi tau begitu. 'Ngomong apa to Bu kowe kok ya nganti dilebokke 14 tahun kuwi kowe nang ngapa?' (Kamu mengatakan apa toh Bu kamu kok ya sampai di penjara 14 tahun itu kamu berbuat apa?) Ya artinya semua teman-teman yang ada di lingkungan saya yang terkena itu.

Banyak ibu yang tidak mau berdebat dengan anak-anak mereka tentang masalah G-30-S atau membujuk mereka agar berpikir lain. Mereka tidak mau membuat anak-anak kesulitan menyesuaikan diri dengan kebudayaan Orde Baru. Dan mereka berpikir saat itu, jika anak-anak mereka semakin dewasa dan memahami masalah politik lebih jauh, mereka tentunya akan berubah pikiran. Seperti dikatakan Ibu Murni, seorang guru TK Mardi Putra dan anggota Gerwani dari Klaten:

Saya punya pandangan, nanti kalau anak-anak sudah kerja, sudah selesai sekolah biar bisa memikirkan sendiri, begitu. Kalau saya cerita sekarang nanti dia patah semangat, lebih-lebih situasi masih begini. Jadi saya rahasiakan soal itu. Takutnya itu, nanti kalau anak-anak nggak kuat mentalnya bisa toh sama ibunya malah dendam. Atau dendam dengan keadaan kan. Yang penting anak-anak sekolahnya pandai, dia baik dengan teman-teman, dengan sesama, begitu saja.

Di samping rasa sedih karena tidak dapat berhubungan dengan anak-anak mereka, para eks-tapol perempuan juga

menghadapi kesulitan mencari nafkah untuk bertahan hidup. Anak-anak harus tetap bersekolah, butuh makanan, pakaian, dan perhatian, sementara sebagian di antara mereka tidak tahu lagi kabar suaminya. Ibu Rukmini bekerja sebagai penjahit di rumah sakit di Semarang selama enam bulan–'saya menjahit sprei, sarung bantal, baju dokter, pokoknya karena baru belum ada semua'–tapi tidak bisa menjadi pegawai karena pernah ditahan. Ia kembali ke Wonosobo setelah kerja serabutan selama satu setengah tahun di Semarang. Di kota asalnya, ia menjual makanan kepada guru-guru sekolah yang menjadi muridnya ketika masih mengajar di sekolah guru sebelum 1965.

Karena saya jualan laris ya, saya kan jualan tempe kemul (tempe dibungkus tepung), bubur. Mustinya orang yang pada melihat tetangganya begitu kan kasihan ya. Beli. Terus saya nggoreng tempe, nggoreng pisang saya titipkan di sekolah-sekolah. Kan saya kenal sama guru-guru itu kok, guru-guru itu keluaran SGA, 'Ini nolong Bu Rukmini, nolong Bu Rukmini,' gitu.

Ibu Jermini, di Denpasar, bekerja sebagai penjahit dan hidup pas-pasan. Anak-anaknya juga bekerja. Ia membelikan pakaian anaknya dengan cara mencicil:

Bagaimana saya menghidupi anak enam? Ya, cari sendiri. Sayur saya minta sama adik, yang penting ada beras. Anak-anak kan nggak bisa makan bulgur. Waduh, mana pakaiannya anak-anak kan harus pakaian putih, itu saya ngebon (berhutang): untuk pakaian anak-anak ini

saya cicil satu rupiah per hari. Saya sisihkan uang dagangan saya, untuk nyicil bajunya anak-anak. Anak-anak semua sekolah, kontan kita nggak bisa, kita bon, terpaksa cicil-cicil.

Setelah belasan tahun di penjara, para ibu mantan tapol ini tidak lama menghirup udara kebebasan. Kesulitan hidup sehari-hari segera menghadang mereka selepas gerbang penjara. Ada dari mereka yang memiliki sanak-saudara yang berkecukupan dan bersedia membantu meringankan beban hidup mereka sekeluarga, seperti menanggung biaya sekolah anak-anak dan mencarikan pekerjaan. Tapi, sebagian besar tidak seberuntung ini nasibnya. Sementara negara membatasi gerak mereka dengan aturan-aturan yang diskriminatif, mereka harus bekerja apa saja, termasuk menjadi pembantu rumah tangga, atau membuka warung kecil-kecilan, agar bisa melanjutkan kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Banyak pula dari mereka yang kehilangan suami, atau kalaupun suaminya masih hidup, biasanya juga berstatus eks-tapol sehingga tidak mudah beroleh pekerjaan. Yang lebih mengenaskan, sampai berusia lanjut dan mulai sakit-sakitan, mereka masih harus bekerja keras. Mereka tidak selalu bisa bergantung pada anak-anak yang sudah dewasa dan bekerja karena kebanyakan anak-anak tapol hidupnya juga pas-pasan. Dalam keadaan seperti inilah solidaritas antar sesama eks-tapol benar-benar terbangun dan berfungsi sebagai jaring pengamanan sosial yang efektif. Seandainya saja

pemerintahan yang berkuasa setelah Soeharto dipaksa mundur pada 1998 berpikir lebih serius tentang nasib para korban kekerasan Orde Baru, mungkin para ibu ini–perempuan-perempuan yang ikut berjuang merebut kemerdekaan negeri ini–bisa menikmati kehidupan yang lebih layak.

Mengungkap ‘Tragedi yang Senyap’

Pemerintah Orde Baru berdiri bukan lewat suatu perjuangan mulia melawan kebathilan seperti yang digembar-gemborkan selama ini, melainkan lewat sebuah operasi kejahatan yang luar biasa berdarah. Dari satu cerita karangan tentang kebejatan perempuan, sebuah operasi yang diberi nama ‘pemulihan keamanan dan ketertiban’ telah dipakai untuk membenarkan penghancuran kehidupan dan penghilangan nyawa ribuan orang yang tidak pernah tahu apa kesalahannya. Lebih dari itu, operasi ini juga melenyapkan bagian-bagian penting dalam sejarah yang memuat kisah-kisah perjuangan rakyat melawan ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender, sejak sebelum republik ini berdiri. Tapi, kini sudah terbukti bahwa pemenggalan sejarah dan pembungkaman mulut para korban ternyata tidak berhasil membuat cita-cita membangun Indonesia yang lebih demokratis dan manusiawi hancur. Mari kita berharap, akan ada lebih banyak lagi korban perempuan yang mau

bersuara, supaya dongeng tentang perempuan ‘penyilet tubuh jenderal’ bisa digantikan dengan kisah perempuan yang berjuang dan berperan aktif dalam setiap sendiri kehidupan manusia.

Saya sadar, dengan merekam dan menyampaikan cerita para korban Tragedi 1965 ke publik, saya mungkin akan dituduh sebagai ‘pembela Gerwani’, atau malah ‘pembela PKI’. Namun, saya pikir kita tetap harus melihat pokok persoalan yang sebenarnya, yaitu bahwa telah terjadi penangkapan, penyiksaan, pemerkosaan, pemenjaraan, dan pembunuhan terhadap begitu banyak orang yang kesalahannya tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Kenyataan ini saja sudah cukup sebagai alasan bagi kita untuk mengangkat persoalan ini sebagai persoalan kemanusiaan: ‘tragedi yang senyap’ dalam sejarah modern Indonesia.[10] Bagi saya, seperti juga kawan-kawan lain yang terlibat dalam penelitian ini, bukan sekali saja kami mengambil resiko diserang mereka yang merasa terancam oleh pengungkapan suatu fakta. Ketika TRuK melaporkan hasil investigasi Tragedi 13-14 Mei 1998, kami dihujat sebagai kelompok yang ‘membela penjara’ dan ‘menjual bangsa’ hanya karena mengungkapkan adanya pembakaran atas ribuan kaum miskin kota, pembiaran penyerbuan terhadap toko-toko milik pedagang Tionghoa, dan perkosaan terhadap ratusan perempuan Tionghoa di seantero Jakarta. Pengalaman bekerja di TRuK dan bergaul dengan keluarga korban, termasuk korban Peristiwa 65, membuat saya tahu satu hal: untuk

membungkam suara korban, pemerintah selalu balik menuduh korban sebagai pelaku kejahatan; bahwa sebelum ada pengungkapan cerita yang lengkap dari banyak pihak, pemerintah sudah terlebih dahulu menghakimi korban sebagai kriminal.

Kalaupun ada yang mempertanyakan tujuan penulisan cerita-cerita ini, saya justru ingin balik bertanya: kenapa lebih mudah bagi kita untuk menjadi marah atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para perempuan yang katanya menyileti tubuh para jenderal daripada terhadap kekerasan yang terjadi pada ribuan perempuan yang dibunuh, dianiaya, dilecehkan juga dikucilkan dalam penjara? Kenapa juga lebih mudah buat kita untuk 'mempersetankan' orang-orang yang menembaki Ade Irma Suryani, putri Jenderal Nasution, dan melupakan ribuan anak yang menjadi korban ketika rumahnya diserbu dan dibakar, anak-anak yang terlunta-lunta ketika ayah-ibunya ditahan? Ribuan anak harus menanggung 'dosa', padahal ketika 'kejahatan' itu terjadi mereka baru atau belum lahir. Sebagai orang Indonesia, kita perlu berpikir tentang bagaimana sebuah pemerintahan militer, melalui kampanye propaganda yang intensif, mengacaukan persepsi kita mengenai warga yang lain, khususnya perempuan, dan bahkan menganggap mereka jahat. Padahal, mereka adalah orang biasa seperti kita juga.

Kaum perempuan yang kehidupannya saya gambarkan secara singkat di atas–Ibu Sunarti, Ibu Rukmini, Ibu

Jermini dan lainnya–adalah perempuan-perempuan yang menjadi korban kesewenang-wenangan rezim Soeharto. Mereka ditangkap tanpa dakwaan, disiksa saat interogasi, disekap di penjara tanpa batas waktu yang jelas, dan dipisahkan dari anak-anak mereka selama bertahun-tahun. Satu-satunya kejahatan mereka adalah menjadi anggota organisasi politik yang sepenuhnya legal dan pro- Sukarno sampai 1965. Tidak ada alasan kiranya yang dapat membenarkan kekerasan negara seperti ini. Jika ada pembaca yang berkesimpulan bahwa tindakan semacam itu dapat dibenarkan, maka pembaca itu dapat pula merobek-robek Konstitusi Indonesia dan semua buku tentang hukum, dan menggantinya dengan satu kalimat saja: di Indonesia, pemerintah dan militer dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Tapi, para pendukung hukum sewenang-wenang semacam ini juga harus memahami bahwa itu artinya mereka pun tidak memiliki perlindungan hukum dan hak-hak sipil juga; mereka juga dapat menjadi korban sewaktu-waktu. Kita tidak perlu terlalu jauh mencari bukti. Sebagian orang yang semula mendukung kekerasan terhadap PKI–termasuk PNI dan NU–akhirnya menjadi korban dari rezim yang sama. Banyak orang mendukung pengabaian hukum seandainya yang menjadi musuh adalah orang lain, tapi jika mereka sendiri yang menjadi korban, maka mereka akan menjerit-jerit meminta hukum ditegakkan.

Rezim Soeharto sudah membangun bentuk pemerintahan yang patriarkal dan militeristik. Dalam era

reformasi ini–jika masih ada yang tersisa darinya–kita harus mencoba mengubahnya. Kita dapat, misalnya, mempersoalkan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 yang ‘mengembalikan’ perempuan pada tempatnya, yaitu hanya berkisar pada wilayah ‘kerumahtanggaan’ yang dinyatakan oleh Pasal 31 ayat 3: ‘Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.’ Atau menentang pembatasan terhadap organisasi perempuan. Setelah 1965, organisasi perempuan yang masih bertahan hanyalah organisasi keagamaan dan organisasi ‘isteri-isteri.’ Usaha-usaha pembungkaman terus dilakukan dengan memberi stigma kepada perempuan yang berjuang di wilayah politik sebagai perempuan-perempuan liar dan jahat, seperti anggota Gerwani. Bagaimanapun, sejumlah cita-cita Gerwani dan organisasi perempuan lainnya sebelum 1965 masih absah sampai saat ini; perempuan masih memerlukan undang-undang perkawinan yang lebih adil; perempuan di tempat kerja berhak atas upah yang sama seperti pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang sama; dan, perempuan memerlukan kebebasan bergerak, baik dari suami maupun negara, agar dapat aktif secara politik di luar rumah tangga. Perempuan yang berjuang saat ini harus merenung sesaat tentang bagaimana rezim Soeharto memukul mundur perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia dan secara brutal menjadikan perempuan sebagai tumbal untuk langgengnya nilai-nilai yang menindas kemanusiaan kita.

Daftar Wawancara

1. Ibu Andhika, Blitar, 26 Juli 2000 and 8 Desember 2000
2. Ibu Anita, Jakarta, 15 Juni 2000
3. Ibu Jermini, Denpasar, 17 Agustus 2000
4. Ibu Marni, Ambarawa, 28 Juli 2000
5. Ibu Murni, Klaten, 24 Juli 2000
6. Ibu Ramdinah, Jakarta, 2 Juni 2000
7. Ibu Riani, Solo, 20 Juli 2000
8. Ibu Rukmini, Jakarta, 4 Juni 2000
9. Ibu Sumiati, Jakarta, 11 Juni 2000
10. Ibu Sunarti, Solo, 19 Juli 2000

---

[1] Saskia Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), h. 303. Dalam bab 8 dan 9 Saskia menguraikan secara rinci hubungan antara Gerwani dan PKI.
[2] Wieringa, *Penghancuran*, h. 353-354.
[3] Wieringa, *Penghancuran*, h. 329
[4] Wieringa, *Penghancuran*, h. 341.
[5] *Harian Angkatan Bersenjata*, 11 Oktober 1965
[6] *Harian Angkatan Bersenjata*, 5 November 1965
[7] Benedict Anderson, 'How did the Generals Die?' *Indonesia* 43 (April 1987).
[8] Budi Setiyono dan Bonnie Triyana, ed., *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara* (Semarang: Mesiass, 2003), dua jilid.
[9] Wieringa, *Penghancuran*, h. 506-508.

‘RIUNGAN’ DAN TEGAR HATI: BEKAL BERTAHAR DI TENGAH KEGILAAN

Aquino W. Hayunta dan John Roosa

Ratusan ribu orang yang ditahan selama periode 1965-68, ketika penangkapan semakin gencar dilakukan, umumnya menghadapi kejutan psikologis saat mereka disekap di rumah tahanan atau penjara. Hampir semua tapol bercerita tentang penyekapan di sel kecil yang dihuni lusinan tapol lain; mereka hanya mendapat jatah makanan begitu sedikit sehingga banyak dari mereka kekurangan gizi dan kelaparan, dan juga tentang siksaan yang mereka alami selama proses interogasi. Kondisi fisik tempat-tempat penahanan itu memang mengerikan. Penjara-penjara seperti Salemba di Jakarta, Kebonwaru di Bandung, dan Kalisosok di Surabaya, seperti neraka di bumi. Para tahanan yang kadang tinggal tulang berbalut kulit, terus-menerus menderita penyakit dan masih harus mengalami pukulan dan sengatan listrik dari para petugas pemeriksa. Di tengah malam, para tahanan dibangunkan oleh sipir penjara yang datang ke sel-sel untuk menjemput sejumlah tahanan keluar. Mereka dibawa dengan truk ke

tempat-tempat sepi untuk dieksekusi dan kemudian dilemparkan ke dalam kuburan massal tak bertanda.

Coba bayangkan, apa reaksi Anda seandainya tiba-tiba dibawa paksa oleh aparat keamanan dan mengalami mimpi buruk semacam itu? Apakah Anda dapat bertahan dari siksaan badan dan derita jiwa semacam itu? Apakah Anda bisa tetap berpikiran waras? Kami meminta Anda membayangkan diri sebagai tapol justru karena rezim Soeharto melatih kita untuk tidak mengidentifikasi diri dengan mereka. Kita dilatih untuk menganggap mereka sebagai 'PKI' saja. Karena yang kita ketahui tentang 'PKI' itu hanya sebatas bahwa mereka adalah setan, maka penderitaan apa pun yang mereka alami bisa kita benarkan. Menjadi orang Indonesia yang baik di bawah rezim Soeharto berarti bahwa kita harus menganggap tapol sebagai spesies manusia yang berbeda, semacam makhluk setengah manusia yang tidak punya kaitan apa pun dengan kita. Kita membangun tembok yang memisahkan kita dari penderitaan mengerikan yang mereka alami. Kita bukan hanya tidak tahu apa yang mereka alami, tapi juga tidak mau tahu.

Untuk memahami apa yang sesungguhnya dialami para tapol dan cara mereka bertahan dalam situasi itu, kami memilih cerita dari tiga orang tapol. Cerita-cerita ini menggambarkan perjuangan para tapol untuk bertahan waras di tengah kegilaan dan bertahan sebagai manusia di tengah perlakuan yang tidak manusia. Dalam wawancara dengan kami, ketiga orang ini tidak hanya

mengungkapkan pengalaman mereka tapi juga menawarkan analisis tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh semua tapol.

‘Itu yang namanya mental memainkan peranan besar’

Tan Swie Ling (nama sebenarnya) ditangkap Desember 1966. Usianya saat itu sekitar 27 tahun. Ia adalah anggota sayap pemuda Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), sebuah organisasi peranakan Tionghoa yang mendukung Presiden Sukarno. Saat mencari Sudisman, salah seorang pemimpin PKI, Angkatan Darat menggerebek rumahnya, merantai dirinya, lalu membawanya pergi ke Markas Kodim Jakarta Pusat. Sesampai di sana, ia ditanyai bermacam hal sambil terus menerima siksaan. Saat berbicara tentang penyiksaan yang dialami, ia berbicara sebagai orang ketiga, seolah penyiksaan itu dialami oleh orang lain, dan dengan penuh kebimbangan, seolah peristiwa itu tidak benar-benar terjadi:

Misalnya ini, kita pukul pakai penggaris itu kan kita akan timbul. Nah bagaimana kalau itu dilakukannya dengan cambuk? Yang disabetkan dengan sekuat tenaga tentu ini gede banget, segede pisang lah. Nah bagaimana kalau cambuknya itu dari ekor ikan pari? Ekor ikan pari itu cambuknya besar, dan dia kan berduri dan berpasir,

ampelas gitu, maka yang namanya kulit daging begitu kena cambuk itu dia melembung kayak pisang, sekaligus pecah kayak kue mangkok. Bagaimana kalau yang pertama kali itu orang masih bisa bertahan tetapi untuk ronde berikutnya tempat yang itu kena pukulan lagi? Tempat yang bengkak dan luka itu kena pukulan lagi. Nah itu di situ boleh disimpulkan kayak apa rasa sakitnya.

Luka-luka dari cambuk ekor ikan pari–bentuk siksaan yang sering kali disebut oleh para tapol–berulangkali menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan: 'bengkak dan luka itu sekujur tubuh.' Militer tentu saja tidak menyediakan perawatan medis, bahkan pembalut pun tidak. Darah dari luka-lukanya dibiarkan membasahi bajunya:

Ketika pakaian itu dipakai kemudian–nggak usah lama lah satu jam aja–pakaian itu sudah lengket sama tubuh kita karena darah, ya kan? Bagaimana kalau diulang? Buka pakaian saja sudah tersiksa bukan main, apalagi diulang. Saya kan buka baju pelan-pelan. Itu nggak bisa, akhirnya saya mandi dengan baju-bajunya itu. Setelah baju basah baru bisa dibuka.

Untuk memulihkan tubuhnya setelah pemukulan, ia mempraktekkan pernapasan yoga dari India: 'Tapi nyatanya memang saya tidak pernah melakukan pengobatan apa pun kecuali itu, melakukan pernapasan.' Hal yang membuatnya tetap waras adalah pengetahuan bahwa semua tapol mengalami siksaan semacam itu. Ia tahu bahwa apa yang dialaminya bukanlah sesuatu yang

unik. Ia memandang penyiksaan sebagai nasib yang tak terhindarkan bagi setiap tapol. Sikap pasrah ini membuatnya tidak tergoda untuk menghindari rasa sakit dengan bekerja sama dengan militer untuk mengkhianati kawan-kawannya.

Jadi ketika saya disiksa itu, itu bukan sesuatu yang bisa dihindari. Itu memang bagian yang tidak bisa dihindari. Jadi dengan begitu justru kesadaran ini yang menyelamatkan saya. Karena saya sadar bahwa itu bagian yang tidak bisa dihindari harus saya jalani, itu yang menghindarkan saya dari perilaku yang tidak semestinya.

Walau tidak memberikan informasi apa pun kepada militer, ia mengaku tidak tahan lagi dalam ronde kedua penyiksaan, ketika luka-luka yang masih segar dikorek lagi. ‘Jadi, saat itulah saya merasa tidak tahan.’ Dia merasa akan mati. ‘Nah, tapi justru dalam kondisi saya sudah mulai putus asa ternyata saya diambil, dipindah.’ Ia dibawa ke Markas Hankam dan kembali diinterogasi dan dipukuli, walau kali ini tidak sehebat sebelumnya. Lalu, suatu malam setelah melalui interogasi ia dipindah ke RTM (Rumah Tahanan Militer) Budi Utomo. Para tahanan RTM ini umumnya menunggu dihadapkan ke Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) sebagai terdakwa maupun saksi. Karena alasan itu, kondisi penjara, khususnya menyangkut makanan, masih lebih baik. Militer tidak mau para tahanan tampil dengan kondisi kurus, sakit, dan penuh luka. Tubuh Tan lumayan pulih saat ditahan di sana.

Ia tampil sebagai saksi dalam sidang Sudisman (salah satu pimpinan PKI) yang ditangkap di rumahnya. Ia mengenang suasana sidang Mahmilub itu ‘menyeramkan’. Banyak tapol yang gelisah: jika berkata benar, mereka khawatir akan disiksa habis-habisan oleh militer sesudah persidangan; tapi jika berbohong seperti yang diinginkan militer, maka mereka terpaksa mengkhianati kawan-kawan sendiri. Semua tapol memberi kesaksian dalam suasana teror; selama interogasi mereka disiksa dan harus bersiap disiksa lagi setelah persidangan seandainya tidak memberi kesaksian sesuai yang digariskan oleh militer.

Beberapa saat sebelum persidangan dimulai, seorang perwira militer mengancam Tan yang sedang duduk di ruang tunggu. Namun, walau menghadapi ancaman begitu rupa, Tan tetap mencoba tenang. Semua kegelisahannya sirna:

Ketika sebelum diajukan dihadapkan ke sidang itu saya sebelumnya sudah dipermainkan oleh panitera, pertama di ruang tunggu panitera saya ditanya, nama segala macam sudah selesai, bangsa sudah saya jelaskan. Dia tanya lagi warga negara. Saya sudah jawab warga negara Indonesia, dia masih tanya lagi sejak kapan jadi warganegara Indonesia. Karena saya sudah yakin bahwa saya dipermainkan, saya ingin mengakhiri permainan itu, maka saya jawab, ‘Sejak lahir.’ Suatu hal yang menyakitkan jawaban itu bagi dia. Karena itu mukanya merah terus tapi stop terus nggak berlanjut. Nah dia balas dendam.

Pada saat saya menjalani upacara sumpah. Saya disumpah itu di depan. Ketika saya dibawa masuk ke satu ruangan, saya tiba-tiba tercenung. Karena saya berhadapan di sebuah ruang kosong ada meja, di meja itu ada gambar, gambarnya Kuan Kong. Tiba-tiba saja seluruh ingatan kembali kepada masa kanak-kanak saya. Ketika saya kanak-kanak itu setiap tahun, tentu kelenteng itu ada tanggapan wayang Potehi. Wayang Potehi itu dibuatkan panggung. Panggung untuk wayang itu di sampingnya altar Kuan Kong. Jadi sejak kecil saya itu akrab dengan gambar itu. Setelah sekian lama tiba-tiba saya jampa lagi dengan gambar itu dalam kondisi sebagai pesakitan. Semua, seluruh ingatan itu kembali pada masa kanak-kanak. Saya seperti melupakan segala sesuatu.

Sampai akhirnya dibentak, suruh sembahyang. Saya tetap diam, akhirnya sama panitera itu dinyalakan dupa disodorkan supaya sembahyang. Saya sembahyang. Nah saya sembahyang itu dibentak lagi suruh berlutut. Saya nggak mau berlutut. Akhirnya diulangi lagi sambil ketuk-ketuk ujung sepatunya ke lantai supaya berlutut. Saat itu saya mengok sama dia saya bilang, ‘Ini acara apa Bapak?’

‘Sumpah!’

‘Yang disumpah siapa?’

‘Kamu!’

‘Menurut kepercayaan siapa?’

‘Kamu!’

‘Nah ijinkanlah kalau ini kepercayaan saya saya melakukan menurut cara saya.’

‘Tapi aturannya berlutut!’

‘Siapa yang membuat peraturan?’ Saya sembahyang sambil berdiri. Dalam sembahyang itu seolah-olah saya ngomong: ‘Kuan Kong, kalau engkau benar ada yang memang selama ini aku puja–karena Kuan Kong itu gambaran orang adil, orang berbudi–tolonglah bantu saya menghadapi pemeriksaan di pengadilan.’ Itu seingat saya itulah, yang saya ucapkan dalam hati. Nggak tahu bagaimana hubungannya ceritanya nggak tahu saya. Ketika saya dipanggil itu enteng, tenang saya. Saya santai sampai ditarik, diseret di tangga itu.

Saat duduk menunggu di bangku saksi, ia menghadapi panel hakim dan pengunjung sidang dengan sikap teguh. Ia mengejutkan mereka dengan memberi pernyataan yang tidak banyak dilakukan tapol lain: ia menyatakan telah disiksa dan bahwa berita acara pemeriksaan yang dibuat selama interogasi itu tidak benar.

Terjadilah tanya jawab lama sampai akhirnya memasuki suatu pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan dasar itu saya disuruh menerangkan tentang pembangunan kembali PKI. Ketika itu saya bilang, saya tidak mengerti pertanyaan Bapak Hakim. Mohon dijelaskan pertanyaannya bagaimana.

‘Terangkan pembangunan kembali PKI.’

Saya bilang saya tidak mengerti. Terus saya disuruh maju ke meja hakim. Terus saya disuruh lihat.

‘Ini tanda tangan siapa?’

‘Tanda tangan saya.’

‘Duduk kembali. Nah sekarang terangkan tentang pembangunan kembali PKI.’

Saya bilang: ‘Saya tidak mengerti pertanyaan Bapak.’ Akhirnya suruh maju lagi.

‘Coba lihat lagi yang betul, ini tanda tangan siapa?’

‘Tanda tangan saya.’

‘Betul?’

‘Betul.’

‘Duduk!’ Setelah duduk mulai nadanya tinggi.

‘Sekarang jelaskan mulai pembangunan kembali PKI!’

‘Sekali lagi saya mohon Bapak tolong jelaskan maksud pertanyaan Bapak saya tidak mengerti.’

‘Kamu menyatakan kamu tidak tahu lalu bagaimana ini bisa di atas tanda tangan kamu!’

‘Oh, itu, mengenai masalah tanda tangan, itu bisa saja.’

‘Artinya bagaimana? Kamu menandatangani?’

‘Artinya kan karena saya masih pingin hidup. Saya kan membubuhkan tanda tangan tidak ada maksud apa-apa, kecuali saya masih kepingin hidup.’

‘Apa kamu kepingin hidup! Dengan kata lain kamu mengatakan kamu pada waktu itu kamu terancam mati?’

‘Betul. Saya terancam mati.’

‘Kenapa? Disiksa? !’

‘Betul. Saya disiksa.’

Terus sidang itu sepi semua. Terus si hakim juga tidak nyangka bahwa akan mendapat jawaban begitu. Dia tergagap sehingga akhirnya dia bilang setelah hilang gagapnya: ‘Hai gimana Saudara [Oditur] begitu ini?’

Si oditur juga nggak bisa langsung tanya saya, diam lama. Akhirnya dia tanya: ‘Apa betul Saudara disiksa?’

‘Betul.’

‘Di mana Saudara disiksa?’

‘Di setiap tempat saya diperiksa.’

‘Termasuk di Tim Pemeriksa Pusat?

‘Iya.’

Akhirnya terdiam oditur itu diambil oper lagi sama hakimnya. Hakimnya tanya: ‘Jadi sekarang bagaimana maunya Saudara?’

‘Saya ini orang perantaian [pesakitan, tawanan]. Saya datang ke sini dengan penuh kesediaan untuk diperiksa.’

‘Lalu bagaimana dengan berita acara Saudara?’

‘Itu bukan berita acara saya.’

‘Lalu?’

‘Saya mohon dibatalkan.’

Salah seorang pengunjung sidang hari itu adalah Benedict Anderson dari Cornell University. Dalam sebuah wawancara di tahun 1996, Anderson mengatakan:

Waktu pengadilan Sudisman saya masih ingat banyak saksi dari PKI, dari atas sampai bawah. Banyak sekali dari golongan atas yang sebenarnya memalukan sekali kesaksiannya. Mereka jelas-jelas mau mencoba mencuci tangan, melarikan diri dari tanggung-jawab sebagai atasan. Tapi ada dua orang yang sikapnya bagus. Yang pertama Sri Ambar dari Gerwani. Dan yang paling mengesankan itu seorang anak Cina yang masih muda. Saya tidak ingat namanya... Anak muda itu orangnya

polos, berani, sopan, dan tidak pernah mau bertekuk lutut terhadap pengadilan. Tentu dia bukan orang yang penting, bukan orang yang dikenal namanya. Tetapi sikapnya hebat.[1]

'Anak Cina yang masih muda' itu adalah Tan.

Karena keberaniannya mengungkap penyiksaan yang dialaminya, Tan bersiap-siap menghadapi penyiksaan hebat setelah persidangan. Saat keluar dari ruang sidang, Tan dimasukkan ke sebuah panser dan dibawa kembali ke RTM. Ia mendengar cerita tentang saksi lain yang dipukuli segera setelah masuk ke panser, walaupun saksi itu bersikap kooperatif dengan jaksa. Karena itu ia yakin akan mengalami siksaan serupa.

Jadi saya sudah ngitung bahwa nasib toh juga akan jatuh pada saya, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ketika saya sudah selesai disuruh dibawa keluar saya dibawa ke panser. Sampai di panser kan saya sudah bagaimanapun, namanya jantung itu kan berdebar, karena membayangkan sesuatu yang nggak enak. Setelah sampai di situ, ternyata tentara itu ngacungkan tangan nyalami, 'Selamat ya Pak, semoga Pak Tan cepat pulang, saya doakan.' Itu yang saya alami.

Ia heran dan sangat lega, saat diperlakukan dengan baik oleh militer pengawalnya.

Tan ditahan di RTM selama dua tahun lebih dan kemudian ditahan di Markas Kodam Jaya (saat itu di Lapangan Banteng) selama setahun. Akhirnya ia ditahan di Rumah Tahanan Salemba. Ia tidak pernah didakwa

melakukan kejahatan dan tidak pernah dihadapkan ke pengadilan sebagai terdakwa. Penahanan terhadap dirinya, seperti juga penahanan banyak tapol lainnya, semata-mata karena militer menghendaki demikian dan karena itu tidak punya dasar hukum apa pun.

Dalam waktu kurang dari sebulan setelah tinggal di Salemba, Tan sakit keras. Seluruh tubuhnya lumpuh dan ia berpikir ajalnya sudah dekat, apalagi karena di penjara itu tidak ada pelayanan medis. Saat menceritakan keadaan sakitnya, ia menekankan pentingnya faktor psikologis dalam proses penyembuhan dan juga bantuan dari kawan-kawannya:

Saya lumpuh. Jadi ketika saya dibawa ke Salemba itu memang saya sudah mulai sakit. Itu jari saya ini mulanya di sini bengkak. Kemudian lama kirak-kira dua minggu bengkaknya hilang, pindah di sini, terus pindah di sini. Reda ganti yang kanan. Sama. Kanan reda tiba-tiba separo badan semua sendis-sendinya bengkak. Terus yang terakhir kena punggung. Begitu punggung kena nggak bisa bangun sudah dibawa ke klinik, kemudian yang namanya klinik itu sebetulnya kalau terkenalnya kan ‘halte perjalanan menuju akhirat.’ Semua orang yang masuk ke klinik itu mesti tidak kembali lagi. Itu tahun, tahun 68, 69. Saya dibawa ke situ, kemudian ya nggak ada obat. Nggak ada obat ya di klinik, telentang aja diletakkan di atas bale-bale kayu.

Di situlah betul-betul barangkali kalau bisa menulis, bisa tulis begitulah salah satu bagian dari neraka. Kita

dikerumuti ribuan kepinding tanpa kita punya daya untuk mengusir atau menghindar. Karena kita nggak mampu bergerak. Itu yang namanya kayu itu kan penuh kepinding. Sementara nggak bisa bergerak, cuma bisa mengok-nengok sama orang merintih-rintih. Nah dalam keadaan begitu barangkali–ini cerita ya apa ada benarnya apa tidak saya tidak tahu–orang dalam keadaan sakit, orang dalam keadaan krisis itu yang namanya mental, yang namanya segala itu, memainkan peranan besar. Itu yang saya alami pada saat begitu akhirnya saya suatu saat seperti berdalog kepada dirinya sendiri. Apakah sudah, rela mati di sini? Nah saat itu sepertinya saya menjawab diri sendiri, 'Tidak.' Saya belum ikhlas untuk mati di sini. Saya merasa masih harus hidup. Nah mungkin pertarungan batin yang semacam ini, itu berpengaruh besar.

Nah yang saya alami pada waktu itu setelah saya seolah-olah menyatakan atau berjanji kepada diri sendiri saya mau hidup, itu kemudian ternyata begitu besar sumbangannya karena begitu saya dapat obat. Saya dibantu oleh salah seorang teman yang namanya Tjoo Tik Tjun yang sekarang sudah mati, sama dia saya diberi sebotol obat. Sebotol obat itu isinya 100 butir tablet hitam. Itu obat-obat tablet Tionghoa itu ya. Dengan makan obat itu dan didukung oleh mental semacam itu jadi saya mulai bisa bergerak. Mulai bisa bergerak, saya mulai bisa miring, kemudian saya bisa mulai duduk, kemudian saya bisa mulai belajar berdiri, kemudian perahan-lahan saya

mulai belajar berjalan walaupun keseluruhan membutuhkan waktu 6-7 bulan. Misalnya suatu contoh, untuk mengangkat tangan ini butuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Jadi dengan ini saya ingin menegaskan dalam satu kondisi kritis itu yang namanya mental itu punya peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia.

Dan di samping itu, kelau di dalam poliklinik itu ada bantuan lain, bantuan itu bukan dari penjara, dari teman-teman sendiri. Teman-teman itulah yang merawat. Teman-teman itulah yang pagi dan sore, ya seperti layaknya perawatlah, membersihkan badan segala macam itu. Itu adalah teman-teman sendiri. Jadi yang namanya rumah sakit di penjara itu yang mengurusi adalah teman-teman sendiri.

Saat Tan mulai pulih dari lumpuh, kondisi di penjara Salemba pun pelan-pelan membaik. Penjara yang penuh sesak antara 1965 sampai 1969, mulai lebih longgar karena sebagian tahanan dilepas atau dikirim ke Pulau Buru.

Sampai dengan akhir tahun 69, kehidupan paling luar biasa, atau kehidupan yang paling berat untuk para tahanan, karena hebat pada tahun-tahun itulah para tahanan banyak yang mati, banyak tahanan yang mati, yang penyebab utamanya adalah kurang makan. Tapi kemudian tahun berikutnya mulai tahun 70an di samping mulai ada perbaikan, makanan mulai agak baik gitu ya,

seperti bulgur [sejenis gandum] tidak muncul lagi, jagung tidak muncul lagi...

Jatah makanan, bagaimanapun, tetap tidak mencukupi, bahkan sampai 1970an. Jatah itu hanya berupa nasi (yang masih penuh gabah), bayam rebus (yang ditanam oleh para tapol sendiri), dan secuil tempe. Semua tapol di Salemba berpendapat sama bahwa seseorang tentu akan mati karena kekurangan gizi jika mencoba bertahan dengan jatah makanan dari penjara.

Bayam itu cuma direbus digarami dikasih daun salam untuk penyedap, itu seperti itu belasan tahun. Nah dengan sekali waktu ada tempe kira-kira irisan dua senti persegi. Nah, semacam itu siapa yang bisa tahan hidup dengan itu? Karena itu akhirnya yang menghidupi tahanan itu dalam jangka lama adalah para keluarga para tahanan itu sendiri. Sebetulnya yang bertanggung jawab itu pihak yang memenjarakan kami, tapi kenyataannya tidak ada tahanan yang dapat bertahan hidup tanpa dihidupi oleh para keluarga tahanan itu sendiri.

Rezim Soeharto terus menahan puluhan ribu tapol sampai 1970an, tapi tidak menyediakan dana cukup untuk merawat mereka. Uang yang dialokasikan untuk para tahanan sering kali diambil oleh para pejabat penjara. Pemerintah dengan begitu turut menghukum keluarga para tapol dengan mengharuskan mereka menyediakan semua keperluan keluarga mereka yang ditahan. Masalahnya, tidak semua tapol masih punya keluarga yang bisa memberi makanan kepada mereka. Banyak

keluarga yang tinggal jauh dari penjara dan tidak punya waktu atau uang untuk berkunjung. Beberapa dari mereka terlalu miskin untuk membeli jatah makanan tambahan.

Tan sendiri masih punya keluarga, tapi ia tidak mau memberitahu mereka bahwa dirinya menjadi tapol.

Orang tua, family

Satu-satunya cara bagi Tan untuk mendapat makanan cukup selama di penjara adalah dengan membantu tapol lain yang menerima jatah dari keluarga mereka. Para tapol ini membentuk kelompok-kelompok untuk membagi makanan yang datang dari luar.

Nah muncul solidaritas, solidaritas itu tentunya ya riil, kebutuhan yang paling pokok di dalam penjara yaitu cara makan. Siapa yang terima kiriman makanan dari keluarganya dibagi dimakan bersama. Caranya para tahanan ini dikelompok. Kelompok ini namanya riungan. Riungan ini bisa berisi 6 bisa sampai berisi sampai 9 gitu ya. Nah di situ nanti terdiri dari orang-orang seperti saya yang tidak pernah dikirim dicampur dengan orang yang dikirim, nah di situ makanan biasanya yang dikirim satu memikul dua atau tiga yang tidak dikirim. Sementara kekuatan ekonomi keluarga makin lama bukannya makin tangguh tapi makin lama makin tipis. Tapi sementara pertumbuhan solidaritas sesama tahanan makin tinggi. Jadi bentuknya misalnya dari semula itu makanan yang khusus untuk yang dikirim dan sebagainya, sampai akhirnya mereka rela. Dengan contoh misalnya kalau telur itu cuma satu, telur itu satu di situ jumlah kelompoknya

enam ya dibelahlah jadi enam. Jadi keikhlasan yang punya kiriman itu begitu nyata solidaritasnya demi supaya teman-teman yang lainnya yang tidak dikirim juga sama-sama hidup, dia rela makannya itu dibagi. Nah ini adalah satu rasa kemanusiaan yang luar biasa, yang tidak mungkin ya kita temukan di dalam kondisi lain dan mungkin pada kelompok lain.

Tan tetap merasa berterima kasih kepada semua kawan tapolnya dan keluarga mereka yang membuatnya tetap bisa bertahan hidup selama mendekam di penjara Salemba.

Bagaimana saya yang tidak dikirim oleh keluarga bisa hidup belasan tahun di dalam penjara dan masih bisa sempat keluar dan relatif masih normal? Itu semua adalah jasa dari para keluarga. Inilah yang saya pernah nyatakan setelah beberapa tahun yang lalu saya diundang silahturahmi lebaran, saya merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih. Sebab tanpa bantuan keluarga mereka nggak mungkin saya bisa bertahan hidup.

Perjuangan untuk bertahan hidup di penjara bukan sekadar masalah kesehatan fisik. Seperti yang ditekankan Tan dalam beberapa wawancaranya dengan kami, perjuangan itu juga berarti usaha agar tetap waras dan bersemangat hidup. Ia menyampaikan cerita seorang tapol, mayor Angkatan Udara, untuk melukiskan akibat dari hilangnya keseimbangan jiwa bagi kesehatan fisik.

Tentunya seorang mayor lapangan itu tegap, tangkas, memerintah. Tapi setelah dia divonis mati, kemudian

terjadi pertarungan batin yang dahsyat pada dirinya dan sejak itu segala ketangkasannya, segala ketegapannya sebagai seorang militer, itu hilang. Bisa saya gambarkan jalannya, sudah mulai membungkuk kayak kakek-kakek 90 tahun padahal dia umurnya paling 30an tahun pada waktu itu, terus matanya kayak orang kena penyakit cacingan, kriyep-kriyep orang Jawa bilang, terus rambutnya botak, terus jari-jarinya gemetar, orang Jawa bilang buyutan.

Tak seorang tapol pun kiranya yang menduga akan ditahan begitu lama, apalagi dalam situasi yang begitu memilukan. Bagi mereka, mimpi buruk itu sangat sulit dihadapi.

Sebagian dari mereka mencoba bertahan dengan tampil tegar untuk menyembunyikan rasa takut yang lekat dalam dirinya.

Orang-orang ini tidak pernah mimpi bahwa pada suatu hari akan dilempar ke penjara. Karena itu dia tidak siap. Tapi dia mengalami. Jadi, wajar, kelau, ketika dia melalui proses itu ada kelemahan-kelemahan tertentu, itu sangat manusia, sangat wajar. Tapi ada orang di dalam memahami kelemahan diri ini tidak sehat. Dia memerlukan persembunyian. Persembunyian ini ngambil bentuk, dia kaya, tukang copet yang mencopet, dia teriak ‘copet...copet...copet,’ gitu ya. Umumnya mereka berlindung di dalam kelompok ini, ngomongnya sok besar, sok revolusioner, tapi itu adalah cuma alibi, pelarian.

Para tapol ini tidak pernah tahu kapan sesungguhnya mereka akan dilepas. Mereka tidak pernah dijatuhi

hukuman oleh pengadilan. Mereka terus ditahan tanpa batas waktu jelas oleh militer. Karena itu, sungguh sulit bagi mereka untuk berharap tentang masa depan. Tan terus meyakinkan dirinya, bahwa ia masih muda dan jika baik-baik mengurus diri, maka akan punya sisa hidup cukup di luar penjara. Ia dan beberapa tapol lainnya hanya bisa berharap bahwa rezim Soeharto akan melemah atau jatuh saat mereka masih hidup.

Mengapa saya ditahan? Ya karena ada perubahan kondisi dan situasi politik. Nah, karena itu sejak semua saya ditahan, saya menyadari saya bisa bebas lagi itu tergantung, kelau pada perubahan, kondisi dan situasi politik. Selama tidak terjadi perubahan, kondisi dan situasi politik nggak ada, tahanan politik bisa bebas.

Perubahan politik semacam itu terjadi pada 1977, setelah Jimmy Carter terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Soeharto adalah diktator yang sangat bergantung pada bantuan ekonomi, investasi, bantuan militer, dan persetujuan diplomatik Amerika Serikat. Pemerintahan Carter, bekerja sama dengan beberapa negara lain, seperti negara Eropa Barat, menekan Soeharto agar memperbaiki kondisi para tahanan dan mulai melepas sebagian dari mereka. Pejabat-pejabat asing mulai melakukan kunjungan ke penjara-penjara. Kondisi di Salemba pun mulai membaik karena adanya tekanan asing ini.

Sejak Presiden Carter terpilih itu pengaruhnya terasa sekali. Karena begitu Jimmy Carter menang, kemudian berkunjnglah Palang Merah Internasional. Palang Merah

Internasional berkunjng dan itu melakukan penelitian segala macam, di samping itu, tadi membagikan alat tidur, alat makan dan sebagainya. Kemudian periksa ruang, diukur segala macam itu. Nah pada saat itu mulai longgar. Terus pada saat longgar itu orang mulai boleh membaca. Membaca buku-buku ringan, buku-buku pengetahuan. Kalau tadinya kan cuma Al Quran dan Alkitab, bacaan lain nggak ada. Kemudian televisi ada. Televisi itu digilir orang menonton televisi. Yang menonton televisi itu misalnya di dalam situs ada 16 barak ya. Ya kita kena bagiannya. Begitulah setiap kali 16 hari kita menonton. Kemudian, kita punya kelembuasaan melakukan kegiatan. Kegiatan itu misalnya kita bikin kerajinan. Kerajinan itu ada tukang kayu, ada pipa rokok dari batok kelapa.

terus kerajinan bikin alat-alat musik seperti bikin gitar dan sebagainya. Itu berawal. Sejak itu, kondisi mulai berubah itu, dan pada saat itu pun kita mulai longgar bisa diperbolehkan memelihara hewan peliharaan, paling tinggi ayam dan kelinci.

Saat Tan akhirnya dibebaskan pada Desember 1979, bersama kebanyakan tapol lainnya, ia merasa beruntung. Bagaimanapun, sulit baginya untuk merasa gembira karena 13 tahun hidupnya dihabiskan sia-sia di penjara. Ia bukan lagi orang yang sama. Ia merasa terluka dan hancur secara fisik maupun mental, walau jika dibandingkan tapol yang lain ia tergolong ‘relatif normal’.

Yang ditahan peristiwa 65 itu yang bisa selamat sampai akhirnya bisa pulang, termasuk diri saya, masih bisa

keluar dari penjara, itu termasuk orang yang betul-betul beruntung. Karena apa? Karena mestinya menurut ketentuan nggak ada tahanan itu bisa keluar hidup. Nah, kalau toh bisa keluar hidup, tentu dia sudah tidak bisa lagi diharapkan sebagai normal. Segala sesuatnya, bayangin, yang namanya orang di penjara oleh peristiwa 65 itu, itu ibarat orang dilontarkan ke dalam ruang hampa, ini kita vakum selama masa yang panjang. Karena kita tidak bisa begini, tidak bisa baca, tidak apa, tidak ada kegiatan apa-apa, sehingga sejak sementara yang namanya otak itu hanya bisa dipertahankan apabila terjadi ada diasah. Jadi kayak pisau itu diasah baru bisa tajam, sementara pisau yang tidak diasah, lama-lama dihinggapi karat, ya tumpul.

Ia harus hidup dengan ingatan akan penderitaan itu–penderitaannya sendiri dan juga orang lain yang dikenalnya dengan baik. Rasa sakit karena siksaan fisik tidak terlalu mengganggu ingatannya, tapi penghinaan rasis antiTionghoa yang menyertainya, melekat sungguh dalam: ‘siksaan yang saya alami sekarang saya sudah lupa rasanya, kecuali penghinaannya.’

Kata-katanya segala macam, misalnya kalau saya diperiksa itu saya tidak selembar benang nempel di tubuh saya. Kalau kita dengan ada aktivis perempuan diperiksa ditelanjangi itu kan karena ada unsur pornonya. Tapi kalau mereka menelanjangi saya itu kan karena Cinanya. Jadi itu yang teringat betul sama saya. Karena apa? Karena dalam penyiksaan itu sendiri juga ada unsur ke-Cina-annya itu tadi. Dia pingin tahu betul Cina atau tidak,

nah terus setiap kali pemeriksaan ditelanjangi butat kemudian dipermalukan yaitu yang saya ingat dan itu salah satu yang akhirnya merupakan satu obsesi untuk mendorong saya berpikir: sebetulnya apa sih urusannya orang-orang ini antiCina ini? Itulah salah satu yang mendorong saya lebih terdorong untuk mengurusi soal-soal yang berkaitan dengan ke-Tionghoa-an ini.

Saat ini, Tan hidup bersama isteri dan anaknya. Ia menganggap kehidupan sekarang yang sederhana dan bagi banyak orang mungkin diterima jadi begitu saja, sebagai mukjizat yang tak terjelaskan.

Itu bukan berlebihan kalau saya selama di dalam penjara itu ya tidak kebayang bahwa suatu ketika saya masih bisa berkeluarga. Suatu ketika ada anak kecil panggil, ‘Papa, Papa,’ itu tidak kebayang. Tapi sekali ini semua saya pikir inilah rupanya yang namanya kehidupan. Kehidupan ternyata terbungkus misteri. Nggak ada orang yang bisa menjelaskan sendiri, nggak ada yang bisa menyimpulkan sendiri. Misalnya satu contoh, saya sudah yakin akan mati dua kali ya. Ketika sakit itu saya sudah yakin sebetulnya walaupun merasa belum rela itu kan subyektif. Tapi obyektifnya kan saya pada waktu itu mati. Kemudian pada saat awal-awal pertama ditangkap itu pun saya sudah merasa mati. Tapi ternyata tidak, ternyata masih bisa keluar dari penjara. Jadi ternyata hidup ini seperti ada rahasia, hidup ini ada rahasia, tidak ditentukan oleh si pelaku hidup itu sendiri.

‘Pertentangan yang hebat di dalam jiwa saya’

Mulyadi seorang Muslim. Ayah dan kakeknya adalah kyai. Baris agama dalam KTP-nya menandakan ia Muslim. Isterinya pun Muslim. Identitas keagamaannya sepertinya sangat jelas. Tapi, status sebagai tapol yang mendekam di penjara selama 14 tahun membuat hubungannya dengan agama yang terlembaga menjadi sangat rumit.

Orang tuanya berasal dari Tegal yang pindah ke Jakarta saat Mulyadi masih kecil. Ia bersekolah di sebuah sekolah Katolik di wilayah Salemba:

Nah di Jakarta lah saya pertama kali tinggal di bilangan Cipinang Cempedak, kemudian pindah ke Karet Belakang, daerah Tanah Abang, dekat Pejompongan sana itu. Terakhir pindah ke daerah Salemba. Nah masa kecil dan remajaku inilah kami alami di Salemba ini. Aku sekolah di SD di daerah kampungku ini, yang namanya SD Rumah Kita... Seratus persen murid-murid yang di sana itu umumnya dari keluarga penduduk kampung di lingkungan situ saja, yang 100 persen memang orang Islam semua. Tapi masyarakat di sana tidak pernah complain, atau keberatan, dan tidak mempersoalkan–sebetulnya Rumah Kita itu sebenarnya singkatan dari Roma Katolik.

Ia tinggal di kampung miskin. Banyak penduduk kampung itu terlibat dalam organisasi sayap kiri. Abangnya aktif dalam Pemuda Rakyat, sementara ibu tirinya ikut Gerwani. Sekretariat ranting PKI setempat ada di sebelum rumahnya. Saat masuk SMA, ia bergabung

dengan IPPI, yang juga condong pada politik nasionalis-kiri. Tentu saja sebagai anak berusia 16 tahun pengetahuannya tentang politik sangat terbatas. Tapi yang penting baginya adalah kegiatan-kegiatan di dalam IPPI sendiri:

Paling-paling kegiatannya kan koor, gerak jalan, olahraga, kompetisi apalah, atletik di sekolah atau bikin majalah dinding di sekolah, jadi seperti itu... Tapi saya sendiri sebenarnya kurang begitu jelas apa sih sebenarnya kiri dan kanan ketika itu. Tidak sampai seperti itu. Artinya bahwa kita masuk IPPI karena kegiatan anak-anak sekolah seperti belajar, jadi tidak politik gitu.

Ia mengingat ada beberapa organisasi lain di kampungnya, seperti Ansor dan Front Pemuda Marhaenis. Tapi seingatnya, tidak ada konflik di antara bermacam organisasi ini. Kaum muda di kampungnya 'rukun-rukun saja.' Konflik biasanya hanya terjadi dengan para crossboys, yang sekarang disebut preman, tapi konflik semacam itu pun tidak pernah menyangkut masalah politik.

Pada 1965, Mulyadi masih kelas dua SMA. Ia hidup biasa sebagai remaja dan tidak tahu bahwa ada krisis politik yang serius. Ia tentu saja tidak terlibat dalam G-30-S dan tidak tahu apa-apa mengenai gerakan itu. Namun, saat gerakan itu berakhir, hidupnya pun ikut jungkir-balik: 'tiba-tiba semua ketenangan kami sekeluarga menjadi berantakan setelah meletus peristiwa G-30-S.'

Nah waktu itu saya melihat rumahku itu diserang oleh massa. Kemudian ayah saya temukan di kantor polisi, minta perlindungan, dan saya sendiri nampaknya dicari. Semua anak laki di situ dicari. Kalau kakak saya, nampaknya tidak tahu saya dia di mana saat itu. Saya sendirian.

Ia kehilangan kontak dengan keluarganya dan harus mencari jalan sendiri agar bisa bertahan hidup. Ia pergi ke Tegal untuk tinggal bersama kakek-nenek dan pamannya.

Karena saya tidak punya rumah di Jakarta lagi, saya kembali ke kampung. Nah di kampung ternyata, ya orang, terutama saudara-saudara agak dingin menyambut saya kan gitu. Bahkan rasa-rasanya kalau bisa menolak ya ditolak. Aku tinggal di rumah nenek. Nenek dari bapak saya yang sudah tidak ada lagi, tinggal saudara tinggal di sana... Umumnya orang dari Jakarta ketika itu sangat menakutkan kan, gitu. Karena konotasinya barangkali setiap orang dari Jakarta itu mesti terlibat, gitu kan, pelarian, atau apa. Mungkin dituduh membunuh jendral, main di Lubang Buaya atau apa-apa itu, seperti apa yang kita baca di surat-surat kabar. Jadi memang situasinya sangat tidak anu sekali, sangat mengerikanlah untuk orang seperti saya itu.

Karena pengaruh propaganda militer dan histeria antikomunis, keluarganya pun tidak mempercayainya. Salah seorang pamannya, yang juga menjadi pejabat desa, memutuskan bahwa militer dan polisi harus menentukan nasibnya, apakah ia terlibat PKI atau tidak.

Sampai pada suatu hari gitu kan, saya dibawa oleh oom saya sendiri ke kantor polisi dan kemudian dijebloskan ke dalam, apa namanya, kamp. Di sana itu kamp itu isinya mungkin seribu atau berapa gitu, saking padat sekali. Yaitu bekas sekolah Tionghoa, kami ditampung di sana-sana.... terus itu biasanya orang-orang itu dipanggil baik di pagi hari, malam hari, siang, karena begitu banyak harus melakukan screening [pemeriksaan]. Nah di-screening inilah saya mengatakan bahwa saya anggota IPPI. Kemudian diterima, tetapi setelah beberapa saat saya dikembalikan ke kamp lagi, dipindahkan ke kamp yang satu ke kamp yang lain, lalu saya dijebloskan ke dalam penjara. Nah di penjara itu saya hampir empat tahunlah.

Seorang remaja berusia delapan belas tahun harus menghadapi polisi, mengakui keanggotaannya dalam sebuah organisasi yang sampai Oktober 1965 adalah organisasi resmi, legal, patriotik, dan pro-pemerintah, dan akhirnya disekap di penjara. Ia tidak pernah didakwa melakukan kejahatan dan pemeriksaan pun tidak menunjukkan indikasi ia pernah berbuat jahat. Satu-satunya alasan yang membuatnya ditahan adalah hubungannya dengan sebuah organisasi pelajar yang punya hubungan longgar dengan PKI. Menjadi anggota sebuah organisasi adalah ‘kejahatannya’, sekalipun pada usia 18 tahun ia tentu tidak punya pengertian politik yang dalam.

Kehidupan di penjara antara 1965 sampai 1969, seperti kita lihat dalam uraian Tan di atas, penuh ketidakpastian. Banyak tahanan yang meninggal karena kelaparan atau dibawa keluar untuk dieksekusi. Bayangkan diri Anda sebagai seorang remaja, yang sedang menempuh kehidupan yang tenang dan menyenangkan, lalu tiba-tiba disekap di penjara yang penuh ancaman kematian.

Saya pernah di sel, di penjara di dalam sel itu delapan orang. Lalu satu persatu tiap malam diambil, katanya sih dipindah. Kemudian semakin lama semakin berkurang, tinggal saya berdua dengan salah seorang yang katanya tokoh di kota itu, yang pada akhirnya orang ini juga mati disiksa. Orang ini sebetulnya oom saya [bukan oom yang aparat desa]. Nah ketika itulah saya merasa tertekan. Saya harus minta tolong siapa? Tiap kali yang datang dalam bayangan saya adalah teman-teman kecil, keluarga, adik, kakak, ibu, bapak. Saya nggak tahu harus bagaimana.

Sejumlah saudaranya dari kampung cukup berani untuk mengunjunginya sekali, seminggu dan mengantarkan makanan. Dengan makanan itu ia berhasil bertahan hidup dan membaginya dengan tiga orang lain dalam sebuah kelompok makan.

Nah kelompok saya ini kelompok yang minus, jadi seminggu sekali saya dikirim, nah saya punya anggota kelompok itu tiga orang yang nggak pernah dikirim. Karena mereka dari luar kota, dari Lampung, Jakarta, dari mana, saya nggak tahu, karena pengakuan kan nggak

jelas ya. Karena kita nggak tahu mereka siapa, karena yang tahu kan biasanya anu, pemeriksa saja. Kita nggak peduli dia siapa, pokoknya kita sama-sama di situ, kita saling bantu-membantu.

Saat menggambarkan penderitaannya di penjara, Mulyadi tidak terlihat emosional. Hal yang membuatnya sedih, bahkan sampai hari ini, adalah penderitaan keluarganya yang tinggal di luar penjara. Ia tidak tahan dan menangis saat bercerita tentang saudarinya yang jatuh miskin dan terpaksa memotong rambutnya yang indah untuk dijual.

Kerabatnya yang membawakan makanan hanya bisa membeli jenis makanan paling sederhana dan murah, termasuk nasi sisa makan mereka sendiri.

Bahkan pada suatu hari, saya pernah bertanya sama keluarga saya, 'Uang dari mana sih ngirim-ngirim saya?'– padahal waktu itu kirimannya juga nggak banyak, mungkin segaking, segaking itu tahu? Nasi yang dikeringin, nasi yang nggak habis, barangkali dari tetangga-tetangga itu diminta gitu, terus dijemur, ya kan? Kemudian setelah kering itu dikirim ke penjara. Nah lalu di sana itu disiram dengan air panas, direbus, itu sudah bisa dimakan gitu ya? Nah itu segaking. Kami kirimannya seperti itu, garam, sederhana sekali.

Saat di penjara, ia mengalami tekanan psikologis yang mendalam. Ia dipisahkan dari orang tua, saudara, dan teman-teman lamanya di Salemba. Tidak jelas berapa lama ia akan ditahan. Mungkin untuk selamanya. Ia tidak

pernah tahu kenapa sampai ditahan di penjara dan apa kesalahan yang dilakukannya. Salah seorang pamannya mati karena disiksa. Ia tahu bahwa tahanan yang dibawa keluar tidak 'dipindahkan', tapi dibunuh. Seperti banyak orang lain dalam keadaan serupa ia menderita krisis kejiwaan. Sebagai seorang Muslim, ia berharap dapat menemukan ketenangan dalam agama. Tapi para ulama yang bertugas di penjara kerjanya hanya memaki-maki para tahanan:

Keadaan kami sebenarnya kan patut ditolong. Tapi sebaliknya apa yang kami terima dalam rangka Santiagoi di penjara–kita selalu dikumpul di situ. Kemudian mereka–biasanya yang paling menonjol itu dari kelompok Islam itu saya lihat–bapak-bapak yang atas nama Islam itu banyak mengkritik kita, mengkafir-kafirkan kita. Kita dianggap orang sesat, dianggap orang tak bertuhan.

Banyak tahanan lain yang menggambarkan sikap para ulama yang tidak memberi kenyamanan secara emosional atau memberi bantuan material.[3] Sementara itu, para rohaniwan Kristen dan Katolik lebih simpatik dan juga mau memberikan bantuan kemanusiaan.

Dari kelompok Kristen tidak pernah mengkritik. Tidak pernah misalnya ngatain kita ini kafir dan sebagainya, tidak pernah. Paling-paling memberikan semacam pengertian bahwa tidak ada dosa yang tidak terampuni. Tuhan selalu datang kepada kita dan mengetuk hati kita untuk menjadi orang-orang baru dengan darah dan tubuh. Sesu dan diselamatkan. Seperti itu saja. Tidak pernah

bicara misalnya ada, ‘Lu PKI’, ‘Lu semua sesat, setan, patut masuk neraka’, gitu misalnya. Jadi tumbuhlah rasa simpati. Karena di dalam kesulitan ini, orang itu batinnya, itu jiwanya itu berkembang, mencari jalan untuk kedamaian gitu kan.

Pada 1969, Mulyadi dipindahkan ke Pulau Buru. Di sana ia melihat banyak tapol Muslim yang berpindah agama.[4] Mereka tidak menghadiri pelajaran agama yang disampaikan oleh para ulama, tapi malah ikut dalam kelas bagi tahanan Kristen dan Katolik.

Setelah saya pindah di Pulau Buru dengan teman-teman, itu barangkali dua pertiga dari semua–tanpa ‘Kristenisasi’ ya, artinya kesadaran kita sendiri–kita itu mulai mencantumkan agamanya itu mulai berubah. Kebanyakan itu

Katolik atau Protestant. Ya udah, yang Katolik harus ke gereja, yang Protestant harus ke gereja gitu kan. Jadi kita begitu, pindah agama akhirnya.

Pimpinan militer di Pulau Buru menyadari perubahan ini awal 1970an. Pegawainya memeriksa kembali catatan para tapol dan melihat bahwa banyak dari mereka yang menyebut diri Muslim saat tiba di sana.

[Mereka] geceka kembali pertama kali masuk itu orang-orang ini agamanya apa saja, ternyata setelah dicek sebagian besar dari mereka itu pindah agama ke Kristen, begitu banyaknya. Sehingga ada peraturan itu harus kembali sesuai dengan data pertama masuk kan [tertawa]. Harus kembali. Kami dikumpul di lapangan, di lapangan

dikumpulkan, ‘Kalian tidak boleh begitu, harus kembali ke agamanya masing-masing.

Bagi para pemimpin militer, agama bukan pilihan bebas. Agama adalah sesuatu yang bisa dipaksakan kepada orang lain, walaupun alasan bagi para tahanan untuk pindah agama tidak lain karena militer menciptakan penderitaan begitu hebat.

Ya seru juga ya, orang sudah keyakinan orang ya, harus kembali. Yah dengan cara paksalah. Dikumpulkan, kemudian dipanggil satu-satu, kemudian disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat dan harus besoknya itu melakukan ibadah Islam. Saya termasuk kena tuh. Tapi jujur saya katakan, saya waktu itu tidak protes, karena percuma, iya kan? Lagi juga saya bicara dengan orang yang tidak mengerti apa kemauan saya. Dan tidak mengerti–apa namanya–diri saya, ya percuma saja. Kemudian saya minta waktu, waktu itu di lapangan. Saya diam-diam ya karena untuk begitu men-switch (pindah) dengan kecepatan yang amat mendadak itu tadi. Memang agak berat. Ya memang karena saya dulunya orang Islam ya, dulunya fasih sekali mengucapkan syahadat. Tetapi dalam hatiku pun saya berdoa Bapak Kami. Di sini pertentangan yang hebat di dalam jiwa saya yang mungkin sulit sekali dilukiskan.

Di satu sisi, agama bukan masalah penting bagi para tapol karena mereka tidak pernah sempat mendalami atau menjalankannya dengan pantas: mereka bangun pagi-pagi sekali, berkumpul di lapangan saat apel, bekerja keras

sepanjang hari di ladang, kembali ke barak pada malam hari, makan malam, lalu segera tertidur karena kehabisan tenaga. Tapi, di sisi lain, agama menjadi sangat penting karena itulah satu-satunya forum yang memungkinkan mereka untuk membaca dan bergaul satu sama lain. Satu-satunya bahan bacaan yang tersedia di Pulau Buru saat itu adalah buku-buku agama. Misa atau kebaktian Minggu adalah saat bersantai dengan teman-teman. Melalui praktik keagamaan seperti inilah para tapol menemukan cara untuk mendapat keseimbangan kejiwaan.

Masalah psikologis paling berat bagi tapol di Buru, menurut Mulyadi, adalah kegelisahan saat mengingat orang-orang yang dicintainya. Para tapol sangat cemas dengan keberadaan keluarga mereka, namun tidak dapat berbuat sesuatu. Mereka merasa sulit dan berat bahkan hanya untuk sekadar berkirim surat saja. Mulyadi sendiri mencoba untuk tidak memikirkan keluarganya.

Ya untuk apa, untuk ini mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif, misalnya rindu kepada keluarga, kepada adiknya, itu sangat menyiksa sekali di sana itu. Bahkan banyak orang-orang putus ada karena kerinduan-kerinduan ini. Ada teman-temanku di sana yang bunuh diri, umpamanya, karena nggak tahan sama hidup. Padahal apa sebenerna yang nggak tahan? Kita sudah sama-sama, kerja sama berat. Tapi toh ada yang bunuh, diri juga kan? Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, ada yang lemah. Rata-rata mereka itu, teman-teman yang mati, bunuh diri atau minum racun dan

sebagainya, apa yang mereka sebut-sebutkan itu? Cuma ibunya. Apa dia bilang ‘Ibu’ atau ‘Mama’ atau apa, nah itu mereka sangat anu–memang memprihatinkan sekali ya. Dunia harus tahu.

Salah seorang temannya yang bunuh diri, untuk waktu lama dirundung pikiran bahwa isterinya sudah tidak setia lagi. Banyak tapol yang kemudian terjerembab dalam bayangan bahwa isteri mereka sudah menikah lagi. Beberapa di antaranya bahkan meminta isteri-isteri mereka untuk mencari suami lain. Dan justru gagasan inilah yang tidak dapat diterima oleh temannya.

Ada satu tragedi yang saya lihat. Pada suatu hari ada seorang tahanan, seorang teman, dia dulu militer, mendapat foto dari Jawa, foto istrinya. Ini lho sensitifnya orang di sana itu, orang tahanan. Ternyata di dalam foto itu–digunting kan foto itu kan–tapi ada gambar tangan yang memegang tangan istrinya. Gambar itu berotot, gitu kan. Itu sampai gila tuh. ‘Kok istri saya nggak setia? Padahal saya di sini ini setia.’ Bagaimana nggak setia? ‘Padahal aku setia untuk bertemu.’ Padahal orangnya cukup intelektual.

Masalah psikologis penting lainnya di Pulau Buru adalah masa depan yang tidak jelas. Mereka tidak tahu kapan akan dibebaskan dari kerja paksa yang mereka jalani. Sangat sulit mempertahankan keinginan untuk hidup saat kehidupan itu hanya tampak sebagai penderitaan berkepanjangan.

Itu kan sebenarnya rasa ketakutan akan hari depan yang tidak jelas. Itu kan menimbulkan orang itu putus asa. Tapi teman-teman kan punya pandangan kan-ya sebagian besar–katakanlah soal, apa pun maunya orang, kalau Allah mau membebaskan kita ya bebaslah kita, kan gitu? Nggak mungkin. Kita berserah diri sajalah sama yang Di Atas, kan seperti itu? Mereka sholat, sebelum tidur mendoakan keluarganya, mendoakan supaya bebas, seperti itu. Jadi punya harapan untuk bebas. Kita seperti itu. Kan kehidupan itu harus 100 persen harus disedihi. Kan ada saja bagian-bagian yang menghibur, ya kita–banyak hal-hal yang lucu-lucu yang istilahnya selalu susah kan seperti itu. Tapi ya itu tadi, keputusasaan itu bisa saya mengerti, kapan pulangnya, berapa pulangnya. Apalagi ada berita-berita kita nggak akan pulang, sampai mati terus di sini.

Mulyadi termasuk rombongan tapol terakhir yang dibebaskan dari Buru pada 1979. Pada saat pembebasan, para pemimpin militer tidak lagi bersikap keras terhadap tapol yang pindah agama. Ia dibiarkan menganut agama Kristen dan saat kembali ke Jawa memiliki

KTP yang menandakan dirinya beragama Kristen. Beberapa anggota keluarganya, saat menerima kembali, agak keberatan dengan kenyataan bahwa ia telah pindah agama:

Sampai di rumah, begitu keluarga saya sebetulnya fanatik gitu. Ayah saya, gitu kan, tapi ayah saya cuma diam-diam saja. Dia bilang, ‘Agama itu yang penting itu. Ya saya nggak bisa bilang apa, kalau kamu mau masuk

agama Nasrani, baik, jadi Nasrani yang baik seperti apa yang diajarkan oleh Nasrani, Nabi Isa kamu.' Gitu ayah saya. Ibu saya bilang, 'Ya ialah, agama di mana-mana sama, yang penting baik, rukun,' kata ibu saya. Tentu saja yang lain seperti kakak saya, 'Ya nggak, orang Islam ya harus kembali.' Gitu, murtad dan sebagainya. Dan teman-teman kecilku ketika saya temui setelah saya bebas, teman saya ngaji, itu juga diam-diam protes, 'Gimana sih kamu, apa nggak sayang sama guru kamu Haji Masruni?' Nah seperti itu.

Tapi, masalah terpenting bagi Mulyadi saat kembali ke Jakarta bukanlah identitas keagamaannya, tapi cara bertahan hidup secara ekonomi. Ia perlu mencari pekerjaan.

Ada tetangga yang nyupir, dan saya nawari diri gimana kalau saya jadi keneknya. Saya mulai jadi kenek Metromini S63, Pasar Minggu-Depok. Makan satu hari sekali, ya kan. Ketika istirahat kita sama-sama makan di warung Padang bersama-sama dengan kondektur yang lain. Kemudian malamnya pembagian upah gitu kan, ya sebetulnya sedikit, tapi daripada nol. Tapi lama-lama ya nggak betah, karena ya bahaya ya, jadi kenek ya, main di terminal, penuh dengan preman.

Ia ingin mencari pekerjaan lain. Di Buru, ia sempat belajar akupunktur[6]. Pada awal 1980an, Mulyadi memutuskan untuk melanjutkan pelajaran akupunktur di Yogyakarta.

Saya masuk organisasi akupunktur, gitu. Di mana organisasi itu pun digosipkan sebagai organisasi tempat penampungan orang-orang eks [tapol]. Jadi harus hati-hatilah, gitu. Jadi gimana? Repot juga kan? Didesas-desuskan bahwa organisasi akupunktur ini nggak lebih dari organisasi dari orang-orang tahanan PKI. Tapi nyatanya masyarakat yang saya datangi tidak peduli ya, artinya kami mulai praktik di masyarakat, tentu saja berurusan dengan pemerintah, terutama dalam minta ijin itu bukan main sulitnya. Harus begini, harus begitu, harus bayar ini, bayar itu. Padahal kami ini benar-benar pennyless, artinya ndak punya apa-apa.

Di sini memang pemerintah ada semacam maksud yang ganda ya, mendua. Pertama kami dianjurkan untuk bersosialisasi, tapi di pihak lain kepada masyarakat dia memberikan warning [peringatan] kepada masyarakat, ‘Awas jangan sampai kesusupan orang-orang eks-tahanan politik.’ Jadi ya gimana? Gitu kan? Kalau kita misalnya ngumpul dengan orang-orang di mesjid, orang-orang ini mengatakan, ‘Awas ada orang eks di sini.’ Gitu kan? Jadi gimana? Maunya apa saya nggak tahu.

Ia menempuh sekolah tinggi untuk tenaga akupunktur dan akhirnya membuka praktik sebagai akupunkturis. Ia bahkan pernah diundang mengajar oleh tenaga-tenaga medis profesional di Jawa Tengah: ‘saya ngajar akupunktur di rumah sakit-rumah sakit, di kalangan dokter. Saya ngajar kelas dokter dan paramedis, ya.’ Di sebuah rumah sakit, ia jatuh hati pada seorang perempuan

yang bekerja di sana, tapi ragu-ragu menyampaikannya. Ia merasa pasti akan ditolak karena latar belakangnya sebagai ekstapol.

Saya ketika mau melamar ya sangat ragu-ragu sekali. Gimana? Bisa diterima atau nggak nih? Apa saya perlu berbohong? Tapi kalau berbohong, apa akibatnya di kemudian hari? Gitu. Maka saya putuskan saya akan bilang terus terang siapa saya.

Perempuan itu bersedia menerimanya sebagai pacar dan juga mau menikahinya. Tapi ia berkata akan berbicara dengan keluarganya lebih dulu. Dalam keluarga perempuan itu ada banyak pegawai negeri, dan ayahnya adalah seorang hakim. Mulyadi pertama kali menjumpai pamannya.

Ketika saya menghadap ke oomnya, oomnya itu rasanya menolak dengan memberi jalan alternatif supaya saya mau mengawini pembantunya, karena pembantunya ini katanya masih saudara dengan keluarga ini. Ya saya bilang bahwa, ‘Ya memang pembantu yang ditawari itu cantiklah, ia baik dengan saya. Tetapi saya ingin anak bapak. Kalau soal pembantu ya nantilah urusan belakangan. Gimana nanti.’ Lalu tiba-tiba kami disuruh menunggu jawaban tiga bulan. Karena apa? Karena keluarga harus berkonsultasi dulu, antara lain dengan salah satu jenderal yang ada di Semarang. Saya ndak tahu nih jenderal siapa. Mungkin… jenderal siapa sih? Saya nggak tahu. Dan salah satu dari keluarganya pun ada jenderal yang menjadi korban Gerakan 30 September.

Saya nggak begitu ingat dan nggak ada hubunganlah dengan saya, gitu kan? Boleh dikata garis besarnya ditolak.

Walau ditolak oleh keluarga itu, keduanya memutuskan untuk menikah. Mereka pindah ke Jakarta untuk menghindari pengaruh keluarga calon isterinya dan mendaftarkan pernikahan mereka di catatan sipil. Satu-satunya halangan saat itu adalah perbedaan agama. Mulyadi beragama Kristen sementara calon isterinya beragama Islam. Calon istrinya meminta Mulyadi kembali pindah agama dan menjadi Muslim.

'Ya kamu harus pindah ke Islam dong. Masa udah keluarga saya kehilangan saya karena kawin sama tapol sekarang harus kehilangan agama saya, gimana? Kamu harus berkorban dong untuk saya karena saya sudah berkorban untuk kamu. Apa untungnya kawin sama tapol sih? Kerjaan nggak menentu, macam- macam.'

'Tapi kesetiaannya ada lho.'

'We belum tentu.'

'Ya udah, okelah, saya oke deh. Saya menghargai pengorbanan kamu, saya juga harus berkorban untuk kamu.'

Dan suatu malam saya pikir-pikir, memang harus berkorban. Dan serasa bahwa ini saya atas dasar kasih ya, atas dasar prinsip cinta kasih gitu... Dari pengertian ini kan, saya kemudian masuk Islam.

Dan begitulah, sampai saat ini Mulyadi adalah seorang Muslim.

‘Waktu 65 itu ndak punya belas rasa kasih terhadap sesama’

Sebelum di penjara pada 1965, Wayan adalah seorang penyanyi dalam sebuah kelompok pertunjukan di Bali. Ia mengenang saat-saat yang menyenangkan ketika berkeliling dengan kelompoknya ke desa-desa untuk menggelar pertunjukan. Ia dan sekitar tiga puluh anggota kelompoknya adalah seniman rakyat: mereka berasal dari keluarga keluarga desa yang miskin dan mementaskan lagu-lagu tradisional untuk penduduk desa yang juga miskin. Wayan sendiri adalah anak seorang buruh tani yang buta huruf. Mereka mementaskan Janger, tarian tradisional Bali, dan menambahkan unsur drama yang berbicara tentang masalah politik kontemporer. Dalam wawancaranya dengan kami, ia menyanyikan salah satu lagu yang biasa mereka bawakan dulu.

Ada beberapa lagu yang saya masih ingat. Misalnya, ‘Dekon,’ itu kan Bung Karno yang Deklarasi Ekonomi, ya. Jadi kita terjemahkan pakai bahasa Bali [menyanyikannya dalam bahasa Bali]: Dekon niku tuku wejangan ne becik... Artinya, Dekon itu memang sebenarnya wejangan–wejangan itu pembicaraan–yang sangat baik, wejangan ne becik. Itu salah satu isi ini. Lagu ini kita kombinasi dengan angklung. Saya senang sekali menyanyikannya, karena memang rasanya kena, kena gitu lho.

Wayan belum pernah keluar Bali, dan bahkan jarang keluar dari lingkungan Kabupatennya sendiri. Tapi, ia

merasa bangsa sebagai bagian dari nasian Indonesia yang baru, karena di dalamnya ia menemukan kebebasan bagi rakyat miskin seperti dirinya untuk maju. Pemerintah baru dari negeri yang merdeka membuat berbagai peraturan yang menguntungkan orang miskin. Ia sangat bersemangat menyambut undang-undang bagi hasil.

Pada waktu itu kan saya melihat penyakap-penyakap (buruh tani) tidak sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil itu [dikeluarkan 1960]. Seperti misalnya orang menyakap (bertani tidak bertanah) hanya dikasih seperempat, dengan menanggung biaya-biaya, pengeluaran apa yang dibutuhkan oleh satu pengolahan pertanian itu. Itu semua yang nanggung yang mendapatkan hasil seperempat ini, atau penyakap itu. Jadi saya pikir, untuk biaya itu tidak cukup dua pertiga daripada hasil yang dia akan dapatkan, halau panen. Kalau tidak panen, menjadi kerugian sepenuhnya kepada si penyakap. Ini saya melihat kokhama sekali tidak sesuai dengan undang-undang itu? Padahal Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil, itu, kan, separo-separo. Dan biaya juga separo-separo.

Bersama BTI, kelompoknya berkeliling ke desa-desa menjelaskan isi undang-undang tersebut kepada kaum tani:

Jadi di satu sisi kita menyebarkan bagaimana sebetulnya isi undang-undang itu supaya petani tau, dan bisa menuntut haknya. Di sisi yang lain kita mementaskan seperti Janger, kita kasih lakon itu. Bagaimana perjuangan

petani penyakap dengan tuan tanah, di mana tuan tanah juga bekerja sama dengan pejabat-pejabat itu. Nah itu, kita bikin pementasan-pementasan itu, ini memang mendapat sambutan yang bagus sekali dari masyarakat. Antusiaslah orang Kalau sudah ini dipentaskan, mereka nontonnya antusias.

Segalanya berubah pada 1965. Militer dan polisi mulai menangkapi siapa pun yang pernah ambil bagian dalam gerakan kiri, termasuk seniman rakyat seperti Wayan. Polisi mendatangi rumahnya pada November dan memintanya ikut ke Denpasar. Ia ikut tanpa perlawanan karena merasa tidak melakukan kesalahan apa pun, dan juga yakin akan segera dibebaskan setelah menjawab sejumlah pertanyaan. Ia dibawa ke Markas Kodim di Denpasar yang penuh sesak dengan tahanan lain dari seluruh Bali, dan ditahan di sana. Ia tidak diinterogasi. Petugas hanya menanyakan nama dan umurnya lalu pergi meninggalkan mereka di sel.

Dalam bulan-bulan pertama penahanannya di Kodim, ia mengaku pasrah menghadapi kematian.

Setiap hari ada yang dikeluarkan, dibon [diambil keluar tahanan untuk diinterogasi, disiksa, atau dibunuh] istilahnya pada waktu itu. Nggak tau ke mana, sampai sekarang banyak yang tidak tau, termasuk teman saya satu dari sini. Ada dari sini satu juga, dibon malamnya, bawa ke penjara. Terus beberapa tahun kemudian sudah nggak ada, sampai sekarang. Jadi malam malam itu dibon istilahnya, ada orang cari.

Agar tidak ‘dibon’, Wayan selalu berusaha berpindah sel agar namanya tidak muncul dalam daftar orang yang akan dibawa keluar dan dieksekusi.

Begini caranya: entah berapa hari sekali orang itu di Kodim itu didaftar. Misalnya orang diurut dari selatan, si A, si B, dan si C, diurut semua. Biasanya, saya kalau sudah diurut seperti itu hampir datang ke saya, saya sudah masuk di tempat orang yang sudah didaftar. Maka itu nggak kena saya. Betul-betul, saya memang dari dulu punya pikiran, saya harus mengulur kematian saya [ketawa], asal saya tidak mengkhianat. Ini prinsip saya.

Setelah hampir dua tahun mendekam di Kodim, ia dilepaskan. Ia tidak pernah diberitahu mengapa ditangkap dan juga tidak pernah diberi penjelasan mengapa akhirnya dibebaskan. Ia kembali ke desanya. Namun, sulit baginya untuk kembali hidup normal karena lingkungan yang semula dianggapnya normal telah berubah sama sekali. Anggota kelompok pertunjukannya yang masih hidup tidak pernah bisa berkumpul lagi. Lagu lagu yang biasa mereka nyanyikan kini dinyatakan terlarang. Banyak temannya yang masih mendekam di penjara. Beberapa di antaranya sudah mati dibunuh. Dalam suasana ketakutan yang masih terasa pada 1967, ia merasa tidak aman. Ia beranggapan, yang kemudian terbukti benar, bahwa dirinya sewaktu-waktu bisa ditangkap lagi. Pada suatu malam di Oktober 1968, polisi mendatangi rumahnya bersama kepala desa, setahun setelah ia menikmati ‘kebebasan’.

Mungkin lho ini–saya tidak menuduh–ada laporan dari desa, ‘Lho, orang ini kok masih hidup?’ Dulu kan memang pekerjaan saya, ya, tukang nyanyi, tukang pementasan Janger, satu drama lakon tuan tanah itu, penyebaran Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil dan Perjanjian Pokok Agraria. Itu kan banyak orang yang benci sama saya. Pasti itu. Jadi dia gunakan kesempatan itu mungkin untuk lapor. Nah, betul, saya diambil.

Ada banyak orang yang ditangkap militer pada 1968, termasuk mereka yang hanya punya hubungan sedikit dengan PKI. Mereka umumnya adalah orang yang belum pernah ditangkap, atau sempat ditangkap, tapi cepat dibebaskan kembali, seperti Wayan. Banyak dari mereka yang sebelumnya berafiliasi dengan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), misalnya, tidak dianggap perlu untuk ditangkap pada 1965-66. Tapi, saat militer melancarkan operasi pembersihan kedua pada 1968, tak seorang pun yang dianggap ‘kurang penting’ oleh militer. Saat itu pula militer menggelar operasi penumpasan sisa-sisa PKI di Blitar Selatan. Militer percaya PKI memiliki jaringan bawah tanah yang terus berkomplot melawan pemerintah. Wayan yang saat itu berusia 25 tahun, dituduh menjadi pemimpin jaringan bawah tanah PKI, yang oleh militer disebut dengan ‘PKI malam’. Pada 1968, militer bertindak sebagai penulis naskah sekaligus sutradara, dan memaksa para tahanan untuk memainkan peran-peran yang mereka tetapkan:

Itu sudah disiapkan satu skenario seperti bahan cerita gitu lho. Karena pada waktu itu saya dituduh PKI malam. Jadi sudah disiapkan: pimpinannya ini, terus anggotanya ini. Nah, saya termasuk pimpinan, gitu lho. Di sana itu dikelompokkan–ada 'trio', istilahnya bagi mereka. Saya sendiri nggak pernah tau itu. Pada waktu itu ada istilah OTB, Organisasi Tanpa Bentuk. Kita sendiri tidak pernah tau namanya OTB. Pada waktu itu kita diistilahkan GTM, istilahnya Gerakan Tutup Mulut. Jadi kalau kita tidak mau menjawab, 'Oh, kamu, kan memang sudah diinstruksikan untuk GTM.' Ya, macam-macam. Seperti saya katakan tadi, ada satu trio.

'Lho, kamu kan masuk trio ini.'

'Ya, nggak tau saya.'

'Memang betul kamu bilang begitu' [ketawa].

Bisa-bisanya gitu lho, bisa-bisanya gitu lho, memberikan satu nama. Jadi Organisasi Tanpa Bentuk, kayaknya. 'Pantas aja kamu nggak tahu memang. Itu memang OTB, Organisasi Tanpa Bentuk. Siapa yang ngaku, lah memang kamu gerak malam, namanya aja PKI malam.' Ya, sudah dibikin satu skenario seperti itu. Nah, halau kita tidak tanda tangani, atau saja yang namanya rotan, namanya kemaluannya sapi itu, itu alat penyiksaan, itu agak berat. Terus ekornya pari, alat penyiksaan pada waktu itu.

Setelah disiksa berulangkali, Wayan akhirnya mengalah dan mengikuti skenario militer. Ia menandatangani berkas interogasi yang mengatakan bahwa ia adalah pimpinan

‘PKI malam’, sekalipun saat menikmati ‘kebebasan’ selama setahun ia tidak pernah terlibat.

kegiatan politik, dan tidak mungkin melakukan sesuatu karena terus diawasi oleh penduduk desa yang lain.

Ia akhirnya diadili pada 1975–tujuh tahun setelah ditangkap. Tidak jelas mengapa militer masih merasa perlu menggelar pengadilan sandiwara karena proses penangkapan dan penahanannya sejak awal sudah berlawanan dengan hukum. Bagaimanapun, pengadilan terhadap dirinya digelar dan Wayan akhirnya dijatuhi hukuman penjara delapan tahun. Karena ia telah menjalani hukuman selama tujuh tahun, ia seharusnya dibebaskan pada 1976. Tapi militer sudah punya rencana lain. Wayan dikategorikan sebagai golongan X, yakni kategori misterius yang membuat nasib para tapol seperti menggantung.

Setelah menjalani delapan tahun, bukan bebas tetapi datang surat penahanan dari Kopkamtib lagi, bahwa orang ini tidak lagi sempat keluar, tetapi ditahan kembali. Menjadi golongan, istilahnya Golongan X, gitu lho. Kalau pada waktu divonis kita menjadi Golongan A, terus waktu ditahan kembali menjadi Golongan X sampai sekarang, ya sampai bebas itu. Desember ‘77 tanggal 20 saya bebas. Massal pada waktu itu, baik yang tidak diadili maupun yang diadili pada waktu itu keluar sama-sama.

Sekeluar dari penjara, Wayan kembali ke desanya. Dan, lagi-lagi ia kesulitan menempuh hidup yang normal. Militer melarangnya keluar dari kecamatan tanpa izin, dan

izin semacam itu sangat sulit diperoleh. Ia terus diawasi oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa), kepala desa, dan penduduk desa yang menderita PKI-fobia. Orang lain yang semula ramah tidak mau lagi berbicara dengannya karena takut dituduh menjadi bagian dari persekongkolan bawah tanah. Terlebih lagi karena Wayan adalah saksi hidup dari kekerasan 1965-66 yang justru ingin dilupakan oleh penduduk desa.

Jadi begitu saya keluar, karena tidak boleh keluar dari kota kecamatan, saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan di rumah. Saya pernah kerja macam-macam, ya, piara babi, piara ayam, setelah itu jadi tukang sepeda. Jadi, takang rumah, tukang mebel, macam-macam lah. Pokoknya yang penting saya bisa makan dan saya tidak memberatkan orang lain, itu tekad saya. Sebab siapa yang mau membantu kita yang baru dari sana? Kita bicara ke tetangga, tetangga takut, trauma. Traumanya malah di situ, kelau menurut penglihatan saya, traumanya masyarakat melihat pembunuhan secara nyata pada waktu 65 itu. Itu yang mereka menjadi trauma, takut, kelau seperti itu terjadi lagi. Karena mereka waktu itu ditanya sama orang yang dianggap PKI sudah bisa diindikasikan bahwa dia adalah keluarga ini. Maka itu, orang tanya sama kita, musti melirik kiri-kanan ada orang atau nggak. Begitu sampai sistem pengawasannya dibikin oleh militer itu. Bukan main, di desa ada Babinsa yang selalu mengawasi kita. Orang kita kencing aja dia tau kok, apa lagi yang lain. Selalu di mata-matai.

Bali, dalam pengalaman Wayan selama 1980an dan 1990an, adalah sebuah penjara besar. Ia terkena wajib lapor tiap minggu selama belasan tahun, tidak boleh meninggalkan kecamatan tempat tinggalnya, terus-menerus diawasi, dan berulangkali dipanggil ke kantor polisi.

Saya pada waktu itu piara babi. Kan ada orang beli babi bawa mobil. Bawa mobil itu saja kok dilaporkan orang, 'Wah, dia ini ada tamu lho. Ada mobil di luar rumahnya. Gimana itu?' Panggil polisi, beberapa kali saya bolak-balik dipanggil polisi. Katanya saya bikin kegiatan lagi. Apalagi kita bicara-bicara ke tetangga. Wong kita di rumah aja sendiri ada orang belanja, beli babi gitu kok, kita diisukan, atau dikatakan. Mau bangkit, apa istilah mereka. Berapa kali saya dipanggil polisi, sampai bosan rasanya polisi itu, manggil karena dilaporkan. Jadi begitu, dari mana-mana kita kok ditekan.

Bali adalah pulau damai dan indah yang terkenal di seluruh dunia, semacam surga di bumi. Namun reputasi ini sepenuhnya bergantung pada kebungkaman mengenai pembunuhan dan pemenjaraan massal yang berlangsung selama 1965-66. Sementara banyak orang Bali yang berusaha melupakan masa teror itu dan berbuat seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu, para korban justru tidak mampu lepas dari ingatan itu. Hidup mereka hancur karena kekerasan itu, dan dalam banyak hal terus berpengaruh terhadap mereka sampai hari ini. Agar citra Bali sebagai surga bisa bertahan, seseorang tidak boleh

mengingat bahwa pulau itu pernah menjadi penjara raksasa bagi ribuan ekstapol.

Pengalaman Wayan dengan ketidakadilan dan kekejaman ini memberinya pemahaman baru mengenai ‘kebudayaan Bali’ yang sangat berbeda dari pikiran yang ingin dipromosikan oleh para penguasa Bali dan yang selama ini dilihat oleh turis. Sebagai bekas penyanyi dan seniman panggung yang dipaksa bungkam, ia sangat merasakan perubahan kebudayaan Bali di bawah rezim Soeharto. Kebudayaan Bali menjadi komoditi dan sekadar tontonan ketimbang kekuatan yang hidup dan dinamis untuk memberdayakan orang secara politik seperti dilakukan kelompoknya sebelum 1965. Saat ini, para seniman pertunjukan Bali hanya menjadi buruh dalam industri yang masif–kumpulan buruh miskin yang tak berdaya.

Saya sering ngangkut kesenian ini, baru-baru ini, saya sering ngangkut kesenian Legong dari desa ini, pakai truk ini. Sampai di sana orang yang perias ini, seniman ini, perias di lapangan rumput itu yang biasa payah. Kalau hujan, mereka kehujanan, dengan naik truk begini. Harganya berapa, orang kesenian itu? Anda tahu? Mereka cuman dibayar Rp 5.000 per orang. Apa ini suatu pelestarian budaya? Apa ini tidak pemerasan? Mereka tidak pernah mau tau kalau mereka kehujanan, atau apa pulang, atau bagaimana. Bagaimana kita bisa perkenalkan budaya tetapi di satu sisi mereka memperas seperti itu? Hal-hal beginilah, ya, dari dulu saya melihat tidak suka.

Saya melihat yang begitu-begitu, kan nggak adil. Bagaimana orang yang sekitar ‘Eh, Legong-mu bawa sini, saya bayar!’ Yang ini dapat Rp 10.000, kita yang dibayar Rp 1.000 misalnya. Gimana logikanya? Cuman itu aja mereka dapat jauh berlipat-lipat daripada yang melakukan seni itu sendiri. Saya sering bawa ke hotel bintang lima, di pinggir pantai. Bayangkan dari sini ke hotel itu, paling ndak dua jam, dua setengah jam malah, dengan naik truk, seperti sapi gitu. Lima ribu rupiah itu bayar penarinya!

Sama seperti kebanyakan orang Bali, Wayan lahir dari orang tua yang juga berasal dari Bali, menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa ibu. Ia menghabiskan seluruh hidupnya di

Bali. Ia pertama kali keluar dari pulau itu beberapa tahun lalu saat berkunjung ke Jakarta. Tapi, sekaligus ia merasa terasing dari kebudayaan Bali setelah menjadi saksi kekejaman orang Bali pada 1965-66 dan cara mereka memperlakukan eks-tapol sampai saat ini.

Orang-orang luar memuja Bali itu begitu indah, begitu ramah tamah, begitu baik hatinya. Kok waktu 65 itu ndak punya belas rasa kasih terhadap sesama? Jangankan terhadap orang lain, terhadap keluarga sendiri kok bisa berbuat seperti itu? Apa ini harus tetap dihargai sebagai pemeluk Hindu yang benar? Tetapi ini bukan berarti saya tidak beragama lho, bukan berarti saya bukan Hindu. Saya masih tetap agama Hindu. Tetapi saya merasa sedikit tersinggung dengan masalah-masalah itu.

Perjuangan kejiwaannya menyangkut identitas dirinya sebagai orang Bali. Ia tidak mau menjadi bagian dari masyarakat yang justru membuatnya menjadi korban. Sebagai bentuk protes halus dan personal, ia tidak memberi nama Bali kepada anak-anaknya.

Tapi sekarang, ia sudah bisa bergaul bebas dengan orang sedesanya tanpa rasa curiga dan hati-hati seperti di zaman Soeharto.

Pergaulan dengan warga sekitar nggak jadi masalah. Bahkan saya mempelopori kalau ada upacara-upacara adat. Saya dengan senang hati menyumbang sesuatu, bahkan saya dijadikan salah satu pengurus desa adat di sini. Jadi, kalau ada apa-apa, saya musti ikut rembuk desa, begitu. Saya menyesuaikan diri, apa yang menjadi kebutuhan kita apa yang bisa saya kemukakan, saya kemukakan.

Walau sudah dapat ‘menyesuaikan diri’ dengan masyarakat sekitarnya, ia tetap berjaga-jaga. Ia mengatakan sampai sekarang belum ada rekonsiliasi sejati di antara mereka yang dicap ‘kiri’ dan yang ikut milisi. Mereka yang dulu terlibat pembunuhan tidak pernah mengaku dan tidak pernah meminta maaf kepada para korban. Di Bali sendiri, di balik segala keselarasan dan keindahan, ada ketegangan yang tersembunyi. Para eks-tapol dan keluarga mereka masih merasa sakit, diperlakukan tidak adil, terhina, sementara para pelaku berbuat seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu.

Daftar Wawancara

1. Mulyadi, Jakarta, 22 Februari 2001
2. Tan Swie Ling, Jakarta, 16 Juni 2000 dan 16 Maret 2001
3. Wayan, Bali, 18 Agustus 2000

---

[1] Wawancara dengan Benedict Anderson, September 1996, pewawancara Ben Abel. Transkripsi wawancara itu disiarkan melalui jaringan internet.

[2] Kami mendengar dari banyak tapol di wilayah yang berlainan bahwa militer menyita gedung dan bangunan milik orang Tionghoa, beberapa di antaranya adalah anggota Baperki, dan menggunakannya sebagai tempat penahanan. Hal seperti itu tampaknya lazim dilakukan.

[3] H. Achmadi Moestahal, seorang tapol yang ditahan di Salemba dan Pulau Buru, misalnya, dalam memoarnya mencatat hanya sedikit ustadz yang simpatik dan baik hati, sementara kebanyakan tidak demikian: 'siraman rohani para perwira Binroh (Pembina Rohani) Islam yang lain, Masya Allah.' Cara mereka menyelenggarakan pelajaran agama, 'justru menimbulkan antipati terhadap Islam, karena cara-cara yang tidak mendidik dan vulgar, penuh dengan cacian dan makian terhadap penganut faham Komunisme dan atheisme ... Bahwa semua tapol adalah al kuffaar musyrikin dan orang yang sesat.' Moestahal berasal dari keluarga santri dan lulus dari Pondok Pesantren Gontor. *Dari Gontor ke Pulau Buru* (Yogyakarta: Syarikat, 2002), h. 252.

[4] Mengenai pendidikan agama di Pulau Buru, lihat I.G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979* (Jakarta: LP3ES, 2001), h. 136-146.

[5] Kejadian ini juga digambarkan oleh beberapa tapol yang lain.

ROMUSHA DAN PEMBANGUNAN: SUMBANGAN TAHANAN POLITIK UNTUK REZIM SOEHARTO

Razif

Dalam buku-buku teks sejarah yang digunakan di sekolah-sekolah Indonesia, kita membaca mengenai kekejaman kerja paksa semasa pendudukan Jepang dari 1942 sampai 1945. Banyak orang Indonesia yang direkrut secara paksa oleh pasukan Jepang untuk bekerja membangun jalan, benteng, landasan pesawat, pelabuhan, dan semacamnya. Sebutan tentara Jepang untuk mereka adalah romusha: buruh yang tidak dibayar. Sekitar 300.000 orang dikirim dengan kapal-kapal ke tempat seperti Birma dan Malaya, untuk bekerja di bawah komando mesin perang Jepang. Dalam buku sejarah yang mendapat persetujuan resmi dari rezim Soeharto, yakni enam jilid Sejarah Nasional Indonesia yang disunting Marwati Djoened Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, kita bisa membaca bahwa romusha dipaksa bekerja selama berjam-jam ‘sejak dari pagi buta sampai petang’ tanpa ‘makan dan perawatan cukup.’ Sejumlah besar orang meninggal karena penyakit, kelelahan, dan kelaparan.[1] Cerita mengenai romusha

menjadi bagian dari ingatan sosial bangsa Indonesia. Mereka yang selamat dalam tahun-tahun itu menggambarkan penderitaan yang mengerikan sebagai tenaga kerja paksa. Hampir semua penduduk Indonesia saat ini tahu makna kata romusha.

Banyak penduduk juga tahu cerita-cerita mengenai kerja paksa di zaman kolonialisme Belanda. Sebutan untuk mereka adalah corvee. Pejabat pemerintah meminta desa-desa untuk mengerahkan tenaga kerja guna membangun jalan dan saluran irigasi. Di abad ke-19, semasa Tanam Paksa, para pejabat memaksa petani untuk menyerahkan seperlima tanahnya untuk tanaman seperti gula dan tembakau, yang kemudian akan dibeli pemerintah dengan harga sangat rendah.

Dalam sejarah kerja paksa di Indonesia yang panjang dan menyedihkan, kasus terakhir ini justru yang paling tidak banyak diketahui: rezim Soeharto pun mengerahkan ratusan ribu tapol, yaitu mereka yang dituduh komunis dan simpatisannya, untuk bekerja di bawah paksaan, tanpa bayaran. Tahukah Anda bahwa jembatan, jalan raya, monumen, dan bendungan yang dibangun di berbagai tempat di Indonesia, sepanjang akhir 1960an dan 1970an dibuat oleh tangan-tangan tapol, yang hanya menerima caci-maki sebagai pengganti keringat yang mereka keluarkan? Tentara juga jarang memberi makanan kepada tapol yang dipekerjakannya; keluarga tapol lah yang justru menanggung dan memberinya makanan. Bagi penguasa,

mempekerjakan paksa para tapol komunis dan simpatisannya, sudah dianggap kemestian.

Di bawah rejim Soeharto, kerja paksa terjadi di banyak wilayah, dari Sumatera sampai Pulau Buru. Di Lampung, misalnya, kerja paksa terjadi di Sungai 'Kopel'. Di tempat ini, para tapol harus mengeruk pasir dan jika mereka bekerja lambat, maka ikat pinggang kopel–ikat pinggang besar yang biasa dipakai tentara–akan melayang ke tubuh tapol. Di Cianjur, Jawa Barat, para tapol bekerja membangun Monument Siliwangi yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Para tapol pula yang bertugas menjaga kebersihan dan keindahan kota-kota di wilayah propinsi Jawa Timur. Bahkan, mereka lah yang membuat Monument Operasi Trisula di Blitar Selatan.[2] Pembangunan hampir seluruh kota Palu dan sekitarnya menggunakan tenaga para tapol, sebagian besar baru bebas dari rangkaian pemaksaan ini setelah Presiden Soeharto lengser, Mei 1998. Ada pula tapol yang sempat di penjara di LP Sukamiskin, Bandung, setelah dibebaskan pada 1992, dipaksa masuk dalam babak kekerasan berikut. Kelurahan Ciranjang memerintahkan dia bersama 14 eks-tapol lain untuk membersihkan Jalan Raya Ciranjang hingga jembatan Rajamanda, yang jaraknya kurang-lebih 15 kilometer, secara rutin. Tapol-tapol tersebut bekerja mencabuti rumput sepanjang jalan itu setiap dua pekan sekali. Tugas lain yang harus mereka kerjakan adalah membersihkan kantor Kelurahan Ciranjang.

Kerja paksa para tapol tidak terbatas pada pembuatan jembatan, jalan, dan monumen saja, tetapi mereka juga bekerja di rumah-rumah para perwira militer sebagai tukang dan pembantu. Tugas mereka biasanya mencuci pakaian, membersihkan dan memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak, dan membuat perabotan rumah tangga. Selain itu, para tapol juga dipaksa membangun rumah ibadah, baik mesjid maupun gereja.

Hasil-hasil kerja paksa tapol membangun Orde Baru itu dinikmati oleh banyak orang yang menilai bahwa PKI adalah penjabat, pembunuh, dan tidak bertuhan. Penilaian itu pula yang muncul dalam buku-buku sekolah, diajarkan di sekolah dan di perguruan tinggi. Di satu sisi, pemerintah Orde Baru mengecam romusha di zaman pendudukan Jepang–rodi di zaman pemerintahan Hindia Belanda–karena merampas kemerdekaan seseorang untuk dipekerjakan paksa di berbagai bidang demi kepentingan perang. Di sisi lain, rejim yang sama justru mempraktekkan kerja paksa serupa terhadap warga negaranya sendiri, para tapol, atas nama pembangunan yang selalu dibanggakan itu.

Dalam tulisan ini, saya akan membeberkan bagaimana kerja paksa yang diberlakukan terhadap para tapol terjadi di berbagai tempat di Indonesia setelah peristiwa G-30-S 1965. Dari paparan ini, makin tampak jelas bahwa rezim Orde Baru yang mengagung-agungkan pembangunan itu ternyata bertumpu pada mekanisme kekerasan dan paksaan, serta perampokan tenaga kerja, yang dijalankan

dan dikontrol melalui kekuasaan territorial militer, terutama Angkatan Darat. Saya akan memberikan perhatian pada kisah para tapol yang pernah melakukan kerja paksa di Jawa, Sumatera, Pulau Buru, dan Palu, Sulawesi Tengah.

Kerja Paksa di Jawa dan Sumatera

Kerja paksa dimulai ketika penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang PKI dan yang dicurigai sebagai PKI oleh tentara mulai mereda pada akhir 1960an. Para tapol biasanya diambil dari penjara pada siang hari untuk membangun proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan kanal. Banyak yang dipaksa mengeruk pasir dan kerikil, bahan baku untuk membuat semen. Sampai pertengahan 1970an, puluhan ribu tapol dilibatkan dalam kerja keras tanpa menerima upah sepesan pun. Sering kali mereka juga tidak mendapat jatah makan. Pola semacam ini berlaku di seluruh negeri dan saya akan menggambarkannya berdasarkan pengalaman para tapol di Jawa dan Sumatera.

Mari kita mulai dari Lampung Selatan dengan cerita Ngatmin yang ditahan pada 1967 karena ia dicurigai sebagai anggota ‘PKI malam’. Setelah kira-kira satu setengah tahun di penjara di Kodim setempat, ia dialihkan ke sebuah kamp penahanan di bekas pabrik beras tua. Ia dan tapol-tapol lainnya yang ditahan di tempat itu dipaksa

mengeruk pasir di sebuah sungai dekat kamp yang disebut Sungai Bulug. Mereka paling- paling diberi jatah beras, tapi tanpa lauk-pauk.

Kita tidak dibayar. Ya jadi hidupnya itu selama cari pasir itu, umpama cari pasir itu ada orang 20 [tapol], yang dua itu bikin kalo (penyaring santan dari anyaman bambu), bikin bakul (wadah makanan dari anyaman bambu), bikin kukusan (alat menanak nasi berbentuk kerucut dari anyaman bambu), itu dijual untuk membeli garam, cabe itulah. Jadi ngurangi, seandainya pekerjaan orang 10 ya dikurangi dua itu. Ya kerjanya memang di situ, cuman lain, untuk hidup kita sendiri.

Ngatmin bekerja di Sungai Bulug selama kira-kira setahun. Lalu ia dipindahkan ke perkebunan karet bernama Rilau, menjadi buruh penyadap karet. Tak lama kemudian, ia dipindahkan lagi ke perkebunan lain bernama Berken. Di sana, Ngatmin dan tapol-tapol lain sering tidak mendapat makanan sama sekali sehingga mereka harus mengemis dari orang-orang desa di sekeliling perkebunan.

Tidak dibayar Pak, sama sekali tidak dibayar. Kasih makan pun nggak ajeg itu, kalau ada, ya dikasih, kalau nggak ada, ya sudah. Sudah pernah Pak, orang satu bulan atau tiga bulan itu tidak ada rangsum dari pemerintah, itu orang-orang suruh bantu ke kampung-kampung itu, suruh minta makan... siapa saja datang ke kampung dia mau. Karena apa? Kasihan. Waktu itu saya suruh nggesek kayu jati itu ke kampung, ya sampai sebulan waktu itu, [di]

kasih makan. Ya tiap sore musti apel pulang, ke tahanan. Selain [di] kasih [makan], juga dikasih baju, dikasih celana gitu.

Dari cerita ini tampak kontras luar biasa antara kemurahan hati dan kebaikan penduduk desa, yang sebetulnya juga tidak memiliki banyak harta, dengan eksploitasi tenaga tapol oleh tentara dan pemerintah.

Cerita serupa disampaikan oleh Rojali, bekas anggota Sarbupri di Lampung. Selama tiga tahun setelah G-30-S, ia harus melaksanakan wajib lapor setiap minggu di kantor tentara. Lalu, pada 1968, ia ditahan dengan tuduhan memberi perlindungan kepada seorang anggota PKI yang sedang dicari tentara. Hampir segera setelah ditahan, ia diperintahkan bekerja. Sampai pembebasannya pada 1973, ia terus-menerus dipaksa bekerja. Selama tiga tahun terakhir sebelum dibebaskan, Rojali dan sekitar 90 orang tapol lainnya bekerja.

di sebuah perkebunan kelapa Berken. Perkebunan ini sebelumnya adalah milik rakyat, tapi kemudian dirampas oleh Korem Lampung.

Kalau waktu di Berken ya, istilahnya kan, kita bikin kebun kelapa. Jadi kalau nggak salah banyaknya orang itu atas 90 orang. Itu tanah itu punya rakyat dulunya. Jadi pokoknya istilahnya dihapus sama orang Korem itu kan. Jadi yang punya kebun itu kan orang Korem. Kalau nggak salah sampai–berapa hektar gitu ya?–1.800 hektar semuanya itu... Kerjanya ya mbabat, kadang-kadang

nanam kelapanya itu. Kalau malam, ya menjaga tanaman kelapa itu. Soalnya banyak babi Pak, dulu.

Perampasan tanah rakyat oleh tentara dan penggalangan tapol untuk menjadi buruh di perkebunan tersebut merupakan hal yang lazim terjadi di masa itu. Santo Haryadi dari Lampung melalui pengalaman yang sama di daerah Banjar Agung. Para perwira dari Polisi Militer, atau POM, setempat menuduh kelompok petani pemilik tanah sebagai PKI, merampas tanah mereka, lalu menggunakan tapol untuk menggarap tanah tersebut menjadi perkebunan.

Pada tahun 72, saya dikirimkan ke proyek. Proyek itu adalah, ya katakanlah perampasan tanah-tanah petani yang terlibat [G-30-S] oleh oknum ABRI... ladang orang dirampas, orangnya dituduh terlibat, orangnya ditahan, atau setidak-tidaknya walap [wajib lapor], tanahnya dirampas, ya, sampai sekarang juga masih. Saya disuruh ngolahnya, tidak dikasih apa-apa, makan aja juga nggak dikasih. Hasil kebunnya untuk dia, sebagian banyak yang sudah dijual, ya. Tapi yang punya garapan pada waktu itu ya, nggak dikasih apa-apa. Hanya dikasih cap aja dia, cap orang PKI.

Ketika Santo Haryadi diperintahkan bekerja di tanah itu, perwira CPM yang menjadi pemilik tanah menjanjikan sebagian tanah akan menjadi milik Santo. Tapi, setelah empat tahun bekerja, ia malah dikirim untuk memburuh di perkebunan lain yang dimiliki perwira CPM juga.

Pada waktu itu saya dipindahkan ke Banjar Agung... untuk mengolah ladang di sana. Menurut perjanjian pada waktu itu, ‘Olahlah tanah ini, buatlah kebun. Kalau sudah jadi kebunnya nanti dibagi dua lah kemudian, kalau kamu nyetak sawah, saya tidak minta, ambil sama kamu untuk hidup bersama keluarga kamu.’ Janjinya. Tapi apa yang terjadi? Di sana itu disuruh kerja, jatahnya yang saya diterima tadinya, downarrow di lembaga, saya menerima jatah, di sana nggak dikasih, ya suruh cari sendiri, tapi kalau siang, mengerjakan ladang dia. ‘Nggak taulah usahanya gimana, yang penting kamu bisa hidup, bisa makan, tapi ladang itu digarap.’ Itulah kirakira... Tahun 76 saya dipindahkan dari Wai Kalih [daerah Banjar Agung] dipindahkan ke Babatan, Kalianda, karena di sana di Babatan Kalianda, itu ada salah satu lahan yang tidak bisa dirambah manusia.

Bersama sejumlah tapol lain Santo membuka hutan di Babatan, Kalianda selama satu tahun, menghadapi penyakit dan macan, lalu dibawa kembali ke penjara pada 1977. Santo tidak termasuk dalam sebagian besar tapol di Lampung yang dibebaskan pada 1977. Perwira-perwira CPM masih ingin menggunakannya sebagai buruh tanpa upah di kantor mereka: ‘Jadi masukkan lembaga [penjara] tapi saya menjadi pembantu di POM itu. Kalau siang, ya suruh bersih-bersih, mengetik dan lain sebagainya.’ Pada 1979, Santo dibawa keluar oleh salah satu perwira untuk dipekerjakan di peternakan ayam milik perwira itu.

Setelah tujuh tahun bekerja tanpa upah bagi Polisi Militer, Santo dibebaskan pada akhir 1979.

Potret kerja paksa di Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Lampung. Para tapol digunakan untuk membangun berbagai proyek infrastruktur pada akhir 1960an. Suratnya, bekas fungsionaris Pemuda Rakyat di Cipanas, menceritakan kepada saya tentang pengalamannya ditahan di Kodim dan di kamp penahanan yang terletak di sebuah gedung bernama Gedung Karet di akhir 1960an dan awal 1970an. Ia dan tapol-tapol lainnya diambil di siang hari untuk kerja paksa. Ia dipekerjakan di Jawa Barat selama tiga tahun sebelum dikirim ke Pulau Buru.

[Kami] dikerjakan membangun jalan, membangun terminal, kadang-kadang perbaiki mesjid dan sebagainya. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan umum itu tahanan-tahanan itu yang mengerjakan. Kemudian membangun jembatan Cisokan, Citarup–semua itu tenaganya tenaga yang dinamakan karyawan waktu itu, bukan karyawan, tahanan sebetulnya… Yang dikerjakan dijatah harus menghasilkan batu sekian kalau di proyek, ha kemudian pasir sekian itu dijatah setiap harinya.

Karena tidak mendapat jatah makanan, mereka terpaksa bekerja melebihi kuota yang diminta dan menjual bahan-bahan bangunan yang berlebih. Dengan uang hasil kerja ekstra dan penjualan itulah mereka bisa membeli makanan untuk mereka sendiri: ‘Jadi kalau umpamanya jatah setengah kubik itu pasir, kita harus tiga perempat,

ya yang satu perempat jual untuk makan.’ Untuk makan sehari-hari saja mereka harus ‘mencuri’ dari tuan-tuan tentara yang ternyata tidak terlalu awas juga.

Selain menggarap kerja-kerja konstruksi, para tapol juga direkrut sebagai tenaga pembantu di rumah-rumah perwira militer. Simak cerita Daryono, bekas anggota Serikat Buruh Gula di Pati, Jawa Tengah. Ia ditahan pada November 1965. Dari 1968 sampai dibebaskan pada 1973, Daryono diperlakukan sebagai budak oleh tentara:

Pertama kali saya itu dikerjabaktikan di Juana... Bikin jembatan, jembatan yang sekarang itu lho, ngebruk (membuat jembatan) itu saya pernah kerja di situ, tapi hanya dua minggu itu... Lalu saya pindah lagi di Swaduk. Swaduk tempat mengambil krokol (kerikil) itu. Ha, itu juga tidak mendapat jaminan [makanan], ya tidak mendapat upah. Hasilnya dijual sama Koramilnya. Jadi orang-orang ndak anu, ndak dapat apa-apa... Belum bebas saya. Sebab tiap sore mesti dikontrol kok dari Koramil Wedari... Kalo pagi ke sungai ambil krokol itu. Setelah dari Swaduk itu saya dipindah lagi ke Tayu, di Tendas. Saya ditempatkan di Tendas pada waktu itu... Itu juga kerja bakti. Pertama kali ambil pasir di sungai Tayu, ambil pasir. Padahal saya itu nggak pernah sobo (main di) kali [ketawa]. Terpaksa ambil pasir itu... Setelah itu, saya ada panggilan dari Kodim. Ada panggilan supaya saya kembali ke Kodim [ketawa]. Terus karena ada perintah ya terpaksa, itu saya sendiri itu, terpaksa saya kembali ke Kodim. Ha di Kodim itu juga dikerjabaktikan.

Kerja bakti, tapi hanya sebentar saya. Kalau hanya [ketawa] resik-resik (bersih-bersih) rumahnya ndoro-ndoro [sebutan untuk majikan Jawa] tentara itu [ketawa]. Pokoknya suruh apa ya, semaunya mereka itulah, apa kebutuhan mereka itu saya suruh mengerjakan.

Seorang tapol dari Banten, Rusyana, mengenang saat tapol-tapol di sana dipanggil untuk merenovasi masjid utama di Banten meskipun mereka dituduh atheis.

[Tapol] bikin mesjid, jalan, jembatan. Dan karena banyak juga tenaga-tenaga ahli ya, arsitek, insinyur itu banyak yang–jadi pembangunan daerah Banten itu banyak yang oleh tapol itu, termasuk mesjid, mesjid Banten ya. Yang jadi kebanggaan Banten itu. Yang merehab itu tapol.

Begitu anehnya permintaan ini bagi Rusyana hingga dengan jahilnya ia bercanda tentang Mesjid Agung di Banten, ‘kalau kau naik ke atas itu, itu ada Palu Arit di atas.’

Bukan hanya tapol yang dipekerjakan paksa oleh tentara, tapi juga mantan tapol yang sudah kembali ke rumah mereka. Rahmadin, seorang petani yang bertempat tinggal di Cipanas, Jawa Barat, dipenjarakan dua kali untuk kurang lebih 200 hari total. Tapi setelah dibebaskan di akhir 1960an, ia masih dipanggil untuk kerja paksa. Sementara tapol-tapol lain dari kecamatannya dikirim ke penjara Kebon Waru di Bandung, ke Nusakambangan, atau ke Pulau Buru, mereka yang dilepaskan lebih dini seperti Rahmadin tetap harus melayani perbudakan oleh

tentara. Setiap Senin dan Kamis, ia harus membersihkan kantor Koramil di Cianjur:

[Saya] membersihkan apa saja. Misalnya, ada gelas yang bekas mereka itu, harus bapak cuci, ya. Ada bekas rokok, puntung-puntung itu kotoran, bapak harus nyapu. Rumput-rumput bara itu, harus bapak nyapu, ya. Nyabutin rumput itu, ya gitu aja kerjanya, 'Udah selesai, kamu pulang!' Walaupun kita udah capek misalnya, udah capek, kepanasan dan sebagainya, nggak boleh pulang sebelum selesai beres-apa itu, misalnya tadi mencabutin rumput, sebelum selesai nggak boleh pulang.

Di awal 1970an, Rahmadin dan sekitar 200 orang mantan tapol di kecamatannya direkrut petugas-petugas Koramil dan pejabat pemda setempat untuk membangun jalan dan jembatan.

Yang di kampung yang dikatagorikan yang dituduh PKI, yang dituduh PKI itu, apa saja menurut kehendak pemerintah desa dan Danramil. Misalnya mau bikin jembatan, ya undang aja itu, yang disebut PKI itu, suruh bikin jembatan... Misalnya dari jam 8.00 pagi sampai jam 4.00 sore, baru boleh pulang. Terus-terus itu, sebelum selesai nggak boleh ditinggalin. Satu jembatan Jeprah, dua jembatan di Kulung Luwu. Nah, kemudian bikin jalan, dari Pasir Bumi sampai Angka, kurang lebih tiga kilometer. Bikin jalan, gali, ya, digali, dibuang tanahnya.

Tak ada imbalan pengganti tenaga tapol yang dikeluarkan: mereka tidak mendapat upah, makanan, apalagi perawatan kesehatan. Pejabat pemerintah dan

perwira militer tak berbeda pandangan dalam menjalankan sistem perbudakan ini. Seperti dituturkan Rahmadin:

Mau sakit kek, mau meninggal kek, nggak adalah, nggak ada perhatian dari pemerintah, nggak ada. Dari desa sampai camat, sampai Danramil, itu nggak ada. Dari Dan [Komandan] Kepolisian, nggak ada.

Di Jawa Tengah, kondisi para tapol sama saja. Sugondo, bekas anggota Pemuda Rakyat, ditahan pada 1965 dan dibebaskan pada 1972. Selama bertahun-tahun di tahanan, ia bekerja untuk macam-macam proyek pembangunan di Klaten. Bersama teman-temannya ia menggarap proyek tanggul untuk keperluan irigasi sawah di Desa Mbayat: 'Nah ada sungai buatan, pedot (putus) gitu kan mengairi [membanjiri] sawah dan desa. Ini tanggul, ketika pertama nglangut (tersendat-sendat).' Selama mengerjakan proyek ini, para tapol disuruh tinggal 'di rumah penduduk, dekat sungai itu, tapi rumahnya jembar (luas) itu.' Karena tentara maupun luruh desa itu tidak menyediakan jatah makan, mereka terpaksa bergantung pada penduduk desa: 'Itu kalau di Mbayat itu setelah mahal beras, ya ndak dijamin... Jadi di sana itu sistemnya di Melian Mbayat itu masyarakat disuruh bikin penakan nasi itu. Siang satu penak, sore satu penak.'[3]

Banyak jalan utama di Jawa dibangun oleh para tapol. Sambil menunggu keberangkatan menuju Nusakambangan dan/atau ke Pulau Buru, para tapol dikerahkan untuk membangun jalan berkilo-kilometer

panjangnya. Hal ini diungkapkan oleh Purwanto, bekas anggota Pemuda Rakyat di Rembang, Jawa Tengah:

Saya habis lebaran kurang lebih tiga bulan saya diambil keluar. Diambil keluar pada waktu itu terus dipindahkan ke daerah sini, kecamatan Seluke juga, eh di Pandangan. Di Pandangan dulu kita diserahkan oleh sipur [zeni tempur] untuk bekerja melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan antara Lasem sampai Sarang... Sarang sini mungkin 35 kilometer. Itu perbaikan selama kurang lebih, ya lama mungkin, ada dua atau tiga bulan, itu saya di Seluke.

Catatan pekerjaan yang harus dilakukan Purwanto selama dua tahun luar biasa beragam. Tentara memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Kabupaten untuk melakukan berbagai macam proyek. Dan yang juga mengagumkan adalah ia masih mengingat setiap kerja penindasan ini dengan jelas, setelah kurang lebih tiga puluh tahun berlalu.

Terus pindah di Sarang. Setelah pindah di Sarang saya dipindahkan mengambil batu di Sumur Tawang selama satu setengah bulan. Setelah itu saya dipindahkan lagi ke Ngandang, yaitu menggali batu bara. Jadi areng setingkul (arang batu), itu batu bara... Lalu saya dipindahkan ke Gunem untuk menebang kayu. Kayu itu namanya kayu bule kethek (kayu belang-belang seperti monyet putih) itu. Menebang demi kepentingan Kodim. Di sana selama–makan juga cari sendiri kok... Jadi makan cari sendiri. Jadi di Ngandang itu makan diberi oleh bosnya, di Ngandang.

Kalau di ngGunem itu mencari sendiri. Dengan setelah bebang kayu kita pulang membawa kayu bakar, kita pikul, kita jual. Siapa yang mau beli itu kita jual. Setelah itu kita diambil pulang ke Kodim lagi. Setelah di Kodim saya di Gudang Kapuk selama satu minggu, saya diambil diminta membantu di kantian–pada waktu itu kantin Kodim. Setelah di kantin Kodim kita berjalan satu bulan, anu, dua bulan terus saya diminta oleh Kasdimnya untuk membantu rumah tangga.

Tapol-tapol yang kerja paksa di luar tidak berani melarikan diri karena sudah mendapat ancaman dari aparat militer. Jika mereka lari, maka anggota keluarga merekalah yang menggantikannya. Situasi seperti ini diceritakan oleh Ramto, bekas pemimpin Pemuda Rakyat Jawa Tengah. Waktu pewawancara bertanya padanya, ‘Kalau kerja di luar Pak, itu kan bebas. Apa ada pikiran buat kabur?’ Ia menjawab:

Nggak. Karena ancamannya kalau kabur keluarganya yang harus mengganti. Sandra. Keluarganya yang kena, daripada keluarganya yang kena ya kita bertahan, gitu.

Ia dipindahkan dari Yogyakarta, tempat ia ditahan pada akhir 1965, ke penjara Magelang di 1968.

Saya ke Magelang, di Magelang agak bebas, keluar, kerja luar, dikerjakan ngaspal jalan dan sebagainya. Boleh dikatakan seluruh Magelang itu diaspal oleh tapol, yang mengaspal itu tapol. Perbaikan jalan itu, sampai selokan bersih dan sebagainya. Ya kita lebih senang karena dikerjakan di luar, daripada ya di dalam.

Bagi sebagian tapol, dibandingkan tinggal di sel penjara yang gelap, lembab, dan penuh sesak sepanjang hari, melakukan kerja paksa di jalanan memang masih lebih baik.

Seperti sudah kita perhatikan, baik tapol maupun mantan tapol dipaksa bekerja oleh tentara dari akhir 1960an sampai akhir 1970an. Namun, menurut Sudarna, bekas aktivis BTI yang tinggal di Desa Ciranjang, Jawa Barat, di beberapa daerah kerja paksa bagi para eks-tapol berlanjut sampai 1990an. Ia masuk penjara akhir 1965 dan bebas pada 1992. Jadi, ia tinggal di Penjara Sukamiskin selama 27 tahun. Setelah bebas, ia masih diharuskan kerja paksa oleh luruh desanya.

Setengah bulan satu kali, saya harus kerja bakti. Nggak tau alasannya itu. Setiap setengah bulan, satu kali aja, kerja bakti. Itu semua, di antara yang ditahan yang pernah dituduh G-30-S, jadi nggak, nggak saya sendiri. Yang dari Buru, yang ditahan di sini, dari Sukamiskin, semua harus kerja bakti. Itu anehnya, jalan propinsi harus dibabat sama kita [babat rumput]. Dari batas Desa Ciranjang, sampai batas Desa Cibiung. Itu anehnya. Saya memang mendengar dari kecamatan-kecamatan yang lain, di desa-desa yang lain sudah tidak ada. Tapi mengapa Desa Cibiung memang lrahnya nih yang punya kerjaan, ya, lrahnya yang kurang ngajar... [Kerja bakti berlangsung] sampai kemarin waktu kejadian itu, waktu kejadian apa, waktu reformasi.

Para tapol yang sudah mengalami kerja paksa bertahun-tahun di Pulau Buru pun tak bebas dari kewajiban ini. Ketika mereka dibebaskan dan kembali ke Jawa, mereka harus melakukan ‘kerja bakti’ di daerah masing-masing. Suparno, bekas anggota Pemuda Rakyat di Pati, diperintahkan kerja bakti oleh tentara di tingkat lokal waktu ia kembali ke rumahnya pada 1977.

Saya bebas dari Buru itu tahun 77. Jadi tanggal 20 Desember tahun 77, itu saya bebas dari Buru. Dan saya bebas dari Buru, terus kita kena wajib lapor dan kerja paksa masih. Seminggu sekali kerja paksa. Terus wajib lapor selama satu tahun. Kerja paksanya sana di Koramil, ya bersih-bersih halaman Koramil, terus di Kodim, ya bersih-bersih halaman Kodim, di CPM juga begitu. Jadi diatur bergiliran menurut kebutuhan mereka. Jadi teman-teman, istilahnya itu wajib lapor diendeg (dihentikan) sementara untuk dimintai bantuan untuk kerja.

Untuk memahami betapa kejamnya meminta Suparno melakukan kerja paksa di Pati, kita harus memahami kondisi di Pulau Buru, dari mana Suparno baru dibebaskan.

Kerja Paksa di Pulau Buru

Kerja paksa di Pulau Buru dialami oleh semua tahanan politik yang dibuang ke sana. Pulau ini mulai dihuni oleh tahanan politik sejak Agustus 1969. Semua tapol di Jawa

yang dimasukkan dalam klasifikasi Golongan B dikirim ke Pulau Buru. Sampai pertengahan 1970an, pulau ini ditinggali oleh paling tidak 11.000 orang tapol yang tersebar di 23 unit penahanan. Pemerintah berencana mempertahankan mereka di sana secara permanen dan membuat daerah itu semacam tempat penampungan orang berpenyakit lepra. Ratusan istri bersama anak-anak para tapol didorong untuk bergabung dengan suami dan bapak mereka di Pulau Buru, supaya para tapol tidak perlu kembali lagi ke daerah asal mereka masing-masing.

Ketika para tapol pertama kali tiba di Buru, pulau itu tertutup hutan belukar dan padang rumput.[4] Mereka harus membangun barak-barak penahanan mereka sendiri dari nol, seperti orang-orang primitif dari masa prasejarah. Mereka juga disuruh membangun rumah bagi Peleton Pengawal (tonwal) yang mengawasi mereka bekerja terus-menerus. Selain itu, mereka harus membangun jalan dan mengolah tanah supaya bisa ditumbuhi tanaman pangan. Selama bulan-bulan awal rombongan pertama tapol bekerja, mereka hidup dari ransum yang dibawa bersama mereka dari Jawa. Rencananya mereka segera mulai memproduksi pangan dari lahan di tempat itu sebelum ransum habis. Tapi, mengolah tanah menjadi lahan yang bisa ditanami makan waktu lama, terutama karena para tapol tidak diberi peralatan yang sesuai dan memadai. Tanah pulau itu ditumbuhi rerumputan liar yang tebal dan tumbuh subur. Pak Kamaluddin, seorang tapol dari Tasikmalaya yang

dikirim ke Buru pada 1970, mengenang bahwa ia dan teman-temannya harus membersihkan tanah dari rerumputan dengan tangan kosong: ‘Pacul, cangkulnya belum ada tangkainya, kemudian cangkulnya tumpul atau parangnya tumpul; yang parang yang besar masih tumpul, padahal dari asahannya. Jadi kita cabuti itunya itu, dengan apa, dengan tangan, si alang-alang atau kusu-kusu itu.’ Pekerjaan membuka hutan seperti ini terasa luar biasa berat karena banyak tapol yang tidak terbiasa melakukan kerja kasar. Kamaluddin, misalnya, sebelum ditangkap adalah guru SD dan mahasiswa IKIP Bandung.

Dengan ransum yang sangat terbatas–sebagian hilang dicuri petugas pengawas kamp–dan belum adanya hasil dari lahan yang mereka olah, para tapol makan apa saja yang bisa diperoleh dari lingkungan sekitar kamp. Kamaluddin menjelaskan:

Nah, segala sesuatu yang kira-kira bisa dimakan dulu itu, waktu itu kan–kalau di kapal makan nasi biasa, kalau datang ke sana bulguuur (sejenis gandum) makan itu dengan gereh (ikan asin), dengan ikan asin peda yang busuk itu. Jadi makan bulgur di sana itu, makan. Nah di sana, kemudian kalau teman-teman ada tikus, ya diambil dimakan, ada ular, ada telur cicak, makan gitu, jadi apa saja. Ada kura-kura, terus dimakan gitu, untuk menambah umur mungkin, kata orang [ketawa].

Pekerjaan yang banyak mengeluarkan energi tapol itu tidak diseimbangkan dengan makanan yang cukup,

sehingga banyak dari mereka yang menderita penyakit hepatitis, terutama tapol yang berumur 50 tahun ke atas.

Ransum yang dibagikan termasuk bulgur, yang memuakkan bagi para tapol yang terbiasa makan nasi. Bulgur diperoleh dari pemerintah Amerika Serikat yang pada saat itu kelebihan produksi. Sukartono, yang masih berumur 17 tahun ketika ditahan pada 1965, mengenang betapa sebalnya ia harus makan bulgur:

Saya di Unit 5, Unit 5 terus tahun 70 ya dikerjakan dengan paksa, dikerjakan dengan paksa. Jatah makannya itu, kalau ingatan saya itu namanya dikatakan bulgur–tapi sekarang sudah ndak pernah lihat itu, bulgur itu apa, seperti apa, sekarang itu nggak pernah lihat. Jadi bulgur itu sebenarnya bukan makanan manusia. Kalau di Amerika itu untuk makan kuda, itu sebenarnya. Tapi di situ untuk makanan para tahanan-tahanan itu, teman-teman itu, bulgur itu.

Sukartono mengingat bahwa kelompoknya, setelah tiba pada 1970, diharapkan mulai memproduksi makanan dalam waktu delapan bulan. Tapi, ransum yang ada sudah menipis sebelum delapan bulan itu berakhir.

Masa konsolidasi katanya itu delapan bulan. Jadi kita untuk membuka lahan, tanam, berhasil gitu, perhitungannya mereka seperti begitu. Tapi ternyata itu dua bulan atau tiga bulan itu ndak keluar bahan makan itu. Wah, ya kita terpaksa mengalami lapar lagi. Lapar lagi. Lapar. Pada waktu itu datang digerakkan menanam itu, singkong, waktu itu tiga bulan mroses bikin lahan itu

kan lama. Jatah dari pemerintah itu sudah nipis, singkong itu baru satu jari jempol tangan ini yang besar sejempol kaki, sudah dicabut, cabut, untuk makan. Karena di situ yang mimpin adalah militer. Jadi kalau diserahkan kepada orang-orang tahanan itu malah bagus sebenarnya, karena tahu seluk-beluknya tanaman ini harus begini-begini. Ini tidak. Tapi selalu diperintah oleh militer dan harus ditaati perintah militer itu.

Setelah menyiangi padang dari alang-alang dan pepohonan, para tapol harus menemukan cara untuk mengairi ladang. Banyak unit yang membangun bendungan di sungai terdekat dan membuat kanal untuk mengalirkan air ke ladang. Suman, bekas pemimpin redaksi Warta Bandung, menggambarkan bagaimana unit tempat ia tinggal

(Unit 4) membuat dam primitif dari bambu.

Nah, kemudian juga untuk proyek-proyek misalnya membuat irigasi bendungan, misalnya. Itu bendungan dengan peralatan yang sangat sederhana sekali ya. Itu juga satu hal, yang apa namanya, satu hal yang, ya, mengikuti sistem tradisional. Misalnya, kita pernah di Unit 4 itu membangun irigasi, itu membendung Wai Bini, Sungai Wai Bini. Itu kedalaman Wai Bini ini, dari permukaan ke dataran itu kurang lebih 2-3 meter. Jadi ini kita bagaimana menaikkan, supaya bisa masuk. Akh itu kan kita bukan ahli-ahli. Semua itu dengan, apa namanya, dengan cari cara-cara tradisional. Begini. Jadi kita bikin cerucuk (bambu yang diruncingkan) dari bambu. Bambu

kan banyak, bambu kita silang-silang itu, kemudian bambu ini dimasukkan daun-daun bambu untuk menahan air. Tapi toh tidak, tetap air ngalir. Hanya memang secara alamiah, harus ini terhalang si pasir mengendap di bawah cerucuk itu, jadi mengendap, lama-lama dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Memang tidak spontan, tidak segera terbendung, memang tetap masih ada aliran air, tapi terbendung. Tapi begitu air besar, nah, misalnya air banjir, semua habis itu, apa cerucuk-nya itu kan terbawa arus. Ah, ini kan kita musti bikin lagi, tapi paling tidak masih ada endapan, pasir tidak tergerus semua, sebab terendap. Ah, ini terus begitu sampai enam bulan terbentuk. Naik permukaan air itu naik, sehingga kita bikin masukkan ke saluran, saluran irigasinya. Sistimnya gitu. Jadi betul-betul tidak pakai bangunan apa, beton apa gitu, nggak. Jadi dengan sistem alam aja.

Jadwal harian mereka adalah bangun jam lima pagi untuk apel. Semua tapol harus dihitung untuk memastikan tak seorang pun melarikan diri. Lalu mereka akan meninggalkan barak jam enam untuk bekerja di ladang. Mereka bekerja sepanjang hari, dengan satu jam istirahat, terus-menerus dijaga oleh tonwal, dan kembali ke barak jam enam petang. Tapol-tapol yang termuda dan terkuat dikirim ke hutan untuk menebang kayu, sedangkan yang lebih tua atau lebih lemah disuruh bekerja di dapur umum di barak. Di setiap unit ada satu tapol yang berperan sebagai koordinator kerja. Ia menerima target produksi dari komandan unit. Kemudian ia akan bertemu dengan

pemimpin setiap barak (biasanya ada 10 barak dan tiap barak dihuni 50 orang tapol) dan mereka akan menentukan bagaimana kerja didelegasikan ke kelompok-kelompok tapol supaya target produksi bisa dipenuhi. Di bawah ini Suman menjelaskan metode sederhana untuk mengorganisir kerja di unitnya.

Jadi begini. Koordinator tiap malam kan membagi kerja gitu. Nanti sawah pun diberi beberapa petak gitu. Ada kan seluruhnya 50 hektar–itu yang jatah, yang harus digarap ini. Tiap unit itu 50 hektar ini minimum, untuk 500 oranglah gitu ya, 50 hektar. Nah, 50 hektar ini yang digarap oleh–seperti kalau di Unit 4, dulu, itu ada blok A, blok B, blok C gitu. Ada tiga blok. Dibagi kira-kira 15 hektar. Nah, yang di blok ini, blok A, B, C ini digabung. Nanti dari barak 1 siapa-siapa, barak 2–nggak, nggak ngelompok misalnya barak 1, ngurus ini, nggak. Kemudian nanti, yang kerja di hutan, ini diambil yang kuat-kuat kan. Yang kuat, yang muda, itu yang untuk menebang kayu yang sebesar-besar gajah gitu. Kan, itu orang yang kuat angkat juang-juang itu.

Akh itu orang yang muda-muda. Biasanya itu, yang kuat-kuat, itu yang biasanya, ya yang biasa kerja kasarlah.

Para tapol bekerja mati-matian di bawah ancaman siksa dan todongan senjata. Dan begitu kerja mereka menampakkan hasil, mereka masih harus menyerahkan sebagian besar ke petugas pengawas. Misalnya, tentara sangat ‘rakus’ dalam memperdagangkan kayu yang ditebang para tapol untuk mengisi kantong mereka

sendiri. Caranya, mereka menyuruh tapol untuk menggerga ji kayu. Setiap tapol per harinya diperintahkan menggerga ji empat bangn kayu yang kemudian diapungkan ke Sungai Wai Apo, dan sampai di Markas Komando (Mako) kemudian diangkut ke atas dan dijual oleh militer. Maksum, bekas anggota Serikat Buruh Pos dan Telekomunikasi dari Pati, menceritakan pengalamannya itu sebagai berikut:

Umumnya komendan-komendan CPM yang datang di sana itu rakus. Kita masih begitu hidupnya itu masih juga apa tegel (tega), Mas ya, tegel, diisep tulang dan dagingnya, serta darahnya di sana itu. Kita dijatah, satu pasang gergaji itu empat lembar. Tapi untuk kita, bukan untuk kita jual dan untuk kita beli garam sendiri atau gula, bukan. Tapi, untuk dikintirkan (dihanyutkan) di Wai Apo itu untuk dijual di Kaki Air [kampung/dermaga di muara Wai Apo] sana uangnya komendan yang menerima itu. Jadi umumnya tahun pertama tahun 70 sampe 78, itu komendan-komendan yang dari Pulau Buru itu pulang mesti bisa beli mobil. Mesti bisa beli mobil. Karena itu kerakusannya. Dia tidak tanggung-tanggung menjatah satu barak itu 10 orang, berarti 5 pasang gergaji kali 10 barang, berarti 50 pasang. Eh, 5, eh 10 kali 10, 100 orang untuk gergaji saja. Yang hasilnya kita tidak makan... Kadang-kadang orang suruh mbabat hutan selebar-lebarnya, tanemi kacang, cabuti kacang ada 25 hektar. Oh, kalo malam disetelkan tep (tape) sambil mretesi (memereteli dari tangkai) itu kacang. Macam sapi perahan

saja. Itu dibagari (dikarungi), yo dikenterkan Wai Apo, masuk kaki air, jadi uang untuk komendan. Itulah, jadi di sana itu masih dikrokoti balunge (digerogoti tulangnya), diisep darah, orang tahanan itu.

Petugas-petugas militer di Buru, untuk memastikan mereka bisa memperoleh panen seutuhnya, tidak memperbolehkan para tapol mengambil apa pun dari ladang. Setiap tapol dari Buru yang saya wawancarai punya cerita tentang bagaimana mereka 'mencuri' hasil kerja keras mereka sendiri. Karena para tapol ini kelaparan, mereka tidak tanggung-tanggung mengambil resiko setiap saat. Mereka menemukan metode yang cukup canggh untuk 'mencuri' makanan dan menyembunyikannya dari tonwal. Salah satu contohnya adalah cerita Sutaryono, bekas anggota PGRI non-Vak Central dari Pati, yang menggambarkan bagaimana mereka mencuri kacang tanah dari ladang:

Bekerja mendapat hasil, padi dikumpulkan, dijual oleh komandan unit. Menanam kacang, kacang hijau, kedelai, kumpulkan, panen dijual, masih disiksa oleh penopang pengawal. Sampe ingin makan namanya kacang tanah, itu dengan upaya teman-teman: cari bambu, kemudian dipotong-potong kira-kira tiga meter, kemudian ruasnya itu dideblongi (dilubangi ruasnya) begitu, sehingga nanti kan bisa sepanjang tiga meter dilubangi terus bisa. Nah, itu dimasuki kacang rebusan yang direbus di ladang, direbus di ladang. Kemudian ditutup.[5] Kalau ditanya pengawal, 'Itu untuk apa?' 'Untuk ganti anu Pak, ganti

tiang barak,’ tapi isinya adalah kacang. Kemudian dimasukkan ke barak. Kemudian cara makannya sendiri pakai cara. Mereka sambil tiduran begini, tertelungkup. Andaikata nanti ada tonwal, mereka tidak bicara. Dan kulit dikumpulkan serapi-rapinya agar mereka tidak tahu. Sebab kalau tahu mereka dipukuli dan dihancur-leburkan.

Tapol-tapol ini sebetulnya sangat marah, terutama di tahun-tahun awal mereka tiba di Buru, karena pelaparan yang dipaksakan itu. Sudah cukup buruk nasib mereka dibuang ke Pulau Buru dan dipaksa bekerja. Tetapi mungkin penderitaan itu masih bisa mereka tahankan seandainya mereka tidak dipaksa terus-menerus berada dalam keadaan kelaparan. Sudah jelas terjadi ketidakadilan luar biasa ketika mereka dibuat kelaparan, sementara makanan yang mereka hasilkan diambil dan dijual tentara. Lebih buruk lagi: sudah bekerja sedemikian keras, mereka masih sering dipukuli sebagai hukuman. Sukartono yang disebut di atas, dengan pahit mengingat bagaimana para tapol dipukuli seperti binatang liar oleh para penjaga kamp: ‘Terus 70, 71 itu prosesnya pukulan itu tidak ada hari-hari yang kosong tanpa pukulan. Jadi satu unit itu 500 orang, setiap hari itu pasti ada orang dipukuli.’

Mengherankan mengapa para tapol di Buru tidak melawan perlakuan biadab yang mereka derita lebih sering. Sebagian besar bertahan dengan menerima saja ketidakadilan dan penghinaan oleh tentara karena mereka merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ada satu kasus di

mana seorang tonwal dibunuh oleh para tapol. Pada Oktober 1972, tiga tapol di Unit 5 menyerang seorang tonwal bernama Pelda Panita Umar dan membunuhnya. Sukartono berada di Unit 5 saat pembunuhan ini terjadi dan berteman dengan seorang tapol yang ikut membunuh. Ia menggambarkan apa yang terjadi sebagai akibat kemarahan mereka terhadap situasi yang menekan mereka itu.

Ya justeru karena teman saya itu, ya karena ditindas. Ditindas, diperas, lagi kesalahan sedikit dipukuli, itu dia tidak tahan, dia tidak kuat. 'Daripada,' ya pikiran mereka, 'daripada saya dipukuli terus-terusan, dikerjapaksakan terus-terusan sama tentara-tentara itu, biar saya mati, saya harus membunuh itu tentara-tentara itu,' gitu. Mestinya begitu, karena dia itu memangnya sama tentara itu benci. Ha, karena benci ini ya, yang menyebabkan bukan kita, yang menyebabkan ya, tentara-tentara itulah yang perlakukan-perlakuan dengan teman-teman itu nggak senonoh, tanpa ada perikemanusiaan kalaupin. Terus timbulkan peristiwa.

Pada waktu itu teman saya itu bertiga. Namanya itu Sadino, Sapari, Samiono, ha itu bergerak membunuh tentara. Namanya tentaranya itu Anumertanya Pelda Panita Umar. Ha terjadilah di situ bunuh. Dibunuh oleh bertiga itu, teman-teman saya itu tadi yang saya sebutkan, ha sesudah membunuh itu kabur, itu. Teman bertiga itu kabur.

Menanggapi pembunuhan rekannya, pasukan tonwal dengan bantuan dari unit-unit lain mengamuk. Semua tapol di Unit 5 dipukuli dengan kejam.

Karena militer ya, militer itu kan begitu lah sifatnya. Jadi dia nggak mau tahu siapa yang membunuh nggak tahu. Pokoknya yang membunuh orang tahanan. Terus orang tahanan itu langsung pukuli sampai mampus. Terus pukuli.

Sukartono baru kembali ke kamp dari bekerja di hutan sekitar pukul empat 4 sore, tepat ketika pemukulan massal mencapai puncaknya. Ia dipukul segera setelah memasuki lingkungan barak.

Terus saya masuk pada itu, yang sudah datang duluan itu kan dalam latar, halaman lapangan itu, terus suruh kumpul. Orang 500, kecuali yang lari itu tiga ya, terus suruh kumpul. Kalau tentara komando pukul, itu terus dipukuli semua orang itu, orang 500 itu. Terus, deeeel.... deeel.... deeel, begitu. Terus aja pukulan. Ada yang sampai patah itu. Senjatanya untuk mukul itu ada, patah. Ada yang dari, kalau bahasa Jawanya itu duran, itu yang untuk tangkai cangkul itu lho, yang belum dipasang.

Di akhir pesta kekerasan ini, tentara berhasil membunuh sebelum tapol. Semua tapol yang berjumlah kurang lebih 500 orang terluka dan sebagian menderita patang tulang.[6]

Kamp pembuangan Pulau Buru yang bernama resmi Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) bagi para tapol, kenyataannya justru menjadi Tempat Pemanfaatan (Tefaat)

tapol. Pengalaman tapol selama di Pulau Buru telah memberi banyak keterangan mengenai, bagaimana penguasa militer memperlakukan para tahanan politik yang tidak lain adalah warga negaranya sendiri. Kerasnya, belum bel

Kerja Paksa di Sulawesi Tengah

Sebagian besar tapol asal Sulawesi Tengah, khususnya Palu, disekap di Penjara Maesa di Palu. Mereka juga diharuskan mengikuti kerja paksa yang hampir serupa dengan rekan-rekannya di Jawa dan Sumatera. Adapun kerja paksa yang dilakukan para tapol ini terbagi dalam dua pola. Pertama, mereka yang bekerja paksa di kecamatan dan tetap tinggal di rumah. Yang kedua adalah tapol yang di penjara, tetapi pada saat terbit hingga terbenamnya matahari, mereka harus dipekerjakan.

Tidak seperti di Jawa atau Sumatera, para tapol di Sulawesi Tengah segera dipekerjakan setelah mereka ditangkap. Hampir setiap tapol direkrut untuk membangun bendungan Sungai Palu setelah banjir melanda kota Palu pada 1966. Pemerintah memutuskan untuk menggunakan tenaga para tapol dalam membangun bendungan, tak pelak lagi untuk menghemat dana. Rifai, bekas salah satu pimpinan Pemuda Rakyat di Sulawesi Tengah, menceritakan: ‘Pada waktu itu menanggulangi bahaya banjir di kota Palu ini itu di Sungai Palu di sana di

jembatan pertama itu ke atas. Itu bikin tembok di situ. Itu istilahnya Komando Kali Palu.'

Ketika bekerja untuk membangun bendungan Sungai Palu, para tapol mendapatkan makanan yang minim, sementara mereka bekerja dari pukul delapan hingga empat sore. Jatah makan mereka hanya satu gelas beras. Mereka rata-rata berumur 20 hingga 50 tahun. Sedangkan mereka yang telah berusia lanjut, atau yang menolak karena alasan fisik yang tidak memadai, diharuskan bekerja di penjara untuk kepentingan tentara, misalnya menjahit seragam militer. Seperti dikatakan Rifai, 'orang yang tinggal [di penjara] orang-orang yang tua nggak bisa kerja. Selama masih bisa bekerja dikasih keluar.'

Nurwahid adalah bekas anggota CGMI yang masih berumur 20 tahun pada 1965 dan menjadi mahasiswa di IPB (Institut Pertanian Bogor). Ia kembali ke Palu pada pertengahan Oktober karena kuliah-kuliah di IPB terhenti. Sesampainya di Palu ia ditangkap dan tak lama kemudian ia sudah bekerja memikul batu di bawah 'Komando Kali Palu.' Ia mengenang paling tidak pemerintah memberinya makan. Keluhannya adalah pemerintah tidak menyediakan pakaian–dan, tentu saja, tidak membayar tapol sehingga mereka bisa membeli pakaian.

Tidak ada pernah dapat pakaian. Jadi, kita punya pakaian persiapan itu, kalau kita berjalan ya sama dengan pengemis, Pak. Karena campang-camping sudah robek ini, jadi kalau berjalan di umum itu, ya tinggal seperti orang

anu saja, karena kita tidak punya pakaian yang sopan artinya, tidak.

Tapol harus bergantung pada sanak-keluarga mereka untuk mendapat pakaian yang layak. Persoalannya, keluarga mereka bukan saja miskin, tapi juga ketakutan berhubungan dengan tapol. Banyak pula dari mereka yang takut datang ke tempat tapol bekerja, karena khawatir akan dikait-kaitkan dengan masalah tapol. Keluarga Nurwahid mengirimkan beberapa potong pakaian melalui seorang pegawai penjara yang kebetulan kawan keluarganya.

Ya pernah saya satu kali itu diberikan anu, dikirimkan satu celana. Karena saudara-saudara saya juga orang susah dan dalam keadaan yang mencekam takut, sampai dikatakan ada hubungan ini, hubungan itu. Sehingga semua keluarga takut... Tapi saya karena dititipkan satu celana, satu sarung, itu hampir satu tahun sudah. Jadi tidur malam tidak pakai baju karena pakai sudah robek lagi. Apa dipakai besok?

Pada 1966, Nurwahid dan sekelompok tapol juga dikirim ke sebuah tempat yang jauh dari desa atau kota apa pun untuk memperbaiki jembatan:

Sementara kita di Kali Palu, ada proyek lagi, perbaikan Jembatan Sakidi. Itu jalan, jalan rusak... ke sana kita ditempatkan di Sakidi karena itu jembatan sudah putus. Jadi, tidak ada lagi jalan dari Kulawi ke Palu sini... sehingga kita dikerahkan itu untuk pemasangan bronjong itu menyambung jembatan yang putus... itu dibikin di satu

tempat barak itu dekat jembatan itu tempat-tempat yang rawan itu: ularnya banyak, nyamuk malarianya luar biasa, di pinggir sungai... Di situlah ditempatkan kita dibikin satu barak untuk penempatan kita, jauh dari desa... Yaitu betul-betul pada waktu itu kita itu dikerahkan secara anu, betul dipaksa betul ya, tenaga pada waktu itu. Turun, mikul batu untuk ngisi bronjong di sekitar untuk pengamanan Jembatan Sakidi itu.

Kerja paksa ini berlangsung secara berantai dan terus-menerus. Selesai satu proyek dilanjutkan dengan proyek lainnya. Para tapol bukan sekedar tahanan, tapi lebih seperti buruh gratis yang kadang-kadang tidur dan makan di penjara. Begini Nurwahid menggambarkannya:

Begitu habis anu [proyek], masuk lagi di lembaga, dibawa lagi. Kalau begitu selesai proyek umpamanya atau pemindahan, peralihan, masuk lagi lembaga, yang entah berapa lama, satu, dua bulan itu, ya, ada lagi proyek. Itu ya, keluar lagi, dikerahkan lagi.

Tapol dipindahkan dari satu proyek ke proyek lain, dan di antara proyek-proyek itu mereka ditugaskan menjadi pembantu rumah tangga di kediaman para perwira militer. Safaruddin, bekas pemimpin Pemuda Rakyat di Donggala, masih menyimpan catatan tentang setiap jenis kerja yang harus ia kerjakan di bawah komando militer. Curriculum Vitae yang ia miliki sebagai budak militer cukup mengesankan!

Selama 12 tahun. Tapi dua belas tahun itu kita selalu dipekerjakan di pekerjaan-pekerjaan yang ditangani oleh

Korem, di antaranya... Tutup [tape] dulu, ada semua catatannya sama saya... 1966 sampai dengan 1967 proyek pemberonjongan Kali Palu, lokasi Kali Koa, itu. 1967 sampai dengan 1968 proyek perbaikan pelebaran jalan, jurusan Palu-Parigi. 1968 sampai 1969 proyek perbaikan pelebaran jalan jurusan Palu ke laut. 1969-1971 proyek pemuatan kapur bangunan-bangunan, ini dari Lilik CPM. 1971 sampai 20 Desember 1977 mengikuti kegiatan bangunan-bangunan pada proyek yang digarap oleh Proncon 132 Tadulako, Palu. Begitu. Kemudian selain dari itu, dipekerjakan juga ada rumah-rumah pribadi, jadi petugas-petugas itu. Di antaranya mencuci, kebanyakan mencuci. Cuci WC, ya, mencuci, cuci WC, itu yang banyak.

Untuk semua pekerjaan yang ia lakukan, Safaruddin tak menerima apa-apa kecuali makanan. Begitu kerja paksa berakhir pada 1977, ia tak punya tabungan sama sekali. Yang tersisa hanyalah tubuh ringkih akibat gizi yang buruk dan menjadi buruh kasar selama bertahun-tahun.

Selama bekerja di luar penjara, para tapol di Sulawesi Tengah mencari siasat bertahan hidup seperti yang dilakukan para tapol di Sumatera dan Jawa: mereka secara sembunyi-sembunyi memproduksi lebih dari yang diminta dan menjualnya ke pasar. Misalnya, Sanube, seorang petani yang pernah menjadi pimpinan PKI di tingkat kecamatan pada 1965, diperintahkan menggergaji kayu di hutan dengan sekelompok kecil tapol. Mereka diizinkan tidur di tepi hutan selama beberapa hari

sebelum kembali ke penjara dengan membawa kayu hasil penggergajian–yang akan dijual oleh perwira militer. Karena bekerja tanpa pengawasan penuh dari petugas militer, mereka berhasil menjual sebagian kayu yang mereka tebang dan menyimpan uang untuk mereka sendiri.

Berbulan-bulan kita orang di sana itu kita orang yang kerja kayu gergaji ini... Umpamanya pintar kita itu, 20 hasil pekerjaan, dibilang itu 15, jadi 5 kita jual; ya biasa gula, biasa rokok. Kemudian, biasa itu juga kita curi waktu, sebab dia orang tidak ikut sama kita orang. Bikin kayu api, baru dijual... Biasa juga kalau kami di sana kalau memang jauh diberikan tiga empat hari tidur di sana. Jadi kelima harinya harus lapor dan berapa hasil pekerjaan. Jadi tinggal pandai-pandai kami, pandai-pandai kami itu biasa. Ada 30 pakap, dibilang ya 15 pakap, kita sesuaikan juga, dibilang ada panas, hujan.[7]

Seperti sudah disampaikan di atas, hampir semua tapol di Sulawesi Tengah pada saat-saat yang berbeda diberi tugas bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah perwira militer. Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 132 Tadulako disebutkan: para tahanan politik dipekerjakan di rumah perwira dan di tempat lain agar mereka bisa bergaul dengan orang lain yang berasal bukan dari keluarga tahanan politik.[8] Pernyataan ini merupakan suatu eufemisme, bahwa kerja paksa di rumah perwira merupakan tindakan rehabilitasi, bukan sebagai eksploitasi dan isolasi dari keluarga dan lingkungannya.

Bukannya dibiarkan mencari kerja sendiri dan memperoleh imbalan untuk menghidupi keluarganya, para tapol justru harus bekerja sebagai pembantu gratis, yang jelas bukan cara terbaik untuk bergaul dengan masyarakat luas.

Sebagian besar tapol di Sulawesi Tengah memiliki tanah pertanian. Sementara mereka mendekam di penjara atau bekerja sebagai kuli di salah satu kamp, perwira militer menjarah tanah mereka dengan alasan: tanah dengan status in absentia (dalam ketidakhadiran—dalam konteks ini, si pemilik tanah). Mereka yang dituduh PKI dua kali dirampok: sementara waktu mereka dicuri untuk kerja paksa, tanahnya pun diambil. Romli, seorang petani yang bergabung dengan BTI pada 1964, menggambarkan apa yang dia saksikan di Donggala:

[Tanah tapol diambil] mulai tahun 67 itu. Artinya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, ada itu peraturan tanah itu, ditinggalkan selama berapa ya tiga tahun, peraturan itu. Tanah itu ditinggalkan, yang punya tidak pernah diolah lagi, terpaksa berhak orang lain atau siapa pun mengambilnya. Di situ dasar mereka ambil. Sebab kita sudah lama ditahan, tidak sempat lagi bekerja... mana kesempatan kerja kita, nanti pulang sore, nanti pulang sore. Ah di situ kesempatan mereka ambil itu. Bukan hanya dari ABRI, dari ABRI memang sudah ambil, dia polisi, tentaranya, pegawai sipil juga, pegawai sipil, ada yang ambil... ada dia, tapi dia kerja, atau dia sibuk apel, apel, apel. Ah di situlah kesempatan mereka.

Sebelum 65, Romli memiliki tanah sebanyak empat hektar. Tanah itu dicuri ketika ia berada di dalam penjara.

Saya punya tanah sendiri, masih tanah yang ayah punya itu. Itu empat hektar lebih, satu tempat itu. Itu polisi yang ambil, dia jadikan kebunnya. Sampai sekarang kelapa sudah 4.000 di kebun dia. Tapi kita coba tuntut, kita hanya diancam: 'Ah jangan macam-macam orang terlibat [sebutan untuk mereka yang dianggap PKI]. Mau dikasih masuk di penjara kami?' Terpaksa kita ya, biarlah.

Penerobotan tanah milik para tapol terjadi hampir serentak antara 1967 sampai pertengahan 1970an. Para keluarga tapol yang ingin mempertahankan tanah miliknya diberi stigma oleh tentara bahwa mereka akan mendirikan partai komunis baru. Keadaan ini membuat mereka lari pontang-panting, dan beberapa di antara mereka dikenakan tahanan sekitar satu hingga dua bulan, agar para sanak saudara tidak lagi berani menempati tanah-tanah tersebut.

Tapol di kamp-kamp Sulawesi Tengah bukan hanya diperintahkan kerja corvee membangun infrastruktur, tetapi juga dipaksa bergerak untuk memenangkan Golkar dalam pemilul. Menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum pertama Orde Baru pada 1971, militer memaksa semua eks-tapol dan keluarga mereka memilih Golkar. Seorang tapol, Nurman, yang menjalankan 'kerja bakti'–menggarap administrasi dan menjadi pesuruh–di kantor Koramil setempat, setuju menjalankan kampanya untuk Golkar dengan harapan dia akan dibebaskan lebih awal.

Sebelum ditahan di akhir 1965, ia adalah anggota setia Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Ia dituduh terlibat PKI karena mengajar di sekolah yang didukung PKI, yaitu Bapera (Balai Pendidikan Rakyat).

Pada waktu pemilu tahun 71, Pak, saya itu tinggal di Desa Karavana. Saya dapat panggilan, Pak, untuk memilih. Saya perlihatkan sama Koramil, Pak, 'Apa memilih diam?' Hai sudah! Kamu itu sudah anggota Koramil, di mana tentara di situ kamu. Tapi, kamu kampanye.' Dikasih sepeda saya Pak, satu, tapi sepeda bukan dikasih untuk diambil, cuma dipakai buat kampanye. Saya bilang, 'Pak, bagaimana ini mau kampanye tinggal empat hari lagi pemilu ini?' Sudah, tidak usah kamu membantah, kampanye ya. Bagaimana cara kamu supaya orang-orang wajib lapor, di Kecamatan Dolo Timur semua harus mendukung kepada Golkar.'

Nurman pergi dari satu desa ke desa lain dengan mengendarai sepeda pinjaman itu dan memanggil kawan-kawan eks-tapol yang masih berstatus wajib lapor. Strategi yang ia pakai adalah membujuk kawan-kawannya mencari 10 orang lain untuk memilih Golkar; ia menyebutnya strategi 'satu sepuluh'. Dan ia mengancam mereka bahwa Koramil akan tahu partai apa yang mereka pilih karena kertas suara untuk para eks-tapol sudah diberi tanda rahasia.

Baru saya dikasih sepeda. Saya dijatahkan Langaleso, kota Lendau, kota Pulu, Karavana, Soulove, Tuva, ini enam desa. Saya bilang, 'Siap Pak!' Sudah saya masuk dulu ke

Langaleso, Pak. Saya masuk ke Langaleso saya panggil teman-teman, panggil 10 orang, saya undang. Ha teman-teman saya bilang begini, ‘Kita kerja sama. Kawan-kawan ini saya panggil ke sini untuk kerja sama. Jadi saya butuhkan kawan-kawan punya bantuan supaya Bapak-bapak harus kampanye. Satu orang harus dapat 10’, saya bilang begitu. Satu orang harus dapat 10. Jadi, caranya ‘satu sepuluh’. Nah ini saya panggil penuh 10 orang. ‘Jadi kalau di sini kita punya keluarga jangan sampai tusuk partai lain, semua Golkar, itu dari Koramil ya. Ini tahu sendiri ada kodenya nanti’, saya bilang begitu... Kita sudah catat yang 10 orang ini kita sudah catat, dalam buku saya, tanda tangan.

Ternyata, walaupun hasil perolehan suara Golkar di daerahnya mengagumkan, Nurman tidak dibebaskan dari penjara dan kerja paksa sampai 1978:

Begitu di tahun 71 itu, sudah dikatakan, ‘Ha Nurman, sudah bisa bebaslah. Sudah. Kamu sudah tidak lama lagi bebas.’ Tapi buktinya tahun 78 baru bebas, lebih dahulu di Pulau Buru baru saya. Saya bilang ini ya begitulah, pengharapan-pengharapan diberikan pada kita. Ha ini.

Meskipun dalam aturan pemerintah tapol tidak diperbolehkan memilih, militer ingin mereka memilih untuk mendongkrak suara Golkar. Hal ini dikemukakan oleh Syalim, bekas anggota Pemuda Rakyat yang ayahnya adalah bekas pimpinan BTI di Palu:

Itu begitu Pemilihan Umum tahun 71, tahun 71, akh itu seluruh kader-kader partai, teman-teman itu dikasih

keluar, cuma kita waktu itu yang tidak dikasih keluar, pimpinan-pimpinan daerah itu. Dengan pimpinan-pimpinan kecamatan itu dikasih ke luar, karena mereka yang punya massa, yaitu disuruh, pokoknya dibawa oleh Korem, di tempat, atau militer yang bawa, kampanya, supaya tusuk Golkar... Ah itulah yang dia orang giring untuk kampanya itu, perintahkan itu massa itu yang ada di kecamatan supaya menusuk Golkar semua. Jadi lahirnya Golkar itu sebenarnya dipaksakan, karena orang-orang PKI juga yang mereka paksakan untuk masuk Golkar itu.

Segera setelah pemilu, banyak tapol di sekitar Palu dikarantina selama empat hari di sebuah gudang kopra tua. Korem tampaknya ingin memastikan mereka tidak akan mensabotase proses penghitungan suara. Romli kembali menjelaskan:

Dari tahun 71 menghadapi Pemilu 71 satu bulan lagi pemilihan itu kita sudah diberikan pekerjaan luar biasa, artinya untuk membantu kantor-kantor pemerintah... tapi kita tidak ada dikasih kerja satu hari pol, hanya jam 10.00 sebab itu persiapan pemilu toh. Akh sesudah waktunya sudah pemilihan, sudah ada instruksi dari Palu bahwa tapol itu, tahanan politik itu, ditahan disatukan tempat, digudangkan, ada satu gudang kopra di sana itu, di situ, disatukan di situ kita. Kita di situ, itu ada 600 barangkali, dengan kantornya dua itu. Nah, di situ kita di jamin oleh pemerintah, beras, beras itu dikasih bekal kita di sana itu pertama kita bawa satu ton itu. Akh kita di sana empat hari, empat malam. Nanti sesudah selesai perhitungan

suara, baru kita dibebaskan. Artinya tiga hari lagi, eh dua hari lagi pemilihan, sudah ada kita di sana. Akh dijamin kita di situ. Ada dari Palu itu, dari Korem yang datang itu membawakan kita punya jaminan beras, beras dengan gula, itu saja.

Kerja paksa secara formal berhenti di Sulawesi Tengah pada 1979. Tetapi, kerja paksa secara informal terus berlanjut hingga jatuhnya diktator Soeharto. Sanube dari Donggala, misalnya, dibebaskan pada 1978. (Sebenarnya, surat pembebasannya dikeluarkan pada 1977, tapi penguasa militer lokal rupanya ingin memanfaatkan tenaganya secara cuma-cuma untuk jangka waktu lebih panjang. Mereka tidak memberikan surat itu dan membebaskannya sampai setahun sesudahnya.) Setelah dibebaskan dari penjara, ia harus wajib lapor, dan setiap kali ia melapor ke Koramil setempat, dia dan tapol-tapol lain disuruh lagi bekerja tanpa upah selama sehari penuh. Bahkan setelah sistem wajib lapor ini perlahan-lahan ditiadakan, ia masih sering dipanggil untuk melakukan kerja gratis dan untuk keuntungan pejabat-pejabat lokal. Sanube adalah salah satu budak semacam itu di desanya.

Akh sewaktu-waktu diperlukan tenaga untuk hari-hari nasional, maka kami dipanggil suruh bekerja, pembersihan… Itu bukan hanya sewaktu-waktu kok. Setiap hari nasional. Dan bukan hanya kami, kawan-kawan di kampung ini, itu utamanya. Jangankan hari-hari nasional, pesta pribadi mereka, umpamanya camat, polisi, eh tentara, eh jaksa, bahkan ada sahabat-sahabat mereka

itu, dan pemerintah minta ini, minta tolong ambil tenaga dari wajib lapor.

Walaupun Sanube masih punya waktu untuk mencari nafkah, tugas-tugas tambahan ini tetap saja mengganggu pekerjaannya sehari-hari. Selain itu, perintah kerja paksa ini menjadi semacam metode penghinaan permanen karena hanya eks-tapol yang dipanggil untuk bekerja. Ini berlangsung sampai rezim Soeharto berakhir.

Sewaktu-waktu kita diberikan juga kesempatan mencari nafkah, tapi sewaktu-waktu dia orang perlukan, babikin (membuat) pintu gerbang [di Koramil]. Dan khusus orang-orang terlibat, dan tidak ada dicampur orang lain. Dan kalau di masyarakat wajib lapor di desa, di kampung, kalau kerja bakti itu tidak bisa bersatu dengan umum mereka dipisahkan. Nanti di era reformasi ini baru tidak ada lagi dia orang. Nanti sesudah peralihan kekuasaan, nanti reformasi pemerintahan, reformasi ini, baru tidak ada dia orang.

Yang menyakitkan pula, para tapol berulangkali dipanggil aparat keamanan untuk difoto tanpa alasan yang jelas. Tentara di Palu cukup kreatif menciptakan metode mengeruk keuntungan dari orang-orang yang pernah mereka jadikan tapol, dan mungkin juga untuk tetap mengingatkan mereka bahwa mereka diawasi terus-menerus. Alatnya sederhana saja, sebuah kamera. Nurdin, anak seorang anggota PKI yang dipenjarakan dari 1965-67, mengingat kembali bagaimana seluruh keluarganya

pernah dipaksa berfoto di depan kamera tentara pada 1980an:

Salah sedikit, orang-orang terlibat difoto lagi, 10 ribu satu orang. Mereka cari uang. Sehingga difoto itu, ya saya sudah anu, difoto taruh papan di badan sini, pokoknya kiri, kanan, belakang, semuanya difoto, samping difoto gambaran PKI... Saya tidak tau itu, untuk apa itu, mungkin mereka cuma minta dana barangkali... Mama juga ikut difoto. Sedangkan kakak saya Gaffar ini ikut terlibat juga, difoto juga dia. Padahal belum bisa terlibat dia, karena tahun 65 dia masih kelas enam SD. Sudah terhitung terlibat G-30-S juga dia, dilibatkan semua. Jadi, berapa orang dalam rumah ini, semua papa yang tanggung itu, difoto. Kakak saya yang perempuan namanya, Indobolce, Gaffar, mama, papa, mereka empat. Lainnya ada punya anak-mantu satu namanya Usnur, semua papa tanggung dulu, dibayar difoto, satu kali foto 10 ribu. Kalau lima orang 50 ribu. Jadi, bayangkan saja satu kecamatan di Dolo ini, berapa orang terlibat di kecamatan Dolo? Semua difoto, 10 ribu satu orang. Tidak cukup tiga bulan, gambar lagi, foto lagi, ganti, ganti lagi, foto lagi, uang lagi. Selama belum ada dua puluh tahun itu, begitu terus. PKI lagi membunuh, foto lagi orang terlibat, di kecamatan. Di mana kita bukan susah. Jadi selama 20 tahun itu orang terlibat di Kecamatan Dolo begitu terus, kasihan foto, foto, foto. Kalau bukan difoto lagi, kerja lagi, di mana ada proyek ke sana lagi mereka.

Para tapol ini, tanpa kekuatan, tanpa tempat untuk mengadu, terpaksa membayar ongkos foto, padahal mereka tahu bahwa kamera yang digunakan tak berisi film!

Penutup

Kerja paksa yang berlaku di Sumatera, Jawa, Pulau Buru, dan Sulawesi adalah kejahatan serius terhadap tahanan-tahanan politik di masa lalu. Ini bertentangan dengan pernyataan umum hak-hak asasi manusia, khususnya pasal 4: 'Tiada seorang juga pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambatan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.' Aparat militer sudah memperlakukan para tapol ini seperti budak belian. Rezim Soeharto melakukan dua kejahatan sekaligus: pertama, menahan ratusan ribu orang selama bertahun-tahun tanpa dakwaan dan proses hukum yang jelas; kedua, memaksa para tahanan itu bekerja tanpa upah. Para perwira militer bisa sewenang-wenang menggunakan tenaga tapol untuk keperluan apa saja, sekaligus merampok hasil jerih payah mereka untuk kepentingan institusi dan pribadinya.

Kerja paksa tapol berdampak pada penghancuran fisik mereka secara bertahap. Untuk memperoleh makanan sehari-hari pun mereka bergantung pada kreativitas mereka sendiri. Seakan-akan pemerintah Orde Baru

dengan sengaja ingin membuat para tapol tersebut mati kelaparan secara perlahan-lahan. Banyak eks-tapol yang sampai saat ini masih mengidap penyakit akibat melakukan kerja paksa tanpa makanan yang cukup. Isteri dan anak-anak mereka harus bertahan hidup sementara pencari nafkah utama dalam keluarga ditahan bertahun-tahun. Pada saat bersamaan, tak jarang mereka juga harus menunjang kelangsungan hidup anggota keluarga mereka yang ditahan di kamp-kamp kerja paksa itu. Mereka harus menyediakan makanan, pakaian, dan uang. Dengan kata lain keluarga para tapol harus membayar agar saudara-saudara mereka dapat dieksploitasi sepuasnya oleh militer.

'Proyek kolosal' kerja paksa tapol dari rezim Orde Baru terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari dua puluh tahun basis ekonomi tapol dan keluarganya dihancurkan, sehingga bentuk perjuangan mereka adalah usaha untuk bangkit dari keterperosokan ekonomi dan melupakan masalah-masalah politik kekuasaan. Bagi mereka, politik adalah bagaimana bisa hidup mandiri dalam hal menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Tiga hal inilah yang diabaikan rezim Orde Baru.

Dari cerita-cerita tapol di atas tampak bahwa militer berusaha menggunakan sistem kerja paksa ini selama mungkin. Sistem ini memang tidak ditetapkan secara formal. Tak seorang pun tapol yang pernah diberitahu kapan masa kerja paksa mereka dimulai dan berakhir.

Pengadilan pun tidak memberikan keputusan mengenai berapa lama orang-orang ini harus ditahan di penjara. Militer dengan begitu memberikan hukuman sewenang-wenang terhadap sekelompok besar orang di Indonesia atas kehendaknya sendiri. Hal ini bisa berlangsung tanpa ada kebijakan dari penguasa militer pusat, tetapi lebih ditentukan oleh kebijakan penguasa lokal. Kebanyakan tapol tidak mengetahui bahwa kerja paksa ini akan selesai pada akhir 1980an. Para tapol menduga bahwa mereka akan dikenakan hukuman kerja paksa sepanjang hidupnya, atau bahkan ada yang menduga bahwa kerja paksa merupakan salah satu cara pemberian hukuman mati bagi mereka. Bahwa mereka berusaha bertahan hidup, di tengah penindasan dan ketidaktahuan, selayaknya dicatat sebagai salah satu bentuk perjuangan memanusia di hadapan kebiadaban.

Kalaupun di dalam negeri rezim Soeharto boleh dikatakan tidak mendapat perlawanan yang berarti atas pemberlakuan kerja paksa ini, mereka menghadapi tekanan kuat dari pemerintah asing dan lembaga internasional. Perlu dicatat bahwa salah satu faktor yang melatari pembebasan para tapol adalah tekanan internasional pada 1970an. Dengan mendirikan Pulau Buru sebagai kamp kerja paksa bagi para tapol, rezim Orde Baru sesungguhnya memperlihatkan bahwa mereka membuat sistem perbudakan baru. Pada 1976, Indonesia terancam akan diskors dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Jenewa karena masalah ini.[9] Tapi

rezim Soeharto berhasil mengatasinya dengan berjanji bahwa para tapol akan dibebaskan dalam waktu dua tahun.[10]

Menurut saya, kerja paksa yang dilakukan para tapol tidak bisa dianggap sepele atau semacam catatan kaki dalam kisah pembangunan ekonomi di masa Soeharto. Pengerahan tenaga kerja paksa ini sesungguhnya mencerminkan hakekat era pembangunan ekonomi Soeharto. Pembangunan itu dipaksakan terhadap masyarakat dari atas dan berakibat meluasnya ketidakadilan. Pemerintah secara paksa merampas milik rakyat untuk proyek pembangunan dan militer menindas semua perlawanan terhadap proyek semacam itu. Dengan melihat fakta bahwa militer memaksa para tahanan untuk bekerja tanpa bayaran, kita bisa menangkap apa yang ada di benak rezim Soeharto: mereka pada dasarnya tidak jauh berbeda dari pikiran pemerintah Jepang saat menduduki Indonesia dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Rezim Soeharto bersifat parasit, yang hanya mungkin bertahan hidup sekian lama dengan merampas kerja, tanah, aset, dan uang milik rakyat pekerja. Soekarno pernah menyatakan bahwa Indonesia menjadi bangsa kuli, dan kuli di antara bangsa-bangsa. Kediktatoran Soeharto, dengan strategi pembangunan yang dipaksakan dan pemerintahan kleptokratik, memastikan bahwa pola dari zaman kolonial ini tetap bertahan. Kerja paksa yang dibebankan kepada para tapol

adalah sebuah gambaran dari watak umum strategi rezim ini dalam membangun perekonomian.

Daftar Wawancara

1. Daryono, Pati, Jawa Tengah, 5 September 2000
2. Kamaluddin, Tasikmalaya, Jawa Barat, 11 April 2001
3. Maksum, Pati, Jawa Tengah, 4 September 2000
4. Ngatmin, Batu Lungguh, Lampung Selatan, 15 Maret 2001
5. Nurdin, Palu, Sulawesi Tengah, 20 Januari 2001
6. Nurman, Amaranta, Sulawesi Tengah, 20 Januari 2001
7. Nurwahid, Parigi, Sulawesi Tengah, 19 Januari 2001
8. Purwanto, Rembang, Jawa Tengah, 9 September 2000
9. Rahmadin, Cipanas, Jawa Barat, 16 Maret 2001
10. Ramto, Yogyakarta, 12 Juli 2000
11. Rifai, Palu, Sulawesi Tengah, 17 Januari 2001
12. Rojali, Umbul Janda, Lampung, 27 Februari 2001
13. Romli, Donggala, Sulawesi Tengah, 24 Januari 2001
14. Rusyana, Gunung Putri, Jawa Barat, 11 Juli 2001
15. Safaruddin, Palu, Sulawesi Tengah, 24 Januari 2001
16. Santo Haryadi, Lampung, 25 Februari 2001
17. Sanube, Donggala, Sulawesi Tengah, 23 Januari 2001
18. Sudarna, Ciranjang, Jawa Barat, 15 Maret 2001
19. Sugondo, Klaten, Jawa Tengah, 23 Juli 2000
20. Sukartono, Pati, Jawa Tengah, 5 September 2000
21. Suman, Tasikmalaya, Jawa Barat, 16 April 2001
22. Suparno, Pati, Jawa Tengah, 7 September 2000

23. Suratna, Cipanas, Jawa Barat, 15 Maret 2001
24. Sutaryono, Pati, Jawa Tengah, 5 September 2000
25. Syalim, Palu, Sulawesi Tengah, 25 Januari 2001

---

[1] M.D. Poesponegoro and N. Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, vol. VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 37.
[2] Tentang Blitar Selatan, lihat pula esai André Liem dalam buku ini.
[3] penakan : bungkusan dari daun pisang yang diberi penutup dan dikunci lipatan pada dua ujungnya dengan lidi.
[4] Luas Pulau Buru seluruhnya 9.100 kilometer persegi atau 910.000 hektar. Di antaranya yang merupakan kawasan Instalasi Rehabilitasi Pulau Buru (selanjutnya disebut Inrehab Buru) meliputi areal 2.350 kilometer persegi atau 235.000 hektar. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) No. 013/KOPKAM/V/1974 tanggal 11 Mei 1974.
[5] Keterangan tambahan dari Hersri Setiawan: 'Bambu dilubangi ruasnya sehingga bambu yang panjang itu bisa menjadi tabung panjang, dan dengan begitu bisa diisi beras, kacang, kedelai, gula, dll. curian lebih banyak. Caranya: pada satu ujungnya diruncingi seperti take-ari atau bambu runcing, dan pada ujung lain dipotong tepat di bawah ruas yang dibiarkan tidak dilubangi. Melalui ujungnya yang runcing itu, jika tapol korve dengan gerobak, isi muatan dalam karung kami 'sedot' ke dalam tabung-tabung itu! Kalau mencurinya di ladang, tinggal mengisinya ketika tonwal sedang meleng.' Korespondensi surel (surat elektronik), 24 Desember 2003.
[6] Cerita ini berulang dalam kisah Sutaryono, tapol lain dari Unit 5. Juga, lihat sketsa tentang makam sebelas tapol yang terbunuh di bagian akhir buku ini, "Sketsa Gumelar."
[7] pakap : istilah atau sandi yang sering digunakan para tapol pada saat itu. Istilah ini berasal dari kata pakapande (bahasa Kaili) yang berarti harus pandai bila bertemu atau berhadapan dengan tentara. Misalnya, jika mereka diperintahkan tentara untuk mencari kayu bakar di hutan sebanyak 30 ikat per orang, mereka akan laporkan bahwa mereka hanya berhasil mendapatkan 15 ikat saja. Separonya mereka berikan ke keluarga mereka sendiri. Kalau ditanyai tentara mengapa mereka tidak berhasil mengumpulkan lebih banyak, para tapol mengatakan, 'Itu adalah karena pengaruh hujan dan terik

matahari.’ Informasi dari Ewin, LBH Bantaya-Palu, lewat korespondensi surel, 9 Januari 2004.

[8] Periksa berkas tertulis komando Korem Tadulako mengenai rehabilitasi para tahanan politik, 5 Oktober 1978.

[9] Tapol, *Treatment of Indonesian Political Prisoners: Forced Labour and Transmigration* (London, 1978).

[10] “Setelah Wawancara Sudomo,” *Tempo*, 10 Juli 1976, h. 7.

PERJUANGAN BERSENJATA PKI DI BLITAR SELATAN DAN OPERASI TRISULA

André Liem

Ketika militer di bawah pimpinan Soeharto mulai menangkapi dan membunuh ratusan ribu orang di seluruh Indonesia pada 1965, beberapa pemimpin PKI yang selamat memutuskan bahwa partai harus melawan. Padahal sebelum G-30-S terjadi, partai tidak punya rencana melancarkan perjuangan bersenjata. PKI sangat dekat dengan Presiden Sukarno dan bekerja dalam sistem politik yang berlaku. Baru setelah dituduh mendalangi G-30-S dan kemudian dilarang, partai di bawah pimpinan Sudisman, yang menggantikan D. N. Aidit yang sudah ditembak mati, memutuskan untuk mengubah strateginya. Selama 1966, Sudisman membuat strategi baru yang didasarkan pada prinsip perjuangan bersenjata. Sebuah buku yang diterbitkan Kodam Brawijaya secara tepat menjelaskan bahwa strategi perjuangan bersenjata lebih merupakan reaksi terhadap represi dan upaya PKI untuk mempertahankan diri:

Akibat daripada lebih intensipnya penumpasan-penumpasan G-30-S/PKI oleh alat-alat kekuatan Negara bersama-sama rakyat, maka pada akhirnya para pimpinan-pimpinan PKI beserta kader-kader mereka yang belum dapat ditangkap telah banyak melakukan pemindahan tempat-tempat sembunyi mereka untuk menyelamatkan diri agar dapat mengkonsolidir kembali partainya secara ilegal. Dalam rangka konsolidasi itulah, maka para pimpinan-pimpinan yang masih dapat menyelamatkan diri, baik dari tingkat pusat maupun daerah, telah membuat evaluasi tentang daerah-daerah manakah yang kiranya tepat dapat dijadikan proyek basis untuk melaksanakan taktik dan strategi PKI Gaya Baru dengan dalih ajaran Mao Tse-tung yang terkenal 'Dari Desa Mengepung Kota.'[1]

terakhir untuk membangun perlawanan saat hampir semua anggota PKI mendekam di penjara atau tergeletak.

melakukan persiapan apa pun untuk menjadikan wilayah itu sebagai basis perjuangan bersenjata sampai awal 1967. Menurut versi resmi rezim Soeharto, partai baru mulai membentuk kompro (Komite Proyek Basis) di Blitar Selatan pada Oktober 1967.[2]

Untuk menyerang pendukung PKI yang menjadikan Blitar Selatan sebagai basis perjuangan bersenjata, Kodam Brawijaya pada 1968 mengerahkan ribuan pasukan dengan peralatan tempur. Operasi militer di Blitar Selatan yang bernama Operasi Trisula ini boleh dibilang sukses kalau kita melihat kekuatan tempur yang digunakan dan kecepatan pasukan pemerintah mematahkan gerakan

perlawanan PKI. Merujuk catatan resmi tentang hasil-hasil dari operasi ini, sejak penyerangan secara efektif dimulai pada Mei sampai dengan Juli, pasukan pemerintah Soeharto berhasil menangkap 257 orang, menembak mati beberapa tokoh-tokoh kunci, dan menyita sejumlah senjata api yang digunakan dalam gerakan perlawanan di Blitar Selatan.[3]

Sejauh ini, informasi mengenai kejadian di Blitar Selatan hampir seluruhnya berpijak pada keterangan militer. Surat kabar dan sumber informasi lainnya saat itu sudah sepenuhnya dikontrol oleh militer. Versi militer dalam beberapa hal ada benarnya, tapi jelas tidak mencakup keseluruhan cerita. Untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu, saya berkunjung ke Blitar Selatan dan mewawancarai sejumlah orang di sana. Saya ingin tahu apa yang mereka ingat, dan menemukan banyak cerita mengenai perjuangan bersenjata PKI dan represi yang dilakukan Angkatan Darat, yang tidak masuk dalam catatan sejarah resmi.

Dalam tulisan ini, saya ingin mengemukakan beberapa hal berdasarkan wawancara sejarah lisan yang saya lakukan di Blitar Selatan. Pertama, bahwa saat Operasi Trisula dimulai pertengahan 1968, kader dan pendukung setia PKI baru memasuki tahap persiapan dan belum memulai perjuangan bersenjata yang sesungguhnya. Mereka masih sibuk dengan perjuangan untuk bertahan hidup di wilayah yang begitu miskin. Seperti yang diungkap catatan Angkatan Darat, mereka menggunakan

strategi Maoisme. Mereka bermaksud melancarkan perjuangan bersenjata yang berbasis di desa. Tapi dalam prakteknya, mereka tidak berbuat banyak di Blitar Selatan dan belum mencapai kemajuan berarti dalam upaya tersebut. Di dalam partai sendiri ada banyak orang yang tidak setuju dengan strategi menggunakan Blitar Selatan sebagai basis perjuangan bersenjata. Mereka menolak meninggalkan kota-kota dan menjadi gerilyawan di sana. Anggota yang selamat dan para pemimpin partai tidak sepenuhnya mendukung strategi Maois tersebut.

Kedua, Angkatan Darat tidak hanya memerangi pendukung PKI ketika memasuki Blitar Selatan. Walaupun berusaha tampil sebagai pelindung rakyat kecil dari terorisme PKI, Angkatan Darat menganggap semua penduduk Blitar Selatan adalah musuh. Keberhasilan Angkatan Darat mengalahkan pejuang PKI ternyata mahal harganya: penduduk desa yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kekerasan militer. Operasi Trisula adalah perang antigerilya pertama yang dilancarkan militer Indonesia pasca-1965 di bawah pimpinan Soeharto. Pengorbanan orang yang tidak ikut bertempur (non-combatants) menjadi pola yang terus berulang dalam operasi antigerilya di Timor Leste, Papua Barat, dan Aceh.

Ketiga, versi Angkatan Darat mengenai penggal sejarah itu tidak berbicara apa pun mengenai kejahatan yang terjadi selama operasi itu. Saya menemukan bukti-bukti di Blitar Selatan bahwa Angkatan Darat mengeksekusi para tahanan dan mencampakkan para korban di dalam

kuburan-kuburan massal. Kita perlu melakukan penelitian lebih jauh untuk menentukan detil-detil pembantaian tersebut. Tempat-tempat yang dikaim sebagai kuburan massal oleh penduduk setempat perlu dibongkar oleh ahli forensik yang kompeten. Penggalian kuburan massal di Lorejo, Kecamatan Bakung, baru-baru ini adalah langkah awal yang tepat.[4]

Penulisan ini sepenuhnya mengandalkan wawancara yang saya lakukan selama tahun 2000 di Jawa Tengah dan Timur, serta beberapa dokumen militer mengenai Operasi Trisula sebagai perbandingan. Saya juga mendengarkan sejumlah wawancara yang dibuat teman-teman saya dengan bekas pemimpin PKI lain yang juga terlibat dalam peristiwa Blitar Selatan. Melalui wawancara-wawancara tersebut saya bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai apa yang terjadi sekaligus menyelami pikiran dan perasaan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Blitar Selatan

Blitar Selatan adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar, yang lama dikenal sebagai daerah miskin di Jawa Timur. Seperti daerah lainnya, kesuburan tanahnya sangat beragam; ada beberapa tempat yang cukup baik untuk dijadikan sawah, sementara lainnya sama sekali kering. Mayoritas penduduknya hidup dari pertanian dan peternakan, sementara industri dan

perdagangan masih sangat terbatas. Mereka mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menyimpan sebagian besar sebagai persediaan pangan, sementara menjual kelebihannya ke pasar. Beberapa keluarga yang cukup berhasil biasanya memiliki sejumlah ternak seperti kambing atau sapi yang mereka anggap sebagai ‘celengan’ (tabungan) yang sewaktu-waktu dapat dijual jika mengalami kekurangan.

Keadaan ini tidak berubah selama puluhan tahun. Sebelum 1965, Blitar Selatan adalah daerah yang terbelakang dan tidak banyak diperhatikan. Di zaman Belanda pun perkebunan besar tidak menjangkau wilayah ini, dan sepertinya sengaja dibiarkan terbengkalai. Beberapa pejabat bahkan menyebutnya sarang perampok yang sulit dan memang tidak perlu dijangkau. Selama perang kemerdekaan Blitar Selatan sering menjadi tempat perlindungan gerilyawan republik seperti Pasukan Brantas yang dipimpin seseorang bernama Nata. Ibu Andhika, yang sejak 1940an tinggal di wilayah itu, mengenang:

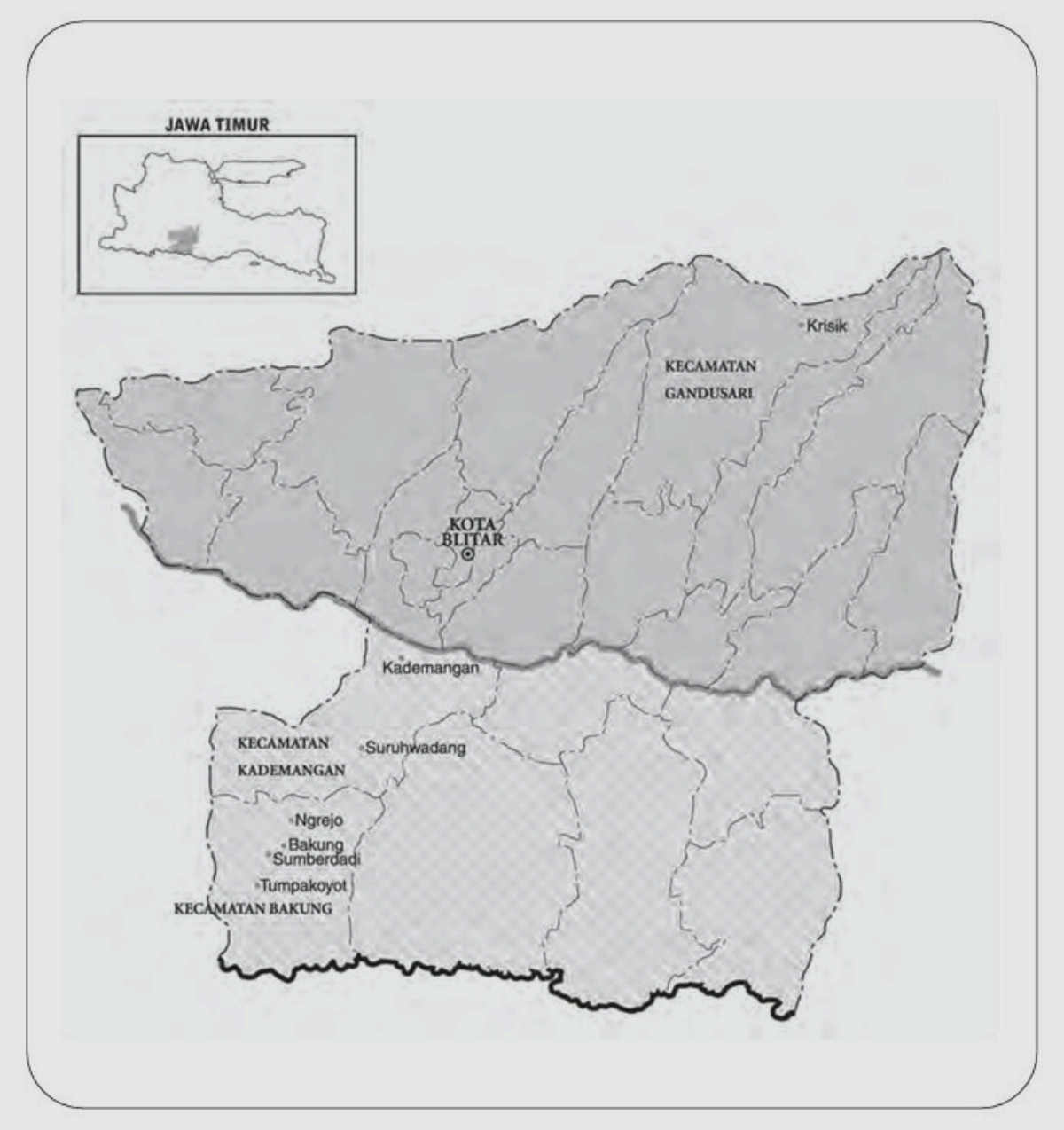
Saya sudah rumah tangga, tahun 48 itu baru. Saya kan usia 17 tahun sudah kawin, tahun 47. Ya, 48 saya punya anak. Anak saya masih satu lalu, tapi meninggal karena lari-lari waktu agresi itu lho. Ya kan terus ngungsi-ngungsi, kan hidupnya ndak karuan, hidupnya ke gunung juga he-eeng. Meninggal anak yang pertama, yang lahir 48 itu. Namanya Agrariani, waktu itu kan adanya Undang-undang Agraria... Ya, Undang-undang Agraria. Itu yang memberi nama juga Pak Nata itu tokoh perjuangan... Ya

Pak Nata, orang Sunda... Pak Noto kalau di sini ya [tertawa]... Orang Blitar to, dia hidupnya di Blitar, kenanya di Blitar Selatan waktu ngungsi-ngungsi, dia kan ada Pasukan Brantas yang melawan Belanda... Ya Pasukan Brantas yang dipimpin Pak Nata melawan Belanda yang datang agresi itu. Jadi rakyat, pasukan rakyat itu he-eeng... Tentara rakyat, bukan dari tentara asli, he-eeng. Lha kalau bapaknya anak-anak memang tentara, tetapi juga ikut di Brantas itu.

Pada Maret 1948, terjadi pertentangan antara pemerintah pusat dan laskar-laskar rakyat yang menentang Program Reorganisasi dan Rasionalisasi.[5] Alasannya, program itu berarti melucuti kekuatan rakyat bersenjata dan menciutkannya sehingga tercipta tentara yang 'profesional.' Ketegangan antara laskar dan pasukan TNI reguler terus berlanjut sampai bulan-bulan berikutnya. Pada awal September, terjadi pertempuran di Solo antara laskar Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dengan Divisi Siliwangi yang dipimpin perwira eks-KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Rewang,[6] yang bergabung dengan Pesindo di Solo di masa itu mengatakan:

Persetujuan seperti Linggarjati isinya lebih merugikan karena ada tuntutan TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang berada di kantong-kantong yang diduduki oleh Belanda, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur harus ditarik keluar dari kantong-kantong itu. Ini berarti mensahkan wilayah-wilayah Republik yang berada di dalam

pendudukan Belanda. Dengan itu terjadi yang disebut hijrah. Jadi tentara Siliwangi yang berada di kantong-kantong daerah Jawa Barat ditarik masuk Jawa Tengah, masuk daerah Republik. Begitu juga yang di Jawa Timur. Ini lebih merugikan lagi karena kita kehilangan basis-basis untuk melawan di daerah yang diduduki oleh Belanda. Saya masih ingat waktu Siliwangi masuk Solo, ya masuk itu karena resmi toh, itu resmi persetujuan dengan Belanda tadi, ditampung di kamp-kamp yang disediakan. Nah, kemudian konflik-konflik terjadi dengan tentara setempat. Dan akhirnya dalam peristiwa Madiun itu, Siliwangi menjadi pemukul pemerintah Hatta.



Peta Blitar Selatan

Puncak dari konflik ini terwujud dalam Peristiwa Madiun pada September 1948, saat kekuatan kiri mengambil alih kota dan mengumumkan penolakan mereka terhadap program rasionalisasi dan berbagai kompromi dengan pihak Belanda. Mohammad Hatta, yang

menjabat sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan, menggunakan Peristiwa Madiun untuk melancarkan serangan umum terhadap kekuatan kiri. Pertempuran antara TNI dengan laskar rakyat merembet ke beberapa kota, seperti Tulungagung, Yogyakarta, dan Blitar. Pengejaran dilakukan terhadap aktivis Front Demokratik Rakyat (FDR) dan Pesindo, sampai kemudian terjadi agresi Belanda II. Di Blitar, Pak Nata dan Wakilnya dalam Pasukan Brantas. Peristipuran, sementara sejumlah aktivis kiri ditangkap. Ibu Andhika mengatakan bahwa ayahnya, Pak Haji Mansyur, seorang sosialis yang aktif dalam BTI (Barisan Tani Indonesia), ditangkap di Blitar saat pasukan pemerintah menggila para pembangkang setelah peristiwa Madiun.

[Bapak saya] Ya, katut (terikut). Katut [di Blitar]. Sebetulnya [bapak] ndak ke mana-mana, ya di rumah [ketawa]. Ditangkap di rumah begitu saja... Ya di Blitar ndak ada apa-apa. Di Blitar ndak ada apa-apa, tapi ditangkap begitu saja. Waktu itu bapak ditahan di pabrik rokok... di Blitar. Lalu Agresi datang [Desember 1948]...He-eeng. Iya larinya. Agresi itu, lepasnya.

Setelah pasukan Belanda pergi dan Indonesia mendapatkan kemerdekaan penuh, tetap tidak ada kekuatan politik lain yang tekun bekerja di Blitar Selatan, kecuali organisasi gerakan kiri. Salah satu organisasi yang terpenting adalah BTI yang mayoritas anggotanya adalah kaum tani miskin. Di Blitar Selatan, organisasi itu disambut karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan

kaum tani. Paijo, salah seorang aktivis dan seniman ludruk di zaman itu mengatakan:

BTI itu Barisan Tani Indonesia itu katanya. Yang di belakang itu kan barisan tani, katanya ada pemuda-pemuda itu kan bentukan Pemuda Rakyat... Saya hanya, semua itu, BTI ya BTI, Barisan Tani, kan dinamakan Barisan Tani, kalo orang tani itu... Yang dibicarakan ya hanya pertanian ini jangan sampai merosot, Kalau panenan jangan dijual terus, begitu. Untuk makan. Dijual itu dibawa ke pasar, kan di sini kan dulu itu hubungannya sukar, Kalau mencari makan itu kan sukar sekali. Jadi, □□□ pun enan hanya habis, dan habis itu hanya dimakan. Dirikan... Isa penyuluhan itu saja, mengenai soal pertanian... [Mengenai penyuluhan sosial politik] Kalau itu saya belum tahu, belum menerima waktu itu. Kalau yang saya ikuti itu kan hanya penyuluhan tentang pertanian... [Tertarik masuk BTI] Yaitu, di sini ini kan umumnya orang tani itu dibentuk BTI itu, karena wadahnya hanya satu di sini itu, dulu.

Partai politik yang giat bekerja di daerah itu pun hanya kader PKI. Menurut penuturan beberapa orang, partai lain, seperti PNI dan NU hanya aktif di daerah perbatasan yang tidak jauh dari pusat kota Blitar. Kesulitan transportasi adalah alasan utama bagi aktivis politik untuk tidak menjangkau daerah-daerah terpencil di Blitar Selatan, seperti Pegunungan Kidul. Para kader PKI biasanya berjalan kaki sehari penuh setelah jalan tidak lagi bisa ditempuh dengan dokar. Ketekunan itu membuat

PKI mendapat sambutan luas dari masyarakat setempat, sehingga menempati urutan pertama dalam pemilihan umum 1955. Beberapa sumber memperkirakan sekitar 85% penduduk memilih PKI.[7]

Bagi orang kebanyakan, PKI mempunyai daya tarik karena memang tidak ada partai lain yang berhubungan erat-erat dengan ormas-ormas, seperti Gerwani, BTI, Lekra, dan Pemuda Rakyat, yang bekerja sampai ke pelosok-pelosok desa. Paijo menjelaskan mengapa ia memilih PKI: ‘Karena di sini ini tidak ada partai lain... Karena, ya itulah, hanya ikut-ikutan, kawan-kawan semua itu nyoblosnya PKI.’ Sebelum Peristiwa 65 Paijo tidak mengenal konsep ‘kampanye’ karena PKI sebagai partai politik tidak pernah secara khusus mengkampanyekan program politiknya. Ia mengenal PKI dari rekomendasi teman-temannya yang juga anggota BTI: ‘Dulu itu kampanyenya PKI saya kok ndak ingat, waktu pemilu PKI yang dulu itu, hanya tahu saya kampanye itu sesudah PKI dibubarkan.’ Yang dia ingat dari PKI adalah:

Programnya itu sebetulnya baik, hanya itu akan bikin negara yang makmur, adil makmur itu, ya seperti, sebetulnya ya sudah anu, memberitahunya itu sesudah Pancasila itu... Mendukung [Pancasila]... Di sini itu [Ketua PKI] yang saya ketahui, Pak Sani, Pak Darpo, Pak Bejan. Pak Bejan, bapaknya Pak Tri. [Kenal] dekat dulu... Kalau orangnya baik... Agamanya ya Islam, tapi agamanya Islam tidak sembahyang begitu saja.

Kesenian juga mendapat perhatian luas dari organisasi seperti Lekra. Di Blitar Selatan, seperti wilayah Jawa Timur pada umumnya, kesenian yang paling digemari adalah ludruk, ketoprak, dan kuda lumping. Hampir semua kelompok kesenian waktu itu bergabung dengan Lekra, yang turun mengurus kegiatan semacam itu sampai ke desa-desa. Muhaimin, yang di masa itu menjadi pemain ludruk menceritakan pengalamannya:

[Ikut organisasi] Ludruk. Dengan sendirinya [ludruk gabung dengan Lekra], pada waktu itu daerah Blitar Selatan itu mutlak... Ludruk tiap-tiap main beraneka macam cerita... Terutama ya sejarah-sejarah kuno, kedua kalinya yaitu, untuk apa itu namanya, untuk pendidikan terhadap masyarakat, yang menyangkut pendidikan kepada masyarakat... Sebenarnya ya mengurangi orang-orang yang berbuat serong, berbuat tidak baik, dan pengikisan itu... Cerita itu kebanyakan ya buatan saya sendiri [ketawa], jadi ya bermacam-macam. Seperti ini lho ceritanya, seperti kebaikan, menata kebaikan rumah tangga dan menata sesuatu masyarakat yang, untuk pengikisan perjudian dan sebagainya. Sejak dahulu itu dalam pengikisan perjudian dan sebagainya itu diutamakan, jadi kenakalan remaja sejak dulu sebelum G-30-S itu tidak ada, tapi anehnya sebelum tahun 60 itu di sini banyak sesuatu, garong-garong itu banyak, tapi setelah tahun 60 itu tidak ada sama sekali... Aman, perjudian ya tidak ada. Terutama sejak lahirnya tahun Vivere Pericoloso[8], itu sejak lahirnya itu, mainan dan

minum-minuman sama sekali tidak ada... Yang mencetuskan itu Presiden Sukarno... Lahirnya tahun Vivere Pericoloso... Belum jelas, artinya belum jelas. Apa ya artinya kira-kira yang diartikan menyerempet-nyerempet bahaya itu lho kira-kira... Terus disusul tahun berikutnya Vivere Pericoloso, terus disusul lagi Gesuri, Genta Suara[9]... Nah ini lupa saya artinya... Hubungannya [pidato Sukarno] pada kenegaraan itu, tetapi untuk kesenian diterapkan. Jadi cerita-cerita itu yang mengandung isi daripada pengikisan-pengikisan yang tidak diingini oleh sesuatu generasi muda atau umum... Terutama yaitu, kerukunan keluarga. Pokoknya begini lho, dalam cerita itu yang penting ada isinya, pengikisan kenakalan remaja dan kenakalan apa saja pun, ada wernya, atau humornya dan ada sesuatu romannya, saya kalau mengarang pokoknya ada itu saja, sudah senang orang melihat.

Sebelum kedatangan Lekra, kelompok kesenian sebenarnya sudah aktif, tapi umumnya hanya untuk menghibur masyarakat tanpa muatan penyadaran mengenai keadaan sosial. Ruslan, yang juga pernah menjadi pemain ketoprak dari Ngrejo mengatakan:

Saya jadi sebelum saya jejaka itu saya sudah menjadi anggota ketoprak [tertawa]... Pada waktu itu saya sebagai ini, karena pada waktu itu kalau waktu itu kalau, peranan wanita. Jadi katakan, jadi hidayat. Penampilan pertama itu kan ndak menampilkan orang wanita, karena tukangnya ya lakilaki, jadi laki-laki dijadikan perempuan untuk

menari-nari waktu itu. Tidak seperti sekarang, kalau sekarang sudah wanita, sudah mau jadi pemain sandiwara. Pada waktu itu belum ada wanita-banan... grupnya ketoprak itu. Namanya Rukun Turonggo Mudo, eh bukan-bukan. Kalau Rukun Turonggo Mudo itu jaranan-nya, kuda lumping. Kalau ini anu, kalau ketopraknya Rukun Rahayu Mudo. Terus ada dua kan, yang satunya persatuan kuda lumping, yang satunya ketoprak itu tadi... Pada waktu itu ya [saya] jadi tukang kuda lumpingnya... Wah ceritanya [yang dipentaskan] ya macem-macem, ada 'Minak Djinggo', 'Angling Darmo' pernah, ya macem-macem. Pokoknya seperti sejarah ini. Terus ada lakon 'Lutung Kasarung', cerita-cerita rakyat itu juga.

Organisasi massa seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani juga aktif dalam kegiatan pemberantasan buta huruf dan pendidikan politik.

Operasi Pembersihan 1965

Berita tentang peristiwa pembunuhan para jenderal di Jakarta pada dini hari 1 Oktober 1965 menyebar dengan cepat, tapi tidak ke Blitar Selatan. Daerah itu dalam kesehariannya sangat terlambat menerima berita dari kota lain, apalagi dari Jakarta yang letaknya sangat jauh. Paijo mengenang saat pertama mendengar kabar itu:

Dengar [G-30-S] dari teman-teman itu, kan saya sering, entah dua bulan sekali, sering ke Blitar. Saya punya

saudara ada di Blitar. Di jalan itu, setelah 65 itu kan saya dengan kalau di Jakarta itu ada pembunuhan jenderal-jenderal, itu yang bunuh katanya PKI. Lantas itu di Kademangan itu saya tahu bahwa di board (papan pengumuman) itu, tulisan itu saya baca: PKI sekarang dibubarkan. Itu yang menulis siapa itu saya tidak tahu, itu ada di Kademangan… [Tapi] di desa sini masih tenang.

Saat memutuskan akan menggelar operasi antiPKI di Blitar Selatan, Angkatan Darat membawa serta sejumlah milisi sipil dari Blitar. Salah satu di antaranya bernama Sakera. Di Blitar Selatan sendiri tidak ada pasukan milisi yang bekerja sama dengan Angkatan Darat. Operasi antiPKI itu berlangsung singkat, sehari-semalam, menunjukkan bahwa Blitar Selatan bukanlah prioritas bagi Angkatan Darat. Tapi operasi selama 24 jam itu diingat oleh penduduk Blitar Selatan sebagai masa teror yang hebat. Seradau dan milisi Sakera yang datang dari luar wilayah terlibat pembakaran, penjahan, dan pembunuhan selama operasi berlangsung. Paijo melanjutkan kisahnya:

Saya itu ya ikut-ikut lari, begitu to. Lari menghindar dari rumah. Karena Sakera itu dikawal sama tentara, kalau ada orang tidak pandang itu PKI, tidak pandang bukan PKI, kalo berjumpa itu dibacok... Tapi kalau di sini ndak ada [yang kena bacok], tapi kalau di sini itu ndak ada. Di Surowadang itu ada. [Desa] kosong, dioperasi itu kosong. Orang laki... semua lari.

Operasi di Blitar Selatan dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata tajam yang berpakaian seperti pendekar Madura dengan pakaian hitam dan kaos loreng. Mereka datang membakari rumah-rumah penduduk yang dituduh PKI dan membunuh beberapa orang. Kabar tentang operasi itu dengan cepat menyebar sehingga penduduk mulai melarikan diri. Wagiman, yang saat itu berusia 16 tahun menceritakan pengalamannya:

Ya sedikit-sedikit tahu [G-30-S], tapi tidak puas [tidak mengetahui secara jelas]. Pada saat sekarang ada operasi itu yang saya tahu, ada operasi Sakera gabungan dengan tentara... Saya pada tahun itu umur 16 tahun... Tidak melihat, tapi sudah takut, saya lari ke hutan... orang tua saya itu di rumah, karena sudah tua. Saya ia ikut dengan teman-teman itu... Ya takut itu, sebab kalau ada orang muda itu dipegang, dipukuli atau dibunuh. Saya ikut takut, ikut lari... Saudara saya lima... Saya nomer tiga... Saudara saya itu perempuan dan di rumah pada waktu itu... Tidak [diapa-apakan].... Saya lari ke hutan selama satu malam satu hari... Banyak, itu semua orang lari semua... Kebanyakan anak muda dan ada juga orang yang sudah tua... [Sakera yang datang] banyak, saya kira ya ada satu peleton, satu mobil... Sama tentara... [Penduduk yang lari] banyak, tapi tidak lama itu. Setelah itu sudah pulang, baru yang lari itu yang pulang ke rumahnya masing-masing... Tidak ada kejadian apa-apa pada waktu itu.

Menurut penuturan korban dan saksi lainnya, Blitar Selatan tidak terlalu terpengaruh oleh represi militer

terhadap PKI antara akhir 1965 dan awal 1966. Angkatan Darat menghimpun sejumlah pemuda Banser dari Blitar kota selama sehari-dua, tapi setelah itu tidak pernah masuk ke Blitar Selatan lagi. Operasi pemberihan sepenuhnya digerakkan dari luar. Histeria antiPKI tidak mendapat sambutan di Blitar Selatan sendiri sehingga militer dan organisasi pemuda seperti Ansor, KAPPI, dan KAMI harus mendatangkan massa dari luar.

Angkatan Darat memusatkan represinya di Blitar kota dan sekitarnya. Banyak orang yang ditangkap dan dibunuh di kota itu karena diduga anggota PKI. Teror dalam kota dan sekitarnya berlangsung sangat intens. Harsono yang saat itu masih bersekolah di Blitar kota menceritakan pengalamannya di masa itu:

Sering sekali saya melihat mayat tergeletak di perempatan. Seperti ada satu orang pemain bass drum dari Pemuda Rakyat. Dia dibunuh di perempatan, mayatnya ditaruh di perempatan dan selama dua hari tidak satu orang pun yang berani mengambil mayat itu. Keluarganya sendiri pun nggak berani. Sampai kemudian membusuk dan diambil oleh Kodim, dikubur di mana saya nggak tahu.[10]

Pembunuhan di Blitar kota dan sekitarnya berlangsung dengan cepat dan kerap tanpa pemeriksaan apa pun. Harsono menuturkannya:

Di daerah Blitar banyak sekali guru-guru yang dibunuh. Ada satu daerah di Blitar namanya Kampung Meduran, di sana memang orang Madura semua. Di Kampung

Meduran itu isinya cuma dua, Ansor dan PKI, Pemuda Rakyat atau PKI lah. Jadi mereka saling membunuh. Dan kemudian ada satu orang dari pekerja Jawatan Kereta Api, yang dicari dan dibunuh. Tetapi ternyata salah bunuh, yang dibunuh adalah guru. Dan kemudian besoknya dia cuma minta maaf, begitu saja.[11]

Awalnya, operasi itu terarah khusus pada anggota PKI dan orang yang diduga berafiliasi dengan partai tersebut. Tapi lama-lama banyak orang yang tidak punya kaitan apa pun dengan kegiatan politik menjadi sasaran. Banyak kasus pertengkaran yang kemudian berlanjut menjadi pembantaian ketika salah satu pihak mendapat legitimasi dengan mencap lawannya sebagai 'komunis.' Sugondo, seorang asisten dosen di Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) yang ketika terjadi Peristiwa 65 pulang ke desanya, Krisik, dekat Blitar kota, mengutarakan:

Dulu pernah ada orang Ansor datang ke Krisik dan kena juga. Dia sebenarnya anak sini tapi dibesarkan di tempat lain, dan di tempat lain itu dia masuk ke organisasi Ansor. Namanya Sarjuni yang masih misan saya, itu dikait-kaitkan dengan keluarga ayah saya yang orang PKI, sudah tidak ambil pusing ikut organisasi apa saja... [Yang tertangkap] juga ada Ansor, PNI juga ada. Ada yang namanya Sukardi dan Sukirin. Yang namanya Sukirin itu karena konflik dengan oknum militer waktu itu rebutan wanita, akhirnya yang enggak pulang sampai sekarang. Entah di mana dia dibunuh, atau mati enggak ada yang tahu. Jadi mayoritas sini itu enggak tahu di mana mereka

itu dibunuh sekian banyak, karena sebagian besar itu mati setelah melalui proses dimasukkan di penjara Blitar itu... Tidak ada [yang dibunuh] di sini. Cuma satu, namanya Karnadi. Kalau yang lain-lainnya itu diambil dan dibawa ke Penjara Blitar. Mungkin tercecer atau ada yang dibunuh di tempat lain saya ndak mengerti, tapi waktu itu diambil.

Para pemimpin operasi pembersihan ini kadang menetapkan target jumlah orang yang harus mereka habisi sebagai bukti keberhasilan. Sugondo, yang juga anak seorang Kepala Desa Krisik, menceritakan apa yang dia dengan mengenai 'sistem target' pada waktu itu:

[Target], ya pernah itu. Jadi di daerah Kawi Sari, posko. Pos Komando Kawi Sari namanya itu. Setiap ditarget harus memasukkan sejumlah orang, misalkan empat atau lima orang. Kalau tiga, ya dia terus disiksa... Akhirnya karena dia itu memang tidak tahu siapa yang Pemuda Rakyat, siapa yang PKI, akhirnya ngawur (sembarangan), siapa pun ditunjuk... Ya kalau sudah di Posko itu umumnya militer, hanya di situ ada juga relawannya dari ormas-ormas itu, KAPPI-KAMI juga. Jadi rata-rata yang di daerah ini orang atau anak yang tidak mengerti apa-apa, banyak sekali yang buta huruf juga kena. Karena ditarget itu tadi.

Orang Tionghoa juga menjadi sasaran karena selama ini dianggap menyokong PKI dan berhubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Harsono menceritakan pengalamannya di Blitar kota:

Meskipun saya tidak terlibat, tetapi sebagai keturunan Cina, saya merasakan bahwa ada semacam trauma.

Karena Baperki [Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia] pada waktu itu sebagai salah satu organisasi, meskipun saya bukan Baperki dan saya tidak sekolah di sekolah Baperki, tetapi etnis Cina itu sudah melekat dengan komunis. Sehingga kemudian, ingat sekali ketika itu semua orang Cina di Blitar dikumpulkan di satu gedung bioskop, namanya gedung Bioskop Dipoyono. Kemudian dilakukan briefing dan di situ dikatakan bahwa orang-orang Tionghoa di sini harus membantu pemerintah terutama militer dengan memberikan dana. Dan saya ingat sekali bahwa semenjak itu orang-orang Cina di Blitar, itu berhak untuk, istilahnya diperas. Misalnya mobilnya bisa dipinjam beberapa hari dengan alasan untuk melakukan operasi, meskipun itu tidak. Kemudian mereka bisa dimintai dana berapa saja untuk operasi, tapi sebetulnya kita juga tidak tahu. Pada akhirnya ada semacam persepsi dari kelompok Cina di Blitar, kalau kita ingin selamat dan kalau bisnis kita ingin selamat, maka kita harus menyambang kepada Kodim. Nah, persepsi ini terus berjalan sampai sekarang.[12]

Kekerasan dan intimidasi di Blitar hanyalah bagian dari kampanye teror yang berskala nasional terhadap semua orang yang berkaitan dengan organisasi progresif dan nasionalis. Banyak orang yang khawatir akan menjadi korban, lari dari rumah-rumah mereka dan mencari tempat berlindung di kota atau desa lain. Mereka memilih bersembunyi sambil bertahan, terus-menerus berpindah

untuk menghindari operasi. Salah satu tempat tujuan mereka adalah Blitar Selatan.

Awal dari Pelarian

Pimpinan PKI tidak siap menghadapi represi yang dilancarkan. Angkatan Darat. Saat

Angkatan Darat mengobarkan histeria antikomunis, lengkap dengan kisah-kisah propaganda palsu, orang yang terkait dengan partai hanya sibuk dengan keselamatan dirinya, dan tidak memikirkan perlawanan. Rewang yang baru bergabung dalam Politibiro partai pertengahan 1965, menjelaskan bahwa PKI sebagai lembaga tidak pernah memutuskan untuk menggelar aksi G-30-S. Anggota Politibiro yang berjumlah sekitar sepuluh orang sebenarnya bingung setelah peristiwa itu terjadi. Mereka hanya dapat mengeluarkan pernyataan yang menyangkal bahwa PKI adalah dalang ‘gerakan’ tersebut dan berharap bahwa Presiden Sukarno akan menghalangi Angkatan Darat agar tidak menyerang mereka. Saat militer mulai menangkapi dan membunuh orang yang terkait dengan PKI, mereka hanya berusaha mencari tempat persembunyian.

Ya kami membantah, itu ndak betul kalau PKI di belakang. Sebab PKI keputusannya begini, ini keputusan resmi PKI. Ya bahwa ada keterlibatan, misalnya Aidit diduga terlibat karena berada di Halim, di luar putusan

resmi sidang Politbiro PKI. Nah, jadi kalau begitu, misalnya ada orang-orang PKI terlibat seharusnya mereka diusut secara khusus toh, diperiksa, diadili. Yaitu kalau menjalankan hukum, tapi penguasa menghindari, anu, hukum ini. Begitu orang-orang yang sebetulnya bisa menjadi kunci untuk menerangkan, dibunuh semua. Ketua, tangkap dibunuh, wakil ketua dibunuh... Saya sembunyi, Saya mengambil sikap bersembunyi, tepatnya menyelamatkan diri. Lalu mikir, ini bagaimana menyelamatkan PKI? Menyelamatkan PKI dalam situasi begitu, yang harus menyelamatkan orang-orangnya, orang-orangnya. Tapi sudah sulit, sulit sekali.

Mereka yang menyelamatkan diri dengan susah payah berusaha menyembunyikan identitas dan menghindari operasi militer, tapi pada saat bersamaan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup.

Angkatan Darat mengeksekusi diam-diam para pemimpin teras partai pada akhir 1965 dan awal 1966. Dari lima pemimpin inti partai–Aidit, Sudisman, Lukman, Nyoto, dan Sakirman–hanya Sudisman yang berhasil selamat dari aksi ‘pelenyapan.’ Ia dan beberapa anggota Politbiro serta CC (Comite Central) yang selamat, seperti Rewang, tetap tinggal di Jakarta. Mereka bersembunyi di berbagai rumah dan mulai berpikir tentang cara menghimpun kembali kekuatan partai.

Saat Sudisman ditangkap pada Desember 1966, para pemimpin partai yang selama ini bersembunyi kemudian meninggalkan Jakarta. Orang yang mengkhianati

Sudisman, Suyono Pradigdo, juga membongkar tempat persembunyian banyak orang lain di seluruh kota. Para pemimpin PKI dengan begitu tidak punya pilihan lain, kecuali melarikan diri. Mereka memutuskan mencari tempat persembunyian yang aman dan terpencil. Mulai saat itu, semakin banyak orang ‘pelarian’ di berbagai daerah Pulau Jawa dan lainnya, seperti Sumatra dan Kalimantan. Salah satu pilihan tempatnya adalah Blitar Selatan, terutama karena alasan geografis mengingat daerah itu sulit dijangkau. Alasan lain, karena sejak 1948 Blitar Selatan adalah basis ‘merah,’ dan juga karena ada rekomendasi dari CDB (Comite Daerah Besar) Jawa Timur. Banyak tokoh penting PKI pada 1940an adalah orang yang aktif di gerakan pemuda seperti Pesindo, Laskar Rakyat, atau organisasi revolusioner lainnya. Pengalaman di masa itu ketika bergabung dengan Brigade 29 dan Pasukan Brantas yang menarik mundur personelnya ke Blitar Selatan.

untuk menghindari pengejaran, kembali muncul. Rewang menuturkan:

Sampai ke Blitar Selatan itu sesudah Bung Disman tertangkap. Dia tertangkap bulan Desember 66. Terus saya mengusulkan pada kawan-kawan, kita tidak bisa bertahan di Jakarta. Harus pindah keluar dari Jakarta mencari daerah desa dan sekaligus kita harus membikin perlawanan, menyusun perlawanan dari desa. Nah terus disetujui, disetujui, pindah. Kami bikin kontak dengan Jawa Timur, Jawa Timur ternyata sudah mempersiapkan

desa yang dipandang bisa untuk menjadi basis perjuangan Blitar Selatan itu, terus kami evakuasi ke sana.

Pimpinan PKI memutuskan pindah ke Blitar Selatan setelah membuat survei singkat ke berbagai lokasi lain. Daerah yang berbukit dengan hutan belum terjamah serta gua-gua dengan aliran air di dalamnya, dianggap sebagai tempat strategis dan sangat mendukung. Para pemimpin PKI merencanakan pembangunan basis yang disebut Komite Proyek Basis atau kompro. Di samping dataran Blitar Selatan, mereka juga memilih daerah pegunungan seperti Gunung Dieng, Kawi, Arjuno, dan Lawu. Namun, basis di Blitar Selatan menjadi basis yang terbesar.

Mereka yang bergabung di Blitar Selatan umumnya adalah aktivis mahasiswa, buruh, petani, pemuda, dan perempuan yang lolos dari pembantaian 1965 dan masih terus dicari penguasa. Mereka yang berhasil menghindari penangkapan atau hanya ditahan sebentar mulai lelah main kucing-kucing dengan militer. Di kota-kota mereka harus senantiasa waspada agar tidak dikenali oleh informan militer, termasuk oleh anggota partai yang berkhianat karena disiksa dan diancam militer. Ada juga serdadu militer yang khawatir akan ditangkap, meninggalkan pasukannya, dan lari ke Blitar Selatan. Tekanan terus-menerus terhadap para pelarian berlangsung di seluruh Nusantara. Pada 1966-68, jumlah tahanan masih ratusan ribu orang.[13] Surat kabar sementara itu masih terus membuat berita tentang ‘gerakan bawah tanah PKI’, menyebar kecurigaan di

antara penduduk yang sesekali berkembang menjadi insiden kekerasan.

Muyatno, seorang sarjana pertambangan lulusan luar negeri dan pernah menjabat sebagai wakil kepala Direktorat Pertambangan di Jakarta, menuturkan:

Ya, ini pertama-tama perlu saya ungkapkan mengapa saya kok ke Blitar Selatan. Dulu tahun 65 setelah ditangkap di Jakarta sebagai anggota HSI [Himpunan Sarjana Indonesia], terus dibebaskan Mei 66. Saya bekerja di Jakarta sebagai kuli dan sebagainya untuk menyambung hidup, setelah itu masih kami dikejar-kejar. Saya ditulis di surat kabar Suluh Indonesia bahwa saya harus diawasi dengan ketat, dalam artian bahwa terus dikejar, mau ditangkap, sebagainya. Kami tidak diberi hak sipil, lalu ndak ada jalan lain, orang sudah kepepet (terjepit) itu musti berlawan. Untuk berlawan, saya sudah tahu sebelumnya di daerah selatan saya kira-kira kurang lebih empat kilometer dari rumah saya, itulah daerah, daerah merah sejak tahun 48. Saya lari ke Blitar Selatan dan berkumpul dengan teman-teman di Blitar sana.

Hubungan bertahun-tahun dengan rakyat Blitar Selatan juga memudahkan rencana evakuasi itu. Penduduk dengan mudah menerima para pelarian dan berinteraksi karena memang mengenal sebagian sebagai mantan anggota Laskar Rakyat atau aktivis yang berkunjung ke tempat mereka. Dari beberapa wawancara terungkap bahwa penduduk memang melihat orang-orang yang belum pernah mereka kenal sebelumnya masuk ke daerah

mereka agak tergesa dan terkesan tanpa persiapan. Tapi, mereka menganggapnya sebagai orang yang ‘ndelik’ (sembunyi), liar, dan mencari selamat saja. Karena teror dan ancaman, banyak pelarian yang tidak membawa barang apa pun, dan akhirnya meminta-minta dari penduduk desa yang dilewatinya. Propaganda militer mengatakan bahwa para pelarian itu merampok, menjarah, dan membunuh. Tapi Paijo, seorang petani dan penabuh gendang di kelompok ludruk di Blitar Selatan, berkata lain:

Pelarian itu tidak membawa barang, mereka makannya minta-minta. Waktu banyak pelarian orang PKI, di desa ini tidak pernah ada kejadian apa-apa seperti kecurian. Orang-orang PKI itu hanya cari selamat dan tidak buat kerusuhan di sini... Saya sering kali ketemu kalau berjumpa, tapi ndak bisa bicara-bicara begini, ndak bisa. Cuma dia bilang, ‘Saya ini orang yang diuber-uber (dikejar-kejar).’ Begitu. Dan saya ndak tahu asalnya dari mana, ndak. Wong saya ini ndak mengetahui jelas begitu, hanya orang itu banyak yang lari ke sini dan lantas lari lagi, itu saja. Mereka juga ndak bawa barang, hanya orang. Kalau ketemu ya saling menyapa dan baik tanggapannya. Orang sama orang di sini ndak pernah mengganggu apa-apa. Mereka itu hanya butuh cari selamat, hanya mereka itu makannya minta-minta, tapi saya ndak pernah kedapatan karena rumah saya itu di tepi jalan ini. Waktu banyak pelarian orang PKI itu di desa ini

ndak ada kejadian apa-apa. Orang-orang PKI itu hanya cari selamat dan ndak buat kerusuhan di sini.

Muyatno yang bersembunyi ke Blitar Selatan berbicara tentang hubungan para pelarian dengan penduduk setempat:

Selama di Blitar Selatan saya itu membaur pada massa Blitar Selatan, yang pada waktu itu melindungi kami, melindungi orang-orang PKI yang di Blitar Selatan. Melindungi, apa itu, memelihara, mengasih makan dan sebagainya dengan tidak minta imbalan apa-apa. Cuma imbalan yang kami berikan pada mereka adalah kerja sama dengan mereka, yaitu mencangkul, ikut bertanam, ikut momong (mengasuh) anak-anaknya, bahkan kalau perlu menceboki (membersihkan setelah buang air besar) anak-anaknya. Lalu ikut mereka berdagang dan sebagainya. Di samping pada waktu-waktu tertentu kami membangun partai.

Rupanya pengalaman buruk melihat pembantaan dan operasi militer pada 1965 tidak menghalangi masyarakat Blitar Selatan membantu para pelarian. Cukup lama gerakan itu tidak diketahui oleh siapa pun dan para pelarian bersama masyarakat setempat hidup seperti biasa.

Membangun Basis

Ketika mulai berbasis di Blitar Selatan pada 1967, pimpinan partai mulai melakukan pembagian tugas: menyusun kembali organisasi partai, menyiapkan perjuangan bersenjata, dan mendidik kader-kader yang tersisa. Struktur itu direncanakan dari Kabupaten sampai ke desa, yang dikelola oleh komite-komite proyek. Menurut dokumen-dokumen yang kemudian disita oleh pihak militer, organisasi komite proyek ini sudah cukup berkembang dengan sistem ‘sel’ yang tertata rapi, detasemen gerilya atau pasukan bersenjata, dan perlengkapan organisasi lainnya. Muyatno juga menjelaskan bahwa gerakan tidak hanya terbatas di daerah pedesaan, tapi juga mencapai beberapa wilayah kota, yang bergantung pada jumlah orang dan kesiapan untuk melakukan penyergapan dan merebut senjata.

Untuk meningkatkan pengetahuan ideologi kadernya, setiap kompro melakukan pendidikan khusus dengan mengajarkan teori Marxisme-Leninisme, ajaran Mao Tse-tung, dan pemikiran para tokoh dunia yang melakukan perjuangan melawan imperialisme. Pendidikan itu dianggap sangat penting, karena menurut Muyatno, ‘orang komunis tanpa ajaran-ajaran komunis itu’ dan ada gunanya.’ Dalam rencana, para pemimpin partai bermaksud membangun Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat (STPR) dan menyelenggarakan Kursus Kader Perang Rakyat (KKPR) di daerah Malang Selatan. Para

instrukturnya berasal dari anggota ABRI yang desersi dan simpatisan PKI yang memiliki pengalaman sebagai militer.

Dengan kekuatan sembilan orang anggota CC-PKI, sejumlah tokoh CDB, dan kader partai dari berbagai daerah, komite proyek mulai berjalan. Namun tidak semuanya semudah yang dibayangkan di atas kertas. Rewang mengenang:

Waktu itu belum ada perhitungan bisa tahan berapa lama. Sebab dalam pikiran kami perjuangan itu belum mulai, baru mempersiapkan. Jadi persiapan itu terdiri atas pembentukan pimpinan CC Darurat, sudah dilakukan. Terus pembentukan pimpinan propinsi, dilakukan. Terus pembentukan pimpinan komite proyek-proyek yang nanti akan dijadikan daerah basis, sudah dilakukan. Terus pembentukan pasukan gerilya, sudah dimulai. Tapi ada ketentuan kapan perjuangan senjata itu dimulai? Lha itu kami diskusikan.

Rewang lebih jauh menjelaskan bahwa perjuangan bersenjata oleh PKI sebenarnya baru memasuki fase rencana dan hanya akan dijalankan setelah komite proyek benar-benar siap, dan setelah ada hasil konferensi tingkat nasional yang akan diadakan untuk menata kembali kehidupan partai. Menurut program yang sudah ditetapkan, pimpinan CC Darurat berada di atas komite proyek, dan aksi perjuangan bersenjata dilakukan dengan kesadaran penuh dan taktik serta strategi yang matang. Keterangan lebih lanjut tentang susunan komite proyek dan personelnya sangat terbatas, karena banyak anggota

yang tidak mengenal satu sama lain dan banyak tokoh yang sudah meninggal dunia. Bagaimanapun, Muyatno yang pada waktu itu ikut terlibat dalam kompro Blitar Selatan mencoba memberikan gambaran siapa yang berperan penting di dalam kompro ini:

Yang saya tahu cuma, yaitu, apa itu, Gatot Taryo, Joko Untung, yang di Blitar Selatan lho–Joko Untung, yang di Blitar Selatan. Dan masih banyak lagi yang saya juga ndak tahu, apa itu anggota, apa itu pimpinan komite proyek apa ndak, karena satu sama lain kan ndak tahu. Yang boleh tahu itu komite proyek yang menghubungi saya, cuma Gatot Taryo, yang lain ndak boleh... Jadi pada waktu itu orang-orang yang dari CDB yang lari ke situ, itu paling nggak ya diangkat jadi anggota kompro. Seperti Gatot Taryo itu kan orang CDB, bukan ketua CDB tapi anggota CDB, anggota komisi CDB, di situ ditugaskan menjadi, apa itu, ketua kompro.

Sistem organisasi yang tertutup ini dipilih untuk melindungi jaringan komite proyek jika ada salah satu anggota yang tertangkap. Orang-orang yang diwawancarai umumnya sulit mengingat dengan tepat susunan maupun personel komite proyek. Sebaliknya, pihak militer dalam terbitannya mengenai Operasi Trisula selalu menggambarkan bagian organisasi dengan jelas seolah memang ada susunan yang pasti dan berjalan efektif. Namun dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaku sejarahnya, gambaran tentang struktur yang jelas dan rapi versi tentara itu terasa berlebihan.

Pihak militer memang berkepentingan membuat musuhnya tampil sebagai kekuatan yang rapi dan baik untuk membenarkan tindak kekerasan yang kemudian mereka lakukan. Rewang sendiri mengatakan persiapan untuk perjuangan bersenjata sebenarnya masih sangat terbatas:

Nah kalau teori militer konvensional, satu kekuatan yang bisa mengambil inisiatif, kedudukan inisitatif itu, tiga banding satu. Itu teori konvensional, tiga banding satu. Jadi, kalian mau menghancurkan musuh harus punya kekuatan tiga, musuhnya satu. Tapi, kalian teori perang gerilya, perang rakyat, 10 banding satu itu baru bisa berkedudukan inisiatif. Karena apa? Tentara rakyat itu secara kualitatif lebih rendah. Kualitas kemilternya lebih rendah, persenjatannya juga lebih jelek. Ha, maka itu harus mengandalkan keunggulan manusia. Musuhnya satu kita 10, itu baru mutlak bisa menghancurkan. Tapi, kalian kurang dari itu, belum dianu, menghancurkan. Ini teori perang rakyat Mao Tse-tung. Jadi, kalian mau berkedudukan inisiatif harus unggul kekuatannya itu. Ha, menurut pimpinan jenderal-jendral Vietnam juga begitu

Muyatno sendiri mengatakan bahwa pelatihan perjuangan bersenjata baru menyangkut teori dan beberapa ketrampilan seperti lempar pisau, penyergapan, dan bela diri. Para pemimpin sering mendiskusikan pengalaman gerakan bersenjata di negara lain, terutama Tiongkok. Mereka menganggap pemikiran Mao Tse-tung mengenai ‘desa mengepung kota’ sebagai sesuatu yang

relevan. Pengalaman Vietnam juga menjadi pembahasan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan lorong-lorong bawah tanah dan gua persembunyian yang efektif menghadapi pasukan Amerika Serikat. Muyatno, seorang sarjana geologi yang ikut bersembunyi di Blitar Selatan, mengenang:

Kader muda-muda itu, yang bisa ditarik sebagai detasemen gerilya, tentaranya kompro, anda tahu Detga [Detasemen Gerilya] tadi? Nah itulah yang di Detga. Dididik soal kemiliteran. Nah bagi kami, militer yang tidak dibekali teori yang baik, apa itu, teori partai yang baik, itu malah bisa membahayakan bagi kita, bahkan kecuali dididik kemiliteran juga diisi otaknya dengan teori-teori Marxis-Leninis, teori kawan Mao Tse-tung... Ya anu, desa ngepung kota. Jadi di desa dulu baru di kota, teori-teori yang, teori mengabdi jangka panjang. Ndak bisa kita menghancurkan musuh dengan sekaligus atau dipreteli dari pinggir dulu, dari pinggir kan cepet. Itu secara sederhana... Nah, memang dalam perjuangan Blitar Selatan itu banyak mempelajari pengalaman-pengalaman, perlawanan dari partai-partai di tempat lain seperti di Vietnam, Kamboja dan seterusnya, Korea Utara. Nah itu kan dengan menggunakan–kalau di Vietnam kan banyak gua-gua bikinan, bahkan antara gua dan gua itu di Vietnam kan ada hubungannya satu sama lain sampe ke kota. Kami akan meniru itu dan sudah kami laksanakan permulaannya. Kami, gua-gua ini masih taraf dalam untuk berlindung, bukan untuk berlawan. Ah mestinya gua-gua

itu kita kembangkan sampe meluas sekali. Ah dibarengi dengan pembangunan partai yang mengabdi jangka panjang, itu anggapan mesti berhasil. Tapi oleh karena di satu pihak pembikinan gua-gua itu belum selesai, nah sudah tahap permulaan. Tapi di pihak lain pimpinan partai ada pemikiran ingin cepet menang, jalan pintas dia tengahkan. Setelah itu seperti yang telah dikatakan, perebutan senjata di daerah, di dalam daerah proyek melawan tentara di dalam wilayah proyek, itu akhirnya diketahui oleh penguasa militer, kita dioperasi pagar betis, kita hancur... Iya, iya banyak [tempat di bawah tanah]. Tapi masih dalam taraf kecil-kecil, sporadis tapi ndak anu, ndak ngumpul. Masih dalam taraf untuk perlindungan, untuk sembunyi.

Tidak bisa dipastikan berapa banyak gua yang sesungguhnya pernah dibuat di Blitar Selatan. Selain gua alam dan bikinan, ada juga lubang tempat perlindungan, baik untuk perorangan maupun kelompok yang disebut sebagai ‘ruba’ atau ‘rumah baru’ atau ‘rumah bawah [tanah].’ Saat ada operasi militer, para pelarian ini bersembunyi di hutan dan masuk ke ruba-ruba atau gua, dan baru keluar menjelang sore untuk mencari makan. Kadang jika situasi tidak memungkinkan, orang bisa berdiam diri sehari penuh bersembunyi dalam ruba dan memanfaatkan hasil hutan untuk bertahan hidup. Seperti dituturkan Ibu Andhika:

Kita berani masuk kampung ya malam, kalau siang ndak berani. Jadi kalau siang kita masuk gua-gua gitu,

kalau siang. Kalau malam kita keluar gua cari makanan, dedaunan, ada daun lamtoro, ada bentis. Ya, kalau ketemu singkong, ya mengambil singkongnya. Jadi ndak pernah makan yang makan dimasak itu ndak pernah. Itu selama saya masuk hutan itu, tanggal 22 bulan 12 tahun 67, masuk hutan. Jadi selama di hutan, di gua itu makannya ya itu, kalau ketemu singkong, ya makan singkong, ketemu pupus lamtoro (pucuk, daun muda petai cina), apa saja yang bisa dimakan, pokoknya bisa dimakan. Jadi ndak pernah masak yang kena api itu ndak pernah. Jadi makanannya mentah-mentahan.

Muhaimin, seorang sutradara dan penggubah cerita-cerita ludruk menceritakan pengalaman ketika ikut bersembunyi di ruba:

Itu di bawah tanah... bentuknya seperti gua... gali sendiri di pinggir sungai atau galengan-galengan (pematang sawah)... ya cukup untuk tiga orang, empat orang... Ya pokoknya dapat melindungkan diri dan di mana saja yang penting bisa berlindung dan di mana-mana. Saya pernah kok melindung itu di dalam lemari, pernah [ketawa]. Pernah lagi saya melindung di dalam gentong juga pernah, tempat air itu [ketawa]. Biasanya jam-jaman kalau dulu.

Untuk mengamankan jaringan, para aktivis juga menggunakan bantuan orang dekat atau masyarakat sekitar yang kecil kemungkinannya dicurigai oleh militer, seperti anak kecil atau orang lanjut usia. Mereka bekerja sebagai kurir, pemberi informasi atau peringatan tentang

keadaan di luar kompro. Rewang mengatakan bahkan anak sekolah dasar pun membantu memberitahu seandainya ada polisi yang datang. Menurutnya, massa di Blitar Selatan memberikan perlindungan tanpa paksaan, karena aktivis PKI tidak membawa apa-apa. Banyak juga yang mendapat bantuan dari anak-anaknya sendiri. Ibu Andhika menjelaskan:

Anak saya kembali ke gunung, tapi dia bisa jadi, anu, dikerjakan untuk kalau ada tentara patroli bisa memberi tahu kepada kita. Jadi saya mesti harus menyelamatkan diri itu dari anak saya itu. 'Ada tentara datang, bu, ibu harus pergi,' gitu kehidupan di gunung... Ya di Gunung Kidul itu. Jadi setiap ada patroli anak saya itu kerjanya ya memang bagaimana mengawasi, kalau ada menjaga ibunya, supaya ibunya mencari selamat.

Adanya dukungan rakyat bagi para pelarian itu disadari oleh pasukan pemerintah yang kemudian diterjunkan ke Blitar Selatan. Mereka sering kali mengalami kesulitan menjalankan operasi penyisiran maupun patroli. Menurut para petingi militer sendiri, keadaan tersebut dapat menimbulkan frustrasi di kalangan pasukan, sehingga dalam salah satu briefing (pemberian petunjuk singkat), Pangdam VIII/Brawijaya mengatakan bahwa rakyat di daerah operasi satuan tugas harus dianggap sebagai lawan.[14] Dan ditegaskan lagi dalam catatan tambahan rencana operasi, yang sebenarnya kita hadapi adalah daya tempur lawan termasuk rakyat seluruh Blitar Selatan yang

mutlak membantu gerombolan bersenjata G-30-S/PKI dan bukan detasemen gerilya PKI saja.[15]

Gerakan ‘Perlawanan’ Blitar Selatan

Saat persiapan masih berlangsung dan basis-basis baru dibentuk, sebagian pemimpin PKI memutuskan agar aksi pembalasan terhadap para algojo pembantai 1965-66 mulai dijalankan. Beberapa kader muda yang tergabung dalam detasemen gerilya mulai melancarkan aksi bersenjata di beberapa wilayah. Awalnya, militer maupun persmenganggap aksi-aksi ini sebagai tindak kriminal biasa. Tapi ketika aksi itu semakin meluas dan berkembang menjadi penyergapan dan pelucutan senjata di pos militer serta pabrik yang dijaga oleh militer, sikap ini pun berubah. Di pihak detasemen gerilya, aksi-aksi itu meningkatkan semangat dan juga menambah beberapa pucuk senjata, serta menjadi alasan untuk melanjutkannya. Perdebatan berlangsung di kalangan pimpinan PKI yang berbeda pendapat. Rewang mengatakan bahwa ada kawan-kawan yang tidak sabar:

Yaitu, terburu nafsu, jadi misalnya ada ucapan ‘Kok sudah satu setengah tahun ndak ada perlawanan, itu bagaimana?’ … Yang diserang itu algojo, jadi orang-orang yang dulu membantai orang-orang komunis, dibalas akhirnya, itu pembalasan… gerilya, bukan massa.

Analisis serupa disampaikan oleh Muyatno yang berkata:

Waktu itu ada pimpinan yang ingin cepet menang. Ingin cepet perjuangan berhasil. Nah tidak melihat kondisi kekuatannya, kekuatannya sendiri. Jadi, kalau ajaran Mao Tse-tung itu mengatakan kita harus mengabdi pada jangka panjang, eh kalo Blitar Selatan pada waktu itu ndak. Kata-katanya saja seperti halnya mengikuti ajaran Mao Tse-tung, tapi dalam prakteknya ndak mengabdi jangka panjang, tapi mengabdi jangka pendek. Ingin cepet menang, itulah penyebab kehancuran PKI sekarang ini. Dan terus sampai sekarang ndak ada, ndak ada gerakan PKI lagi.

Aksi-aksi bersenjata itu sebenarnya di luar keputusan yang sudah ditetapkan oleh kompro. Alih-alih meningkatkan perlawanan, aksi-aksi itu kemudian meningkatkan kecurigaan militer akan adanya gerakan bersenjata komunis di wilayah Blitar Selatan. Para pemimpin sementara itu belum mencapai kesepakatan karena masih menunggu penyelenggaraan konferensi nasional. Rewang mengenang:

Untuk menentukan situasi politik itu memenuhi syarat atau belum, akan dilakukan konferensi setidak-tidaknya dihadiri komite daerah pusat se-Jawa. Lha ini semuanya belum terlaksana. Konferensi mengenai situasi politik belum, belum dilakukan, lalu juga peninjauan persiapan organisasi belum dilakukan. Tapi kenyataannya sudah ada aksi-aksi yang sebetulnya itu sudah bisa dimasukkan

kategori mulai gerakan bersenjata. Ini di luar ketentuan, di luar program yang ditentukan oleh CC. Misalnya ya, pelucutan senjata, pengawal perkebunan. Ini sebetulnya sudah aksi militer, sebetulnya. Tapi mereka tidak menyadari ini aksi militer. Ini baru propaganda bersenjata. Lalu menyerang algojo, algojo yang dulu membunuhi orang-orang komunis itu. Ini sebetulnya juga, 'Saya pengen ini aksi militer'. Ini semuanya dilakukan tanpa kesadaran memulai perjuangan bersenjata. Akibatnya pemerintah menilai ini aksi militer, pasti ada organisatornya. Lalu dilakukan pengepungan itu. Jadi sebetulnya berdasar dokumen yang kami bikin, perjuangan bersenjata belum mulai, Blitar Selatan itu. Ada ketentuan kok kapan dimulai. Kami menilai begini, secara konkrit sekarang ini sudah ada perjuangan senjata. Karena kami ditindas dengan senjata dan di berbagai tempat ada perlawanan bela diri, sudah ada. Tapi, kalau kita mulai dengan cara yang teratur menurut teori perjuangan bersenjata rakyat, sekarang ini belum. Sebetulnya perumusannya begitu.

Rewang kemudian melanjutkan dengan analisa mengapa ada aksi muncul di luar garis CC:

Ya, ini artinya kelemahan umum di kalangan gerakan orang-orang tertindas itu, tidak tahan menghadapi penindasan yang lama. Ya, kita tahan itu bisa dua macam, bisa kapitalasi, ya bisa avonturisme. Kalau yang lemah jiwanya kapitalasi, sudah menyerah saja. Tapi kalau yang terburu nafsu menjadi avonturisme. Ada ucapan-ucapan

begini, ‘Kalau kita ini tidak melawan, kita terus-menerus dikejar. Tapi kalau melawan, sekali waktu kita mengejar. Nah, kita membalas begitu.’ Ini tidak, ya tidak ilmiah. Artinya cuma perasaan saja. Perasaan kalau kita itu belum melawan terus dikejar, kita sembunyi saja, kita ilegal terus. Tapi kalau kita melawan sekali-kali, kita pukul musuh, mengejar musuh. Ini kan subyektif, namanya subyektif, pandangan subyektif. Jadi melakukan aksi tidak didasarkan apa tinjauan yang luas, apa akibatnya kalau ada gerakan begini.

Walaupun PKI bermaksud melancarkan perjuangan bersenjata, kenyataannya mereka hampir tidak punya senjata sama sekali. Setelah Operasi Trisula berakhir dan hampir semua anggota PKI berhasil ditangkap, Angkatan Darat mengumumkan bahwa mereka hanya merebut 37 pucuk senjata, yakni 10 pistol, 13 bren, 2 senapan AK, 2 senapan Tjung dan bermacam senjata tua dari masa Belanda dan Jepang.[16] Dengan senjata seperti ini PKI jelas tidak mempersiapkan diri untuk melancarkan perjuangan bersenjata melawan rezim Soeharto.

Operasi Trisula

Menjelang akhir 1967, gerakan di Blitar Selatan mulai tercium oleh militer karena operasi yang dilakukan oleh detasemen kompro tidak jauh dari wilayah itu. Beberapa personel militer diturunkan untuk melakukan penjajakan

dan selanjutnya laporan intelijen menegaskan bahwa memang ada gerakan bersenjata di Blitar Selatan. Masyarakat setempat sejak awal didatangi oleh militer dan didesak memberikan bantuan. Seperti dituturkan Ruslan, seorang petani:

Sebelum Operasi Trisula, itu setahu saya, karena luralahnya di sini kan luruh lama, belum diganti ABRI. Itu luralahnya masih paman saya, jadi suaminya Bulik (bibi) saya, gitu. Saya pernah oleh Pak luruh itu, karena Paklik (paman) saya, saya disuruh ke kelurahan karena di kelurahan itu ada tamu tentara-tentara. Saya disuruh membawa ranselnya itu sampai ke Desa Tumpakoyot. Saya bawa ransel tentara dengan perbekalan tentara itu, mikul dengan teman-teman yang lain, mbantu gitu. Pak luruh kan dimintai orang supaya membawakan ini, gitu. Lalu saya ini oleh Pak luruh disuruh itu. Tentaranya, kalian adalah dia 40 orang. Rencananya dia [tentara] hanya, anu saja, hanya jalan saja, ambah menggambar Desa Ngrejo. Sini terus selatannya. Sambil berjalan itu, dia memperkirakan berapa kilo Desa Ngrejo-Bakung terus Sumber Jadi. Setelah datang di Tumpakoyot, datang di rumahnya kepala desa, eh, Pak Dirjo. Tumpakoyot itu belum jadi desa, masih dukuhan, kamituwo. Habis itu saya disuruh pulang.

Untuk mengatasi dukungan rakyat terhadap gerakan di Blitar Selatan, militer mengambil inisiatif mengganti para pamong desa dengan seorang caretaker (penanggung jawab) dari ABRI yang terdaftar sebanyak 234 orang.[17]

Dari posisi ini militer berhasil mengumpulkan keterangan lebih banyak tentang keadaan di Blitar Selatan. Sementara itu, beberapa aktivis yang terlibat aksi penyergapan pun tertangkap dan dari mereka diperoleh informasi lebih mendalam tentang struktur organisasi serta kegiatan perlawanan. Menurut laporan militer, gerakan ‘sisa-sisa G-30-S/PKI’ saat itu sudah berhasil menjangkau Surabaya, Malang, Blitar Selatan, dan daerah pegunungan di Jawa Timur. Setelah melancarkan operasi intelijen mulai pertengahan 1967, Kodam VIII/Brawijaya pun menghimpun kekuatan untuk melancarkan operasi pembersihan yang dimulai Februari 1968. Pangkopkamtib Jenderal Soeharto memperkuat rencana operasi itu dengan Surat Perintah Operasi pada 20 Februari 1968.

Dalam perintah operasi itu disebutkan kerja sama antara pasukan-pasukan di tingkat Kodim dengan pemerintah sipil, termasuk kepala dan pamong desa. Untuk dukungan logistik, pasukan pemerintah mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh warga yang lari menyelamatkan diri, mulai dari beras sampai ternak, seperti ayam dan kambing. Operasi fase pertama tidak banyak membuahkan hasil. Serangan balasan dari sejumlah detasemen gerilya tingkat kompro justru semakin meningkat. Kodam VIII/Brawijaya kemudian mengeluarkan konsep operasi baru yang bertugas menghancurkan basis PKI di Blitar Selatan dengan mengerahkan kekuatan militer yang lebih besar. Tindakan itu pun tidak berhasil mengikis perlawanan secara efektif,

dan akhirnya pada 5 Mei 1968 dibentuk Satuan Tugas Trisula yang dipimpin Kolonel Witarmin, Komandan Brigif Linud-18.

Panglima Kodam Brawijaya, Mayjen Jasin, secara jelas dan tegas mengatakan bahwa tujuan operasi itu adalah penghancuran total PKI: 'Operasi ini berpangkal-tolak dari prinsip yang saya anut bahwa sebelum golongan komunis dapat bangun kembali sebelum kekuatannya pulih kembali, sebelum pengaruhnya makin meluas dan membesar mereka harus dipukul habis-habisan, harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.'[18] Susunan personel Operasi Trisula memperlihatkan bahwa penghancuran basis PKI di Blitar Selatan memang dilakukan secara sistematis dan dengan kekuatan besar. Bagan organisasinya memperlihatkan kelengkapan mulai dari unit tempur, administrasi, perhubungan, peralatan, angkutan, pemeliharaan rohani, penerangan, sampai pasukan amfib. Sebagai pelaksana di lapangan, Satgas Trisula mengerahkan lima batalyon tentara, salah satunya adalah batalyon Infanteri Para (pasukan terjun payung) dari Kostrad, yang berada di bawah Kodam VIII/Brawijaya. Ditambah lagi dengan pasukan dari tiga Kodim dan delapan Koramil. Di samping itu, ada tambahan pasukan dari satu kompi Komando Pasukan Gerak Tjepat (PGT) Angkatan Udara: satu skudron yang terdiri dari dua helikopter, dua pesawat pembom B-25, dan 6 pesawat lainnya. Selain unsur-unsur yang langsung terjun ke lapangan, masih ada lagi satuan-satuan yang disiapkan

jika sewaktu-waktu dibutuhkan, yaitu satu batalyon Zeni Tempur Amphibi, satu batalyon Artileri Medan, satu batalyon Infanteri Para, serta satu grup Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).[19]

Menyadari sulitnya menembus wilayah itu, pasukan yang diterjunkan biasanya mengumpulkan penduduk di lapangan desa atau tempat lain yang agak luas dan terbuka, untuk diperiksa. Perwira yang memeriksa menyebutkan beberapa nama orang yang diduga terlibat PKI atau pernah ditangkap sebelumnya, dan menahan mereka yang hadir di sana. Mereka juga menggunakan orang dari luar daerah Blitar Selatan, termasuk tahanan yang ditangkap lebih dulu, untuk mengidentifikasi orang yang dicurigai. Tidak ada jaminan bahwa orang yang kemudian ditahan benar-benar berhubungan dengan PKI atau aktivitas bersenjata di wilayah itu.

Untuk melancarkan operasi ini, Angkatan Darat berusaha melibatkan sebanyak mungkin orang sipil. Pasukan Hansip dikerahkan dari seluruh Jawa Timur. Orang sipil di Blitar Selatan, termasuk mereka yang ditahan, diminta atau dipaksa bergabung dalam operasi tersebut.

Ketika memasuki Blitar Selatan, Angkatan Darat sebenarnya tidak mengharapkan kerja sama dengan penduduk lokal. Mereka justru menganggap semua penduduk setempat sebagai musuh. Dalam sebuah konferensi pers, Mayjen Jasin mengatakan bahwa rencana awal untuk mengganti semua camat dan kepala desa

dengan personel militer pada awal 1968, ‘tidak dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Karena Rakyat di daerah itu adalah praktis sudah berfihak pada mereka.’[20] Ia mengatakan bahwa Angkatan Darat harus menggelar operasi militer karena ‘operasi territorial’ tidak berhasil dengan baik. Karena semua orang di wilayah itu dianggap pendukung PKI, maka pasukan militer tidak dapat mengandalkan dukungan mereka dalam Operasi Trisula. Dalam kenyataannya, militer memang memperlakukan penduduk dengan buruk dan membuat mereka merasa diteror.

Perhatikan cerita Wagiman yang saat itu tinggal di Blitar Selatan. Ia tidak pernah terkait dengan PKI, tapi saat pasukan militer tiba, ia lari ke hutan karena takut.

Sampai tahun 68 mulai ada operasi, operasi saya ya juga takut saya lari lagi sampai ke pantai... takut kalau ada orang dipegang, dipukuli itu... kebanyakan di sini ini takut... kalau dipegang dipukuli, diurus-diurus itu... bukan PKI kebanyakan itu... tapi kebanyakan yang takut itu juga disangka PKI saja... Saya lari ke hutan-hutan dekat pantai itu [Pantai Selatan]... saya ikut ke hutan itu kiranya hanya satu malam satu hari, lantas saya di rumah, terus di rumah ada perintah dari Pamong Desa supaya semua masyarakat berkumpul di desa pada waktu itu jam gangsal–jam lima sore... terus itu pada jam lima sore semua masyarakat berkumpul di sini. Terus ada perintah lagi, ‘Besok berkumpul di Bakung.’ Terus semua masyarakat berkumpul di Bakung... Iya semua

masyarakat, laki-perempuan... [desa] kosong, yang mengisi itu tentara-tentara yang operasi itu... Dikumpulkan di Bakung, jadi–skrining (screening, penyaringan) itu, skrining lima-liman, saya itu diambil, ada salah seorang yang menunjuk saya, saya dimasukan ke tempat pengurusan... Lima orang diurus satu-satu. Yang cocok namanya dengan yang diperlukan dengan tentara itu diambil... Saya kena, ada salah seorang yang nunjuk saya kira-kira. Saya ia tidak tahu [salahnya]. Saya dimasukan tempat pemukulan itu–diikat semua orang-orang yang diambil itu, pada jam lima sore itu sudah habis urusan dialihkan ke tempat tahanan, tempatnya di lapangan Bakung, lantas di situ dimasukkan ke tempat tahanan saya masih diikat–diikat dulu dan dimasukkan ke tempat tahanan, saya ini dikasih itu lho, ketela godok (ketela rebus) satu-satu untuk makanan

Saat menjadi tahanan militer, Wagiman merasa harus bergabung dalam operasi memburu anggota PKI, karena jika menolak ia akan dianggap sebagai pendukung PKI.

Selama satu malam ditahan saya. Di situ itu dengan hansip itu didodoli (disodok-sodok) dengan granggang (bambu runcing) dari luar tahanan itu...

Untuk mendodoli tiang - orang tahanan itu yang di dalam. Terus saya takut itu, saya terus mingset-mingset (bergeser perahan-lahan) itu pindah tempat tidak sampai ke granggang itu berada... hansip itu dari masing-masing Kabupaten, seluruh Jawa Timur itu yang operasi di sini, seluruh Hansip Jawa Timur. Terus pada waktu jam enam

pagi saya dipanggil diurus di tempat tahanan–tempat pengejaran itu, terus saya dibilangi, diajak operasi ke hutan, ditanyai, ‘Kalau menemui PKI mau megang?’ Saya takut–wis mau (ya mau)... Diajak operasi ke hutan... [oleh] tentara... [yang ikut] hansip, masyarakat, masyarakat setempat... Semua itu hansip, tentara kaleh (bersama) masyarakat Bakung. Lantas datang ke hutan itu sudah jam lima, hutan Molang. Lantas jam lima itu terus membuat tenda-tenda semua tentara, semua hansip, semua tahanan seperti saya ini untuk bermalam di hutan, satu malam. Lantas paginya jam enam sudah berangkat operasi lagi, operasi itu menemukan orang tujuh yang di hutan itu... orang tujuh ini lari, yang kena tembak itu orang tiga dan yang empat itu lari enggak kena tembak, terus ditembak di situ saja, terus di, di depan itu, saya kan disuruh lihat, belum kenal saya ya bilang belum kenal... Iya orang Blitar Selatan, orangnya yang kena-kena itu sudah tua-tua, yang muda-muda melarikan diri, tidak kena... Bentuknya orang itu seperti petani... Ciri-ciri badannya itu seperti petani. Terus itu setelah ditembak mati terus operasi pergi lagi mengarah ke timur sampai datang ke sungai itu, mulut sungai sampe ke sini ini, kalau ada goa itu supaya dioperasi–dilihat, yang disuruh seperti saya ini supaya masuk di gua. Terus datang ini di gua sini, itu lihat ada orang mati di situ terus saya disuruh lihat. Terus saya operasi–saya belum kenal, orang-orang itu sudah busuk semua... Itu seperti dikatakan orang-orang itu, delapan

orang. Orang-orang itu sudah busuk, tidak tahu nama-namanya.

Wagiman dijadikan tukang angkut oleh militer untuk membawa peralatan radio yang berat ke atas bukit. Tapi bahkan setelah melayani militer selama lebih dari seminggu, ia tetap di penjara lagi dan disiksa.

Selama operasi saya tidak diikat, saya disuruh membawa itu lho, radio angin itu. Yang muda itu saya, yang lain-lain orang tua-tua semua... Tentaranya banyak ada satu kompi... Hansipnya itu ya banyak, wong pagar betis operasinya ini... Setahu saya itu hanya dua hari warga itu ikut...

Kalau saya selama orang-orang dikumpulkan di Bakung itu dipulangkan saya, orang-orang yang dikumpulkan di Bakung pulang, saya disuruh pulang dengan Pak Ja'i Komandan Pleton, eh Komandan Kompi pos mriki (sini)... [Saya ikut operasi] selama delapan hari... Saya ini pas diberikan di tengah- tengahnya operasi, kalau di muka itu pak tentara saya itu di belakangnya, terus lantas di belakang saya itu hansip, tentara campur-campur... Membuat tenda di hutan itu ya diberikan tengah saya ini, jadi kanan kiri saya itu tenda hansip, tenda tentara itu... Dikasih [makan] sama dengan tentara, setiap hari itu dikasih tiga bungkus. Rokoknya tiga cepet (batang), jatahnya tentara sama... Ya bunyinya [radio] kalau saya dengan itu, ‘caprak-caprak badak satu ganti’, ‘ya apa ganti’ gitu... Kira-kira [beratnya] ada 30 kilo... Saya dikembalikan ke pos sini... Lantas saya dipegang rambut

saya, saya diadukan pada tiang rumah itu... Ya tidak mengerti saya, urusan apa saya tidak ngerti... Hanya kata-kata tentaranya, 'Mula'no (makanya) jangan ikut-ikut PKI, gini ini jadinya.' Saya diadukan (dibenturkan) ke tiang rumah itu. Terus hansip-hansip itu, klewang itu, apa, kenthes (baton) itu, dipukulkan kepada punggung saya, malah saya itu m pun (sudah) luar biasa. Klewang itu ngerti? Di leher saya itu sudah pernah.

Menurut orang-orang yang saya wawancarai, Angkatan Darat kelihatannya secara rutin menyiksa para tahanan, termasuk orang setempat yang tidak menjadi bagian dari gerakan bersenjata PKI. Militer sering kali menahan penduduk dan memaksa mereka mengakui tempat persembunyian gerilya PKI atau tempat penyimpanan senjata mereka. Salah satu korban penyiksaan ini adalah Gunarto, seorang penduduk Blitar Selatan.

Saya ndak ditahan, sore suruh pulang. Tapi siangnya itu saya juga dianu, dipukul sama anu itu lho, tentara yang pulang dari operasi, saya masih ditanyai, dipukul di sini... Geger (badan) saya ini. Di punggung belakang, dengan anu itu, pelepahnya kelapa. Ya yang muda itu kan gini, sampai beberapa hari ini seperti anu itu, ndak gandeng dengan punggung tulangnya, anu kulitnya. Sakit... [Sebelum dipukul] sempat distrum... supaya ngaku... Saya nggak punya apa-apa kok ngaku. Yang saya akui apa? ... [Alat setrumnya] itu lho, yang diputer itu... Ini diikat, jempol diikat, suruh kaki bersilang itu duduk di bawah... [Diikat] pakai anu itu lho, benang. Tapi ndak dapat anu

itu, jadi saya distrum juga, ‘Hau...! Hau...!’ gitu. Ini seperti anu itu, bulu-bulu itu... Dulu dianu dengan benang, lalu diikat lagi dengan itu. Lalu itu diputar... Ditanya anu, senjata. Tanyanya juga anu, ‘Kowe wong PKI? Kowe weruh senjata? (Kamu orang PKI? Kamu tahu senjata?’)

Kula ngghih ngaku mboten gadhah napa-napa. Ora nduwe anu kok e.(Saya mengaku tidak mempunyai apa-apa. Tidak punya anu kok ya.) Ndak punya apa-apa, ndak punya senjata, nggak ngerti senjata. Juga anu itu, yang mengaku teman saya. Teman saya ngaku-ngaku tapi ndak tahu. Tapi itu yang malah diurus, terus-terusan, sampai menemukan temannya itu di Bakung itu. Yang ndak apa-apa diikut-ikutkan. Katanya tahu di sana tempatnya. Dia dari hutan kok tahu tempatnya di rumah, di dalam rumah itu, apa mungkin? ... Ya distrum lalu diulang lagi... Pertanyaannya sama, tapi saya juga ndak ngaku, ya juga ndak punya... Sakit itu, itu mutarnya itu cepat. Kalau pelan-pelan itu ndak anu.

Walau tidak selalu disiksa secara fisik, intimidasi terhadap penduduk terus berlangsung dan menjadi beban batin selama puluhan tahun. Bagi banyak orang, trauma pengalaman pahit itu melekat kuat seperti halnya kulit pada daging.

Juga, banyak dari orang sipil yang ikut operasi menyandang trauma, menjadi pembunuh yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Harsono, yang pada 1960an menjadi aktivis organisasi Katolik di Blitar kota mengisahkan:

Ketika itu semua organisasi kepemudaan di luar PKI dan onderbouw-nya memang dikoordinir oleh Kodim, Koramil. Kita diminta untuk menjaga tawanan, tahanan, di daerah Blitar Selatan. Saya waktu itu saya aktif di organisasi sekolah Katolik. Kemudian saya tahu persis bahwa tiga orang sahabat saya ikut dan ternyata mereka di sana itu memang disuruh membunuh. Jadi mereka memang ditugaskan oleh militer yang mengkoordinir untuk membunuh, dikasih jatuh satu orang membunuh satu orang. Waktu itu kawan saya, setelah dua minggu di daerah Blitar Selatan, ingatannya hilang. Ya kembali, tetapi dengan sorot mata yang sudah tidak jelas, kemudian dia ngoceh ke sana ke mari. Pakaiannya itu penuh[21]

Korban operasi militer ini bukan hanya pendukung PKI atau penduduk Blitar Selatan saja. Banyak orang sipil dan serdadu yang terlibat dalam operasi ini, seperti banyak veteran dari perang antigerilya yang lain, secara psikologis terluka oleh pengalaman itu.

Pagar Betis

Setelah semua desa yang dianggap rawan dan dinilai berpihak pada PKI berhasil dikuasai militer dengan menempatkan personel dan mengambil alih kepemimpinan desa, orang pelarian di Blitar Selatan tidak lagi bersembunyi di desa. Hubungan dengan masyarakat

setempat pun tidak lagi terang-terangan dan leluasa seperti sebelumnya. Mereka akhirnya bersembunyi di hutan dan tempat yang sulit dijangkau, atau hidup di ruba-ruba yang baru dibangun. Ruba yang dibangun pun sangat sederhana dan ternyata tidak efektif untuk bersembunyi. Militer menggunakan taktik pagar betis itu untuk memojokkan gerilyawan.

Muyatno menceritakan tentang cara kerja taktik tersebut.

Pagar Betis yang jaraknya antara orang satu dan orang lain itu satu meter. Itu berlangsung lama sekali, lalu kita itu makin selatan, makin selatan, makin selatan, sehingga kami itu terpepet (terjepit) di lautan. Pada waktu itu banyak dari kami yang tertangkap, yang lolos cuma sedikit. Sedang orang-orang penduduk sana itu dikumpulkan tersendiri di satu, apa itu, pendopo pendatang, pendopo kelurahan. Yang tidak kumpul di pendopo kelurahan dianggap orang pendatang dan ikut orang, orang PKI. Mereka ikut tertangkap bahkan juga ada yang dibunuh.

Seorang lain yang terlibat dalam perjuangan bersenjata, Ruslan, menggambarkan bagaimana ia dan kawan-kawannya dipaksa mundur ke selatan, dan akhirnya terpaksa menjadikan sebuah gua di dekat pantai sebagai tempat persembunyian terakhir mereka.

Pagar Betis itu begini. Setelah masyarakat yang tidak lari itu ditampung di satu tempat, di Bakung, desa dikosongkan. Itu terus desa di Operasi Pagar Betis, setiap

rumah ditengok. Akhirnya ya, mungkin ada nangkap orang atau tidak saya ndak ngerti. Akhirnya terus ke hutan, ke hutannya juga begitu. Jadi di antaranya masyarakat yang sudah tertangkap diajak operasi atau hansip bawaan atau Ansor dan Sakera-Sakera yang dari utara, bawaan tentara tadi, dibariskan. Dibariskan, potong kompas dengan jarak dekat-jarak dekat terus, namanya pagar betis, ke selatan semua. Digiring ke selatan, supaya ngumpul di selatan, akhirnya tertangkap, hasilnya begitu. Ternyata di situ ya juga ada yang tertangkap, juga ada yang lari, ya ada memang orang larinya ke selatan semua, ya kena, mati, gitu... Jadi jalan kalau malam, kalau siang itu takut kalau ada operasi pagar betis ya ngumpet (bersembunyi) masuk air, ngumpet di gerowongan kayu, kayu yang berlubang itu di hutan.

Muyatno lalu menceritakan pengalamannya ketika mencoba keluar dari tempat persembunyiannya dan nekat menerobos kepungan Operasi Pagar Betis:

Operasi Trisula dibawa massa hansip dari bawah, atau massa yang pro-Soeharto diajak operasi pagar betis. Ha, kita dikirim mepet (dekat) ke laut, Laut Selatan, Kalau sudah nepi ke laut itu kan musti gampang ketangkap. Ha sekalipun ada pagar betis, tapi banyak di antara kita itu yang bisa menggunakan peluang-peluang yang sehingga pagar betis itu sudah bisa diterobos. Seperti saya itu dipagar betis masih bisa lolos ke barat. Itu memang ya–apa itu, ya keuntungan. Setelah akhirnya tertangkap, tapi sesama teman-teman yang dulu pernah sama-sama

berjuang, ada yang namanya Bu Andhika itu, ketangkap tanggal 11 atau berapa, saya tanggal songo likur (duapuluh sembilan), tanggal 29, tahun 69. Ha ceritanya pada waktu sama Bu Andhika, itu kami kumpul di suatu Gua Parang di dekat Laut Selatan. Itu Parang kelihatannya juga didapat dari laut... Nah, terus ada seorang pengkhianat yang keluar dari Parang itu, dari gua itu, mungkin menceritakan pada pihak Angkatan Darat, pihak operasi itu. Ha kami sudah terkepung di situ, termasuk Bu Andhika dan sebagainya. Kami masih punya senjata ya, mereka menggunakan senjata kita lawan dengan senjata dari gua itu, tapi ya dari satu arah. Lalu dengan senjata mereka, mereka ndak bisa menghancurkan kita atau menangkap kita, lalu menggunakan helikopter. Helikopter lewat itu, lewat laut, dan membaki di situ. Sampai yang namanya gua itu dulu–apa itu, carang-nya (rantingnya) itu, banyak pohon-pohonan itu, tumbang semua. Dan mereka masih belum bisa memaksa kita untuk keluar dari gua. Terus dia sangka kalau dengan demikian mereka ndak bisa menangkap kita, mereka bikin ngebor, ngebor dari atas. Dari atas, terus nanti digranat atau apa, dibunuh di situ. Oh pada waktu itu, termasuk saya ini, yang ikut menentukan, ‘Ini kami di dalam gua ini musti mati, sebab–tapi kalau keluar dari gua yang ditanya mati atau hidup.’

Terus Bu Andhika pada waktu itu ndak ikut karena dia pindah di dalam sama anaknya. Ha terus pikiran saya begini, ‘Bagi mereka yang pindah karena tidak ada kemampuan kekuatan untuk lari, itu kalau yang lari itu

sudah–sudah apa itu - yang akan lari bisa diketahui oleh musuh–dan mereka ndak akan ngebom gua ini'. Nah terus, satu kasus dihadapi. Kita tetap tinggal di gua ini musti mati. Tapi kalau kita melarikan tugas dua ini, mungkin masih bisa hidup dan berjuang.' Nah, saya bersama-sama dengan berapa teman-teman, jam duabelas malam itu naik ke atas. Wah itu sudah, massa Angkatan Darat sama Hansip, Ansor dan sebagainya sudah mengepung situ... Tepat pada jam satu dikomando, lari. Sudah lari semua. Lari sudah nerobos itu barisan–barisan massa, barisan pagar betis. Sudah itu lah ada seorang pahlawan yang namanya Paryadi, itu dia megang AK, seorang murid–anak murid. Dia paling akhir, kemudian AK itu menembak-nembak, sehingga pada perhatiannya Angkatan Darat, pihak operasi itu ke Paryadi. Lha kami, kami-kami ini, diuber oleh massa rakyat. Saya hampir ketangkap, tapi masih kuat saya lolos. Ha setelah lolos itu ditembak dor...door...door! Ditembak dari belakang, terus saya pura-pura nggelundhung (menggelinding) itu. 'Rasain mati lo!' Diuber, terus saya bisa melewati massa, massa pagar betis. Saya dengan beberapa teman bisa lolos.

Seperti disebutkan dalam kutipan di atas, orang yang berada di gua bersama Muyatno adalah Ibu Andhika. Ia menggambarkan bagaimana ia dan anaknya terus masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan diri dari serangan militer:

Ha, terakhir setelah kena pendadakan itu, jam dua siang, kita lapar sekali cari makanan gitu lho, keluar gua

dengan teman-teman itu. Lalu ada teman yang tertembak, sekarang masih ada itu, kena jeren itu namanya Warsimin. Sekarang masih jadi saksi itu... Pendadakan he-eeng. Saya dengan Soeroso itu, anak Angkatan Laut yang desersi. Itu naik, jadi semua lari, kan kita di jundangan gitu, pokoknya di lembah, itu ada gunung yang terjal itu, kita naik ke atas itu. Lalu saya mundur, tapi merangkak, suruh Suroso itu ke depan gitu, selisih barang kali dua meter dengan kepala saya kakinya itu. Lalu ada pemberisihan dari tentara yang, pokoknya tentara yang akan mengepung kita itu. Kan teman-teman, kan kita nggerombol cari makanan itu, itu kan ketahuan tentara yang operasi... [Tentara] di ujung sana gitu tadinya, di atas lembah sana. Tahu itu kan terus datang, mendatangi ke arah kita, itu anak saya yang masih hidup di Jambi itu, itu lari ke mana saya ndak tahu, saya dengan Soeroso itu naik yang terjal itu, saya mengikuti. Ha, setelah di atas, Dik Roso itu ke depan, saya mundur, pokoknya abstan-nya (afstaand, jarak) satu setengah meter atau kurang lebih dua meter. Itu lalu ada pemberisihan tentara yang dari bawa dreeeel, deeel, dreeel, tembakan pokoknya barang kali di situ masih ada orang begitu ya, itu yang kena Soeroso itu... Jadi manjat begini ya, terjal manjat, saya ke sini, situ ke sini ya to, lalu tembakan draaal, draaal, draaal, dari bawah, dari lembah itu. Kita kan ada barang-barang di situ, kita ada bawa bentis, soal makanan, singkong mentah, gitu. Ya hanya dua, satu gitu dapat makanan belum dimakan itu. Jadi, lalu ada tembakan, saya dengan

napas, ‘hhheegggrrr’ tiga kali. Eh, Dik Soeroso itu meninggal. Setelah kita lihat, tengok sana, tengok sini, sudah nggak kelihatan tentara, saya merangkak ke tempatnya saya balik. Dia bawa AK, AK-nya saya lepas, saya taruh, tapi ndak saya bawa... Lalu saya tinggal, selamat tinggal. Itu Soeroso itu anaknya Mantri Kehutanan, Blora, Jawa Tengah. Blora itu Jawa Tengah atau Jawa Timur ya? Anaknya Mantri Kehutanan itu, masih anak-anak.

Lalu saya turun, ketemu Warsimin yang kena jeren itu– jeren itu pelurunya ya dari tembus lalu, uwer-uwer lebar sini muter, lalu sikut (siku) sini. Jadi sekarang sikut ya nggak bisa begini [sambil memperagakan gerakan menekuk lengannya] ... Lalu datang lagi Sukini, anak Maron itu, orang Maron. Kena ininya, kena peluru, eh bengkak dagunya. Lalu obatnya apa? Bentis yang kita bawa itu disesel (disumpalkan), masukkan itu biar ndak infeksi kena peluru itu. Lalu si Warsimin itu saya peras dengan kain kotor, pokoknya diperas biar nggak infeksi itu. Lalu kita ndak tahu dia pergi ke mana ya. Lalu saya siapa yang membawa juga ndak jelas.

Masuk ke Gua Gayasan itu, Gua Gayas. Gua Gayas itu sebelum timurnya Gua Mbluthuk. Ada gua Mbluthuk di situ. Gua Mbluthuk itu gua yang ‘kali panjangnya berapa meter gitu lho. Sekarang malah jadi untuk wisata. Dalamnya itu ada ‘kali sampai tembus ke laut. Itu lalu Gayas, Gua Gayas, Mbluthuk, Gayas, lalu Tambak yang sekarang yang untuk rekreasi anak-anak. Lha itu di

tengah-tengah antara Tambak dan Gayas situ, saya masuk di situ, lewat pohon akar. Kaki saya itu siapa yang menerima saya nggak tau, pokoknya mengikuti kaki saya itu diterima dengan saya pegangan akar. Gelayutan turun ke gua itu. Kalau lempeng (lurus) itu hanya lima belas meter, tapi karena kita turunnya miring-miring itu 100 meter sampai mulut gua. Ya di situ sudah banyak teman, beberapa tapi perempuannya hanya saya, he-eeng. Lha waktu di gua itu ya, ditembaki dengan granat itu dengan LE barangkali itu... Dari samping, ndak bisa dari atas. Pernah atasnya gua itu digali, digali maunya akan dibom plastik[22] itu. Tapi bom plastik itu hanya mampu lima meter, lha padahal itu 15 meter. Dia nggali lima meter saja sudah payah, nggak jadi untuk blok dia, dia menjaga di atas. Jadi kita dengan dia bicara apa, di bawah itu kita dengar.

Jadi saya di dalam gua itu masuknya hari malam Minggu, Sabtu malam ya. Malam Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pagi saya tertangkap, ditangkap tanggal 11 bulan tujuh... Mereka masuk, rakyat yang masuk... lalu massa di situ banyak sekali. Ada yang tau saya namanya samaran Tini, saya pakai nama samaran Tini. Jadi, 'Bu Tini dipegang, digeledah', dikira saya dapat bantuan senjata dari RRT katanya. Bantuan senjata dari RRT katanya, entah lupa saya di mana ndak tau ya, rambut saya kan banyak itu, saya gelung ke sini, karena kalau nerobos-nerobos begitu, lalu di sini nanti kesangkut, kalau di sini kan nggak.

Pakaian ya sudah nggak karuan wong ndak salin (kan nggak ganti), hujan terus to, 68 itu hujan terus.

Saat keluar dari gua dan menjadi tahanan militer, ia menyaksikan beberapa kawannya ditembak oleh militer. Ibu Andhika melanjutkan kisahnya:

Saya tertangkap di Gua Gayas. Pada waktu itu warga yang masuk. Orang-orang itu melihat ada kaki perempuan. 'Orang perempuan, keluar!'

'Kalau mau ditembak, ditembak saja dari luar,' kata saya. 'Kalau mau dimatiin, tembak saja dari luar.'

'Oh, ndak. Ndak dimatiin. Keluar!'

Lalu saya keluar. Itu ndak dimatiin. Anak saya masih di dalam, lalu ada lelaki yang kena dulu memang. Jadi yang melaporkan bahwa ada temannya, itu lelaki yang ketangkap duluan. Karena dia mau masuk ke tempat saya itu, tahu ada kaki saya, kaki wanita. Karena gelap saya nggak tahu dia. Tahu saya namanya Pak Seran. Orangnya kurus, bentuknya itu saya masih ingat. Lalu ditembak di situ lalu dibuang ke laut. Yang menembak itu, ya tentara. Tapi siapa saya nggak jelas dari kesatuan mana. Saya nggak hapal anunya, saya ndak sampai melihat. Pak Seran itu kan keluar dulu, lalu bilang kalau masih ada orang perempuan di dalam, gitu. Jadi kan masuknya dulu orang sembilan, katanya rakyat. Itu dapat orang laki-laki, ya Pak Seran itu. Lalu Pak Seran ditanya, 'Apa masih ada teman-temannya?'

'Saya ada, itu seperti kaki wanita di lubang yang satunya,' gitu. Lalu saya dipanggil, suruh keluar dan dia

itu ditembak di samping saya. ‘Ini teri, tembak!’ Pak Seran itu ditembak di kepalanya, dekat ubun-ubun pake pistol. Waktu itu posisinya jongkok karena sedang sakit. Dia hanya pakai celana pendek dan kaos. ‘Ah, ini teri. Ini kakap,’ gitu. Terinya ditembak, ‘Tar!’ terus dilempar ke laut.

Menurut Ibu Andhika, istilah ‘kakap’ (orang besar) dan ‘teri’ (orang kecil) digunakan sebagai petunjuk. Dalam Operasi Trisula ‘kakap’ yang tertangkap dianggap berharga karena dibutuhkan untuk dikorek keterangannya. Mereka tidak langsung dibunuh di tempat. Dari mereka biasanya diperoleh keterangan. Orang-orang ini biasanya dikonfrontasi dengan ‘kakap-kakap’ yang lain untuk mencocokkan keterangan.[23] Dengan cara itu, militer membongkar jaringan ruba dan gua yang digunakan oleh para pelarian dan mulai melakukan pengepungan.

Lokasi Blitar Selatan yang terkurung oleh laut sebenarnya menjadi masalah bagi PKI. Saat diserang, tidak ada tempat melarikan diri lagi. Pemilihan Blitar sendiri sebagai lokasi bersembunyi bukan melulu karena pertimbangan strategis. Rewang mengenang:

Kalau aksi seperti Blitar Selatan itu misalnya dilakukan di Sulawesi, mungkin akibatnya tidak separah Blitar. Karena Sulawesi itu wilayahnya luas sekali, luas sekali. Daerah manuernya juga luas, cukup bagus. Sehingga misalnya di sini ada aksi, terus dicurigai ini ada pencuatan-pencuatan kekuatan. Dilakukan operasi masih bisa bergerak ke lain tempat. Tapi di Blitar Selatan

ternyata dikurung begitu ndak bisa keluar. Dikepung kira-kira 13 ribu kekuatan bersenjata TNI sama Hansip. Setiap 50 meter itu satu pos-pos itu, pagar betis artinya. Ini taktik menghancurkan DI [Darul Islam] digunakan untuk menghancurkan Blitar Selatan. Lha, ini seandainya terjadi di Kalimantan atau Sulawesi, mungkin tidak akan sefatal Blitar.

Gerakan perlawanan itu semakin rapuh menghadapi operasi pagar betis. Perlawanan hanya berlangsung singkat, itu pun atas inisiatif beberapa orang saja, bukan sebuah keputusan yang jelas dengan struktur yang kuat. Strategi yang coba diterapkan para pemimpin kompro di Blitar Selatan maupun jaringan lainnya morat-marit dalam waktu singkat, yang membuktikan bahwa gerakan kompro itu masih sangat lemah.

Jasa atau Kerja Paksa?

Seperti yang kita lihat sebelumnya dalam cerita Ruslan, militer menggunakan tenaga yang tidak dibayar saat melakukan ekspedisi ke Blitar Selatan sebelum Operasi Trisula dimulai. Dalam cerita Wagiman terlihat bagaimana militer menggunakan tenaga kerja paksa selama operasi berlangsung. Angkatan Darat kemudian terus memaksa orang Blitar Selatan bekerja untuk mereka bahkan setelah operasi selesai. Baik penduduk setempat maupun tapol, dipaksa bekerja untuk proyek pembangunan pemerintah

setempat. Ini bukanlah taktik yang mendekatkan Angkatan Darat dengan penduduk, apalagi sebelum dipaksa bekerja, mereka masih dihina dengan dicukur gundul oleh militer.

Muhaimin mengingat bahwa ia dipaksa bekerja membangun sekolah setelah ia menyerah dan ditahan tentara. Berbeda dengan apa yang biasanya terjadi, ia diberi upah untuk pekerjaannya.

Ya bagaimana namanya, sudah menyerah itu ya bukan bebas, untuk bekerja, setelah menyerah dikerjakan untuk kerja bakti, kerja paksa... Ke anu, ke markas tentara di lapangan. Anu, di desanya sendiri-sendiri, di bagi Undul Alang ya di desanya sendiri-sendiri. Kan tiap-tiap desa itu kan minimal tujuh tentara yang berdiam diri untuk menjadi, yang dinamakan apa, perangkat desa. Kan ABRI semua... [Yang menyerah] khusus yang Bakung kira-kira 47 atau 45 orang, kurang lebih... Orang yang menyerah itu ya, kan tidak sama untuk menyerahnya. Ada yang hari ini, ada yang hari besok, besok lusa. Tapi setelah menyerah itu terus diberi pekerjaan, pekerjaan yang namanya kerja bakti, kerja sukarela. Apa membuat jalan atau bangunan ini dan itu dan sebagainya. Dan setelah menyerah itu, untuk kepala itu menjadi plonco semua. Digundul semua sama tentara... Terutama ya tentara dalam waktu itu. Tapi sebelumnya itu ada Sakeranya itu ada, tapi sejak saya menyerah itu tidak ada... Kalau yang menyerah itu tidak ada yang disisihkan, tapi ada dianggap berat sampai mati, tapi sebelum menyerah itu diadakan

skrining, penyisihan. Itu yang perlu disikat itu yang perlu tidak, itu ada... Yang menentukan pihak operasi sendiri, entah siapa saya tidak tahu, saya ndelik (sembunyi) [ketawa]... Kalau tokoh-tokoh [PKI] dari khusus desa-desa itu tidak ada yang tertangkap. Ada yang tertangkap, mati. Tapi tokoh-tokoh dari pendatang saya sendiri tidak jelas di mana tertangkapnya, di mana letaknya tidak ada. Ini nyatanya setelah reda foto-foto di Sanggrahan itu banyak, saya tidak tahu untuk penangkapan itu, katanya dulu di lapangan itu banyak orang yang dikudungi tikar dan sebagainya, ya saya tidak tahu. Di rumah saya ada yang ngeringkuk mati disetrum, saya tidak tahu, katanya orang perempuan itu ada.

Saya waktu itu termasuk enak, saya bekerja membangun sekolahan. Tapi kawan-kawan kita banyak yang disetorkan ke ilik-ilik (aparat desa) Suruwadang dan sebagainya, mau bikin jalan... [Membangun sekolah] kirakira satu bulan lebih lah. Bahan bangunannya kayu jati dari Dolok dan sudah disediakan dan saya tinggal mengerjakan. Untuk mengerjakan itu dengan teman-teman campur. Campur yang eks tapol dan yang tidak... Dulu dapat upah, tidak dapat makan, tapi upahnya paling, ya sederhana banget lah... [Upahnya] harian... Lupa itu, dulu masih ripisan (recehan) lah, masih rendah dalam perhitungan uang... Teman-teman ini banyak yang dikerjakan ke mana-mana, tapi khususnya saya terus berkecimpung di pertukangan, tukang kayu.

Gerakan perlawanan yang dibayangkan sebagian orang pun kandas. Sebagian besar pemimpinnya, seperti Oloan Hutapea, tewas dibunuh sementara lainnya disekap di penjara selama belasan sampai puluhan tahun. Mereka yang dianggap 'terlibat'- oleh sesama tahanan disebut 'pasukan gundul'- dikerahkan untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan pemerintah dan terus mengikuti indoktrinasi tentang kejahatan dan kekejian PKI.[24]

Di antara 'pasukan gundul' juga terdapat penduduk yang tidak punya kaitan apa pun dengan gerakan perlawanan. Sebagian dari mereka menerima upah yang sangat kecil jumlahnya. Bagi mereka, situasinya tidak jauh berbeda dari heerendiensten di zaman Belanda atau romusha di zaman Jepang.

Gunarto, salah seorang penduduk yang pengalamannya ketika disiksa telah kita lihat di atas, mengatakan bahwa dia dikerahkan untuk kerja paksa pada 1968 dan selama beberapa tahun selanjutnya.

Lalu setelah sore, lalu disuruh pulang dengan wakil komandan itu... [Namanya] Badrun, Pak Badrun. Lettu... Disuruh pulang, 'Ndak apa-apa wis sudah pulang.' Tapi saya dipotong rambutnya di tengah sini (menunjuk ke kepala bagian atas), lalu sini [ketawa]. 'Besok anu, cukur gundul!'... Setelah itu ndak apa-apa lagi saya... Kalau wajib lapor itu selama berapa tahun itu, sampai pemilu. Pemilu itu, jaman Soeharto itu. Pemilu pertama itu masih anu, sampai 77 itu masih wajib lapor... Dulu itu seminggu sekali. Di sana juga anu, katanya sana aku karo mlaku-

mlaku (sambil jalan-jalan) bawa teken (tongkat), usuk githok (kaso). Dulu itu [bawa] kaso kalau [ke] sana... Ya untuk teken(tongkat), tapi untuk bangunan sana... Ya untuk nyumbang. Ya suruh bawa... Diharuskan membawa... Entah kayu apa itu, saya buat juga saya bawa ke sana.

[Melapornya ke] Bakung... Jalan kaki... Jauhnya sih tiga kilo, tapi bertahun-tahun... Setiap minggu, lalu satu bulan... Sampai ada berapa bulan itu, lalu terus ganti satu bulan. Kalau tanggal 17 apel, 17 Agustus. Ya tiap bulan, setiap tanggal 17... Ya dikumpulkan, lalu disuruh kerja apa gitu... Saya waktu itu juga kerjaan itu, jadi yang pertama, yang pertama itu kerja proyek tiap hari mencangkul itu... Selama ada anu itu, ada setengah bulan... Dari anu itu lho Umitrako [Ometraco], proyek Umitrako itu. Tapi yang kerja dari orang-orang wajib lapor.

Selama bertahun-tahun Gunarto bekerja tanpa mendapat gaji dan makan. Salah satu bangunan yang dikerjakan dengan paksaan semacam itu adalah Monumen Trisula. Muhaimin menjelaskan:

[Monumen Trisula] itu pokoknya tahun 72 itu sudah diresmikan, kira-kira ya, di antaranya ya hampir delapan bulan lah. Kira-kira lho... Pekerja-pekerja itu kebanyakan orang-orang wajib lapor itu, dan soal batu dan sebagainya itu tidak ada yang beli.

Pada monumen itu terdapat patung prajurit yang didukung dan didorong dari belakang oleh penduduk sipil. Tampaknya pihak militer ingin menggambarkan bahwa

mereka memperoleh dukungan tulus dan sepenuhnya dari penduduk untuk menindas gerakan bersenjata PKI. Tapi, kalau kita menyimak cerita dari mereka yang menjadi saksi operasi militer di Blitar Selatan, penggambaran patung itu tidak tepat. Dengan menjalankan taktik pagar betis, penyiksaan terhadap penduduk, dan praktik kerja paksa, patung yang lebih cocok sebenarnya sosok orang sipil berdiri di depan, di bawah todongan senjata sang prajurit. Penting juga diingat bahwa monumen itu sendiri dibangun dengan kerja paksa.

Pembantai

Militer yang dipimpin Soeharto mendapat pembenaran hukum dan moral untuk menghancurkan PKI di Blitar Selatan karena adanya gerilya bersenjata di wilayah itu. Bagi tentara, operasi pembasmian itu adalah perang, karena ada dua kelompok bersenjata yang ingin mengalahkan satu sama lain. Walaupun pihak gerilyawan jauh lebih lemah, tetap tidak ada yang salah dengan operasi TNI di Blitar Selatan. Operasi itu secara teori sama seperti operasi melawan DI/TII dan PRRI/Permesta pada 1950an dan 1960an. Tapi yang tidak dapat dibenarkan dari Operasi Trisula adalah kejahatan yang dilakukan militer selama operasi berlangsung. Setiap orang bersenjata yang terlibat dalam perang, terlepas apakah itu pasukan pemerintah atau pemberontak, terikat

pada aturan-aturan perang tertentu. Salah satu perangkat aturan yang terpenting adalah perlakuan terhadap tawanan perang. Seperti telah kita lihat di atas, pihak militer saat memerangi gerilyawan PKI di Blitar Selatan memperlakukan tawanan dengan buruk. Beberapa di antara mereka disiksa dan dipaksa bekerja tanpa upah. Kejahatan lain yang belum saya gambarkan adalah pembunuhan terhadap tawanan perang.

Di Blitar Selatan, saya mendengar cerita tentang beberapa pembunuhan massal yang dilakukan oleh militer. Korbannya adalah orang-orang yang sudah ditahan sebelumnya. Salah satu cerita itu disampaikan Paijo, penduduk Blitar Selatan waktu itu:

Saya dikumpulkan lagi, orang laki-laki itu kan ada sebelas orang dikumpulkan terus disuruh anu itu, membuat lobang di pinggir sungai... Ndak [diberitahu], hanya ikut membantu tentara... Hanya itu, 'Ayo ikut, jangan lari, kalau lari nanti saya tembak!' Begitu. 'Ayo ikut saya!'... Dikumpulkan di pinggir jalan itu. Setelah dikumpulkan di pinggir jalan, saya disuruh ke pinggir sungai itu, dikawal oleh tentara itu... Datang di pinggir sungai itu, saya ini disuruh disuruh jongkok itu, ndak boleh ngeliat apa-apa. Lantas itu orang-orang yang dibawa ke situ itu katanya orang-orang PKI... Pertamanya saya ini ndak lihat, ndak tahu. Setelah ada di situ itu saya tahu bahwa orang itu akan dibunuh... Antaranya ada 40-an [orang]... Dulunya dari Bakung itu [dibawa] pakai kendaraan, lantas dibawa ke pinggir kali itu disuruh jalan,

tapi sudah diikat semua [tangannya]... [pakai] tambang... [diikat] empat-empat... Empat, lantas diberi tambang lagi, sini empat lagi, empat lagi. Seperti orang baris itu tapi ditaleni (diikat) semua... Laki-laki semua... Dengar hanya tembakan itu.... Hanya pembicaraannya tentara-tentara itu, tiang ceruet (berisik) begitu, saya ndak anu... Ndak mendengarkan. Karena di sini ini, apa namanya, dengan senjata itu kuping ini cumpleng (berdengung)... Ya lama, orang 40 itu. Dan ada yang ditembak dua kali, tiga kali dan gantiganti itu kok. Yang menembak itu sepertinya dijatah begitu, sepertinya. 'Ini kamu ditugaskan menembak.' Lantas ini sudah menembak, nanti panggil lagi tentara yang lain itu suruh menembak...

Setelah selesai penembakan itu kan sudah mati semua, saya ini, anu. Tentara yang dari Bakung itu pulang, yang bawa itu tadi, tinggal tentara yang jaga di situ. Saya, teman-teman saya itu disuruh mencari pacul... Disuruh mencari pacul di rumah yang kosong-kosong itu, lantas sudah, anu, membawa pacul untuk membuat lubang... Rumah semua kosong di sini... Orangnya ditampung ke Bakung itu... Setelah dapat pacul lantas disuruh membuat lubang itu, dan orang-orang yang mati itu lantas dikubur... Kan nguburnya itu ada dua jam. Dari jam lima sampai jam tujuh pulangnya... Yang delapan dimasukkan ke goa itu, kalau yang dikubur itu yaitu turah-nya (sisanya) yang dimasukkan goa itu... Tapi setelah diurug itu ada yang, yaitu, ada yang bicara. Bicaranya ya seperti Pak Maryono itu, 'Jangan coba-coba, PKI itu makin lama makin

berkembang, makin jaya.’... Wong saya ini sudah pas kok, pikiran saya ndak anu, ya hanya, Pak Maryono itu memberitahu tentara ada yang bicara begitu. ‘Bicaranya bagaimana?’ ‘Hanya bicara.’... [Tentaranya bilang], ‘Sudah ditutup saja.’

Ya ada yang pakai [baju], ya ada yang tidak. Kalau pakaiannya yang baik-baik itu kan dianu, diminta tentara itu, dikumpulkan di situ. Ditumpuk di situ, terus saya ini diberitahu, malah mau membawa, boleh membawa, tapi teman saya itu, dan ada yang bawa... Ndak bawa itu, saya ini wong, itu kan sepertinya wong, saya dulu itu, dan BTI itu kan persamaannya kan teman [tertawa]. Orang itu kan ya orang di sini, ya kebanyakan kan orang di sini, tapi kan ya teman sendiri, ndak tegel (tega). Kalau saya membawa, nanti saya pakai itu kan, lho, ada keluarganya tahu bahwa itu, ‘Sarungnya bapak saya kok dipakai? Asalnya dari mana?’ Begitulah, saya bagaimana nanti?

[Saya] ndak kena itu, karena saya itu invalid (cacat) ini lho. Invalid itu didakwa tentara itu ndak ikut-ikutan... [Setelah ngubur] pulang. Setelah pulang, datang di pos itu. Rumahnya Pak Gun itu kan untuk pos itu. Saya habis itu pulang ke rumah saya sendiri. Tapi ya suruh ngantarkan tentara itu, saya pulang ke rumah saya sendiri. Ndak berani kalau malam berjalan sendiri, lantas saya datang ke rumah ya, lantas anu, ngaso (istirahat)... [Tentaranya] ya hanya di anu itu, ‘Jangan bicara apa-apa, kalau bocor ya orang sebelas ini saya tangkap.’... Ndak, ndak pernah saya [cerita-cerita], ndak pernah. Karena

anak saya itu setelah selesai di bangku sekolah itu lantas pergi semua mencari pekerjaan sendiri-sendiri. Sampai sekarang ini anak saya itu, lima itu ndak ada yang di rumah kalau tidak hari raya... Waktu itu ya, kalau menangisnya ndak menangis, tapi pikiran ini takut, keronto-ronto (menayat hati). Terharu... [Di antara yang dibunuh itu] iya kawan sendiri... [Kenal] baik, ya namanya kalau ludrukan itu kan situ yang main saya yang nabuh itu.

Maryono, yang juga ikut menggali lubang untuk 40 orang itu, dalam kesempatan terpisah menceritakan hal yang sama. Ingatan keduanya sangat kuat sampai ke hal-hal yang sangat detil:

Itu ada orang PKI yang dibawa ke Ngrejo sini, yang akan dibunuh. Kalau ndak salah yang sebanyak 40 orang itu. Nah, itu yang ngrumat (merawat) ya bala (teman) saya orang sebelas. Waktu itu Pak Paijo, saya sendiri, terus yang lainnya sudah ndak ada, sudah mati. Sudah itu, saya ditodong dengan tentara itu supaya mbantu tentara, mbantu maksudnya mbantu ngrumat bangke (merawat mayat) 40 [orang] tadi–mayat-mayat yang sudah dibunuh pak tentara tadi... [Orang-orang PKI] masih ditumpakkan (dinaikkan) truk, dibawa ke pinggir lepen (kali), di sana ditembak... Itu bukan dengan tapi ya tau. Tahu sendiri maksudnya. Sudah ada di situ, saya dibawa ke situ, lalu yang dibunuh itu ya saya tau sendiri. Ditembak... Sebagian kenal, yang banyak tidak... Yang saya kenal ya, sing (yang) banyak orang Ngrejo. Kalau orang lain daerah, ya saya

belum kenal... Yang saya kenal kalau ndak keliru namanya Sani, Senen Parjono, terus Wagimin, Suro Kempleng, terus Gentong, Kamto, Sonto... Kalau [alasan ditembak] itu saya ndak ngerti. Tapi sasarannya yang pokok, adanya dibunuh dan ditangkap itu, sasarannya itu kan dianggap orang PKI. Mestinya gitu. Soalnya nangkapnya itu saya itu ndak mengerti... Ya saya amati ya kebanyakan ya orang tani... Waktu itu mestinya [organisasinya] yaitu, ya anu kuwi (itu), PKI kuwi ya... Saya sendiri ya belum puas, ndak ngerti kalau itu BTI kah, apa itu PKI. Tapi ternyata yang menjadi korban ya orang-orang itu. Maksud saya itu...

Di waktu itu saya sendiri itu di sungai, di kali itu lho. Terus suaranya yang 32 [orang] itu ditembak semua. Nyatanya yang luka itu yang banyak sini, dada sini. Kalau di sungai itu delapan [orang]. Soalnya kan jadi dua bagian lah, yang delapan itu dikembalikan ke gua, kalau yang 32 itu saya beri lubang, dua lubang. Yang dirumat (dirawat)... Tentaranya itu ya boleh dikatakan sebagian 511, sebagian lek dhoreng kawi iku apa to kesatuan ne, apa 512? (sebagian kalau yang loreng itu apa ya kesatuannya, apa 512?)–yang dhoreng satu regu, yang 511 satu regu... Kalau perempuannya kok tidak ada. Laki-laki semua... Ya masih muda ya ada, yang tua ya banyak. Tapi kebanyakan yang tua... Yang banyak itu sudah diberi tanda-tanda dadanya itu diselempang merah, ya. Tapi kebanyakan sudah ndak memakai, maksudnya apa ini–baju... Waktu belum ditembak itu ndak boleh dekat... He-eeng, tembakan itu dengan... Yang nembak ndak tau. Saya kan

di sungai, yang ditembak itu kan di atas sana. Jadi saya ndak mengerti masalah yang nembak berapa-berapa. Tapi nyatanya suaranya itu suara tembakan ramai, gitu... Terus ditodong, dengan tentara yang regu lain itu nodong orang yang sebelas itu... Umpamanya di atas ya terus diikuti dengan pak tentara dan ditodong, tidak dibiarkan saja. Kalau dibiarkan ya lari ya, kalau dibiarkan...

Nah [saya] di waktu berjalan ya jalan, nanti datang sungai, jongkok semua... Kalau tangan [saya] tidak diikat, tapi terus ditodong dengan pak tentara, disuruh jongkok. Nanti kalau ndak ditodong terus, kan nyamar–melayu (lari) maksude (maksudnya)–gitu. Sedangkan mengubur mayat-mayat itu ditodong terus sampai selesai itu ditodong terus. Tidak sampai dibiarkan dengan tentara itu... [Perintahnya tentara]

'Kowe gelem bantu ABRI apa ora?' (Kamu mau bantu ABRI atau tidak?)

'Purun Pak.' (Mau Pak)

'Lek gelem bantu ABRI, ngenteni niku.' (Kalau mau bantu ABRI tunggu itu)

Kula ditodhong wonten lurung mriki takiyan kula. Ditodong mriki kira-kira dangune seperapat jam. Sing ajeng dibunuh dibeto teng kali, niku kula ken negutno teng burine ditodong. Sampe dugi sungai diberondong, saya datang ke sungai jongkok, carane ngenteni leh mateni maksude. Ngenteni leh mateni kawi mau, bareng wis mati kon njenggelek meneh, ngrangkuli sing mati-matian, nglebokno ning jero ruba–sing nglebokno ruba

aku, Mas. Sampe selesai orang delapan. Selesai orang delapan kon munggah to, golek pacul dingge gawe lubang, rong lubang nggih ngubur meneh wong sing 32. (Saya ditodong di lorong sini. Ditodong di sini kira-kira selama seperempat jam. Yang akan dibunuh dibawa ke kali. Itu saya disuruh mengikuti sambil ditodong dari belakang. Sampai di tempat diberondong. Saya datang ke sungai, jongkok. Istilahnya disuruh menunggu bagaimana caranya mati maksudnya. Menunggu kapan matinya itu tadi. Setelah mati disuruh bangun lagi, memeluk yang mati-matian. Memasukkan ke dalam ruba, yang memasukkan ke dalam ruba aku, Mas. Sampai selesai orang delapan. Selesai orang delapan disuruh naik, cari cangkul untuk membuat lubang. Dua lubang untuk mengubur yang 32 orang lagi.)

Delapan itu sudah saya masukkan ke dalam gua dekat sungai. Guanya dekat sungai, tapi yang 32 orang itu di atas sana, di sawah atas itu... Selesai yang delapan itu saya ke atas mencari cangkul, membuat lubang–dua lubang.

Jadi, 32 orang itu saya jadikan dua lubang–ndak satu lubang, dua lubang... Ya di waktu itu lihat [mayatnya], Mas... Antara mayatnya itu ya tiga meter lah dengan lubangnya itu... Ya sambil ditodong terus. Sampai selesai, itu pulang saja masih ditodong dengan pak tentara sampai datang di rumah.

Ya, yang melakukan [penguburan] 11 orang... [Tentaranya] melihat. Hanya nodong saja tentaranya itu.

‘Hayo ndang diseleskne lak wengi!’ (Hayo cepat diselesaikan nanti kemalaman). Selesainya kalo ndak keliru jam tujuh malam, selesai sudah peteng (gelap)... Oh, [saya] dengar ya tapi, aduh. Kalau yang namanya entah ndak tau, sudah saya–apa itu–pendam itu, masih ada yang bicara, ‘Jangan menyia orang PKI. Orang PKI makin hidup yang sempurna.’... Ya entah ndak tau, sudah saya kubur... Kira-kira apa hidup apa tidak, itu ndak tau, tapi masih ada yang sombong gitu. ‘Jangan menyia orang PKI. Orang PKI makin hidup, makin lama makin hidup yang sempurna.’ Malah saya, ‘Masih bicara pak.’ ‘Sudah diurugi (ditimbun) saja!’ tentaranya itu... ‘Masih ada yang bicara Pak.’ Niki nggih tapuk kula getih thok pak. Getih thok niki kula damel napuk cangkem. Darah. (Ini telapak saya darah semua pak. Darah semua ini saya pakai untuk menampar mulut) ‘Sudah diurugi saja!’ tentaranya gitu... Ya terus, sampai selesai. ‘Pri pun Pak, m pun mantun.’ ‘M pun Pak, m pun mantun adus teng ngriko.’ Disenteri to, byur-byur. Iki banyak u banyu banjir, kon ngge adus. Niki dalam kenyataan dan nyoto, Pak. (‘Gimana Pak, sudah selesai.’–‘Sudah Pak, ya sudah mandi di sana.’–Disenteri, byur-byur [bunyi air mandi]. Itu airnya air banjir, disuruh pakai mandi. Ini dalam kenyataan dan nyata, Pak)...

Sudah itu sekitar jam tujuh malam, selesai itu orang sebelas itu disuruh pulang, ditodong dengan pak tentara itu supaya pulang ke rumahnya sendiri-sendiri. Pak Paijo ya pulang ngriki (ke sini). Saya pulang ke rumahnya Mbah Sajinah. Kumpul di situ ndak berani, apa itu, di rumahnya

sendiri-sendiri ndak berani. Kalau kelompok saya itu di rumahnya Mbah Sajinah, kumpul. Sebelas orang dengan isteri, dengan ibu, itu ya ada 15 orang... Sebelum pulang, 'Pak kamu jangan bicara apa-apa. Yang nanya siapa, jangan ngaku kalau kamu itu disuruh ngubur orang sekian banyaknya ya. Kalau kamu bicara nanti kamu saya tembak sendiri,' gitu kata pak tentara, yang dulu dipesan begitu dengan pak tentara... Perasaannya ya wedi, takut terus. Di rumah takut, makan ya ndak mau, soalnya ya jenenge konceh getih, ya ngono kae. (namanya berlumuran darah, ya begitu itu)... Sekaligus belum berani. Kalau lain hari, lain hari itu berani cerita dengan isteri itu. Tapi, kalau sekaligus belum berani. Kalau, yaitu, janji dengan tentara, kalau bilang-bilang siapa pun, akan ditembak sendiri, jadi sini tutup mulut ndak berani bilang.

Cerita dari Paijo dan Maryono ini mengenai pembantaian terhadap 40 tahanan. Ada beberapa pembantaian lain yang juga saya dengar. Tapi, saya tidak mengumpulkan cerita yang sama rincinya seperti cerita mereka di atas. Kita perlu melakukan penelitian lagi untuk mengumpulkan cerita-cerita mengenai kejahatan perang yang dilakukan oleh militer dan memetakan semua kuburan massal yang ada.

Jejak Blitar Selatan dalam Sejarah

Menghadapi represi militer terhadap PKI, sejumlah anggota dan pendukung partai yang selamat pada 1967 memutuskan menggunakan Blitar Selatan sebagai basis untuk melancarkan perjuangan bersenjata melawan rezim Soeharto. Tapi sebelum rencana itu terwujud, militer menyerang para gerilyawan PKI di sana pada 1968. Terbukti bahwa mereka bukan tandingan militer. Mereka tidak punya orang dan cukup senjata; mereka tidak siap menghadapi serangan besar-besaran sementara masih harus berjuang untuk bertahan hidup di daerah yang begitu terasing dan miskin. Sementara Angkatan Darat hanya menderita sedikit korban, hampir semua anggota pasukan PKI ditahan atau dibunuh. Sebagian tewas dalam perburuan di lapangan, tapi banyak juga yang mati dibunuh setelah ditahan, baik secara langsung oleh militer maupun hansip dan pasukan sipil yang terlibat dalam operasi itu. Tidak bisa dipastikan jumlah korban tewas dalam pelaksanaan operasi ini karena seperti terungkap dari cerita-cerita di atas, banyak peristiwa yang sengaja digelapkan dan tidak dilaporkan.

Kekerasan dan teror yang sekarang kita saksikan di mana-mana sebenarnya sudah ditanam benihnya dalam sebuah generasi. Pembasman di Blitar Selatan mengulang pola yang dipakai sebelumnya, yakni mengerahkan orang sipil sebagai perpanjangan tangan militer untuk menghabisi sesamanya. Keterlibatan kelompok sipil, baik

dari kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa–terutama KAMI dan KAPPI–menjadi catatan penting dari Operasi Trisula dan pembunuhan massal 1965-66 pada umumnya. Kaum muda Indonesia dimobilisasi besar-besaran untuk membunuh sesamanya, kadang tanpa tahu mengapa dan untuk apa mereka melakukannya. Sebagian dari mereka ikut menyandang trauma, menjadi pembunuh yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Ada dua hal yang dicapai dengan cara seperti itu. Pertama, mempercepat operasi pembasmian mengingat orang yang dijadikan sasaran banyak sekali jumlahnya. Menurut keterangan PKI sendiri, anggota dan simpatisannya di seluruh Indonesia mencapai puluhan juta. Bisa dibayangkan bahwa operasi pembasmian terhadap pemimpin dan kadernya memerlukan tenaga dan organisasi luar biasa besar. Kedua, dengan mengerahkan masyarakat sipil, maka peran militer tidak begitu menonjol, sehingga kampanye tentang ‘konflik horisontal’ terus dapat ditanamkan di benak masyarakat. Penjelasan atas semua itu berulangkali digunakan dalam kasus-kasus kekerasan lain yang dilakukan oleh militer ketika menggunakan tangan sipil sebagai pelaksana.

Perjuangan di Blitar Selatan, dari sudut pandang para pelaku dan orang yang mengalaminya, jelas berbeda dari penjelasan militer. Jika militer mengatakan bahwa perlawanan itu dilakukan secara sistematis, terencana dengan baik, dan disiapkan sejak lama, maka wawancara dengan para pelaku memperlihatkan bahwa Blitar Selatan

sesungguhnya menjadi basis bagi para pelarian untuk bertahan hidup. Rencana melakukan perjuangan bersenjata belum lagi berkembang dan aksi-aksi yang mereka lakukan ternyata tidak sepenuhnya dengan persetujuan para pemimpin. Di samping itu, kita mendapat gambaran tentang dinamika yang berbeda, termasuk cerita mengenai kelemahan di dalam gerakan, khususnya mengenai mereka yang tidak tahan menderita, tidak tabah dan sabar untuk menjalankan perjuangan jangka panjang.

Dari cerita-cerita para korban, kita juga belajar tentang penderitaan orang sipil di Blitar

Selatan karena perbuatan militer: penyiksaan, kerja paksa, dan pembunuhan. Angkatan Darat menganggap semua penduduk wilayah itu sebagai musuh, dan karena itu memperlakukan mereka sebagai musuh pula. Walaupun mengklaim diri sebagai pelindung, yang dilakukan adalah sebaliknya: menyerang penduduk. Seperti yang kita baca dalam masa setelah 1965, Angkatan Darat tidak pernah belajar tentang cara menggelar operasi antigerilya yang bisa memperoleh dukungan dari penduduk setempat. Cerita para korban mengungkapkan bahwa Angkatan Darat gagal memenangkan hati dan pikiran rakyat Blitar Selatan. Lebih banyak cerita semacam ini kita perlukan untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi dalam sejarah Indonesia modern. Cerita para korban dan saksi tidak semata melengkapi penulisan, tapi juga memberi

perspektif baru bagi kita mengenai masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Daftar Wawancara

1. Ibu Andhika, Blitar, 26 Juli dan 8 Desember 2000
2. Gunarto, Blitar, Maret 2001
3. Maryono, Blitar, Maret 2001
4. Muhaimin, Blitar, Maret 2001
5. Muyatno, Blitar, 12 December 2000
6. Paijo, Blitar, Maret 2001
7. Rewang, Solo, 19 Juli 2000 dan 27 Juni 2001
8. Ruslan. Blitar, Maret 2001
9. Sugondo, Blitar, Maret 2001
10. Wagiman, Blitar, Maret 2001

---

[1] Kodam VIII/Brawijaya, *Operasi Trisula* (Surabaya: Yayasan Taman Candrawilwatikta, 1969), h. 2.

[2] Sekretariat Negara, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1994), h. 162.

[3] Kodam VIII/Brawijaya, *Operasi Trisula*, h. 1.

[4] Pada September 2002, Solidaritas Nusa Bangsa melakukan ekskavasi di sebuah gua di Blitar Selatan yang disebut sebut sebagai kuburan massal bagi 41 orang oleh penduduk setempat. Menurut keterangan, mayat mereka dicampakkan ke gua tersebut setelah dieksekusi oleh militer. Tim ekskavasi itu berhasil menemukan sisa tulang belulang, tapi tidak dapat sepenuhnya masuk untuk mengangkat semua jasad yang masih tersisa.

[5] Program itu diusulkan oleh Kabinet Hatta pada Februari 1948 untuk ‘menertibkan’ pasukan-pasukan gerilya yang tersebar di berbagai tempat. Penertiban itu memakai tolok ukur pendidikan militer sehingga banyak pemimpin laskar dan aktivis politik yang angkat senjata pada masa revolusi

tersingkir dari tubuh militer, termasuk pasukan di bawah Jenderal Soedirman. Lihat, misalnya, Ann Swift, *The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1989), h. 44-48, 67-73; Hersri Setiawan, *Negara Madiun?: Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan* (FuSPAD, 2003).

[6] Rewang adalah tokoh PKI yang sangat terkenal dan sulit disembunyikan identitasnya. Karena alasan itu, dalam artikel ini saya menggunakan nama sesungguhnya.

[7] Di karesidenan Kediri (yang mencakup Blitar), PKI juga tampil sebagai pemenang dengan 457.000 suara, disusul PNI dan NU masing-masing dengan 455.000 dan 366.000 suara. Lihat Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: KPG, 1999), h. 123.

[8] Ini adalah judul pidato kemerdekaan Soekarno pada 1964, yang kemudian diterbitkan sebagai *Tahun 'Vivere Pericoloso'* (Djakarta: Tjita Agung, 1964).

[9] Genta Suara sebetulnya sebagian kepanjangan dari Gesuri (Genta Suara Revolusi Indonesia). Ini adalah judul pidato Soekarno yang disampaikan pada 1963.

[10] Harsono mengungkapkan pengalaman ini dalam sebuah pertemuan terbuka. Rekaman pertemuan itu telah ditranskripsi dan diterbitkan dalam bentuk buku, *Jaringan Kerja Budaya, Kumpulan Hasil Diskusi Tahun 2000* (Jakarta, 2000), h. 129.

[11] Jaringan Kerja Budaya, *Kumpulan Hasil Diskusi Tahun 2000*, h. 128.

[12] Jaringan Kerja Budaya, *Kumpulan Hasil Diskusi Tahun 2000*, h. 128.

[13] Mengenai jumlah tahanan politik, lihat Greg Fealy, *The Release of Indonesia's Political Prisoners: Domestic Versus Foreign Policy, 1975-1979* (Clayton: Monash Asia Institute, 1995).

[14] Kodam VIII/Brawijaya, *Operasi Trisula*, h. 63.

[15] Kodam VIII/Brawijaya, *Operasi Trisula*, h. 40.

[16] Redaktur Skets Masa, *Operasi 'Trisula' Brawidjaja Menghantjurkan PKI-Gaja Baru* (Surabaya: GRIP, 1968), h. 14 15.

[17] Kodam VIII/Brawijaya, *Operasi Trisula*, h. 243.

[18] Redaktur Skets Masa, *Operasi 'Trisula' Brawidjaja Menghantjurkan PKI-Gaja Baru*, h. 12.

[19] Kodam VIII/Brawijaya, *Operasi Trisula*, h. 54-55.

[20] Redaktur Skets Masa, *Operasi 'Trisula' Brawidjaja Menghantjurkan PKI-Gaja Baru*, h. 12.

[21] Jaringan Kerja Budaya, *Kumpulan Hasil Diskusi Tahun 2000*, h. 127.

[22] Bom plastik di sini maksudnya adalah bahan peledak biasa seperti TNT, yang ditempatkan dalam kemasan plastik, dan bukan bahan peledak plastik seperti C-4.
[23] Kolonel Acub Zainal menggunakan istilah ‘kakap’ dan ‘teri’ untuk menggambarkan hasil operasi anti-PKI di Surabaya pada 1968. Redaktur Skets Masa, *Operasi ‘Trisula’ Brawidjaja Menghantjurkan PKI-Gaja Baru*, h. 36.
[24] Kodam VIII Brawijaya, *Operasi Trisula*, h. 206.

II
SKETSA

Gumelar adalah seorang seniman yang menjadi tapol di bawah rezim Soeharto. Lahir pada 1943 dan besar di Magelang dan Jakarta, ia belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta pada awal 1960an. Ketika masih mahasiswa, ia bergabung dengan Sanggar Bumi Tarung, tempat banyak seniman muda berbakat bekerja, seperti Amrus Natalysa dan Joko Pekik. Ia kembali ke Jakarta pada 1964 dan bekerja di studio seni Panitia Negara. Studio ini bertanggung jawab untuk mendekorasi ruangan tempat upacara-upacara resmi diselenggarakan dan melukis foto-foto tamu-tamu negara yang berkunjung di panel-panel raksasa yang didirikan di jalan-jalan utama.

Sebagai seniman yang tidak memiliki hubungan erat-erat dengan Lekra, apalagi PKI, Gumelar tidak melihat ada alasan kuat untuk bersembunyi selama penangkapan massal yang berlangsung di akhir 1965. Ia tetap bekerja di Panitia Negara meski beberapa seniman yang ia kenal ditangkap. Ia tidak mengganti namanya atau pindah ke alamat lain. Ia melanjutkan hidup sebagaimana biasanya. Begitu studio Panitia Negara ditutup pada 1966, ia menjadi pengangguran. Melalui seorang teman di daerah Setiabudi, ia memperoleh pekerjaan di Gedung Kebudayaan Uni Soviet di Jl. Diponegoro. Ia bekerja di sana selama dua tahun tanpa menghadapi masalah apa-apa. Kehidupannya yang tenang tiba-tiba di hancurkan sama sekali ketika ia dijemput dari rumahnya pada

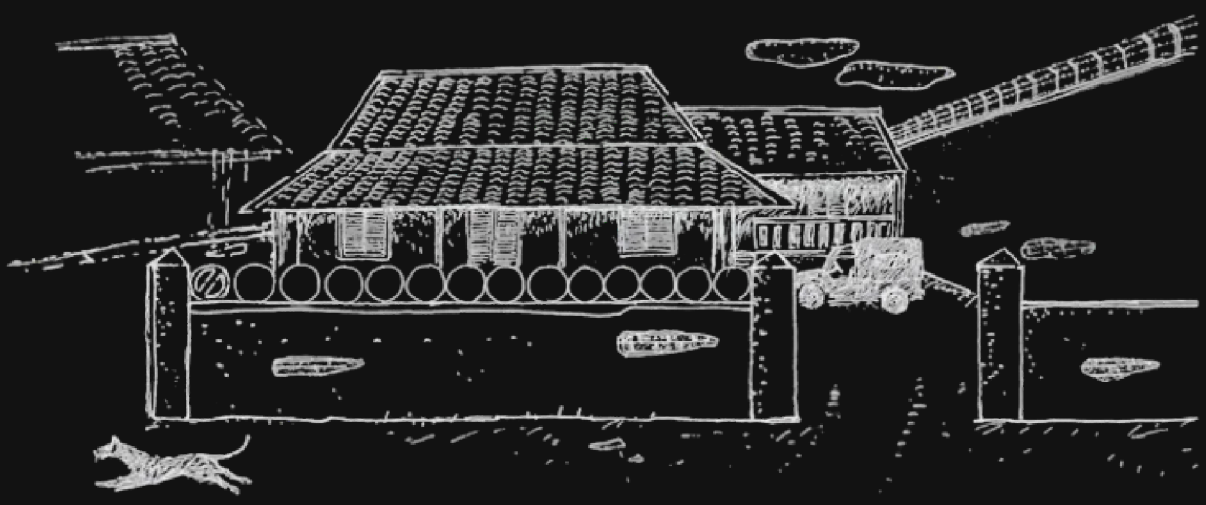
November 1968 oleh tentara. Satu-satunya ‘bukti’ yang dipakai untuk mempersalahkan dia adalah ucapan seorang kenalan yang melontarkan namanya ketika disiksa. Selama sebelum tahun berikutnya ia ditahan tanpa dakwaan, terutama di Penjara Salemba dan Pulau Buru.

Sekarang, Gumelar hidup bersama istrinya yang juga pelukis, Sarah, di Jakarta, dan masih tetap melukis.

Sketsa-sketsa di bawah ini menggambarkan suasana dari tahun-tahun pemenjaraan yang dia lalui. Teks yang mengikuti sketsa-sketsa ini ditulis kembali berdasarkan wawancara kami dengan Gumelar.

SKETSA GUMELAR

1.



Saya ditangkap pada Desember 1968. Saya dijemput di rumah kira-kira jam 11 malam dengan jip tentara. Di dalam jip itu sudah ada teman saya yang menunjukkan keberadaan saya, padahal saya tidak pernah berurusan dengan kegiatan politik apa pun. Saya tidak menyalahkan dia. Memang pada waktu itu semua tahanan terpaksa, karena siksaan, menunjuk orang lain. Saya dibawa ke rumah tua ini di Gunung Sahari dan ditahan sampai 8 bulan. Tentara mengambil rumah ini dari seorang Tionghoa yang menyewakan becak. Mereka menggunakannya sebagai markas ‘Operasi Kalong’ dengan komandan Mayor Suroso.

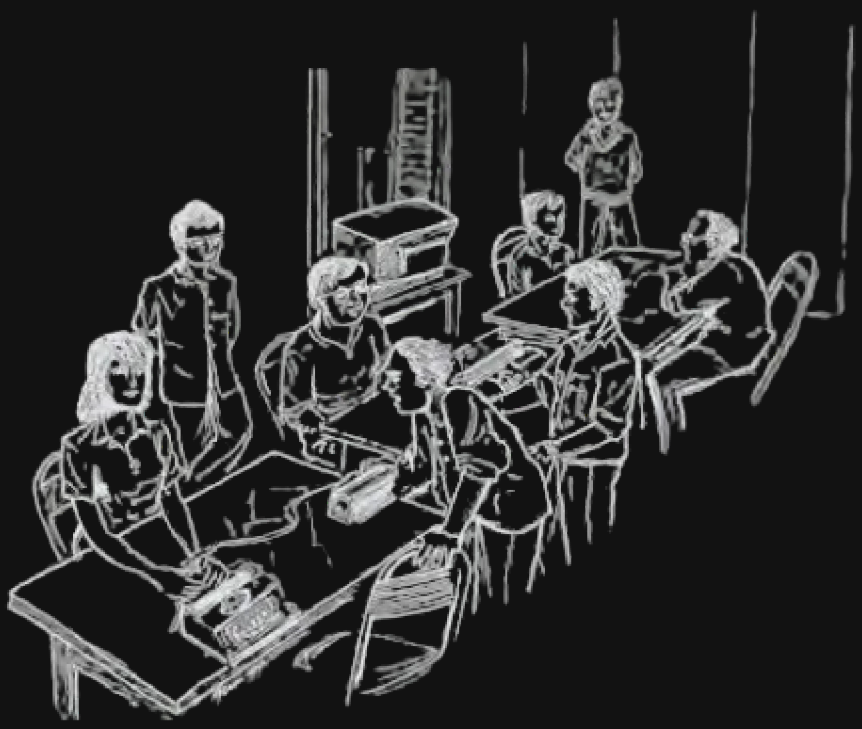
2.



Ada kira-kira 120 orang yang ditahan di rumah interogasi ini bersama saya. Penuh. Satu kamar kecil saja dihuni 12 orang. Kami tidur di lantai seperti ikan sarden. Saya ditugaskan memasak air tiap malam, dari jam 12 sampai jam 5 pagi, dan membagikan air minum. Orang-orang ini ditahan dengan alasan yang bermacam-macam, tapi

banyak yang tidak tahu apa-apa, seperti salah satu haji yang berzikir terus tiap malam.

3.



Waktu saya diinterogasi ada seorang wanita yang disetrum. Saya kagum terhadap dia karena dia tidak goyang. Dia tetap tenang. Hebat perempuan ini. Saya tidak tahu bagaimana dia bertahan. Yang lain kalau disetrum, langsung tumbang. Saya sendiri terkencing-kencing waktu disetrum. Saya lama disetrum dan dipukuli karena ada yang menganggap saya banyak tahu. Mereka tidak percaya bahwa saya tidak punya jaringan. Tujuh orang memukul saya, ramai-ramai, sampai saya bilang, ‘Apa yang Bapak inginkan dari saya tulis sajalah.’ Saya

sakit sampai babak belur dan berdarah-darah. Sebagai interrogator, selain tentara, ada beberapa oknum-oknum CC PKI. Umumnya, mereka terpaksa melakukan hal ini karena tekanan luar biasa. Tapi, ada satu eks-CC yang kejam sekali, sampai dia dapat pangkat kapten dari tentara.

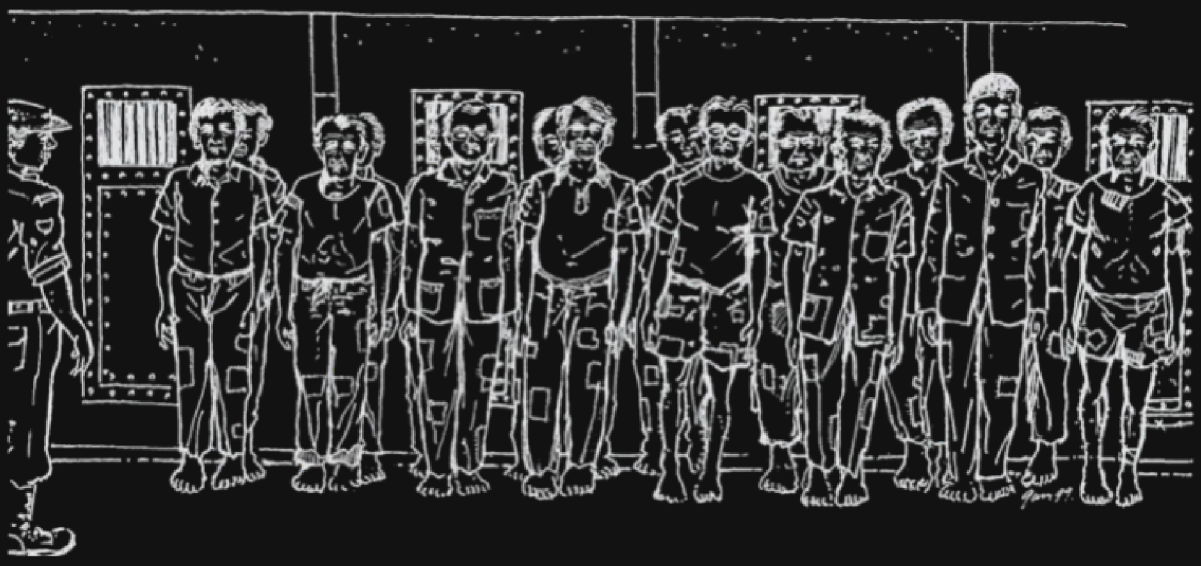
4.



Ada seorang perwira polisi yang jadi tahanan politik juga. Jagoan benar dia, secara fisik. Tapi waktu disetrum, jatuh dia, ‘blak!’ Biasanya, kabel alat setrum dipasang di ibu jari yang sudah diikat. Alat itu manual, diputar dengan tangan. Orang mau tidak mau mengaku kalau sudah dibegitukan. Saya mengaku juga, tapi masih punya akal. Saya sebut

nama orang yang saya tahu sudah ditangkap. Di dalam kamar interogasi, selain penanya, biasanya ada tukang pukul (figur di sebelah kiri). Otaknya tidak ada, kalau disuruh, dia langsung laksanakan tugas. Komandan tukang pukul di sana, seorang Sersan Mayor RPKAD, namanya Bob. Tinggi, besar dia. Waktu kami pulang, kami lihat dia jadi tukang parkir di Glodok. Nasib baik banget!

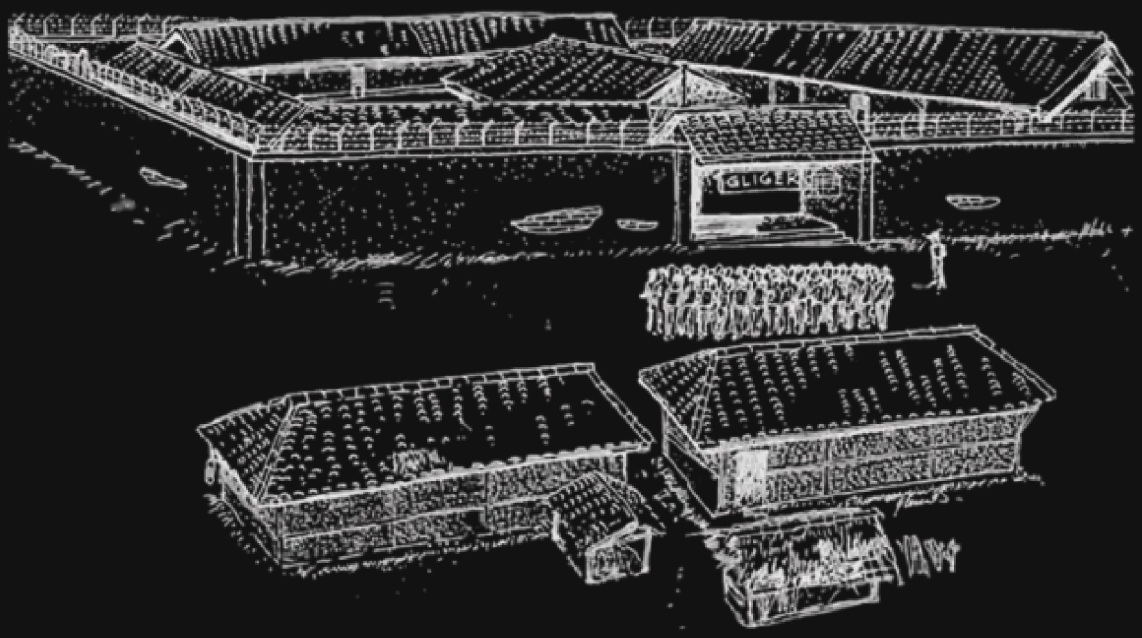
5.



Setelah delapan bulan di Markas Kalong, saya dipindah ke Kodam Jaya di Lapangan Banteng dan ditahan di sana selama 21 hari. Setelah itu saya di penjara di Salemba selama 14 bulan. Di Salemba, saya ditempatkan di Blok L. Tapol lain di blok ini sudah mendekam di sana sejak 1965. Pakaian mereka compang-camping dan penuh kutu. Tubuh mereka jamuran dan budukan (kurapan). Baunya bikin

orang mau muntah. Awalnya saya tidak bisa tahan tapi lama-lama jadi biasa dan tahan juga.

6.



Nusakambangan, 1970. Saya dipindah dari Salemba ke Pulau Buru akhir 1970. Rombongan tapol yang pertama dikirim ke Buru, 1969. Saya masuk rombongan kedua. Kami pertama dibawa dengan kereta api ke Nusakambangan, penjara pulau di lepas pantai Cilacap. Penjara itu jadi tempat transit sebelum naik kapal ke Buru. Di pulau itu ada tujuh penjara yang terpisah. Salah satunya disebut Gliger. Saya ditahan di sana selama tiga bulan. Petugas di sana sangat tradisional, kayak kembali

ke zaman kolonial. Bangunan memang dari zaman itu, tidak ada renovasi.

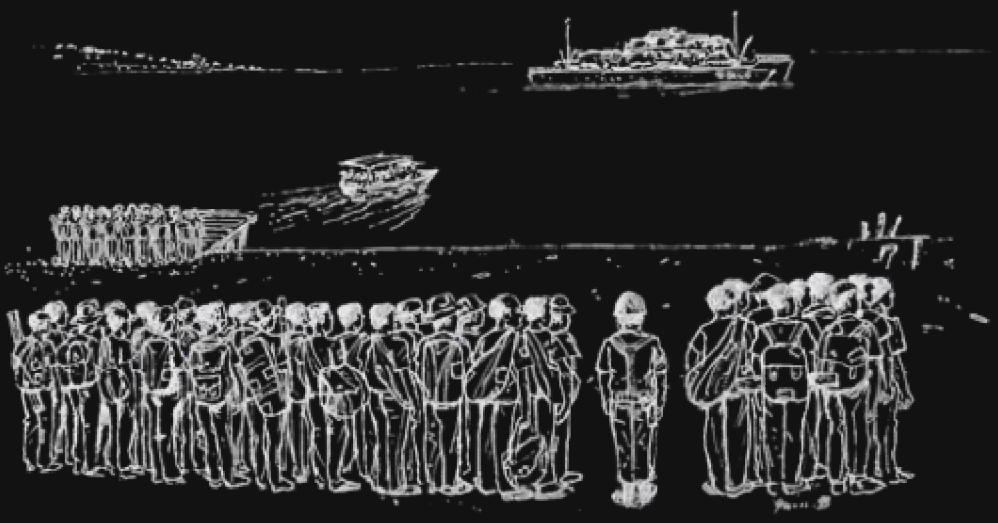
7.



Di Nusakambangan, kondisi fisik para tapol sangat cepat merosot karena jarang ada kiriman dari keluarga. Saya masuk kamar, kira-kira 12 m x 5 m, yang kapasitas resminya sebetulnya 25 orang. Tetapi ternyata diisi dengan 125 orang. Kami tidak bisa tidur. Mandi pun seminggu dua kali. Di dalam penjara itu ada sumur yang tidak berfungsi lagi. Mandinya di luar. Ada sebuah mata air yang berjarak kira-kira satu kilometer lewat jalan

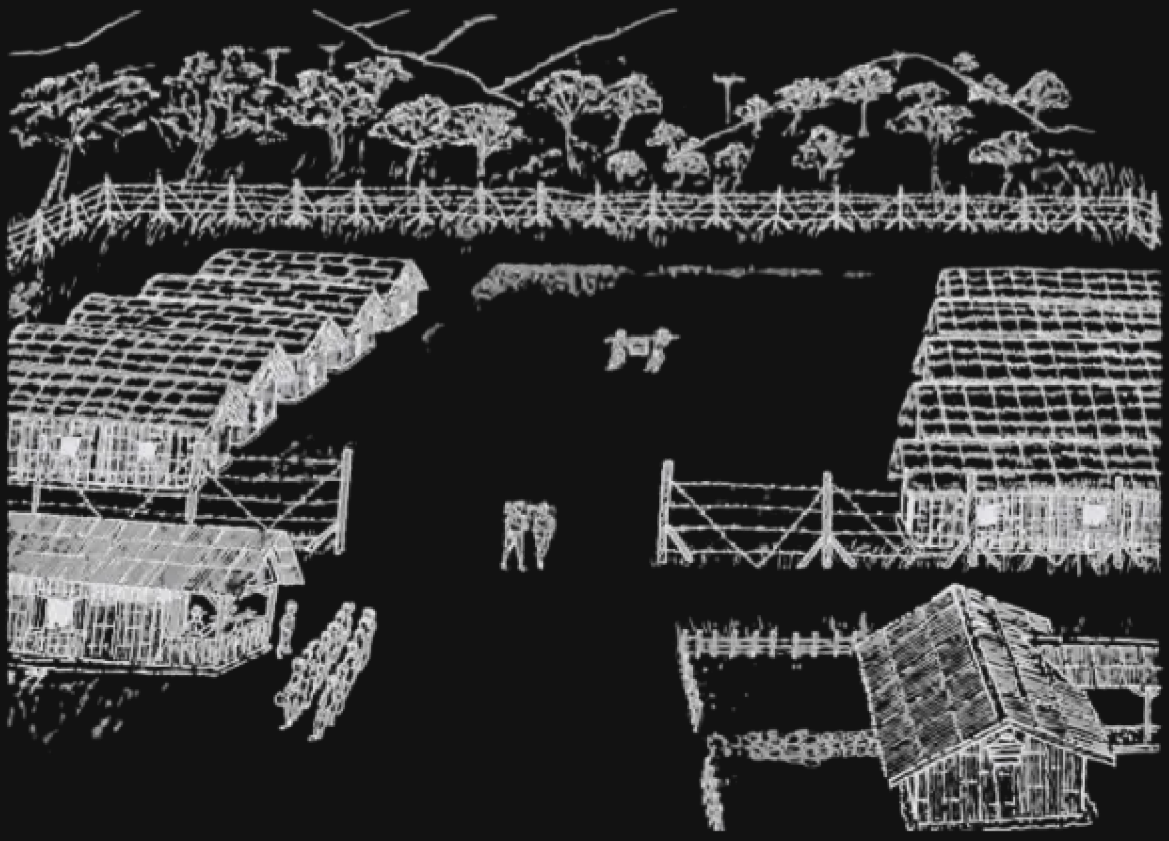
setapak. Kesempatan kami bukan untuk mandi, tetapi untuk cari makanan.

8.



Nusakambangan, 1970. Dalam rombongan kedua ke Pulau Buru, ada sekitar 5.000 tapol. Kami dikumpulkan dalam kelompok-kelompok kecil untuk naik perahu ke kapal besar. Kapal yang bernama Tobelo ini setidaknya beberapa kali pulang-pergi dari Nusakambangan ke Buru. Saya tidak merasa sedih maupun gembira saat berangkat ke Buru. Kami tidak tahu apakah keadaan di sana akan lebih baik atau buruk. Apalagi, kami tidak punya pilihan lain kecuali ikut perintah.

9.



Unit 4, Pulau Buru. Saya ditempatkan di Unit 4, yang disebut Savanajaya. Ada sepuluh barak di unit itu (dibangun oleh tapol yang datang lebih dulu). Setiap barak menampung 50 orang, jadi seluruhnya ada 500 orang. Dalam sketsa ini, di sebelum kiri gerbang adalah pos penjagaan. Ada peleton yang beranggotakan dua belas tentara, yang disebut tonwal di sana. Di sebelum kanan gerbang adalah wisma untuk komandan unit.

10.



Saat tiba, tanah di sana belum diolah. Kami harus membersihkan lahan, bikin pematang sawah, dan membangun saluran irigasi. Komandan unit memilih seorang tapol menjadi coordinator kerja. Koordinator ini akan bekerja sama dengan sepuluh kepala barak untuk memutuskan pembagian kerja. Beberapa tapol bekerja di ladang, lainnya di dapur, dan ada juga yang di hutan. Setiap pagi kami apel pukul 06.00 lalu kerja di luar sampai pukul 06.00 sore. Di sawah, kalau tidak ada pengawas kami diam saja. Kalau dia mulai datang, ada kode, seperti, ‘lalat hijau, lalat hijau,’ itu berarti tentara datang. Kami kerja lagi. Karena beras yang kami makan berasal dari sawah ini, maka kami pun terpaksa kerja. Tapi, kami tidak mau bekerja dengan aturan yang ditetapkan tonwal.

11.



>Beberapa tapol bekerja di hutan menebang pohon meranti dan membuat papan. Pekerjaan itu sulit dan berbahaya. Kayu itu lalu dijual oleh tentara dan tapol hampir tidak mendapat apa pun dari hasil kerjanya. Tapi, kadang-kadang, ada tapol yang menyembunyikan papan itu dan menjualnya sendiri. Mereka bisa mendapat uang banyak dari berjualan minyak kayu putih. Di sana juga ada pasar gelap.

12.



Setiap unit punya dapur yang akan memasak makanan bagi seluruh unit, biasanya nasi, sayur rebus, dan ubi. Dapur umum langsung dapat jatah dari pusat di Namlea: beras, untuk satu warga, sekian; minyak tanah, sekian. Karena kami pelan-pelan mulai menanam tanaman sendiri dan memelihara ayam, tiap barak dan tiap individu juga bisa, istilahnya, upgrade (meningkatkan mutu) makanan dari dapur umum. Ada tapol yang malam-malam menyelinap keluar untuk mengumpulkan kelapa. Kalau menemukan satu cabe liar saja, gila bukan main. Di gunung-gunung di dekat kamp, kami berburu babi liar, kijang, dan ular.

13.



Saat jam makan di barak. Kami agak ragu bicara dan mengungkapkan perasaan karena khawatir ada rekan tapol yang jadi informan untuk komandan unit. Kami hanya bicara soal-soal di dalam kamp sendiri. Hampir semua tapol di sana orang Jawa, sehingga bahasa Jawa jadi bahasa yang lebih sering dipakai daripada bahasa Indonesia.

14.



Pada 1972, beberapa orang istri dan anak-anak tapol tiba di Pulau Buru. Sebenarnya pemerintah bermaksud mengirim semua keluarga mereka ke Buru dan menahan para tapol di sana selamanya. Tapi, hanya ada beberapa keluarga yang datang. Di Unit 4, kami membangun rumah-rumah bagi mereka yang datang. Kami menyiapkan 250 rumah. Begitu keluarga-keluarga itu mulai tinggal di sana, Unit 4 ditutup, dan kita semua dipindah ke unit lain. Saya dikirim ke Unit 1.

15.



Pada awalnya, kami dan penduduk asli saling mencurigai. Kami jaga jarak. Mereka jarang mandi, bawa tombak, tidak bisa berbahasa Indonesia. Di antara mereka ada yang terkena penyakit kusta. Lewat proses panjang, akhirnya kami berhasil membangun rasa saling percaya. Misalnya, waktu kami kerja di sawah, ada dua tiga tapol yang ditugaskan keluar dan cari makan. Saya, kalau cari makan, masuk desa penduduk asli. Saya mengajar bagaimana cara mencangkul dan menanam. Ada yang mengajar baca dan tulis. Kami bekerja di desa mereka. Sebagai imbalan, mereka memberi kami pisang atau ikan. Kami keluar dari sawah itu secara rahasia–kalau tonwal

tahu, waduh, hukumannya berat. Demi perut, kami sering ambil resiko besar.

16.



Para tonwal sering berlagak seperti bos. Tahun-tahun permulaan, mereka mencari-cari kesalahan terus. Mereka sering kali tanpa alasan menjatuhkan hukuman massal pada kami. Suatu hari, saat apel pagi, seorang tapol kentut dan tonwal merasa dihina. Karena tidak ada yang mengaku kentut, kami semua dihukum.

17.



Pada 1972, seorang tonwal di Unit V dibunuh, namanya Umar. Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ada yang bilang bahwa ada tiga tapol yang membunuhnya lalu melarikan diri. Tapi apa pun cerita sesungguhnya, semua tapol di Unit V juga yang akhirnya dihukum. Sebagai balasan atas kematian itu, para tonwal menggebuki semua tapol di unit itu, satu per satu. Pemukulan itu begitu hebatnya sehingga sebelas orang tapol meninggal dunia. Mereka dikubur di dekat Unit V. Sebelum kembali ke Jawa, beberapa dari kami membuat nisan yang pantas untuk makam mereka.

18.



Pemerintah mulai melepas kami pada 1977. Mereka yang pertama dikirim pulang ke Jawa adalah orang tua dan yang punya penyakit kambuhan. Saya termasuk rombongan yang pulang 1979. Kami meninggalkan tanaman singkong, pepaya, ternak sapi, bebek, begitu saja. Kita serahkan kepada yang tinggal di sana, kepada petugas-petugas LP, juga kepada warga yang menikah dan tinggal di sana. Ini adalah gambaran salah satu rombongan orang Jawa Tengah saat tiba di pelabuhan Surabaya.

19.



Kapal dari Buru membawaku ke Jakarta. Sampai di Tanjung Priok, ada acara penjemutan resmi oleh pemerintah DKI. Kemudian kami dibawa ke Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Sampai di sana sudah banyak sekali penjempat. Saya sendiri lihat-lihat, apa ada yang menjemput. Umpamanya ada, mungkin saya juga sudah lupa, karena sudah berpisah sebelas tahun. Saya sudah berpikiran, kalau tidak ada yang jemput, saya akan kembali ke Pulau Buru. Saya takut kedatangan saya malah mengganggu. Rupanya ada keluarga yang mencari saya. Wah, kami langsung bersalaman dan berpeluk-pelukan di situ. Mereka dari keluarga tante saya, tempat saya menumpang ketika ditangkap.

III
TRANSKRIPSI WAWANCARA

PENGANTAR

Untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang wawancara-wawancara yang kami pakai sebagai basis esai-esai di dalam buku ini, kami lampirkan transkripsi lengkap dari dua wawancara yang kami lakukan. Pembaca bisa melihat dari kedua transkrip ini bahwa kami tidak menggunakan kuesioner standar untuk mengajukan sederet pertanyaan kepada orang-orang yang kami wawancarai. Metode yang kami pakai adalah mengajukan pertanyaan terbuka yang bisa memancing orang bercerita panjang lebar. Kami memulai setiap wawancara dengan maksud memahami riwayat hidup seseorang dan kami membiarkan si pencerita untuk menentukan bagaimana ia akan menceritakan pengalamannya. Selama si pencerita berbicara, kami mengajukan beberapa pertanyaan khusus untuk memperjelas ceritanya, seperti waktu atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Dengan demikian, setiap wawancara memiliki ciri tersendiri, unik. Pewawancara yang berbeda akan melakukan dialog yang berbeda pula dengan yang diwawancarai. Di samping itu, pewawancara yang sama pun, ketika mendengarkan rekaman wawancara yang sudah dilakukan atau membaca hasil transkrip, sering kali menyesal tidak sempat mengajukan pertanyaan tertentu atau tidak cukup berusaha

memperjelas bagian-bagian cerita yang dianggap penting. Tak ada wawancara yang sempurna atau lengkap.

Kami memutuskan untuk menerbitkan wawancara dengan Pak Kasmin karena cerita yang ia sampaikan sedikit banyak mewakili pengalaman tapol pada umumnya. Ia adalah seorang guru di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah pada 1965. Pada suatu hari ia dipanggil ke kantor polisi, dan tanpa ada peringatan atau penjelasan terlebih dahulu, ia diseret ke sebuah truk untuk diangkut ke penjara. Ia menghabiskan 13 tahun berikutnya dalam penyekapan, tanpa tuduhan resmi, tanpa pengadilan, tanpa tahu apakah ia akan pernah dibebaskan. Satu-satunya 'kejahatan'nya adalah menjadi anggota PKI. Begitu ia dibebaskan dari Pulau Buru pada Desember 1978, ia tidak punya rumah untuk pulang. Ia harus memulai hidupnya dari nol. Ia bekerja sebagai buruh bangunan di berbagai proyek pembangunan gedung dan jalan raya di Jakarta hingga krisis ekonomi 1997 memaksa dia menjadi pengangguran. Sekarang ia tinggal di desa asalnya, tanpa pekerjaan dan miskin. Inilah warisan dari pengalamannya direnggut dari pekerjaannya sebagai guru, dijadikan seorang tapol, dan direndahkan menjadi buruh harian tanpa serikat selama masa pemerintahan Soeharto.

Kami memilih wawancara dengan Ibu Sugianti karena pembicaraan dengannya menggambarkan bagaimana seorang anak melalui bencana 1965. Ia masih berumur 8 tahun ketika kedua orang tuanya di penjara. Sebelum

akhir 1965 ia dan ketiga saudaranya hidup normal dan nyaman di Kebumen, Jawa Tengah. Suatu malam rumah mereka dibakar habis oleh gerombolan milisi dan orang tua mereka, keduanya guru, dibawa pergi oleh orang-orang tak dikenal ke tempat yang tak diketahui letaknya. Beberapa waktu kemudian, ia menemukan ibunya di salah satu tempat penahanan dan memilih tinggal bersama sang ibu. Lalu, sementara kedua orang tuanya masih di dalam penjara, ia sempat tinggal di jalanan, sampai sebuah organisasi gereja memungutnya dan menitipkannya di panti asuhan. Ketika orang tuanya dibebaskan dari penjara dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, mereka menghadapi masalah-masalah baru. Di kota kecil seperti Kebumen mereka berhadapan dengan masyarakat yang memberi mereka stigma sebagai keluarga eks tapol sehingga mereka tidak bisa menemukan pekerjaan dan mendapat penghasilan yang cukup. Mereka pun hijrah ke Jakarta. Ibu Sugianti menggambarkan bagaimana keluarganya terus-menerus dicerai-beraikan selama Soeharto berkuasa.

Transkrip-transkrip berikut ini adalah rekaman verbatim wawancara. Kami mencoba menyampaikan suara pencerita dengan kadang-kadang menggunakan ejaan yang tidak beraturan dan secara hati-hati memilih tanda baca.

IBU SUGIANTI

31 Agustus 2000

Jawab: Mbak Asih itu kan nanya, apa yang musti saya omongkan?

Tanya: Masa kecilnya, sebelum hari ulang tahun Bu Sugianti itu.

J: Iya, ya, ya, saya ulang tahun kan waktu itu, tanggal 30 September. Nah terus, sore-sore, biasa anak-anak kecil. Nah, tempat saya itu, apa ya, banyak calon bu guru-bu guru yang... apa, sekolahnya itu di tempat, di rumah gitu lho, seperti kayak kost-kost-an gitu. Terus, di rumah itu hampir kayak semacam kursus. KG TK Melati kalau nggak salah. Kursus Guru Taman Kanak-Kanak Melati, gitu.

T: Oh Melati.

J: Ah itu, gurunya itu ibu saya yang sudah meninggal. Biasa ya, karena kita biasa hidup di lingkungan yang familier, hidup biasa di lingkungan yang kayaknya aman, kayaknya seneng gitu ya, yang banyak temen gitu ya. Suatu saat saya ulang tahun, ulang tahun itu pas tanggal itu kan ya, 30 September 65 itu, kok malamnya habis ulang tahun rame-rame gitu, kok ada itu, apa bukan

polisi gitu, kayak semacam kayak tentara deh, kayaknya deh ya, kayak tentara gitu. Terus, habis itu, rame ya, saya lihat itu, 'Bakar! Bakar! Bakar!'[1] Tempat saya itu deket dengan daerah Pecinan. Kalau di tempat saya Pecinan itu apa ya? Toko-toko, gitulah. Toko-toko.

T: Itu di mana bu?

J: Di daerah Kebumen.

T: Oh Kebumen.

J: He-em, toko-toko di situ. Lah, dekat deretan situlah, tapi agak, agak masuk sedikit gitu. Ah itu terus, 'Bakar! Bakar! Bakar!' Oh, ngeri deh, termasuk rumah saya. Saya pating slebar (tercerai berai), gitu. Saya pating slebar waktu itu. Beennnner-bener trauma, ya ampuuunnnn. Itu tetangga semua, nggak ada yang mau nolongin. Itu dateng orang segitu banyaknya, nggak tahu darimana. Yang dibilang, 'Allahhu akbar. Allahhu akbar.' Tapi bawa klewang, gitu.

Terus akhirnya bapak saya dibawa. Bapak saya dibawa, cuma pesen, 'Ya, ati-ati aja di rumah, ya?' 'Iya.' Dibawa, terus nggak pulang. Terus nggak tahu ke mana, nggak pulang. Terus nggak pulang. Nah, saya dengan ibu-ibu, dengan ibu, dengan adik-adik, ya udah habis itu terus rumahku, terus di, dikroyok gitu ya. Yah, kita sudah pating slebar deh. Nggak sempet bawa apa... ya yang nempel di badan ini aja.

Ya, disangka saya itu udah meninggal, disangkanya. Karena rumah saya kan karena waktu itu terus dikroyok begitu, dibakar ya. Saya itu mlipir-mlipir, mlipir

(berjalan mengendap-endap) antara got itu kan ada, ini got ya, itu kan ada begininya nih, aku mlipir-mlipir-mlipir akhirnya sampe ke ujung gang sana. Itu kalo jatuh, itu kan jatuh kecemplung air ya, saya sudah bayangkan, anu, musti saya sakit anu. Yah wis boro-boro (Ya sudah jangankan) pake sendal, udah apa yang ada di sana. Uuuuuh, udah belepotan nggak karuan. Terus saya tanya, 'Aduh, saya musti ke mana?' Kan waktu itu saya kelas berapa SD, kelas tiga deh kalau nggak salah, kelas tiga.

'Lho, saya mau ke mana?' Wong tengah malam kayak gitu. Orang udah sibuk, udah dibakar-bakar, langitnya sampe merah. Saya bilang, 'Aduuuuuhh. Saya udah, ibu saya sudah ke mana, wah, udah, udah nggak tahu.' Saya milipir-mlipir, milipir, kok ada yang ngasih tahu, 'Eh, udah, coba deh ini putranya anu ya?' Gitu. 'Oh, iya.' 'Di anu aja, di tangsi aja.' Ada tangsi polisi gitu. 'Di tangsi aja deh, ke sana deh.'

Ya, udah deh, saya ke sana. Saya ke sana, di situ banyak orang, nggak tahunya orang yang seperti kayak keluarga saya. Uuuhhh... di situ ketemu dengan temen-temen ibu saya, dengan murid-murid bapak saya. 'Lho, waduh kok ada di sini? Lik (bibi) ini, lik itu. Manggilnya kan Bu lik, Bu lik. Lik itu, lik ini. 'Lho, nang kene kabeh (di sini semua),' saya gitu. Oh iya, saya itu disangka, saya itu udah nggak ada, pasti itu sudah kena api itu tadi. 'Aku kok, aku, aku.' 'Oh, ya. Lha, ibumu pundi

(mana)?' 'Belum ketemu ibu.' Belum. Adik saya itu, belum ketemu. Belum.

Haa, dua hari baru ngumpul di situ semua, barulah kita ketemu. Ibu, ada adik di situ, 'Oh, kowe karo sapa (kamu dengan siapa?),' kata ibu.

'Iya aku di sini.'

'Sama siapa. Terus gimana?' Ibu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ibu saya itu Kepala Sekolah SD, bapak saya Kepala Sekolah SMA. 'Bapak nggak ke sini?'

'Nggak.'

'Bapakmu nggak ke sini?'

'Nggak.'

'Ya, udahlah.'

'Waktu itu nggak pesen apa-apa?'

'Ya, nggak tau. Wong masih pake piyama, pake sarung gitu kok, terus dibawa truk.'

'Iya udah.'

Terus, ibu juga tau, bapak pergi itu juga. Ya nggak pulang sampe lama, gitu. Lha, terus habis itu, ibu saya, waktu itu masih sempet ngajar sekolah. Ngajar sekolah, ehhh... dapat surat apa itu, eeh, apa kae (apa itu)? Dapat surat, dari, dari atasannya, dari penilik sekolahnya, non-aktif, diskors, dapat non-aktif. Langsung, ibu saya dapat non-aktif, nggak boleh ngajar lagi. Berarti kita hanya tinggal di situ, di tangsi-tangsi itu dengan, kayak orang-orang, kayak gembel itulah.

Wils... kita makan nasi, ingeeettt aku itu dijatah bulgur (sejenis gandum), segini-segini. Bulgur itu, ya wis. Ya apa adanya, memang adanya itu, ya kita makan. Ada yang ngempani (memberi makan) aja sudah terima kasih. Udah makan di situ.

T: Yang ngasih siapa tuh?

J: Kayaknya, kalau saya perhatikan, kayaknya itu, ini lho, dari pihak gereja gitu lho.

T: Oh dari pihak gereja.

J: Kayaknya deh, kayaknya dari pihak gereja kayaknya. Ya wis bareng gitu (Ya sudah setelah itu), terus kita masih seneng ngumpul sama ibu, saya ini berempat bersaudara, saya nomor dua, sering ngumpul. Itu saudara saya, tetangga saya, kenalan ibu saya, itu nggak ada yang mau kenal. Kalau ketemu saya, atau ketemu ibu, atau ketemu siapa, dilemparin batu.

T: Di tangsi itu?

J: Di luar tangsi begitu, di dalam tangsi aman. Dalam penjara aku aman. Lho, aneh to? Di penjara aku serasa surga, karena banyak temenku, ada enem ratusan, buanyak banget! Di dalam tangsi itu aku aman. Tapi kalo di luar, wah wis nggak tau. 'Wah! Gestok! Gestok!' pasti begitu kan.

T: Gestok apa?

J: Katanya Gestok itu, Gerakan 30 S, gitu lho.[2]

T: Ohhh...

J: ‘Gestok lo! Gestok lo!’ gitu. ‘Ya udahlah, aku ini wong Gestok.’ Sampai sekarang trauma. Aku ini orang Gerpol [gerakan politik]. Padahal waktu itu, mana saya tahu, Gestok apa, Gerpol apa. Lho ya ngga tau.

T: Bapak aktif di mana?

J: Kepala Sekolah.

T: Tapi nggak ikut organisasi apa gitu?

J: Ya, nggak, nggak, ya dibilang... Oh, ikut itu, guru-guru. Saya ingat itu majalahnya, guru-guru PG... apa... PGRI Non-vak Central. Guru apa sih tuh, apa sih ya? Ya guru-guru itulah. Ibuku ya, kayak gitu. Persatuan Guru-Guru kayak gitu-gitulah. Ya wis pokoknya. Mana saya tahu, wong umur itu ya, waktu itu ya... Terus udah gitu, ya enaklah masih walaupun makan bulgur, makan seadanya. Udah nggak pernah mandi ya, masih enaklah kalo masih ngumpul.

Nah, suatu saat ini, ibuku diambil juga. Ibuku diambil juga, masuk. Tapi nggak di daerah Kebumen. Kalau masih di Penjara Kebumen, masih melihat satu kota, masih mending. Ibuku, di mana coba dibuangnya? Di Purworejo. Lha, kalo aku mau besuk (menengok) ibu-tapi ibu pernah pesen, ‘Ati-ati kowe ya.’ (Hati-hati kamu ya) Terus komunikasi-komunikasi gimana, ilang itu jejak sama ibu, sama bapak juga ilang. Tapi ibu nggak lama. Ibu kira-kira tiga tahun setengahlah.

Ibu tiga tahun setengah, kok pulang. Nah, selama ditinggal ibu tiga tahun setengah itu aku mangane piye (makannya bagaimana)? Aku makannya gimana? Lha

terus... akhirnya ya, pembagian. Pating slebar. Akhirnya kakak saya yang di Tangerang itu, kakak saya yang di Tangerang itu dipelihara orang, ikut orang. ‘Iya wis, nderek sapa?’ (Ya sudah, ikut siapa) Gitulah. Ya, kasarane, baturlah, babu, babu (Ya kasarnya, pembantulah, babu, babu). ‘Wis ikutlah sana.’ Adik saya yang nomer–terus saya, saya tetep tinggal di situ. Adik saya perempuan yang nomer tiga, si T. itu, ada yang, ada yang, ini, dipelihara juga sama orang, gitu. Pisah, mencar-mencar.

Terus, tinggal saya berdua adik saya laki. Saya memang, waktu itu kok sudah punya inisiatif, ‘Nanti kalau aku ikut dibawa orang, aku terus gimana komunikasinya sama ibuku, sama bapakku?’ Aku itu udah punya pemikiran gitu, padahal waktu itu aku umur 9 tahun, belum tahu malah. Adikku yang kecil itu, adik saya yang paling kecil, si Budi itu, laki-laki, tak tenteng (gandeng) aja. Ya umur empat tahunlah, gitu. Ke mana-mana berdua aja, kayak wong... Ya, ya, gimana?

Habis, udah gitu, setelah itu, selama ibu nggak ada yah, itulah saya merasakan, ‘Ya, ampuuun saya nih ya, dosa apa?’ Tapi ya wong namanya anak umur waktu itu ya. Ini apa yang namanya kiamat? Saya nanya ibu, ibu saya ada di mana? Ini belum pulang, jadi selama tiga tahun setengah itu, saya betul-betul saya itu dalam posisi yang susah, gitu.

Akhirnya kita ini, anak-anak kayak saya ini pating slebar. Tidak mungkin mau mbantu terus, mau ngasih makan

terus, itu duit dari mana, gableke sapa (punyanya siapa), nggak mungkin ya. Pating slebar, ada yang larinya ke mana? Ke pasar, pasar. Aku jadi anak pasaaarrrr. Yakin. Makanya kalau di pasar itu saya lihat, eh, ada 'kali bangsa enem ratusan anak yang kayak saya ini di pasar itu. Pating trempel (berjubel-jubel) ya. Ya, apa yang bisa dimakan, dimakan. Apa yang ini, ya se... se... seininya aja. Tidur ya di situ, lah mau ke mana?

T: Nama pasarnya masih ingat?

J: Masiiiiih. Pasar Gede.

T: Pasar Gede?

J: Ya. Masih. Terus di situ aku, yaah... sekolah, boro-boro mikir sekolah. Ya membaur sama anak-anak pasar itu. Tapi saya kenal, orang-orang tuanya temen-temenku itu tadi. Jadi kalau ada orang mati itu di pasar, anak kecil itu, misalnya, kayak teman saya itu: 'Eh, putranya Bu Kardi kan meninggal, si Trimurti.'

'Di mana?'

'Itu, tuh, tuh. Di lincak (bangku panjang dari bambu). Di lincak.' Itu sudah biasa.

'Oh, kae to (itu to)?' Udah, kita nggak tahu, kita ninggalin aja. Tahu? Tahu kalau itu temenku. Dia juga umurnya sepantar sama aku, kelasnya sama. 'Mati to?' 'He'eh.' Itu sering yang kayak begitu, itu. Tega-teganya ya. Lha, ini dosane sapaaa (dosanya siapa)?

Terus ibu waktu itu pulang, udah tiga tahun setengah. Kok pulang? dinyatakan kok pulang? Pulang ke mana? Ya,

otomatis nyari'in..ketemu saya di pasar. ‘Lho, kowe nduk?’

‘Iya bu.’

‘Ibu pulang.’

‘Terus ibu mau ke mana?’

‘Sudahlah, kita prihatin aja.’ Kan banyak mamah-mamah Cina itu, tantetante Cina itu, akhirnya ibuku ngajarin bahasa Indonesia. Sama ibuku kan guru ngajarin bahasa Indonesia, ngajarin bahasa Belanda ke Indonesia, Indonesia-Belanda ngajarin orang-orang Cina-Cina itu. Apa ya namanya? Namanya apa sih itu yang nama orang Cina itu? Wis, pokoknya orang-orang Cina yang belum fasih ngomong bahasa Indonesia. Ibuku itu ngajarin bahasa Indonesia. Ya, itu sedikit-sedikit, kita makan dari situ. Mending honornya..ya... mending kita bisa makan, itu aja. Keluar dari penjara ibuku itu ya susah, kurus.

Terus, masuk lagi. Masuk lagi, tapi aku boleh tinggal satu ruangan dengan ibu, di dalam penjara, tapi aku boleh tinggal di situ. Namanya Gedung Gembira.

T: Itu ditangkapnya gimana tuh?

J: Hah?

T: Ditangkap laginya gimana. Ada suratnya?

J: Boro-boro surat, wis, pokoknya kalau ada orang tentara itu, langsung suruh masuk.[3] Bapakku udah nggak tahu ke mana. Udah nggak tahu. Saya sama ibu masuk lagi. Tapi seneng waktu itu, masuk berarti aman kan. Tapi ibu boleh keluar hari Senin dengan Kamis, ngasih les privat

sama orang-orang itu. Ibunya masuk, lah, saya kan sama adikku, sama si Budi kan di luar, aku kan nggak boleh masuk ke tahanan ibu, tetap aja aku di luar, tidurnya ya gresek-gresek (berdesakan) begitu.

Ya, kenalanku itu ibu-ibu orang-orang Cina, mamah-mamah itu kan, suaminya ada yang masuk. Karena dulu itu, namanya terkenalnya tuh, Baperki. Tua, tua, sipit-sipit itu ya. Itu murid ibuku. Itu masuk pecinan-pecinan itu, 'Waduh, anaknya ibu?'

'Iya. He'eh.'

'Tante mau ini, mau ngirim oom.' Kan suaminya mesti ada di dalam.

'Aku ketemu oom di dalam LP.' Lembaga Pemasyarakatan itu.

'Oh ya, aku nitip ya.' Nitip.

Lha aku tuh, kalau jamnya, jadwalnya ngirim ke mereka kan, wah penuuh. Penuh, bawa lemper, yang apa. Waduuhh... yang begitu kan biasanya itu sambel pecel, nasi, apa yang begitu, yang bisa untuk dimakan untuk besok. Terus baju-baju, pakaian-pakaian. Uuuhh... itu ribuuan di dalam. Namanya oom ini, oom ini, oom ini, masih inget aku. Terus akhirnya dari situ, ya balas jasa dong. 'Lho, kan kirimanmu wis nyampe ke si oom. Sekarang aku njaluk (minta).'

'Ya, ya, gampang nanti.'

'Aku minta makan aja.' Di situ aku mulai makan, di situ kenyang. Di situlah. Jadi, asal udah ini, kalau ngirim

surat itu, istrinya itu, kan aku pake rok, ini, nih. [tertawa] Ini kan ada gini, anunya nih kalau rok nih. Ini, nih, penuh surat ini [tertawa], penuh ini. 'Wis nggak tau surat. Mau kirim surat nggak?', gitu. Nggak dicurigain, wong aku masih kecil.

T: Boleh bawa makanan banyak?

J: Wo, banyak. Uuuuuuu...

T: Boleh sama penjaganya?

J: Sama penjaganya ya, boleh. Kalau aku kan anak kecil, boleh keluar masuk [terawa]. Nggak taunya, yang... apa ya namanya? Yang jaga penjara itu, apa jenenge kae (apa namanya itu)? Saya masih ingat namanya pak itu, siapa sih, itu bekas muridnya ibuku. Itu muridnya bapakku, muridnya ibuku, muridnya ibuku di SD, di SR, muridnya bapakku waktu di SMA. Muridnya basa Inggris. Yang jaga di penjara itu, ya, dia itu. 'Oh putranya anu ya?'

'Iya.'

'Ya wis mlebu wae lah (Ya sudah masuk saja lah),' gitu. 'Ngerti apa sih?'

Habis itu aku dikasih pisang goreng. Aduuuh senengnya ora karuan (tak karuan). Ketemu begitu aja seneng. Itu tak jalani bertahun-tahun. Lama, lama, lama, lama, lama, kan aku dah ndak sekolah ya, berapa tahun, datenglah dari pihak gereja, suster-suster itu. Saya dipanggilin. Jadi naik truk [tertawa]. 'Wah aku nggak mau.'

‘Nggak apa-apa,’ katanya.

‘Nanti kalau aku kangen sama ibuku piye (bagaimana)?’

‘Oh nggak apa-apa, boleh, boleh. Daripada di situ keliaran.’ Ya, ampuuuuun, itu banyak sekali, ada berapa ratuslah anak itu, masuk ke panti asuhan.

T: Pius ya namanya?

J: Ya. Di situ ada TK, SD, SMP, SMA Pius. Di bentengi, bentengi. Pager tembok, benteng tinggiiii. Aku di situ, aman aku di situ. Udah seneng. Suruh sinau (belajar), suruh sekolah, suruh belajar, dikasih baju. Yahhh, yang tadinya pating trembel (penuh dengan tambalan) nggak karuan, sekarang salin (ganti). Adikku ya udah, ya wis. Tapi kan ngurusin anak segitu banyak, ya bagaimana? Aku itu kalau ini apa, bagian ngirisin roti, itu roti itu kalau ngirisin gitu di meja itu, sini itu tak bolongin [tertawa]. Jadi kan ke luar nih, remukan ini, ‘Buat siapa?’ ‘Buat adikku, Budi. Mesakakalah (kasihanlah).’ Ini rempah-rempahnya.

T: Budinya di luar panti asuhan?

J: Di dalam juga, tapi kan masih kecil. Begitu tiap hari. Kalo jam empat pagi neng neng neng neng bangun, berdoa, diajari itu…. Wis, habis itu, gede, gede, gede, gede ibu belum keluar, belum. Belum keluar. Saya sekolah, eh, pinter. Karena andelanku apa? Aku kan musti sainganku, kalau sekolahan Katolik itu kan, yang masuk kan musti anake bongso (seperti anaknya) kepala polisi, anake (anaknya) bupati, anaknya Cina yang kayakaya. Aku musti pinter. Karena apa? Aku miskin.

Karena aku miskin, aku nggak punya siapa-siapa. Andelanku apa? Aku harus pinter. Kalau aku pinter, wah, pasti aku disayang sama suster, sama pastur, aku disayang sama ibu asrama. Aku mesti nurut di situ. Anake orang kaya, tapi kalo bodo kan nggak dihargain. Kalo di asrama, jadi aku harus pinter. Eh, pinter. Kelas berapa? Yang tadinya kelas 3, kelas 4, loncat kelas 5. Ujian lulus. Adikku masih ngikut, ya susahnya dia ikut.

Susahnya hidup itu kayak gitu. Terus, apa kesibukannya di dalam asrama itu? Masih tertib, masih di dalam betengan itu, masih tertib. Daripada kalau aku di luar, mati mungkin. Temen-temenku yang di luar, yang di luar panti asuhan itu sudah jadi apa, udah nggak tahu. Ya, untung aja, ya sampai sekarang ini. Sudah gitu, ya diajarin sekolah Sunday School, Sekolah Minggu. Nanti Kalau pembantu gereja itu mandiin asu (anjing), aku ikut mandiin anjing. Ya, ampuuuun bener, ya gitu rasanya. Kadang-kadang makanan yang untuk anjing aja, aku yang makan. Wong enakan dia [tertawa]. Pake sup, enak, kebul-kebul (masih hangat, dengan uap yang masih mengepul). Aku makannya bulgur. Ya, mendingan aku yang untuk makanan anjing tak makan. Tak ganti bulgur, anjing emoh (anjingnya tidak mau) [tertawa]. Ya, di situlah ya, aduhhh, susahnya jadi orang. Aduhhh, aku termasuk anak yang bandel.

Sudah gitu, sampe akhirnya dibaptis. Ibuku nggak tau. Ya, nggak nguoi. Ditanya, tapi komunikasi sama ibu terus. ‘Betah?’

‘Ya, dibetah-betahin.’

‘Yang nurut ya sama ibu asrama, sama suster.’

‘Ya, aku nurut.’

‘Sekolahmu pinter kan? Kamu itu orang nggak punya,’ gitu. ‘Andelan kamu kan kalo kamu pinter, kamu dihargain.’

‘Iya bu, iya bu.’ Terus, saya dikasih ini, kesempatan, apa? dagang es mambo. Dagang es mambo. Sama suster dikasih modal suruh dagang es mambo, nanti uangnya dikumpulin untuk bayar sekolah, gitu. Untuk nabung, ditabung. Ya, aku gitu tiap hari. Pulang sekolah, bilang sama ibu asrama, ‘Mana esnya?’ Jual. Iya, kan tante-tanteku tadi itu, yang yang yang oom-oomnya masih pada di dalem, tante-tante Cina-Cina itu tadi, harus beli esku. Gantian [tertawa] beli dia. Aduh… wis. Beli. Lumayan itu.

Lama-lama, lama, lama, di situ aku dididik ketrampilan, dididik agama, dididik dagang, dididik menjahit kristik itu. Waduhhh… wis, bikin kue. Ya pokoknya keterampilan. Jadi aku pinter. Sampe mbantuin di rumah sakit bersalin apa itu, Pius itu lho. Bantu di rumah sakit. Terus, ya di situ, ya otomatis yang ditolong yang orang-orang yang nggak punya.

Tidak lama ibu keluar. Ibu keluar. Yah, kecil-kecilanlah, ibu dagang. Yah, dagangnya bangsa (seperti) makanan-makanan kecil gitulah. Kripik singkong diiris-iris itu lho, singkong diiris-iris, kasih gula. Ya ibu dagang. Kita

ngontrak kecil-kecilan, ibu keluar itu. Bapak belum tau kabar beritanya di mana.

T: Itu di mana itu?

J: Apanya?

T: Daerahnya?

J: Ya, di daerah Kebumen.

T: Oh masih di Kebumen?

J: Masih... Tapi bagus dalam lingkungan asrama panti asuhan itu. Kita masih dikasih makan, walaupun bulgur. Tapi seadanya, pakaian ya masih bagus, daripada kita di luar, keluyuran (berkeliaran) yang nggak karuan. Setelah itu, gede, gede, gede, udah dewasa. SMA ya, belum ketemu [bapak], waktu itu belum ketemu. Terus, tahun berapa ya? Tahun 70anlah, tahun 70an itu. Oh, kan ada berita tuh, 'Bapak ini pulang.' 'Oh, bapakku kapan pulangnya?'

T: Ibu udah tahu ada di mana?

J: Nggak tahu. 'Pulang-pulang, bapak pulang, lama juga di sana itu. Bapak pulang dalam keadaan tangannya cengkrong (bengkok). Terus ada yang ngasih tahu. Pegawai kelurahan ngasih tahu, pegawai kelurahan bekas murid, bekas muridnya ibu, 'Itu, bapak pulang.' Pulang, cukup, cukup, cukup pulang, yang, kita keadaan gitu. Tapi pulangnya ngsak terus pulang ke rumah. Pulangnya ditampung di suatu tempat di situ yang mana setiap minggu dapat indoktrinasi. Jadi ngsak langsung pulang, setiap minggu itu apel. Ke... apa jenenge (apa

namanya)? Koramil. Danramil apa Koramil... Sampe bertahun-tahun dijalani begitu. Lama, lama, lama, lama, selama sekali. Sampe kita pada kawin, yah... susah terus. Sampe sekarang ini anak-anak udah gede, kok lama-lama ngumpul gitu, lho.

Bapak saya pulang, ibu, ya, otomatis ya, ibu sambil dagang-dagang apa yang bisa dijual, ya jualan. Bapak ya, sambil mbuka-mbuka bengkel sepeda. Kecil-kecilan bengkelnya, ndandani (memperbaiki) sepeda. Ya, gitulah rasanya.

Saya ditanya, 'Mau ikut ibu atau mau ikut, tetep di sini?' Ya, seenak-enaknya ya mendingan ikut ibu.' Iya kan? Udah gede itu, udah tamat SMA. Adik udah STM waktu itu. Keluar, yaitu kita udah ngumpul. Terus adik yang, adik saya kandung yang sapa itu (siapa itu) kok pulang, gitu. Nyari, kita cariin, tak cariiii... ketemu. Ada di kota Purwokerto. Di salah satu keluarga. Yah, nyarinya kan bertahun-tahun itu. Eh Budi, pulang. Kakak saya yang satu kan, tinggal kakak saya. Akhirnya ketemu juga, pulang.

Ngumpul, ya udah. Ya nggak nyangka kalau sampai bisa kayak gitu, sampai bisa ngumpul kembali. Sehingga pating slebar lagi karena buat apa ya, aku tinggal di kotaku sendiri sana, di tempat kelahiranku sendiri udah nggak ada tempat untuk berlindung, semua orang itu nggak bisa menerima ya. Yang lebih kasihan lagi bapak saya. Apakah setelah keluar, setelah pulang itu, pulangnya bapak itu langsung bisa diterima di

masyarakat? Nggak. Bapak itu masih tetap sebulan sekali itu, sampai mau mati kemarin, mau meninggal, itu masih apel. Padahal umur udah tua, ibu ini juga begitu. Di KTP-nya, di pojoknya ada ‘ET’-nya.

Yah, udah kita jalanin berpuluh-puluh tahun, ya kayak begitu. Apakah enak, terus dengan pulangnya bapak itu terus kita seneng? Nggak. Malapetaka buat saya. Malah, ‘Anaknya si Gerpol itu tadi, Gestok itu tadi. Anaknya pengkhianat Pancasila, merongrong kewibawaan, bahaya laten.’

Jadi setelahnya itu begitu. Di kota kecil, lebih tersiksa lagi ruang lingkupnya, makanya kita hijrahlah ke Jakarta. Terus aku tak nang Jakarta wae (mau ke Jakarta saja). Nang Jakarta mau ngapain? Ngumpul, ngumpul, ngumpul begitu, mau makan apa? Siapa yang mau kasih makan? Ngumpul tapi kalo nganggur, perutnya lapar. Mau kerja, kerja apa di situ? Mau usaha, usaha apa? Modal nggak gablek (punya), apa-apa nggak punya. Rumah aja nggak punya. Apa? Yang tersisa apa? Cuma PD [percaya diri] aja yang kita punyai.

Wis, keadaan yang memang harus begitu, ya pergi hijrahlah aku ke Jakarta. Ketemu sama yang dulu memelihara, yang dulu waktu sebelum peristiwa 65 ini, ketemu sama Mas Har, paman, masih paman itu. Nah, sekarang jadi suaminya kakakku. Ketemu sama itu. ‘Lho, lik, ada di sini?’

‘Iya.’

‘Lha iya. Kamu ngapain ada di sini?

‘Kerja.’

Lama, lama, lama, lama... Mas Har ini juga dulu bekas Pemuda Rakyat, bekas Pemuda Rakyat. Dia lari ke Jakartalah. Di sini dia kerja di... apa kae (apa itu)? , dagang warung. Pertama kali. Warung, warung, warung... warung rokok kecil-kecilan gitu. Aku numpang di situ. Lama, lama, lama, lama, yah, kawinlah sama kakak saya. Dibawa pulang, ketemu sama bapak, sama ibu. Kawin aja, kawin diem-diem. Tapi bapak masih seminggu di luar, seminggu di dalam, begitu. Nggak, langsung dilepas begitu. Nggak langsung. Lama, lama, lama, lama, sama pang nasih indoktrinasi itu, sampe bosen. ‘Udahlah,’ katanya, ‘udahlah. Mau apel nggih? Sampun-lah (sudah), pak. Udah,’ gitu. Tapi namanya persyaratan. Sampe bosen itu yang yang, yang itu, tuh, yang nerima apel itu, yang ngasih tanda-tangan. Alaaahhh...

Ya udah. Ya sampe sekarang ini, akhirnya kita tinggalkanlah kota kecil itu. Akhirnya ibu, bapak, terus kita boyong (bawa) semua ke sini. Terus, untuk apa? Di sana juga mau ngapain. Pensian? Pensian dari mana? Terus, ‘Di Jakarta piye (bagaimana)? Wah, diuthik-uthik (ditanya-tanya) nggak masalah itu?’

‘Mboten (tidak) kok Pak.’

Tanya sama mantu, kan punya mantu bapak, tanya sama kakak ipar, ‘Gimana dik?’

‘Pokoke (pokoknya) aman-aman aja.’

‘Yah, aku titip adik-adikmu ya.’ Yah, titiplah. Saya dititipin, adik saya ya dititipin sini. Ya, akhirnya ya pada cari kerja di sini, sudah.

Lama, lama, lama, lama, ya udah sampe sekarang ini. Sampe bapak ibu itu meninggalnya di sini [di Jakarta]. Ya nggak ada yang peduli, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nggubris, udah lha itu, udah. Seperti sekarang kan dianggap saudara, kan setelah sekarang. Istilahnya anak-anak udah pada berhasil, istilahnya anak-anak udah pada jadi. Dulu nggak punya saudara, sekarang aja kan. ‘Oh putranya anu ya?’ ‘Oh, iya.’ Situ kan saudara saya,‘ gitu. Dulu? Ya, nggak kenal.

Tapi saya yang kasihan ya, teman-teman saya, teman-teman yang sepantar-sepatar saya, yang sebaya-sebaya saya. Pada jadi apa, kita juga nggak tau. Yang jelas hidupnya itu musti mblangsak (sangat susah), susah. Ya, bagaimana? Nggak pernah dikasih kesempatan. Oh... sekolah rada (agak) pinter sedikit aja nggak boleh. Nggak boleh.

T: Nggak boleh sama siapa, bu?

J: Ya... sama–pokoknya nggak boleh aja, ada yang ini, ‘Oh... kamu nanti anu. Kamu anu ya? Wah pantes anaknya itu sih.’ ‘Wah, pinter ya?’ Ya, begitu, sampe dapat piagam, kalau juara itu kan, se-kabupaten itu kan dapat piagam. Itu aja nggak boleh diambil. ‘Anak itu.’ Udah, nggak jadi. Buat saya, saya nggak butuh kertas kok. Buat apa itu. Nggak butuh. Sampe mau melamar pekerjaan, sampe apa pun, kalau udah mentok, ‘Tidak

tersangkut G-30-S', ah itu kita sudah loyo kok. Syarat-syarat itu, 'Tidak tersangkut.' Eh, itu kita itu sudah, sudah, sudah pokoknya udah kayak gitu itu, udah nggak ngga ada ini lagi lah, udah nggak ada harapan.

Makanya paling- paling kerjanya, yah... wiraswasta gini, kecil-kecilan. Atau nggak, ya bikin usaha sendiri. Yah dididik kayak gitulah, mandirilah. Dan musti nggak enak, begitu. Mana ada temen-temenku yang jadi tentara pangkatnya... nggak ada. Sampe-sampe mau kawin pun, masih ditanya sama calon besan, sama calon mertua, 'Anake sapa (anaknya siapa)?' Masih, masih. 'Anake Gerwani ya (anaknya Gerwani, ya)?' 'Hem, jangan- jangan Gerwani.' Padahal yang namanya Gerwani, apa saya tau kayak apa? Nggak tahu, Gerwani itu kayak apa, ngga tau.

Tapi katanya kalau menurut sekolah-sekolah itu, sekolahan-sekolahan, Gerwani itu ya yang suka mbunuhin orang, yang suka nyilet-nyilet. Makanya jangan suka deket-deket sama Gerwani, nanti kamu disiletin [terawa]. Padahal apa saya nguoi waktu itu? Nggak tau. Saya tanyakan sama ibu saya, 'Ibu Gerwani ya? Ibu berarti bisa berat dong?'

'Iya.'

'Kira-kira yang mbunuh jenderal-jendral itu Gerwani, ya?'

'Hus! Kamu tahu apa. Kamu itu tahu apa?' Itu jadi bingung, tanamkan dogma yang kayak gitu. Dogmatisme kuat sekali. Bahwa yang katanya kan dihabiskan sampe

ke akar-akarnya. Ya, bener, kejadian. Ya, memang tenan (benar).

T: Tapi ibunya ibu memang benar ikut [Gerwani]?

J: Ya, guru itu, tadi. Guru yang ngajar itu, guru apa? Guru apa? Guru TK Melati itu, yang ngajar calon guru-guru itu. Saya masih inget itu lagunya, lagu apa kae (apa itu)? Lagunya lagu [bersenandung], saya inget itu. Dan anak TK tahu semua itu, jaman saya itu [terawa].

T: Ya, saya ingat ceritanya Ibu Sugiantit yang waktu perkawinan terus bapaknya datang?

J: Oh itu. Oh itu kan bapak masih di dalem.

T: Di dalam di mana maksudnya?

J: Kan nggak dilepas terus pulang, terus langsung dilepas gitu. Ya masih di dalem, belum keluar, gitu lho.

T: Itu di Koramil apa?

J: Iya. He-em, di LP, gitu. Itu kan kawin [tertawa], kawin. Jadi, besok mau kawin itu, kurang enam bulan mau kawin itu udah ngomong dulu, bapak saya, 'Lho nanti kalau saya kawin nggak ada walinya, ya susah. Di catatan sipil harus ada wali. Kalau dibilang walinya nggak ada, wong masih punya bapak. Nggak bisa. Aku mau kawin secara Islam, aku nggak mungkin.' Lha, jadi kan amannya apa ya? Kawin hakim, kawin catatan sipil itu. Dulu belum ada kawin–ya biro sipil ada ya–itu buat saya memudahkan, karena kan nggak bertele-tele. Ngga pake... Yang wali'in aku siapa? Nggak ada yang mau. Kawin aja susah. Lewat gereja bertele-tele. Ya sudahlah,

kawin catatan sipil aja, kawin hakim. Itu mau kawin kurang enam bulan itu udah harus ngasih tau, ‘Bisa nggak jadi wali?’ Bisa. Tapi hanya satu jam.’ Jadi mau kawin, ya dijemput. Saya mau kawin, bapak saya ya dijemput mobil tahanan itu. Turun. Saya disumpah kawin, itu resmi disumpah nikah, akad nikah itu resmi sama hakim itu. Nggak taunya, hakimnya itu ya muridnya bapak juga, waktu di SMA itu. ‘Lho...alah, kowe toh le, le.’ ‘Iya udah deh, he’eh udah tanda-tangan.’ Yaitu.

T: Dijaga bapaknya?

J: He'eh. Wong timbang, timbang cuma saknyukan (sebentar) lima menit gitu. Tanda tangan ‘utek-utek’, gitu. Udah gitu ya, masuk lagi. Mending kalau yang dijaga itu keker, tinggi gede, atau jenderal, atau... ya alah, alah, lah, lah. Coba, sampe ke Biro Sipil sana, ke kantor sana ke Catatan Sipil, bapak saya ya, dieret-eret (diseret-seret) ke sana. Ya iya, makanya, jadi orang itu bukan pingin lihat mantennya (pengantinnya), bukan [tertawa], pingin lihat bapak saya. Aduhhhh... Ya begitu. Habis itu tanda tangan, masuk lagi. Salamah sama suami. Udah, masuk lagi.

Saya pikir, mau jadi suami itu, saya pikir sudah siap segalanya, ternyata suamiku mungkin bisa, tapi saudaranya, sampe sekarang. Poko'e angger (pokoknya jika) ada masalah sedikit itu, dikutik itu. Keluar ‘Wooh...’ Nah, makanya saya lebih baik saya, ya menyendiri

ajalah. Beginilah. Aku wiraswasta, buka salon kecil-kecilan sambil laundry (binatu).

Saya juga bilang sama bapaknya anak-anak. 'Terserah kamu deh,' saya bilang gitu. Iya kan?

T: Terus, yang ibu baru keluar, terus nyewa satu tempat tinggal...

J: Waduh, itu di emperan kecilil, cuma satu bale-bale begini, bale-bale bambu punyanya. Itu aja dikasih.... Ya udah cuma emperan itu aja, aku bolehnya dagang es itu. Ibu tinggal di situ, kan ibu sendirian. Ya di situ ibu mulai ngajarin orang Cina-Cina itu bahasa Indonesia itu lho. Kan mereka kan bahasanya itu masih bahasa Kuo'ie [Hokkian] istilahnya. Ah itulah buat makan. Ya ngga gede. Yaah, ada yang ngasih, diterima, ngga, ya udah. Ngasih makanan, ya dimakan, ngga ya matur nuwun, gitu aja.

T: Waktu sering berkunjung ke ibu itu, Bu Sugianti kenal sama tahanan yang lain?

J: Ooh, banyaaakk! Baaanyaakk! Mereka ya mungkin anak-anaknya ya pada berkunjung. Mungkin. Kalau yang masih hidup, keluarganya masih. Kalau yang ngga punya keluarga ya mungkin udah dibantai, atau mungkin itu ya ngga ada yang ngunjungi. Tapi serasa aman di dalam di situ. Aman tentrem, gitu ya, mereka merasa senasib sepenanggunggan gitu. Malahan kalau saya ngga dateng mungkin kangen dengan mereka yang punya anak sepantar-pantar saya. Seneng di dalem situ, waduuh wis.. kumpul ibu-ibu banyak, bapak-bapak juga banyak.

Jadi, keluar dari penjara bukannya enak, malah susah mbak Asih! Kayak kita ini penderita lepra gitu yang orang itu takut ketularan, di kota kecil itu. Hukuman dari masyarakat itu. Nek (kalau) maling karuan! 'Oh maling metu, ya wis sadar. (Oh maling keluar, ya sudah sadar.)

T: Terus, kalau yang di gedung itu bentuknya kayak penjara ya bu?

J: Kayak, dulunya itu bekas pabrik gula, tapi nggak dipake. Tempatnya paling angker, katanya. Lha itu di situ itu ibu-ibu bapak-bapak dimasukin di situ.

T: Jadi satu?

J: Oh ngga. Kan anu jadi disekat gitu. Bapak sebelum sini, keluar emperan itu, ibu yang di dalem. Tapi ya gedung-gedung tua begitu, gedung tua, gedung jaman Belanda.

T: Terus, yang ibunya Bu Sugianni sering omongin waktu ibu datang berkunjung apa aja?

J: 'Terima ini dengan sabar, dengan tabah. Ngga selamanya itu kayak gini terus.'

T: Waktu kecil kehidupan Bu Sugiantikayak gimana sih sebelum kejadian 65?

J: Ooh, jan (sangat) aman tentrem semua! Seneeng, seneeng, seneeng gitu ya! Ya kalo pagi sekolah, ibu kan ngajarnya kan deket. Sekolahan sini, sekolahan situ... eh... rumahnya sini, sekolahnya situ. Deket. Nah, kalo pagi bareng-bareng bapak, ibu, anak tu pembantu rumah tangga, pembantu nganterin sekolah. Nanti

pulangnya, yaa keadaan yang damai, aman, tentrem pulang sekolah ya belajar begitu. Ketemu bapak, ibu sore masih ngobrol di meja makan. Masih ngomong masalah-masalah ada yang lucu-lucu lah ceritain. Yah begitu, tapi ya nggak lama ngalami yang seperti itu. Familier gitu. Banyak orang itu keluar masuk di rumah karena di rumah ini ada koperasi guru-guru. Nah di situ itu ada gula, kopi, beras, segala macem. Saya itu senengnya nyangkir (menakar dengan cangkir) gitu, di situ guru-guru yang sudah tanggung bulan boleh ngebon di situ. Jadi rumahku rame terus.

T: Terus, Bu Sugianti tahu kejadian 65 itu dari mana?

J: Oh itu. Waktu itu saya mana tahu? Kan setelah gede, gitu, setelah... 'ooh, jahat ya PKI itu'. Saya juga ngga tahu ibu saya PKI atau bukan. Saya ngga ngerti. Mana aku ngerti wong anak SD kok. Di sekolah ditanamkan yang kayak gitu. Sampe sekarang, sampe sekarang ini cucu saya, anak saya ya tahunya PKI itu jahat. Saya sendiri juga ngga tahu kalo bapak saya itu dedengkotnya PKI. [terawa]

T: Anak-anak ibu sekarang tahu, dulu latar belakang ibu?

J: Lama-lama tahu. Setelah sekarang ini, lama-lama tau. Dulu juga anakku yang paling gede, kalau lagi berantem sama adiknya gitu, 'Dasar lo, PKI lo!' suka begitu kan [tertawa]. Masih begitu berantem, 'PKI lo!' Saya bilang, 'Ssst, apa itu?' 'Iya tuh mak! Kenapa?' Aku sedikit kalau bandel, 'Dasar PKI lo!' gitu. [tertawa]. Itu sampe begitu dogmanya. Jadi begitu hebatnya ya, begitu hebatnya si

rezim itu menanamkan dogmatisme, menanamkan rasa... yaitu, yang dianggap penyakit lepra itu. Begitu hebatnya sampe satu generasi kan? Iya, kan bisa begitu kan. Pokoknya kalau yang jahat, ‘Dasar lo, PKI lo!’ gitu kan? Timbang nggak mau, atau rebutan mainan atau apa, ‘PKI lo!’ Saya bilang, ‘Kamu itu apa itu? Kamu itu apa? Tahu nggak kamu PKI itu apa, coba? PKI itu makanan yang enak, tahu nggak?’ Sekarang setelah sudah pada kuliah, itu tahu.

---

[1] Menarik bahwa Ibu Sugianti mengingat munculnya kerusuhan pada malam 30 September. Kerusuhan di kotanya, Kebumen di Jawa Tengah, tidak mungkin mulai sampai pertengahan ke akhir Oktober. Tanggal 30 September rupanya begitu berkesan baginya sehingga ia mungkin tanpa sadar menempatkan ingatan tentang kerusuhan di kotanya pada tanggal tersebut.
[2] Gestok: Gerakan Satu Oktober.
[3] Kemungkinan ibu dari Ibu Sugianti ditangkap kembali pada 1974 setelah kerusuhan Malari terjadi. Beberapa tapol yang dibebaskan pada akhir 1960an atau awal 1970an mengalami penahanan sewenang-wenang sekali lagi pada 1974 semata-mata karena nama mereka tercatat dalam daftar tentara sebagai orang-orang yang berpotensi menimbulkan masalah.

PAK KASMIN

8 September 2000

Jawab: Ya saya akan bercerita sedikit...

Tanya: Yang banyak, Pak. Jangan sedikit [terawa].

J: Harus banyak ini? Ya seingat saya ya. Jadi apa yang bisa saya ingat. Memang saya dilahirkan di Lasem juga. Jadi, kota pantai inilah saya dilahirkan, Rembang, Lasem. Ya saya dari desa Kecamatan Lasem, Lasem, Kabupaten Rembang, Jateng. Kami dari keluarga miskin. Sejak kecil saya sudah ditinggal mati oleh orang tua laki-laki saya. Sehingga ibu saya ditinggali tiga orang anak. Yang sulung adalah perempuan, tengah itu saya, kemudian yang bungsu ada adik saya laki. Kemudian tidak lama, kami baru berumur masih kanak-kanak, ayah saya sudah meninggal, ibu saya terpaksa menanggung beban yang berat. Dari keluarga miskin dari ekonomi yang terlalu sulit untuk mencari nafkah terpaksa ibu saya itu, di samping buruh-buruh di daerah, tempat kelahiran saya, juga kalau ada uang sekedar bakulan (dagang) kecil-kecilan, misalnya jualan jagung dan lain sebagainya. Menginjak tahun 48, saya lahir ya, saya sebutkan, saya ulang lagi, saya lahirnya tahun 1939. Kalau ndak salah tanggal 12 April eh, 12 Maret 1939, di kota Lasem. Nah,

kemudian sejak ayah saya meninggal, saya uraikan sebagaimana tadi, orang tua memang tinggal orang tua perempuan, saya kumpul bersama kakek dan nenek saya. Semuanya dari kalangan orang yang tidak mampu.

T: Petani apa nelayan Pak?

J: Buruh, buruh. Bukan petani, bukan nelayan. Kalau disebutkan petani, ayah saya orang tua saya tidak punya sawah tegal, saya sebutkan nelayan, tidak punya perahu dan bukan buruh nelayan, sebab jauh dari pantai. Meskipun Lasem ini termasuk kota pantai, tapi kampung saya itu jauh dari pantai. Jadi kehidupannya itu adalah kehidupan dari buruh-buruh kecil. Tetapi dengan keuletan orang tua perempuan saya itulah, maka saya bisa dibesarkan. Cuma yang menjadi sayang setelah ayah saya meninggal dunia, menyusul adik saya dulu. Menyusul. Selisih beberapa bulan adik saya meninggal. Tinggal saya dengan mbakyu saya atau kakak perempuan saya.

Kemudian tahun 1948 Belanda masuk lagi, aksi kolonial kedua atau berapa itu, waktu pergolakan Belanda masuk dan keluar masuk kampung. Penderitaannya, derita ibu saya sekeluarga itu tidak sebatas sampai di situ saja. Karena pada saat itu pendudukan Belanda, dan Belanda wataknya memang demikian kasarnya. Pas masuk ke rumah saya, sedang mbakyu saya sedang sakit, istilah Jawanya kaget atau terkejut, dan derita yang dialami oleh kakak perempuan saya itu akhirnya sampai pada puncaknya, yaitu meninggal. Tinggal satu-satunya anak

adalah saya, yang harus dididik oleh seorang ibu yang sebenarnya tidak mampu.

Dari kecil baru sekolah SD, saya pernah sama sekali tidak punyai pakaian, cuma hanya selembar kain yang melekat di tubuh saya. Dan pernah saya diajak cari jagung untuk nantinya dijual ke pasar, dan kulakannya itu cukup jauh, antara lain dari kampung saya ada enam kilometerlah, ke sebelum selatan. Saya pernah ndak pakai baju, telanjang dada, ngikutin orang tua saya dalam keadaan panas dingin. Dan ketabahan itu akhirnya saya bisa dididik, diteruskan oleh ibu saya menjadi buruh Tionghoa, yaitu buruh batik. Batik-batik tulis, tulis tangan itu. Tapi dengan hasil yang sangat minim itulah ibu saya dengan tabah, selalu mendidik, supaya benar-benar saya menjadi anak yang baik, berguna. Akhirnya saya bisa meneruskan sekolah sampai ke sekolah SD.

Pada tahun 48 itu, sekolah di SD itu, ada Belanda datang itu. Saya ramai-ramai ikut membakar gedung sekolahan–memang pada waktu itu pemerintah Republik Indonesia itu memerintahkan politik bumi hangus–sehingga sekolahan, kantor-kantor, jembatan-jembatan, banyak yang dihancurkan oleh bangsa kita sendiri, menggunakan politik bumi hangus itu. Setelah sekolahan saya dibakar, dan kami ikut melaksanakannya, dan sebagai petugas rombongan dengan anak-anak sekolah semua itu, akhirnya saya terpaksa ndak bisa sekolah lagi, mandeg (berhenti).

Pada waktu itu saya kelas empat SD, SR [Sekolah Rakyat] pada waktu dulu.

Pada tahun 49, setelah Belanda agak mundur, sekolahan dibangun lagi, dan bertempat di suatu gedung bekas rumah Tionghoa, itulah ditempati sekolahan-sekolahan. Jadi sekolah-sekolah kami kan itu adalah bertempat di rumah-rumah, atau pada umumnya memang begitu, sebab sekolah-sekolahan sudah banyak yang hancur. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan fisik di atas pemerintah Indonesia. Akhirnya satu, dua, sekolah itu bisa berdiri. Setelah ada satu sekolahan yang bisa didiriken, saya bisa menempati fasilitas atau sekolahan baru itu, sampai ke kelas enam SR. Dari situ saya berpikir, kalau saya meneruskan sekolah umum, sekolah menengah, sekolah manakah kami harus ke mana? Biaya dari mana harus kami dapat? Padahal orang tua saya untuk makan aja pas-pasan. Bahkan boleh dikatakan kurang. Maka dari itu terpaksa saya mengambil jalan pintas mencari sekolahan yang mendapatkan ikatan dinas untuk meringankan beban, itu sekolah SGB [Sekolah Guru tingkat Bawah], SGB empat tahun.

Dengan adanya sekolah SGB itu, beban orang tua kami agak ringan sedikit, sebab sudah tidak begitu membiayai kebutuhan kami. Kami bisa mencukupi diri atas dasar ikatan dinas yang diberikan pemerintah kepada kami pada saat sekolah di SGB. Sebenarnya bukan kami termasuk orang anak yang pandai, tapi karena ketekunan mengingat orang tua latar

belakangnya dari orang tua miskin, keluarga miskin, saya tetap berusaha untuk jangan sampai sekolah saya itu gagal. Malu bagi diri saya kalau sampai sekolah saya itu gagal.

Justru itu, pada waktu itu, meskipun anak-anak orang yang berada dan mampu, yaitu bisa ya pergi ke mana-mana, saya dengan kondisi yang ada pada waktu itu, tetap saya manfaatkan. Dan mulailah tanda kehidupan ini mulai berubah pula, sebab kalau saya dari SGB kelas satu itu uang ikatan dinas cukup saya gunakan untuk makan, beli pakaian dan untuk kos, tapi setelah menginjak kelas tiga karena harga-harga mulai sudah merambat naik, terpaksa kurang cukup. Namun demikian saya paksakan untuk bisa cukup-cukup dan saya tidak boleh mengganggu atau minta pertolongan kepada orang tua atau famili-famili. Sebab saya anggap famili-famili saya juga dari lingkungan orang yang tidak mampu. Sebenarnya kelas tiga itu kami berkeinginan untuk bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi, yaitu SGA [Sekolah Guru tingkat Atas]. Dan di situ ada peraturan yang nilainya rata-rata tujuh ke atas itu bisa meneruskan ke SGA. Kami berusaha untuk mencapai nilai yang cukup memadai.

Cuma karena situasi, di SGA itu sendiri juga nantinya juga tidak ada di Rembang dan harus di Semarang, maka kami terpaksa dengan hati yang berat kami tidak bisa meneruskan dan hanya bisa melanjutkan SGB sampai di kelas empat. SGB saya lanjutkan sampai di kelas empat,

lulus pada tahun 1958. Agustus 58 lulus. Dengan membawa predikat lulusan SGB, saya bercita-cita menjadi seorang pendidik atau guru yang baik. Saya tunggu-tunggu, kalau tidak salah bulan Januari 59, saya sudah mendapatkan perintah untuk mengajar di satu desa, di daerah satu kecamatan dan di puncak gunung. Di situlah.

T: Daerah mana itu Pak?

J: Daerah mBendo, Seluke, daerah Bendo, Kecamatan Seluke. Di puncak gunung inilah. Saya berkenalan dengan orang-orang desa. Orang-orang desa. Dan orang-orang desa itu, oh ya saya juga dengan ini peradabannya agak primitif. Namun demikian juga tidak terlalu kasar terhadap orang-orang pendatang, dengan dibuktikan setelah kami berada di sana, bisa bergaul dengan masyarakat di sana, dan tokoh-tokoh masyarakat, pamong desa, dan sebagainya, termasuk pemuda-pemuda, akhirnya kami bisa melakukan suatu komunikasi yang baik, kerukunan bisa kami ciptakan antar pemuda. Akhirnya ada satu kemajuan, dengan dibentuknya koperasi pada waktu itu di desa, Koperasi Tenun. Kami juga ikut berkecimpung menangani di Koperasi Tenun. Ya ditinjau ikut cawe-cawe-lah (terlibat) di dalam kepengurusan.

Kemudian ada sensus pada tahun 1961, kalau ndak salah. Sensus itu kami juga bisa bertugas, ditunjuk sebagai badan pemeriksa yang menguasai beberapa lingkungan. Nah, tenaga sensus inilah membuat saya agak seneng.

Sebab gaji guru pada waktu itu sudah tidak cukup lagi dengan harga yang makin meningkat. Gaji guru tidak digunakan untuk apa-apa, kecuali hanya sekedar untuk bisa makan satu bulan.

Kemudian, umur merambat menjadi, sudah menjadi devasa dan sudah berkepala dua ke atas, sekitar 25 tahun. Akhirnya, mungkin Tuhan sudah menciptakan bahwa saya harus segera mendapatkan jodoh. Tapi, apa yang saya gunakan untuk biaya perjodohan saya? Padahal saya hanya seorang guru SD, pegawai kecil, dan gajinya cuma pas-pasan. Lewat hasil dari Badan Pemerintah Sensus itulah, akhirnya honor dari sensus itu, bisa saya gunakan untuk sekedar membiayai biaya perkawinan.

Sayang, derita tiada akhir. Setelah saya kawin, selisih satu bulan lebih sedikit, ibu saya sakit keras dan meninggal. Tinggal sebatang kara saya, inilah yang saya katakan derita tiada akhir. Sebagai seorang laki-laki yang baru saja melaksanakan perkawinan dan mestinya kalau menurut orang yang berada harus berbulan madu ke sana-sana. Tapi bulan madu saya ada di makam ibu saya, dengan perasaan berat dengan menangis saya laksanakan derita kehidupan saya, pada tahun 1962.

Kemudian di tempat yang tinggi, itu, oleh karena saya, kalau saya bertempat berdua dengan isteri saya, itu tidak memungkinkan, karena biaya yang cuma pas-pasan, maka isteri itu, isteri saya, saya suruh berada di rumah. Dan saya pergi ke sekolahan itu dengan, apa itu

istilah bahasa Jawanya nglaju, yaitu pulang pergi naik sepeda pancal (kayuh). Padahal jaraknya yang bisa dinaiki sepeda cukup jauh, sekitar 15 kilometer lebih, kemudian naiknya yang harus jalan kaki ada lima kilometer lebih. Namun demikian itu, saya laksanakan tugas itu dengan penuh ketabahan, dan saya laksanakan dengan baik.

Memang pada tahun itu, itu gejolak perekonomian kita makin meningkat. Pada saat Bung Karno mencanangkan Trikora, itu saja kehidupan guru-guru sudah makin ndak karu-karuan. Dan ada sebagian guru-guru sudah tidak disiplin lagi. Sebab kalau hanya disiplin saja, kita sebagai seorang guru tidak bisa dimakan hasilnya. Akhirnya banyak guru-guru juga yang menyambi (melakukan kerja sambilan). Ada yang jual, tidak masuk sekolah jual apa itu? Jual ikan. Ada yang jual sepeda, ya makelaran, dan sebagainya dan sebagainya. Calo apa, calo ini, calo itu, yang pokoknya halal lah pada waktu itu.

Namun gejolak apa pun yang diderita oleh kami, dengan kawan-kawan senasib seprofesi, seperti guru pada waktu itu, tidak ada gejolak batin yang sangat menyolok. Sebab kehidupan pada waktu pemerintahan Bung Karno itu bener-bener damai, tenang. Sudah itu, meskipun kami makan nasi gaplek atau beras singkong kering, nasi jagung. Itu rasanya damai, kehidupan itu hidup rukun, antar teman, antar kelompok, antar suku. Jadi di Indonesia itu saya kira merupakan satu kedamaian yang

boleh dibanggakan pada waktu itu. Partai-partai politik hidup subur berdampingan, berlomba, melakukan pendidikan politik sampai di desa-desa.

Pada pemilu, pada tahun 55 itu, ada seratus partai, ada buanyak partai, dan salah satu partai yang menarik bagi saya adalah Partai Komunis Indonesia. Sebab mengapa saya tertarik masuk PKI? Sebab PKI programnya adalah ingin mengentaskan rakyat kecil, memperjuangkan nasib kaum yang tertindas dan terampas haknya. Dus, dengan jelas saya mempunyai obsesi, mempunyai harapan kalau toh nanti kami bisa menyalurkan aspirasi politik saya ke PKI, dan PKI mendapatkan tempat di hati rakyat, mungkin bisa mengubah situasi yang sangat menderita itu menjadi tujuan yang lebih baik.

Kerukunan antara partai politik, antar organisasi massa, maupun organisasi apa saja pada waktu Bung Karno sebelum 65 itu benar-benar terjalin satu kerukunan, sampai-sampai tercipta satu ikatan yang dinamakan Nasakom. Bung Karno membuat Nasakom: Nasionalis, Agama dan Komunis hidup berdampingan secara damai. Untuk di daerah-daerah, nggak tahu kalau di kota, di pusat pemerintahan sana, nggak tahu. Orang-orang elit politik di sana mau cakar-cakaran atau nggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, setahu saya, elit politik di tingkat kecamatan sampai di Kabupaten itu tidak ada yang cakar-cakaran atau saling menjatuhkan.

Namun, ketenteraman yang kami terima, kami derita, kami laksanakan kami hayati, kembali lagi mencapai

puncak kekelabuannya. Sebab tanggal 29 September 1965 meletuslah G-30-S. Kami nggak tahu siapa yang membuat ide G-30-S itu? Dan tujuannya sebenarnya apakah? Apakah bener G-30-S ini mau menjatuhkan Bung Karno? Padahal PKI itu satu-satunya partai yang paling setia kepada Bung Karno. Setiap ada perintah dari Bung Karno, setiap ada komando pidato-pidato yang dulu itu terkenal dengan pidato tiap-tiap tanggal 17 Agustus, dengan judul apa pun baik itu Usdek, Tavip, dan lain sebagainya itu.[1] Banyak sekali, ada Berdikari segala itu. Setelah dikomandokan oleh Bung Karno, dipidatokan Bung Karno itu, besok harinya, setelah turun ke daerah-daerah, disosialisasikan oleh PKI ke daerah-daerah lewat Front Nasional. Dengan menggunakan media Front Nasional itu PKI bekerja memasyarakatkan pidatonya Bung Karno. Dan kenyataannya memang PKI pada waktu itu dicintai oleh rakyat. Enam lima, namun sampai bulan September jatuhnya Bung Karno dengan adanya G-30-S itu, Bung Karno sengaja posisinya makin terancam. Terancam.

Dengan terancamnya Bung Karno itu, sasaran pokoknya adalah PKI. PKI dijatuhkan dulu oleh Soeharto. Dengan dibuktikan, PKI dibubarkan, kami yang ada di daerah-daerah itu, baik itu yang memasuki organisasi perguruan seperti PGRI, dulu ada PGRI Non-vak Central, maupun yang masuk PKI, masuk Pemuda Rakyat, atau BTI [Barisan Tani Indonesia], yang perempuan masuk Gerwani, semua ditangkap, ditahan

dan dipenjarakan. Setelah kami masuk penjara, selang beberapa minggu surat datang dari pendidikan, dari dinas kependidikan saya, Dinas PDK pada waktu itu, yang menyatakan bahwa saya diberhentikan.

Anehnya, pemberhentian yang saya terima itu tidak dilanjutkan dengan fasilitas apa pun yang kami terima. Jadi begitu, sehingga saya sendiri pada waktu itu bingung, apa salah saya, saya dimasukkan ke penjara? Mengapa dedikasi saya di dinas di perguruan itu tidak mendapatkan imbalan, apalagi pensiun? Ganti rugi atau santunan untuk keluarga saja ndak. Bahkan keluarga-keluarga orang-orang yang ditindas, ditahan itu, bahkan ikut tertindas. Dikejar-kejar, harus wajib lapor, dikenakan wajib lapor, tidak kenal itu anak kecil atau ibu, sang ibu tadi baru melahirkan, atau sang ibu baru menimang anaknya yang masih bayi, semua dikenakan wajib lapor. Nah, dengan sambil wajib lapor itulah isteri saya satu-satunya pada waktu itu ngirim, mbantu penghidupan saya di dalam terali besi, yaitu di Penjara Rembang.

T: Itu Pak, Bapak waktu itu apa organisasinya Pak?

J: Organisasi, tadi saya sebutkan sebagai PKI.

T: Dulu apa Pak jabatannya waktu di PKI?

J: Saya memang aktivis. Jadi di sini saya sebutkan sebagai aktivis saja. Sebagai aktivis.

T: Di PGRI Bapak ndak ikut?

J: Di samping PGRI, PGRI sebagai anggota biasa. Tapi kalau PKI-nya memang saya terus terang sebagai aktivis. Namun di tingkat desa kecil, gitu lho. Karena saya mempunyai obsesi tadi.

T: Bapak masih ingat tanggal penangkapan Pak, terus bagaimana proses penangkapan?

J: Saya kalau waktu yang persis adalah tanggal 9 November 1965.

T: Itu Bapak bisa ceritakan bagaimana proses penangkapannya–misalnya sedang apa waktu itu Bapak, terus di rumah isteri ada apa nggak?

J: Nah gini, sebelumnya itu sejak meletusnya G-30-S itu kami terus di, dengan gagalnya gerakan 30 September, disebut gagal atau tidak kami nggak tahu secara politis ya, tinggal tinjaunya dari kacamata apa itu. Kalau menurut Soeharto memang G-30-S gagal. Nha justru itu dengan gagalnya itu, orang-orang itu, yang masuk organisasi kiri, semua adalah kena wajib lapor. Sampai dengan tanggal 9 Nopember 1965 kemudian saya baru wajib lapor itu di depan kantor polisi itu sudah siap truk. Setelah orang-orang wajib lapor sudah selesai, semua dinyatakan naik truk. Tapi, situasi pada waktu itu sudah geger (heboh), di daerah Lasem sudah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Islam, tujuannya adalah antiSukarno. Dan terjadi clash (pertempuran) antara aparat, terutama adalah dari–kalau dulu Butterpra, kalau sekarang Koramil–, kalau dulu kalau nggak Butterpra ya PODM, itu Koramil,

sekarang Koramil, yaitu terjadi clash antara aksi massa dilaksanakan oleh pemuda-pemuda Islam dengan Koramil. Namun dari pihak kami tidak tahu persis adanya aksi itu, sebab kami sudah ada di kota Seluke dan sebentar lagi sudah naik kendaraan, dari kendaraan itulah kami turun sebentar di Kantor Polisi Lasem, dari Kantor Polisi Lasem setelah dihitung diterusken ke Penjara Rembang, langsung masuk Penjara Rembang.

Dari Penjara Rembang itulah kami merasa tenang. Kenapa kok di dalam penjara kok tenang? Ha ini faktornya banyak sekali. Karena selama di rumah, kami mendengar gejolak yang terjadi di masyarakat, terjadi tembak-tembakan, terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian kami setelah diangkut ke penjara bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh desa, seluruh kecamatan, se-Kabupaten Rembang di situ. Itu tumplek blek (tumpah ruah). Tempatnya saja ndak cukup, ribuan.

Nah, setelah beberapa hari di sana, menangis, melihat orang-orang yang dimasukkan di dalam penjara. Hati saya merintih, menangis. Sebab apa? Sebab ada orang yang sedesa dengan saya, desa asalnya ya di Lasem itu, ya sebenarnya orang sudah tua. Boleh dikatakan sudah lumpuh, dan tidak tahu apa-apa memang, kenyataannya begitu, dibawa ke penjara. Masuk penjara. Di mana letak kemanusiaannya? Diambil pemerintah pada waktu itu. Namun demikian ini memang merupakan suatu kenyataan, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa di

dalam penjara, hanya merenung, merenung, merenung, dan sekali lagi merenung.

Setelah di penjara, kemudian kami ditampung, dan mulai ada pemeriksaan. Pemeriksanya dilakukan oleh Timperda, atau Pemeriksa Daerah. Ini saya dengan dan saya lihat, banyak sekali perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh aparat daerah itu tidak manusia iwa sama sekali.

T: Bisa diceritakan, Pak?

J: Sebab setiap ada teman yang dipanggil dari penjara untuk diperiksa di satu tempat, di tempat pemeriksaan, pulangnya pasti lumpuh. Itu karena pukulan yang tidak manusiawi lagi. Ada juga yang telinganya juga sobek, karena memang ada satu polisi yang terkenal yang namanya, kalau ndak salah... Lupa saya... Lan... Lan... Das... Darlan apa sapa ya? Polisinya. Kasilan! Namanya Kasilan. Itu polisi terkenal sebagai satu tim, petugas yang doyan kuping. Jadi setiap teman ke sana, giliran dia yang meriksa jangan diharepkan telinganya akan utuh pulang.

T: Itu diapain?

J: Pasti digigit. Jadi digigit sengaja. Maka dari itu sebagai binatang buas atau apa saya ndak tahu aja, kenyataannya begitulah. Kemudian pukulan juga begitu, bertubi-tubi. Ada juga sehabis dari periksa sampai di penjara, dia semaput. Jadi tidak siuman lagi, karena pukulan yang terlalu parah. Sesudah itu, begitulah teruuuus, saya lihat tiap hari begitu. Jadi kami di

penjara ini disuguhi oleh atraksi atau kenyataan-kenyataan yang begitu, yang mengerikan. Sebagai orang Jawa, saya hanya pasrah, memohon kepada yang Maha Kuasa, semoga saya mendapatkan perlindungan. Dan satu ketika, lupa saya tanggal pemeriksaannya, sebab tidak tahu. Pemeriksaan itu saya lupa, tapi ya sekitar tahun 66. Itu sebenarnya saya sudah mendapat panggilan, dan panggilan setelah menghadap tim saya suruh menunggu di ruang tunggu. Di ruang tunggu itu yang meriksa saya tidak datang, sebab saya harus kembali. Paginya dipanggil lagi. Saya dengan, yang akan meriksa saya itu adalah polisi Kasilan yang doyan kuping tadi. Tapi mungkin Tuhan memberi pertolongan kepada saya. Kami tidak jadi diperiksa oleh Kasilan, dan diganti oleh petugas lain, polisinya, kalau tidak salah namanya Pak Karjan. Lupa saya, sudah sekian tahun.

Di situ memang saya diinterogasi, dan saya menjawab. Pertanyaannya apa saya jawab dengan jelas. Nah, di situlah saya mendapat perlakuan yang baik, dengan dibuktikan saya tidak mendapatkan bentakan apalagi pukulan itu tidak dapat. Sehingga saya pulang dengan selamat di penjara. Setelah masuk penjara banyak teman yang meragukan. ‘Ada apa? Kok pulangnya dengan badan yang utuh?’ Padahal teman-teman masih banyak yang ancur. Namun di situlah kenyataannya. Jadi mungkin saja kalau ditinjau dari segi agama, permohonan saya dikabulkan, buktinya saya masih mendapat perlindungan. Selanjutnya mulai tahun 60, eh,

selama di dalam penjara itu saya ulang lagi, ini, penderitaan bentuk makanan, bentuk makanan, minuman yang diberikan. Minuman, apalagi minuman manis, minuman air putih itu aja tidak mencukupi. Makanannya lebih susah lagi. Cukup diberi makan omprengen. Omprengen itu piring seng.

T: Makannya sehari?

J: Sehari yang tadinya dua kali, akhirnya menjadi satu kali.

T: Isinya apa Pak?

J: Isinya nasi merah dan kasar sekali, cuma satu centong (sendok nasi) itu. Itu aja tidak selamanya, selama kami di dalam penjara. Dan yang sangat mengerikan sendiri selama di penjara adalah makan jagung. Jagung yang direbus hanya beberapa gelintir diberikan sekali, itu saya bagi menjadi tiga kali. Artinya setiap jam dua saya mendapat rangsum, pembagian makan, saya makan sore itu. Malamnya saya makan juga beberapa biji, paginya saya makan lagi, meskipun cuma sepuluh butir saya sisakan untuk pagi-pagi sebagai sarapan. Dan setelah pagi itu tidak ada jagung yang sehat, sudah keluar liurnya itu lho. Sudah lekat keluar liurnya dan basi. Tapi mungkin di penjara itu merupakan makanan yang nikmat. Bayangkan. Itulah penderitaannya. Kalau pada waktu mendapat nasi, sayurnya itu juga paling baik itu dari daun pepaya dicampur bonggol-bonggolnya. Bahkan tangkainya itulah yang paling banyak dimasukkan di dalam.

T: Itu di Penjara Rembang itu, Pak? Itu bentuknya sel-sel?

J: Ya di dalam penjara itu idealnya itu di tiap-tiap penjara itu ada sel yang kecil, yang cukup lima, enam orang. Ada juga sel yang diisi 50 orang, dengan orang bagaikan ikan pindang itu, tidurnya ya berhimpit-himpitan dan tidak aturan lagi, sudah. Karena saking capeknya ya tertidur.

T: Waktu itu Ibu besuk nggak, waktu itu?

J: Ya?

T: Ibu bisa besuk nggak?

J: Pada waktu itu Ibu bisa besuk, namun karena kondisi di rumah sendiri itu juga ndak ada, satu-satunya jalan–dulu itu penghidupan dari saya, karena saya masuk penjara Ibu juga kena wajib lapor, sehingga kadang-kadang bisa ngirim itu hanya sumbangan dari sanak family saya. Jadi saudara-saudara yang mungkin ada belas kasihan nyuruh isteri saya, suruh ngirim.

T: Waktu itu Bapak sudah punya anak, Pak?

J: Sudah punya anak satu.

T: Umur berapa, Pak?

J: Laki-laki jadi baru umur satu tahun.

T: Terus kalau Ibu besuk bisa dialog sama Ibu?

J: Kalau Ibu besuk susah untuk berdialog. Pernah memaksakan anaknya supaya bisa saya timang, itu aja anaknya karena kecil itu dimasukkan pada pintu kecil, seperti pintu loket gitu. Dibrosotkan (didorong), dimasukkan gitu, saya terima dari dalam. Itu saja

dengan kekerasan hati ibunya anak-anak itu baru diterima. Umpama ibunya anak-anak tidak dengan maksa, tidak dengan menangis-nangis, mungkin juga tidak akan diijinkan. Jadi tidak bisa ketemu. Omong kosong kalau ada orang yang mengatakan bisa ketemu, wawancara, bercanda dengan isteri. Nggak bisa. Selama di penjara baru tahun 1968 mulai orang-orang itu dikaryakan, 68, 67, mulai dikaryakan bisa keluar bekerja untuk kepentingan daerah. Saya pada waktu itu dari orang puluhan ribu tinggal beberapa puluh aja di penjara. Lha sementara bisa bekerja di depan kantor CPM [Corps Polisi Militer], di halaman, di situ nyangkul, dan suruh nanam ubi jalar, dan lain sebagainya. Suruh perbaiki WC, suruh macem-macemlah, apa kebutuhan di situ. Dengan catatan di situ hanya kami dipaksa bekerja, tapi tidak mendapatkan imbalan apa-apa.

T: Untuk makan siang?

J: Makan siang juga tidak mendapat.

T: Untuk makan bagaimana?

J: Makan ya kalau ada kiriman ya makan kiriman, kalau nggak ada ya jatah dari penjara, kalau sudah pulang baru kami terima, sudah kembali ke penjara lagi. Sebab kerja di situ kan tidak sehari suntuk, sampai jam empat kalau ndak salah. Lama kelamaan karena teman-teman sudah dikerjakan di daerah, ada yang di perbaikan jalan, ada yang menggali batu bara di daerah Sale, akhirnya saya karena sudah kenal dengan komandan Timnya, saya ingin mencoba minta jasa baiknya untuk saya bisa

keluar dari penjara. Akhirnya saya bisa dikirim ke suatu daerah, di situ tapol sudah dikaryakan dengan melakukan penggalian batu bara. Dari situ, kami tidak lama dipindah lagi dengan dipindah ke suatu daerah pengepresan genting. Genting pres. Namun demikian juga sekali lagi, segala-galanya adalah hidup daripada orang-orang ini dikaryakan, jarang mendapatkan rangsum yang memadai.

T: Itu gentingnya genting apa?

J: Genting pres macam gini.

T: Buat dijual atau buat dipakai?

J: Ya, itu kami nggak tahu. Yang jelas kalau sudah jadi, ya dibawa ke Kodim. Segala-galanya adalah Kodim yang kuasa. Sedangkan kami yang melaksanakan itu, di samping itu untuk alat bakarnya sendiri adalah kayu bakar. Kami terpaksa melanggar aturan pemerintah yaitu dengan jalan mencuri kayu. Jadi kayu-kayu hutan-hutan jati sekitar situ, kami mencuri kayu untuk membakar.

T: Atas perintah itu?

J: Ya. Atas perintah Kodim. Memang pada satu ketika pernah kami tertangkap oleh petugas kehutanan, dan alat penebang saya diambil. Saya silahkan untuk diambil, sebab ini bukan untuk saya pribadi, bukan kami jual kami makan, tapi ini adalah untuk membakar bata, membakar genting dan hasilnya atau bahannya yang sudah jadi adalah untuk di Kodim. Saya katakan begitu, “Kalau mau diambil silahkan.” Kenyataannya pada

waktu itu mungkin yang paling berkuasa adalah tentara, ya? Ya akhirnya alat itu dikembalikan lagi kepada saya. Ya paginya ya nyolong (mencuri) lagi. Memang tugasnya nyolong. Dan sepenggal pun juga hasil colongan itu tidak masuk dalam keluarga, memang diharuskan begitu. Setelah kami ditahan begitu, dikayakan dan berpindah-pindah tempat, tidak hanya sekali dua kali, sampai ada yang di daerah perbatasan Blora juga, perbaikan jalan.

Kemudian pada tahun 69, mulailah ada orang-orang yang dikirim ke Pulau Buru. Enam sembilan, betul, 69 mulai dikirim ke Pulau Buru, angkatan pertama. Teman-teman dari Rembang itu naik kapal ADRI,

Angkatan Darat. ADRI Lima atau ADRI berapa, lupa saya. Saya nggak ikut, saya adalah angkatan kedua tahun 70. Tanggal sembilan Agustus 70 saya diberangkatkan ke Pulau Buru. Tapi tidak langsung ke Pulau Buru. Umpama dari Rembang masuk ke Nusakambangan. Dari Nusakambangan masuk ke sel Nusakambangan di Limus Buntu, itu menderita lagi. Tidak ubahnya orang-orang yang dipenjarakan lagi meskipun pernah menikmati udara luar lewat dikaryakan kerja di daerah-daerah dan bisa berhubungan dengan keluarga dengan leluasa, meskipun dalam keadaan terbatas cuma setelah di Nusakambangan kami-kami itu dipenjarakan lagi. Di situ kalau ndak salah 42 hari atau 50. Sekitar itulah, sekitar 40 sampai 50 hari itu. Di situlah giliran saya kapal yang

akan memberangkatkan saya sudah siap di pantai Nusakambangan itu, dan diberangkatkan ke Pulau Buru.

T: Itu Bapak bisa ceritakan fenomena yang ada di Nusakambangan, Pak?

J: Yaitu, kalau di Nusakambangan itu ya kami selamanya cuma di dalam penjara, kemudian menerima jatah makan dan bisa diberi waktu untuk keluar dari pintu, kira-kira jam sembilan dilatih oleh tentara untuk lari-lari, olahraga. Di situlah di penjara saya, karena penjara saya di Limus Buntu berhadapan dengan laut, itu merupakan kenikmatan tersendiri bagi orang yang tertindas, sebagai orang yang terkurung, sebab kalau sudah mulai senja, itu tampak kapal di laut itu. Dari kami semuanya berkerumun di belakang pintu itu, lihat dari jeruji-jeruji besi itu, lihat kapal, pemandangan laut.

Apa itu, di Nusakambangan itu hanya merupakan tempat transit sementara, saya tidak tahu persis perlakuan orang-orang yang ada di Nusakambangan. Tapi menurut cerita, menurut cerita memang deritanya adalah tidak kalah susahnya daripada derita yang dialami di penjara-penjara yang lain. Bahkan di penjara Nusakambangan itu adalah mayoritas atau tempat orang-orang buangan dari narapidana. Ha itulah, tapol-tapol itu menjadi mangsa daripada narapidana itu, dari napi-napi itulah memperalat tapol-tapol itu untuk kesenangan dia, itu. Kalau dari sana, orang-orang yang ditahan di Nusakambangan itu diwajibkan menanam singkong, tapi setelah keluar singkongnya dia mau makan sepotong aja

harus ijin, ijin petugas dan napi yang diserahi tugas jaga. Jadi bisa nanam, bisa menciptakan hasil, tetapi tidak bisa makan sesuai dengan bidangnya. Untuk mendapatkan, mencicipi apa hasil kerjanya itu saja harus minta ijin. Dan sesuai dengan pemberian yang diberikan oleh petugas.

Ha ini kami sekali lagi tidak lama di Nusakambangan terus berangkat ke Pulau Buru. Dari Pulau Buru naik kapal Tobelo sampai di Namlea, itu di pelabuhan Pulau Buru itu kan berada di Transito. Transito itulah tempat penampungan kami sementara. Dari Transito kami harus melalui aturan-aturan tentara yang menjaga di sana sangat ketat, dan akhirnya dengan susah payah, penderitaan, kami menempati tempat yang baru, yaitu di Unit 6.

Pada waktu itu kami membawa barang-barang. Ada tikar, ada pakaian beberapa lembar, namun karena badan sudah kurus capek, jalan licin lagi, membawa dengan perjalanan kaki dari ini, dari dermaga ke unit yang jaraknya cukup jauh, dan lewat jalan setapak, akhirnya jatuh bangun. Dan sudah malam, gelap sekali, kami tidak bisa mencapai unit. Kami sebagian teman-teman terpaksa harus tidur tanpa kawalan tentara, kami tidur di hutan, hampir-hampir jatuh di pinggiran sungai. Di hutan itu lho, untung ada satu kepala adat yang baik hati, mempersilahkan kami-kami itu berada di situ dan membakar bekas rumah yang sudah kosong untuk dijadikan, dibakar untuk penghangat badan. Dari situlah

paginya kami dengan udara yang sangat dingin kami terpaksa tidur beberapa jam. Paginya, kami setelah kelihatan jalan, berangkat ke Unit 6. Dari Unit 6, setelah sampai di unit kami sangat terkejut sekali. Di situlah ada barak-barak yang rumputnya menjulang tinggi, dan rumput itu alang-alang, dan istilahnya rumput alang-alang dan gerisan.

Di dalam unit itulah kami mendapat bagian parang baru. Namun parang- parang itu tidak bisa kami gunakan karena memang tumpul sekali, belum pernah kena asah. Terpaksa kami untuk bisa masuk ke rumah barak, itu aja kami mencabutin pakai tangan. Mencabut pakai tangan, dan oleh karena ada rumput yang tajam, seperti rumput gerisan itu yang tajamnya bukan main, sehingga tangan itu beberapa kali mengeluarkan darah dan pedasnya bukan main. Tiap hari beberapa hari cuma begitu dengan pengawasan tentara sangat ketat. Kalau kami kendor sedikit bekerja wahh... pasti kena dampratan dan pukulan. Setelah kami bisa membabat dan membersihkan rumput-rumput itu, kemudian kami menempati barak- barak itu cukup dengan apa itu? bale-bale bambu. Bale-bale bambu itulah kami bisa tidurkan diri dan paginya harus bekerja. Bekerja, diatur yaitu berupa bekerja untuk membabat alang-alang, membabat hutan untuk pertanian dan membuat irigasi. Ha, dengan pengalaman yang tadinya kosong, terus tidak pengalaman babat hutan, tidak punya pengalaman babat rumput, akhirnya bersama-sama dengan teman-teman

dari desa yang sudah pernah mengalami itu akhirnya bisa kami laksanakan tugas.

Selama kami dalam masa, istilahnya transisi ya, sebelum kami bisa menciptakan makanan sendiri itu memang dapat bantuan dari pemerintah, yaitu kami lupa sendiri makanannya bentuk nasi dalam ompreng yang dimasak sendiri, jadi dapat jatah beras. Namun kecewanya pernah juga pengalaman yang kami alami. Makanan yang ada di situ cukup nasi, pakai ikan asin. Ikan asinnya habis, ndak dapat jatah, pakai garam melulu. Nasi ada, ikan asinnya habis, garamnya juga ndak ada, pernah cuma makan nasi doang. Inilah penderitaan yang kami alami.

Sehingga tidak heran bahwa pada awalnya kami berada di pulau Buru itu segala apa yang kami dapat dari hutan itu, dari lingkungan itu terpaksa kami makan. Misalnya kami nggali-nggali, di situ ada ular kecil satu kelingking saja itu merupakan satu santapan yang nikmat. Teman-teman itu mengatakan, ‘Hayo, ini kita nikmati bersama-sama. Ini karunia Tuhan.’ Haa... ada rejeki, teman-teman kalau dapat ular kecil itu saja: ‘Protein’ gitu. Ngomong bareng-bareng, ‘Dapat protein,’ senangnya bukan main. Dibakar. Bakar itu ndak punya korek, dari mana dapat korek? Akal kembali jaman sebelum 45, teman-teman pakai bambu. Bambu digosok-gosok saking kerasnya, di situ ada sejenis kapuk dan sebagainya, keluar apinya. Itulah, kita beriken kayu-kayu yang kering, yang tipis-tipis, kita pilah-pilah sampai tipis-tipis,

akhirnya bisa untuk menciptakan api dan kita gunakan untuk membakar apa saja. Dan kita nanam. Tidak hanya itu saja penderitaan yang kami alami di sana. Di Pulau Buru juga deritanya lebih bahaya, lebih gawat daripada di Jawa.

Di samping pernah juga makan cuma nasi doang, itu juga pernah ada satu kasus, ya. Ada satu kasus di unit lain, terjadi suatu kesalahpahaman atau bagaimana sehingga akhirnya teman-teman di unit itu dikatakan melakukan suatu pemberontakan, kemudian terjadi penyiksaan. Ha, penyiksaan dan lain sebagainya. Ada yang terpaksa saking ndak kuatnya melarikan diri. Tapi kita ingat, kayak hutan Pulau Buru adalah hutan yang tidak mau bersahabat, di sana isinya cuma pohon-pohon sagu dan rotan yang tajam-tajam. Nah, ini. Ha karena tidak tahannya, akhirnya orang itu yah ketangkap juga, mau ke mana? Bisa lama bertahan? Nggak mungkin, dan dikirim, setelah disiksa lalu dikirim kembali ke tempat Transito lagi. Tempat neraka bagi orang-orang yang ditahan. Jadi Transito adalah tahanan di dalam tahanan.

Kemudian agak lumayan itu setelah derita kita alami beberapa tahun, kita sudah akhirnya berkesimpulan, ‘Kalau pemerintah Indonesia macam gini, mungkinkan kita bisa kembali ke tanah Jawa?’ Pada waktu itu berkesimpulan, ‘Sulit untuk bisa kembali ke Pulau Jawa.’ Akhirnya kami semua berkesimpulan, ‘Daripada mati kelaparan di sini, lebih baik meninggalkan makanan yang luar biasa banyaknya di sini, daripada mati

kelaparan.’ Justeru itu kami bertani dengan bersemangat yang tinggi. Kerukun dan bahu-membahu, gotong-royong dengan bersama-sama teman. Ikan kita bisa swadaya dengan.. di sana itu tiap-tiap air ada mujair kita buat lubang, empang, kita tanam ikan itu. Akhirnya, ikan itu kita gunakan untuk makanan. Dapat bantuan sapi dari pemerintah. Sapi ini kita gunakan, kita pelihara.

Setelah kita bisa memproduksi, bertani dengan baik, kemudian makan bisa cukupi, sapi merupakan bantuan dari pemerintah bisa kita ternak, dengan kita bisa memperbanyak, akhirnya yang tadinya kita membuat sawah cukup dengan cangkul, kita cangkuli sepenuhnya, sekarang bisa kita bajak pakai sapi. Transportasi di unit, ada dokar. Atau apa ya? Ada dokar, pakai kuda. Nah, itu juga ada, tapi cuma satu. Itu fasilitas untuk komandan atau tentara. Nggak ada fasilitas, kecuali kadang-kadang akhir-akhir itu bagi koordinatornya mungkin mendapat tugas ke Mako atau apa, kadang-kadang itu bisa pinjam kalau nggak ada kepentingan untuk komendan, bisa dipakai. Tapi yang paling banyak di situ kami bisa beli sepeda. Sepeda, sepeda apa adanya itu lho. Sepeda kita ramai-ramai, dari yang jelek itu lho, meskipun jelek-jelek kita gunakan untuk hubungan ke tempat komando.

Jadi begitulah penderitaan. Kemudian tahun menjelang tahun 77, kami mendapatkan informasi bahwa akan ada pembebasan. Dan pembebasan pertama suatu

kenyataan memang tahun 77. Itu adalah orang-orang yang menderita sakit parah. Orang yang menderita sakit paru-paru, penyakit TBC, kulit. Pokoknya penyakit-penyakit yang parah. Mungkin pengobatan di sana sudah tidak akan bisa melaksanakan dengan baik, justerau itu mendapatkan prioritas untuk kembali dulu. Kemudian tahun 78 juga ada dan bertahap. Akhirnya kami mendapat kesempatan untuk bulan Desember tanggal 18. Jadi 18 Desember 1978 itu kita bebas. Ha setelah bebas, kami pulang. Di perjalanan kami berpikir. Ke mana kami harus menempatkan diri? Ke mana kami harus menginap? Rumah sudah tidak punya, orang tua sudah ndak punya. Ke mana?

Tapi setelah pulang di Rembang tahu-tahu ada memang paman saya ada yang menjemput. Paman dan bulik (bibi) saya. Itu ada yang menjemput saya, dan masing-masing punya baik hati untuk nawari silahkan untuk tidur di tempat dia. Sehingga saya terpaksa memilih satu tempat di paman saya, yang tidak jauh dari rumah saya. Dari situlah kami melihat, eeh apa itu, keadaan-keadaan yang sangat menyolok sekali. Di satu pihak kami menderita sebagai orang yang sudah tahu dunia, dunia luar, lepas dari penjara, tapi situasi tetap masih mencekam kepada kami. Intimidasi selalu ada. Intimidasi dari aparat pemerintah selalu ada.

T: Misalnya, Pak?

J: Misalnya kami tidak bisa melakukan pekerjaan sebelum dilakukan santiaji, santiaji dari kabupaten. Setelah kami

tunggu, kami diam saja, sambil ya ada petugas yang tanya dan lain sebagainya. Namun demikian kami sudah berbekal dari komandan Inrehab Pulau Buru, bahwa setelah dibebas dari sana kita harus berbangga hati, dan tidak perlu minder dan takut. Tanyakan, katakan saja kita adalah ‘alumni Pulau Buru’ gitu [terawa]. Jadi dengan gitu kebanggaan tetap ada, yaitu kita sudah terbebas dengan derita. Namun saya kira, saya pikir, penderitaan itu sudah cukup kami alami di penjara sampai di pembuangan di Pulau Buru. Tahu-tahu tidak cukup itu saja. Derita masih harus kami lakukan. Kami tidak bisa secara bebas untuk bekerja, artinya kalau saya terus leeeng... misalnya begitu bablas (lari) ke Jakarta kek, atau ke Surabaya, atau ke pulau-pulau lain, tidak bisa. Kami harus lapor lalu melalui litsus. Jadi melalui laporan-laporan sebagai... setiap mau pergi harus laporan. Model apa ini? Akhirnya saya memaksakan diri demi saya harus bisa mencari nafkah untuk menghidupi anak saya, pada waktu itu anak saya sudah dua. Ha, saya harus bisa menghidupi diri saya dan anak saya.

Akhirnya setelah santiaji dilaksanakan, jadi kami menunggu sekitar 49 hari kalau ndak salah, di rumah, kami setelah itu terus terang saja kami tinggalkan kota Lasem dan neraka ini, kami ke Surabaya. Dari Surabaya kami langsung mendapatkan tugas, di... peluanglah, peluang suatu proyek dan proyek air minum. Proyek ini sebenarnya karena tidak, saya tidak mempunyai latar

belakang teknik di air minum. Namun, karena kemauan saya keras, dan saya harus bisa akhirnya itu bisa kami lakukan. Kami lakukan. Setelah kami laksanakan, pertama dapat tugas di Madura. Di situ proyek air minum ada, di Madura. Saya ikut satu proyek dan diangkat jadi pelaksana. Mungkin karena teman yang membawa saya itu sudah jadi pelaksana, dianggep saya itu orang pinter atau gimana. Pembantu pelaksanalah pertama. Namun karena saya juga bisa melaksanakan tugas, akhirnya saya menyesuaikan diri jadi pelaksana administrasi keuangan dan teknik. Dari bertahun-tahun, tahun, setelah saya bekerja beberapa tahun, ya lima tahun kalau nggak salah, proyek saya mengalami kebangkrutan, akhirnya kami mengalami PHK. Setelah dari ini Karya Agung atau proyek perusahaannya yang saya geluti itu, akhirnya saya harus berhenti karena perusahaan macet, berhenti dan kini saya harus cari peluang dari proyek satu ke proyek lain. Oleh karena apa? saya terpaksa harus meneruskan di proyek-proyek ini, sebab pengalaman yang kami dapat pengalaman dari teknik ini adalah masalah proyek.

Akhirnya jatuh bangun-jatuh bangun lihat proyek, kami tahun demi tahun, 70, eh, tahun 95 kalau nggak salah, dapat tugas di Cikarang. Cikarang bulan enam, terus kemudian kembali lagi ke Surabaya. Surabaya dapat lagi di daerah mana saja itu, di Bekasi juga pernah, kembali lagi. Habis kembali lagi, terakhir yaitu, di Pancoran. Proyek BI. Proyek BI di Pancoran itu boleh saya katakan,

kalau itu diteruskan, saya sebenarnya merasa senang, karena saya mendapatkan fasilitas yang bisa menghidupi keluarga kami untuk satu bulan, dan gajian, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lain.

Namun, kehidupan juga menyusul lagi grafik saya menurun lagi. Maret, satu Maret 1998, ekonomi berantakan lagi, amburadul (berantakan) ekonomi Indonesia. Proyek-proyek, banyak aksi-aksi yang membakar gedung-gedung, terutama terbakarnya gedung di mana? Klender ya? Gedung di Klender, yang seluruh orang-orang terbakar, hangus terbakar itu, akhirnya proyek tidak berani meneruskan, dan sementara perusahaan macet, tidak bisa ada proyek baru, jadi kami ini lepas dari proyek lagi. Pulang kampung. Di sini bingung. Sebagai orang sudah tidak punya apa-apa, hidup saya bergantung dari hasil kerja, dari otak saya.

Itu akhirnya nganggur, dengan sisa yang ada dari hasil kerja saya di Jakarta itu, ibunya terpaksa yang tadinya nggak pernah masuk ke pasar jualan, saya suruh coba-coba jualan di pasar. Tapi dasar pengalaman nggak ada, baru pengalaman ini terjadi, jatuh bangun bergelimpangan itu ada, dan saya sekarang itu sampai saat sekarang ini. Saya kehidupannya sangat sulit sekali, karena apa? Pasar itu sebagai penjualan kecil saja kehidupannya atas dasar hasil dari desa-desa, kalau di desa-desa tidak ada penghasilan, jelas pasar ya repot, sepi.

T: Dulu, Pak, waktu itu Bapak ditahan, Ibu dari mana hidupnya?

J: Ya pada waktu ditahan Ibu itu nggak punya penghasilan.

T: Apa jual rumah, apa jual…?

J: Ya apa yang punya. Apakah juga sepeda dijual. Ada sepeda, sepeda dijual. Ada kursi, meja kursi dijual, lemari dijual, untuk ngirim. Kemudian habis, isteri saya ikut orangtuanya. Saya ya biarkan ndak bisa ngirim, gimana. Jadi isteri saya ikut orangtuanya, saya nggak bisa ngirim, tidak bisa dikirimi. Akhirnya hidup saya ya sudah, apa adanya, kalau ada belas kasihan daripada teman-teman yang punya makanan lebih, atau kesadaran teman, ya saya dapat. Tapi memang ya kehidupan di dalam penjara yang senasib itu memang rukun. Jadi andaikan teman-teman itu punya singkong satu aja, ya dibagi-bagilah. Jadi kehidupan terpaksa gitu.

T: Bapak waktu kerja paksa bisa pulang ke rumah?

J: Pada waktu ditahan di daerah?

T: Iya.

J: Pulang ke rumah, ya harus ijin.

T: Tapi bisa?

J: Pada waktu kami dikayakan, itu memang bisa pulang ke rumah harus ada ijin. Dan surat ijin itu harus laporan kepada kepala desa. Bahwa nggak tahu surat ijin itu pakai kebijaksanaan ditugaskan mencari apa, apa… supaya untuk mempermudah saja untuk tidak ada rasa curiga dari masyarakat. Namun demikian, sebenarnya

kami kalau dipulangkan itu juga masyarakat tidak ada yang menaruh curiga kepada saya. Hanya aparat yang mencurigai, ndak tahu. Sebenarnya masyarakat itu sudah lama nggak ada apa-apa. Ya memang ada satu, dua orang-orang yang, ada berapa gelintir orang yang memangnya dulu itu pernah berbuat jahat terhadap orang yang ditahan itu kalau orang yang ditahan mungkin dianggapnya balas dendam. Padahal sampai detik ini kami tidak mempunyai perasaan ingin balas dendam. Bahkan saya mempunyai 'Sudahlah!' Maksud saya, kalau yang sudah, sudah. Kita bangun Indonesia ini menjadi Indonesia yang baru, hilangkan sifat-sifat diskriminasi, kita bisa hidup rukun kembali seperti jaman-jaman keemasan kita, jaman kedamaian kita. Ha, kita supaya bisa hidup dengan damai rukun kembali. Sebab kami tidak mempunyai rasa untuk ingin balas dendam. Kita ingin kehidupan Indonesia ini Indonesia yang damai, syukur bisa menciptakan masyarakat yang madani.

T: Tapi ketika Bapak pulang tetangga-tetangga sini bagaimana, Pak? Waktu Bapak pulang itu?

J: Tetangga-tetangga sini yaitu mayoritas sebenarnya baik. Tapi ada juga orang yang berdekat dengan aparat, itu memang mempunyai perasaan yang bagaimana gitu terhadap saya. Di samping itu juga orang yang tadinya juga anti terhadap PKI, itu juga belum rela kalau orang-orang itu bisa bebas. Namun, teman-teman saya pada waktu di guru dulu, setelah saya pulang, banyak yang

mencari saya. Malam itu juga begitu saya datang, dengan saya datang, malam itu juga banyak yang mencari saya di mana, dan mengucapkan selamat atas kepulangan saya dari Pulau Buru. Begitulah. Ada yang belum ketemu, dicari, katanya sampai empat hari. Dan di situ memberikan motivasi baik kepada yang baik kepada saya, dan saya terima sumbangan pemikiran-pemikiran yang baik itu.

T: Sekarang bagaimana Pak iklim di sini mendengar eks tapol?

J: Iklim di sini sekarang ini sangat... saya sangat rasakan kondusif. Jadi iklimnya sangat kondusif di sini. Sebab, mungkin, dari hari ke hari setelah jatuhnya Pak Harto itu, boleh dikatakan masyarakat sudah sadar atau memang mengikuti arus perkembangan jaman ini atau sekarang setelah reformasinya atau bagaimana, kita ndak tahu. Tapi memang di sini sudah baik. Kami juga bersama-sama dengan teman-teman kampung atau masyarakat kampung melaksanakan obyek apa yang dilakukan.

T: Bapak sekarang berapa anaknya Pak?

J: Ya?

T: Berapa anaknya?

J: Anak saya adalah empat.

T: Semua empat?

J: Ya

T: Sudah besar-besar semua?

J: Empat yang dua itu sudah berkeluarga, yang dua masih sekolah. Dan untuk saat sekarang itu yang untuk sekolahkan anak saya yang satu di SMA yang satu masih SD ini masih sangat sulit sekali. Sebab hasilnya Ibu, hanya satu-satunya penghasilan dari ibunya, sedangkan ibunya hasilnya sekarang sudah sepi, sehingga derita itu ya masih saja belum bisa melepaskan diri saya dari kungkungan penderitaan ini. Saya cuma memaksakan anak saya jangan sampai putus sekolah, apa pun yang terjadi, apa pun yang ada pada saya, saya usahkan anak saya untuk tidak putus sekolah, semoga bisa mencapai sampai selesai SMA. Setelah dari SMA, saya belum punya obsesi ke mana, belum mempunyai prediksi arah ke mana anak ini. Sebab kami tidak mempunyai persediaan biaya. Justeru itu kalau saya ditanya teman-teman yang anu saya tidak bisa menjawab pasti. Memang anak teman-teman saya ada juga yang teman-teman saya yang mempunyai anak yang sudah sarjana penuh, itu banyak sekali. Tapi memang nasib orang tidak semua sama. Mungkin juga dia punyai kemampuan lebih, atau pikirannya dia juga dasar punya modal yang banyak atau bagaimana. Tapi penghidupan saya dari hari ke hari dari dulu setelah bebas itu dari hasil kerja sebagai karyawan, buruh. Sudah nggak ada apa-apa jadi pengangguran.

T: Bapak sekarang nganggur?

J: Sekarang nganggur, sudah berapa... tiga tahun nganggur. Saya tadi kan cuma main-main di pasar, gitu,

lihat ibunya. Tentu sampai saat ini saya masih mencari peluang, mungkin ada ya belas kasihan daripada tenaga lain atau orang teman-teman, atau orang saudara, sahabat, yang bisa ada peluang kami bisa mencari nafkah, akan kami laksanakan meskipun tidak harus ada di daerah tempat tinggal saya. Saya sudah mencoba menghubungi teman-teman yang di Jakarta, di anu lagi, baik di proyek maupun di mana aja. Tapi kenyataannya sampai saat sekarang sama-sama masih menderita.

T: Bapak waktu melaksanakan pernikahan anak Bapak nggak ada masalah Pak, karena Bapak sebagai eks tapol?

J: Pernikahan. Nikah itu kan... saya gini ya, nikah saya itu dua kali. Pernikahan pertama itu masih jaman Bung Karno, tidak ada masalah. Setelah saya di penjara, isteri saya menikah. Ya, menikah. Mungkin ya karena tekanan ekonomi yang jelas. Tekanan ekonomi harus menghidupi anak saya, anak saya. Terpaksa isteri saya menikah. Setelah saya pulang, saya ndak punya apa-apa, akhirnya saya kenal dengan ibunya anak-anak sekarang itu, dan dia bersedia kawin, rumah tangga dengan saya. Pada waktu itu juga ndak ada masalah apa-apa, kami kawin yang terakhir ini, kami rumah tangga secara Kristen. Jadi, nikah Katolik, secara Katolik, jadi lewat catatan sipil. Kalau dulu masih Islam, pada waktu itu.

T: Tapi anak Bapak yang kedua ini, yang terakhir tahu Bapak sebagai eks tapol mungkin?

J: Anak saya yang mana? Untuk yang pertama, kedua, tahu. Tapi untuk yang ketiga ini kami kurang jelas. Lebih-lebih yang terakhir, sebab sampai saat ini kami belum pernah menceritakan hal ini untuk daripada anak saya. Saya anggap belum waktunya, nanti jangan-jangan ini mengganggu sekolahnya. Jadi memang ibunya anak-anak sendiri saya tekankan untuk tidak menceritakan kepada anak-anak. Ya yang gede-gede tahu biarlah, dia kan sudah bisa mencari nafkah sendiri. Yang ini jangan dulu, sebab ini nanti sekolahnya terganggu. Nah itu. Namun saya pikir, yang sudah SMU itu saya pikir tahu. Sudah merasakan. Buktinya dia tahu kalau dari saya dulu guru, gitu. Anak yang kecil, yang kecil ini juga tahu, 'Bapak mbiyen guru, kenapa saiki kok prei ya Pak? Kok gak entuk pensiun?' tanya gitu. (Bapak dahulu guru, kenapa sekarang kok tidak lagi, ya Pak? Tidak dapat pensiun?)

T: Tahunya dari mana Pak?

J: Ya mungkin dari teman-temannya, atau dari orang tua temannya, atau siapa, kan informasi itu dari siapa saja kan bisa. Cuma saya katakan, dia nggak tahu persis kenapa prosesnya saya kok lepas dari guru itu, nggak tahu persis.

T: Tapi waktu menikah dengan Ibu yang ini Pak, Bapak punya masalah? Bermasalah nggak dengan Bapak sebagai eks tapol, misalnya dilarang karena Bapak PKI?

J: Nggak ada. Jadi saya nikah kedua itu tidak ada hubungannya dengan latar belakang saya berasal dari

mana, nggak ada.

T: Tapi pihak isteri tahu waktu itu?

J: Tahu. Bahkan dia menceritakan sebab dia sebelum dapat saya itu, kan dia berada di kampung saya diberi tahu oleh teman-temannya. ‘Nanti iki, anu, Pak Kasmin mau pulang, kamu kan janda. Udah nanti saja kamu jangan cepat-cepat kawin. Orangnya baik, ini tanggung jawab.’ Semacam lapor orang yang senang itu yang gunggung (menyanjung) saya, memuja saya, menilai saya baik, ya orang ya senang ya. Tapi yang nggak senang ya njelek-jelekin [tertawa]. Ya kami kira begitu cerita singkat saya. Ha selanjutnya mungkin ada hal-hal yang dianggap perlu ya ditanyakan kepada saya kalau masih ada waktu saya.

T: Tapi hubungan Bapak dengan isteri yang lalu tetap baik?

J: Sampai sekarang tetap baik. Lebih-lebih ibunya sekarang itu jiwanya saya anggap jiwanya baik. Pernah suatu ketika, kenapa saya menilai baik? Begini, ketika suatu ketika saya berada di Surabaya. Bekas isteri saya itu sakit tipes. Datang ke sini minta diantar ke rumah sakit, ngamar (opname). Akhirnya diantar ke sana dan tidak ada duit, untuk membiayai itu. Saya punya tape, tape itu dijual oleh isteri saya sekarang itu, dijual untuk membiayai itu. Jadi inilah suatu penilaian saya bahwa ibunya anak-anak sekarang itu atau isteri saya yang sekarang itu baik hati. Gitulah, jadi tidak ada kendala, malah sering karena cucu saya di sini, dulu itu keluarga

dari dia, anak dari hasil pernikahan dengan dia, itu sudah punya anak di sini, ha sering juga nengok cucunya di sini. Karena ini cucunya sini kan sekaligus juga nengok kakeknya [terawa]. Tapi sekali lagi ini adalah merupakan suatu persaudaraan dan saya bina, dan sampai detik ini hubungan saya dengan bekas mertua saya dari isteri yang pertama itu baik-baik saja. Bahkan anak-anaknya, artinya adik-adik dari isteri saya itu menganggap saya itu sebagai saudara tuanya. Jadi ada apa-apa terus dia datang ke sini, punya masalah apa, kerja apa, makan sedikit enak gitu ya dikirimkan ke saya, datang ke sini, disampaikan.

T: OK, Pak. Saya rasa cukup.

J: Iya.

T: Terima kasih banyak, Pak.

---

[1] Usdek: Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia. Tavip: Tahun *Vivere Pericoloso*.

DAFTAR TULISAN KORBAN 65: MEMOAR, OTOBIOGRAFI, BIOGRAFI

Budiardjo, Carmel, *Surviving Indonesia's Gulag* (London: Cassell, 1995). Terjemahan: *Bertahan Hidup di Gulag Indonesia* (Kuala Lumpur: Wira Karya, 1997).

Dani, Omar, *Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku: Pledoi Omar Dani* (Jakarta: ISAI, 2001).

Hanafi, A.M., *A.M. Hanafi Menggugat* (Lile, France: Edition Montblanc, 1998).

Havelaar, Ruth (Jitske Mulder), *Selamat Tinggal Indonesia* (Jakarta: Lentera, 1995; Pustaka Utan Kayu, 2003). Diterjemahkan dari *Quartering: A Story of a Marriage in Indonesia During the Eighties* (Monash Papers on Southeast Asia, no. 24, 1991).

Krisnadi, I.G., *Tahanan Politik Pulau Buru, 1969-1979* (Jakarta: LP3ES, 2001).

Latief, Kol. Abdul, *Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G-30-S* (Jakarta: ISAI, 2000).

Marni, Ibu, "I am a Leaf in a Storm," diedit dan diterjemahkan oleh Anton Lucas, *Indonesia* 47 (April 1989).

Moestahal, H. Achmadi, *Dari Gontor ke Pulau Buru* (Yogyakarta: Syarikat, 2002).

Oei Tjoe Tat, *Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno* (Jakarta: Hasta Mitra, 1995).

Nusa, Pandu, "The Path of Suffering: The Report of a Political Prisoner on his Journey through Various Prison Camps in Indonesia," *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 19: 1 (1987).

Prayitno, Suyatno; Hasibuan, Astaman; Buntoro, *Kesaksian Tapol Orde Baru: Guru, Seniman, Prajurit* (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2003).

Raid, Hasan, *Pergulatan Muslim Komunis* (Yogyakarta: LKPSM/Syarikat, 2001).

Reksosamodra, Pranoto, *Memoar Major Jenderal Raden Pranoto Reksosamodra* (Yogyakarta: Syarikat, 2002).

Saroso, Kresno, *Dari Salemba ke Pulau Buru: Memoar Seorang Tapol Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002).

Sasongko, H.D. Haryo, *Anak Bangsa Terpidana: Catatan Harian* (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2003).

Setiawan, Hersri, "Dua Wajah dalam Satu Haribaan: Warna-warna Pendewasaan di Pulau Buru," *Prisma* (Oktober 1979).

———, "Keeping Your Head: Memoir of Detention in Prison," *Inside Indonesia* (October 1984).

———, "Art and Entertainment in the New Order's Jails," penerjemah Keith Foulcher, *Indonesia* 59 (April 1985).

———, *Dunia yang Belum Sudah* (Kockengen, 1993).

———, "Behind Bars," *Manoa* 12: 1 (2000).

———, *Kamus Gestok* (Yogyakarta: Galang Press, 2003).

———, *Aku Eks Tapol* (Yogyakarta: Galang Press, 2003).

Siauw Tiong Djin, *Siauw Giok Tjhan* (Jakarta: Hasta Mitra, 1999).

Soebandrio, *Kesaksianku tentang G-30-S* (2001).

Soeharso, *Di Bibir Pusaran Prahara* (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2003).

Sudjinah, *Terempas Gelombang Pasang: Riwayat Wartawati dalam Penjara Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2003).

Sulami, *Perempuan-Kebenaran dan Penjara* (Jakarta: Cipta Lestari, 1999).

———, *Merentang Purnama* (Jakarta: Cipta Lestari, 2001).

Toer, Pramoedya Ananta, "Maaf, Atas Nama Pengalaman," *Kabar Seberang* 23 (1992); http://www.radix.net/~bardsley/prampage.html

Toer, Pramoedya Ananta, "Surat Terbuka kepada Keith Foulcher," *Demi Demokrasi* 2 (1985); http://www.radix.net/~bardsley/prampage.html

Toer, Pramoedya Ananta, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*, dua jilid (Jakarta: Lentera, 1995-97); Terjemahan: *The Mute's Soliloquy* (New York: Hyperion, 1998).

Toer, Pramoedya Ananta, *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* (Jakarta: KPG, 2001).

TENTANG PENULIS

André Liem lahir di Jakarta 1979. Lulus D3 Manajemen Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Gunadarma. Tertarik mempelajari sejarah Indonesia, khususnya tentang peristiwa 1965. Minat lainnya adalah mempelajari budaya pengobatan tradisional dan mendukung gerakan kesehatan mandiri alami. Aktif di Jaringan Kerja Budaya dan Komunitas Sekitarkita. Saat ini masih berkulia di Jurusan Filsafat, STF Driyarkara.

Aquino W. Hayunta menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Atma Jaya, Jakarta, pada 1999. Pernah aktif di Tim Relawan untuk Kemanusiaan sejak 1998 sampai 2000. Setelah itu, menjadi peneliti di Elsam dan sekarang bekerja di sebuah lembaga pemerhati pendidikan, The Centre for the Betterment of Education, Jakarta. Yang bersangkutan juga aktif menjadi redaksi di www.sekitarkita.com, sebuah situs informasi HAM dan budaya.

John Roosa Asisten Profesor di bidang Sejarah Asia Tenggara dan Hubungan Internasional di University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Ia menerima gelar

doktor untuk bidang Sejarah Asia Selatan dari University of Wisconsin-Madison (1998). Pada 2001-2002, ia menerima beasiswa penelitian pasca-doktor dari Institute of International Studies, University of California-Berkeley.

Josepha Sukartiningsih lulus D3 Jurusan Akuntansi Universitas Nasional pada 1999. Saat ini sedang mengikuti Program Extension Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dan bekerja sebagai karyawati sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Dia juga aktif di Tim Relawan untuk Kemanusiaan.

Yayan Wiludiharto pernah kuliah di Fakultas Biologi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Sekarang aktif di Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Jaringan Kerja Budaya. Dia pernah ke Timor Timur dan Ambon untuk menjalankan misi kemanusiaan. Pada 2003, dia menyutadarai film dokumenter Bunga dan Tembok.

Razif lulus dari Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia pada 1989. Semenjak lulus, ia tertarik dengan penelitian sejarah sosial. Ia pernah menulis artikel di jurnal Prisma tentang buruh perkebunan di Sumatra Timur dan jurnalis zaman 1920an Mas Marco Kartodikromo. Ia juga menulis buku Sejarah Pemikiran Serikat Buruh di Indonesia. Sejak 1999, menjadi koordinator redaktur Media Kerja Budaya.

Sekarang, ia sedang melakukan penelitian sejarah tentang buruh di Tanjung Priok dan Kampoeng Manggarai untuk Institut Sejarah Sosial Indonesia.

Rinto Tri Hasworo lulus S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pada 1996. Pernah aktif di Divisi Pendampingan Korban, Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Sekarang aktif di Jaringan Kerja Budaya. Sedang berkuliah di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Program Extension.

CC BY-SA 4.0

Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Halaman hak cipta biasanya memberi tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, pernyataan *CC BY-SA 4.0* ini hadir untuk membuka kemungkinan.

E-book ini merupakan hasil digitalisasi dan penyuntingan, tanpa klaim kepemilikan atas materi aslinya.

Seluruh kontribusi dalam edisi ini—termasuk digitalisasi, penyuntingan, atau penataan tipografi—dilepaskan di bawah lisensi *Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional (CC BY-SA 4.0)*.

Pemegang hak cipta atas materi dalam *e-book* ini yang keberatan atas penggunaannya dipersilakan menghubungi *info@masa-silam.com* untuk peninjauan lebih lanjut.

Upaya ini dilakukan semata-mata demi memperkaya khazanah literasi, mendukung pelestarian, dan membuka akses seluas-luasnya agar isi dalam *e-book* ini dapat dibaca, dinikmati, sekaligus dipelajari.

DAFTAR ISI

JUDUL

KOLOFON

UCAPAN TERIMA KASIH

PERIHAL KUTIPAN

DAFTAR SINGKATAN

PENGANTAR SEJARAH LISAN DAN INGATAN SOSIAL

- Ingatan Sosial tentang Kekerasan 1965-66
- Metodologi
- Penulisan

I. ESAI

- PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN DI JAWA TENGAH SETELAH G-30-S — RINTO TRI HASWORO
  - RPKAD sebagai Pemicu dan Provokator
  - Perlawanan terhadap RPKAD
  - Mobilisasi Massa
  - Penangkapan Sewenang-wenang
  - Penyanderaan

Pemerkosaan

Tidak Aman setelah ‘Diamankan’

Pola Penangkapan

Penutup

Daftar Wawancara

PENANTIAN PANJANG DI JALAN PENUH BATAS KISAH KELUARGA KORBAN — YAYAN WILUDIHARTO

‘Waktu Bapak Diambil Tentara’

Jual Harta, Jual Tenaga untuk Hidup

Mencari Orang Hilang, Menunggu Orang Pulang

Di Bawah Bayang-bayang Masalah Orang Tua

Akhir Cerita

Daftar Wawancara

KETIKA PEREMPUAN MENJADI TAPOL — JOSEPHA SUKARTININGSIH

Gerakan Perempuan sebelum 1965

Keibuan yang Direnggut

‘Nggak tahu Bu, nggak tahu.’

Bertahan Hidup di dalam Penjara

Penjara Tak Berjeruji

Mengungkap ‘Tragedi yang Senyap’

Daftar Wawancara

‘RIUNGAN’ DAN TEGAR HATI: BEKAL BERTAHAR DI TENGAH KEGILAAN — AQUINO W. HAYUNTA DAN JOHN ROOSA

‘Itu yang namanya mental memainkan peranan besar’

‘Pertentangan yang hebat di dalam jiwa saya’

‘Waktu 65 itu ndak punya belas rasa kasih terhadap sesama’

Daftar Wawancara

ROMUSHA DAN PEMBANGUNAN: SUMBANGAN TAHANAN POLITIK UNTUK REZIM SOEHARTO — RAZIF

Kerja Paksa di Jawa dan Sumatera

Kerja Paksa di Pulau Buru

Kerja Paksa di Sulawesi Tengah

Penutup

Daftar Wawancara

PERJUANGAN BERSENJATA PKI DI BLITAR SELATAN DAN OPERASI TRISULA — ANDRÉ LIEM

Blitar Selatan

Operasi Pembersihan 1965
Awal dari Pelarian
Membangun Basis
Gerakan ‘Perlawanan’ Blitar Selatan
Operasi Trisula
Pagar Betis
Jasa atau Kerja Paksa?
Pembantai
Jejak Blitar Selatan dalam Sejarah
Daftar Wawancara
II. SKETSA
SKETSA GUMELAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
III. TRANSKRIPSI WAWANCARA
PENGANTAR
IBU SUGIANTI
PAK KASMIN
DAFTAR TULISAN KORBAN 65: MEMOAR, OTOBIOGRAFI, BIOGRAFI
TENTANG PENULIS
CC BY-SA 4.0